



**RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
- R K P D -
Provinsi Riau Tahun 2016**

BUKU - 1 (SATU)

**Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2015**



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 63 Tahun 2015

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI RIAU TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian Sementara Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019 dinyatakan Wakil Gubernur Riau untuk Melaksanakan Tugas dan Kewenangan Gubernur Riau Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c menetapkan peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 217);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI RIAU TAHUN 2016.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun 2016, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun 2016 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun 2016.

Pasal 2

- (1) Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
 - c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
 - d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
 - e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
 - f. BAB VI PENUTUP
- (2) RKPD dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019

Pasal 4


RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 merupakan Pedoman dalam Penyusunan KUA dan PPAS Provinsi Riau Tahun 2016 dengan mempertimbangkan dinamika pelaksanaan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 MEI 2015

Pt. GUBERNUR RIAU

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 MEI 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ZAINI ISMAIL
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 63

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	x
 BUKU – 1 (Satu)	
Bab I Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I-7
1.5. Maksud dan Tujuan	I-8
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah	II-16
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana	II-28
2.1.1.4. Kondisi Demografi	II-30
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-34
2.1.2.2. Fokus kesejahteraan Sosial	II-52
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-67
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	II-70
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-70
2.1.3.2. Fokus Layanan urusan Pilihan	II-159

2.1.4.	Aspek Daya Saing	II-191
2.1.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-191
2.1.4.2.	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-194
2.1.4.3.	Fokus Iklim Berinvestasi	II-208
2.1.4.4.	Fokus Sumberdaya Manusia	II-210
2.1.4.5.	Resume Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	II-212
2.1.4.6.	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-216
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD	II-222
2.2.1.	Urusan Wajib	II-222
2.2.2.	Urusan Pilihan	II-223
2.3.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-449
2.3.1.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-449
2.3.2.	Aspek Pelayanan Umum	II-450
2.3.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-457
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah.	
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1.	Kondisi Ekonomi Tahun 2013-2014 dan Perkiraan Tahun 2015-2016	III-2
3.1.2.	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017	III-13
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-14
3.2.1.	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .	III-15
3.2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-26
3.2.3.	Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah	III-34
Bab IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-17
4.2.	Prioritas dan Pembangunan	IV-22

BUKU – 2 (DUA)

Bab V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	V-1
Bab VI	Penutup	VI-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
BUKU – 1 (SATU)	
Tabel 2.1. Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-3
Tabel 2.2. Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Riau	II-4
Tabel 2.3. Luas dan Jenis Satuan Tanah Di Provinsi Riau	II-7
Tabel 2.4. Sungai-Sungai yang Bermuara di Provinsi Riau	II-8
Tabel 2.5. Luas Daerah Pengairan (<i>Catchment Area</i>) Beberapa Sungai di Provinsi Riau	II-8
Tabel 2.6. Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Per Bulan Tahun 2010-2014 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau	II-10
Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Hari Hujan (HH) dan Jumlah Curah Hujan (MM) Tahun 2010–2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-11
Tabel 2.8. Keadaan suhu (°C) Tahun 2010–2014 Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau	II-12
Tabel 2.9. Kelembaban Udara (%) Tahun 2010–2014 Kota Pekanbaru Provinsi Riau	II-12
Tabel 2.10. Jumlah Titik Api Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-13
Tabel 2.11. Jumlah Titik Api Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Riau	II-14
Tabel 2.12. Potensi Pertambangan Menurut Jenis di Provinsi Riau	II-22
Tabel 2.13. Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-29
Tabel 2.14. Perkembangan Tenaga Kerja Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-65
Tabel 2.15. Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-68
Tabel 2.16. Tingkat Erosi pada Setiap DAS Tahun 2012Provinsi Riau	II-107

Tabel 2.17.	Tingkat Kekritisn Lahan pada Setiap DAS Tahun 2012 Provinsi Riau	II-107
Tabel 2.18.	Sifat Kimia Air Sungai DAS Indragiri Pada Bulan Kering dan Bulan Basah Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-108
Tabel 2.19.	Sifat Kimia Air Sungai DAS Kampar Pada Bulan Kering dan Bulan Basah Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-109
Tabel 2.20.	Sifat Kimia Air Sungai DAS Rokan Pada Bulan Kering dan Bulan Basah Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-110
Tabel 2.21.	Sifat Kimia Air Sungai DAS Siak Pada Bulan Kering dan Bulan Basah Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-111
Tabel 2.22.	Ketersediaan Dokumen RTRW Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-119
Tabel 2.23.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau ..	II-120
Tabel 2.24.	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-121
Tabel 2.25.	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda/Ormas Tahun 2012 Provinsi Riau	II-122
Tabel 2.26.	Rekapitulasi Implementasi Budaya Melayu dalam Kurikulum Pendidikan Madrasah (MI, MTS, MA) Provinsi Riau	II-125
Tabel 2.27.	Kesetaraan Gender di Setiap Jenjang Pendidikan Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-140
Tabel 2.28.	Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2012 Provinsi Riau	II-143
Tabel 2.29.	Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang Tahun 2012 Menurut Pelabuhan Udara Provinsi Riau	II-144
Tabel 2.30.	Jumlah Pelabuhan Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-144
Tabel 2.31.	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler (HP), Komputer Desktop, Komputer Laptop Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-145
Tabel 2.32.	Persentase Penduduk Usia 5 tahun Ke atas yang Pernah Mengakses Internet Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-146
Tabel 2.33.	Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar Pada Badan Kesbang dan Politik Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-147

Tabel 2.34.	Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Tahun 2013 Provinsi Riau	II-147
Tabel 2.35.	Penilaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-153
Tabel 2.36.	Jumlah Desa dan Kelurahan Tahun 2009 – 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-155
Tabel 2.37.	Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-156
Tabel 2.38.	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-156
Tabel 2.39.	Jumlah Panti Sosial Anak Terlantar Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-157
Tabel 2.40.	Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2009 – 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-158
Tabel 2.41.	Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman H.S Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-159
Tabel 2.42.	Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2013 Provinsi Riau	II-160
Tabel 2.43.	Populasi Ternak dan Produksi Daging Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-174
Tabel 2.44.	Target dan Realisasi Penempatan Transmigran Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-190
Tabel 2.45.	Realisasi Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau	II-190
Tabel 2.46.	Pola Pengembangan Kawasan Andalan Menurut RTRW di Provinsi	II-199
Tabel 2.47.	Status dan Wewenang Penyelenggara Jalan	II-200
Tabel 2.48.	Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan	II-200
Tabel 2.49.	Panjang Jembatan, Jenis Kontruksi Jembatan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	II-202
Tabel 2.50.	Angka Kriminalitas Tahun 2008 – 2012 di Provinsi Riau	II-209
Tabel 2.51.	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008 – 2012 Provinsi Riau	II-211
Tabel 2.52.	Rasio Ketergantungan Tahun 2008 - 2012 Provinsi Riau	II-211
Tabel 2.53.	Resume Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Riau	II-212

Tabel 2.54.	Realisasi pencapaian target indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau....	II-216
Tabel 2.55.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013 – 2014 dan Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2015 Provinsi Riau	II-225
Tabel 3.1.	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Riau	III-2
Tabel 3.2.	Realiasi Pendapatan 2012-2014, Perkiraan Tahun Berjalan 2015 dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Riau	III-16
Tabel 3.3.	Proporsi Sumber Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2012 – 2015	III-17
Tabel 3.4.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-18
Tabel 3.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-19
Tabel 3.6.	Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-20
Tabel 3.7.	Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-20
Tabel 3.8.	Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-21
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-22
Tabel 3.10.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-22
Tabel 3.11.	Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-23
Tabel 3.12.	Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-23
Tabel 3.13.	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-23
Tabel 3.14.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014	III-24
Tabel 3.15.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2012 – 2017	III-25
Tabel 3.16.	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2012 – 2015	III-30
Tabel 3.17.	Realisasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Riau Tahun 2012 – 2017	III-31

Tabel 3.18.	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Riau 2012 – 2017	III-35
Tabel 3.19.	Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Riau Periode 2012-2017	III-36
Tabel 4.1.	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	IV-20
Tabel 4.2.	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-22
Tabel 4.3.	Penjelasan Program Pembangunan Daerah	IV-25

BUKU – 2 (DUA)

Tabel 5.1.	Rekapitulasi Program dan Kegiatan SKPD Provinsi Riau Tahun 2016.....	V-3
Tabel 5.2.	Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau.....	V-12

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
BUKU – 1 (SATU)	
Gambar 2.1. Peta Provinsi Riau	II-2
Gambar 2.2. Peta Daerah Rawan Banjir di Provinsi Riau	II-4
Gambar 2.3. Peta Geologi Provinsi Riau	II-5
Gambar 2.4. Kelas Jenis Tanah di Provinsi Riau	II-6
Gambar 2.5. Peta Curah hujan di Provinsi Riau	II-9
Gambar 2.6. Luas Hutan Menurut Fungsi di Provinsi Riau	II-16
Gambar 2.7. Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Provinsi Riau	II-17
Gambar 2.8. Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-18
Gambar 2.9. Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Provinsi Riau	II-19
Gambar 2.10. Produksi Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-21
Gambar 2.11. Produksi Pertambangan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-23
Gambar 2.12. Jumlah Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-31
Gambar 2.13. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014 di Provinsi Riau	II-32
Gambar 2.14. Penduduk Menurut Kabupaten Kota Tahun 2010-2014 di Provinsi Riau	II-33
Gambar 2.15. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2010 – 2014 Atas dasar Konstan Tanpa Migas (TM) dan Dengan Migas (DM) Provinsi Riau	II-35
Gambar 2.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014 Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas dan Dengan Migas	II-36
Gambar 2.17. Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas dan Dengan Migas Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	II-37
Gambar 2.18. Laju Inflasi Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-38
Gambar 2.19. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas dan Dengan Migas Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-40

Gambar 2.20.	Indeks Gini Pemerataan Pendapatan Tahun 2010 – 20134 Provinsi Riau	II-41
Gambar 2.21.	Indeks Williamson Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-43
Gambar 2.22.	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-45
Gambar 2.23.	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-46
Gambar 2.24.	Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau ..	II-47
Gambar 2.25.	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 20108 – 2014 di Provinsi Riau	II-48
Gambar 2.26.	Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 – 2013 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Riau	II-49
Gambar 2.27.	Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Tahun 2010 – 2013 Provinsi Riau	II-50
Gambar 2.28.	Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-51
Gambar 2.29.	Indek Pembangunan Manusia Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-53
Gambar 2.30	Usia Harapan Hidup Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-54
Gambar 2.31	Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-55
Gambar 2.32	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-56
Gambar 2.33	Pengeluaran Per Kapita Rill Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-57
Gambar 2.34.	Angka Partisipasi Kasar Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau .	II-58
Gambar 2.35.	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-59
Gambar 2.36.	Status Gizi Balita Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-60
Gambar 2.37.	Status Gizi Balita Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-61
Gambar 2.38.	AKB, AKABA dan AKI Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-63
Gambar 2.39.	Angka Kesakitan DBD dan Malaria Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-64
Gambar 2.40.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-66
Gambar 2.41.	Persentase Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-67

Gambar 2.42.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-72
Gambar 2.43.	Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Ketersediaan Sekolah Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-73
Gambar 2.44.	Rasio Jumlah Penduduk Usia Sekolah Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau	II-74
Gambar 2.45.	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau ...	II-76
Gambar 2.46.	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau di Provinsi Riau	II-77
Gambar 2.47.	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau di Provinsi Riau	II-79
Gambar 2.48.	Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-80
Gambar 2.49.	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau ...	II-82
Gambar 2.50.	Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-83
Gambar 2.51.	Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-85
Gambar 2.52.	Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-86
Gambar 2.53.	Rasio Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-87
Gambar 2.54.	Rasio Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	II-88
Gambar 2.55.	Rasio Puskesmas Keliling Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau.....	II-89
Gambar 2.56.	Rasio Puskesmas Keliling Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.....	II-90
Gambar 2.57.	Rasio Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-91
Gambar 2.58.	Rasio Puskesmas Per Kecamatan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-92

Gambar 2.59.	Rasio Puskesmas Per Kecamatan Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-93
Gambar 2.60.	Rasio Pustu/Pusling Per Desa/kelurahan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-94
Gambar 2.61.	Rasio Pustu/Pusling Per Desa/kelurahan Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Riau	II-95
Gambar 2.62.	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-96
Gambar 2.63.	Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-97
Gambar 2.64.	Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-98
Gambar 2.65.	Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-99
Gambar 2.66.	Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-100
Gambar 2.67.	Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-101
Gambar 2.68.	Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-102
Gambar 2.69.	Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-103
Gambar 2.70.	Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-104
Gambar 2.71.	Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-105
Gambar 2.72.	Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau	II-105
Gambar 2.73.	Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	II-106
Gambar 2.74.	Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014	II-113
Gambar 2.75.	Panjang Jalan Provinsi Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau ..	II-114
Gambar 2.76.	Panjang Jalan Provinsi Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-115
Gambar 2.77.	Panjang Jalan Provinsi Berkondisi Baik Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-116
Gambar 2.78.	Panjang irigasi/Rawa Tahun 2013 – 2014 Provinsi Riau	II-117
Gambar 2.79.	Frekuensi Banjir Tahun 2013 – 2014 Provinsi Riau	II-118

Gambar 2.80.	Panjang Jembatan Berkondisi Baik Tahun 2013 Provinsi Riau	II-119
Gambar 2.81.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-123
Gambar 2.82.	Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-124
Gambar 2.83.	Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau ..	II-126
Gambar 2.84.	Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-127
Gambar 2.85.	Persentase Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-128
Gambar 2.86.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-129
Gambar 2.87.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-130
Gambar 2.88.	Rasio Produksi Beras dan Jagung Terhadap Konsumsi Beras dan Jagung Penduduk Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-131
Gambar 2.89.	Rasio Produksi Beras Terhadap Konsumsi Beras Penduduk Tahun Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-132
Gambar 2.90.	Rasio Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Terhadap Konsumsi Sayuran dan Buah-Buahan Penduduk Riau Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-133
Gambar 2.91.	Rasio Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Terhadap Konsumsi Sayuran dan Buah-Buahan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2013 Provinsi Riau	II-135
Gambar 2.92.	Rasio Produksi Daging Ruminansia Terhadap Konsumsi Daging Ruminansia Penduduk Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-136
Gambar 2.93.	Rasio Produksi Daging Ruminansia Terhadap Konsumsi Daging Ruminansia Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2013 Provinsi Riau	II-137
Gambar 2.94.	Rasio Produksi Ikan Terhadap Konsumsi Ikan Penduduk Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-138
Gambar 2.95.	Rasio Produksi Ikan Terhadap Konsumsi Ikan Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota Provinsi Riau	II-139
Gambar 2.96.	Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-140
Gambar 2.97.	Rasio Akseptor KB Aktif Terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur Tahun 2012 – 2014 Provinsi Riau.....	II-142

Gambar 2.98.	Indeks Efektivitas Pemerintahan Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau.....	II-149
Gambar 2.99.	Indeks Integritas Daerah Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-150
Gambar 2.100.	Nilai Keterbukaan Informasi Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Riau	II-152
Gambar 2.101.	Produksi Perikanan Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-160
Gambar 2.102.	Perkembangan Produksi Beras dan Jagung Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-162
Gambar 2.103.	Produksi Padi dan Jagung Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-163
Gambar 2.104.	Perkembangan Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-164
Gambar 2.105.	Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota Provinsi Riau	II-165
Gambar 2.106.	Perkembangan Produksi Buah-Buahan Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-166
Gambar 2.107.	Produksi Buah-Buahan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota Provinsi Riau	II-167
Gambar 2.108.	Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-168
Gambar 2.109.	Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-169
Gambar 2.110.	Produktivitas Kelapa Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-170
Gambar 2.111.	Produktivitas Kelapa Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota Provinsi Riau	II-171
Gambar 2.112.	Produktivitas Karet Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-172
Gambar 2.113.	Produktivitas Karet Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-173
Gambar 2.114.	Produksi Daging Sapi Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-175
Gambar 2.115.	Produksi Daging Sapi Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-176
Gambar 2.116.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada Harga Konstan Tanpa Migas (ADHK-TM) Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau	II-177
Gambar 2.117.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada Harga Konstan Tanpa Migas (ADHK-TM) Tahun 2013 Menurut Sub-Sektor di Provinsi Riau	II-178
Gambar 2.118.	Luas Hutan Produksi terbatas Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-180

Gambar 2.119. Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-181
Gambar 2.120. Perkembangan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-182
Gambar 2.121. Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-184
Gambar 2.122. Jumlah Objek Wisata Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau	II-185
Gambar 2.123. Perkembangan Jumlah Wisatawan Asing Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-186
Gambar 2.124. Perkembangan Kontribusi Sektor Industri (ADHK DM dan TM) Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-187
Gambar 2.125. Perkembangan Ekspor Netto Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-189
Gambar 2.126. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Total Pengeluaran Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-192
Gambar 2.127. Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-193
Gambar 2.128. Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Sub-Sektor Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau	II-194
Gambar 2.129. Arah Struktur Ruang Wilayah Riau 2007 – 2026	II-198
Gambar 2.130. Panjang Jalan menurut Kondisi Aggregate Tahun 2012 di Provinsi Riau	II-201

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sekaligus merupakan RKPD tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Riau 2014-2019. Dalam penyusunannya, RKPD ini diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah, diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang pada akhirnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD. Sebagai dokumen perencanaan daerah, maka RKPD mempunyai kedudukan yang sangat penting untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Tahapan penyusunan RKPD dimulai dari rencana penyusunan, penyiapan rancangan awal rencana pembangunan, selanjutnya penyiapan rancangan rencana kerja, musyawarah perencanaan pembangunan, penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, dan pada akhirnya adalah penetapan RKPD. Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD di Provinsi Riau dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Penyusunan RKPD dengan pendekatan teknokratis berarti bahwa dalam proses penyusunan dan penetapan RKPD dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD ini berarti bahwa dalam proses penyusunan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (*stakeholder*) di Provinsi Riau.

Selain pendekatan teknokratis dan partisipatif, proses penyusunan RKPD Provinsi Riau ini juga dilakukan dengan pendekatan *bottom up planning* agar

kebutuhan pembangunan dapat memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat melalui mekanisme musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten. Sedangkan pendekatan *top down planning* menjadi sangat penting karena merupakan RKPD yang disusun sebagai tahun kedua RPJMD Riau 2014-2019. Dengan demikian proses penyusunan RKPD ini senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Provinsi Riau tahun 2015 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Riau Tahun 1994 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau tahun 2014 – 2019; (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan nasional, maka daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RKPD Provinsi Riau ini merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025. Penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diatur dalam peraturan daerah dimaksud khususnya dalam penentuan target kinerja program, kegiatan maupun dalam hal pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah.

Hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 disusun sebagai penjabaran dari target kinerja program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
2. RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan SKPD.

3. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Tahun 2016 ini disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan dan tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan organisasi dokumen sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai 2014 dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.3.2. Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kondisi Ekonomi Tahun 2013-2014 dan Perkiraan Tahun 2015-2016

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas Pembangunan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI

PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 adalah sebagai pedoman penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD Riau untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD Riau.

Penyusunan RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Provinsi Riau yang terintegrasi dan

berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD. Secara khusus tujuan RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah Riau,
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah Riau,
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2016,
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Riau, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD),
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi Provinsi Riau meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Riau. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menggambarkan mengenai letak, luas dan batas wilayah administrasi, kondisi geografis, kondisi topografi, kondisi geologi, kondisi klimatologi dan penggunaan lahan.

1) Letak, Luas, dan Batas Wilayah

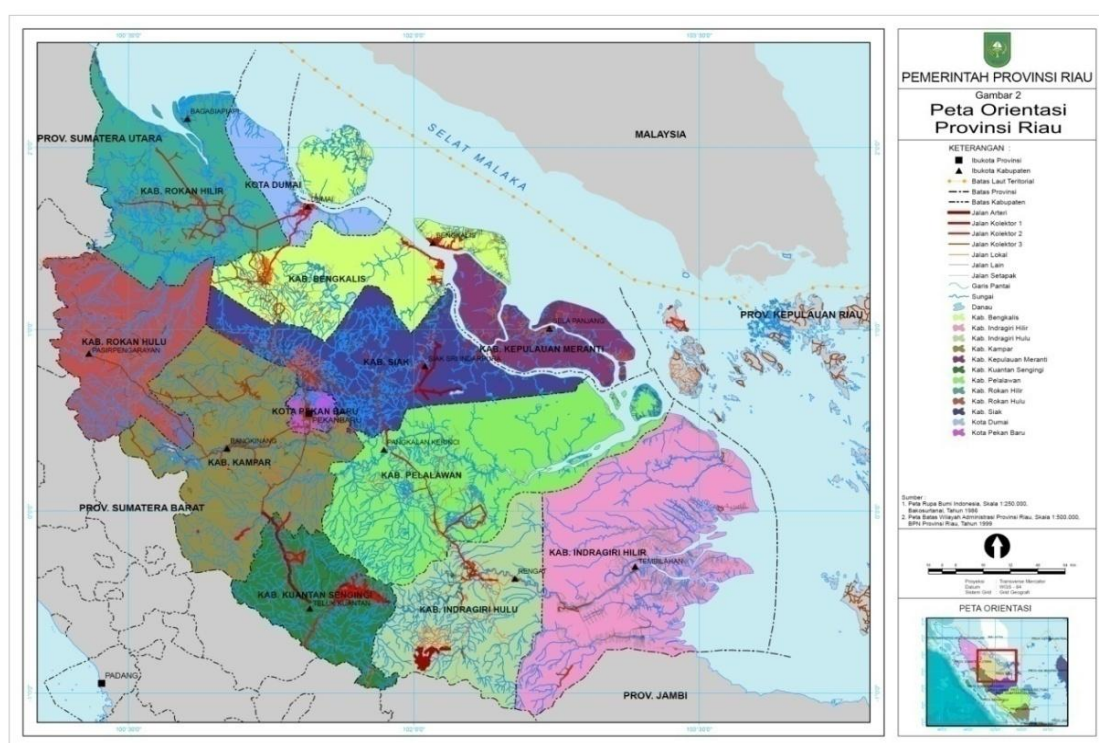
Secara geografis Provinsi Riau terletak pada posisi 01°05'00" Lintang Selatan- 02°25'00" Lintang Utara atau antara 100°00'00" Bujur Timur hingga 105°05'00" Bujur Timur. Provinsi Riau memiliki luas 107.932,71 Km² atau setara dengan 10.793.271 hektar. Luas daratan sebesar 8.915.016 Hektar dan sisanya berupa lautan/perairan yaitu seluas 1.877.255 hektar. Luas lautan menurut Kabupaten/Kota tidak dilakukan pembatasan dan lebih kepada pemanfaatan bersama. Kabupaten/Kota yang berhadapan langsung dengan laut dan memiliki peran besar dalam perekonomiannya antara lain

adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir dan kota Dumai.

Secara geografis, Provinsi Riau berbatasan dengan Provinsi lain dan Negara tetangga sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Melaka
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sumatera Barat dan Sumatera Utara

Gambar 2.1.
Peta Provinsi Riau



Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Kesepuluh Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir dan Kepulauan Meranti. Dua Kota adalah Kota Pekanbaru dan Dumai. Luas wilayah Kabupaten/Kota dan persentase terhadap total luas Provinsi Riau serta letak masing-masingnya ditunjukkan pada Gambar 2.1 dan Tabel 2.1.

Menurut kondisi geomorfologi daratan Riau dapat dibedakan menjadi wilayah bagian timur yang didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 meter

dari permukaan laut (dpl) dan bagian tengah merupakan dataran bergelombang serta bagian barat yang merupakan dataran berbukit dibentuk oleh Gugusan Bukit Barisan. Kondisi geomorfologi tersebut menempatkan wilayah Riau bagian timur berfungsi sebagai kawasan bawahan dari wilayah bagian barat yang merupakan hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Provinsi Riau yang bermuara di pantai Timur.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

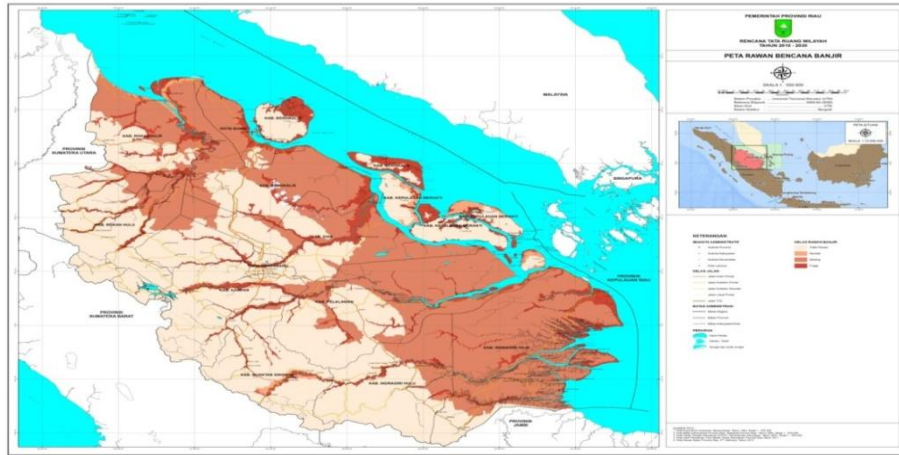
No.	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (Ha)	Persentase Luas (%)
1.	Kuantan Singingi	Teluk Kuantan	520.216	5,84
2.	Indragiri Hulu	Rengat	767.627	8,61
3.	Indragiri Hilir	Tembilahan	1.379.837	15,48
4.	Pelalawan	Pangkalan Kerinci	1.240.414	13,91
5.	Siak	Siak Sri Indrapura	823.357	9,24
6.	Kampar	Bangkinang	1.092.820	12,26
7.	Rokan Hulu	Pasir Pengaraian	722.978	8,11
8.	Bengkalis	Bengkalis	843.720	9,46
9.	Rokan Hilir	Bagan Siapi-API	896.143	10,05
10.	Kepulauan Meranti	Selat Panjang	360.703	4,05
11.	Pekanbaru	Pekanbaru	63.301	0,71
12.	Dumai	Dumai	203.900	2,29
Provinsi Riau		Pekanbaru	8.915.016	100,00

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

2) Topografi

Secara umum, Provinsi Riau bertopografi dataran rendah dan sedikit bergelombang dengan rata-rata ketinggian 10 meter dpl. Kemiringan lahan 0–2% seluas 1.157.006 hektar, kemiringan 15–40% seluas 737.966 hektar dan kemiringan lebih besar dari 40% seluas 550.928 hektar. Wilayah dataran rendah berada di posisi bagian pantai timur Sumatera, daerah dataran rendah ini merupakan muara dari empat sungai utama yang ada di Riau. Akibatnya daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan genangan air. Bencana banjir dan genangan air terjadi hampir di seluruh wilayah muara sungai seperti: Sungai Siak, Sungai Rokan, Sungai Kampar, Sungai Indragiri/Batang Kuantan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.2. Hal ini disebabkan tingginya curah hujan di wilayah hulu serta berkurangnya daerah resapan air akibat dari berkurangnya luas hutan.

Gambar 2.2.
Peta Daerah Rawan Banjir di Provinsi Riau



Ketinggian lahan di Provinsi Riau yang diukur dari beberapa titik kota berkisar antara 2–91 meter dpl ditunjukkan pada Tabel 2.2. Wilayah yang memiliki ketinggian dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Rokan Hulu (91 meter dpl), Kuantan Singingi (57 meter dpl), dan Kampar (30 meter dpl). Wilayah yang relatif rendah ketinggiannya dari permukaan laut terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti (2 meter dpl) dan Kabupaten Bengkalis (2 meter dpl), Indragiri Hilir (3 meter dpl) dan Indragiri Hulu (4 meter dpl).

Tabel 2.2.
Tinggi Beberapa Kota dari Permukaan Laut Menurut Kabupaten/ Kota
Di Provinsi Riau

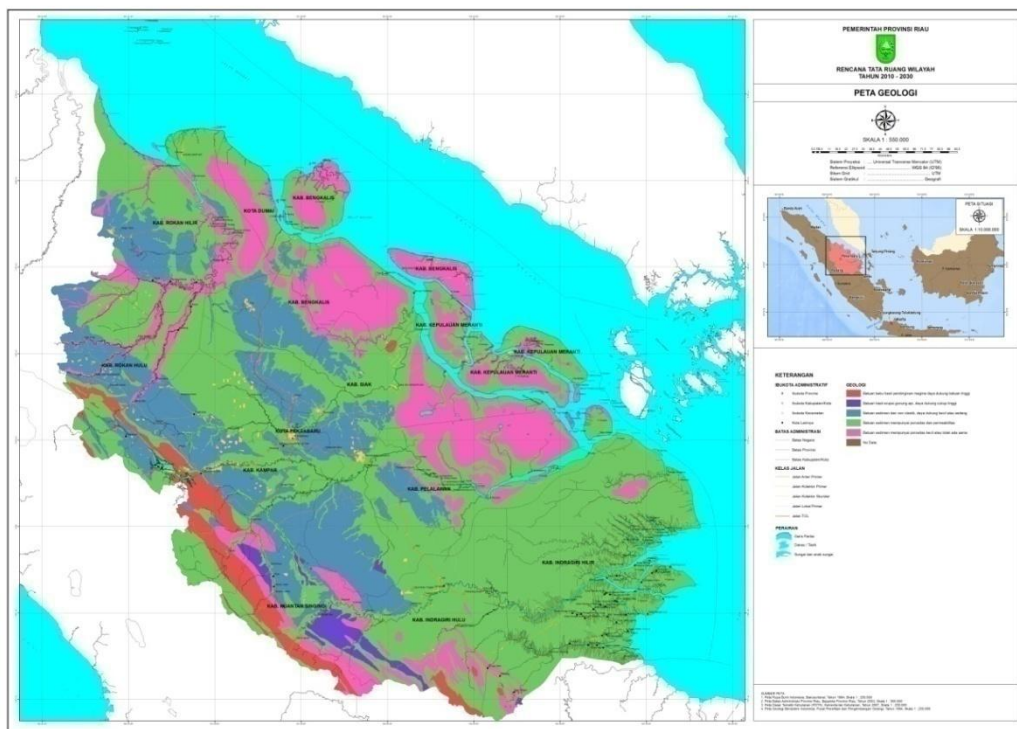
No.	Kabupaten/Kota (kota)	Dari Permukaan Laut (Meter)
1.	Kuantan Singingi (Teluk Kuantan)	57
2.	Indragiri Hulu (Rengat)	4
3.	Indragiri Hilir (Tembilahan)	3
4.	Pelalawan (Pangkalan Kerinci)	5
5.	Siak (Siak Sri Indrapura)	5
6.	Kampar (Bangkinang)	30
7.	Rokan Hulu (Pasir Pengaraian)	91
8.	Bengkalis (Bengkalis)	2
9.	Rokan Hilir (Bagan Siapi-api)	5
10.	Kepulauan Meranti (Selat Panjang)	2
11.	Pekanbaru (Pekanbaru)	10
12.	Dumai (Dumai)	5

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

3) Geologi

Kondisi geologi Riau didominasi oleh batuan sedimen kuartar dengan sisipan batuan sedimen tersier di bagian barat dan selatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.3. Struktur geologi memiliki lipatan yang umumnya berada di wilayah daratan sepanjang Bukit Barisan, serta patahan aktif yang tersebar mulai dari bagian barat di sekitar Bukit Barisan hingga bagian tengah dan selatan. Ditinjau dari potensi bencana alam geologi, sebagian besar wilayah Provinsi Riau bagian tengah dan barat termasuk zona lipatan (*folded zone*). Kemungkinan terjadinya gempa bumi di bagian barat dipengaruhi oleh keaktifan vulkanis di daerah Sumatera Barat. Sedang potensi gerakan tanah relatif kecil karena wilayah Provinsi Riau umumnya datar, kecuali sebagian wilayah barat yang merupakan bagian dari Bukit Barisan.

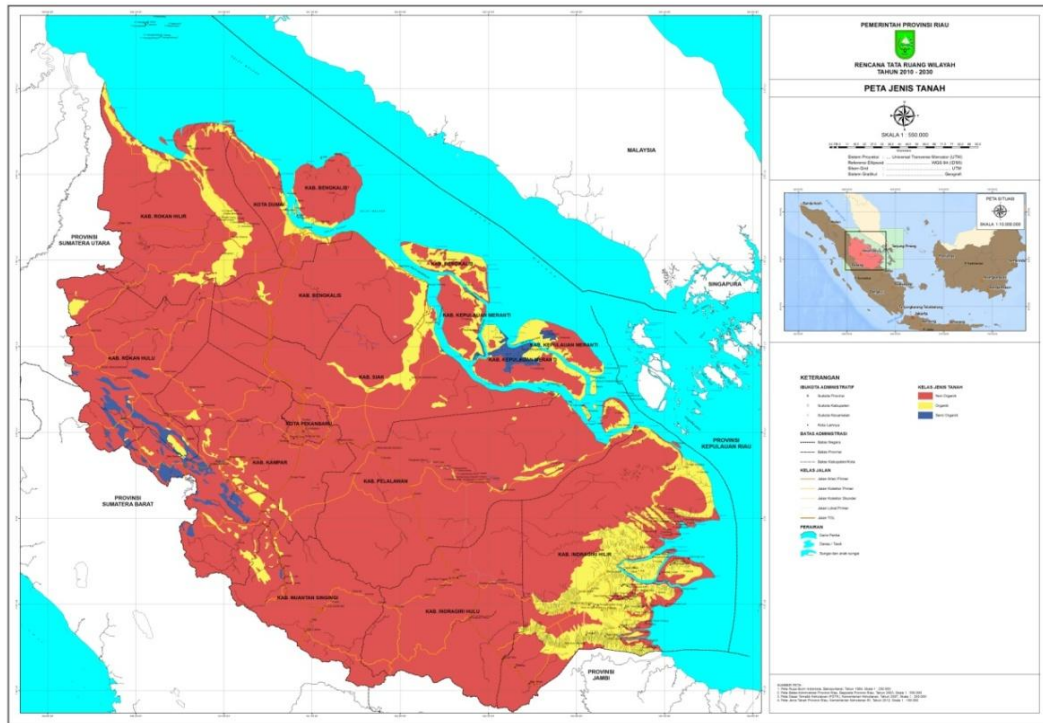
Gambar 2.3.
Peta Geologi Provinsi Riau



Sebagian tanah daratan daerah Riau terjadi dari formasi *alluvium* (endapan), dan beberapa tempat terdapat selingan neogen seperti sepanjang Sungai Kampar, Sungai Indragiri dan anaknya (Sungai Cinaku) di Kabupaten Indragiri Hulu bagian selatan. Daerah perbatasan sepanjang Bukit Barisan sepenuhnya terdiri dari lapisan

permokarbon, paleogen dan neogen dari tanah podsolik yang berarti terdiri dari induk batuan endapan.

Gambar 2.4.
Kelas Jenis Tanah di Provinsi Riau



Provinsi Riau terdapat empat jenis tanah utama yakni jenis tanah Histosol, Inceptisol, Oxisols dan Ultisols sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3. Jenis-jenis tanah ini terbentuk dari tiga kelas jenis tanah yaitu organik, semi organik dan non organik. Kelas jenis tanah organik umumnya mempunyai fisiografi datar, terutama terdapat di daerah sepanjang pantai sampai dengan pertengahan daratan yang berformasi sebagai dataran muda tidak bergunung-gunung, bahkan beberapa bagian terdiri dari tanah bencah berawa-rawa. Kelas jenis tanah semi organik dengan fisiografis datar hingga bergunung dijumpai di Kabupaten kampar dan Rokan Hulu. Kelas jenis tanah non organik tersebar diseluruh bagian wilayah Provinsi Riau dan merupakan kelas jenis tanah yang terbesar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.4.

Tabel 2.3.
Luas dan Jenis Satuan Tanah Di Provinsi Riau

No	Jenis Tanah	Bahan Induk	Fisiografi	Luas (Ha)
1.	Entisols	Aluvium	Datar	234.552,71
2.	Histosols	Organik	Datar	3.865.360,23
3.	Inceptisols	Aluvium	Berombak-Bergelombang	21.482,15
			Datar	1.024.131,83
		Metamorf	Bergunung	19.298,00
		Sedimen	Berbukit	186.081,26
			Bergunung	43.244,23
			Berombak-Bergelombang	185.903,45
4.	Mollisols	Batu Gamping	Berbukit	23.156,82
5.	Oxisols	Metamorf	Berbukit	24.092,53
		Sedimen	Berbukit	46.047,79
			Berombak-Bergelombang	277.081,56
		Volkanik	Datar-Berombak	333.934,16
6.	Ultisols	Metamorf	Berbukit	56.775,36
		Plutonik	Berbukit	28.441,46
		Sedimen	Berbukit	58.107,09
			Bergunung	43.677,31
			Berombak-Bergelombang	2.120.154,00
		Volkanik	Berbukit	287.987,33
			Bergunung	35.570,72
Total				8.915.015,99

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

4) Hidrologi

Provinsi Riau memiliki 15 sungai sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.4, dimana diantaranya empat sungai utama mempunyai peranan penting sebagai prasarana perhubungan masyarakat sekitar bantaran sungai. Keempat sungai tersebut adalah Sungai Siak dengan panjang ± 300 Km dengan kedalaman 8-12 meter, Sungai Rokan sepanjang ± 400 Km dengan kedalaman 6-8 meter, Sungai Kampar sepanjang 400 Km dengan kedalaman ± 6 meter, dan Sungai Indragiri sepanjang ± 500 Km dengan kedalaman 6 -8 meter. Keempat sungai yang membelah dari pegunungan dataran tinggi Bukit Barisan bermuara di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan ini dipengaruhi juga oleh pasang surut laut.

Tabel 2.4.
Sungai-Sungai yang Bermuara di Provinsi Riau

No	Nama Sungai	Muara
1.	Sungai Kubu	Kec. Kubu Kabupaten Rokan Hilir
2.	Sungai Bangko	Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
3.	Sungai Sinaboi	Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
4.	Sungai Ala	Kec. Dumai Barat Kota Dumai
5.	Sungai Bukit Batu	Kec. Bukit Batu Kabupaten Bengkalis
6.	Sungai Siak Kecil	Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak
7.	Sungai Siak	Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak
8.	Sungai Penyengat	Kec. Sungai Apit Kabupaten Siak
9.	Sungai Rokan	Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir
10.	Sungai Kampar	Kec. Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan
11.	Sungai Guntung	Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir
12.	Sungai Gaung	Kec. Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
13.	Sungai Indragiri	Kec. Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir
14.	Sungai Reteh	Kec. Reteh Kabupaten Indragiri Hilir
15.	Sungai Kateman	Kec. Kateman Kabupaten Indragiri Hilir

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

Menurut Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, total luas daerah pengairan (*catchment area*) di beberapa sungai di Provinsi seluas 39.963,10 KM² atau setara dengan 44,83% dari total luas daratan Provinsi Riau. Namun dengan semakin tingginya frekuensi banjir di Provinsi Riau mengindikasikan bahwa luas *catchment area* disekitar bantaran sungai semakin menurun untuk penggunaan lain dan diperparah lagi oleh konversi dan penggudulan hutan dihilu sungai.

Tabel 2.5.
Luas Daerah Pengairan (*Catchment Area*) Beberapa Sungai di Provinsi Riau

No	Kabupaten	Nama Sungai	Luas Pengairan (KM ²)
1.	Kabupaten Kampar		
	1.1. Kec. Kampar	Batang Kampar	4.000,0
	1.2. Kec. Kampar	Batang Bokan Hulu	4.848,0
	1.3. Kec. Kampar Kiri	Batang Kampar Kiri	3.934,2
2.	Kabupaten Rokan Hilir		
	2.1. Kec. Pujud	Batang Kumu	3.821,3
3.	Kabupaten Indragiri Hulu		
	3.1. Kec. Peranap	Batang Indragiri	1.873,0
	3.2. Kec. Pasir Penyau	Batang Indragiri	11.960,0
4.	Kabupaten Rokan Hulu		
	4.1. Kec. Rambah	Batang Lubuk	748,1
5.	Kabupaten Kuansing		
	5.1. Kec. Singingi	Batang Singingi	1.167,5
	5.2. Kec. Kuantan Mudik	Batang Kuantan	7.611,0

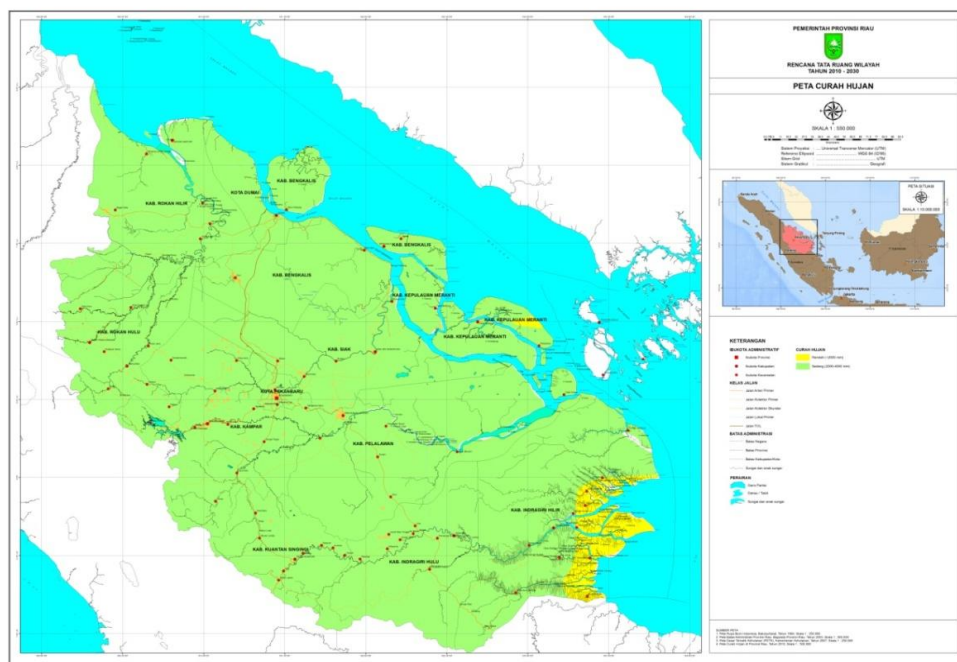
Sumber: Kanwil BPN Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

5) Kondisi Klimatologi

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, Provinsi Riau mempunyai tipe iklim Af, sedangkan menurut Schmidt dan Ferguson tipe iklim berkisar antara A-B-C, beriklim tropis basah. Secara geografis Provinsi Riau dilintasi oleh garis khatulistiwa dan mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Berdasarkan curah hujan, Provinsi Riau dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu wilayah dengan curah hujan sedang dan rendah. Daerah dengan curah hujan sedang (2000 – 4000 mm) mencakup sebagian besar Provinsi Riau. Daerah dengan curah hujan rendah (< 2000 mm) terdapat di bagian selatan Kabupaten Indragiri Hilir dan Pulau Rangsang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Detail curah hujan menurut wilayah di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.5 dan Tabel 2.6 serta Tabel 2.7.

Gambar 2.5.
Peta Curah hujan di Provinsi Riau



Selama periode 2010–2014, hari hujan dan curah hujan di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau dan berada di posisi tengah wilayah Provinsi Riau tergolong yang tertinggi dibanding wilayah Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.6. Musim hujan umumnya terjadi pada bulan Oktober hingga April yang ditunjukkan dengan tingginya hari hujan dan curah hujan. Musim kemarau umumnya terjadi mulai bulan Mei hingga September yang ditunjukkan menurunnya hari hujan dan curah hujan. Pada tahun 2013 - 2014, terjadi pergeseran waktu musim

kemarau dan hujan yang ditunjukkan dari jumlah hari hujan curah hujan yang menurun cukup signifikan. Musim hujan dimulai pada bulan Oktober 2013 hingga Januari 2014 dan diselingi dengan musim kemarau yang cukup parah pada bulan Februari – Maret 2014 sehingga mendorong terjadi kebakaran hutan dan lahan yang cukup parah di Provinsi Riau. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan upaya hujan buatan sehingga pada bulan April hingga Agustus 2014, meski merupakan musim kemarau namun jumlah hari hujan dan curah hujan relatif cukup tinggi. Pada bulan September 2014, kembali hari hujan dan curah hujan rendah sehingga kembali memicu kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar di Provinsi Riau. Kondisi kemarau ini relatif pada bulan Januari – Maret 2015 ini, meski tingkat kebakaran hutan dan lahan relatif sedikit.

Tabel 2.6.
Jumlah Hari Hujan dan Jumlah Curah Hujan Per Bulan Tahun 2010-2014
Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau

No.	BULAN	2010		2011		1012		2013		2014	
		HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM
1.	JAN	23	375.6	25	227.0	12	66.7	16	110,9	19	253,3
2.	FEB	16	205,0	15	88.1	22	247.6	22	335,0	4	13,8
3.	MAR	20	434,4	19	116.0	17	324.6	22	339,0	8	168,3
4.	APR	19	379,9	23	328.1	22	215.3	18	172,1	22	347,2
5.	MAY	16	373,3	12	101.7	18	182.6	16	129,2	16	233,0
6.	JUN	17	271,8	11	65.2	9	140.6	7	56,0	10	119,2
7.	JUL	19	321,8	8	26.1	18	262.2	11	133,9	12	102,1
8.	AUG	20	191,5	15	228.7	16	97.0	13	186,2	22	105,1
9.	SEP	24	466,6	15	304.9	15	185.8	18	146,6	9	137,2
10.	OCT	15	120,7	23	266.4	21	228.9	25	473,4	20	348,3
11.	NOV	19	147,8	22	317.1	17	439.5	25	380,9	24	331,5
12.	DEC	22	213,9	23	335.3	20	245.0	24	540,5	22	279,9
JUMLAH		230	3.502	211	2.404	217	2.636	217	3.003	188	2.438

Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011, 2012, 2013) dan BMKG Riau (2015)
Keterangan : HH = Hari Hujan; MM = Milimeter; na = not available.

Kondisi hari hujan dan curah hujan di Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota cukup bervariasi. Selama periode 2010 – 2014, jumlah Hari Hujan (HH) berkisar antara 73 – 230 hari hujan/tahun dengan jumlah curah hujan berkisar antara 444 – 4.080 milimeter per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.7. Selama periode 2010 – 2014 ini, Kabupaten dengan kecenderungan jumlah hari hujan dan/atau curah hujan semakin sedikit sehingga memicu kebakaran hutan dan lahan adalah Kabupaten

Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Bengkalis dan Kepulauan Meranti. Kondisi rendahnya hari hujan dan curah hujan telah diantisipasi Pemerintah melalui hujan buatan sehingga jumlah hari hujan relatif meningkat meski tidak merata, namun jumlah curah hujan cenderung menurun, khususnya pada tahun 2014. Kondisi musim hujan dan kemarau yang cenderung semakin tidak menentu ini menjadikan antisipasi terhadap kebakaran hutan dan lahan di empat Kabupaten ini yang sebagian besar lahannya merupakan lahan gambut perlu menjadi prioritas utama.

Tabel 2.7.
Perkembangan Jumlah Hari Hujan (HH) dan Jumlah Curah Hujan (MM)
Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	2010		2011		2012		2013		2014	
		HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM	HH	MM
1.	Kuantan Singingi	133	2.816	121	2.304	140	4.080	105	2.676	90	1.447
2.	Indragiri Hulu	196	2.490	192	2.288	168	2.305	202	2.758	183	1.997
3.	Indragiri Hilir	142	1.324	133	1.781	130	1.707	133	444	132	574
4.	Pelalawan	152	2.315	167	2.394	200	2.788	175	2.148	196	2.114
5.	Siak	na	na	na	na	114	2.148	173	2.063	150	1.552
6.	Kampar	141	3.398	127	2.938	75	3.360	187	3.142	133	1.507
7.	Rokan Hulu	135	2.505	142	1.998	112	1.958	131	2.202	140	2.441
8.	Rokan Hilir	85	1.571	83	2.088	73	2.470	164	2.930	134	2.042
9.	Bengkalis	89	2.090	122	2.110	101	1.881	122	2.104	106	1.020
10.	Kep. Meranti	na	na	na	na	194	2.974	166	1.724	140	622
11.	Pekanbaru	230	3.502	211	2.404	217	2.635	217	3.004	188	2.438
12.	Dumai	na	na	164	2.249	160	2.095	178	2.486	166	1.719
Rataan		145	2.445	146	2.255	140	2.530	163	2.307	147	1.623

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011, 2012, 2013) dan BMKG Riau (2015)

Keterangan : HH = Hari Hujan, MM = Milimeter, na : not available

Keadaan suhu Provinsi Riau yang diukur di Kota Pekanbaru selama periode 2010 – 2014, dengan rata-rata sebesar 28,26 derajat celcius, yang secara detail ditunjukkan pada Tabel 2.8. Suhu pada siang hari berkisar antara 33,8 - 36,5 derajat celcius. Suhu pada malam hari berkisar antara 19,9 – 23,1 derajat celcius. Suhu minimum sebesar 19,9 derajat celcius terjadi pada bulan Oktober 2011 dan suhu maksimum sebesar 36,5 derajat celcius terjadi pada bulan Oktober 2010. Secara umum, suhu udara di Provinsi Riau cenderung semakin panas pada siang hari seiring dengan semakin menurunnya jumlah hari hujan dan curah hujan, cenderung semakin dingin pada malam hari. Kondisi ini menggambarkan telah terjadi perubahan cuaca ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global.

Tabel 2.8.
Keadaan suhu (°C) Tahun 2010 – 2014 Di Kota Pekanbaru , Provinsi Riau

NO.	BULAN	2010		2011		2012		2013		2014	
		MAK	MIN	MAK	MIN	MAK	MIN	MAK	MIN	MAK	MIN
1.	JAN	34.2	21.5	33.5	22.0	33.1	23.2	35,1	21,4	32,7	21,2
2.	FEB	35.2	22.5	35.5	21.0	32.6	23.1	34,7	22,0	34,4	20,6
3.	MAR	24.8	22.0	34.6	21.5	32.6	23.1	36,0	22,6	34,6	22,0
4.	APR	35.5	23.0	35.4	21.8	33.2	23.3	36,6	22,2	33,3	22,8
5.	MEI	35.8	22.3	35.8	22.3	33.2	23.6	36,5	21,0	34,8	23,0
6.	JUN	35.0	22.8	35.0	22.5	33.8	23.6	37,0	22,0	35,7	21,8
7.	JUL	35.0	21.6	34.6	21.8	32.8	23.6	35,2	21,0	35,9	22,0
8.	AUG	35.0	22.6	33.4	23.3	32.4	23.3	35,2	21,5	34,2	22,0
9.	SEP	35.4	20.3	35.0	21.5	33.1	23.1	34,7	21,2	34,2	22,2
10.	OKT	36.5	22.0	34.6	19.9	32.6	23.5	34,4	21,4	35,0	21,4
11.	NOV	35.0	22.0	35.0	22.5	32.5	23.4	34,0	22,2	34,2	22,7
12.	DES	34.2	21.6	34.1	22.2	32.8	24.4	34,4	21,4	34,4	21,8
RATAAN		35,1	22,0	34,7	21,7	32,9	23,6	35,3	21,6	34,4	21,9

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011, 2012,2013) dan BMKG Riau (2015).
Keterangan : MAK = Maksimum ; MIN = Minimum.

Jumlah hari hujan, curah hujan dan suhu berkorelasi positif dengan tingkat kelembaban. Selama periode 2010 – 2014, kelembaban udara di Kota Pekanbaru berkisar antara 69,0% - 84,0% sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9. Tingkat kelembaban rendah umumnya terjadi pada musim kemarau ditandai dengan rendahnya hari hujan dan curah hujan. Tingkat kelembaban tinggi umumnya pada musim hujan.

Tabel 2.9.
Kelembaban Udara (%) Tahun 2010 – 2014 Kota Pekanbaru Provinsi Riau

NO.	BULAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1.	JAN	78.0	78.0	69.3	78,3	80,0
2.	FEB	74.0	70.0	77.6	82,0	74,0
3.	MAR	74.0	72.0	73.7	80,0	77,0
4.	APR	74.0	75.0	73.0	78,0	78,0
5.	MEI	75.0	75.0	75.5	79,0	80,0
6.	JUN	72.0	74.0	71.1	72,0	75,0
7.	JUL	75.0	69.0	76.8	78,0	74,0
8.	AUG	74.0	73.0	75.3	77,0	79,0
9.	SEP	74.0	76.0	80.0	79,0	78,0
10.	OKT	69.0	77.0	75.3	81,8	80,0
11.	NOV	74.0	77.0	83.0	82,9	81,0
12.	DES	73.0	78.0	82.3	84,0	83,0

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011, 2012, 2013) dan BPBD Riau (2015)
Keterangan : MAK = Maksimum ; MIN = Minimum

Menurunnya jumlah hari hujan dan curah hujan berkorelasi positif terhadap kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap sehingga kualitas udara menjadi sangat tidak sehat. Pada tahun 2014, kebakaran lahan dan hutan mulai banyak terjadi pada bulan Februari dan Maret bersamaan dengan musim kemarau dan pembukaan/pembersihan lahan gambut oleh petani sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.10. Titik api pada kebakaran Februari – Maret 2014 dijumpai di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dengan jumlah titik api terbanyak dijumpai di Kabupaten Bengkalis, diikuti Kabupaten Pelalawan, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hilir. Meski bulan April dan Juni 2014 jumlah titik api menurun tajam karena turun tangan langsung Presiden dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau melalui pemadaman langsung dan hujan buatan, namun mulai bulan Juni jumlah titik api kembali meningkat kembali seiring dengan masuknya musim kemarau. Jumlah titik api di beberapa Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Dumai, Indragiri Hilir dan Pelalawan tetap bertahan hingga bulan Oktober 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa hutan dan lahan yang terbakar merupakan lahan gambut, yang penanganan pemadaman api jauh lebih sulit.

Tabel 2.10.
Jumlah Titik Api Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	BULAN											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kuantan Singingi	1	17	17	6	5	34	17	0	5	4	0	0
2	Indragiri Hulu	1	15	4	5	3	24	58	9	3	6	0	0
3	Indragiri Hilir	1	133	116	2	5	26	11	10	28	41	1	0
4	Pelalawan	11	218	182	7	11	52	59	30	38	42	2	0
5	Siak	5	150	130	0	8	22	21	10	10	10	0	0
6	Kampar	0	49	12	11	5	25	34	10	6	5	0	0
7	Rokan Hulu	1	15	4	5	3	24	58	9	3	6	0	0
8	Rokan Hilir	3	116	162	10	17	212	301	59	0	3	1	0
9	Bengkalis	20	327	243	3	11	68	59	17	11	10	0	0
10	Kep. Meranti	3	93	143	1	0	1	0	15	6	8	1	0
11	Pekanbaru	0	2	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
12	Dumai	3	192	168	0	6	47	52	4	5	3	0	0
JUMLAH		49	1327	1182	50	74	536	671	174	115	138	5	0

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011, 2012, 2013) dan BPBD Riau (2015).

Selama periode 2010 – 2014, jumlah titik api yang terjadi di Provinsi Riau berfluktuatif meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.11. Selama lima tahun terakhir ini, jumlah titik api terbanyak dijumpai di Kabupaten Rokan Hilir (3.521 titik api) diikuti Kabupaten Pelalawan (2.774 titik api), Kabupaten Bengkalis (2.124 titik api), Kabupaten Indragiri Hilir (1.451 titik api), Kabupaten Indragiri Hulu (1.330 titik api), Kabupaten Siak (1.293 titik api) dan Kota Dumai (1.133 titik api).

Selama periode 2010 – 2014, pertumbuhan titik api di hampir semua Kabupaten/Kota kecuali Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan antara 9,01% - 65,24% per tahun. Meski jumlah titik api terbanyak dijumpai di Kabupaten Rokan Hilir dengan tingkat pertumbuhan titik api sebesar 22,61% per tahun, namun pertumbuhan titik api tertinggi ternyata dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti (65,24%/tahun) diikuti Kabupaten Siak (29,11%/tahun), Kabupaten Indragiri Hilir (26,82%/tahun), Kota Dumai (26,11%/tahun), Kabupaten Pelalawan (24,11%/tahun), dan Kabupaten Bengkalis (23,84%). Peningkatan pertumbuhan titik api. Relatif lebih tingginya pertumbuhan titik api di 6 Kabupaten/kota ini perlu diwaspadai dengan seksama karena lahan yang terbakar umumnya merupakan lahan gambut yang penanganan kebakarannya relatif sukar dan mahal serta dampak kebakarannya terutama asap sangat besar.

Tabel 2.11.
Jumlah Titik Api Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kuantan Singingi	59	191	314	114	106
2	Indragiri Hulu	77	375	597	153	128
3	Indragiri Hilir	114	274	506	183	374
4	Pelalawan	221	559	923	419	652
5	Siak	102	310	326	189	366
6	Kampar	102	271	307	138	157
7	Rokan Hulu	81	239	343	188	128
8	Rokan Hilir	319	843	710	495	884
9	Bengkalis	264	344	422	325	769
10	Kep. Meranti	22	20	55	32	271
11	Pekanbaru	16	0	9	12	6
12	Dumai	150	141	163	199	480
JUMLAH		1.527	3.567	4.675	2.447	4.321

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2011, 2012, 2013) dan BPBD Riau (2015)

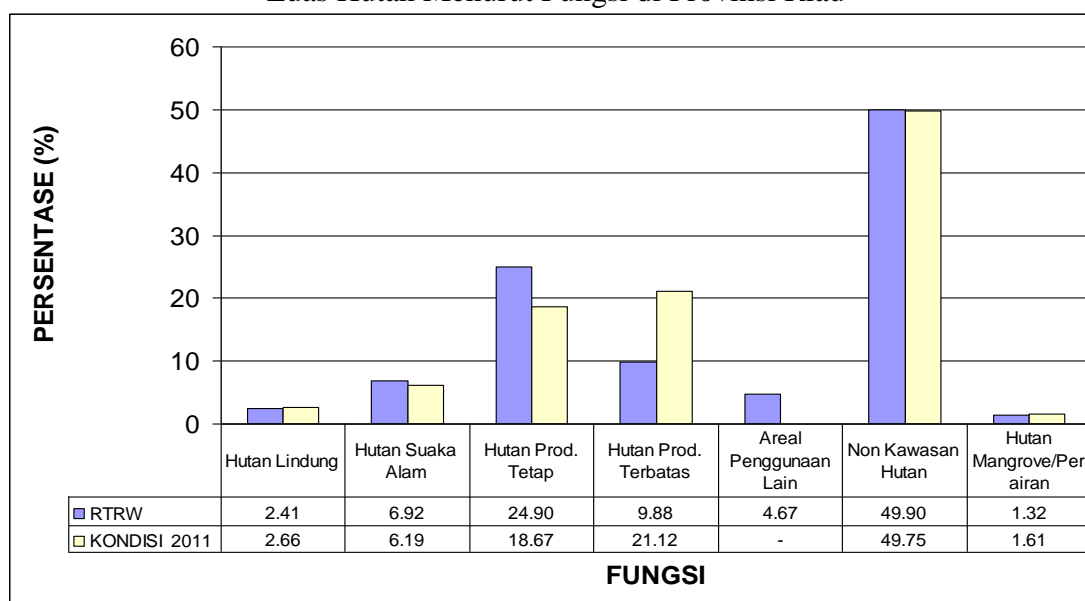
Permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berakibat kepada kabut asap sudah menjadi permasalahan nasional dan bahkan regional Asean. Kedepan, upaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan perlu mendapat perhatian khusus untuk mengurangi kerusakan dan pencemaran lingkungan, menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan menghindari dari tekanan dunia terhadap komoditas ekspor Indonesia.

6) Penggunaan Lahan

Luas wilayah daratan Provinsi Riau adalah 8.915.016 hektar. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGKH) *Update* (Keputusan Menteri Kehutanan No. 173/Menhut-II/1986) dengan penggunaan sebagai berikut : (1) Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 531.852,65 Hektar atau 6,19%; (2) Hutan Lindung seluas 228.793,82 Hektar atau 2,66%; (3.a) Hutan Produksi Tetap seluas 1.605.762,78 Hektar atau 18,67%; (3.b) Hutan Produksi Terbatas seluas 1.815.949,74 Hektar atau 21,12%; (4) Hutan Produksi yang dapat dikonversi seluas 2.364.828,39 Hektar atau seluas 27,50%; (5) Hutan Mangrove/Bakau seluas 138.433,62 Hektar atau 1,16%; dan (6) Areal Penggunaan Lain/APL Pelepasan seluas 1.913.136 Hektar atau 22,25%. Sedangkan rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau 2013–2030 yang saat ini dalam tahap proses pengesahan, berdasarkan hasil rekomendasi tim terpadu terdiri atas : (1) Kawasan Hutan seluas 4.411.648 hektar atau 48,82%; (2) Areal penggunaan lain seluas 4.505.187 hektar (49,18%); dan perairan/sungai seluas 119.260 hektar (1,32%) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Dari luas hutan usulan tim terpadu, seluas 3.986.475 hektar atau 44,11% dari total luas daratan Provinsi Riau merupakan luas hutan tetap (hutan lindung, hutan suaka alam/hutan pelestarian alam, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap) dan seluas 425.173 hektar (18,06%) merupakan hutan produksi konversi.

Kondisi eksisting kawasan hutan di Provinsi Riau pada tahun 2014 (Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Laporan Tahunan 2014) diketahui bahwa luas hutan tetap di Provinsi Riau (hutan lindung, suaka alam, produksi terbatas, dan produksi tetap) seluas 4.182.359 hektar atau 48,64% dari total luas daratan Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.6. Luas non kawasan hutan seluas 4.277.964 hektar (49,75%) serta hutan mangrove/bakau/perairan seluas 138.433,62 hektar (1,61%).

Gambar 2.6.
Luas Hutan Menurut Fungsi di Provinsi Riau



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Laporan Tahunan 2014 dan RTRW Provinsi Riau

Bila dibandingkan dari total luas hutan tetap Provinsi Riau pada RTRW Provinsi Riau tahun 2013 – 2030 menunjukkan bahwa penggunaan lahan non kawasan hutan belum melebihi dari yang telah direncanakan dan masih tersedia seluas 229.289,01 hektar atau 2,67% dari total luas daratan Provinsi Riau, yang dapat dikembangkan untuk non kawasan hutan atau usaha budidaya pertanian. Bahkan dari total luas kawasan hutan tetap, tersedia seluas 425.173 hektar (4.67%) yang dialokasikan dari hutan produksi konversi, sehingga total area yang masih dapat dikembangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan adalah seluas 654.462,01 hektar atau 7,61% dari total luas daratan Provinsi Riau.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

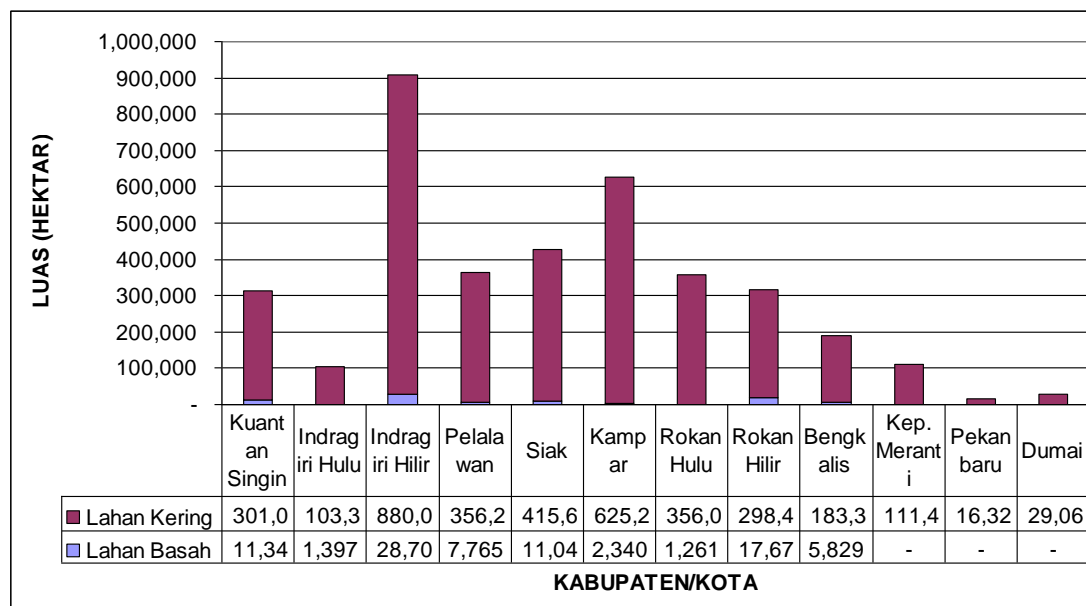
Provinsi Riau memiliki potensi untuk pengembangan pertanian/perkebunan, pertambangan, industri dan pariwisata serta pemekaran wilayah kabupaten/kota. Pengembangan potensi yang ada akan mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Provinsi Riau.

1) Perkebunan

Sesuai dengan kondisi kesuburan lahan, jenis lahan dan kesesuaian iklim, maka sebagian besar lahan non kawasan hutan khususnya lahan budidaya, umumnya diusahakan untuk budidaya tanaman perkebunan di samping secara terbatas diusahakan untuk tanaman pangan. Jenis lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya pertanian yaitu lahan basah dan lahan kering seluas 3,76 juta hektar sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7, dimana seluas 3,40 juta hektar (90,20%) diusahakan untuk 3 tanaman perkebunan utama yaitu kelapa sawit, kelapa dan karet (Gambar 2.8).

Luas lahan menurut jenis (lahan basah dan lahan kering) terluas terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebesar 24,14% dari total luasan Provinsi Riau, diikuti Kabupaten Kampar (16,67%) dan Kabupaten Siak (11,34%). Khusus jenis lahan basah yang umumnya digunakan untuk pesawahan, persentase terbesar berada di Kabupaten Indragiri Hilir (32,86%) diikuti Kabupaten Rokan Hilir (20,23%), Kabupaten Kuantan Singingi (12,98%), dan Kabupaten Siak (12,64%).

Gambar 2.7.
Luas Lahan Menurut Jenis dan Penyebarannya
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Provinsi Riau



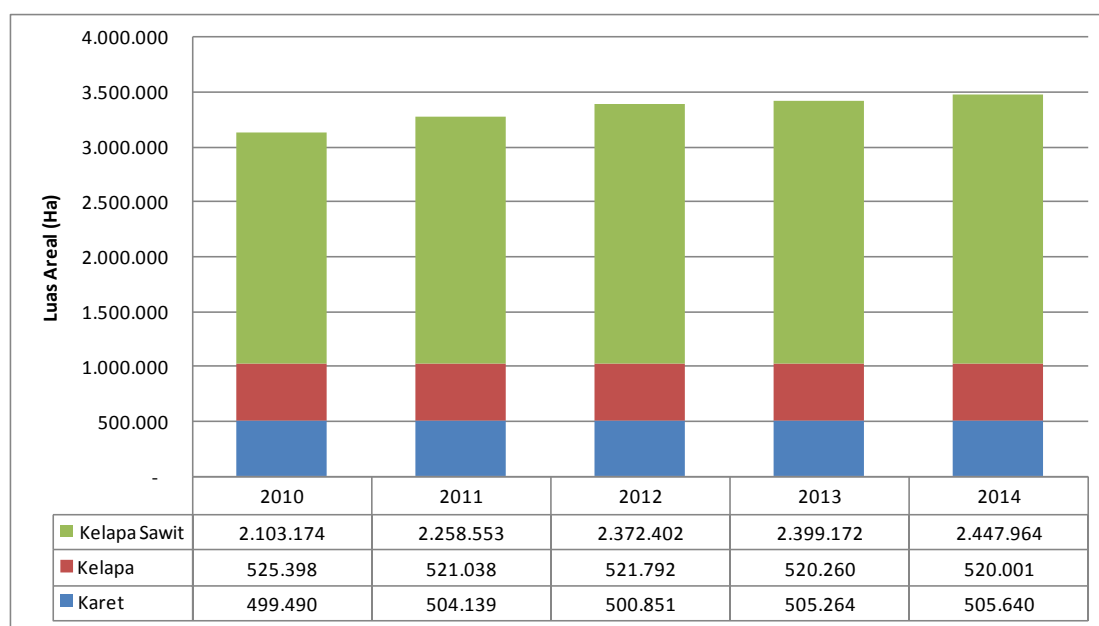
Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka 2014)

Pengembangan lahan kering untuk budidaya pertanian sebagian besar digunakan untuk budidaya tanaman perkebunan kelapa sawit, kelapa dan karet

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.8. Lahan yang telah dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman perkebunan khususnya kelapa sawit, kelapa dan karet sebesar 90,20% dari total luasan lahan yang telah diusahakan di Provinsi Riau.

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman terluas diusahakan di Provinsi Riau. Pada tahun 2010, areal tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau seluas 2,10 juta hektar, meningkat menjadi 2,40 juta hektar pada tahun 2013 dengan jumlah keluarga yang mengusahakannya sebanyak 526.350 KK. Pada tahun 2014, diperkirakan total areal kelapa sawit seluas 2,44 juta hektar. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata laju pertumbuhan luas areal kelapa sawit Provinsi meningkat sebesar 3,08% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.8. Pada tahun 2013, areal perkebunan kelapa sawit Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia, dengan persentase sebesar 21,03% dari total luas areal kelapa sawit Indonesia.

Gambar 2.8.
Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014)

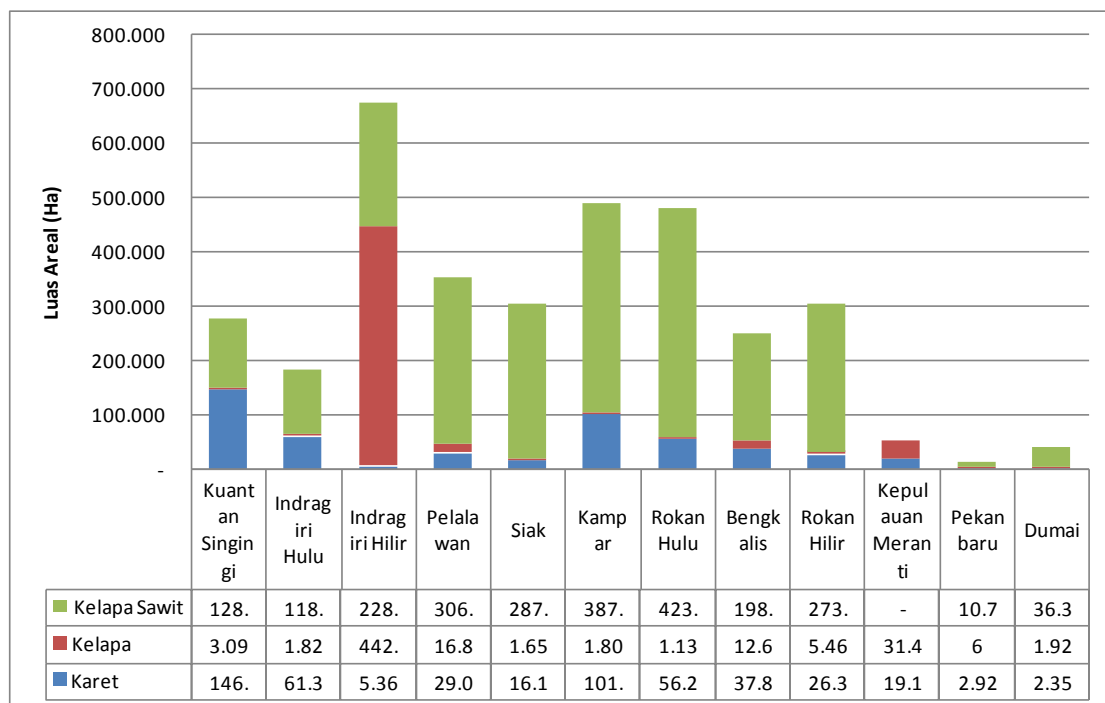
Keterangan: Tahun 2014 merupakan angka prediksi

Areal tanaman kelapa sawit terluas di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebesar 17,65% dari total areal kelapa sawit Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9. Kabupaten lain yang memiliki areal kelapa sawit yang luas berturut-turut adalah Kabupaten Kampar (16,14%), Kabupaten

Pelalawan (12,76%), Kabupaten Siak (12,00%) dan Kabupaten Rokan Hilir (11,38%). Luas areal kelapa sawit Kabupaten/Kota lainnya berkisar antara 0,45% hingga 9,51%, kecuali Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum berkembang perkebunan kelapa sawitnya.

Tanaman perkebunan terluas kedua setelah kelapa sawit sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.8 adalah tanaman kelapa. Pada tahun 2010, areal tanaman kelapa seluas 525.398 hektar menurun menjadi 520.260 hektar tahun 2013 dengan jumlah keluarga petani kelapa sebanyak 207.079 KK. Pada tahun 2014, diperkirakan areal kelapa di Provinsi Riau seluas 520.001 hektar. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata laju pertumbuhan menurun areal kelapa di Provinsi Riau menurun sebesar -0,21% per tahun. Pertumbuhan menurun, areal kelapa di Provinsi Riau lebih disebabkan karena tingginya area tanaman kelapa yang sudah tua dan kerusakan akibat intrusi air laut dibandingkan luas area peremajaan. Pada Tahun 2013, luas areal kelapa yang ada di Provinsi Riau merupakan yang terluas di Indonesia dengan persentase area sebesar 13,79% dari total luas areal kelapa di Indonesia.

Gambar 2.9.
Luas Areal Tanaman Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2014).

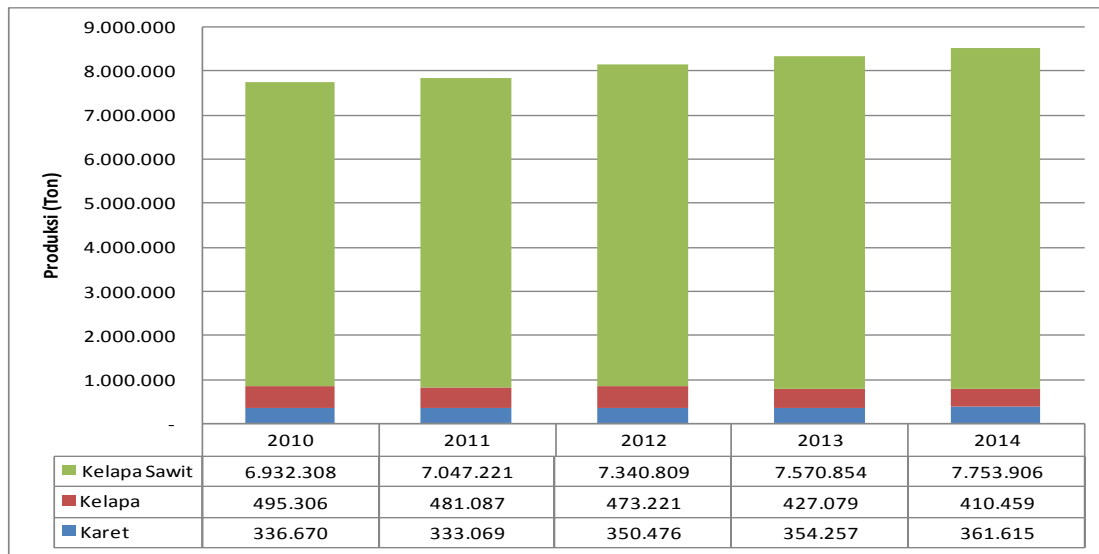
Areal tanaman kelapa terluas di Provinsi Riau terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luasan 442.335 hektar atau 85,02% dari total luas areal kelapa di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.9. Kabupaten lainnya yang memiliki areal kelapa adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (6,05%), Kabupaten Bengkalis (3,24%) dan Kabupaten Pelalawan (3,24%). Luas areal kelapa di Kabupaten lainnya berkisar antara 0% hingga 1,05% dari total luas areal kelapa Provinsi Riau.

Tanaman perkebunan terluas ketiga setelah kelapa sawit dan kelapa adalah tanaman karet sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.8. Pada tahun 2010, areal tanaman karet di Provinsi Riau seluas 499.490 hektar meningkat menjadi 505.264 hektar pada tahun 2013 dengan jumlah keluarga petani karet sebanyak 245.460 KK. Pada tahun 2014, diperkirakan area karet seluas 505.640 hektar. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan areal karet meningkat sebesar 0,25% per tahun.

Kabupaten terluas karet terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu seluas 146.2474 hektar atau 28,99% dari total luas areal karet di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.9. Kabupaten lainnya yang memiliki areal karet yang luas adalah Kabupaten Kampar (20,18%), Indragiri Hulu (12,15%) dan Rokan Hulu (11,13%). Luas areal karet Kabupaten/Kota lainnya berkisar antara 0,47% - 7,49% dari total luas areal karet di Provinsi Riau.

Seiring dengan peningkatan/penurunan luas areal, produksi kelapa sawit kelapa dan karet juga terus meningkat/menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10. Produksi kelapa sawit yang diukur dari produksi CPO (*crude palm oil*) menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2010, produksi minyak sawit sebesar 6,93 juta ton CPO, meningkat menjadi 7,57 juta ton CPO pada tahun 2013. Pada tahun 2014, produksi CPO Provinsi Riau meningkat menjadi 7,75 juta ton. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata laju pertumbuhan produksi minyak sawit di Provinsi Riau meningkat sebesar 2,42% per tahun. Produksi minyak sawit Provinsi Riau ini merupakan yang terbesar di Indonesia yaitu sebesar 24,17% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Tinggi ketersediaan bahan baku CPO merupakan potensi pengembangan industri hilir kelapa sawit.

Gambar 2.10.
Produksi Kelapa Sawit, Kelapa dan Karet Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (2011,2012 , 2013 dan 2014).

Keterangan: Tahun 2014 merupakan angka prediksi

Perkembangan produksi karet dalam beberapa tahun mulai meningkat. Pada tahun 2010, produksi karet sebesar 336,67 ribu ton (KKK) meningkat menjadi 354,26 ribu ton tahun 2013. Pada tahun 2014, produksi karet diperkirakan meningkat menjadi 361,62 ribu ton. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata laju pertumbuhan produksi karet Provinsi Riau meningkat sebesar 2,08% per tahun. Ketersediaan bahan baku karet belum dikembangkan menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, masih terbatas dalam bentuk SIR. Pengembangan industri hilir karet berpotensi untuk dikembangkan di Provinsi Riau.

Provinsi Riau sebagai produsen kelapa terbesar di Indonesia jauh lebih lama dibanding pencapaian produksi kelapa sawit. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi kelapa terus menurun. Pada tahun 2010, produksi kelapa di Provinsi Riau sebesar 495,31 ribu ton setara kopra, menurun menjadi 427,10 ribu ton setara kopra. Pada tahun 2014, produksi kelapa akan menurun menjadi 410,46 ribu ton setara kopra. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata laju pertumbuhan produksi kelapa menurun sebesar - 3,89% per tahun. Ketersediaan kelapa yang cukup besar merupakan peluang pengembangan industri hilir kelapa untuk produk berbasis kelapa yang bernilai tambah tinggi.

2) Pertambangan

Provinsi Riau memiliki potensi pertambangan yang besar. Potensi/cadangan Bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau adalah Minyak bumi, Gas bumi, Batubara, Bitumin dan Gambut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.10. Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*). Besarnya cadangan minyak bumi ini secara berurut berada Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 *trillion standart cubic feed* (TSCF). Besarnya cadangan gas bumi ini secara berurut berada di Kabupaten Pelalawan, Siak, Pekanbaru dan Bengkalis. Potensi/cadangan Batubara sebesar 2,19 milyar ton berada di Kabupaten Indragiri Hulu (1,60 milyar ton), Kampar (156,49 juta ton), Rokan Hulu (145,00 juta ton), Kuantan Singingi (140,00 juta ton), Pelalawan (86,88 juta ton) dan Indragiri Hilir (60,48 juta ton). Potensi/cadangan Bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Tabel 2.12.
Potensi Pertambangan Menurut Jenis di Provinsi Riau

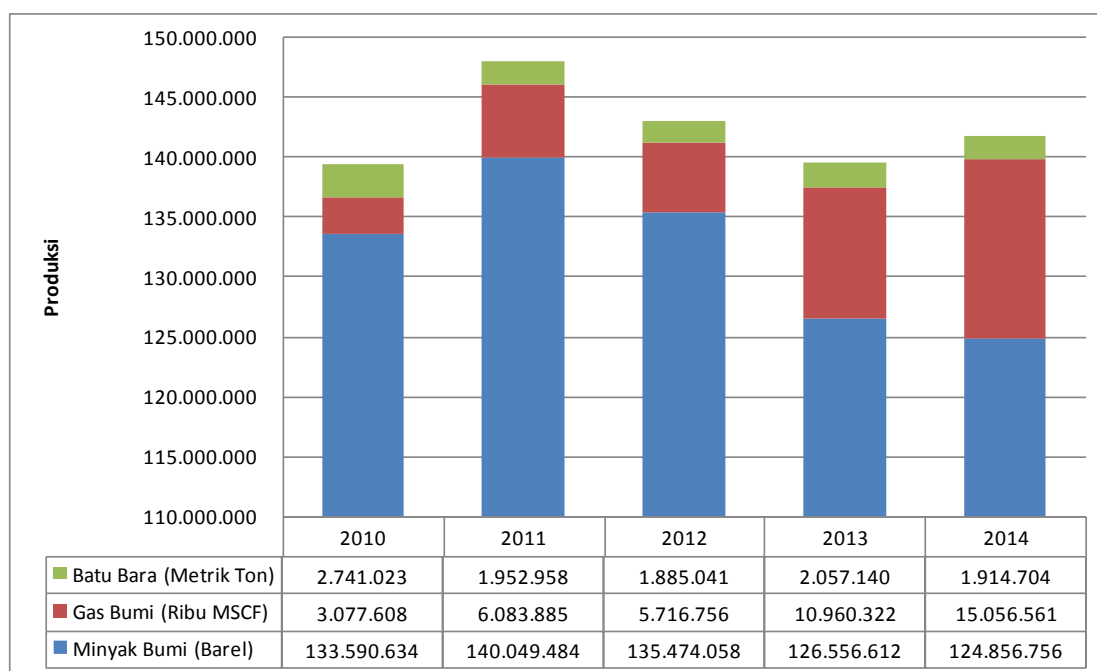
No	Sumber Energi Primer	Potensi	Satuan	Lokasi
1	Minyak Bumi	4,27	MMSTB	Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan dan Inhu
2	Gas Bumi	7,75	TSCF	Pelalawan, Siak, Pekanbaru, Bengkalis
3	Batubara	2,19	Milyar Ton	Kuansing, Rohul, Inhil, Inhu, Pelalawan dan Kampar
4	Bitumin (<i>Oil shale</i>)	52,8	Juta Ton	Kuansing
5	Gambut	12,88	Milyar Ton	Siak, Bengkalis dan Inhil

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau, 2014).

Dari potensi/cadangan pertambangan Bitumin hanya ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dimana hingga kini masih belum diusahakan. Sedangkan bahan tambang gambut hanya diusaha hingga tahun 2009 dan mulai tahun 2010 dihentikan terkait isu pemanasan global (*global warming*) dan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk tidak lagi menambang bahan tambang Gambut.

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2010 – 2014 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11. Selama periode ini, produksi minyak bumi Provinsi cenderung menurun dikarenakan meningkatnya jumlah sumur yang tua dan kurang produktif. Pada tahun 2010, produksi minyak bumi Provinsi Riau 133,59 juta barel, menurun menjadi 126,56 juta barel pada tahun 2013. Pada tahun 2014, produksi minyak bumi akan terus menurun menjadi 124,86 juta barel. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan produksi minyak bumi Provinsi Riau menurun sebesar -1,34% per tahun. Produksi minyak bumi dari bumi Provinsi Riau merupakan yang terbesar di Indonesia dan hanya sebagian kecil yang diolah di Provinsi Riau sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor. Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 425.073.163 kilo minyak olahan dari luar. Oleh karena itu, produksi minyak mentah yang dihasilkan idealnya diolah di pabrik yang ada di Provinsi Riau dengan meningkatkan jumlah pabrik dan atau meningkatkan kapasitas olah pabrik yang ada.

Gambar 2.11.
Produksi Pertambangan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2011, 2012, 2013 dan 2014).

Keterangan: Tahun 2014 merupakan angka prediksi

Produksi gas bumi Provinsi Riau memiliki tren meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11. Pada tahun 2010, produksi gas bumi Provinsi Riau sebesar 3.077,61 juta MSCF (*million standart cubic feed*), meningkat menjadi 10.960,32 juta MSCF. Pada tahun 2014, produksi gas bumi Provinsi Riau akan meningkat menjadi 15.056,56 juta MSCF. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan produksi gas bumi Provinsi Riau meningkat sebesar 37,37% per tahun.

Produksi pertambangan batubara memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, produksi batubara Provinsi Riau masih sebesar 2,74 juta metrik ton, menurun menjadi 2,06 juta metrik ton tahun 2013. Pada tahun 2014, produksi batubara Provinsi Riau akan menurun menjadi 1,91 juta metrik ton. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan produksi batubara Provinsi Riau menurun sebesar 6,92% per tahun. Produksi batubara Provinsi Riau ini turut mendukung ketersediaan energi bagi industri yang ada di Provinsi Riau.

3) Industri

Potensi ketersediaan bahan baku CPO, kelapa, karet dan minyak mentah yang tersedia dalam jumlah yang besar di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.10 dan Gambar 2.11, selama ini sebagian besar di ekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit, kelapa, karet serta pengolahan minyak bumi relatif tidak berkembang. Pengembangan industri hilir perlu dilakukan agar nilai tambah dapat diperoleh oleh Provinsi Riau, pengembangan industri hilir ini tidak saja meningkatkan devisa negara dan PDRB Provinsi Riau tetapi juga akan membuka lapangan kerja dan menggerakkan industri pendukung lainnya. Pengembangan industri hilir pengolahan kelapa sawit dan kelapa di Provinsi Riau sudah menjadi kebijakan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Menteri perindustrian melalui Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 13/M-IND/PER/I/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 111/M-IND/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit. Peraturan Menteri Perindustrian ini telah menetapkan Provinsi Riau sebagai klaster industri hilir kelapa sawit. Sasaran jangka menengah (2010 – 2014) adalah (1) terbentuk klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Riau dan (2) iklim usaha dan investasi yang kondusif. Sasaran jangka panjang (2015 –

2025) adalah (1) memperluas pengembangan produk akhir, (2) terbentuknya *center of excelent* industri oleokimia, (3) penguasaan pasar, (4) pemantapan industri berwawasan lingkungan, dan (5) terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Riau.

Perencanaan pengembangan industri hilir kelapa sawit di Provinsi Riau telah dimulai sejak tahun 2010 hingga 2013 meliputi:

1. *Feasibility Study* Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok Inhil, Tahun 2010 oleh Bappeda Provinsi Riau.
2. Penyusunan Dokumen *Existing* Infrastruktur Fisik dan Non Fisik serta Rancangan Umum Pengembangan Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok Inhil, Tahun 2011 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
3. Identifikasi dan Inventarisasi Kepemilikan Lahan Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok (30% Dumai dan 100 % Kuala Enok), Tahun 2011 oleh Bappeda Provinsi Riau.
4. Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok Inhil, Tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
5. Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Klaster IHKS Kuala Enok Inhil, Tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indragiri Hilir.
6. Penyusunan *Business Plan* Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok Inhil, Tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
7. Penyusunan PERDA Penetapan Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok Inhil, Tahun 2012 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
8. Penyusunan PERDA Badan Pengelola Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok Inhil, Tahun 2012 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
9. Penyusunan Blok Plan dan Animasi Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai dan Kuala Enok, Tahun 2012.
10. Penyusunan Dokumen AMDAL Kawasan Klaster IHKS Pelintang Dumai, Tahun 2013 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.

11. Identifikasi dan Inventarisasi Kepemilikan Lahan Kawasan Klaster IHKS Pelintung Dumai (70% Dumai), Tahun 2013 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau.
12. Rencana Penyertaan Modal pada Badan Pengelola Kawasan Klaster IHKS Pelintung Dumai dan Kuala Enok (APBDP), Tahun 2013 oleh Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau.
13. Rencana Penyusunan Dokumen Identifikasi dan Inventarisasi Existing Pengembangan dan Teknologi IHKS pada perusahaan dan Perguruan Tinggi dan Lembaga Terkait lainnya, Tahun 2013 oleh Kementerian Perindustrian (Dekon).
14. Rencana Pembebasan Lahan Kawasan IHKS Pelintung Dumai dan Kuala Enok, Tahun 2014 oleh Badan Pengelola.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia juga menetapkan Provinsi Riau menjadi wilayah pengembangan industri pengolahan kelapa melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor. 131/M-IND/PER/12/2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Industri Pengolahan Kelapa. Perencanaan Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Riau dimulai tahun 2013 dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan hubungan baik antar anggota klaster.
- b. Mengevaluasi hambatan/kendala dalam pengembangan klaster.
- c. Meningkatkan kerjasama antar Kabupaten di Riau untuk pemenuhan pasokan bahan baku.
- d. Pemetaan kondisi industri kelapa.
- e. Menetapkan harga pembelian kelapa (kelapa hibrida).

Sasaran jangka menengah (2010 – 2014) pengembangan industri pengolahan kelapa di Provinsi Riau adalah:

- Diprosesnya kelapa menjadi produk olahan kelapa yang mempunyai nilai tambah tinggi.
- Produk sudah mengacu pada standardisasi seperti SNI, CODEX dan lainnya.
- Pengembangan (modifikasi) teknologi pengolahan kelapa.
- Pencegahan ekspor kelapa bulat (belum diolah).

- Peningkatan utilitas kapasitas produksi pengolahan kelapa rata-rata 5% per tahun.
- Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong.
- Penyerapan tenaga kerja.
- Peningkatan ekspor produk pengolahan kelapa rata-rata 5% per tahun.
- Terbangunnya citra merk Indonesia di pasar internasional.
- Penyebaran sentra produksi di luar Riau.
- Terjaminnya infrastruktur seperti peti kemas, energi listrik dan transportasi.
- Peningkatan iklim investasi.
- Deregulasi kebijakan Pemerintah Pusat.

Sasaran jangka panjang (2015 – 2025) pengembangan industri pengolahan kelapa di Provinsi Riau adalah:

- Dicapainya diversifikasi produk olahan kelapa.
- Berkembangnya industri pengolahan kelapa secara terpadu di Provinsi Riau

4) Pariwisata

Provinsi Riau memiliki daya tarik pariwisata yang dapat dikembangkan sehingga menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Namun daya tarik wisata yang ada di Provinsi Riau belum dikembangkan dengan baik termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga belum menjadi tujuan wisata dan belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau.

Daya tarik wisata yang dapat dikembangkan di Provinsi Riau antara lain:

1. Wisata Bono, Taman Nasional Tesso Nillo, dan Kawasan Lindung Kerumutan di Kabupaten Pelelawan;
2. Candi Muara Takus, Desa Pulau Belimbing, Kawasan PLTA Koto Panjang, Kawasan Wisata Kampar Kiri Hulu di Kabupaten Kampar;
3. Benteng Tujuh Lapis, Wisata Rohani di Binuang Sakti, Air Panas Hapanasan, Air Terjun Aek Matua, Kawasan Hulu Sungai Rokan dan Bukit Setungkuih Nasi di Kabupaten Rokan Hulu;
4. Pacu Jalur, Kawasan Wisata Kebun Nopi, Air Terjun Guruh Gemurai dan Air Terjun Tujuh Tingkat di Kabupaten Kuantan Singingi;

5. Festival Bakar Tongkang, Kawasan Wisata Rantau Bais dan Kawasan Wisata Pulau Jemur di Kabupaten Rokan Hilir;
6. Kawasan Pekanbaru Water Front City, Kawasan Bandar Serai, Danau Bandar Kayangan, Kawasan Agro Wisata Marpoyan, Kawasan wisata TAHURA SSH di Kota Pekanbaru;
7. Istana Siak Sri Indrapura dan Desa Mempura, event pariwisata Siak Bermadah di Kabupaten Siak.
8. Kawasan Wisata Pulau Rupert, Pantai Selat Baru, Pantai Prapat Tunggal Desa Meskom, Kawasan Biosfir Giam Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis.
9. Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Makam Raja-raja Indragiri Kota Lama, Danau Raja dan Danau Menduyan di Kabupaten Indragiri Hulu.
10. Pantai Solop, Bukit Berbunga, Wisata Religi Makam Syech Abdurrahman Siddiq, Event Pariwisata Sampan Leper dan Manongkah di Kabupaten Indragiri Hilir.
11. Pantai Teluk Makmur, Kawasan Mangrove, Danau Bunga Tujuh di Kota Dumai.
12. Event Wisata Bokor, Kawasan Mangrove dan Kawasan Wisata Tasik di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Apabila daya tarik wisata alam dan wisata budaya yang ada di Provinsi Riau dikembangkan dan didukung dengan sarana/prasarana yang baik akan menarik wisatawan domestik dan mancanegara sehingga kontribusinya akan signifikan dalam perekonomian di Provinsi Riau. Selain daya tarik wisata alam dan budaya, Provinsi Riau juga berpotensi untuk dikembangkan untuk menjadi daerah tujuan wisata MICE (*Meeting, Incentive, Conference dan Exhibition*) dan Wisata Minat Khusus, dengan memanfaatkan keunikan alam, sarana dan prasarana olah raga yang telah dibangun dalam rangka PON XVIII Tahun 2012, serta sarana MICE yang telah dimiliki pihak swasta.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam yang sering terjadi setiap tahunnya di Provinsi Riau adalah banjir dan kebakaran hutan/lahan. Bencana alam lainnya seperti gempa dan tsunami belum pernah terjadi. Bencana banjir yang terjadi berakibat kepada kerusakan dan bahkan kematian terutama terjadi di wilayah sekitar tepian sungai Indragiri (Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir), Sungai

Siak (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis), Sungai Kampar (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan), dan Sungai Rokan (Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Rokan Hilir). Selama periode 2010 – 2013, frekuensi, korban dan kerusakan rumah cenderung semakin meningkat. Kondisi ini erat kaitannya dengan semakin tingginya kerusakan hutan dan semakin dangkalnya sungai serta semakin berkurangnya/hilangnya *cacthment area*.

Tabel 2.13.
Bencana Alam Banjir dan Korban Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/ Kota	Frek	Korban (Jiwa)		Rumah (Unit)		Bantuan
			Mati	Menderita	Hancur	Rusak	Beras (Kg)
1	Kuantan Singingi	1	-	1.360	-	-	2.000
2	Indragiri Hulu	0	-	-	-	-	2.000
3	Indragiri Hilir	11	4	1.175	267	-	4.000
4	Pelalawan	2	2	5.904	-	-	2.000
5	Siak	0	-	210	-	-	-
6	Kampar	4	-	8.297	-	-	2.400
7	Rokan Hulu	6	-	14.588	-	-	1.500
8	Bengkalis	-	-	-	-	-	3.000
9	Kep. Meranti	-	-	-	-	-	-
10	Rokan Hilir	-	-	-	-	-	2.000
11	Pekanbaru	5	-	15.576	-	-	3.000
12	Dumai	-	-	-	-	-	2.0 00
2013		29	4	46.900	267	-	23.900
2012		27	2	16.134	188	-	22.700
2011		12	-	7.669	315	-	28.200
2010		27	3	54.253	225	14	61.605

Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

Bencana alam dan korban terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, namun bencana banjir besar yang memberikan dampak negatif pada tahun 2013 ditunjukkan Tabel 2.13. Kabupaten Indragiri Hilir merupakan kabupaten yang frekuensi banjirnya terbesar diikuti Kabupaten Rokan Hulu, Pekanbaru, Kampar dan Pelalawan. Korban menderita terbesar akibat bencana banjir terdapat di Kota Pekanbaru, diikuti Kabupaten Rokan Hulu, Kampar dan Pelalawan. Jumlah rumah yang hancur akibat bencana alam hanya dijumpai di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebanyak 267 unit rumah .

Bencana alam kebakaran hutan dan lahan (gambut) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.11, bukan saja berakibat kepada menurunnya kualitas udara di Provinsi

Riau menjadi “sangat tidak sehat” sehingga berdampak kepada kesehatan, juga telah mengganggu penerbangan serta hubungan baik dengan negara tetangga. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau telah mencapai Singapura dan Malaysia. Oleh karena itu, upaya meminimalisir kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi prioritas penanganan bencana di Provinsi Riau.

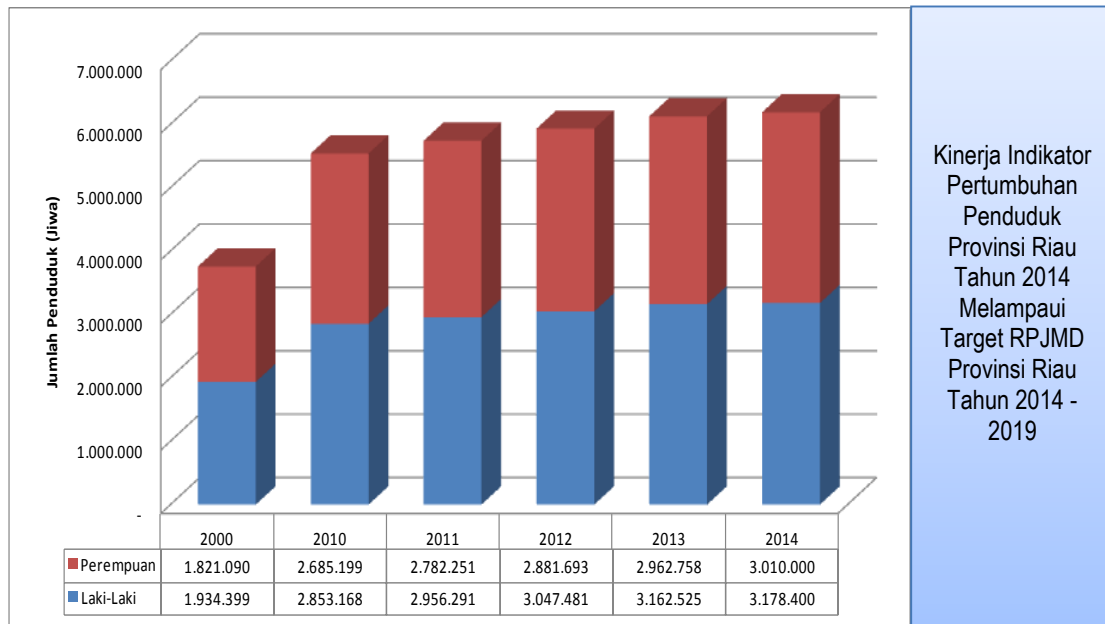
2.1.1.4. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Riau berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2000 berjumlah 3.755.485 jiwa sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.12 terdiri dari 1.982.086 laki-laki dan 1.821.086 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.162.289 rumah tangga dan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4,09 jiwa. Hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 5.538.367 jiwa yang terdiri dari 2.853.168 laki-laki dan 2.685.199 perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 1.367.034 rumah tangga dan rata-rata penduduk per rumah tangga sebanyak 4 jiwa. Selama periode 2000 – 2010, rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau meningkat sebesar 3,96% per tahun.

Pada periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 2,64% per tahun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.12. Pada periode ini, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Provinsi Riau lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk Indonesia (1,40%/tahun) dan Sumatera (1,70%/tahun). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau hanya dilampaui oleh laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kepulauan Riau (3,16%/tahun).

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2018 telah ditetapkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Riau tahun 2014 sebesar 3,20%. Pada tahun 2014, BPS Provinsi Riau memperkirakan jumlah penduduk Provinsi sebanyak 6.188.400 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 3,03%. Pencapaian realisasi kinerja persentase pertumbuhan penduduk Provinsi Riau tahun 2014 melebihi target yaitu sebesar 105,61% atau lebih besar 5,61% dari target. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pertumbuhan penduduk yang melebihi target perlu terus dipertahankan. Catatan, dalam penilaian pencapaian indikator adalah sebagai berikut: Indikator dinyatakan melampaui target jika kinerja <105%, relatif sesuai target jika kinerja 95% – 104,99% dan tidak mencapai target jika kinerja < 95%.

Gambar 2.12.
Jumlah Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

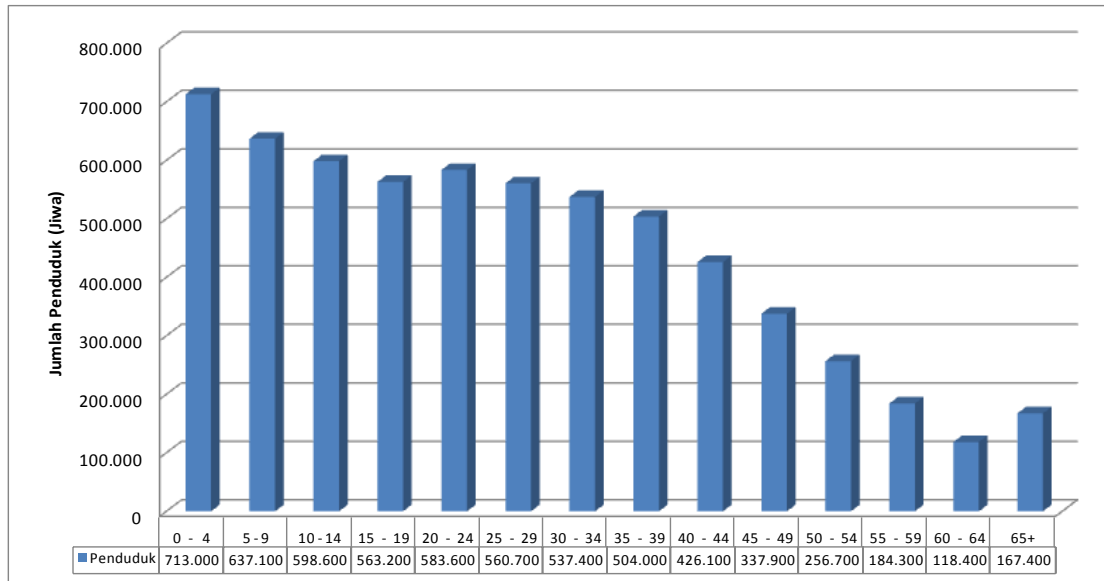


Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

Catatan: Indikator Melampaui Target jika Kinerja < 105%, Relatif Sesuai Target jika Kinerja 95% – 104,99% dan Tidak Mencapai Target jika Kinerja < 95%.

Jumlah penduduk Provinsi Riau menurut kelompok umur tahun 2014 ditunjukkan pada Gambar 2.13. Rasio jumlah penduduk menurut kelompok umur antara penduduk laki-laki dengan perempuan relatif sama. Kelompok umur 0 – 4 tahun, 5 – 9 tahun dan 10 - 14 tahun) merupakan 3 kelompok umur dengan persentase tertinggi. Persentase penduduk dengan kelompok umur terbesar ada pada kelompok umur 0 – 4 tahun yaitu sebesar 11,52% dari total penduduk Provinsi Riau tahun 2014, diikuti kelompok umur 5 – 9 tahun (10,30%), kelompok umur 10 – 14 tahun (9,57%). Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Riau sudah mulai memasuki periode ‘bonus demografi’ sehingga perluantisipasi dini. Bila kelompok umur ini dikelompokkan lagi menjadi kelompok umur tidak produktif (0 – 14 tahun dan 55+) dan produktif (15 – 54 tahun) memperlihatkan bahwa rasionya 39,09% tergolong umur tidak produktif dan 60,91% tergolong umur produktif. Rasio antara jumlah penduduk produktif dan jumlah penduduk tidak produktif di Provinsi Riau relatif cukup ideal.

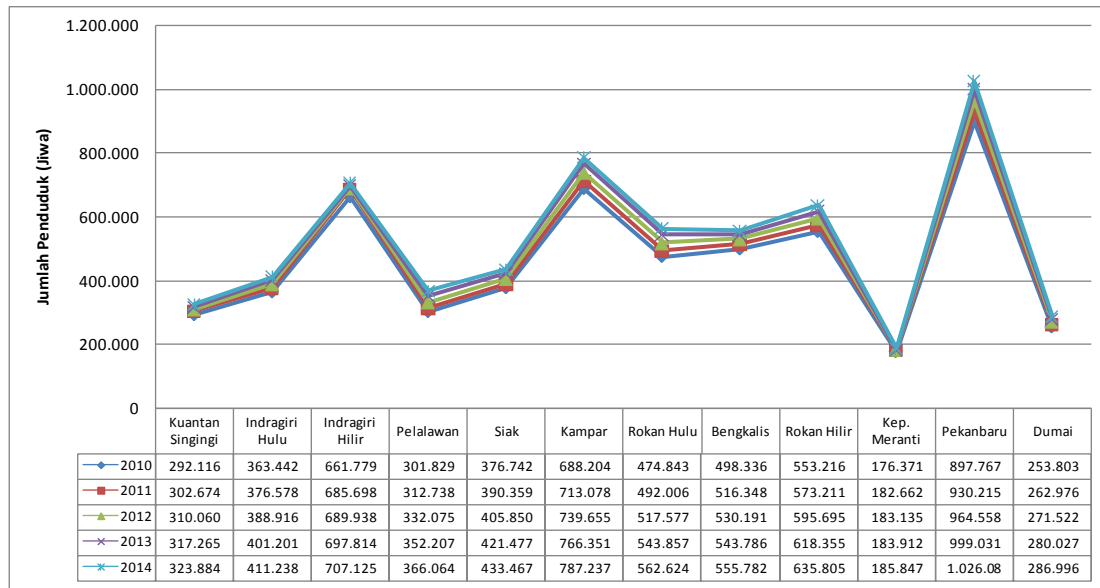
Gambar 2.13
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014
di Provinsi Riau Tahun



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014).

Penyebaran penduduk Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota ditunjukkan pada Gambar 2.14. Pada tahun 2014, Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau mempunyai penduduk terbesar di Provinsi Riau yaitu sebanyak 1,03 juta jiwa atau 16,33% dari total penduduk Provinsi Riau. Kelompok Kabupaten/Kota lainnya yang mempunyai penduduk yang cukup tinggi adalah Kabupaten Kampar yaitu sebanyak (12,53%), Kabupaten Indragiri Hilir (11,26%), dan Kabupaten Rokan Hilir (10,12%). Kelompok Kabupaten yang mempunyai penduduk sedikit adalah Kabupaten Kepulauan Meranti (2,96%) diikuti Kota Dumai (4,56%), Kabupaten Kuantan Singingi (5,16%) dan Kabupaten Pelalawan (5,83%). Selama periode 2010 - 2014, rata-rata pertumbuhan penduduk terbesar dan lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau (2,55%/tahun) adalah Kabupaten Pelalawan (3,93%/tahun) diikuti Rokan Hulu (3,45%/tahun), Siak (2,84%/tahun), Kampar (2,73%/tahun) dan Pekanbaru (2,71%/tahun).

Gambar 2.14.
Penduduk Menurut Kabupaten Kota Tahun 2010 -2014 di Provinsi Riau



Sumber : BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2014)

Keterangan: Tahun 2014 merupakan angka prediksi

Relatif tingginya pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau khususnya 5 Kabupaten/Kota didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor kelahiran relatif kecil (sekitar 1,5% per tahun). Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk yang tinggi adalah berupa pertambahan angkatan kerja, memperluas potensi pasar, berkembangnya upaya potensi sumber daya yang ada di daerah, menarik investasi baru, dan berkembangnya suatu wilayah/kawasan sehingga terjadinya pemekaran wilayah. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya penduduk miskin, jumlah pengangguran, terjadinya degradasi lingkungan hidup (perambahan hutan) dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik lainnya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 3 fokus yaitu (i) fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (ii) fokus kesejahteraan sosial dan (iii) fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini pemerataan pendapatan, indeks ketimpangan Williamson, persentase penduduk di atas garis kemiskinan dan angka kriminilitas yang tertangani.

1) Pertumbuhan Ekonomi

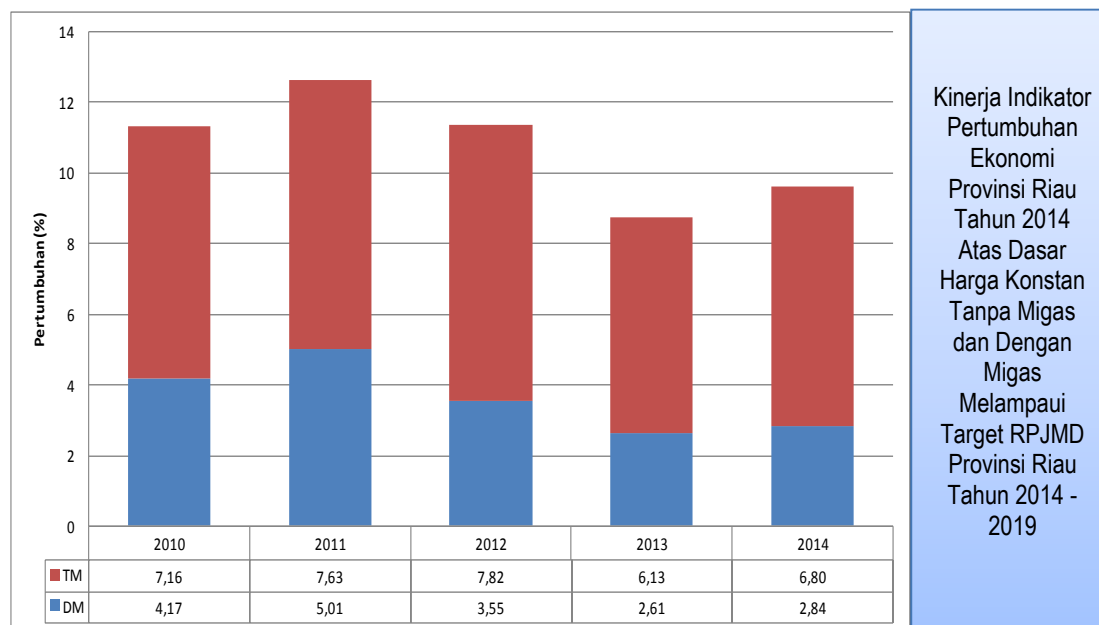
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang menunjukkan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan kedalam 9 sektor yaitu (1) Pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan dan perikanan, (2) Pertambangan dan penggalan, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas dan air, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Angkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, sewa bangunan, dan jasa perusahaan, dan (9) Jasa-jasa.

PDRB atas dasar harga konstan (riil) menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan dengan migas (DM) dan tanpa migas (TM) tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.15. Selama periode 2010 – 2012, pertumbuhan ekonomi tanpa migas terus meningkat kecuali tahun 2013 menurun dan bahkan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia (6,25%). Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ini merupakan kali pertama dalam 1 dekade terakhir.

Pada RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2014 atas dasar harga konstan tanpa migas ditargetkan meningkat menjadi 6,31% dan atas dasar harga konstan dengan migas meningkat menjadi 2,41%. Realisasi pertumbuhan ekonomi pada harga konstan tanpa migas hingga kuartal III tahun 2014 sebesar 6,80%, sehingga nilai realisasi kinerja indikator pertumbuhan ekonomi pada harga konstan tanpa migas melampaui target yaitu sebesar 110,39% atau lebih tinggi sebesar 10,39% dari target. Nilai realisasi kinerja indikator pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan dengan migas juga melampaui target yaitu sebesar 108,21 persen atau lebih tinggi sebesar 8,21% dari target. Pada akhir tahun 2014, pertumbuhan

ekonomi atas dasar harga konstan tanpa migas sekitar 6,15% dan dengan migas sekitar 2,62%.

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014
Atas dasar Konstan Tanpa Migas (TM) dan Dengan Migas (DM) Provinsi Riau



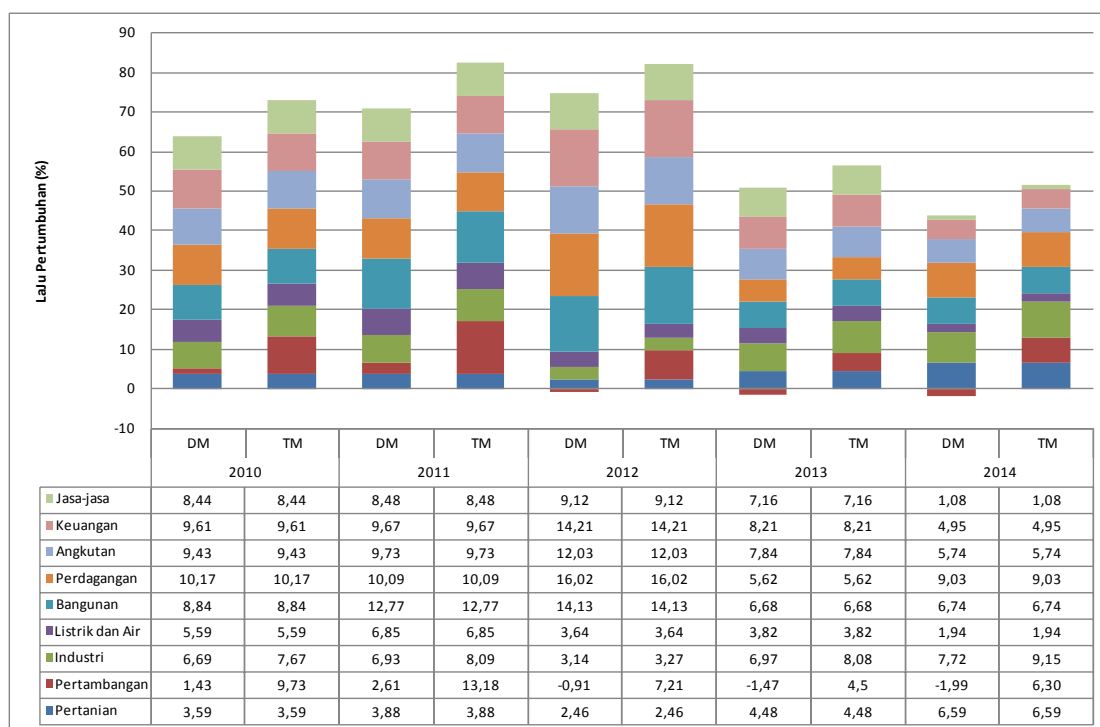
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014).

Keterangan: Tahun 2014 merupakan pertumbuhan hingga triwulan III.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2014 atas dasar harga konstan tanpa migas yang relatif lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah sektor industri pengolahan; sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pertanian; dan sektor bangunan. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 9,15% dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan (sumber pertumbuhan) ekonomi Provinsi Riau sebesar 1,59%. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 9,03% dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,82%. Sektor pertanian tumbuh sebesar 6,59% dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 2,06%. Sektor bangunan tumbuh sebesar 6,74% dan memberikan kontribusi sebesar 0,54%. Pertumbuhan sektor-sektor lainnya relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2013 dengan kontribusi terhadap pertumbuhan (sumber pertumbuhan) kecil dari 0,5%.

Gambar 2.16

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2010 – 2014
Menurut Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas dan Dengan Migas



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014).

Keterangan: Tahun 2014 merupakan pertumbuhan hingga triwulan III.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2014 atas dasar harga konstan dengan migas yang relatif lebih tinggi dibanding tahun 2013 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pertanian dan sektor bangunan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh sebesar 9,03% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,0%. Sektor pertanian tumbuh sebesar 6,59% dengan kontribusi terhadap pertumbuhan sebesar 1,13%. Sektor bangunan tumbuh sebesar 6,74% dengan kontribusi sebesar 0,29%.

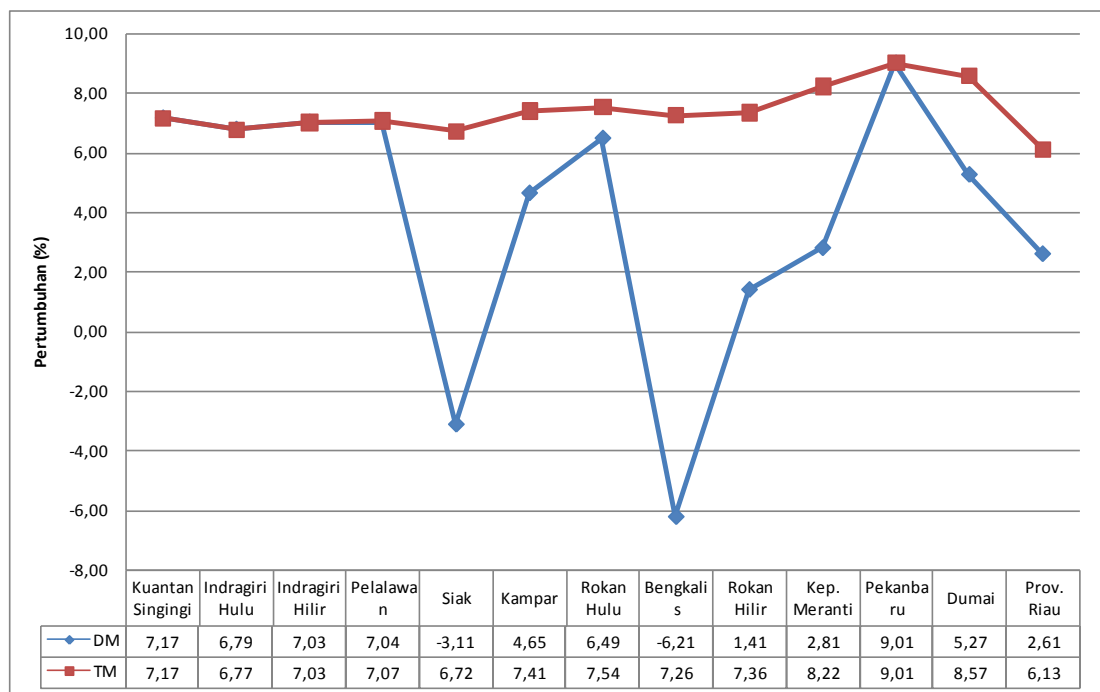
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau atas dasar harga konstan tanpa migas tahun 2013 semuanya di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kota Pekanbaru (9,01%) diikuti oleh Kota Dumai (8,57%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (8,22%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten lainnya berkisar antara 6,72% - 7,54%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota tahun 2013 se Provinsi Riau atas dasar harga konstan dengan migas yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi

adalah Kota Pekanbaru (9,01%), diikuti Kabupaten Kuantan Singingi (7,17%), Kabupaten Pelalawan (7,04%), Kabupaten Indragiri Hilir (7,03%), Kabupaten Indragiri Hulu (6,79%), Kabupaten Rokan Hulu (6,49%), Kota Dumai (5,27%), Kabupaten Kampar (4,65%) dan Kepulauan Meranti (2,81%). Pertumbuhan ekonomi Kabupaten se Provinsi Riau atas dasar harga konstan dengan migas yang lebih rendah pertumbuhannya dibanding pertumbuhan Provinsi Riau adalah Bengkalis (-6,21%), Siak (-3,11%) dan Rokan Hilir (1,41%).

Gambar 2.17.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas dan Dengan Migas Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014).

Tingginya ketergantungan migas dalam PDRB di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan Rokan Hilir perluantisipasi melalui pengembangan sumber daya yang dapat diperbaharui. Disisi lain, kabupaten yang rendah sumber daya perlu mendapat dukungan pembangunan yang lebih besar dari Pemerintah Provinsi Riau sehingga ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Riau akan semakin rendah.

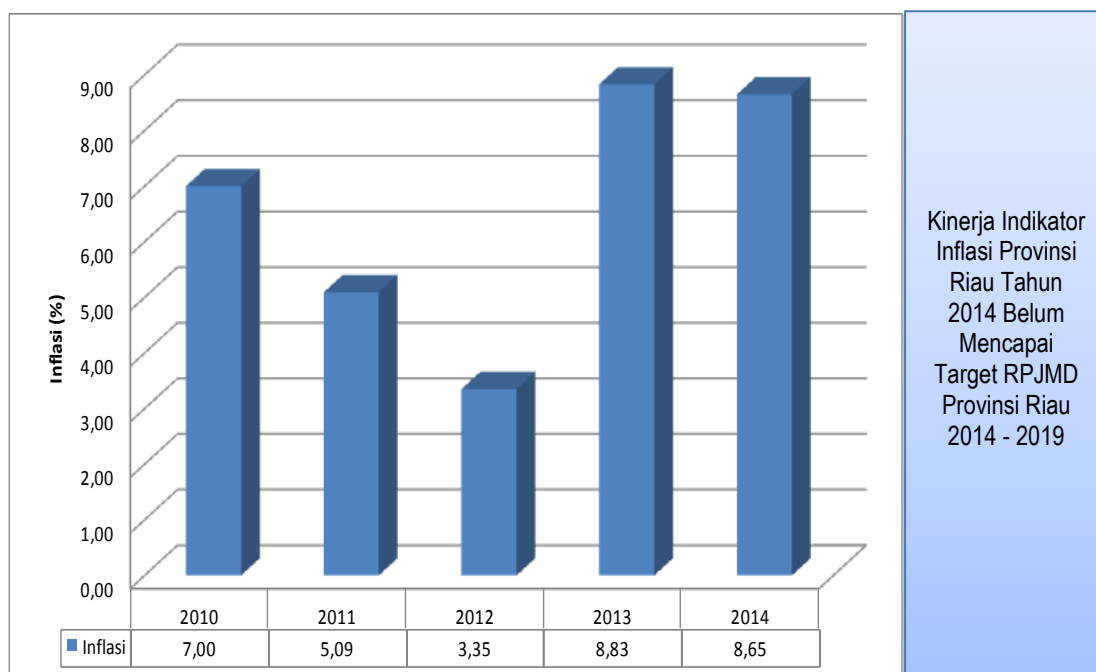
2) Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) Inflasi ringan yaitu di bawah 10% setahun, (ii) Inflasi sedang yaitu antara 10 - 30% setahun, (iii) Inflasi berat yaitu antara 30 - 100% setahun dan (iv) Hiperinflasi yaitu di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.18. Selama periode 2010 – 2014, tren inflasi di Provinsi Riau berfluktuatif meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,03% per tahun. Inflasi yang terjadi di Provinsi Riau selama ini terkategori inflasi ringan. Dibandingkan dengan inflasi yang terjadi di Indonesia, inflasi yang terjadi di Provinsi Riau tahun 2010 - 2014 relatif lebih tinggi dibanding inflasi Indonesia.

Pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, inflasi Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 6,63%. Selama Januari – Desember 2014 terjadi inflasi di Provinsi Riau sebesar 8,65% atau lebih tinggi sebesar 2,02% dari target, sehingga nilai realisasi kinerja indikator inflasi lebih rendah dari target yaitu sebesar 76,65%.

Gambar 2.18.
Laju Inflasi Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



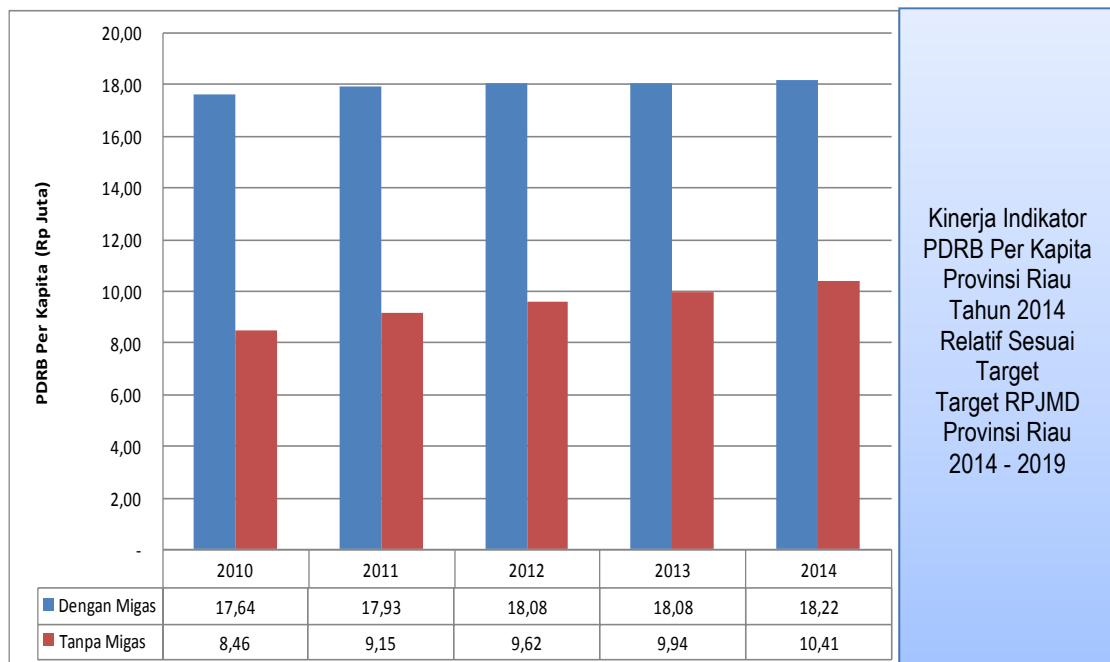
Sumber : BPS Provinsi Riau (<http://www.bps.go.id/aboutus.php?inflasi=1>)

Besarnya sumbangan/andil inflasi selama tahun 2014 di Provinsi Riau menurut kelompok pengeluaran terdiri dari kelompok bahan makanan dengan andil inflasi sebesar 1,91%, kelompok makanan sebesar 2,19%, kelompok perumahan sebesar 1,19%, kelompok sandang sebesar 0,26%, kelompok kesehatan sebesar 0,22%, kelompok pendidikan sebesar 0,22% dan kelompok transpor sebesar 2,22%. Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi antara lain: bensin (premium dan pertamax plus) dengan andil sebesar 0,71%, tarif listrik sebesar 0,63%, piring sebesar 0,57%, rokok kretek filter 0,33%. Cabe rawit, beras, dan nasi dengan lauk masing-masing sebesar 0,29%. Kue kering berminyak dan bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 0,24%, kue basah sebesar 0,18%, cabe hijau sebesar 0,17%, dan solar sebesar 0,16%. Sedangkan yang memberikan andil deflasi antara lain komputer tablet sebesar 0,25%, sawi hijau sebesar 0,19%, bawang merah sebesar 0,18%, daun bawang sebesar 0,07%, pasir sebesar 0,06%, batu bata sebesar 0,04%, daging ayam ras dan ayam hidup masing-masing sebesar 0,02%.

3) PDRB Per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita Provinsi Riau tahun 2010 – 2014 ditunjukkan pada Gambar 2.19. Selama periode ini, PDRB per kapita di Provinsi Riau menunjukkan tren meningkat. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita atas harga konstan tanpa migas meningkat sebesar 4,23% per tahun lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita harga konstan dengan migas yang hanya tumbuh sebesar 0,65% per tahun.

Gambar 2.19.
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tanpa Migas dan Dengan Migas
Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014).

Keterangan: Tahun 2014 merupakan pertumbuhan hingga triwulan III.

Pada tahun 2013, pencapaian PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas sebesar Rp 9,94 juta lebih rendah dibandingkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas Indonesia (Rp 10,15 juta). Di Sumatra, PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas Provinsi Riau ini berada di bawah Provinsi Kepulauan Riau (Rp 25,67 juta) dan Sumatera Utara (Rp 10,43 juta).

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 telah ditargetkan bahwa PDRB per kapita tahun 2014 atas dasar harga konstan tanpa migas sebesar Rp 10,11 juta. Realisasi PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas hingga kuartal III tahun 2014 sebesar Rp 10,41 juta, sehingga nilai realisasi kinerja indikator kinerja PDRB per kapita atas dasar harga konstan tanpa migas relatif sesuai target yaitu sebesar 102,96% meski lebih tinggi sebesar 2,96%.

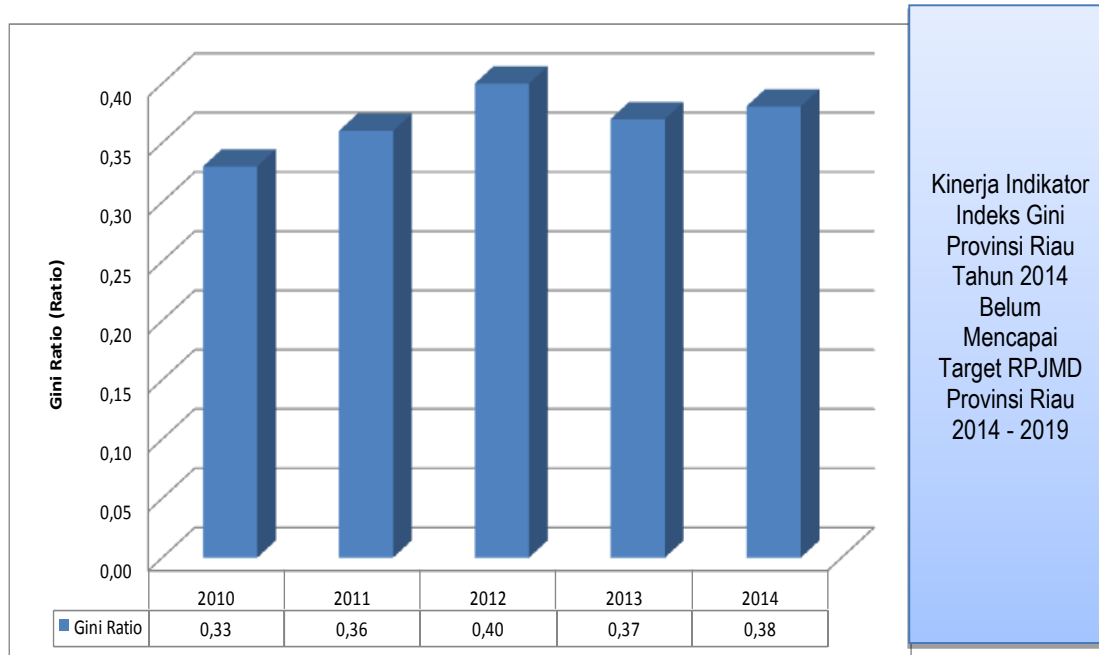
4) Indeks Gini Pemerataan Pendapatan

Dinegara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk dan perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan. Distribusi pendapatan dapat diukur

menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan bahwa untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidak-merataan sedang jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika angka indeks gini antara 0,2 sampai 0,35.

Di Provinsi Riau, selama periode 2010 – 2014, angka indeks gini berfluktuatif meningkat dengan kisaran indeks antara 0.33 – 0.40. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa selama periode ini distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata (Tahun 2010) ke tidak-merataan sedang (Tahun 2011 – Tahun 2014). Pergerakan kategori relatif merata menjadi tidak-merata sedang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau kedepan.

Gambar 2.20.
Indeks Gini (Pemerataan Pendapatan) Tahun 2010 – 2014
Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 telah ditargetkan bahwa indeks gini (*gini ratio*) sebesar 0,35. Realisasi indeks gini tahun 2014 diperkirakan sebesar 0,38 sehingga nilai realisasi kinerja indikator kinerja indeks gini lebih rendah dari target dimana pencapaiannya sebesar 94,93% atau lebih rendah sebesar 8,07%.

Pada tahun 2013, pencapaian indeks gini Provinsi Riau sebesar 0,37 lebih rendah dibandingkan indeks gini Indonesia (0,41) meski berada dalam kelompok yang sama yaitu ketidak-merataan sedang. Bila dibandingkan dengan Provinsi tetangga, angka indeks gini Provinsi Riau lebih tinggi dibanding indeks gini Provinsi Sumatera Utara (0,35), Sumatera Barat (0,36), Kepulauan Riau (0,36) dan Jambi (0,35).

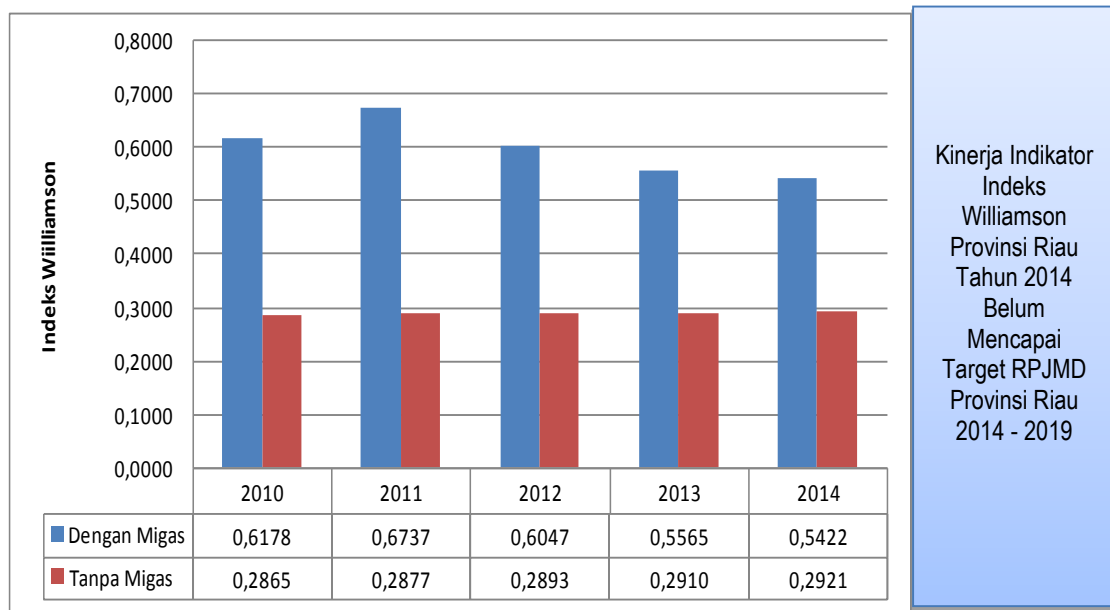
5) Indeks Ketimpangan Williamson

Indeks ketimpangan Williamson digunakan untuk mengukur besarnya ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Dasar perhitungannya adalah menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per Kabupaten/Kota. Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

- Jika ketimpangan Williamson mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.
- Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Selama periode 2010 – 2014, indeks ketimpangan williamson yang diukur dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan migas menunjukkan tren menurun dan tanpa migas menunjukkan tren meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.21. Pada tahun 2010, indeks ketimpangan atas dasar harga konstan sebesar 0.2865 meningkat menjadi 0.2921 pada tahun 2014. Angka indeks ini hampir mendekati nol sehingga dapat disimpulkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan per kapita tanpa migas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau relatif rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indeks ketimpangan distribusi pendapatan per kapita tanpa migas di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,39% per tahun.

Gambar 2.21.
Indeks Williamson Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 telah ditargetkan bahwa angka indeks Williamson tahun 2014 atas dasar harga konstan tanpa migas turun menjadi 0,25. Pada tahun 2014, diperkirakan angka indeks Williamson justru meningkat menjadi 0,2921 sehingga nilai realisasi kinerja indikator indeks Williamson lebih rendah dari target dengan pencapaiannya sebesar 85,58% atau lebih rendah sebesar 14,41%.

Bila indeks ketimpangan Williamson diukur dari PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan migas menunjukkan tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, indeks ketimpangannya sebesar 0.6178, menurun menjadi 0.5422 pada tahun 2014. Meski indeks ketimpangan yang diukur dari PDRB per kapita dengan migas ini cenderung menurun, namun lebih mendekati satu sehingga dapat dikategorikan ketimpangan distribusi pendapatan per kapita atas dasar harga konstan dengan migas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau relatif tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata. Hal ini dimungkinkan karena hanya sebagian Kabupaten saja yang memiliki sumber daya migas yang besar di Provinsi Riau seperti Kabupaten Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Kampar sedangkan Kabupaten/Kota lainnya relatif kurang/tidak memiliki sumber daya migas. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan

indeks ketimpangan distribusi pendapatan atas dasar harga konstan dengan migas antara Kabupaten/Kota di Provinsi Riau menurun sebesar – 2,58% per tahun.

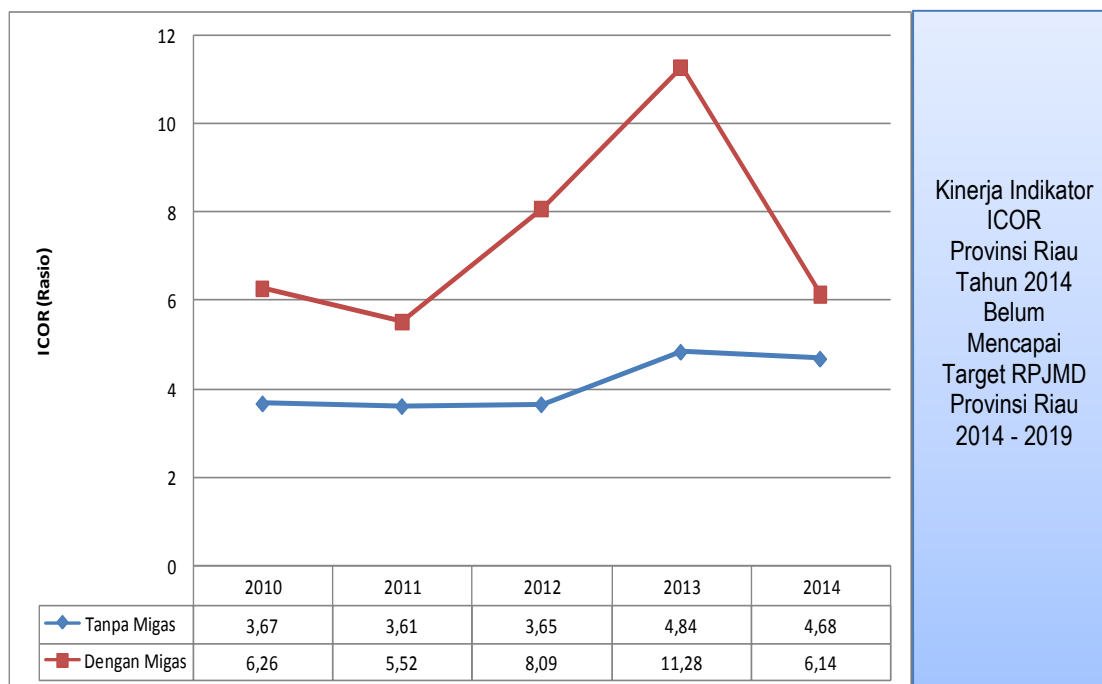
6) Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi baru) yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam, sementara unit output relatif tidak berbeda maka penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Formulasi penghitungan ICOR merupakan statistik yang menunjukkan kebutuhan perubahan stok kapital untuk menaikkan satu unit output (Perubahan Kapital/Perubahan Output). Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan modal baru atau perubahan stock kapital melainkan Investasi (I) yang ditanamkan oleh swasta maupun pemerintah sehingga ICOR dimodifikasi menjadi rasio Investasi terhadap perubahan output, dimana faktor-faktor selain investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

Selama periode 2010 – 2014, ICOR Provinsi Riau atas dasar harga konstan tanpa migas memiliki tren berfluktuatif meningkat dan dengan migas berfluktuatif menurun dengan rata-rata pertumbuhan masing-masingnya sebesar 5,00% dan -0,40% per tahun. ICOR Provinsi Riau tahun 2014 yang merupakan angka prediksi menggunakan formulasi rasio perkiraan investasi terhadap perkiraan perubahan output diperoleh sebesar 4,68 (atas dasar harga konstan tanpa migas) dan 6,14 (atas dasar harga konstan dengan migas). Angka ini menunjukkan bahwa untuk menaikkan 1 unit output diperlukan investasi sebesar 4,68 unit (atas dasar harga konstan tanpa migas) atau 6,14 unit (atas dasar harga konstan dengan migas).

Gambar 2.22.
Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

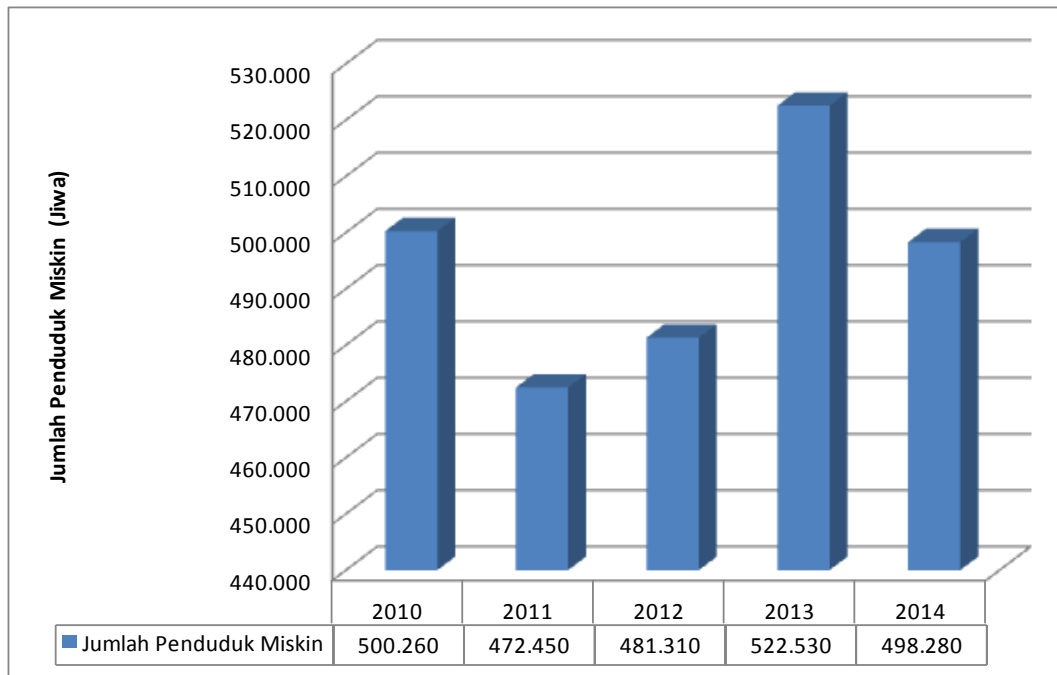
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 telah ditargetkan bahwa ICOR dasar harga konstan tanpa migas turun menjadi 3,68. Pada tahun 2014, diperkirakan ICOR meningkat menjadi 4,68 sehingga nilai realisasi kinerja indikator ICOR lebih rendah dari target dengan pencapaiannya sebesar 78,56% atau lebih rendah sebesar 21,44%.

7) Kemiskinan

Target MDG's untuk penurunan proporsi penduduk miskin dunia adalah menurunkan setengah penduduk miskin dunia dari tahun 1990 hingga tahun 2015. Persentase kemiskinan nasional pada tahun 1990 adalah 15,1% sehingga pada tahun 2015 ditargetkan angka kemiskinan sebesar 7,5%. Pada RPJMN 2010 - 2014, target penurunan angka kemiskinan adalah menurunnya angka kemiskinan menjadi 8% - 10% pada tahun 2014. Namun pencapaian penurunan penduduk miskin Indonesia berfluktuatif, dimana pada tahun 2014, angka kemiskinan Indonesia masih sebesar 8,16%.

Gambar 2.23.
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2014 dan Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2015)

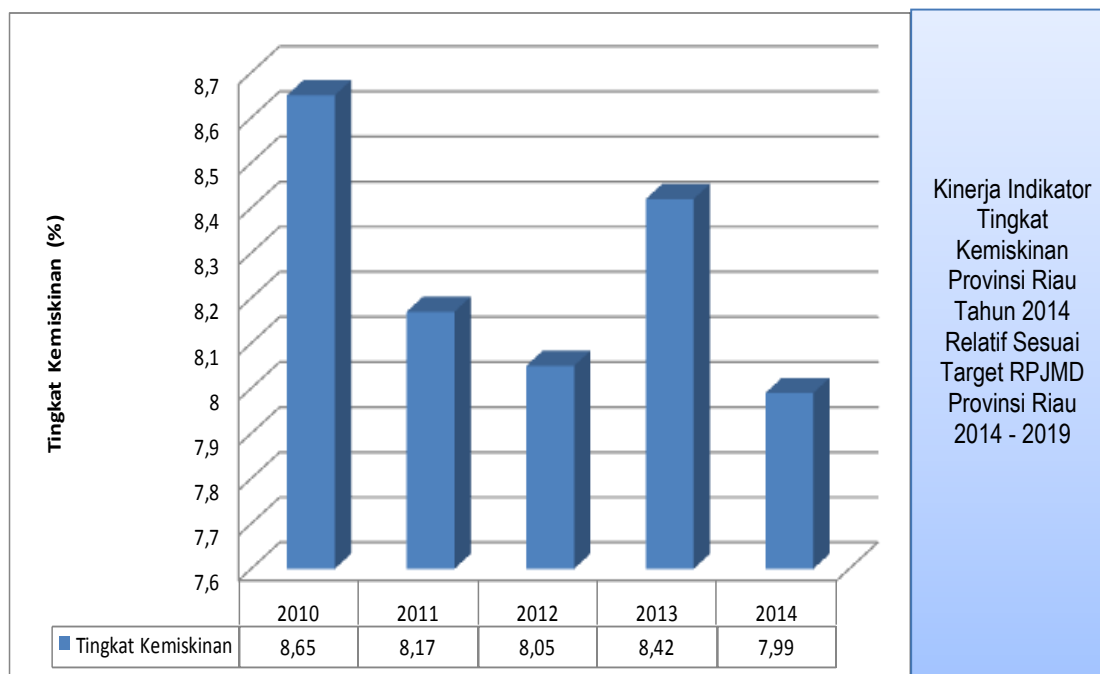
Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin Provinsi Riau sebanyak 500.260 jiwa atau 8,65% dari total penduduk Provinsi Riau menurun menjadi 472.450 jiwa atau 8,17% dari total penduduk Provinsi Riau pada tahun 2011. Pada tahun 2012 - 2014, jumlah penduduk miskin berfluktuatif meningkat dan persentase penduduk miskin berfluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.23 dan Gambar 2.24. Selama periode 2010 – 2013, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau rata-rata meningkat sebesar 1,09% per tahun dan persentase penduduk miskin menurun sebesar -0,67% per tahun.

Tingkat kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 6,53% pada tahun 2014 lebih rendah dari tingkat kemiskinan Indonesia (8,16%) dan tingkat kemiskinan di Sumatera (9,33%). Tingkat kemiskinan Provinsi Riau pada tahun 2014 lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau (5,61%) dan Sumatera Barat (5,41%), meski lebih baik dibanding tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (9,81%), dan Jambi (10,67%).

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, tingkat kemiskinan Provinsi Riau tahun 2014 ditarget turun menjadi 7,90%. Pada November 2014, tingkat

kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 7,99%, sehingga realisasi kinerja indikator tingkat kemiskinan relatif sesuai target yaitu sebesar 98,87% meski lebih rendah sebesar 1,13% dari target.

Gambar 2.24.
Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



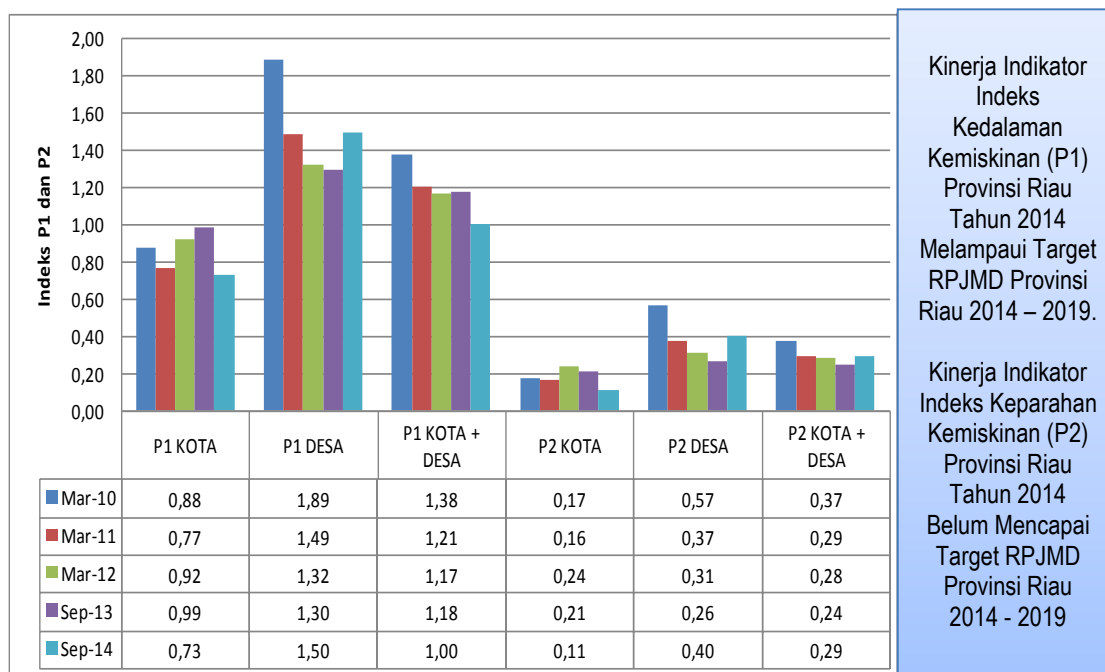
Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2014 dan Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2015)

Meski Pemerintah Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan, namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (P1) kemiskinan (*poverty gap index*) dan tingkat keparahan (P2) kemiskinan (*poverty severity index*). Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu memperkecil jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta ketimpangannya antara Kota dan Pedesaan.

Perkembangan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota dan Desa di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.25. Selama Periode 2010 – 2014, indeks kedalaman (P1) kemiskinan (desa dan kota) memiliki tren berfluktuatif menurun dengan rata-rata pertumbuhan penurunan sebesar -6,24% per tahun. Kondisi yang

relatif sama pada indeks keparahan kemiskinan dengan tren berfluktuatif menurun dan rata-rata pertumbuhan penurunan sebesar -4,89% per tahun.

Gambar 2.25.
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota dan Desa
Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2014 dan Berita Resmi Statistik Provinsi Riau Tahun 2015)

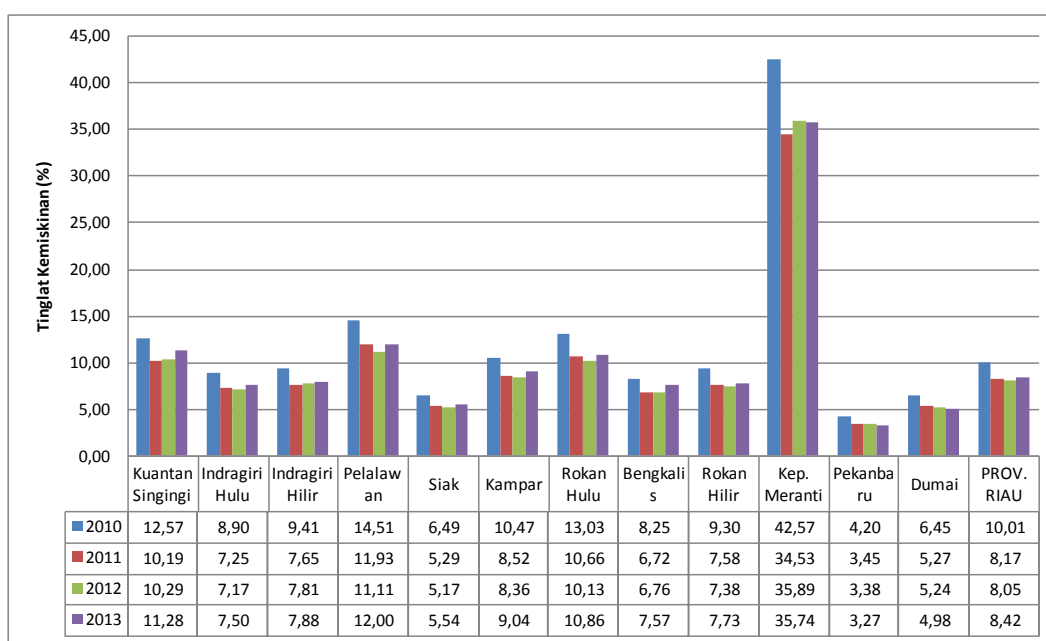
Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan antara kota dengan desa di Provinsi Riau menunjukkan bahwa angka indeks kedalaman antara kota dan desa di Provinsi berbeda cukup signifikan. Indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan pada bulan September 2013 mengalami kenaikan dari 1,299 menjadi 1,501 pada September 2014. Pada masa yang sama, di perkotaan menurun dari 0,989 menjadi 0,728. Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di daerah pedesaan menjauh dari garis kemiskinan sedangkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin perkotaan semakin mendekati ke garis kemiskinan.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) di daerah pedesaan mengalami kenaikan dari 0,263 pada September 2013 menjadi 0,403 pada September 2014. Sebaliknya di daerah perkotaan indeks keparahan kemiskinan (P2) turun dari 0,212 menjadi 0,110. Hal ini berarti terjadi peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di daerah pedesaan sedangkan di daerah perkotaan terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran

penduduk miskin. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat di wilayah pedesaan khususnya pedesaan non perkebunan kelapa sawit.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Riau tahun 2014 ditarget masing-masingnya sebesar 1,09 dan 0,22. Pada September 2014, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Riau sebesar 1,00 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,29. Realisasi kinerja indikator kedalaman kemiskinan (P1) telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 109,00% atau lebih tinggi sebesar 9,00% dari target. Sebaliknya pada realisasi kinerja indikator keparahan kemiskinan (P2) masih di bawah target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76,39% atau lebih rendah sebesar 23,61% dari target yang ditetapkan.

Gambar 2.26.
Tingkat Kemiskinan Tahun 2010 – 2013 Menurut Kabupaten/kota
di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Bila kemiskinan dianalisis menurut kabupaten/kota di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.26 menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan Kabupaten yang baru terbentuk tahun 2009 merupakan kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Riau, dimana

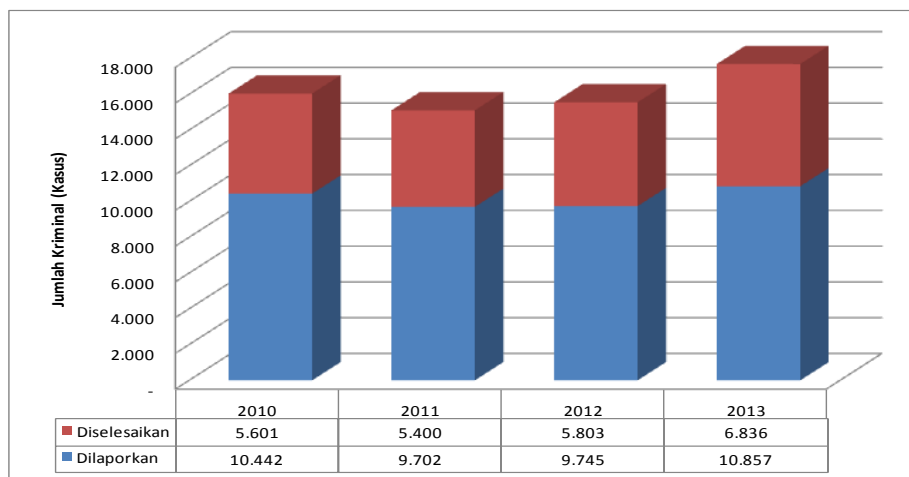
tahun 2013 sebesar 35,74%. Tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti salah satu yang tertinggi di Indonesia. Kabupaten lainnya dengan tingkat kemiskinan yang lebih besar dari tingkat kemiskinan Provinsi Riau tahun 2013 adalah Pelalawan (12,00%), Kuantan Singingi (11,28%), Rokan Hulu (10,86 dan Kampar (9,04%). Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan Provinsi Riau ke depan lebih besar diarahkan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Kuantan Singingi dan Rokan Hulu serta Kampar.

8) Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Tindak kriminal yang tinggi disuatu wilayah tidak saja menurunkan rasa aman dan kesejahteraan penduduk tetapi juga akan melemahkan iklim investasi. Secara teori dinyatakan bahwa faktor penyebab seseorang melakukan tindak kriminal antara lain (1) kemiskinan, (2) kesempatan, (3) Kehendak bebas, keputusan yang hedonistik dan kegagalan dalam melakukan kontrak sosial, (4) Sifat-sifat anti-sosial bawaan, dan (5) hukuman kepada pelaku kriminal yang tidak proporsional.

Gambar 2.27.

Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Tahun 2010 – 2013 Provinsi Riau

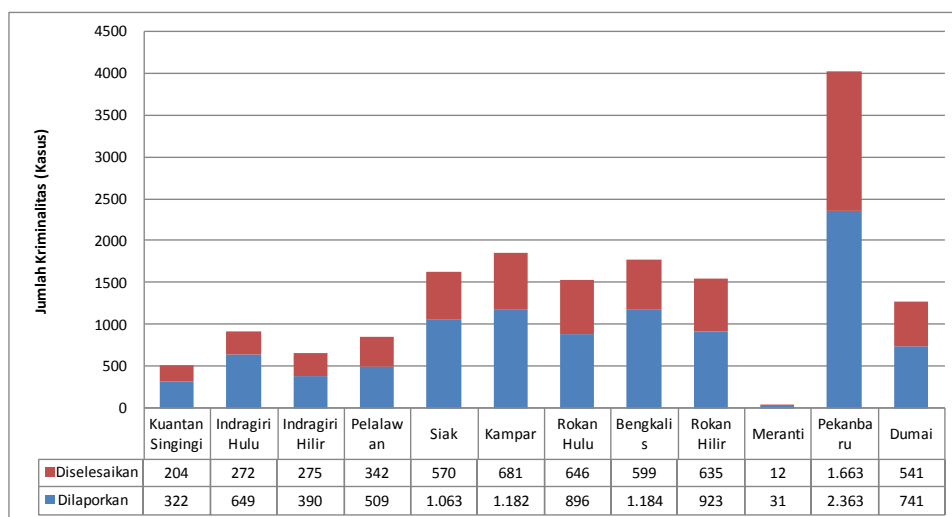


Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2013)

Perkembangan jumlah tindak kriminalitas yang dilaporkan dan yang diselesaikan di Provinsi Riau tahun 2010 – 2013 ditunjukkan pada Gambar 2.27. Selama periode ini, jumlah tindak kriminal dan penyelesaian di Provinsi Riau menunjukkan tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, tindak kriminal yang dilaporkan

sebanyak 10.442 kasus, meningkat menjadi 10.857 kasus pada tahun 2013. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan jumlah kriminalitas meningkat 0,98% per tahun. Penyelesaian kasus kriminal meningkat dari 5.601 kasus (55,64%) menjadi 6.836 kasus (62,96%) dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 5,11% per tahun.

Gambar 2.28.
Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber: BPS (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Polres Kabupaten Kepulauan Meranti masih bersatu dengan Polres Kabupaten Bengkalis

Pada tahun 2013, terdapat lima tindak kriminal yang tertinggi terjadi di Provinsi Riau berdasarkan jenis kriminalitas adalah (i) pencurian dengan pemberatan atau *theft by weighting* sebanyak 1.725 kasus atau 15,89% dari jumlah kasus kriminalitas tahun 2013, (2) Pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor atau *theft by force using a motor vehicle* yaitu sebanyak 982 kasus atau 9,04% dari jumlah kasus kriminalitas dan (iii) Penganiayaan ringan atau *lightweight persecution* yaitu sebanyak 748 kasus atau 6,89% dari jumlah kasus kriminalitas. (iv) Penggelapan atau Embezzement yaitu sebanyak 729 kasus atau 6,71% dari jumlah kasus kriminalitas dan (v) Pencurian biasa atau *ordinary theft* yaitu sebanyak 666 kasus atau 6,13% dari total kasus kriminalitas. Tindak kejahatan yang perlu mendapat perhatian karena melibatkan generasi muda dan tren terus meningkat sejak tahun 2010 (483 kasus) menjadi 760 kasus pada tahun 2013 adalah jenis kriminalitas narkoba. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait untuk penanggulangan kemiskinan dan kesempatan kerja di samping penyadaran dan penegakan hukum perlu semakin ditingkatkan.

Penyebaran kasus kriminalitas menurut Kabupaten/Kota ditunjukkan pada Gambar 2.28. Pada tahun 2013, Kota Pekanbaru merupakan kota dengan yang kasus kriminalitas tertinggi yaitu sebanyak 2.363 kasus atau 23,05% dari total kasus kriminalitas di Provinsi Riau. Kabupaten lainnya yang memiliki kasus kriminalitas yang tinggi adalah Kabupaten Bengkalis (1.184 kasus atau 11,55%), Kampar (1.163 kasus atau 11,53%), dan Siak (1.063 kasus atau 10,37%). Peningkatan jumlah kasus kriminalitas yang cukup tinggi di Kabupaten Siak dan Kabupaten Indragiri Hulu yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 16,20%/tahun dan 12,03%/tahun perlu mendapat perhatian serius karena peningkatan jumlah dan kualitas kriminalitas di dua Kabupaten ini cukup meresahkan masyarakat.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan dianalisis menggunakan indikator IPM, angka harapan hidup, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, pengeluaran per kapita riil, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rasio penduduk yang bekerja.

1) Indek Pembangunan Manusia (IPM)

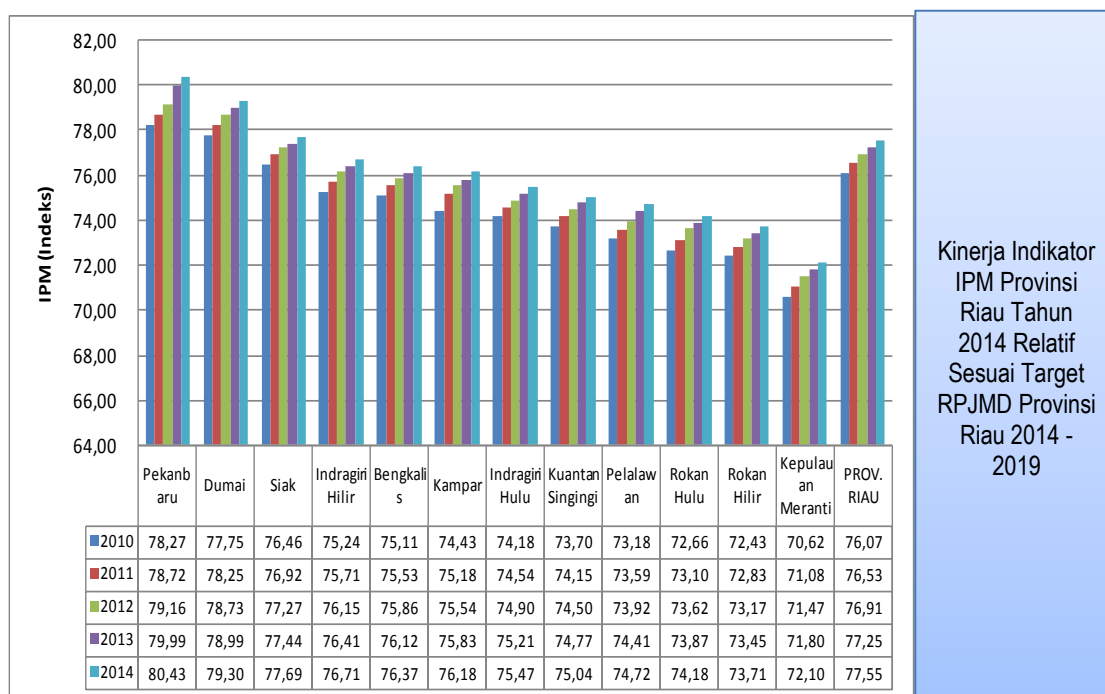
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human Development Index*) adalah salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara/daerah yang dikeluarkan oleh UNDP (*United Nation Development Programe*) dengan menghitung indeks komposit dari tiga indikator utama, yakni kesehatan yang menggunakan variabel usia harapan hidup, pendidikan yang menggunakan variabel jumlah penduduk yang melek huruf dan lamanya menempuh jenjang pendidikan formal, serta indikator ekonomi dengan menghitung tingkat daya beli (*Purchasing Power Parity*).

Pada tahun 2010, IPM Provinsi Riau telah mencapai 76,07 dan terus meningkat menjadi 77,55 pada tahun 2014 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.29. Pada tahun 2013, IPM Provinsi Riau lebih tinggi dari IPM Indonesia (73,81) dan tertinggi di Sumatera. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Riau meningkat sebesar 0,39% per tahun. Satu hal yang perlu menjadi catatan bahwa IPM yang telah diperkirakan dicapai Provinsi Riau pada tahun 2014 sebesar 77,55 masih jauh di bawah standar IPM internasional yaitu sebesar 80. Apabila rata-rata pertumbuhan

IPM Provinsi Riau masih sama dengan rata-rata pertumbuhan periode sebelumnya, Provinsi Riau baru akan dapat mencapai IPM sama dengan 80 pada tahun 2022/2023.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, IPM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 77,96. Pada tahun 2014, IPM Provinsi Riau diperkirakan sebesar 77,55, sehingga realisasi kinerja indikator IPM relatif mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,47%. Pencapaian IPM Provinsi tahun 2014 ini sangat membanggakan dan sekaligus menggambarkan keberhasilan pembangunan di Provinsi Riau serta perlu terus ditingkatkan.

Gambar 2.29.
Indek Pembangunan Manusia Tahun 2010 – 2014
Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

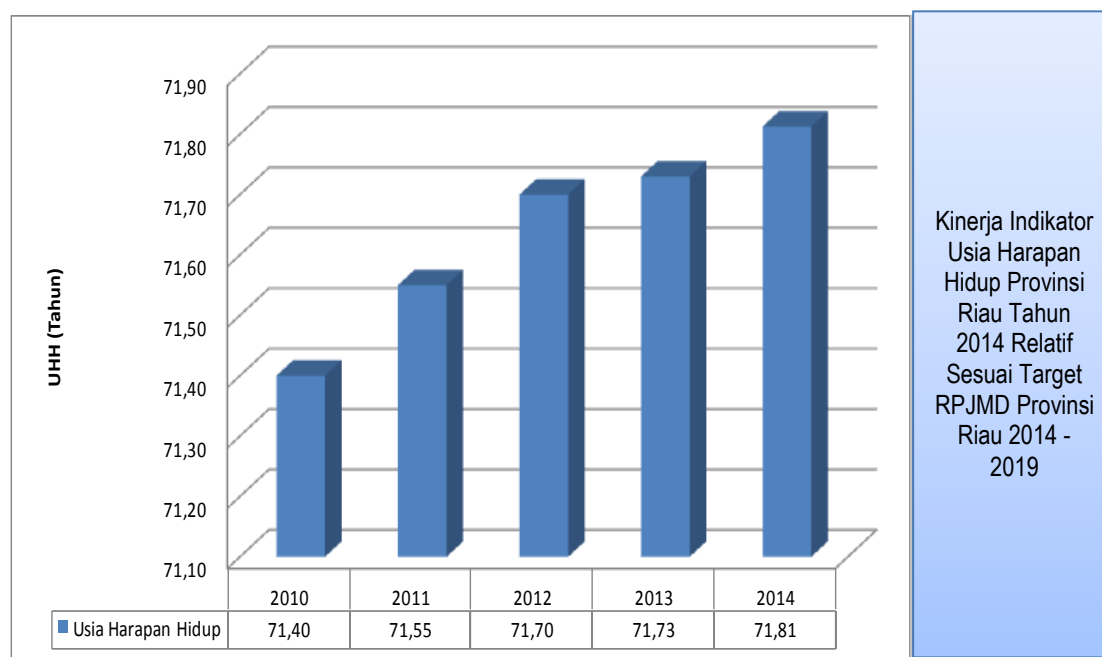
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Bila pencapaian IPM Provinsi Riau tahun 2014 ini di analisis menurut Kabupaten/Kota diketahui bahwa Kota Pekanbaru, Kota Dumai dan Kabupaten Siak memiliki IPM yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau yang masing-masingnya sebesar 80,43; 79,30 dan 77,69. IPM sembilan kabupaten lainnya di bawah IPM Provinsi Riau dengan tiga Kabupaten terendah yaitu Kepulauan Meranti (72,10), Rokan Hilir (73,71) dan Rokan Hulu (74,18).

Komponen pembentuknya IPM terdiri dari usia harapan hidup (UHH), angka melek huruf, lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Selama periode 2010 – 2014, usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau sebesar 74,40 tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 71,81 tahun pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan usia harapan hidup Provinsi Riau meningkat sebesar 0,12% per tahun dan merupakan komponen dengan pertumbuhan terendah kedua setelah angka melek huruf.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, usia harapan hidup dalam IPM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 72,16 tahun. Pada tahun 2014, usia harapan hidup penduduk Provinsi Riau diperkirakan sebesar 71,81 tahun sehingga realisasi kinerja indikator usia harapan hidup relatif mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,51%.

Gambar 2.30.
Usia Harapan Hidup Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

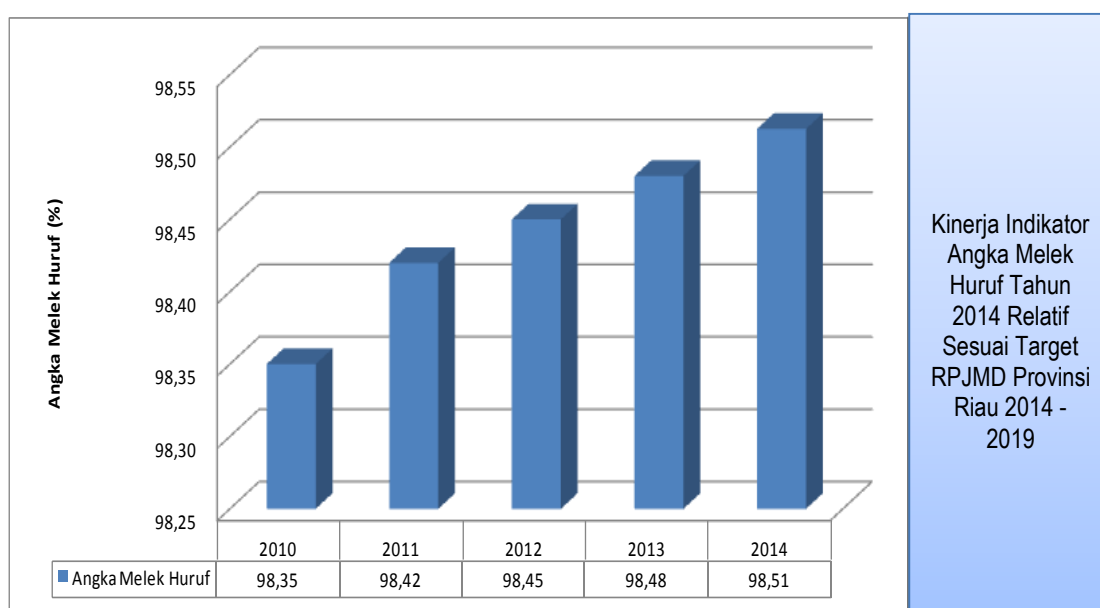
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Komponen pembentuk IPM kedua yaitu angka melek huruf, yang memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, angka melek huruf Provinsi Riau sebesar 98,35% dan diperkirakan meningkat menjadi 98,51% pada tahun 2014. Selama periode 2010 – 2014,

rata-rata pertumbuhan angka melek huruf meningkat sebesar 0,03% per tahun. Laju pertumbuhan angka melek huruf ini merupakan laju pertumbuhan terendah dari keempat komponen IPM Provinsi Riau.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, angka melek huruf dalam IPM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 98,71%. Pada tahun 2014, angka melek huruf Provinsi Riau diperkirakan sebesar 98,51% sehingga realisasi kinerja indikator angka melek huruf relatif mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,80%.

Gambar 2.31.
Angka Melek Huruf Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



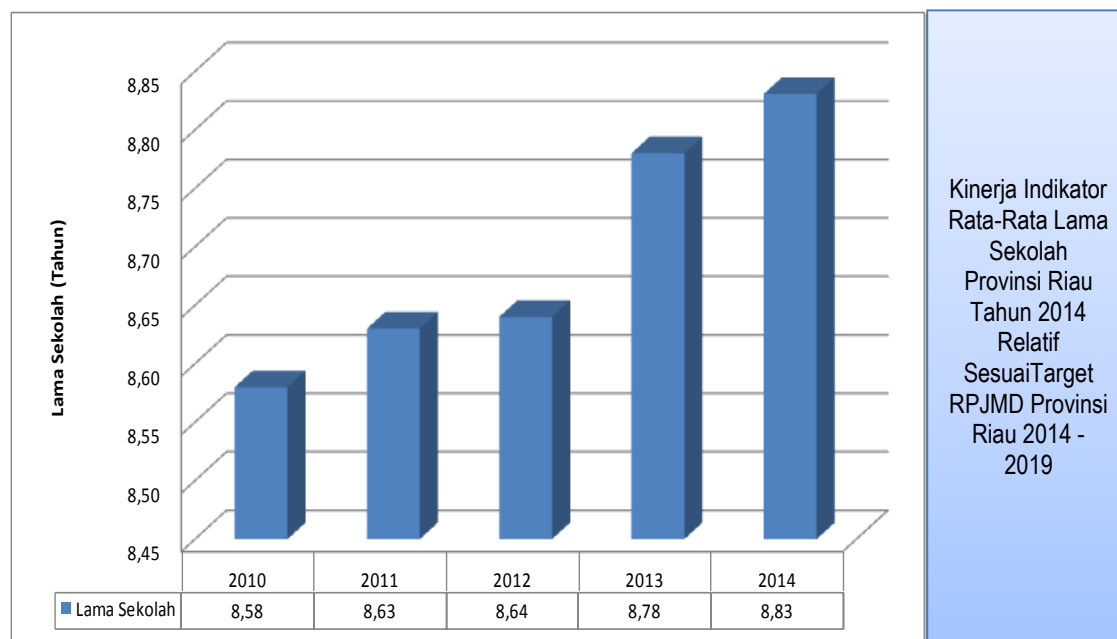
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Komponen pembentuk IPM ketiga yaitu rata-rata lama sekolah, yang memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau selama 8,58 tahun dan diperkirakan meningkat menjadi 8,83 tahun pada tahun 2014. Rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau ini belum mencapai lama sekolah ‘Wajib Belajar’. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan lama sekolah penduduk Provinsi Riau meningkat sebesar 0,58% per tahun. Laju pertumbuhan lama sekolah ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi dari keempat komponen IPM Provinsi Riau.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau dalam IPM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 8,69 tahun . Pada tahun 2014, rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Riau diperkirakan selama 8,83 tahun sehingga realisasi kinerja indikator rata-rata lama sekolah relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,62% meski lebih sebesar 1,62% dari target yang ditetapkan.

Gambar 2.32.
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

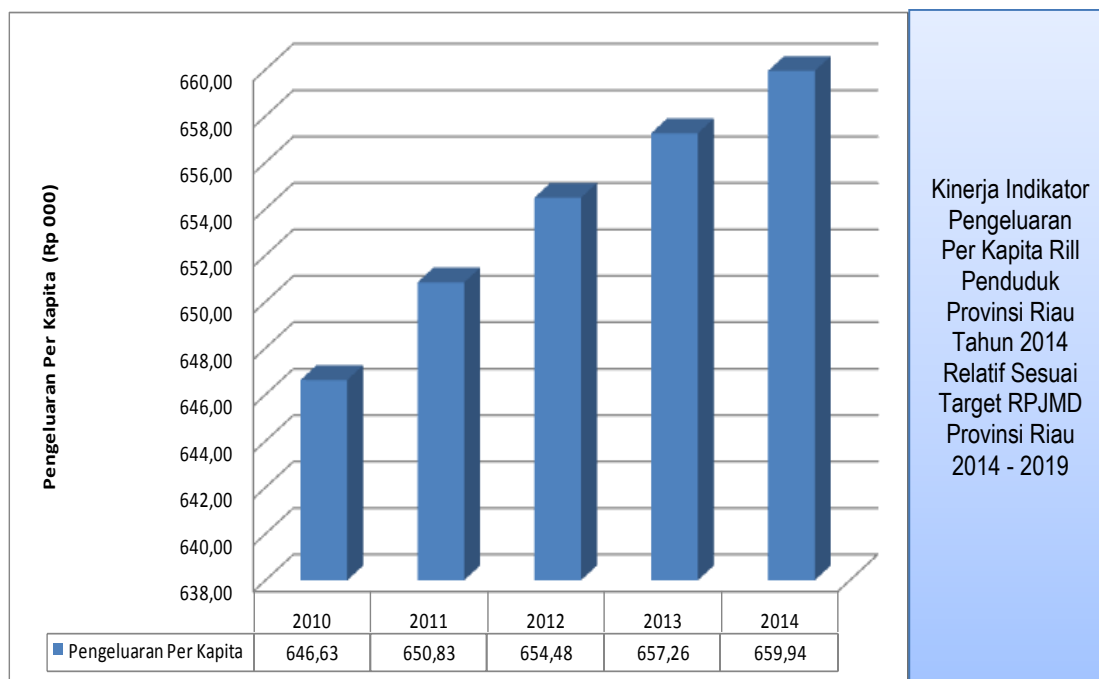
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Komponen pembentuk IPM keempat yaitu pengeluaran per kapita riil penduduk, yang memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau sebesar Rp 646.630 dan diperkirakan meningkat menjadi Rp 659.940 pada tahun 2014. Selama periode 2010 – 2014, pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau meningkat sebesar 0,41% per tahun. Laju pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau ini merupakan laju pertumbuhan tertinggi kedua dari keempat komponen IPM Provinsi Riau.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi Riau dalam IPM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi Rp 661,060. Pada tahun 2014, pengeluaran per kapita riil penduduk Provinsi

Riau diperkirakan sebesar Rp 659,940 sehingga realisasi kinerja indikator pengeluaran per kapita riil relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,83%.

Gambar 2.33.
Pengeluaran Per Kapita Riil Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

2) Angka Partisipasi Kasar

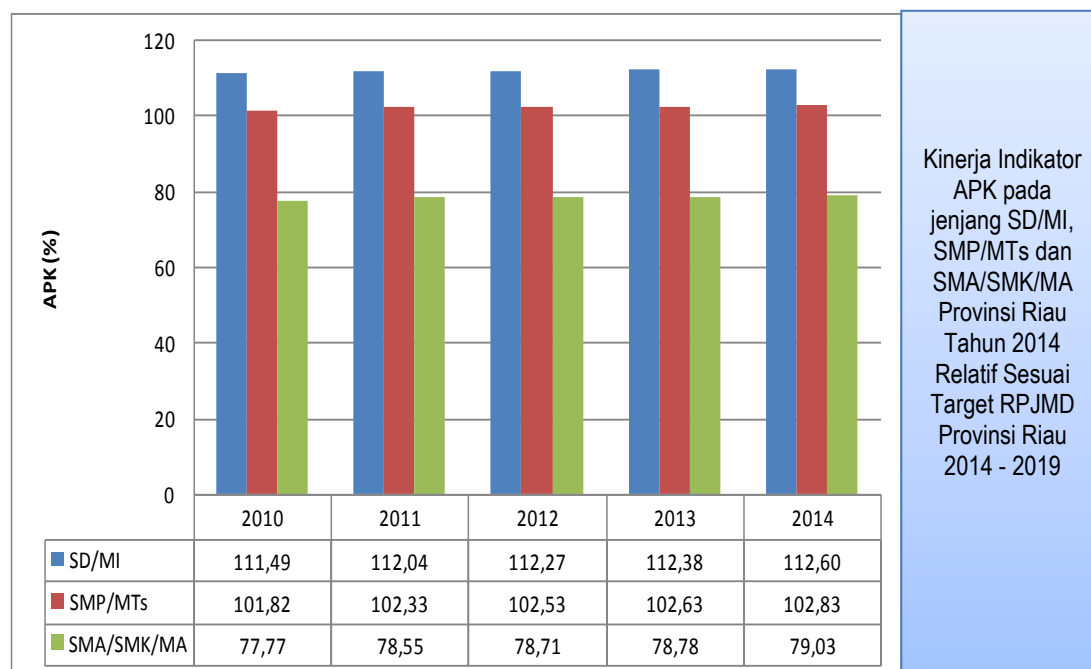
Perkembangan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tahun 2010 – 2014 ditunjukkan pada Gambar 2.34. APK jenjang SD/MI dan SMP/MTs mempunyai tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masingnya sebesar 0,20% per tahun. Kondisi yang relatif sama dijumpai pada jenjang SMA/SMK/MA dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 0.32% per tahun. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah semakin tinggi jenjang pendidikan maka APK nya semakin menurun. Perhatian terhadap peningkatan APK pada jenjang SMA/SMK akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi sehingga perlu upaya untuk mencapai APK sama dan/ atau di atas 100%.

Pada tahun 2013, pencapaian APK Provinsi Riau disemua jenjang pendidikan lebih tinggi dibanding pencapaian APK disemua jenjang Indonesia yang masing-

masingnya sebesar 107,71%; 85,96% dan 66,61%. Pada level Sumatera, pencapaian APK di jenjang termasuk yang terendah.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, APK pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 112,67%; 102,90% dan 79,14% Pada tahun 2014, APK pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Riau diperkirakan sebesar 112,60%; 102,83% dan 79,03%. Realisasi kinerja indikator APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,94%, 99,94 dan 99,87%.

Gambar 2.34.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

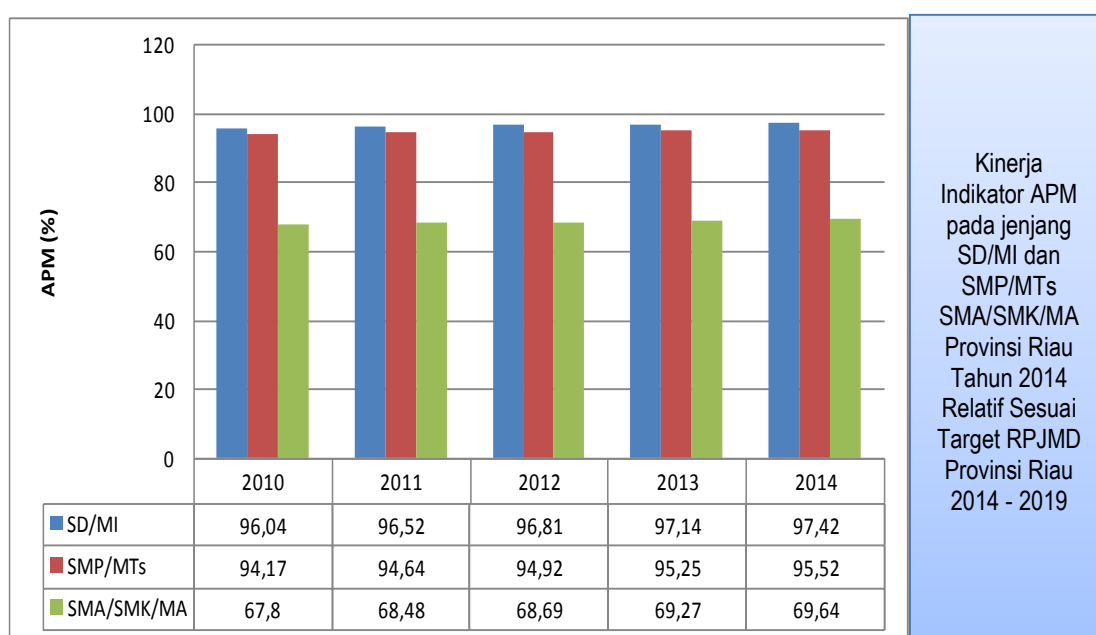
3) Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang menggambarkan partisipasi anak usia sekolah dalam mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai. Perkembangan APM pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau ditunjukkan pada Gambar 2.34. Relatif sama dengan APK, selama periode 2010 – 2014 tren APM ditingkat SD/MI dan SMP/MTs serta SMA/SMK/MA terus meningkat. Semakin tingginya jenjang pendidikan, maka APM

semakin menurun. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan APM menurut jenjang pendidikan masing-masingnya sebesar 0,29%, 0,29% dan 0,54% per tahun.

Pada tahun 2013, pencapaian APM Provinsi Riau di jenjang pendidikan SD/MI lebih rendah dibanding pencapaian APK SD/MI Indonesia (95,59%). APM dijenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA lebih tinggi dibanding Indonesia (73,88% dan 54,25%). Pada level Sumatera, pencapaian APK di jenjang termasuk yang rendah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan APM perlu menjadi prioritas dalam rencana pembangunan jangka pendek Provinsi Riau 2016.

Gambar 2.35.
Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

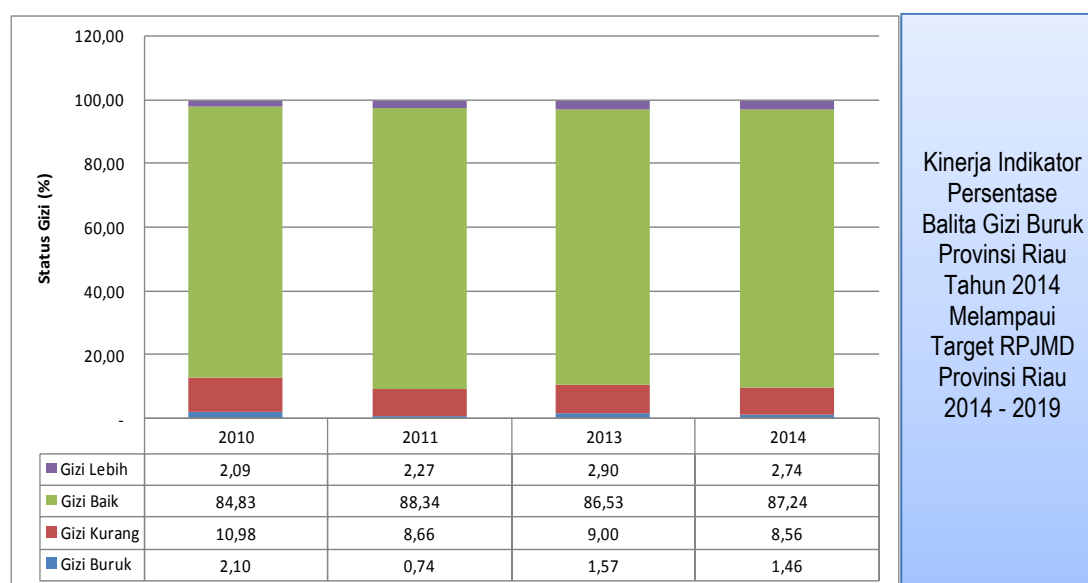
Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, APM pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 97,46%; 95,56% dan 69,71%. Pada tahun 2014, APM pada jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Riau diperkirakan sebesar 97,42%; 95,52% dan 69,64%. Realisasi kinerja indikator APM SD/MI dan SMP/MTs relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,96%. Realisasi kinerja indikator APM SMA/SMK/MA juga relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,09%.

4) Status Gizi Balita

Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Menurut Departemen Kesehatan RI (2005) bahwa parameter berat badan/tinggi badan berdasarkan *Z-Score* yang diklasifikasikan menjadi 4 ukuran yaitu (i) Gizi buruk (sangat kurus): < -3 SD, (ii) Gizi kurang (kurus): -3 SD s/d -2 SD, (iii) Gizi Normal (normal): -2 SD s/d $+2$ SD dan (iv) Gizi lebih (gemuk): $> +2$ SD.

Selama periode 2010 – 2014, persentase balita yang diklasifikasikan gizi buruk dan gizi kurang di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif menurun. Menurunnya persentase balita yang diklasifikasikan gizi buruk dan gizi kurang sejalan dengan semakin meningkatnya pendapatan per kapita dan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Riau. Selama periode ini, persentase balita gizi buruk rata-ratanya menurun sebesar 7,01% per tahun.

Gambar 2.36
Status Gizi Balita Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



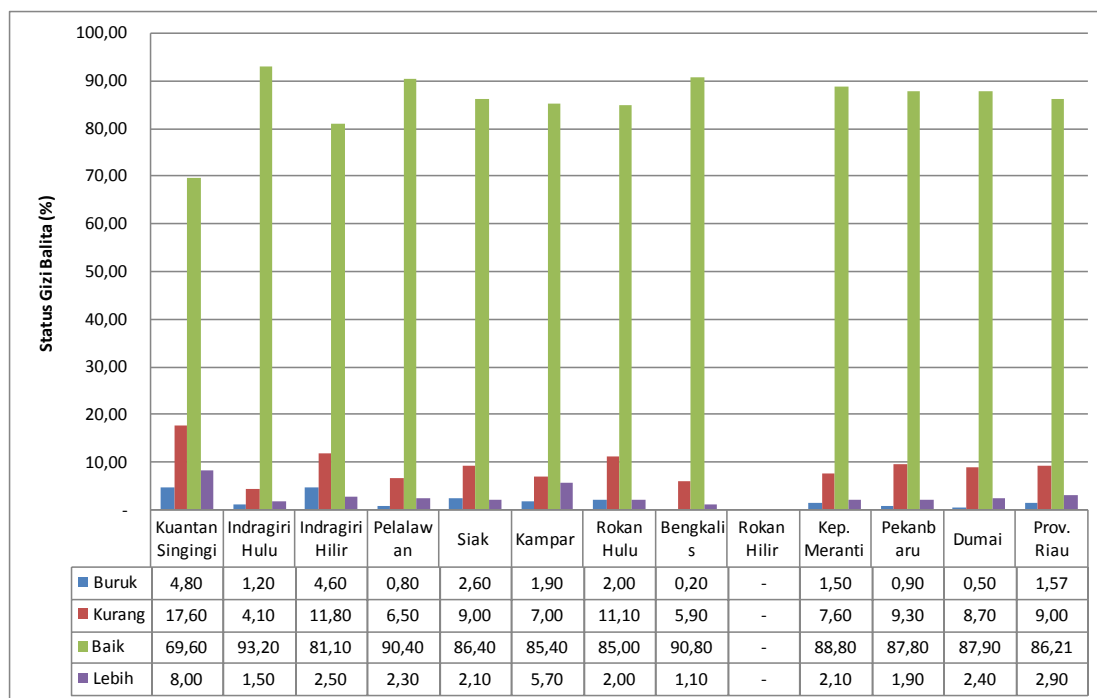
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2012 tidak ada survey dan tahun 2014 adalah angka prediksi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, persentase balita gizi buruk tahun 2014 ditargetkan menurun menjadi 1,60%. Pada tahun 2014, realisasi persentase balita gizi buruk di prediksi sebesar 1,46%, sehingga realisasi kinerja indikator persentase balita gizi buruk melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 109,60%.

Gambar 2.37

Status Gizi Balita Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Bila status gizi balita, khususnya gizi buruk dianalisis menurut Kabupaten/kota pada tahun 2013 menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk yang lebih tinggi terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi (4,80%), Indragiri Hilir (4,50%), Siak (2,60%), Rokan Hulu (2,00%) dan Kampar (1,90%). Oleh karena itu, program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan status gizi balita lebih difokuskan kepada lima Kabupaten ini, sehingga pencapaian penurunan persentase galita gizi buruk dapat lebih rendah lagi.

5) AKB – AKABA – AKI

Angka kematian bayi/AKB (*Infant Mortality Rate/IMR*) menjadi indikator pertama dalam menentukan derajat kesehatan anak dan tujuan ke 4 dalam MDG's. AKB diukur dari banyaknya kematian bayi berumur di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran hidup dalam satu tahun. Balita (bawah lima tahun) adalah semua anak termasuk bayi yang baru lahir, yang berusia 0 sampai menjelang tepat 5 tahun (4 tahun 11 bulan 29 hari). Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita selama 1 tahun tertentu per 1000 anak pada umur yang sama pada pertengahan tahun tersebut (termasuk kematian bayi). Penyebab kematian bayi dan balita kematian bayi dan balita umumnya adalah karena *pneumonia*, diare dan penyakit karena tidak memperoleh vaksin.

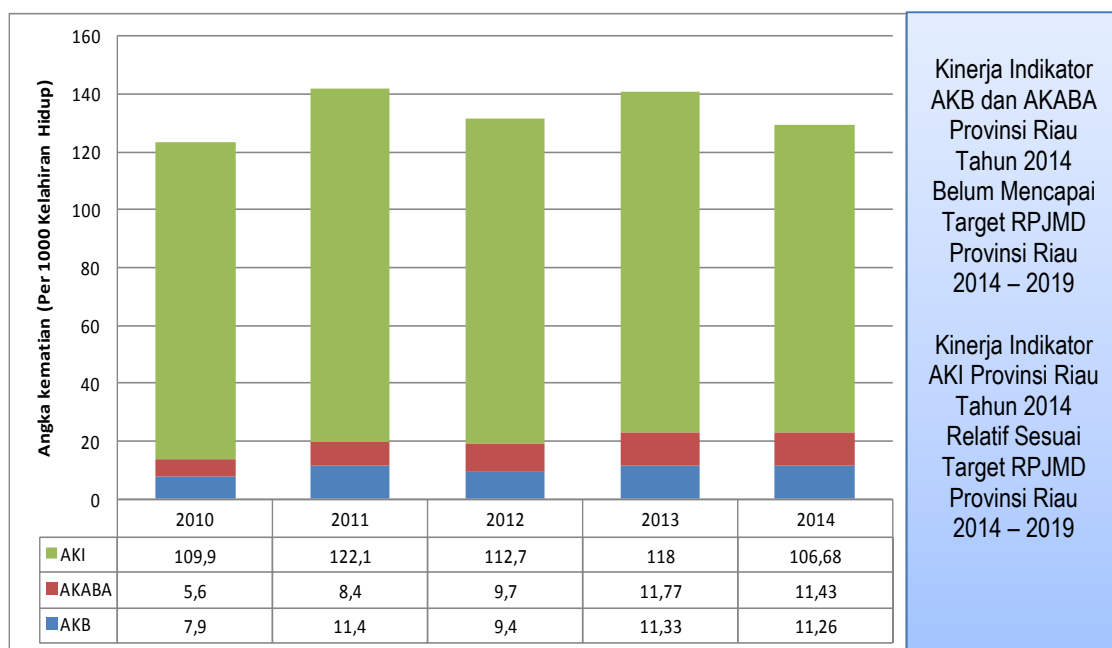
Angka Kematian Ibu/AKI (*Maternal Mortality Rate/MMR*) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan dan merupakan salah satu target yang ditentukan dalam tujuan ke 5 MDG's. Pengertian AKI adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan, persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab apapun yang berkaitan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau pengelolaannya serta bukan akibat kecelakaan. AKI ini berkaitan langsung dengan AKB.

Selama periode 2010 – 2014, AKB dan AKABA memiliki tren meningkat sedangkan AKI memiliki tren menurun. Pada tahun 2014, AKB Provinsi Riau sebesar 11,33 lebih rendah dari target penurunan AKB MDG's 2015 yaitu sebesar < dari 23 per 1000 kelahiran hidup. Pada masa masa yang sama AKABA sebesar 11,43, lebih rendah dari target penurunan AKABA MDG's 2015 yaitu sebesar < 32 per 1000 kelahiran hidup. Target penurunan AKI MDG's 2015 menjadi 102 kematian per 100.000 kelahiran, dimana AKI di Provinsi Riau tahun 2014 lebih tinggi dibanding target MDG's yaitu sebesar 105,58 kematian per 100.000 kelahiran.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, AKB tahun 2014 ditargetkan menurun menjadi 8,99 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2014, realisasi AKB Provinsi Riau di prediksi sebesar 11,26 kematian bayi per 1000 kelahiran hidup,

sehingga realisasi kinerja indikator AKB belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 79,86%. AKABA Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan menurun menjadi 9,13 kematian balita per 1000 anak umur yang sama, sehingga realisasi kinerja indikator AKB belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 79,84%. AKI Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan menurun menjadi 96,57 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, sehingga realisasi kinerja indikator AKI relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu 96,57%.

Gambar 2.38.
AKB, AKABA dan AKI Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



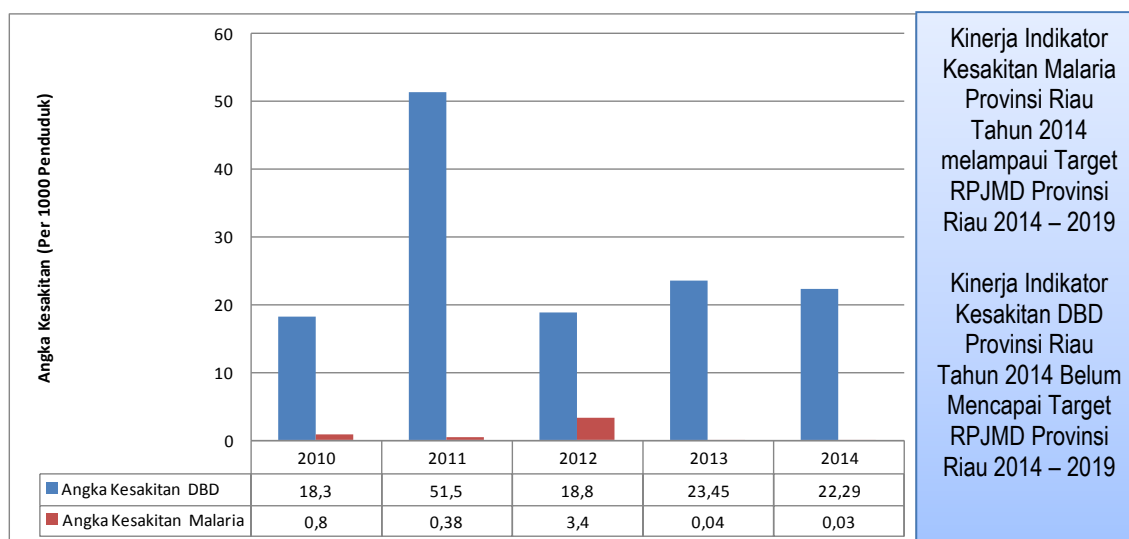
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

6) Angka Kesakitan DBD dan Malaria

Angka kesakitan malaria atau prevalensi malaria adalah jumlah kasus baru malaria dengan hasil laboratorium positif malaria disuatu wilayah pada kurun waktu satu tahun. Angka kesakitan demam berdarah dengue (DBD) adalah jumlah kasus DBD baru yang terdeteksi di sarana kesehatan sesuai kriteria WHO 1997 (klinis dan laboratoris) disuatu wilayah pada kurun waktu. Angka kesakitan malaria termasuk DBD merupakan salah satu indikator VI MDG's yaitu memerangi HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular lainnya.

Selama periode 2010 – 2014, angka kesakitan malaria di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif menurun dan bahkan pada tahun 2013 sudah di bawah 1 per 1000 penduduk. Angka kesakitan malaria Provinsi Riau tahun 2013 lebih baik dari Indonesia yaitu sebesar 1,38 per 1000 penduduk. Kondisi sebaliknya terjadi pada angka kesakitan DBD yang memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2013 dan prediksi tahun 2014 angka kesakitan DBD mengalami peningkatan dari 22,45 per 100.000 penduduk menjadi 22,29 per 100.000 penduduk. Meski angka kesakitan DBD Provinsi Riau meningkat, namun angka kesakitan DBD Provinsi Riau tahun 2013 yaitu sebesar 23,45 per 100.000 penduduk, jauh lebih rendah dari angka kesakitan DBD Indonesia yaitu 45,85 per 100.000 penduduk. Target angka kesakitan DBD Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 yaitu < 52 per 100.1000 penduduk.

Gambar 2.39
Angka Kesakitan DBD dan Malaria Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, angka kesakitan malaria dan angka kesakitan DBD Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan masing-masingnya sebesar 0,25 per 1000 penduduk dan 18,50 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, realisasi angka kesakitan malaria dan angka kesakitan DBD di prediksi sebesar 0,03 per 1000 penduduk dan 22,29 per 100.000 penduduk. Realisasi angka kesakitan malaria

melampaui target (833,33%) dan realisasi kinerja indikator angka kesakitan DBD belum mencapai target yang ditetapkan (82,99%).

7) Rasio Penduduk Yang Bekerja

Perkembangan tenaga kerja di Provinsi Riau sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.14 menunjukkan bahwa tren jumlah tenaga kerja yang bekerja meningkat seiring dengan tren peningkatan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan penduduk usia 15 tahun ke atas meningkat sebesar 2,65% per tahun dan angkatan kerja meningkat sebesar 2,54% per tahun. Dari angkatan kerja, pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja meningkat 3,02% per tahun sedangkan angkatan kerja yang tidak bekerja menurun sebesar -3,13% per tahun. Rata-rata pertumbuhan bukan angkatan kerja meningkat sebesar 2,85% per tahun.

Tabel 2.14.
Perkembangan Tenaga Kerja Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau

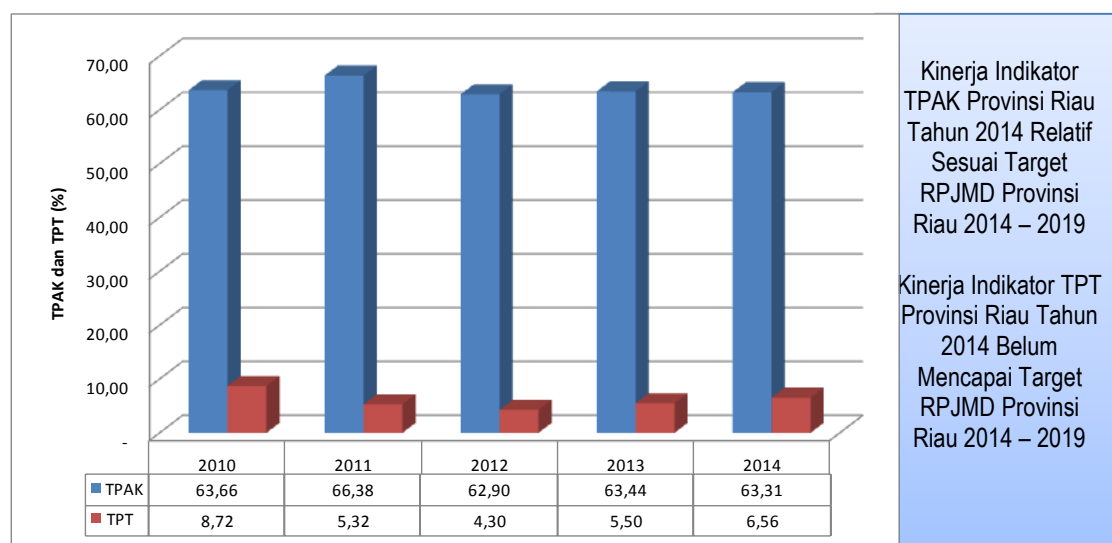
No	Kegiatan Utama	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penduduk usia 15 tahun Ke atas (jiwa)	3.735.390	3.857.145	3.985.257	4.135.186	4.257.120
2	Angkatan Kerja (jiwa)	2.377.494	2.560.402	2.506.776	2.623.310	2.695.247
	a. Bekerja	2.170.247	2.424.180	2.399.002	2.479.493	2.518.485
	b. Tidak Bekerja (Pengangguran Terbuka)	207.247	136.222	107.774	143.817	176.762
3	Bukan Angkatan Kerja	1.357.441	1.296.743	1.478.481	1.511.876	1.561.873
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja /TPAK (%)	63,66	66,38	62,90	63,44	63,31
5	Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT (%)	8,72	5,32	4,30	5,50	6,56

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi, 2014)

Selama periode 2010 – 2014 ini, tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar - 0,11% per tahun. Kondisi yang relatif sama terjadi di pengangguran menurun dengan rata-rata pertumbuhan menurun sebesar -5,53% per tahun. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau tahun 2014 sebesar 6,56%, lebih tinggi dari tingkat pengangguran terbuka Indonesia (5,94%). Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau di Sumatera termasuk kelompok tinggi dan hanya di bawah Aceh (9,02%) dan Kepulauan Riau (6,69%). Tingginya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau ini didorong oleh tingginya migrasi angkatan kerja dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan masing-masingnya sebesar 64,25% dan 5,15%. Pada tahun 2014, realisasi tingkat realisasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka masing-masingnya sebesar 63,31% dan 6,56%. Kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja relatif sesuai target (98,54%) dan realisasi kinerja indikator tingkat pengangguran terbuka belum mencapai target yang ditetapkan (78,51%).

Gambar 2.40.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi, 2014)

Sektor penyedia lapangan kerja utama masih sektor Pertanian dengan persentase sebesar 46,30% dari total angkatan kerja yang bekerja (Tahun 2013). Sektor penyedia lapangan kerja terbesar kedua dan ketiga sektor jasa yaitu sektor perdagangan, rumah makan dan hotel (20,60%) dan jasa-jasa (15,205). Ke depan, seiring dengan peningkatan angkatan kerja dan semakin terbatasnya kemampuan sektor pertanian menyerap limpahan tenaga kerja maka upaya pengembangan sektor industri perlu dilakukan yang didukung dengan pelatihan peningkatan skill angkatan kerja.

Angkatan kerja yang bekerja dan menganggur menurut Kabupaten/ Kota ditunjukkan pada Gambar 2.42. Tingkat pengangguran yang melebihi tingkat pengangguran Provinsi Riau terdapat di Kota Dumai (6,16%). Tingginya tingkat pengangguran di Kota Dumai yang merupakan kawasan industri di Provinsi Riau

disebabkan karena migrasi pencari kerja. Oleh karena itu, upaya penumbuhan kesempatan kerja khususnya di Kota Dumai perlu menjadi prioritas pembangunan.

Gambar 2.41.
Persentase Angkatan kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi, 2014)

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga.

1) Seni Budaya

Seni budaya di Provinsi Riau relatif kurang berkembang. Pada tahun 2008, jumlah grup kesenian sebanyak 158 grup. Jumlah ini grup kesenian ini untuk tahun-tahun berikut relatif tidak terdata. Seni budaya yang terus bertahan di masyarakat antara lain Rebana, Gebana, Kompang dan Qasidah. Kurang berkembangnya seni budaya tersebut tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Jumlah gedung kesenian hanya ada enam gedung, satu gedung megah adalah Gedung Idrus Tintin yang berlokasi di Bandar Seni Raja Ali Haji (SERAI) di Kota Pekanbaru sedangkan gedung-gedung lainnya relatif kurang memadai dan perlu rehabilitasi atau

pembangunan kembali sehingga mendukung perkembangan seni budaya khususnya seni budaya melayu.

Jumlah grup seni budaya menurut Kabupaten/Kota sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.15. memperlihatkan bahwa jumlah grup kesenian yang terbanyak ada di Kabupaten Kampar, yaitu sebanyak 76 grup diikuti Kabupaten Indragiri Hulu (24 grup), Rokan Hulu (24 grup) dan Kuantan Singingi (10 grup). Jumlah gedung kesenian sebanyak 2 gedung terdapat di Kota Pekanbaru, diikuti Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Rokan Hilir, dan Bengkalis yang masing-masingnya sebanyak 1 gedung.

Tabel 2.15.
Jumlah Grup Seni Budaya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian	Jumlah Gedung Kesenian
1	Kuantan Singingi	10	1
2	Indragiri Hulu	24	-
3	Indragiri Hilir	3	1
4	Pelalawan	1	-
5	Siak	2	-
6	Kampar	76	-
7	Rokan Hulu	24	-
8	Rokan Hilir	3	1
9	Bengkalis	3	1
10	Kep.Meranti	3	-
11	Pekanbaru	7	2
12	Dumai	1	-
	Jumlah	158	6

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka, 2009).

Rendah jumlah grup seni budaya melayu dan minimnya sarana/prasarana seni budaya bertolak belakang dengan Visi Riau 2020 yaitu *“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025”*. Oleh karena itu, upaya untuk penumbuh-kembangkan jati diri dan kebudayaan melayu harus menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau kedepan.

2) Olahraga

Pada tahun 2012, Provinsi Riau telah menjadi tuan rumah PON VIII dan membangun baru serta memperbaiki beberapa venue untuk penyelenggaraan cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan. Venue PON XVIII tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Riau antara lain:

1. Grand Stadion Utama – sepak bola – yang berada di Kampus Universitas Pekanbaru.
2. Grand Stadion Kuansing – sepak bola – berada di Komplek *Sport Center* di Taluk Kuantan - Kabupaten Kuantan Singingi untuk cabang sepak bola
3. Stadion Kaharudin atau Stadion Rumbai – Sepak bola - berada di Kota Pekanbaru.
4. Gelanggang Olahraga Pelalawan – Tinju – berada di Pangkalan Kerinci – Kabupaten Pelalawan.
5. Gelanggang Remaja Pekanbaru – bulu tangkis - berada di Kota Pekanbaru.
6. GOR Angkasa – Bulu Tangkis berada di Kota Pekanbaru.
7. Gelanggang Olahraga Senam – Senam – yang berada di Rumbai Sport Center di Kota Pekanbaru.
8. Gelanggang Olahraga Tribuana – karate – berada di Kota Pekanbaru.
9. Danau Buatan – Ski Air – berada di Kota Pekanbaru.
10. GOR Kampar – pencak silat dan *road race* – berada di Kota Bangkinang Kabupaten Kampar.
11. Padang Golf Hotel Labersa – Golf – berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
12. Hall A Sport Centre Rumbai – Basket - berada di Kota Pekanbaru.
13. Hall Renang Sport Center Rumbai – Renang – berada di Kota Pekanbaru.
14. Perkasa Alam Sport Hall Bengkalis – Bela Diri Tarung Drajat – berada di Kota Bengkalis Kabupaten Bengkalis.
15. Hall Menembak *Sport Centre* Rumbai – Menembak - berada di Kota Pekanbaru.
16. Hall Volly *Sport Centre* Rumbai – Volly – berada di Kota Pekanbaru.
17. Stadion *Hockey Sport Centre* Rumbai – *Hockey* – berada di Kota Pekanbaru.
18. Stadion Atletik *Sport Center* Rumbai – Atletik – berada di Kota Pekanbaru.
19. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Lancang Kuning – Anggar – berada di Kota Pekanbaru.

20. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Riau – Judo - berada di Kota Pekanbaru.
21. Gedung Pusat kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Islam Sultan Syarif Qasim – Taekwondo – berada di Kota Pekanbaru.
22. Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) Universitas Islam Riau – Gulat – berada di Kota Pekanbaru.
23. Lapangan Softball Chevron Rumbai – *Softball* – berada di Kota Pekanbaru.
24. Sport Center PT. Chevron – Tenis Meja – berada di Kota Dumai.
25. Kolam Renang Sasana Tirta Pertamina – Selam – berada di kota Dumai.
26. Kawasan Olahraga Universitas Riau – Panahan – berada di Kota Pekanbaru.
27. Panjat Tebing Kawasan Universitas Riau – Panjat Tebing – berada di Kota Pekanbaru.

Ketersediaan fasilitas gedung/venue eks PON XVIII yang dibangun dengan dana besar harus dapat dioptimalkan penggunaannya untuk menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Oleh karena itu, pengembangan olahraga berprestasi perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

Fokus layanan urusan wajib dianalisis menggunakan indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah Provinsi Riau, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil menengah serta penanaman modal.

1) Bidang Urusan Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah

Pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun di Provinsi Riau telah meningkat secara signifikan. Pada tahun 2010, Angka Partisipasi Sekolah (APS) umur 7 – 12 tahun sebesar 98,50%, meningkat menjadi 98,80% pada tahun 2013. Pada tahun 2014

diprediksi meningkat menjadi 98,88%. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan APS umur 7- 12 tahun Provinsi Riau meningkat sebesar 0,08% per tahun. Pencapaian APS umur 7 – 12 tahun di Provinsi Riau tahun 2013 yaitu sebesar 98,80% relatif lebih tinggi dibandingkan APS 7 – 12 tahun Indonesia (98,42%). Bila APS 7 – 12 tahun Provinsi Riau tahun 2013 ini dibandingkan dengan APS umur 7 – 12 tahun Sumatera Barat (98,81%), Sumatera Utara (99,03) dan Jambi (98,81%) sedikit lebih rendah namun dibanding Kepulauan Riau (98,63%) sedikit lebih tinggi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 APS umur 6 – 12 tahun ditargetkan meningkat menjadi 99,04%. Pada tahun 2014, realisasi APS umur 5 – 12 tahun di prediksi sebesar 98,88%, sehingga realisasi kinerja indikator APS umur 6 – 12 tahun hampir mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,84%.

APS umur 13 – 15 tahun pada tahun 2010 sebesar 91,70% meningkat menjadi 92,00% tahun 2013 dan diprediksi meningkat menjadi 92,08% pada tahun 2014. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan APS umur 13 – 15 tahun meningkat sebesar 0,08% per tahun. Pencapaian APS umur 13 – 15 tahun Provinsi Riau tahun 2013 lebih tinggi dibanding APS umur 13 – 15 tahun Indonesia tahun 2013 yaitu 90,81%. Bila dibandingkan dengan APS umur 13 – 15 tahun dengan provinsi tetangga, APS umur 13 – 15 tahun Provinsi Riau lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Utara (92,11%), Sumatera Barat (92,20%), Kepulauan Riau (96,67%). Namun APS umur 13 – 15 tahun Provinsi Riau sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jambi (91,96%).

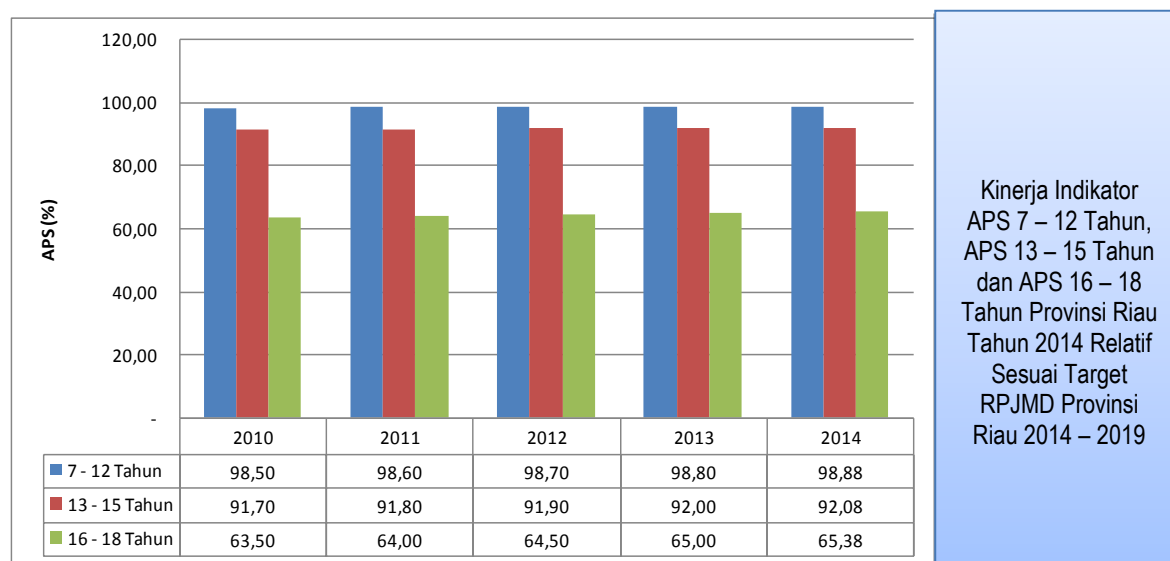
Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 APS umur 13 – 15 tahun ditargetkan meningkat menjadi 93,30%. Pada tahun 2014, realisasi APS umur 13 – 15 tahun di prediksi sebesar 92,08%, sehingga realisasi kinerja indikator APS umur 13 – 15 tahun relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98,62%.

APS umur 16 – 18 tahun pada tahun 2010 sebesar 63,50% meningkat menjadi 65,00% tahun 2013 dan diprediksi meningkat menjadi 66,00% pada tahun 2014. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan APS umur 16 – 18 tahun meningkat sebesar 0,59% per tahun. Pencapaian APS umur 16 – 18 tahun Provinsi Riau tahun 2013 lebih tinggi dibanding APS umur 13 – 15 tahun Indonesia tahun 2013 yaitu 63,84%. Bila dibandingkan dengan APS umur 16 – 18 tahun dengan provinsi tetangga, APS umur 16 – 18 tahun Provinsi Riau lebih rendah dibanding Provinsi Sumatera Utara

(70,24%), Sumatera Barat (74,10%), Kepulauan Riau (73,66%). Namun APS umur 13 – 15 tahun Provinsi Riau sedikit lebih tinggi dibanding Provinsi Jambi (63,97%).

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 APS umur 16 – 18 tahun ditargetkan meningkat menjadi 66,01%. Pada tahun 2014, realisasi APS umur 16 – 18 tahun di prediksi sebesar 65,38%, sehingga realisasi kinerja indikator APS umur 12 – 15 tahun relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,05%.

Gambar 2.42.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

b) Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah

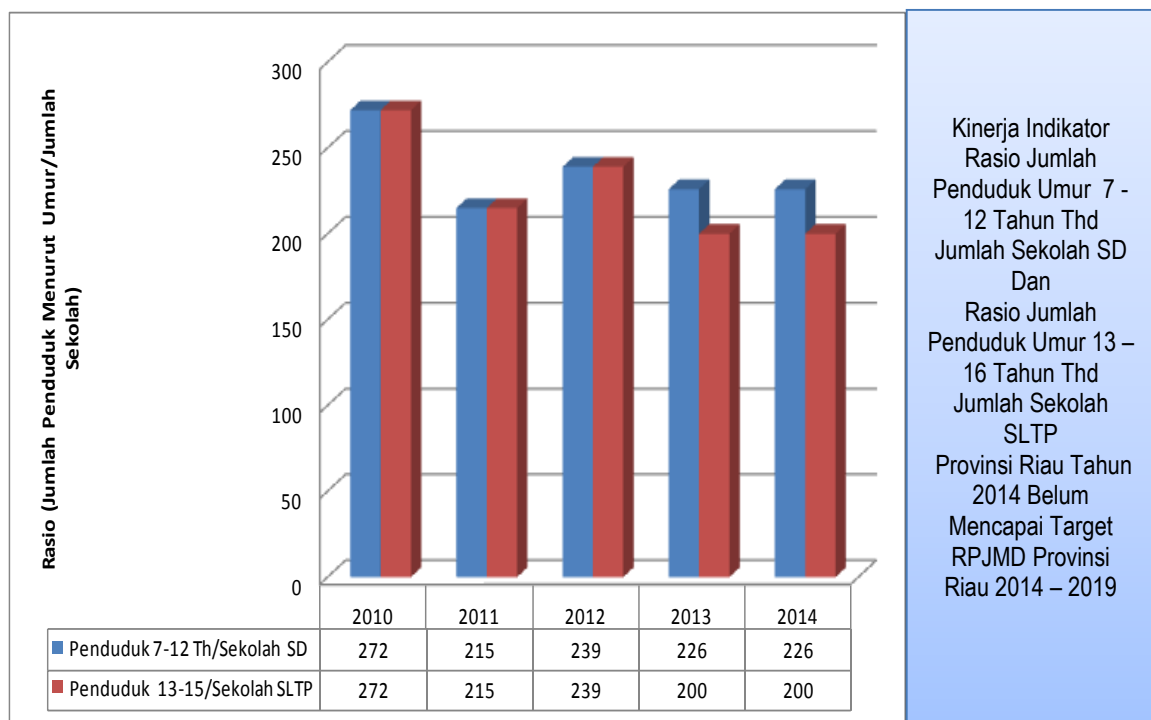
Selama periode 2010 – 2014, jumlah sekolah setingkat SD meningkat lebih tinggi dibanding pertambahan penduduk umur 7 – 12 tahun sehingga rasio jumlah penduduk umur 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, rasio jumlah penduduk umur 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SD sebesar 272, menurun menjadi 226 pada tahun 2013 dan diprediksi pada tahun 2014 masih sebesar 226 penduduk umur 7 – 12 tahun untuk setiap sekolah setingkat SD. Selama periode ini rata-rata pertumbuhan rasio jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah menurun sebesar -3,64% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 rasio jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SD ditargetkan sebesar

211,58. Pada tahun 2014, realisasi rasio jumlah penduduk umur 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SD di prediksi sebesar 226, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SD belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 93,62%. Kondisi ini perlu tindakan penanganan yang lebih serius dan segera, mengingat masih sulitnya masyarakat untuk memasukkan anak sekolah. Peningkatan jumlah sekolah perlu didukung juga dengan peningkatan kualitas dan pemerataan.

Gambar 2.43.

Rasio Penduduk Usia Sekolah Terhadap Ketersediaan Sekolah Tahun 2010 – 2014
Di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014) dan BPS (2014)

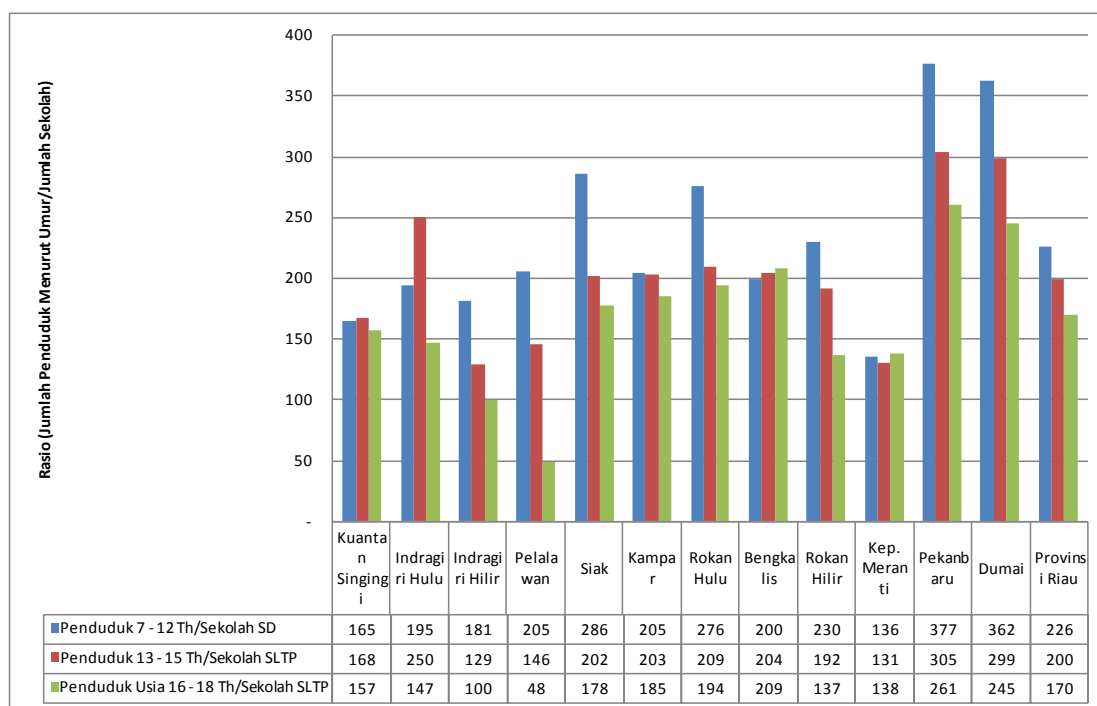
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Kondisi yang sebaliknya pada rasio jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SLTP. Rasio jumlah penduduk umur 13 – 15 tahun terhadap jumlah gedung sekolah setingkatpada tahun 2010 menjadi 200 pada tahun 2013 dan diprediksi masih sebesar 200 pada tahun 2014. Pada periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan rasio jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SLTP menurun sebesar 5,96% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 rasio jumlah penduduk usia 12 – 15 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SLTP ditargetkan sebesar 239,40. Pada tahun 2014, realisasi rasio jumlah penduduk umur 12 – 15 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SLTP di prediksi sebesar 200, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SLTP melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 119,70%.

Rasio jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun terhadap jumlah sekolah tingkat SD menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 ditunjukkan pada Gambar. Rasio yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru (377), Kota Dumai (362) Kabupaten Siak (286), Kabupaten Rokan Hulu (276) dan Kabupaten Rokan Hilir (230). Kelima Kota/Kabupaten inilah yang menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan sekolah setingkat SD atau penambahan ruang kelas.

Gambar 2.44.
Rasio Jumlah Penduduk Usia Sekolah Terhadap Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)

Rasio jumlah penduduk umur 13 – 15 tahun terhadap jumlah sekolah setingkat SLTP yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru (305), Kota Dumai (299), Indragiri Hulu (250), Rokan Hulu (204), (Kampar (203) dan Siak (202). Kelima Kota/Kabupaten inilah yang menjadi prioritas dalam kegiatan pembangunan sekolah setingkat SLTP atau penambahan ruang kelas.

c) Rasio Antara Jumlah Murid dan Guru

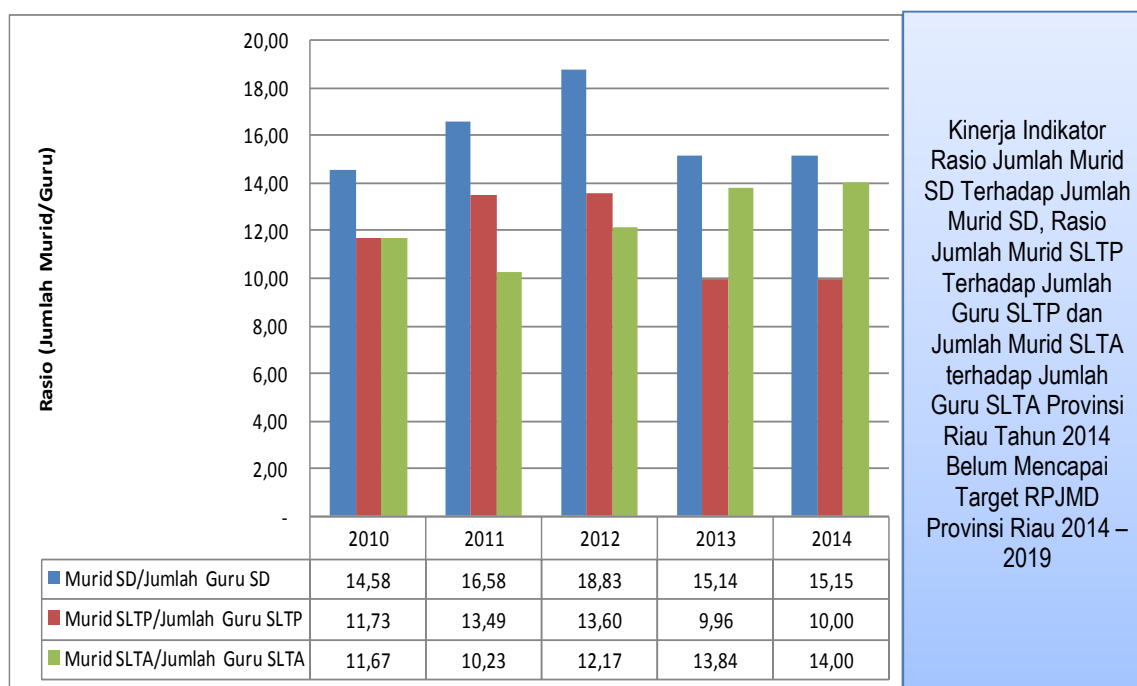
Rasio antara jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD mengalami peningkatan pada tingkat SD. Pada tahun 2010, jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD sebesar 14,58, meningkat menjadi 15,14 pada tahun 2013 dan diperkirakan menjadi 15,15 pada tahun 2014. Meski tren rasio jumlah murid terhadap jumlah guru meningkat tetapi rasionya masih jauh di bawah rasio ideal yaitu sebesar 32. Permasalahan yang menyangkut guru bukanlah masalah jumlah guru melainkan distribusinya yang tidak merata, dimana guru banyak terkonsentrasi diperkotaan dan relatif kurang di wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, upaya penyebaran/pemerataan guru di wilayah terpencil/terisolir perlu dilakukan agar kualitas pendidikan lebih merata.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 rasio jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD ditargetkan sebesar 20,79. Pada tahun 2014, realisasi rasio jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD diprediksi sebesar 15,15, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,87%.

Rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP terus mengalami penurunan yaitu dari 11,73 pada tahun 2010 menjadi 9,96 pada tahun 2013 dan menjadi 10,00 pada tahun 2014. Rasio antara jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP masih jauh dari ideal yaitu 36 yang artinya jumlah guru SLTP relatif berlebih. Permasalahan relatif sama yaitu masalah distribusi guru yang tidak merata, dimana guru banyak terkonsentrasi diperkotaan dan relatif kurang di wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, upaya penyebaran/pemerataan guru SLTP di wilayah terpencil/terisolir perlu dilakukan agar kualitas pendidikan lebih merata dan pencapaian wajib belajar 9 tahun dapat segera dicapai.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP ditargetkan sebesar 15,82. Pada tahun 2014, realisasi rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP diprediksi sebesar 10,00 sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 63,21%.

Gambar 2.45.
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

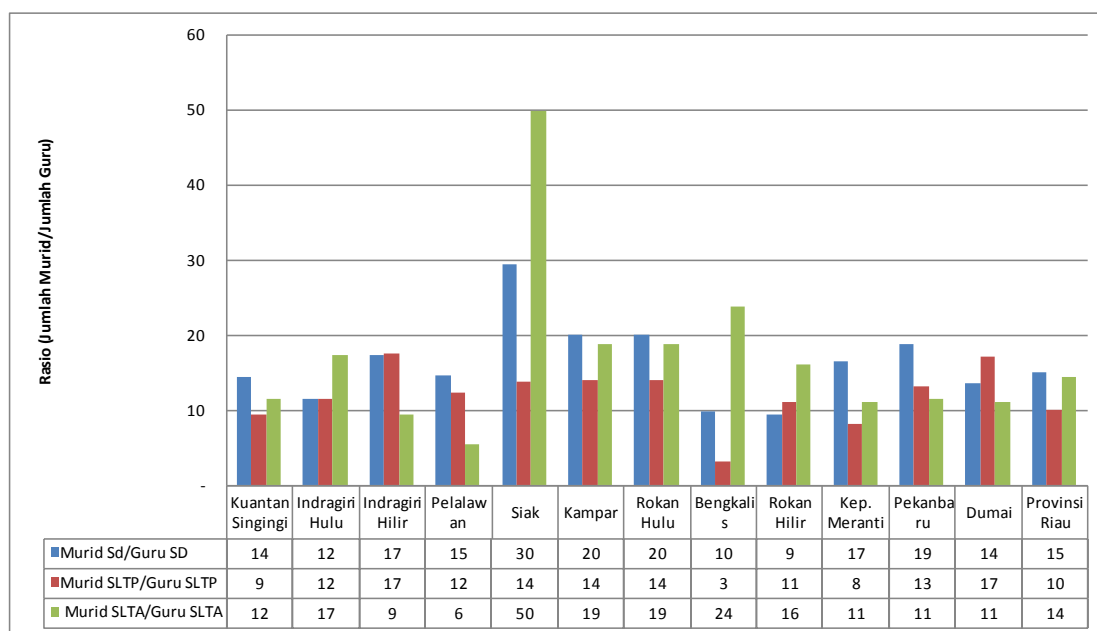
Rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA sebesar 11,67 meningkat menjadi 13,84 pada tahun 2013 dan diprediksi menjadi 14,00 pada tahun 2014. Rasio antara jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA masih jauh dari ideal yaitu 36 yang artinya jumlah guru SLTA relatif berlebih. Permasalahannya relatif sama yaitu masalah distribusi guru yang tidak merata, dimana guru banyak terkonsentrasi diperkotaan dan relatif kurang di wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, upaya penyebaran/pemerataan guru SLTA di wilayah terpencil/terisolir perlu dilakukan agar kualitas pendidikan lebih.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pada tahun 2014 rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA ditargetkan sebesar 15,22. Pada tahun 2014, realisasi rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA diprediksi sebesar 14,00 sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,98%.

Pada tahun 2013, rasio jumlah murid SD terhadap guru SD menurut Kabupaten/Kota yang lebih besar dari rasio Provinsi Riau adalah Kabupaten Siak (30), Kampar (20), Rokan Hulu (20), Pekanbaru (19), Indragiri Hilir (17) dan Kepulauan Meranti (17). Secara umum, rasio jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD Kabupaten/Kota yang lebih besar dari Provinsi Riau masih melebihi standar yaitu sebesar 32.

Gambar 2.46.

Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)

Rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP yang lebih besar dibanding Provinsi Riau adalah Kabupaten Indragiri Hilir (17), Kota Dumai (17), Siak (14), Kampar (14), Rokan Hulu (14), Pekanbaru (13), Indragiri Hulu (12) dan Pelalawan (12). Rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP yang terdapat di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Riau masih melebihi standar yaitu sebesar 36.

Rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA yang lebih besar dibanding Provinsi Riau adalah Kabupaten Siak (50), Bengkalis (24), Rokan Hulu (19), Kampar (19), Indragiri Hulu (17) dan Rokan Hilir (16). Rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA di Kabupaten Siak telah melampaui standar 36, sehingga perlu mendapat perhatian serius.

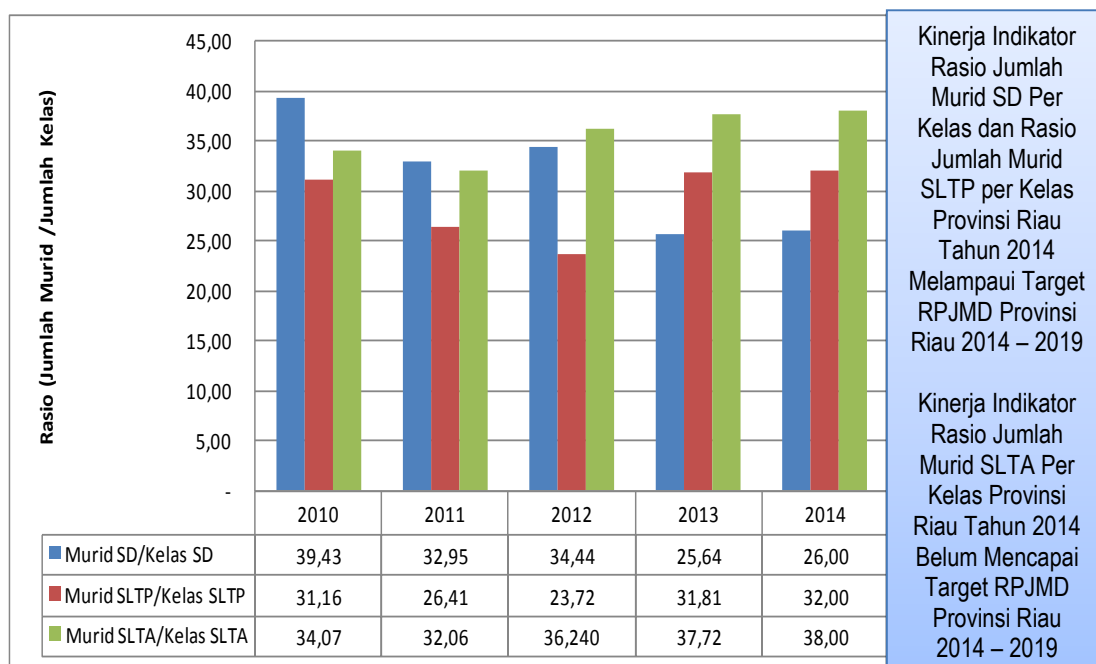
d) Rasio Murid Terhadap Kelas

Selama periode 2010 – 2014, rasio antara jumlah murid SD terhadap jumlah kelas SD memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, rasio jumlah murid SD terhadap jumlah kelas SD sebesar 39,43 murid per kelas, di atas standar 32 murid per kelas. Pada tahun 2013, rasionya menurun menjadi 25,64 murid per kelas dan pada tahun 2014 diprediksi menjadi 26 murid per kelas sehingga melebihi standar. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio murid SD per kelas menurun sebesar -7,99% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio murid SD per kelas di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 32,90 murid per kelas. Pada tahun 2014, realisasi rasio murid SD per kelas diprediksi sebesar 26,00 murid, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah murid SD terhadap jumlah guru SD melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 126,54%.

Selama periode 2010 – 2014, rasio antara jumlah murid SLTP terhadap jumlah kelas di SLTP memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah kelas di SLTP sebesar 31,16 murid per kelas. Pada tahun 2013, rasionya meningkat menjadi 31,81 murid per kelas dan pada tahun 2014 diprediksi menjadi 32 murid per kelas. Selama periode 2010 – 2014 ini, rata-rata jumlah murid SLTP per kelas masih di bawah standar yang ditetapkan yaitu 35 murid per kelas. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio murid SLTP per kelas meningkat sebesar 0,53% per tahun.

Gambar 2.47.
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)
 Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio murid SLTP per kelas di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 22,59 murid per kelas. Pada tahun 2014, realisasi rasio murid per kelas diprediksi sebesar 32 murid SLTP per kelas, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah murid SLTP terhadap jumlah guru SLTP melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 143,56%.

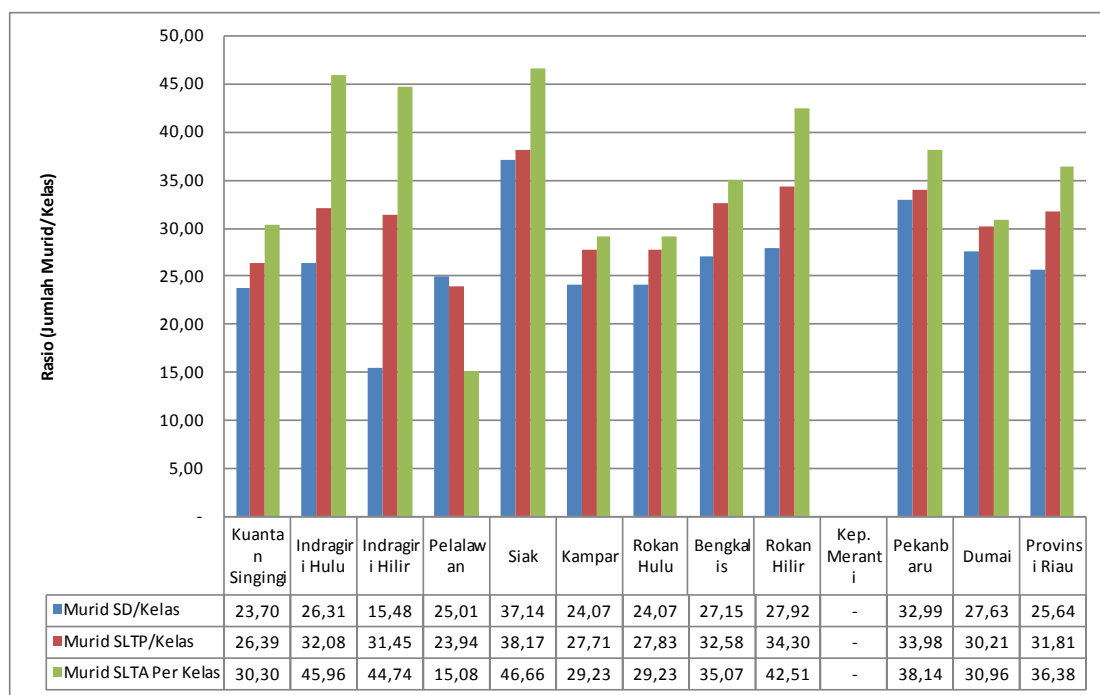
Selama periode 2010 – 2014, rasio antara jumlah murid SLTA terhadap jumlah kelas di SLTA memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah kelas di SLTA sebesar 34,07 murid per kelas. Pada tahun 2013, rasionya meningkat menjadi 37,72 murid per kelas dan pada tahun 2014 diprediksi menjadi 38 murid per kelas dimana jumlah murid SLTA per kelas ini telah melewati standar yaitu 36 murid per kelas. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio murid SLTA per kelas meningkat sebesar 2,21% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio murid SLTA per kelas di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 35,87 murid per kelas. Pada tahun 2014, realisasi rasio murid per kelas diprediksi sebesar 38 murid SLTA per kelas, sehingga

realisasi kinerja indikator rasio jumlah murid SLTA terhadap jumlah guru SLTA belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 94,39%.

Pada tahun 2013, jumlah murid SD per kelas yang melebihi standar (32 murid/kelas) hanya dijumpai di Kabupaten Siak (37,14 murid per kelas). Jumlah murid SD per kelas di Kabupaten/Kota lainnya masih belum melebihi standar dengan kisaran 15,48 – 32,99 murid per kelas. Jumlah murid SLTP per kelas yang melebihi standar (36 murid per kelas) juga dijumpai di Kabupaten Siak (38,17 murid per kelas). Jumlah murid per kelas di Kabupaten/Kota lainnya belum melebihi standar yang ditetapkan dengan kisaran 26,39 – 33,98 murid per kelas. Jumlah murid SLTA per kelas yang melebihi standar (36 murid per kelas) dijumpai di Kabupaten Siak (46,66 murid per kelas), Rokan Hilir (42,51 murid per kelas), Pekanbaru (38,14 murid per kelas) dan Bengkalis (35,07 murid per kelas).

Gambar 2.48.
Rasio Jumlah Murid Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)

e) Rasio Guru Terhadap Kelas

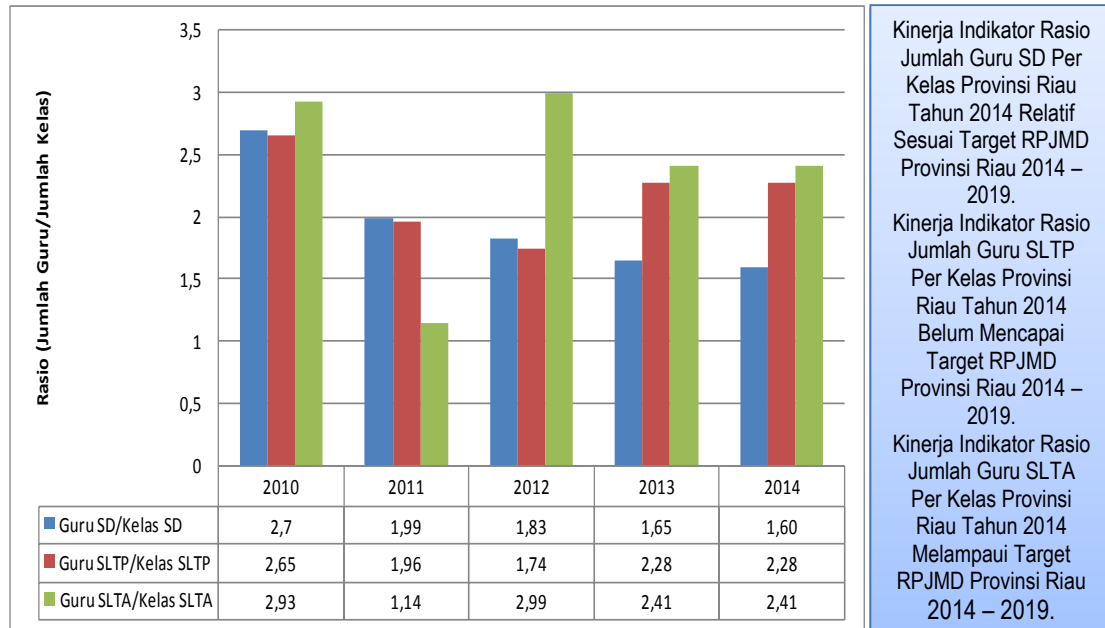
Selama periode 2010 – 2014, rasio antara jumlah guru SD terhadap jumlah kelas SD memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, rasio jumlah guru SD terhadap jumlah kelas SD sebesar 2,70 guru per kelas, di atas standar 1,00 guru per kelas. Pada tahun 2013, rasionya menurun menjadi 1,65 guru per kelas dan pada tahun 2014 diprediksi menjadi 1,60 guru per kelas. Rasio 1,60 guru per kelas masih melebihi standar. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio murid SD per kelas menurun sebesar -9,94% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio guru SD per kelas ditargetkan sebesar 1,62 guru per kelas. Pada tahun 2014, realisasi rasio murid per kelas diprediksi sebesar 1,60 guru SD per kelas, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah guru SLTP terhadap jumlah kelas relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,25%.

Selama periode 2010 – 2014, rasio antara jumlah guru SLTP terhadap jumlah kelas di SLTP memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, jumlah guru SLTP terhadap jumlah kelas SLTP sebesar 2,65 guru per kelas, di atas standar 1,00 guru per kelas. Pada tahun 2013, rasionya meningkat menjadi 2,28 guru per kelas dan pada tahun 2014 diprediksi menjadi 2,28 guru per kelas. Rasio 2,28 guru per kelas masih melebihi standar. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio murid SD per kelas menurun sebesar -2,96% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio guru SLTP per kelas di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,25 guru per kelas. Pada tahun 2014, realisasi rasio murid per kelas diprediksi sebesar 2,28 guru SLTP per kelas, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah guru SLTP terhadap jumlah kelas belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 54,82%.

Gambar 2.49.
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau

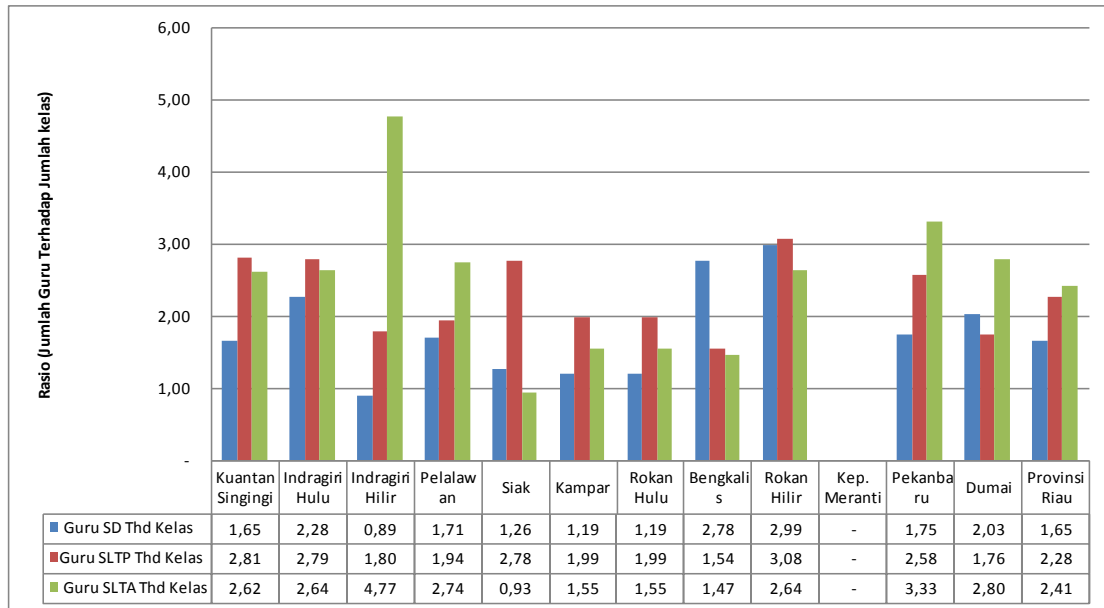


Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)
 Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Selama periode 2010 – 2014, rasio antara jumlah guru SLTA terhadap jumlah kelas di SLTA memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, jumlah guru SLTA per kelas sebesar 2,93 guru per kelas, di atas standar 1,00 guru per kelas. Pada tahun 2013, rasionya menurun menjadi 2,41 guru per kelas dan pada tahun 2014 diprediksi masih 2,41 guru per kelas. Rasio 2,41 guru per kelas masih melebihi standar. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan rasio murid SD per kelas menurun sebesar - 3,83% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio guru SLTA per kelas di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 2,25 guru per kelas. Pada tahun 2014, realisasi rasio murid per kelas diprediksi sebesar 2,41 guru SLTA per kelas, sehingga realisasi kinerja indikator rasio jumlah guru SLTA terhadap jumlah kelas melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 107,11%.

Gambar 2.50.
Rasio Jumlah Guru Terhadap Jumlah Kelas Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)

Rasio guru SD per kelas yang relatif mendekati standar adalah Kabupaten Indragiri Hilir (0,89 guru per kelas), Kampar (1,19 guru per kelas) dan Rokan Hulu (1,19 guru per kelas). Kabupaten/kota lainnya relatif jauh melebihi standar 1 guru per kelas. Rasio guru SLTP per kelas semuanya jauh di atas standar. Rasio jumlah guru SLTA kabupaten Siak (0,93 guru per kelas) relatif mendekati standar. Kabupaten/kota lainnya jauh di atas standar.

2) Bidang Urusan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintah terdiri dari 3 urusan yaitu urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren dan urusan pemerintah umum. Terkait urusan konkuren, pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibagi berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Sub urusan bidang kesehatan terdiri dari upaya kesehatan, SDM kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman.

Urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintahan Provinsi dalam UU pemerintahan daerah untuk upaya kesehatan adalah (i) pengelolaan UKP rujukan

tingkat daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota, (ii) Pengelolaan UKM daerah Provinsi dan rujukan tingkat daerah Provinsi/lintas daerah Kabupaten/Kota, (iii) Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah Provinsi. Dalam hal Sumber daya Manusia (SDM) kesehatan adalah perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP daerah Provinsi. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman adalah (i) penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) dan (ii) Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT). Dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah memberdayakan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh Provinsi, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi.

Komponen sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama, pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Unit pelayanan kesehatan dibagi atas beberapa kategori yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum dan unit pelayanan teknis kesehatan lainnya.

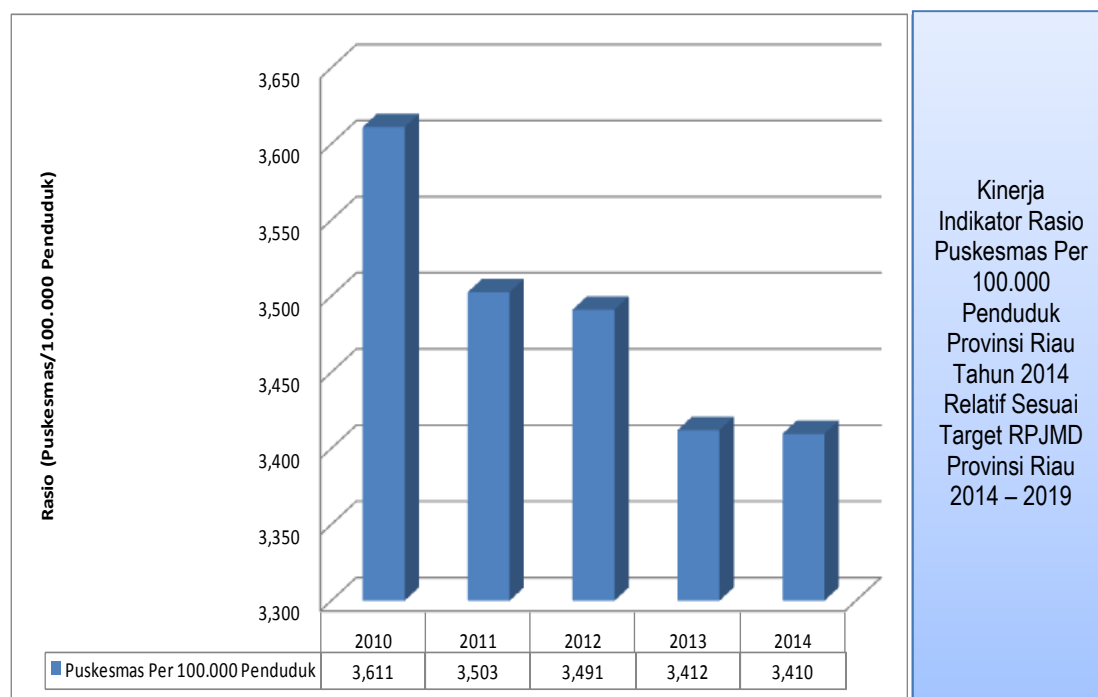
a) Puskesmas

Puskesmas adalah organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis kesehatan di bawah supervisi Dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang memberikan pelayanan preventif, promotif, kuratif sampai dengan rehabilitatif baik melalui upaya kesehatan perorangan (UKP) atau upaya kesehatan masyarakat (UKM). Puskesmas dapat memberikan pelayanan rawat inap selain pelayanan rawat jalan.

Selama periode 2010 – 2014, rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk memiliki tren menurun. Hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan puskesmas. Pada tahun 2010, rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 3,61 yang artinya rata-rata puskesmas di Provinsi Riau tahun 2010 melayani 27.692 penduduk. Pada tahun 2013, rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurun menjadi 3,41 dan pada tahun 2014 diprediksi rasionya sebesar 3,41.

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi riau sudah di atas standar nasional 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa penduduk.

Gambar 2.51.
Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

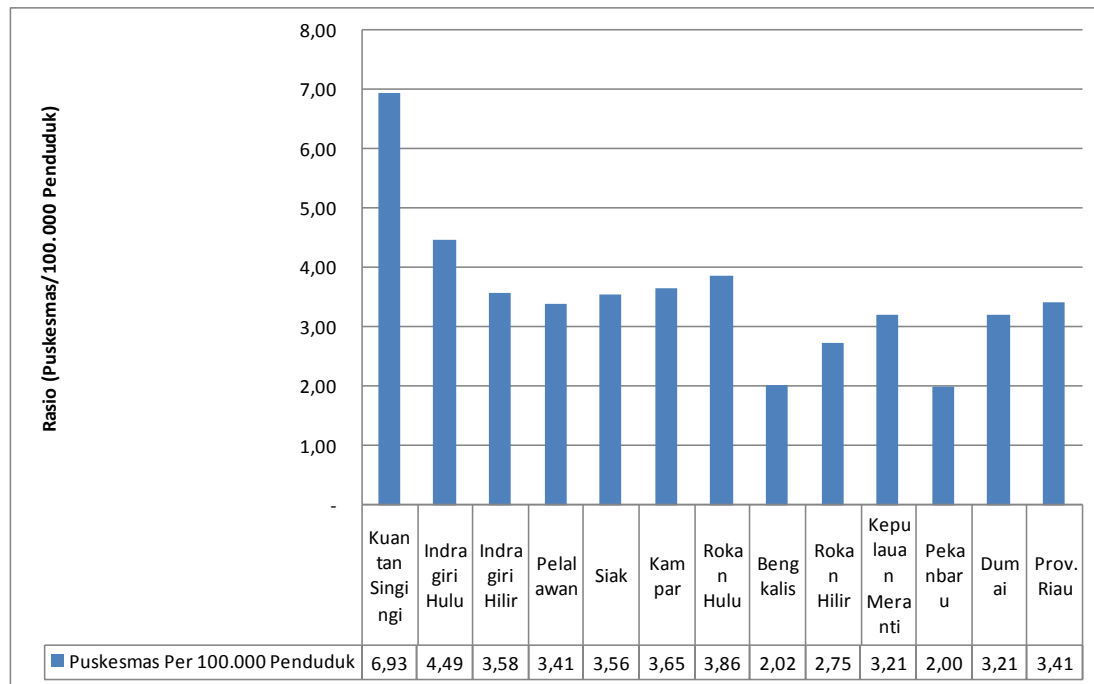


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 3,52 puskesmas per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, realisasi rasio puskesmas per 100.000 penduduk diprediksi sebesar 3,41 puskesmas per 100.000 penduduk, sehingga realisasi kinerja indikator rasio puskesmas per 100.000 penduduk relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,88%.

Gambar 2.52.
Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

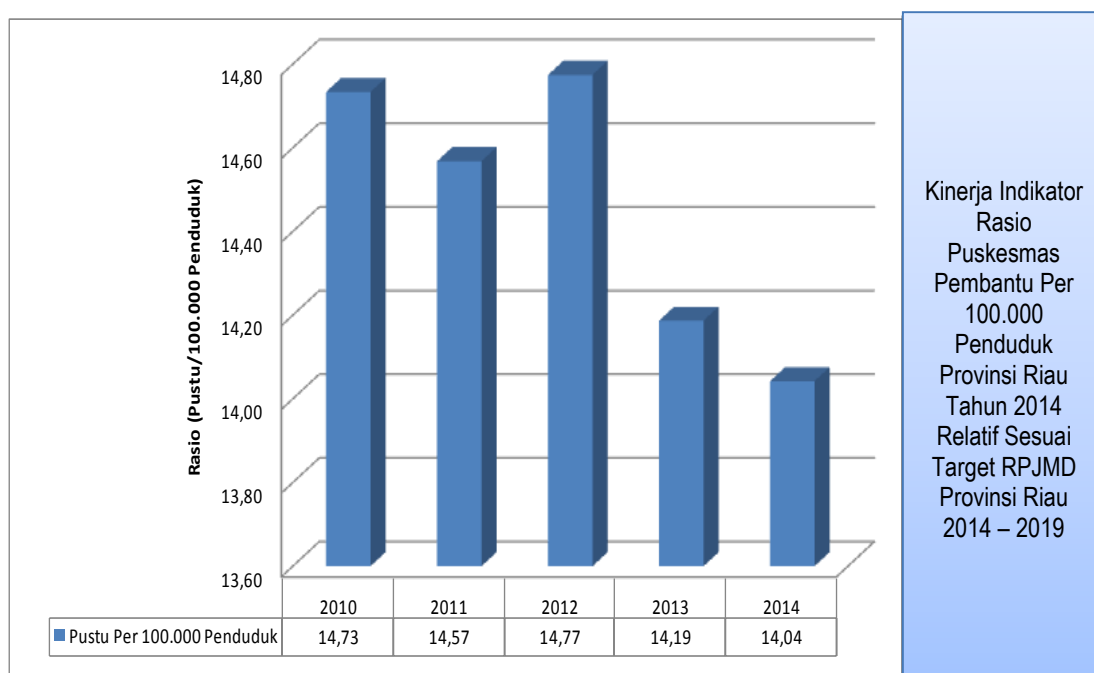
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Rasio puskesmas per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau adalah Kabupaten Kuantan Singingi (6,93), Indragiri Hulu (4,49), Rokan Hulu (3,86), Kampar (3,65), Indragiri Hilir (3,58), Siak (3,56). Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk menurut Kabupaten sama atau di bawah rasio Provinsi Riau namun di atas standar nasional 1 puskesmas per 30.000 penduduk (rasio 3,33) adalah Kabupaten Pelalawan (3,41). Rasio puskesmas per 100.000 penduduk yang di bawah rasio puskesmas Provinsi Riau dan standar nasional adalah Kabupaten Kota Pekanbaru (2,00), Kabupaten Bengkalis (2,75), dan Kota Dumai (3,21).

Rasio puskesmas melayani puskesmas pembantu (Pustu) pada tahun 2010 sebesar 4,08 yang artinya 1 puskesmas rata-rata melayani sebanyak 4,08 puskesmas pembantu. Bila ditambah dengan puskesmas keliling (Pusling) rasionya meningkat menjadi 4,97. Pada tahun 2013, rasio pelayanan puskesmas terhadap pustu sebesar 4,16 (5,08 termasuk pusling) dan diperkirakan menurun menjadi 4,12 (5,03 termasuk pusling) pada tahun 2014.

Selama periode 2010 – 2014, rasio puskesmas terhadap 100.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, rasio puskesmas per 100.000 penduduk sebesar 14,73 yang artinya 1 puskesmas pembantu melayani 6.787 jiwa penduduk menurun rasionya menjadi 14,19 tahun 2013 dan diprediksi rasionya menjadi 14,04. Hal ini menggambarkan bahwa selama periode ini laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Puskesmas.

Gambar 2.53.
Rasio Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

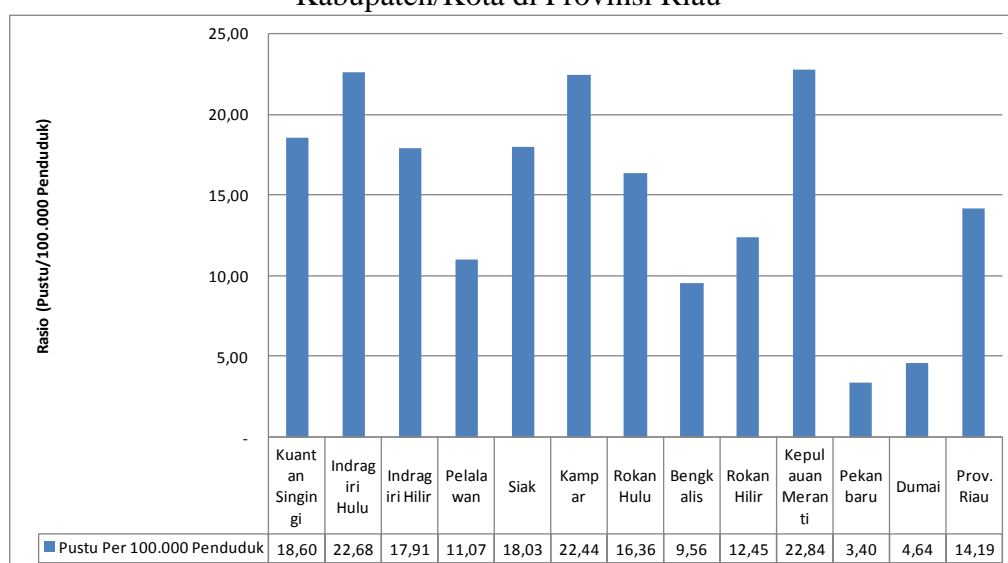
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio puskesmas pembantu per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 14,16 puskesmas pembantu per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, realisasi rasio puskesmas pembantu per 100.000 penduduk diprediksi sebesar 14,04 puskesmas pembantu per 100.000 penduduk, sehingga realisasi kinerja indikator rasio puskesmas pembantu per 100.000 penduduk relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,17%.

Rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 menunjukkan bahwa 7 Kabupaten memiliki rasio yang lebih besar dari rasio

Provinsi Riau. Kabupaten yang memiliki rasio Puskesmas Pembantu per 100.000 penduduk yang lebih besar dari Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti (22,84), Indragiri Hulu (22,44), Kampar (22,44), Kuantan Singingi (18,60), Siak (18,03), Indragiri Hilir (17,91) dan Rokan Hulu (16,36). Kabupaten/Kota yang memiliki rasio Puskesmas Pembantu lebih kecil dari Provinsi Riau umumnya merupakan daerah maju dengan populasi dan/atau kepadatan penduduk yang tinggi yaitu Pekanbaru (3,40), Dumai (4,64), Bengkalis (9,56) dan Pelalawan (11,07).

Gambar 2.54.
Rasio Puskesmas Pembantu Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

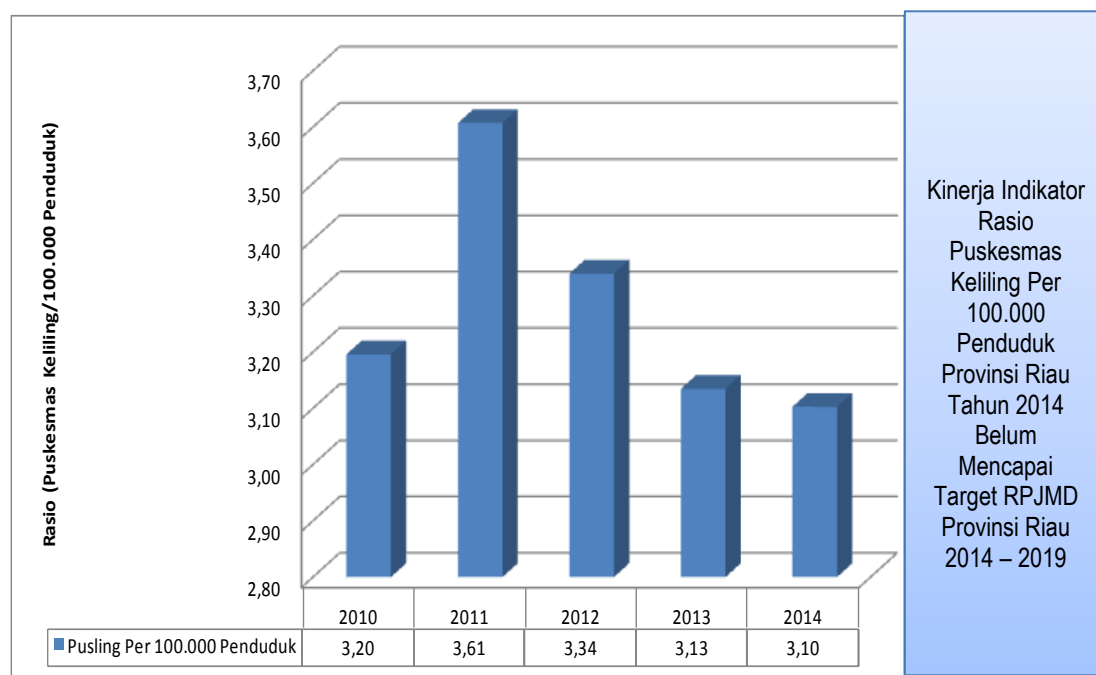
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Puskesmas keliling merupakan bentuk lain dari puskesmas pembantu untuk melayani daerah-daerah yang terpencil. Selama periode 2010 – 2014, rasio puskesmas keliling berfluktuatif menurun seiring dengan semakin terbukanya wilayah-wilayah yang selama ini relatif terpencil. Pada tahun 2010, rasio puskesmas keliling per 100.000 penduduk di Provinsi Riau sebesar 3,20 meningkat menjadi 3,61 pada tahun 2011 dan selanjutnya menurun menjadi 3,13 pada tahun 2013. Pada tahun 2014, diprediksi rasio puskesmas keliling per 100.000 penduduk sebesar 3,10.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio puskesmas keliling per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 3,44 puskesmas

keliling per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, realisasi rasio puskesmas keliling per 100.000 penduduk diprediksi sebesar 3,10 puskesmas keliling per 100.000 penduduk, sehingga realisasi kinerja indikator rasio puskesmas keliling per 100.000 penduduk relatif belum sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,12%.

Gambar 2.55.
Rasio Puskesmas Keliling Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

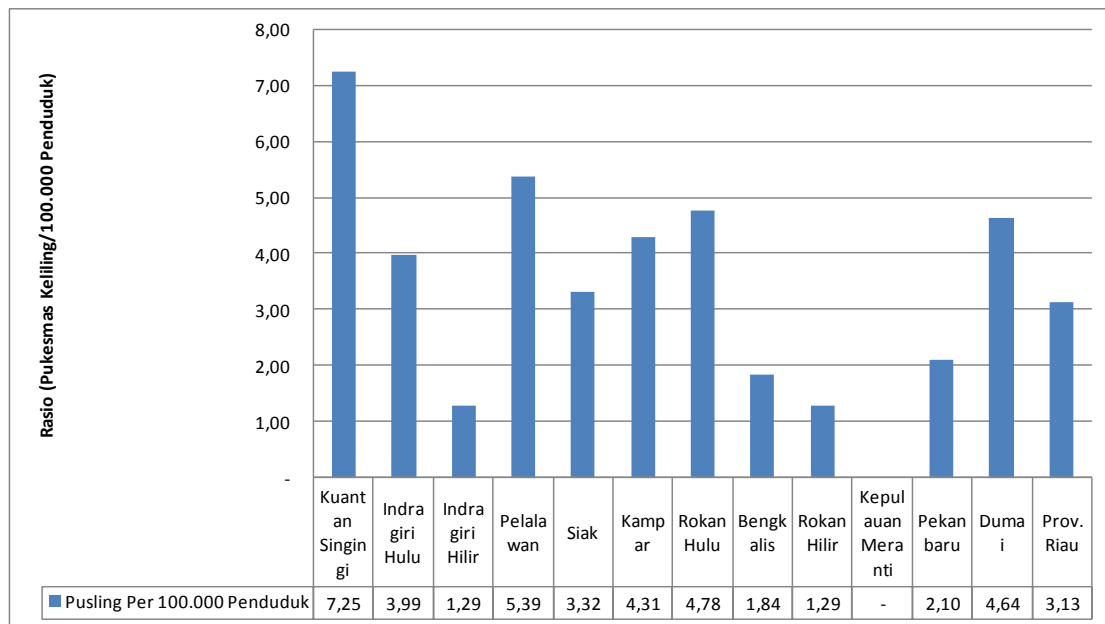


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio Puskesmas Keliling per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau terdapat 7 Kabupaten/Kota yang rasionya lebih besar dari rasio Provinsi Riau dan 5 Kabupaten/Kota lebih kecil dari rasio Provinsi Riau. Rasio puskesmas keliling per 100.000 penduduk yang lebih besar dari rasio Provinsi Riau umumnya merupakan Kabupaten/Kota yang banyak Desa/Kelurahan yang relatif terpencil dan belum terlayani oleh puskesmas dan puskesmas pembantu atau tidak memiliki puskesmas keliling yang memadai yaitu Kuantan Singingi (7,25), Pelalawan (5,39), Rokan Hulu (4,78), Dumai (4,64), Kampar (4,31) dan Indragiri Hulu (3,99). Kabupaten/Kota yang rasio puskesmas kelilingnya lebih kecil dari puskesmas keliling Provinsi Riau adalah Kepulauan Meranti (0), Rokan Hilir (1,29), Indragiri Hilir (1,29), Rokan Hilir (1,29), Bengkalis (1,84) dan Pekanbaru (2,10).

Gambar 2.56.
Rasio Puskesmas Keliling Per 100.000 Penduduk Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

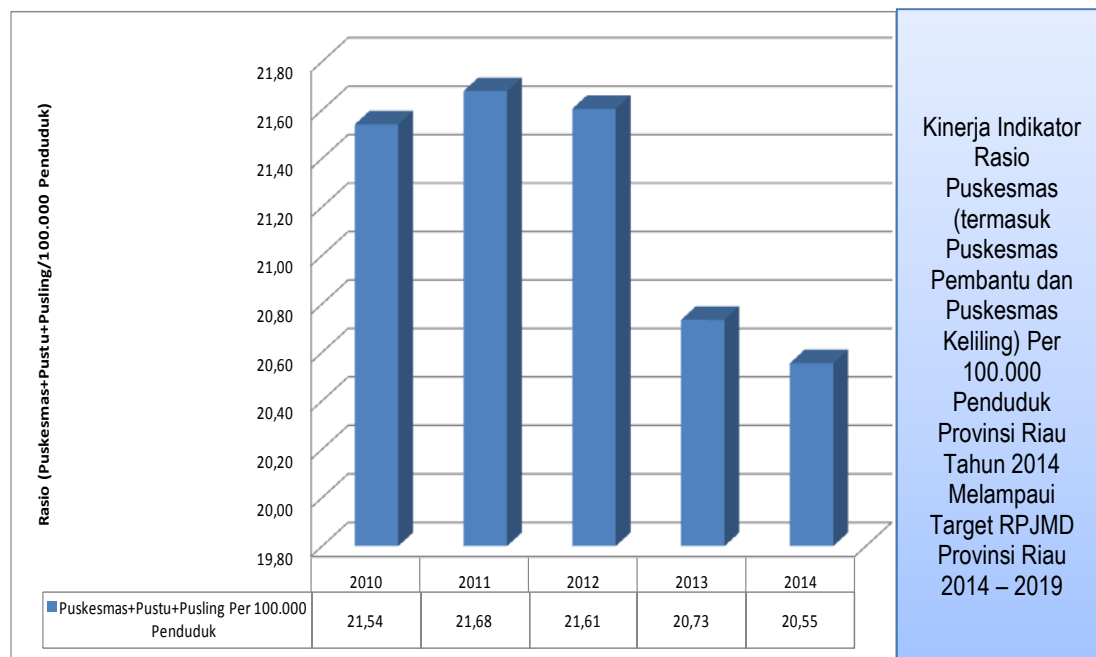


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
 Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Selama periode 2010 – 2014, rasio puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) per 100.000 penduduk memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, rasio puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) di Provinsi Riau sebesar 21,54, meningkat menjadi 21,61 tahun 2012. Pada tahun 2014 diprediksi rasio puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) per 100.000 penduduk sebesar 20,55 yang artinya 1 puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) melayani 4.865 penduduk.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 17,60 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, realisasi rasio puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) per 100.000 penduduk diprediksi sebesar 20,55 per 100.000 penduduk, sehingga realisasi kinerja indikator rasio puskesmas (termasuk puskesmas pembantu dan puskesmas keliling) per 100.000 penduduk melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 116,79%.

Gambar 2.57.
Rasio Puskesmas (termasuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling) Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

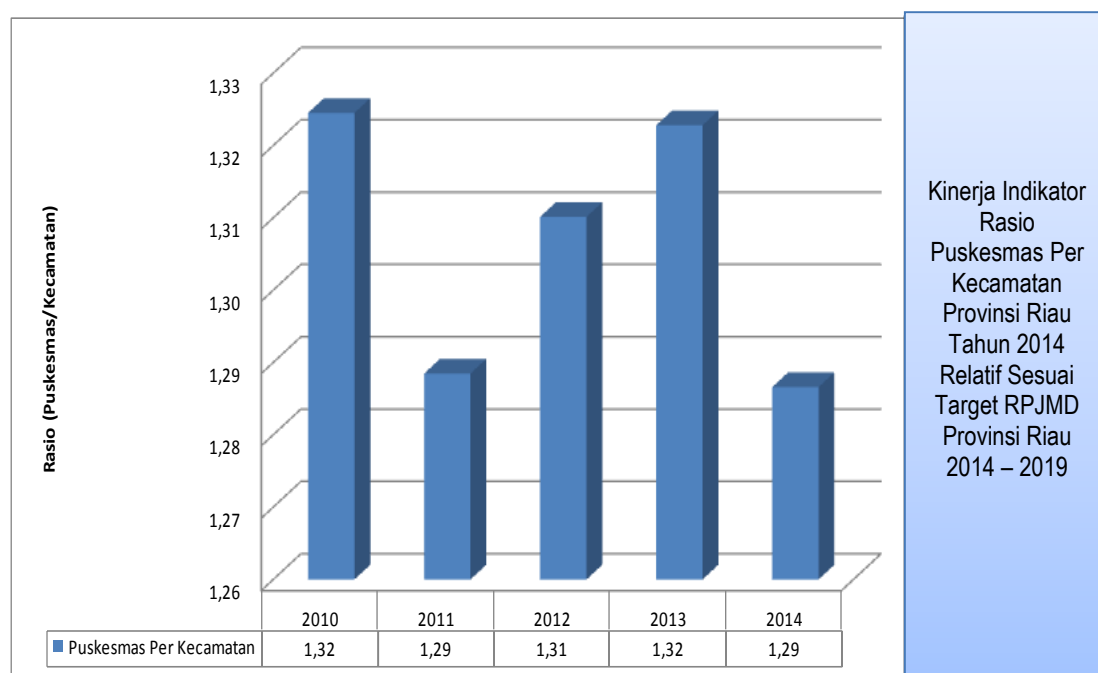
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

b) Cakupan Puskesmas Per Kecamatan

Pada tahun 2010, jumlah kecamatan di Provinsi Riau sebanyak 151 kecamatan dan jumlah puskesmas sebanyak 200 puskesmas sehingga rasio puskesmas per kecamatan sebesar 1,32 yang berarti bahwa setiap 1 kecamatan dilayani oleh 1,32 puskesmas. Pada tahun 2013, jumlah kecamatan meningkat menjadi 158 kecamatan dan jumlah puskesmas meningkat menjadi 209 puskesmas, sehingga rasionya masih terjaga sebesar 1,31. Pada tahun 2014, jumlah kecamatan sebanyak 164 dan jumlah puskesmas sekitar 211 sehingga rasio puskesmas per kecamatan menjadi 1,29.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio puskesmas per kecamatan di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,30. Pada tahun 2014, realisasi rasio puskesmas per kecamatan sekitar 1,29, sehingga realisasi kinerja indikator rasio puskesmas per kecamatan relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,23%.

Gambar 2.58.
Rasio Puskesmas Per Kecamatan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau

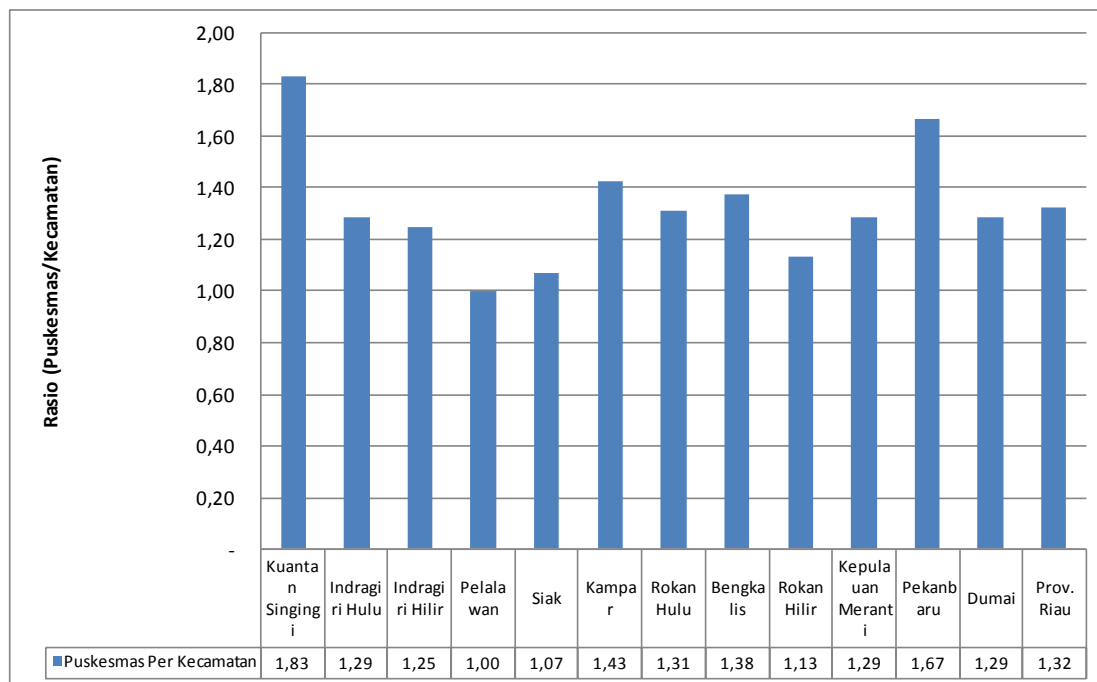


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio puskesmas per kecamatan menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 yang lebih tinggi dari rasio puskesmas per kecamatan Provinsi Riau terdapat di 4 Kabupaten/Kota dan yang lebih kecil terdapat di 8 Kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan rasio puskesmas per kecamatan yang lebih besar dari rasio puskesmas per kecamatan Provinsi Riau adalah Kuantan Singingi (1,83), Pekanbaru (1,67), Kampar (1,43) dan Bengkalis (1,38). Kabupaten/kota yang rasio puskesmas per kecamatan yang lebih kecil dari rasio puskesmas per kecamatan Provinsi Riau adalah Pelalawan (1,00), Siak (1,07), Rokan Hilir (1,13), Indragiri Hilir (1,25), Kepulauan Meranti (1,29), Indragiri Hulu (1,29), Dumai (1,29) dan Rokan Hulu (1,31).

Gambar 2.59.
Rasio Puskesmas Per Kecamatan Tahun 2010 – 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

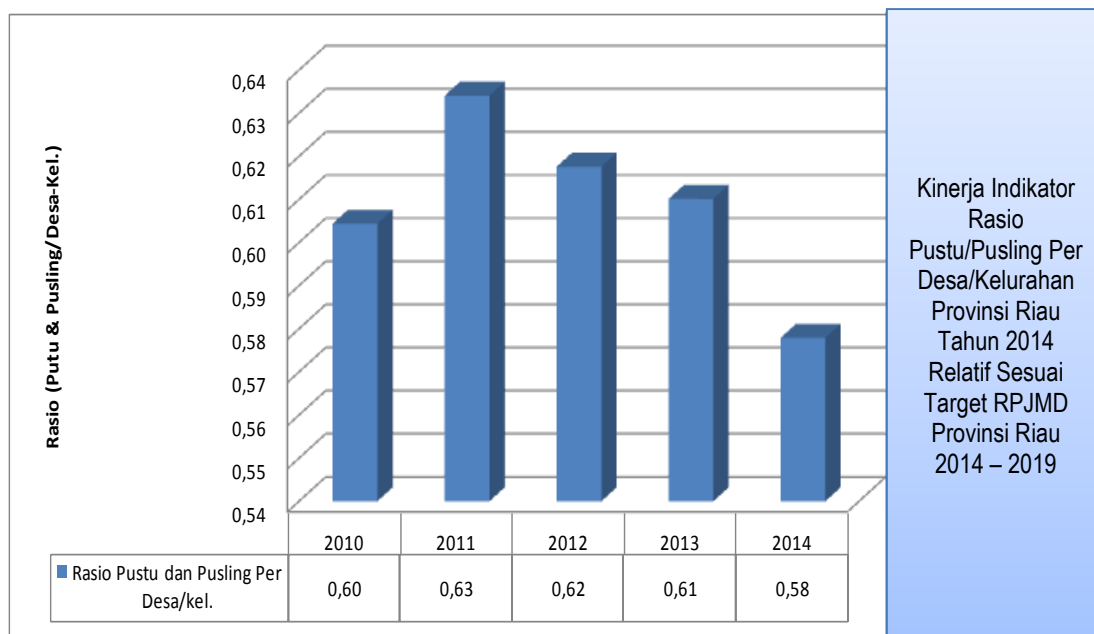
c) Cakupan Pustu dan Pusling Per Desa/Kelurahan

Bila puskesmas per kecamatan maka puskesmas pembantu (pustu) dan puskesmas keliling (pusling) per desa/kelurahan. Pada tahun 2010, jumlah Desa/kelurahan di Provinsi Riau sebanyak 1.643 Desa/kelurahan dengan jumlah Pustu/Pusling sebanyak 993 unit sehingga rasio pustu dan pusling per desa/kelurahan sebesar 0,60. Pada tahun 2013, jumlah desa/kelurahan meningkat menjadi 1.739 dan jumlah pustu/pusling meningkat menjadi 1.061 dengan rasio pustu/pusling per desa/kelurahan menjadi 0,61. Pada tahun 2014, jumlah desa/kelurahan meningkat menjadi 1.836 dan jumlah pustu/pusling diperkirakan tetap 1.061 unit sehingga rasio pustu/pusling per desa/kelurahan sebesar 0,58 yang berarti 1 pustu/pusling melayani 2 desa/kelurahan.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio pustu/pusling per desa/kelurahan di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 0,60. Pada tahun 2014, realisasi rasio pustu/pusling per desa/kelurahan sekitar 0,50, sehingga realisasi kinerja

indikator rasio pustu/pusling per desa/kelurahan relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,31%.

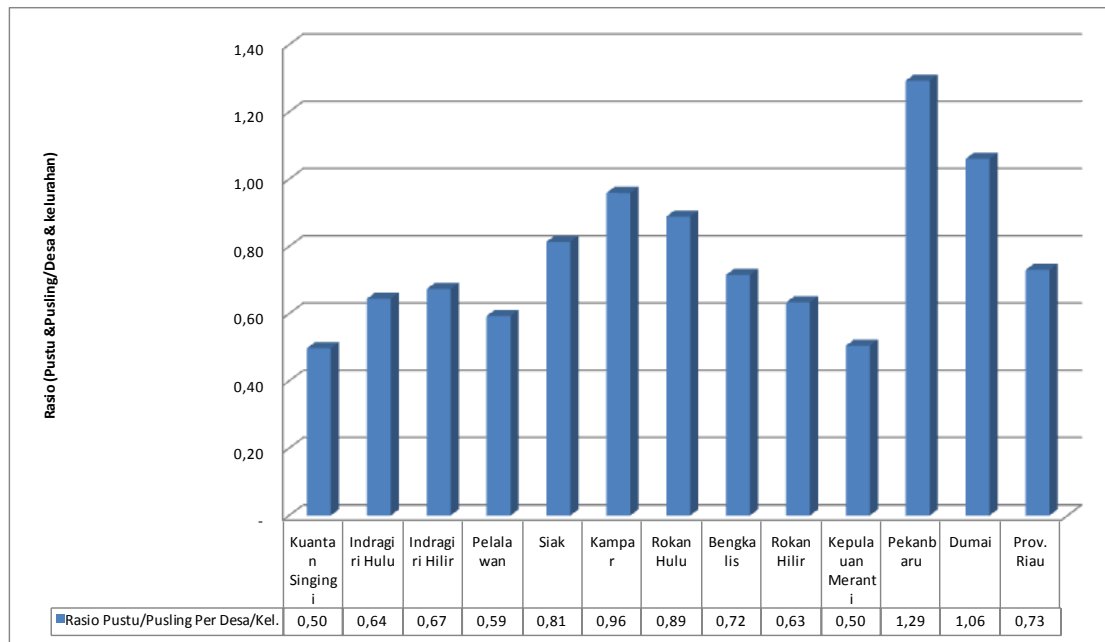
Gambar 2.60.
Rasio Pustu/Pusling Per Desa/kelurahan Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio Pustu/Pusling per desa/kelurahan Provinsi Riau yang lebih kecil dari 1 ternyata dijumpai Kabupaten/kota dengan rasio yang lebih kecil lagi yaitu Kepulauan Meranti (0,50), Kuantan singingi (0,50), Pelalawan (0,59), Rokan Hilir (0,63), Indragiri Hulu (0,64), Indragiri Hilir (0,67) dan Bengkalis (0,72). Pekanbaru dan Dumai merupakan dua kota yang memiliki rasio pustu/pusling per desa/kelurahan yang lebih besar dari 1. Sedangkan rasio pustu/pusling per desa/kelurahan yang lebih tinggi dari rasio pustu/pusling per desa/kelurahan dengan rasio di bawah 1 adalah Kampar (0,96), Rokan Hulu (0,89) dan Siak (0,81).

Gambar 2.61.
Rasio Pustu/Pusling Per Desa/kelurahan Tahun 2010 – 2014
Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

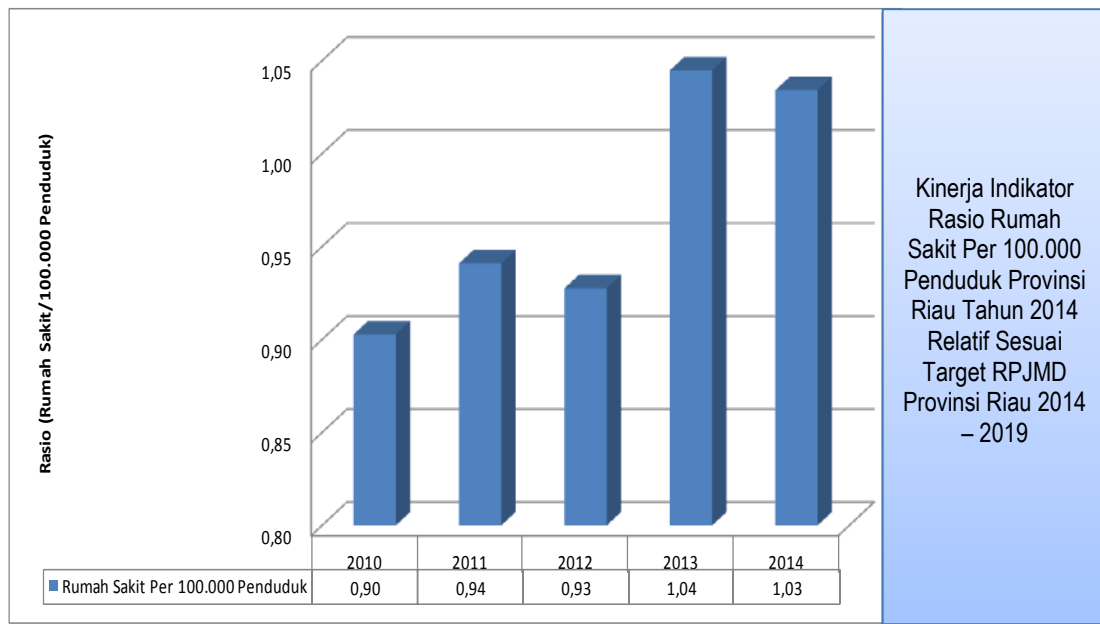
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

d) Rumah Sakit

Pada tahun 2010, jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 5,54 juta jiwa dan jumlah rumah sakit sebanyak 50 unit sehingga rasionya sebesar 0,90 rumah sakit per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah penduduk meningkat menjadi 6,13 juta jiwa dan rumah sakit bertambah menjadi 64 unit dengan rasio sebesar 1,04 rumah sakit per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, jumlah penduduk diperkirakan meningkat menjadi 6,19 juta jiwa dengan jumlah rumah sakit sebanyak 64 unit sehingga rasionya menjadi 1,03 yang berarti 1,03 unit rumah sakit melayani 100.000 penduduk.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio rumah sakit per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 1,02. Pada tahun 2014, realisasi rasio rumah sakit per 100.000 penduduk sekitar 1,03, sehingga realisasi kinerja indikator rasio rumah sakit per 100.000 penduduk relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,98%.

Gambar 2.62.
Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

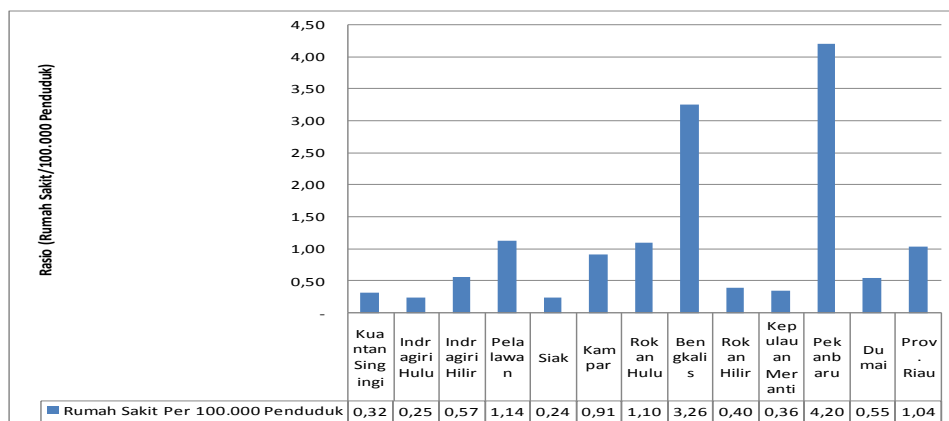


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk tahun 2013 menurut Kabupaten/kota menunjukkan hanya 4 Kabupaten/Kota yang rasionya lebih tinggi dari rasio Provinsi Riau. Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Rokan Hulu memiliki rasio yang lebih besar dari 1, dimana masing-masingnya sebesar 4,20; 3,26, 1,14; dan 1,10. Kabupaten/Kota lainnya memiliki rasio lebih kecil dari rasio Provinsi Riau dan lebih kecil dari 1.

Gambar 2.63.
Rasio Rumah Sakit Per 100.000 Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



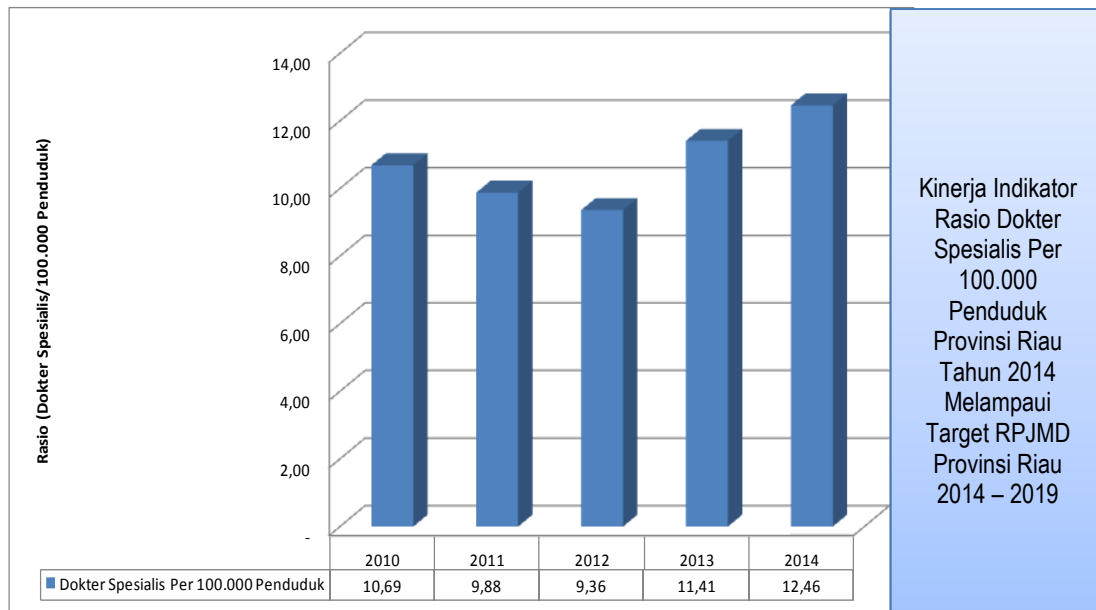
Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

e) Dokter

Pada tahun 2010, jumlah dokter (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi) sebanyak 1.585 orang untuk melayani 5,54 juta penduduk Riau. Pada tahun 2013, jumlah dokter meningkat menjadi 2.110 orang melayani 6,13 juta penduduk. Pada tahun 2014, diperkirakan jumlah dokter sebanyak 2.222 orang dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6,19 juta jiwa. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan dokter di Provinsi Riau meningkat sebesar 3,64% per tahun lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Riau yang meningkat sebesar 2,24% per tahun.

Pada tahun 2010, jumlah dokter spesialis sebanyak 592 orang untuk melayani 5,54 juta penduduk Provinsi Riau sehingga rasionya sebesar 10,69 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah dokter spesialis sebanyak 699 orang untuk melayani 6,13 juta penduduk Provinsi Riau sehingga rasionya sebesar 11,41 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, jumlah dokter spesialis diperkirakan sebanyak 771 orang dengan jumlah penduduk sebanyak 6,19 juta penduduk sehingga rasionya sebesar 12,46 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Selama periode 2010 – 2014, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Provinsi Riau masih di bawah standar nasional yaitu 15 dokter spesialis per 100.000 penduduk.

Gambar 2.64.
Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

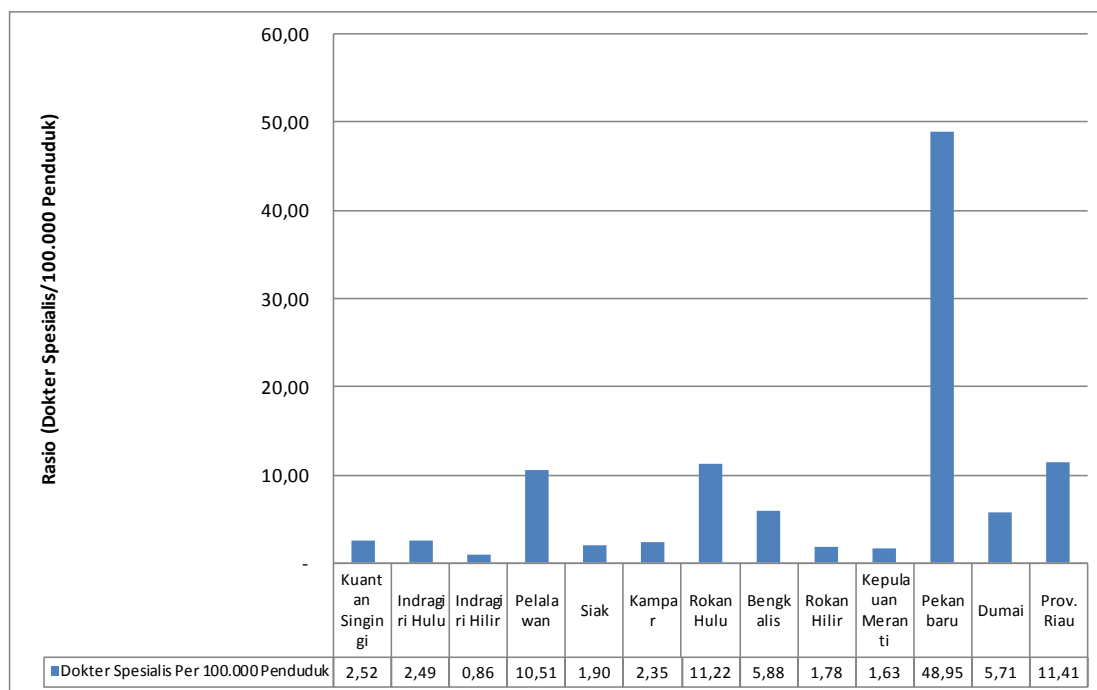


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 9,40. Pada tahun 2014, realisasi rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk Provinsi Riau sekitar 12,46, sehingga realisasi kinerja indikator rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 132,54%.

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk tahun 2013 menunjukkan bahwa hanya Kota Pekanbaru yang memiliki rasio lebih besar dari rasio Provinsi Riau dan sekaligus melampaui standar jumlah dokter spesialis per 100.000 penduduk yaitu sebesar 48,95 dokter spesialis per 100.000 penduduk. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di Kabupaten/kota lainnya di bawah rasio Provinsi Riau.

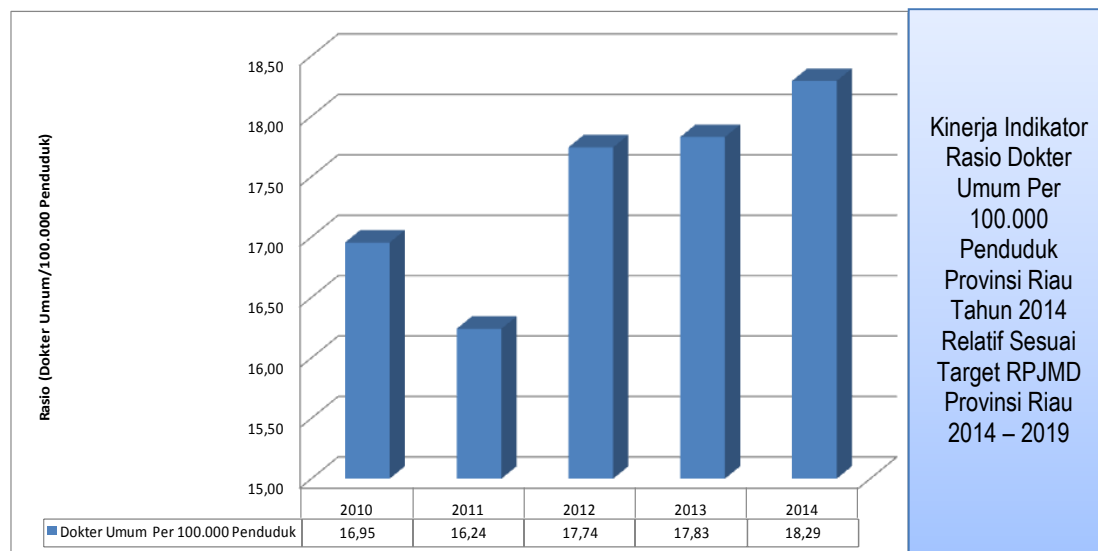
Gambar 2.65.
Rasio Dokter Spesialis Per 100.000 Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Jumlah dokter umum tahun 2010 sebanyak 939 orang untuk melayani 5,54 juta penduduk Riau dengan rasio sebesar 16,95 dokter umum per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah dokter umum meningkat menjadi 1.092 orang untuk melayani 6,13 juta penduduk Provinsi Riau dengan rasio 17,83 dokter umum per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, jumlah dokter umum diperkirakan sebanyak 1.132 orang untuk melayani 6,19 juta jiwa penduduk Provinsi Riau sehingga rasionya sebesar 18,29 dokter umum per 100.000 penduduk. Selama periode 2010 – 2014, rasio dokter umum per 100.000 penduduk Riau masih di bawah standar nasional yaitu 40 dokter umum per 100.000 penduduk.

Gambar 2.66.
Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau



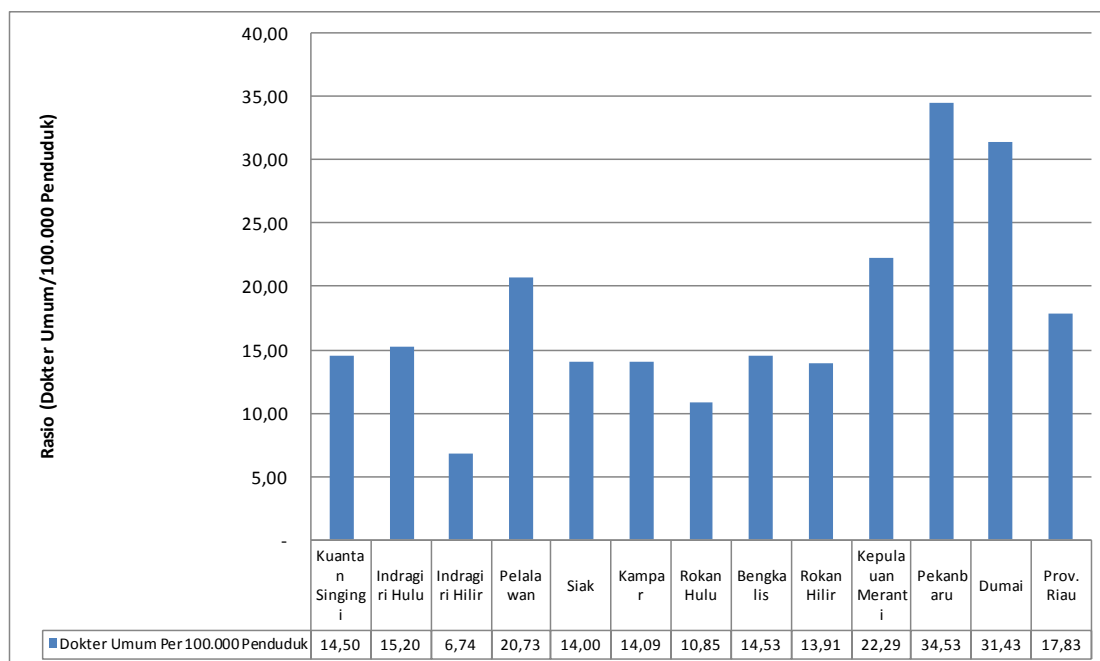
Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio dokter umum per 100.000 penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 17,70 dokter umum . Pada tahun 2014, realisasi rasio dokter umum per 100.000 penduduk Provinsi Riau sekitar 18,29, sehingga realisasi kinerja indikator rasio dokter umum per 100.000 penduduk relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,33%.

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Pelalawan memiliki rasio dokter umum per 100.000 penduduk yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau namun masih di bawah standar nasional 40 dokter umum per 100.000 penduduk. Sedangkan 8 kabupaten lainnya yaitu Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Bengkalis, Kampar, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Indragiri Hilir memiliki rasio yang lebih kecil dari rasio dokter umum per 100.000 penduduk.

Gambar 2.67.
Rasio Dokter Umum Per 100.000 Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



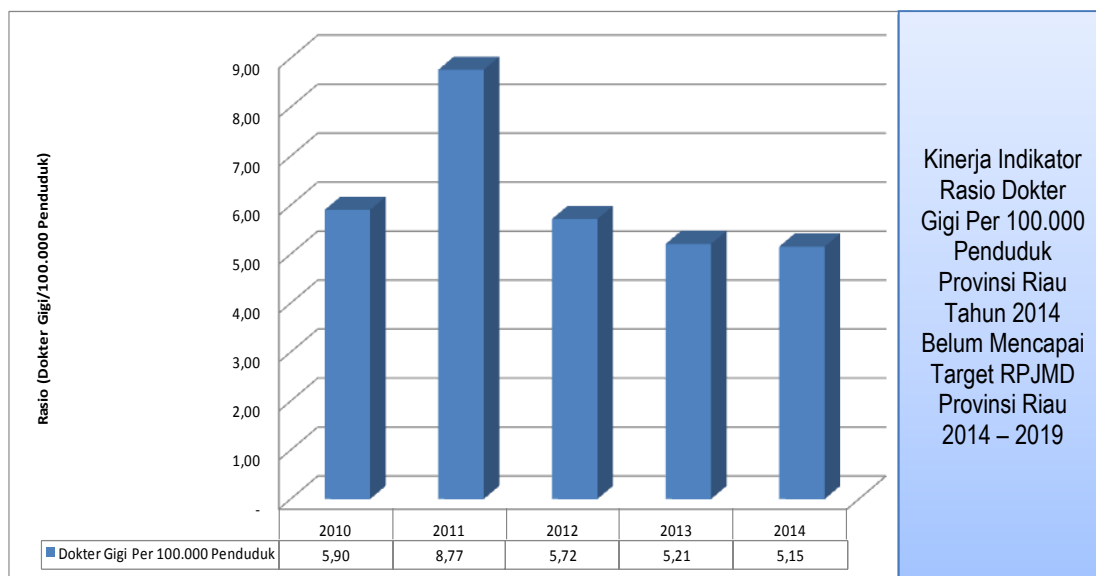
Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Pada tahun 2010, jumlah dokter gigi sebanyak 327 orang melayani 5,54 juta penduduk Provinsi Riau sehingga rasionya sebesar 5,90 dokter gigi per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah dokter gigi meningkat menjadi 319 orang melayani 6,13 juta penduduk Provinsi Riau sehingga rasionya 5,21 dokter gigi per 100.000 penduduk. Pada tahun 2104, jumlah dokter gigi diperkirakan sebanyak 319 orang melayani 6,19 juta jiwa penduduk Provinsi Riau dengan rasio 5,15 dokter gigi per 100.000 penduduk. Selama periode ini, rasio dokter gigi di Provinsi Riau masih di bawah standar nasional yaitu sebesar 11 dokter gigi per 100.000 penduduk.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 5,72 . Pada tahun 2014, realisasi rasio dokter gigi per 100.000 penduduk Provinsi Riau sekitar 5,15, sehingga realisasi kinerja indikator rasio dokter gigi per 100.000 penduduk belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,12%.

Gambar 2.68.
Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

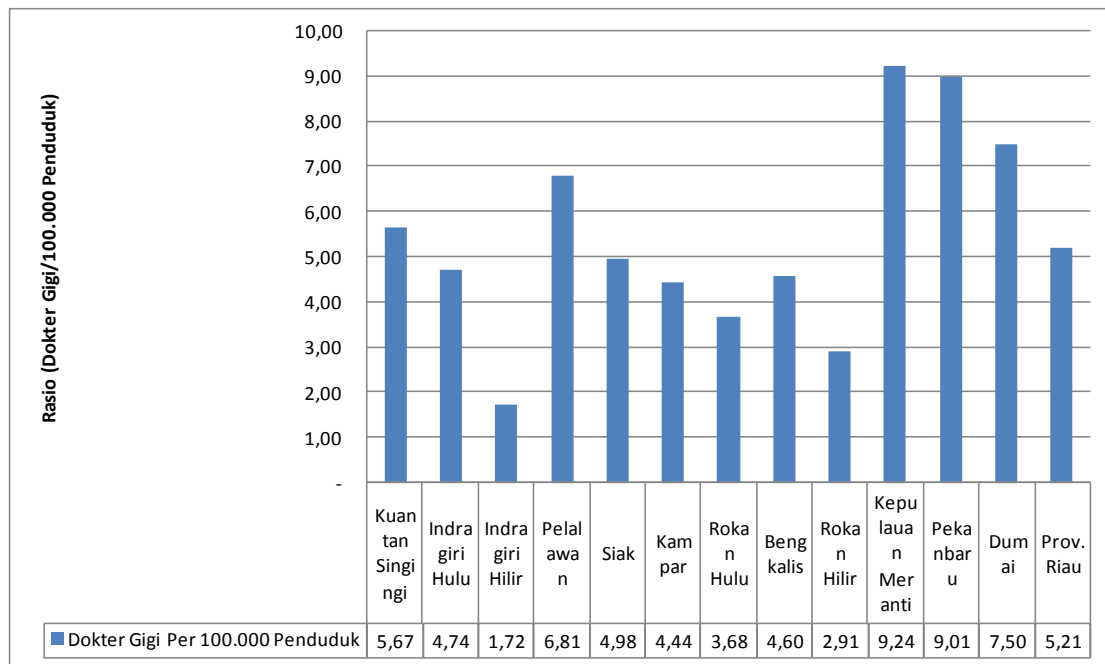


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten pelalawan dan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki rasio dokter gigi per 100.000 penduduk yang lebih tinggi dibanding rasio dokter gigi Provinsi Riau. Perlu dicatat bahwa, pencapaian rasio ke 5 Kabupaten/Kota ini masih di bawah standar nasional. Kabupaten lainnya yaitu Indragiri Hilir, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, Indragiri Hulu dan Siak memiliki rasio yang lebih kecil dari Provinsi Riau dan di bawah standar nasional.

Gambar 2.69.
Rasio Dokter Gigi Per 100.000 Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

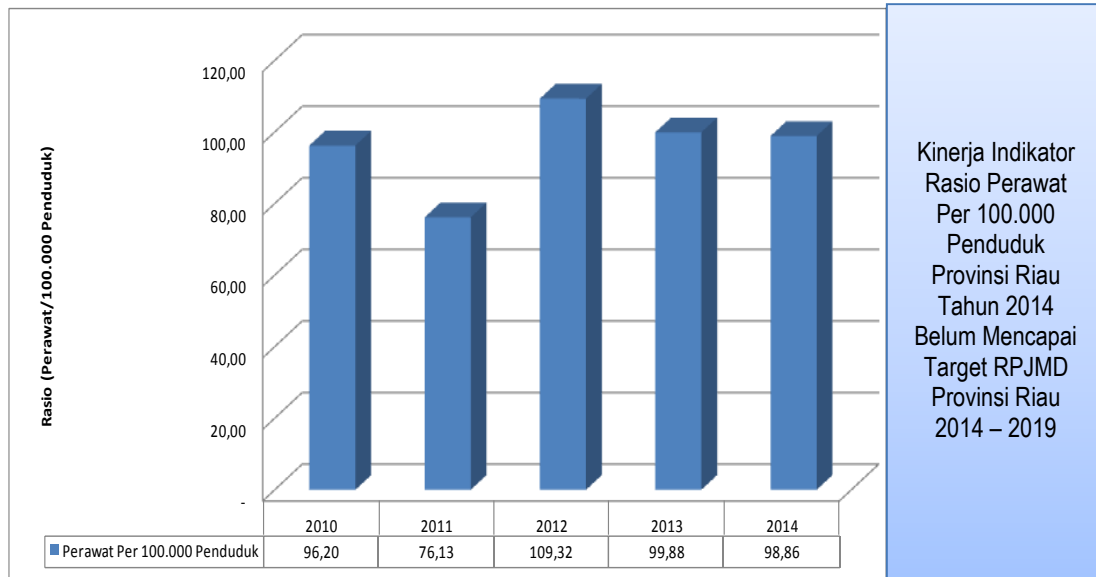
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

f) Perawat dan Bidan

Pada tahun 2010, jumlah perawat sebanyak 5.328 orang melayani 5,54 juta penduduk Provinsi Riau dengan rasio 96,20 perawat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah perawat meningkat menjadi 6.118 orang melayani 6,13 juta penduduk Provinsi Riau dengan rasio 99,88 perawat per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, jumlah perawat diperkirakan sebanyak 6.118 orang melayani 6,19 juta penduduk Provinsi Riau dengan rasio 98,86 perawat per 100.000 penduduk. Selama periode ini, rasio perawat per 100.000 penduduk di Provinsi Riau masih di bawah standar nasional yaitu 111 perawat per 100.000 penduduk

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio perawat per 100.000 penduduk Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 109,30 . Pada tahun 2014, realisasi rasio perawat per 100.000 penduduk Provinsi Riau sekitar 98,86, sehingga realisasi kinerja indikator rasio perawat per 100.000 penduduk belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 89,07%.

Gambar 2.70.
Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014
di Provinsi Riau

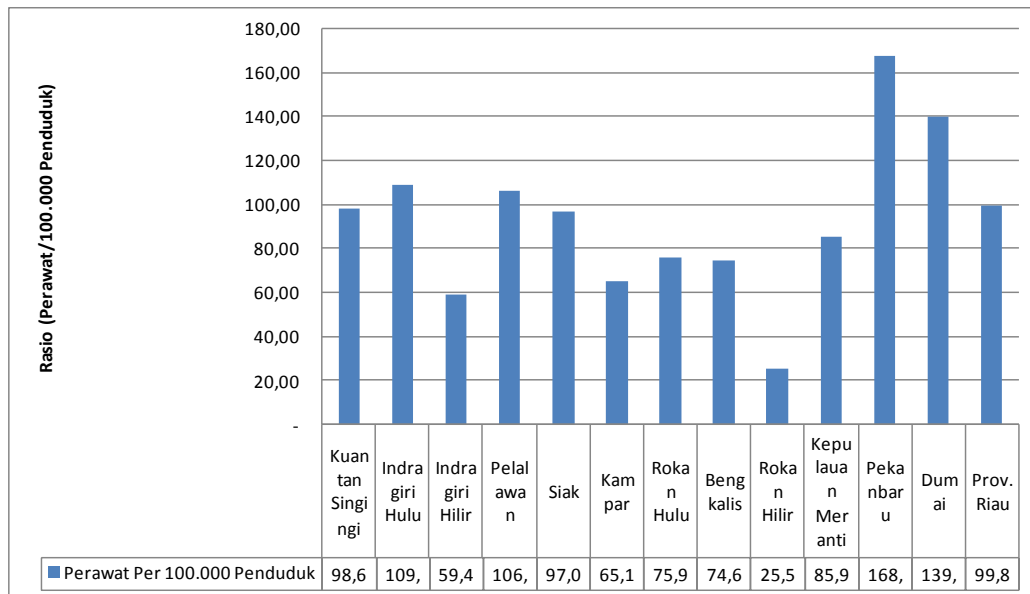


Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
 Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio perawat per 100.000 penduduk tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memperlihatkan bahwa Kota Pekanbaru dan Dumai memiliki rasio perawat per 100.000 penduduk yang lebih tinggi dari rasio Provinsi Riau sekaligus melebihi standar nasional. Rasio perawat per 100.000 penduduk di Kabupaten Indragiri Hulu dan Pelalawan meski rasionya lebih tinggi dibanding Provinsi Riau namun masih di bawah standar nasional. Kabupaten lainnya memiliki rasio di bawah Provinsi Riau dan di bawah standar nasional.

Pada tahun 2010, jumlah bidan sebanyak 3.484 orang melayani 5,54 juta penduduk Provinsi Riau dengan rasio 62,91 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013, jumlah bidan meningkat menjadi 4.563 orang melayani 6,13 juta penduduk provinsi Riau sehingga rasionya meningkat menjadi 74,49 bidan per 100.000 penduduk. Pada tahun 2014, jumlah bidan diperkirakan sebanyak 4.563 orang melayani 6,19 juta penduduk Provinsi Riau sehingga rasionya 73,73 bidan per 100.000 penduduk Provinsi Riau. Selama periode 2010 – 2014, pencapaian rasio bidan per 100.000 penduduk Provinsi Riau masih di bawah standar nasional yaitu 100 bidan per 100.000 penduduk.

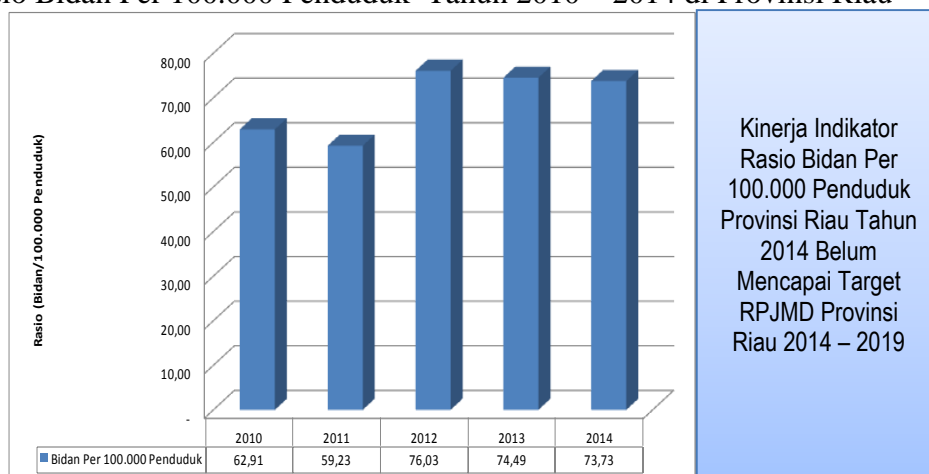
Gambar 2.71.
Rasio Perawat Per 100.000 Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
 Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio bidan per 100.000 penduduk Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 76 bidan. Pada tahun 2014, realisasi rasio bidan per 100.000 penduduk Provinsi Riau sekitar 73,73, sehingga realisasi kinerja indikator rasio bidan per 100.000 penduduk belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 73,73%.

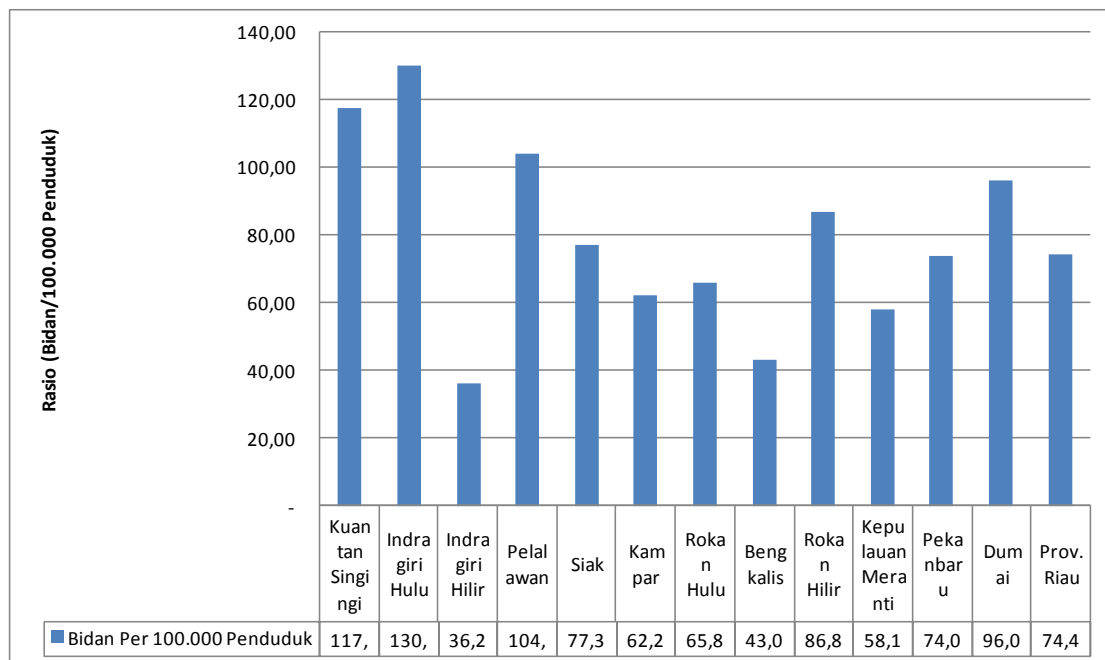
Gambar 2.72.
Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
 Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Rasio Bidan per 100.000 penduduk tahun 2013 menurut Kabupaten/kota memperlihatkan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Pelalawan, Dumai, Rokan Hilir dan Siak memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau namun masih di bawah standar nasional. Rasio bidan per 100.000 penduduk di Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Kampar, Rokan Hulu, Pekanbaru, dan Siak memiliki rasio yang lebih rendah dibanding rasio bidan per 100.000 penduduk Provinsi Riau dan di bawah standar nasional 100 bidan per 100.000 penduduk.

Gambar 2.73.
Rasio Bidan Per 100.000 Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

3) Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Tingginya permukaan lahan hutan menjadi lahan pertanian menyebabkan lahan menjadi terbuka sehingga pelepasan agregat tanah, aliran permukaan, erosi tinggi dan kebakaran hutan. Kondisi tersebut telah meningkatkan luas lahan kritis di Provinsi Riau. Tingkat erosi dan kekritisan lahan pada setiap DAS di Provinsi Riau masing-masingnya ditunjukkan pada Tabel 2.16 dan Tabel 2.17. Luas lahan kritis dalam kawasan hutan

berdasarkan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) di Provinsi Riau pada tahun 2013 seluas 1,54 juta hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seluas 237.157 hektar atau 18,91%, diikuti Kabupaten Kampar seluas 190.833 hektar (15,22%) dan Kabupaten Bengkalis seluas 151.149 hektar (12,05%).

Tabel 2.16
Tingkat Erosi pada Setiap DAS Tahun 2012 Provinsi Riau

Tingkat Erosi	DAS				Grand Total
	Indragiri	Kampar	Rokan	Siak	
Sangat Ringan	1.207	2.195	1.123	1.051	5.576
Ringan	315	1.067	995	481	2.858
Sedang	556	1.436	581	615	3.188
Berat	329	901	258	206	1.694
Sangat Berat	192	387	190	139	908
Grand Total	2.599	5.986	3.147	2.492	14.224

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2013)

Perairan Sungai Indragiri – Kuantan bagian hulu berdasarkan kriteria PP Nomor 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II, maka (i) COD dan BOD nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (iii) Nitrat, Fosfat dan sianida nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. Kesimpulannya adalah daya tampung beban cemaran air sungai Indragiri – Kuantan bagian hulu berdasarkan parameter COD dan BOD sudah melampaui, dan Nitrat, Fosfat serta Sianida masih rendah untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, namun untuk DO masih rendah.

Tabel 2.17
Tingkat Kekritisan Lahan pada Setiap DAS Tahun 2012
Provinsi Riau

Kekritisan	DAS				Grand Total
	Indragiri	Kampar	Rokan	Siak	
Agak Kritis	822.987	911.920	618.973	678.915	3.032.793
Kritis	526.990	561.900	584.505	317.912	1.991.307
Potensial Kritis	1.086.729	1.159.932	1.020.039	557.200	3.823.900
Sangat Kritis	101.315	93.282	97.304	14.029	305.929
Tidak Kritis	183.864	255.427	265.351	246.498	951.141
Grand Total	2.726.883	2.982.461	2.586.172	1.814.554	10.105.071

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2013)

Perairan sungai Indragiri – Kuantan dibagian hilir berdasarkan kriteria PP Nomor 82 tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD dan BOD nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) Nitrat, Fosfat dan Sianida nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. (iii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. Kesimpulannya adalah daya tampung beban cemaran air sungai Indragiri – Kuantan bagian hilir berdasarkan parameter COD dan BOD sudah melampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. Begitu juga dengan DO yang rendah. Sedangkan Nitrat, Fosfat dan Sianida masih belum melampaui. COD dan BOD tinggi dan DO rendah mengindikasikan kawasan ini sangat tinggi menerima beban cemaran.

Tabel 2.18
Sifat Kimia Air Sungai DAS Indragiri Pada Bulan Kering dan Bulan Basah
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Tahun	Hulu/ Hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO ₃	DO	Ph	SO ₄
2009	Hulu	1,755	7,25	0,03	0,93	4,38	7,48	2,43
	Hilir	1,75	10,25	0,02	1,12	4,33	6,91	0,06
2010	Hulu	5,58	19,61	0,03	0,83	4,31	6,76	6,09
	Hilir	12,26	29,41	0,02	0,69	4,37	6,68	6,68
2011	Hulu	4,98	17,58	0,01	1,62	3,99	7,43	0,09
	Hilir	7,30	25,94	0,03	1,54	4,00	7,00	2,88
2012	Hulu	3,87	20,35	0,021	7,38	3,67	6,19	5,64
	Hilir	13,93	39,25	0,01	7,61	3,25	6,29	21,79
2013	Hulu	7,55	72,19	0,12	18,27	4,32	6,27	31,81
	Hilir	9,34	87,53	0,0075	7,77	2,77	6,60	16,90
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 – 9	-
Bulan Basah								
2009	Hulu	9,46	36,22	0,17	0,69	5,21	6,72	8,26
	Hilir	8,44	33,46	0,13	25,17	5,30	6,54	9,52
2010	Hulu	6,26	20,09	0,02	0,84	3,03	6,44	6,70
	Hilir	7,28	27,50	0,01	0,96	3,01	6,26	9,86
2011	Hulu	4,51	20,63	0,03	5,13	3,81	6,69	4,66
	Hilir	5,16	26,94	0,01	2,64	3,39	6,33	8,93
2012	Hulu	8,68	40,00	0,005	8,89	3,44	5,90	10,63
	Hilir	15,17	64,00	0,07	9,71	3,08	6,23	10,37
2013	Hulu	8,92	28,41	0,006	8,42	3,93	6,67	21,52
	Hilir	13,47	50,03	0,04	9,17	3,58	6,54	20,51
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 – 9	-

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2013)

Perairan Sungai Kampar hulu berdasarkan kriteria PP Nomor 82 Tahun 2001 dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) DO nilainya lebih kecil dari baku air mutu kelas II atau tidak memenuhi persyaratan. (ii) COD, BOD, NO₃N dan Fosfat nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi persyaratan. (iii) CN nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak dipersyaratkan. Kesimpulan adalah daya tampung beban cemaran air Sungai Kampar bagian hulu berdasarkan parameter COD, BOD, Nitrat dan Fosfat masih belum dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai, namun untuk DO sudah dilampaui.

Perairan Sungai kampar bagian hilir dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD, BOD, Nitrat dan Fosfat nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi persyaratan. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi persyaratan dan (iii) Cl tidak dipersyaratkan. Kesimpulan adalah daya tampung beban cemaran air Sungai Kampar bagian hilir berdasarkan parameter COD, BOD, Nitrat dan Fosfat sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. Sedangkan DO masih sangat rendah.

Tabel 2.19
Sifat Kimia Air Sungai DAS Kampar Pada Bulan Kering dan Bulan Basah
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Tahun	Hulu/ Hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO ₃	DO	Ph	SO ₄
2009	Hulu	4	25	0,03	0,71	4,33	6,32	4,03
	Hilir	8,50	42,50	0,01	0,99	2,38	5,06	14,12
2010	Hulu	1,94	12,19	0,05	0,67	2,90	6,07	2,49
	Hilir	2,37	12,19	0,04	0,36	4,05	6,07	2,26
2011	Hulu	6,04	19,84	0,03	1,55	4,82	5,83	2,33
	Hilir	15,30	49,60	0,03	1,53	4,52	5,02	5,95
2012	Hulu	1,41	18,30	0,03	6,70	3,38	6,47	2,37
	Hilir	5,43	52,83	Na	3,21	3,31	5,40	7,07
2013	Hulu	6,19	29,79	Na	2,91	3,04	6,64	Na
	Hilir	4,74	43,90	Na	15,90	2,87	5,92	Na
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 - 9	-
Bulan Basah								
2009	Hulu	3,07	22,36	0,05	0,38	4,25	5,59	3,25
	Hilir	4,35	31,70	0,04	0,53	4,15	5,37	4,37
2010	Hulu	2,58	9,71	0,03	0,21	4,08	6,11	3,18
	Hilir	2,77	12,14	0,04	0,26	3,62	6,77	2,22
2011	Hulu	10,52	27,42	0,03	1,28	2,27	5,51	1,16
	Hilir	16,50	66,48	0,03	4,53	2,62	5,14	6,60
2012	Hulu	7,88	48	0,02	6,06	3,46	6,61	4,92
	Hilir	7,68	40	0,009	6,61	3,11	5,52	8,84
2013	Hulu	0,82	2,77	Na	4,83	3,55	6,61	Na

	Hilir	6,29	20,27	Na	7,04	2,05	5,38	Na
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 - 9	-

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2013)

Perairan sungai Rokan berdasarkan kriteria PP Nomor 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) BOD nilainya lebih rendah dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) COD, Nitrat, Fosfat dan Sianida nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. (iii) DO nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau memenuhi dan (iv) CN hasilnya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. Kesimpulan adalah daya tampung beban cemaran air Sungai Rokan bagian hulu berdasarkan parameter COD, Nitrat, Fosfat dan Sianida masih belum melampaui serta DO memenuhi. Sedangkan BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai.

Tabel 2.20
Sifat Kimia Air Sungai DAS Rokan Pada Bulan Kering dan Bulan Basah
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Tahun	Hulu/ Hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO ₃	DO	Ph	SO ₄
2009	Hulu	1,50	9,80	0,02	0,45	3,51	7,21	2,24
	Hilir	16,5	63,53	0,09	0,53	3,39	6,73	8,70
2010	Hulu	3,01	44,55	0,09	0,56	4,67	6,64	2,57
	Hilir	5,52	93,72	0,06	0,62	4,77	5,58	12,07
2011	Hulu	5,85	23,04	0,01	1,06	4,81	5,79	3,06
	Hilir	10,05	42,33	0,03	4,81	4,78	5,39	9,24
2012	Hulu	13,24	49,60	0,02	6,72	4,21	7,28	3,13
	Hilir	13,05	57,60	0,01	6,59	4,39	6,25	13,85
2013	Hulu	4,23	25,60	0,05	4,68	5,30	7,24	7,23
	Hilir	7,26	40,00	0,05	4,11	4,11	6,25	15,04
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 - 9	-
Bulan Basah								
2009	Hulu	13,89	22,05	0,03	0,65	3,32	6,54	32,81
	Hilir	24,77	39,21	0,13	0,93	3,35	5,97	10,39
2010	Hulu	12,07	34,48	0,06	1,88	3,70	6,28	9,22
	Hilir	10,67	47,61	0,08	1,87	3,82	5,66	11,55
2011	Hulu	13,24	49,60	0,02	6,72	4,21	7,28	3,13
	Hilir	13,05	57,60	0,01	6,59	4,39	6,25	13,85
2012	Hulu	10,92	46,89	0,006	7,41	3,74	6,56	4,55
	Hilir	20,69	86,24	0,03	4,71	2,25	5,84	5,92
2013	Hulu	8,82	30,912	0,09	10,52	4,34	6,30	10,01
	Hilir	10,97	33,50	0,10	10,49	2,97	5,37	9,05
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 - 9	-

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2013)

Perairan Sungai Rokan bagian hilir berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001 dapat digolongkan ke dalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD, BOD dan Nitrat nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (ii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi dan (iii) Fosfat dan Sianida nilainya lebih rendah dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. Kesimpulannya adalah daya tampung beban cemaran air sungai Rokan bagian hilir berdasarkan parameter COD, BOD dan nitrat dilampaui. Nilai DO rendah, sedangkan Fosfat dan Sianida masih rendah untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai.

Tabel 2.21
Sifat Kimia Air Sungai DAS Siak Pada Bulan Kering dan Bulan Basah
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Tahun	Hulu/ Hilir	Bulan Kering						
		BOD	COD	P Total	NO ₃	DO	Ph	SO ₄
2009	Hulu	5,50	25,0	0,53	0,73	5,62	5,22	8,50
	Hilir	12,50	44,3	0,085	0,90	4,92	5,11	14,50
2010	Hulu	1,615	9,8	0,0185	0,34	4,395	5,90	3,77
	Hilir	16,21	58,8	0,191	1,02	4,305	4,785	20,37
2011	Hulu	12,17	25,9	0,012	1,21	3,335	6,76	4,96
	Hilir	27,61	62,6	0,098	3,02	1,38	6,325	42,47
2012	Hulu	5,356	26,4	0,009	15,43	4,57	6,01	3,84
	Hilir	14,80	68,9	0,022	19,35	2,965	4,90	20,79
2013	Hulu	4,28	39,2	-	18,80	2,69	5,81	-
	Hilir	4,33	40,8	-	22,32	1,41	6,28	-
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6 - 9	-
Bulan Basah								
2009	Hulu	3,78	27,0	0,059	0,64	4,88	5,78	29,56
	Hilir	21,11	75,1	0,11	0,78	4,96	5,12	11,88
2010	Hulu	10,38	42,9	0,029	2,41	4,02	5,65	9,83
	Hilir	17,97	64,3	0,088	3,57	3,09	5,02	16,84
2011	Hulu	13,69	38,2	0,033	3,01	4,59	5,76	9,91
	Hilir	21,45	51,7	0,023	3,71	1,82	4,82	7,43
2012	Hulu	3,78	24,0	0,024	4,42	3,37	4,96	3,55
	Hilir	22,65	99,8	0,064	5,70	1,34	4,70	21,77
2013	Hulu	3,20	12,0	-	4,65	3,22	6,18	-
	Hilir	14,45	48,3	-	9,59	1,55	6,47	-
Baku Mutu	Kelas 1	2	10	0,2	10	6	6 – 9	400
	Kelas 2	3	25	0,2	10	4	6	-

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2013)

Perairan Sungai Siak bagian hulu dapat digolongkan ke dalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (i) COD, Nitrat dan Fosfat nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau memenuhi. (ii) BOD nilainya

lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (iii) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi dan (iv) Klorin (Cl) bebas tidak dipersyaratkan untuk air kelas II. Kesimpulan adalah daya tampung beban cemaran air Sungai Siak bagian hulu sampai Pekanbaru berdasarkan parameter COD, Nitrat dan Fosfat belum dilampaui. BOD sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. DO lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

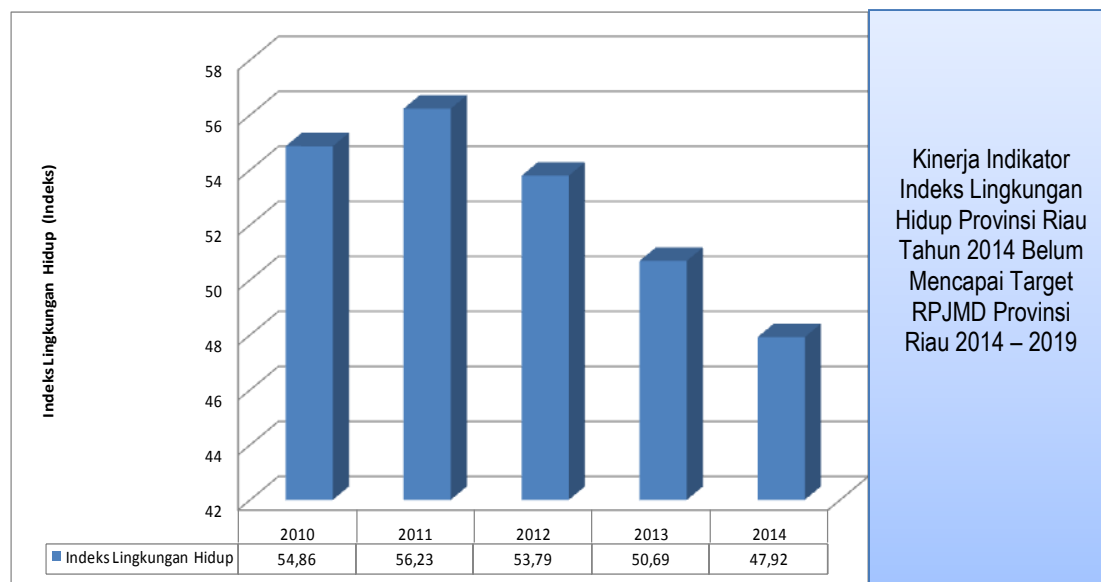
Perairan Sungai Siak bagian hilir dapat digolongkan kedalam baku mutu air kelas II. Jika dibandingkan dengan baku mutu air kelas II maka: (1) BOD, COD, dan Nitrat nilainya lebih besar dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (2) DO nilainya lebih kecil dari baku mutu air kelas II atau tidak memenuhi. (3) Klorin bebas tidak dipersyaratkan untuk air kelas II. Kesimpulan adalah daya tampung beban cemaran air Sungai Siak bagian Pekanbaru sampai hilir berdasarkan parameter BOD, COD dan Nitrat sudah dilampaui untuk masukan dari luar dan dari dalam sungai. DO lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Tingginya daya tampung beban cemaran sungai, kebakaran hutan dan lahan yang berpengaruh kepada pencemaran udara semakin meluas sehingga juga berakibat tutupan hutan menjadikan indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Riau Semakin menurun. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengukur indeks kualitas lingkungan hidup menggunakan indikator kualitas udara dengan parameter SO_2 dan NO_2 ; kualitas air sungai dengan parameter pH, TDS, TSS, DO, BOD, COD, NO_2 , NO_3 , NH_3 , Fosfat, Fenol dan Detergen; dan Tutupan hutan dengan parameter luas hutan primer, dan luas hutan sekunder. Pengukuran IKLH Provinsi adalah (Indeks Pencemaran Air Sungai + Indeks Pencemaran Udara + Indeks Tutupan Hutan) dibagi 3.

Pada tahun 2010, IKLH Provinsi Riau sebesar 54,86 yang berarti nilai indeks lingkungan hidup Provinsi Riau hanya 54,86% dari standar 100%. Indeks lingkungan hidup Provinsi Riau ini berada berada di urutan 22 dari 28 provinsi dan di bawah nilai indeks nasional (59,79). Pada tahun 2011, nilai IKLK Provinsi Riau meningkat menjadi 56,23, namun urutannya di Indonesia menurun di urutan 22 dan masih di bawah nilai indeks nasional (64,21). Pada tahun 2012 - 2013, nilai IKLH Provinsi Riau menurun masing-masingnya menjadi 53,79 dan 50,69. Pada tahun 2014, diprediksi nilai indeks lingkungan hidup lebih turun dibanding tahun 2013 yaitu sekitar 47,92. Semakin

menurunnya nilai indeks lingkungan hidup perlu menjadi perhatian khusus dalam pembangunan tahun 2016.

Gambar 2.74.
Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2010 - 2014



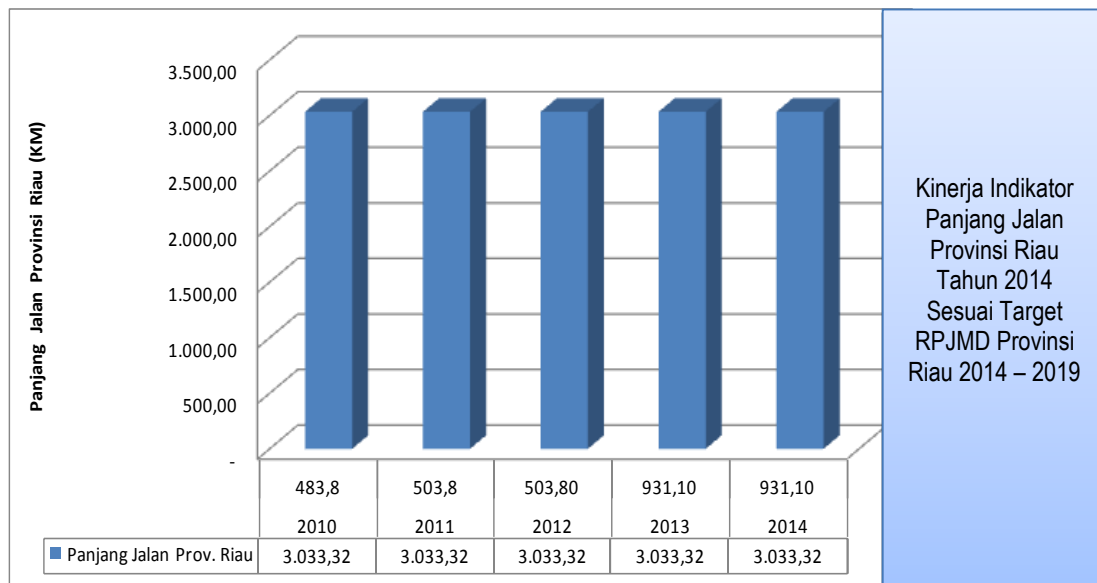
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2014).
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, nilai indeks lingkungan hidup Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar 59,32. Pada tahun 2014, realisasi nilai indeks lingkungan hidup Provinsi Riau sekitar 47,92, sehingga realisasi kinerja indikator nilai indeks lingkungan hidup Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,78%.

4) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Menurut UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Gambar 2.75.
Panjang Jalan Provinsi Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



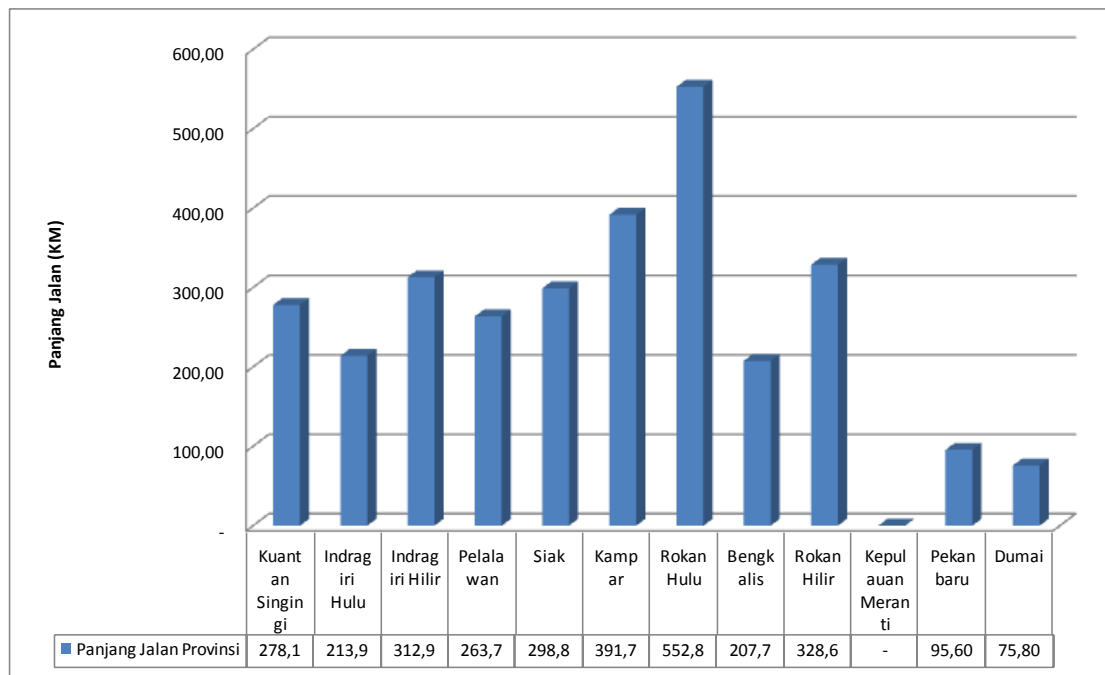
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Selama periode 2010 – 2014, panjang jalan Provinsi yang menjadi wewenang Provinsi Riau relatif tetap sepanjang 3.033,32 Km. Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, panjang jalan Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan tetap sepanjang 3.033,32 Km. Pada tahun 2014, realisasi panjang jalan Provinsi Riau sepanjang 3.033,32 Km, sehingga realisasi kinerja indikator panjang jalan Provinsi Riau sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00%.

Panjang jalan Provinsi terpanjang ada di Kabupaten Rokan Hulu yaitu sepanjang 552,86 Km atau 18,31% dari total panjang jalan Provinsi Riau tahun 2014. Jalan Provinsi Riau terpanjang kedua dan ketiga ada di Kabupaten Kampar (391,74 atau 12,97%) dan Rokan Hilir (328,65 Km atau 10,88%). Panjang jalan Provinsi Riau di Kabupaten lainnya berkisar antara 0 Km - 312,98 Km. Jalan Provinsi Riau belum ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gambar 2.76.

Panjang Jalan Provinsi Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Jalan Provinsi di Provinsi Riau berdasarkan kondisinya terbagi kedalam jalan berkondisi rusak berat, rusak ringan, sedang dan baik. Selama periode 2010 – 2014, panjang jalan Provinsi yang berkondisi rusak berat terus menurun dari 712,63 Km atau 23,49% pada tahun 2010 menjadi 621,23 KM (20,48) pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 relatif sama yaitu 621,23 Km. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan panjang jalan Provinsi dengan kondisi rusak berat menurun sebesar -2,71% per tahun.

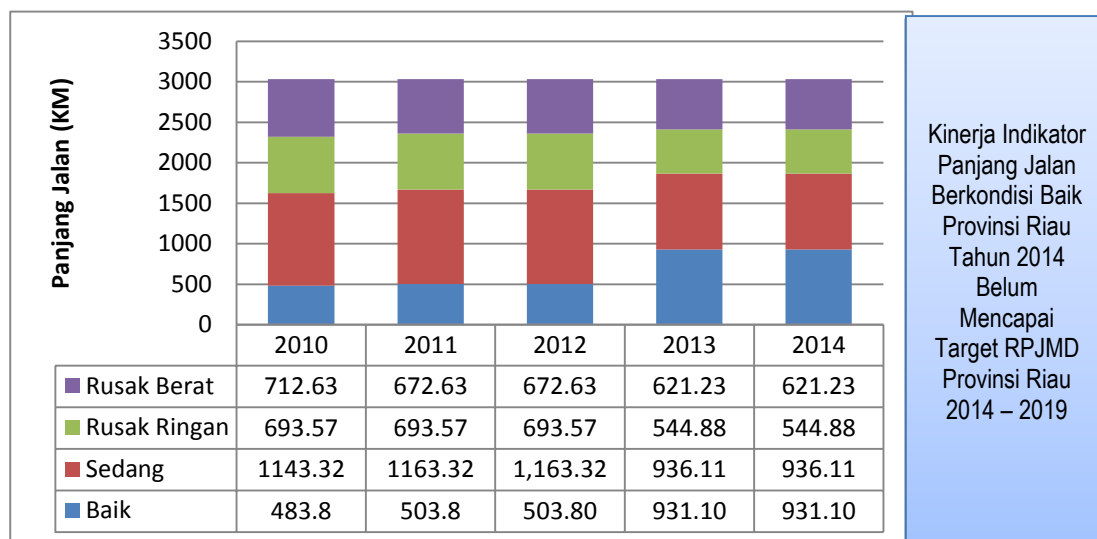
Panjang jalan Provinsi dengan kondisi rusak ringan juga menurun. Pada tahun 2010, panjang jalan dengan kondisi rusak ringan sepanjang 693,57 Km atau 22,87% dari pajang keseluruhan jalan Provinsi, menurun menjadi 544,88 Km (17,96%) pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 diperkirakan relatif sama yaitu sepanjang 544,88 Km. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan panjang jalan Provinsi dengan kondisi rusak ringan menurun sebesar -4,71% per tahun.

Panjang jalan Provinsi dengan kondisi sedang juga menurun. Pada tahun 2010, panjang jalan dengan kondisi sedang sepanjang 1.143,32 Km atau 37,69% dari pajang keseluruhan jalan Provinsi, menurun menjadi 936,11 Km (30,86%) pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 diperkirakan relatif sama yaitu sepanjang 936,11 Km. Selama

periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan panjang jalan Provinsi dengan kondisi rusak ringan menurun sebesar -3,92% per tahun.

Gambar 2.77.

Panjang Jalan Provinsi Berkondisi Baik Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

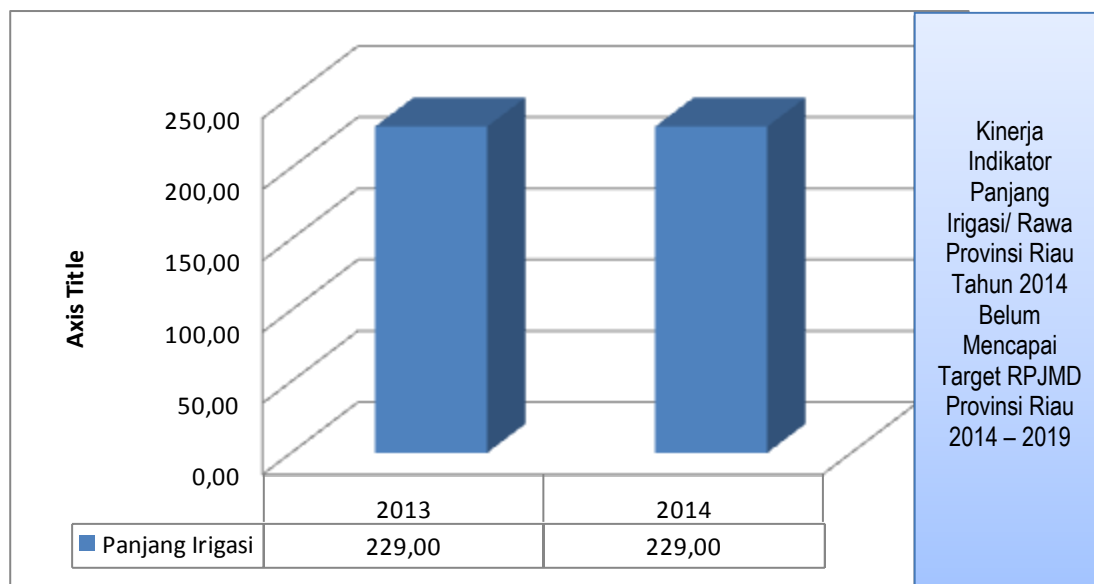
Sebaliknya, panjang jalan Provinsi dengan kondisi baik terus meningkat. Pada tahun 2010, panjang jalan Provinsi berkondisi baik sepanjang 483,8 Km atau 15,95% dari panjang keseluruhan jalan Provinsi, meningkat menjadi 931,10 Km (30,70%) pada tahun 2013 dan diperkirakan relatif sama pada tahun 2014 yaitu sepanjang 931,10 Km. Selama periode 2010 – 2014, rata pertumbuhan panjang jalan berkondisi baik meningkat sebesar 13,99% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, panjang jalan Provinsi Riau tahun 2014 berkondisi baik ditargetkan tetap sepanjang 1.031 Km. Pada tahun 2014, realisasi panjang jalan berkondisi baik Provinsi Riau diprediksi sepanjang 931,10 Km, sehingga realisasi kinerja indikator panjang jalan berkondisi baik Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,31%.

Pada 2013, panjang irigasi/rawa di Provinsi Riau sepanjang 229,00 Km dan di prediksi pada tahun 2014 panjangnya relatif sama yaitu 229,00 Km. Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, panjang irigasi/rawa Provinsi Riau ditargetkan sepanjang 350,60 Km. Pada tahun 2014, realisasi panjang irigasi/rawa Provinsi Riau

diprediksi sepanjang 229 Km, sehingga realisasi kinerja panjang irigasi/rawa Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,32%.

Gambar 2.78.
Panjang irigasi/Rawa Tahun 2013 – 2014 di Provinsi Riau



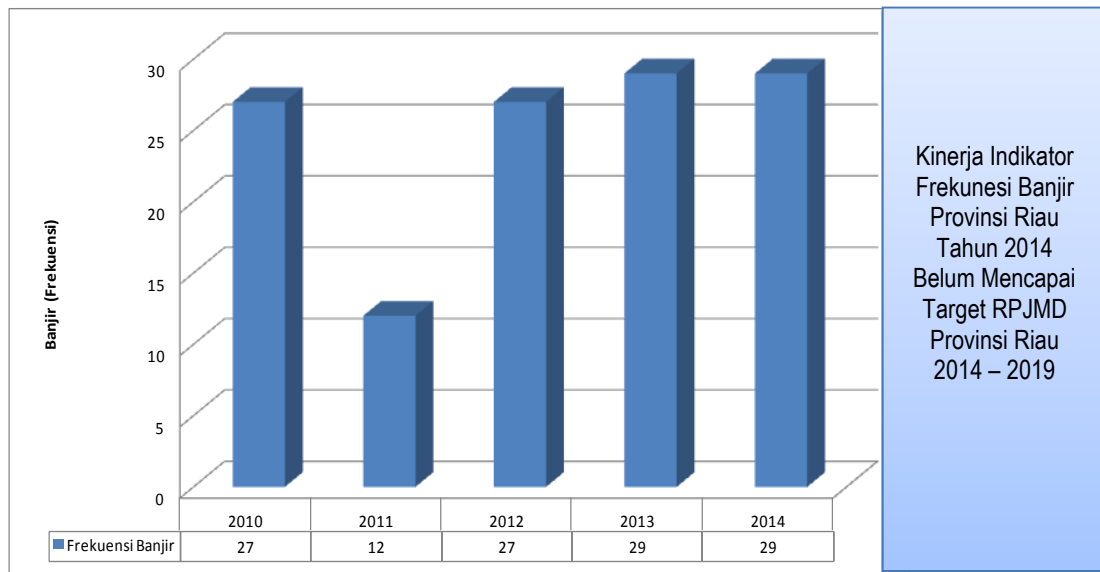
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dampak dari konversi hutan di hulu sungai, semakin berkurangan daerah resapan dan tingginya curah hujan menjadikan tren bencana banjir di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010 sebanyak 27 kali, menurun menjadi 12 kali pada tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 meningkat menjadi 27 dan 29 kali. Pada tahun 2014 diprediksi frekuensi banjir sebanyak 29 kali.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, frekuensi bencana banjir di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebanyak 20 kali. Pada tahun 2014, realisasi banjir Provinsi Riau diprediksi sebanyak 29 kali, sehingga realisasi kinerja frekuensi banjir di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 68,97%.

Gambar 2.79.
Frekuensi Banjir Tahun 2013 – 2014 di Provinsi Riau

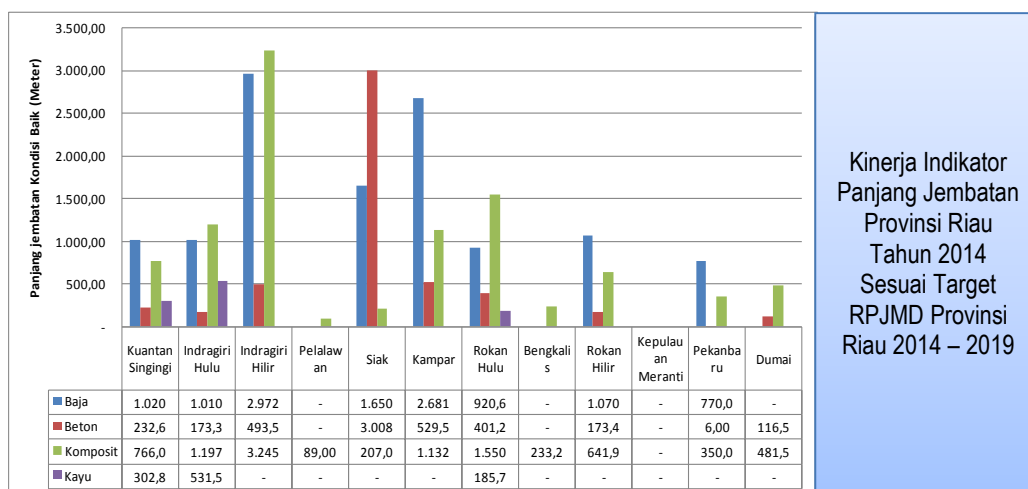


Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Pada tahun 2013, jumlah jembatan Nasional dan Provinsi yang ada di Provinsi Riau sebanyak 1.023 unit dengan panjang keseluruhannya 28.142 meter. Panjang jembatan Provinsi sepanjang 26.492 meter atau 94,14% dari total jembatan nasional dan Provinsi. Keseluruhan jembatan Provinsi dalam kondisi baik sepanjang (26.492 meter). Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, panjang jembatan Provinsi Riau dengan kondisi baik ditargetkan semuanya dalam kondisi baik. Pada tahun 2014, realisasi panjang jembatan dengan kondisi baik Provinsi Riau diprediksi sepanjang 26.492 meter, sehingga realisasi kinerja panjang jembatan dengan kondisi baik di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00%.

Gambar 2.80.

Panjang Jembatan Berkondisi Baik Tahun 2013 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

5) Bidang Urusan Penataan Ruang

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai tahun 2026 Provinsi Riau telah disusun sejak tahun 2007 dan telah diajukan ke Menteri Kehutan untuk disahkan. Namun hingga akhir tahun 2014, Rancangan RTRW Provinsi belum ditandatangani oleh menteri Kehutanan. Rancangan RTRW ke 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau juga telah tersedia dan dalam proses persetujuan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

Tabel 2.22.

Ketersediaan Dokumen RTRW Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/kota	Dokumen RTRW	Keterangan
1	Kuantan Singingi	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
2	Indragiri Hulu	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
3	Indragiri Hilir	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
4	Pelalawan	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
5	Siak	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
6	Kampar	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
7	Rokan Hulu	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
8	Rokan Hilir	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
9	Bengkalis	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
10	Kep. Meranti	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
11	Pekanbaru	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
12	Dumai	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut
	Provinsi Riau	√	Dalam Proses Pengesahan di Kemenhut

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

6) Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan yang harus dimiliki Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tabel 2.23
Ketersediaan Dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD)
Tahun 2009 – 2013 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/kota	RPJPD	RPJMD	RKPD				
				2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Singingi	-	√	√	√	√	√	√
2	Indragiri Hulu	√	√	√	√	√	√	√
3	Indragiri Hilir	√	√	√	√	√	√	√
4	Pelalawan	-	√	√	√	√	√	√
5	Siak	√	√	√	√	√	√	√
6	Kampar	√	√	√	√	√	√	√
7	Rokan Hulu	√	√	√	√	√	√	√
8	Rokan Hilir	-	√	√	√	√	√	√
9	Bengkalis	√	√	√	√	√	√	√
10	Kep. Meranti	√	√	-	-	-	√	√
11	Pekanbaru	√	√	√	√	√	√	√
12	Dumai	-	√	√	√	√	√	√
	Provinsi Riau	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

RPJPD Provinsi Riau disusun untuk jangka waktu 2005 – 2025. RPJMD Provinsi Riau saat ini merupakan RPJMD tahap ke empat sejak era otonomi daerah. Setiap tahunnya, RPJMD dijabarkan kedalam RKPD. Semua dokumen perencanaan ini selalu disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

7) Bidang Urusan Perumahan

Pembangunan rumah layak huni khususnya bagi keluarga miskin merupakan salah satu program Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau. Pada tahun 2009, jumlah rumah layak huni yang dibangun melalui APBD Provinsi Riau sebanyak 800 unit yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Kepulauan Meranti yang pada tahun 2009 sedang berproses menjadi Kabupaten Baru sehingga pencatatan jumlah unit rumah layak huni masih tergabung

dengan Kabupaten Bengkalis. Pada tahun 2010 hingga 2013, jumlah unit pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin berfluktuatif menurun. Pada tahun 2013, jumlah unit rumah layak huni yang dibangun hanya sebanyak 640 unit. Jumlah rumah layak huni yang telah dibangun selama ini jauh lebih rendah dibanding jumlah keluarga miskin yang menempati rumah yang belum layak. Pada tahun 2013, dengan jumlah penduduk miskin 522.530 ribu jiwa, setidaknya masih perlu dibangun sebanyak 30.000 unit rumah layak huni bagi keluarga miskin. Oleh karena itu, program pembangunan rumah layak huni bagi keluarga miskin harus menjadi prioritas dalam RPJMD 2014 – 2019.

Tabel 2.24
Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH)
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

No	Kabupaten/kota	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kuantan Singingi	75	60	20	30	26
2	Indragiri Hulu	120	80	20	45	52
3	Indragiri Hilir	90	80	40	50	60
4	Pelalawan	80	60	30	24	78
5	Siak	55	80	30	30	39
6	Kampar	90	60	30	60	111
7	Rokan Hulu	75	60	20	45	26
8	Rokan Hilir	55	55	20	30	31
9	Bengkalis	75	70	30	25	81
10	Kep. Meranti	0	60	30	45	60
11	Pekanbaru	45	85	20	10	30
12	Dumai	40	50	20	26	13
	Jumlah	800	800	320	400	640

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

8) Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi kemasyarakatan pemuda yang terdaftar sebanyak 12 ormas. Jumlah organisasi dilapangan jauh lebih banyak. Oleh karena pentingnya peran pemuda dimasa depan maka pembinaan organisasi kepemudaan dan olahraga perlu mendapat perhatian khusus dalam pembanguna lima tahun ke depan.

Tabel 2.25
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda/Ormas Tahun 2013 Provinsi Riau

No	Nama OKP	Periode
1	DPP Forum Reformasi Keadilan Anak Bangsa (Forkab)	2008 - 2011
2	Forum Nasional Aliansi Mahasiswa Peduli Republik Indonesia	2008 - 2011
3	Koalisi Pemuda Riau untuk Perjuangan Otonomi Khusus Provinsi Riau (KPR Otsus Provinsi Riau)	2008 - 2011
4	Forum Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid dan Mushola	2008 - 2011
5	Lembaga kreatifitas Mahasiswa Peduli SDM Melayu	2008 - 2011
6	Himpunan Pemuda Alkhairiah Provinsi Riau	2008 - 2011
7	Pelajar Islam Indonesia (PII)	2008 - 2011
8	Himpunan Muda Peduli Lingkungan (HMPL)	2008 - 2011
9	Forum Komunikasi Pemuda Mahasiswa Tempatan Riau Reformasi (FORKOM PMTR REFORMASI)	2008 - 2011
10	LSM Peduli Generasi Muda Riau (PERAMR)	2008 - 2011
11	LPW GMI – RIAU	2008 - 2011
12	Rumpun Mahasiswa Pemuda Kabupaten Bengkalis (RMPKB)	2008 - 2011

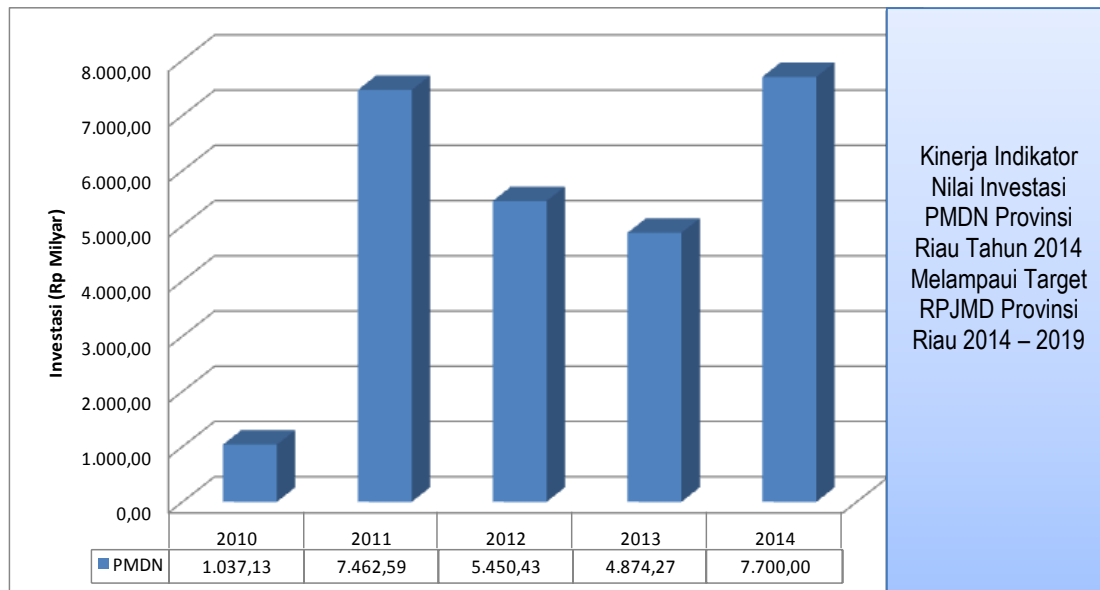
Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau (2013)

9) Bidang urusan Penanaman Modal

Selama periode 2010 – 2014, perkembangan realisasi investasi di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, realisasi PMDN di Provinsi Riau sebesar Rp 1.037,13 milyar, meningkat menjadi Rp 7.462,59 milyar menurun pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014, realisasi investasi di Provinsi meningkat kembali menjadi Rp 7,7 triliyun. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan realisasi investasi di Provinsi Riau meningkat sebesar 49,32% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, nilai investasi PMDN di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar Rp 5.699,57 milyar. Pada tahun 2014, realisasi investasi PMDN Provinsi Riau sebesar Rp 7.700 milyar, sehingga realisasi kinerja realisasi investasi PMDN di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 135,10%.

Gambar 2.81.
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

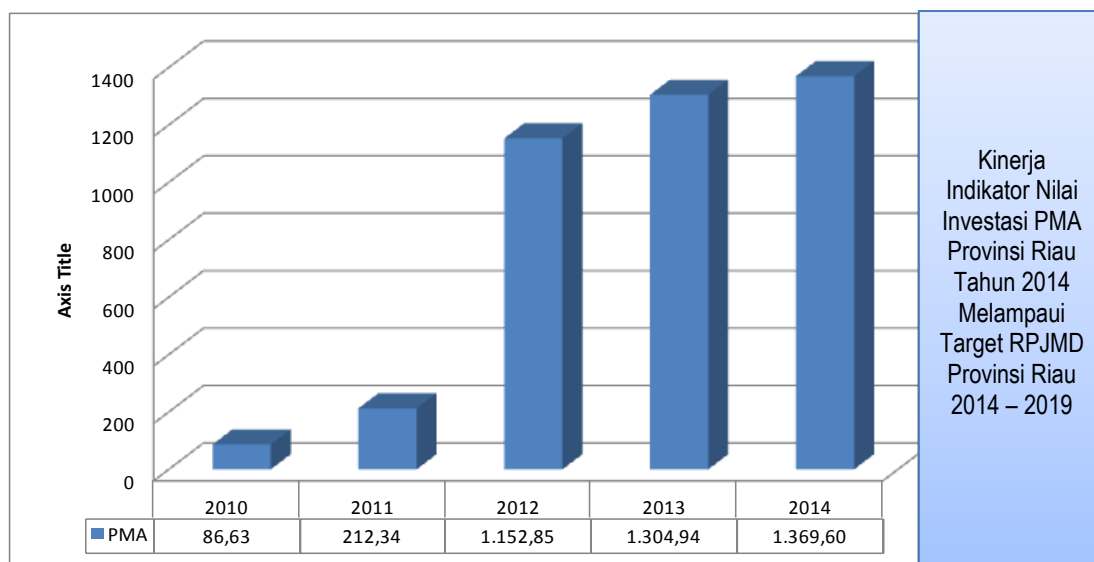
Pada periode yang sama (2010 – 2014), realisasi investasi PMA terus dengan tren meningkat. Pada tahun 2010, realisasi PMA sebesar US\$ 86,63 juta, meningkat menjadi US\$ 1.152,85 juta pada tahun 2012. Pada tahun 2014, realisasi investasi PMA meningkat menjadi US\$ 1.369,60 juta. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan PMA di Provinsi Riau meningkat sebesar 73,69% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, nilai investasi PMA di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebesar US\$ 1.178,90 juta. Pada tahun 2014, realisasi investasi PMA Provinsi Riau sebesar US\$ 1.369,60 juta, sehingga realisasi kinerja realisasi investasi PMA di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 116,18%.

Secara keseluruhan, pada tahun 2014, realisasi investasi di Provinsi Riau sebesar Rp 22,38 triliun meningkat dari tahun 2013 yaitu sebesar Rp 17,2 triliun. Investasi PMDN dan PMA di Provinsi Riau didominasi oleh industri hilir perkebunan kelapa sawit, pulp dan kertas, di samping energi kelistrikan, perhotelan dan perdagangan. Pencapaian realisasi Provinsi Riau tahun 2014 ini menempatkan Provinsi Riau di peringkat ke tujuh dalam pencapaian investasi dari 34 Provinsi di Indonesia dan merupakan yang tertinggi di Sumatera. Apabila RTRW di Provinsi Riau telah di sahkan

maka diyakini realisasi investasi di Provinsi Riau akan lebih tinggi lagi. Sebagai catatan. Selama periode 2010 – 2014, sebagai akibat belum sahnya RTRW telah menghambat setidaknya Rp 200 triliun yang akan masuk ke Kota Dumai.

Gambar 2.82.
Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

10). Bidang Urusan Kebudayaan

Pengembangan budaya melayu di Provinsi Riau baik dalam tatanan pendidikan yang kemudian diimplementasikan dalam pola dan tingkah kehidupan sehari-hari belum memberikan kemajuan yang berarti hal ini dapat kita lihat masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal dan belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya. Demikian juga halnya dalam dunia pendidikan yang merupakan dasar bagi pembentukan karakter masyarakat melayu yang agamis terutama dalam kurikulum pendidikan.

Di Provinsi Riau terdapat 1197 madrasah (MI, MTS, dan MA) dimana terdapat 850 madrasah belum mengakomodir budaya melayu dalam kurikulum pendidikan dan 370 madrasah yang sudah mengakomodir budaya melayu dalam kurikulum pendidikan. Hal ini merupakan sebuah masalah yang harus diselesaikan dimana Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki kultur budaya melayu tetapi belum mengakomodir budaya melayu pada madrasahnyanya sehingga perlu di upayakan agar budaya melayu

masuk dalam kurikulum pendidikan pada semua jenjang pendidikan sehingga bisa diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tabel 2.26
Rekapitulasi Implementasi Budaya Melayu dalam Kurikulum Pendidikan
Madrasah (MI, MTS, MA) Provinsi Riau

No	Madrasah	Alternatif Jawaban				
		Inti	Muatan Lokal	Ekstrakurikuler	Insidentil	Belum Ada
1	Madrasah Ibtidaiyah	131 (7.8%)	15 (0.9%)	162 (10%)	4 (0.2%)	1368 (81.1%)
2	Madrasah Tsanawiyah	292 (17.4%)	25 (1.5%)	342 (20%)	1 (0.1%)	1020 (61%)
3	Madrasah Aliyah	256 (15.2%)	1 (0.1%)	245 (14.6%)	0 (0%)	1178 (70.1%)
	Jumlah (%)	679 (13.3%)	41 (0.8%)	749 (14.8%)	5 (0.1%)	3566 (71%)

Sumber: Implementasi Visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaan melayu dalam kurikulum pendidikan madrasah se- Provinsi Riau (BALITBANG PROVINSI RIAU 2013)

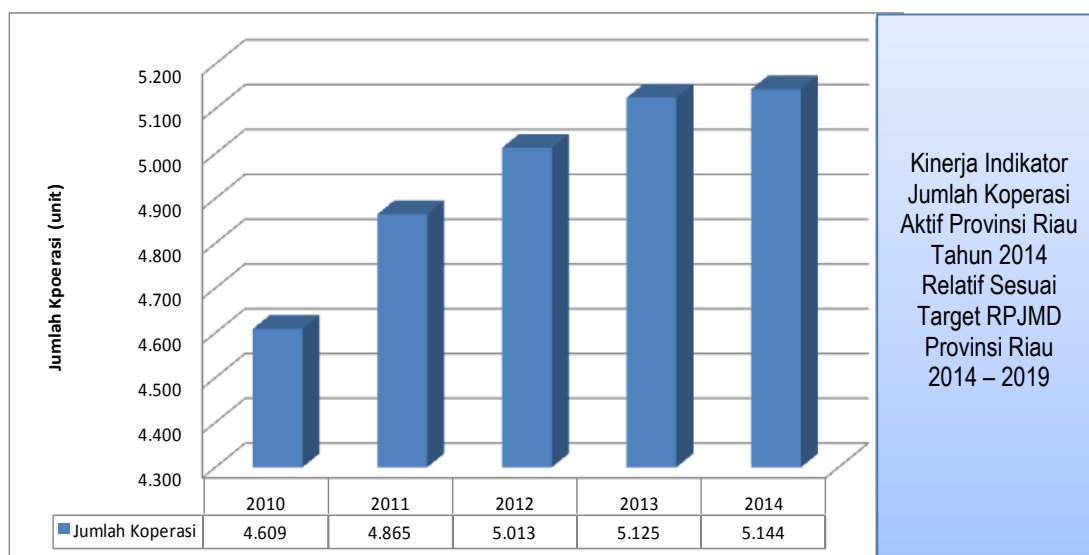
Pengembangan kebudayaan di Provinsi Riau pada dasarnya merupakan upaya dalam rangka mewujudkan jati diri dan karakter bangsa yang tangguh, berbudi luhur, toleran dan berakhlak mulia. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai dan keragaman budaya, revitalisasi dan pelestarian seni budaya secara terus menerus.

11). Bidang Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Selama periode 2010 – 2014, jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau terus meningkat. Pada tahun 2010, jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau sebanyak 4.609 koperasi, meningkat menjadi 5.013 koperasi pada tahun 2012. Pada tahun 2014, jumlah koperasi meningkat menjadi 5.144 koperasi. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan koperasi aktif di Provinsi Riau meningkat sebesar 2,22% per tahun. Koperasi yang tumbuh dan aktif di provinsi Riau adalah Koperasi Unit Desa Perkebunan. Jumlah koperasi aktif yang ada di Provinsi Riau tahun 2013, merupakan yang terbesar keempat di Sumatera setelah Sumatera Utara (6.678 Koperasi), Sumatera Selatan (4.227 Koperasi) dan Aceh (3.913 Koperasi).

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan sebanyak 5.329 koperasi. Pada tahun 2014, realisasi koperasi aktif di Provinsi Riau sebanyak 5.144 koperasi, sehingga realisasi kinerja jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,53%.

Gambar 2.83.
Jumlah Koperasi Aktif Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau

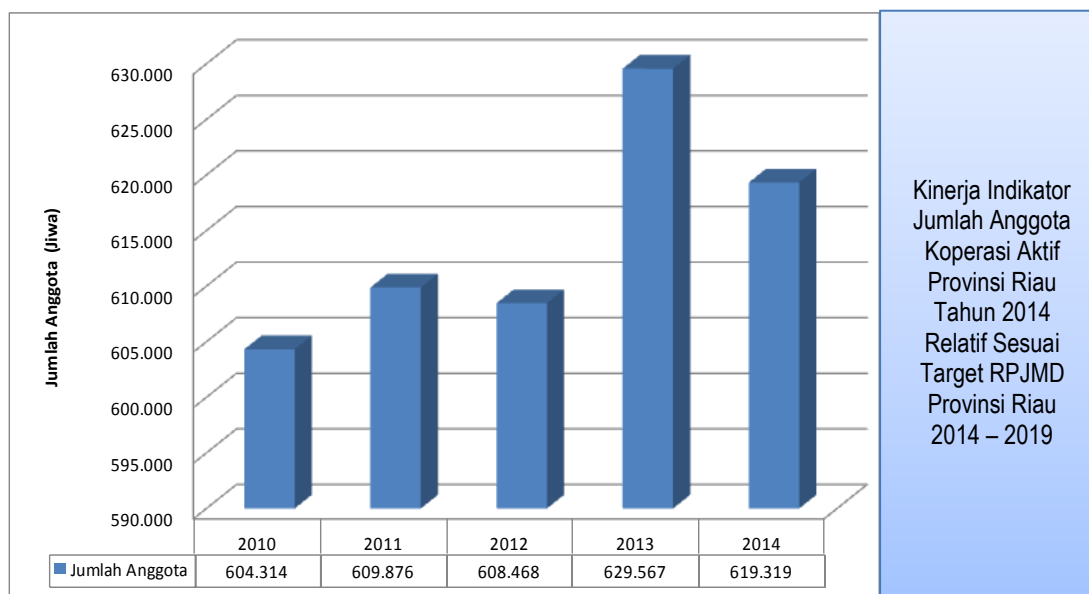


Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Pada periode yang sama, jumlah anggota koperasi memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, jumlah anggota koperasi yang aktif sebanyak 604.314 orang, meningkat menjadi 608.468 orang. Pada tahun 2014, jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau meningkat menjadi 619.319 orang. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,49% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau ditargetkan sebanyak 639.272 orang. Pada tahun 2014, realisasi jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau sebanyak 619.319 orang, sehingga realisasi kinerja jumlah anggota koperasi aktif di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,88%.

Gambar 2.84.
Jumlah Anggota Koperasi Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau



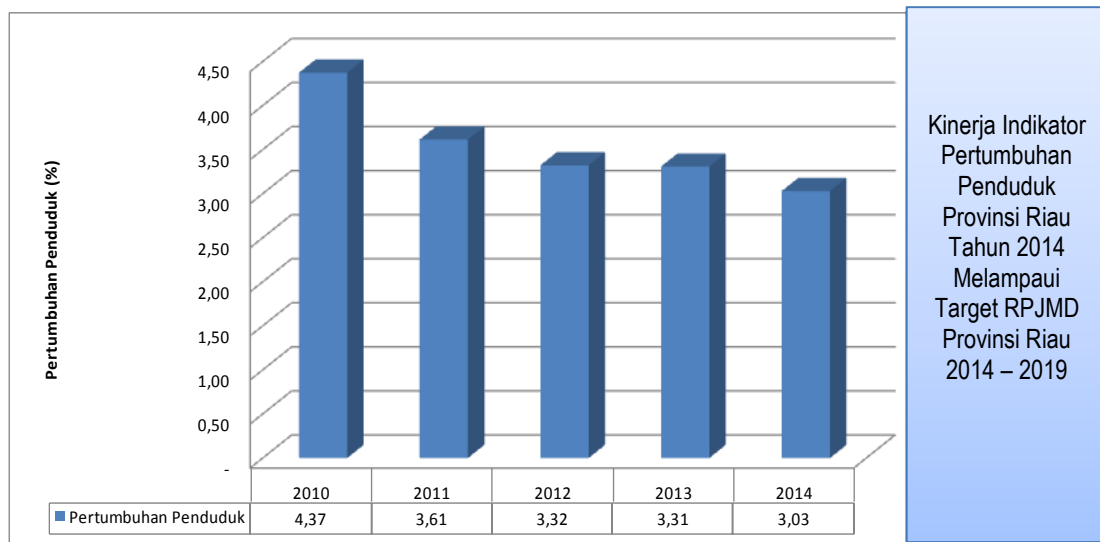
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

12) Bidang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Provinsi Riau telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan di Sumatera. Kondisi ini memberikan konsekuensi pada tingginya migrasi dari luar provinsi. Hal ini terlihat dari tingginya pertumbuhan penduduk dibanding pertumbuhan penduduk alami yang rata-rata sekitar 2%. Tingginya migrasi penduduk luar provinsi menjadikan beban tersendiri yaitu bertambahnya penduduk miskin dan pengangguran. Selama periode 2010 – 2013, pertumbuhan penduduk Provinsi Riau relatif tinggi dengan tren menurun. Pada tahun 2014, persentase pertumbuhan penduduk Provinsi Riau sebesar 3,03%.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan menurun menjadi 3,20%. Pada tahun 2014, realisasi pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau sebesar 3,03%, sehingga realisasi kinerja persentase pertumbuhan penduduk di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,61%.

Gambar 2.85.
Persentase Pertumbuhan Penduduk Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

13) Bidang Urusan Ketenagakerjaan

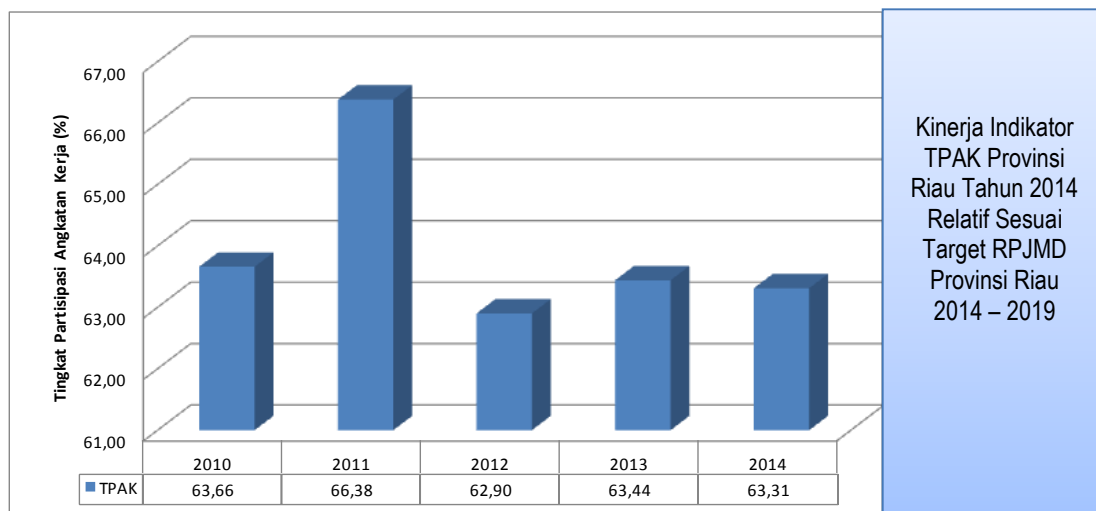
Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja di Provinsi Riau sebanyak 2.377.494 orang, meningkat menjadi 2.506.776 orang pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 2.695.247 orang. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 2,54% per tahun. Pada masa yang bersamaan, jumlah penduduk usia 15 tahun keatas meningkat menjadi masing-masingnya sebanyak 3.735.390 orang, 3.985.257 orang dan 4.257.120 orang. Selama periode ini, rata pertumbuhan penduduk usia 15 tahun keatas meningkat sebesar 2,54% per tahun.

Rasio antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas menggambarkan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Selama periode 2010 – 2014, tingkat partisipasi memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, TPAK Provinsi Riau sebesar 63,66% yang menggambarkan bahwa sebesar 63,66% penduduk usia 15 tahun keatas merupakan angkatan kerja. Pada tahun 2012, TPAK Provinsi Riau menurun menjadi 62,90% dan meningkat menjadi 63,31% pada tahun 2014.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, TPAK di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 64,25%. Pada tahun 2014, realisasi TPAK di Provinsi Riau sebesar 63,31%, sehingga realisasi kinerja TPAK di Provinsi Riau relatif sesuai target

yang ditetapkan yaitu sebesar 98,54%. Meski TPAK relatif sesuai target, namun upaya peningkatan TPAK perlu terus di tingkatkan.

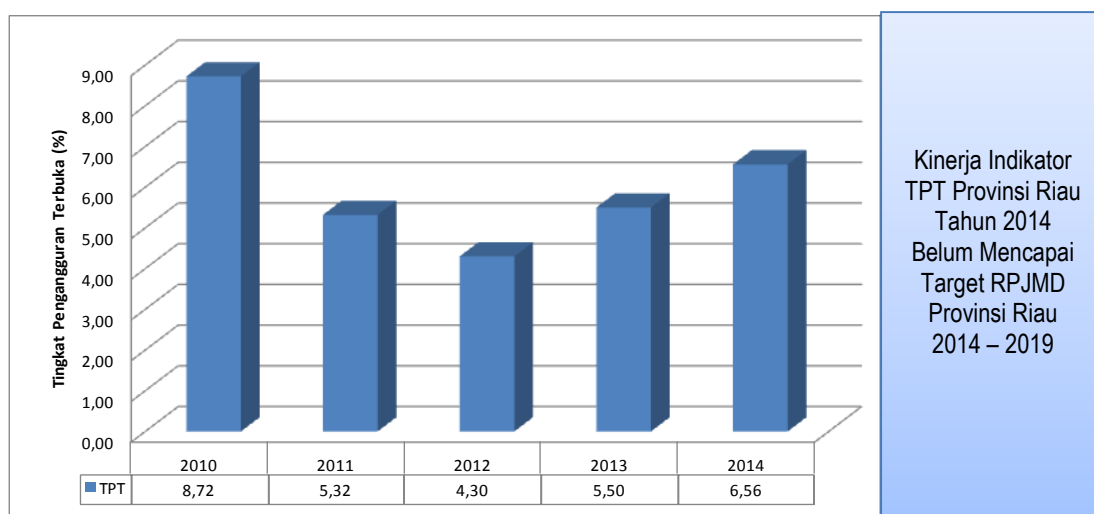
Gambar 2.86.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Selama periode 2010 – 2014, TPT di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, TPT sebesar 8,72%, menurun menjadi 5,32% dan tahun 2014 meningkat menjadi 6,56%. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan TPT Provinsi Riau menurun – sebesar 3,13% per tahun. TPT Provinsi Riau tahun 2014 ini tergolong tinggi di Sumatera dan hanya Aceh (9,02%) dan Kepulauan Riau (6,69%) yang lebih tinggi dibanding Provinsi Riau. Bahkan, TPT Provinsi Riau jauh lebih tinggi dibanding TPT Indonesia (5,94%). Hal ini perlu menjadi fokus dalam RKPD 2016.

Gambar 2.87.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2010 - 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, TPT di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 5,15%. Pada tahun 2014, realisasi TPT di Provinsi Riau sebesar 6,56%, sehingga realisasi kinerja TPT di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 78,51%.

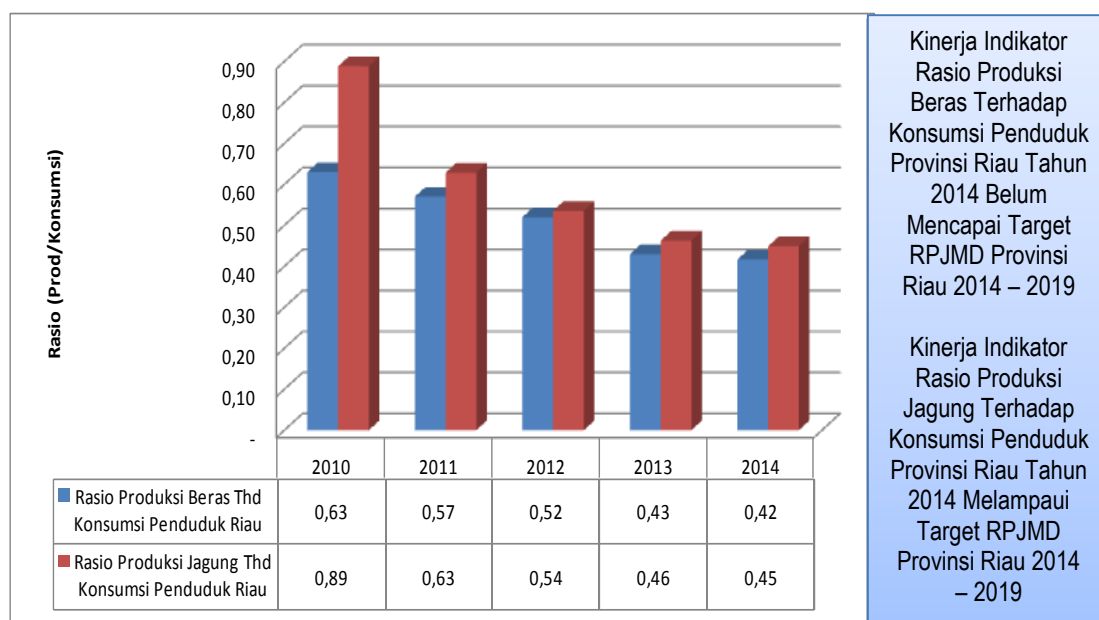
14). Bidang Urusan Ketahanan Pangan

Selama periode 2010, produksi beras memiliki tren berfluktuatif menurun yaitu dari 362.164 ton pada tahun 2010 menjadi 273.511 ton pada tahun 2014, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -5,46% per tahun. Disisi lain, konsumsi beras penduduk Provinsi Riau memiliki tren meningkat yaitu dari 575.990 ton pada tahun 2010 menjadi 656.331 ton pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,65% per tahun. Kondisi ini menjadikan perimbangan beras di Provinsi Riau terus semakin besar kekurangannya yaitu sebesar 213.509 ton tahun 2010 menjadi 382.821 ton pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan kekurangan beras sebesar 12,35% per tahun.

Kondisi ini menjadikan bahwa rasio produksi beras yang diproduksi dibanding konsumsi penduduk di Provinsi Riau terus semakin menurun. Pada tahun 2010, rasio produksi beras terhadap konsumsi beras sebesar 0,63 dan terkategori defisit, dimana rasio ini memberi arti bahwa beras yang diproduksi di Provinsi Riau hanya mencukupi 63% dari kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Riau tahun 2010. Pada tahun 2012, rasio produksi beras terhadap konsumsi beras penduduk Provinsi Riau menurun

menjadi 0,52 dan diprediksi kembali menurun menjadi 0,42 pada tahun 2014 juga dengan kategori defisit. Secara tradisional, defisit beras Provinsi Riau sebagian besar di suplai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi.

Gambar 2.88.
Rasio Produksi Beras dan Jagung Terhadap Konsumsi Beras dan Jagung
Penduduk Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

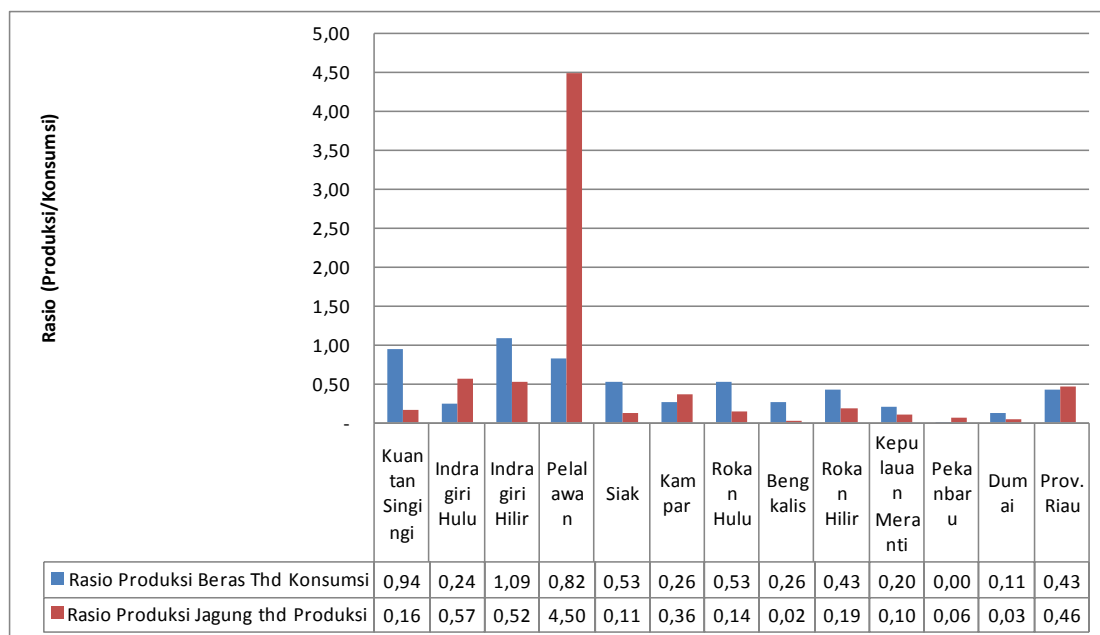
Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio produksi beras terhadap konsumsi beras penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 0,54. Pada tahun 2014, realisasi rasio produksi beras terhadap konsumsi beras di Provinsi Riau sebesar 0,42, sehingga realisasi kinerja rasio produksi beras terhadap konsumsi beras penduduk di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 77,17%.

Selama periode 2010 – 2014, produksi jagung memiliki tren berfluktuatif menurun, dimana pada tahun 2010 produksi sebesar 41.862 ton menurun menjadi 28.052 ton pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan produksi menurun sebesar - 7,69% per tahun. Konsumsi jagung memiliki tren meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2010, konsumsi jagung sebesar 54.830 ton meningkat menjadi 62.478 ton dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi menurun sebesar -2,65% per tahun. Rendahnya produksi dibanding konsumsi menjadikan

perimbangan jagung di Provinsi Riau semakin membesar, dimana pada tahun 2010 sebesar 0,76 dan terkategori defisit, dimana rasio ini memberi arti bahwa produksi jagung tahun 2010 hanya mampu mencukupi sebesar 76% dari kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2014, diprediksi rasio produksi terhadap konsumsi jagung di Provinsi Riau menurun menjadi 0,45 dan terkategori defisit. Relatif sama dengan beras, defisit jagung Provinsi Riau sebagian besar di suplai dari Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio produksi jagung terhadap konsumsi jagung penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 0,25. Pada tahun 2014, realisasi rasio produksi jagung terhadap konsumsi jagung di Provinsi Riau sebesar 0,45, sehingga realisasi kinerja rasio produksi jagung terhadap konsumsi jagung penduduk di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 179,60%.

Gambar 2.89.
Rasio Produksi Beras Terhadap Konsumsi Beras Penduduk Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau



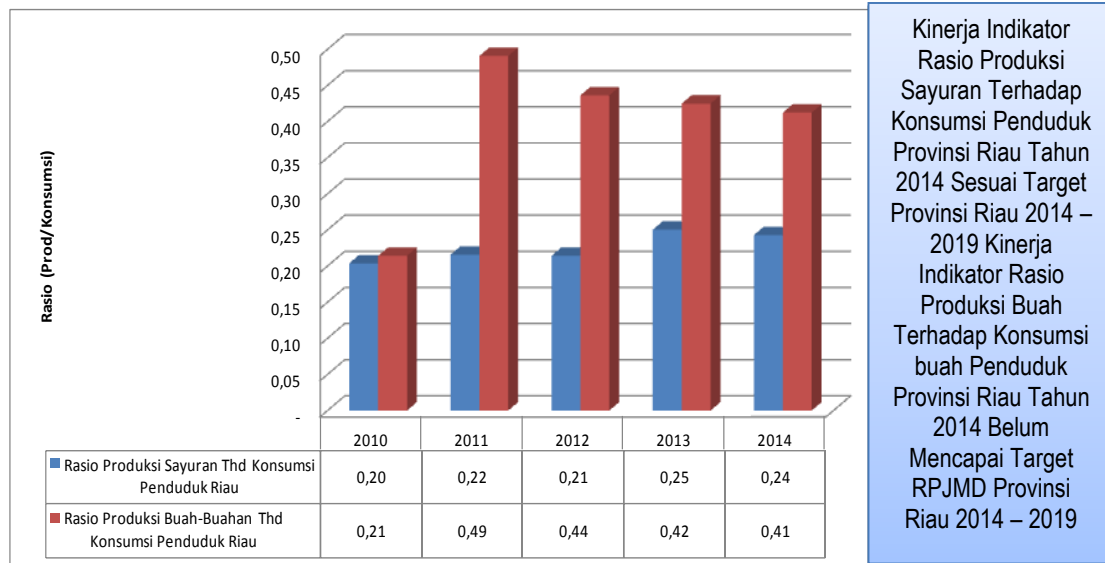
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Prov. Riau Tahun 2014)

Rasio produksi beras terhadap konsumsi beras menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi yang mendekati surplus ($\text{Surplus} > 1,14$) dengan rasio produksi terhadap konsumsi masing-masingnya

sebesar 1,09 dan 0,94. Rasio produksi beras terhadap konsumsi Kabupaten/Kota lainnya terkategori defisit dengan nilai rasio berkisar antara 0 – 0,91. Rasio produksi jagung terhadap konsumsi jagung menurut Kabupaten/Kota menunjukkan hanya Kabupaten Pelalawan yang terkategori Surplus (4,58). Rasio produksi jagung terhadap konsumsi jagung Kabupaten/Kota lainnya terkategori defisit dengan rasio 0,07 – 0,76.

Gambar 2.90.

Rasio Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Terhadap Konsumsi Sayuran dan Buah-Buahan Penduduk Riau Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

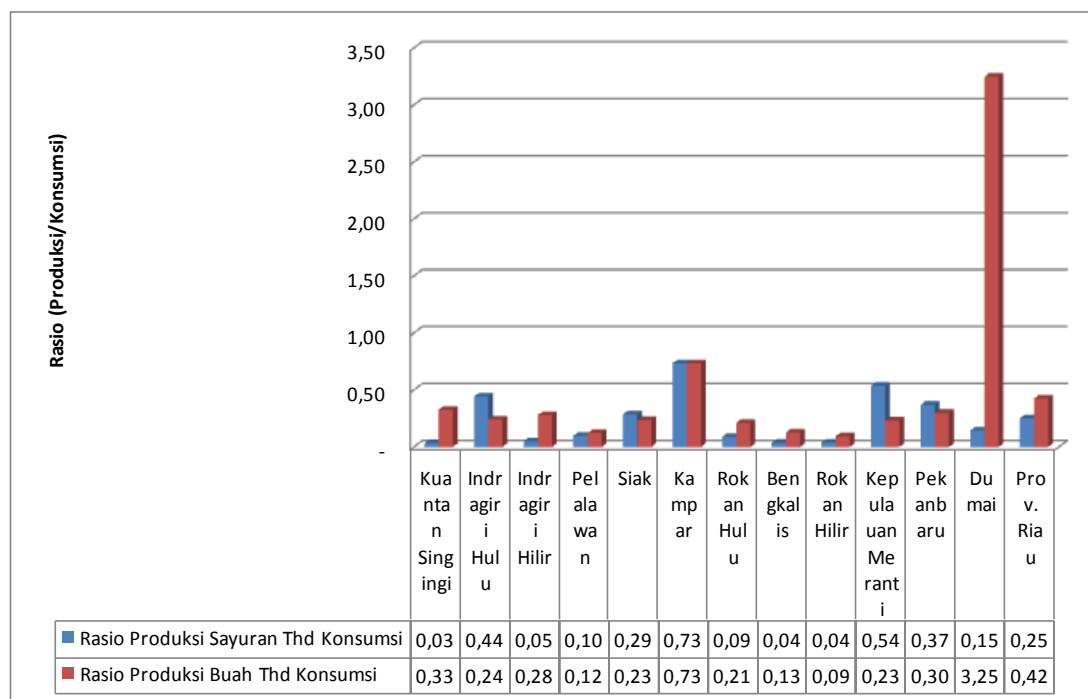
Produksi sayur-sayuran di Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010 sebesar 74.173 ton meningkat menjadi 100.783 ton pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 6,32% per tahun. Konsumsi sayuran memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010 sebesar 364.309 ton menjadi 414.940 ton pada tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,65% per tahun. Jauh lebih tingginya konsumsi dibanding produksi menjadikan perimbangan semakin membesar. Pada tahun 2010, rasio produksi sayur-sayuran terhadap konsumsi sayuran penduduk Provinsi Riau 0,20 dan terkategori defisit dimana rasio ini memberi arti bahwa produksi sayur-sayuran di Provinsi Riau hanya mencukupi 20% dari konsumsi. Pada tahun 2014, diprediksi rasio produksi sayuran terhadap konsumsi sayuran penduduk Provinsi Riau sedikit meningkat menjadi 0,24 dan terkategori defisit.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio produksi sayuran terhadap konsumsi sayuran penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 0,24. Pada tahun 2014, realisasi rasio produksi sayuran terhadap konsumsi sayuran di Provinsi Riau sebesar 0,24, sehingga realisasi kinerja rasio produksi sayuran terhadap konsumsi sayuran penduduk di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,20%.

Selama periode 2010 -2014, produksi buah-buahan memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, produksi buah-buahan sebesar 86.546 ton meningkat menjadi 188.866 ton pada tahun 2012 dan diprediksi meningkat menjadi 189.931 ton pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan produksi buah-buahan di Provinsi Riau meningkat sebesar 17,02% per tahun. Disisi konsumsi trennya terus meningkat seiring dengan penambahan penduduk. Pada tahun 2010, konsumsi buah-buahan penduduk Provinsi Riau sebesar 404.301 ton, meningkat menjadi 432.830 ton pada tahun 2012 dan menjadi 414.940 pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan konsumsi buah-buahan sebesar 2,65% per tahun. Tingkat konsumsi yang lebih besar dibanding produksi buah-buahan menjadikan perimbangan cenderung semakin membesar. Rasio produksi buah-buahan terhadap konsumsi buah-buahan penduduk Provinsi Riau sebesar 0,21 yang terkategori defisit dimana angka rasio ini memberi arti bahwa produksi buah-buahan di Provinsi Riau hanya mampu mencukupi sebesar 21% dari konsumsi buah-buahan penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2014, diprediksi rasio produksi buah-buahan sebesar 0,41 dan terkategori defisit.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio produksi buah-buahan terhadap konsumsi buah-buahan penduduk di Provinsi Riau ditargetkan meningkat 0,45. Pada tahun 2014, realisasi rasio produksi buah-buahan terhadap konsumsi buah-buahan di Provinsi Riau sebesar 0,41, sehingga realisasi kinerja rasio produksi buah-buahan terhadap konsumsi buah-buahan penduduk di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,62%.

Gambar 2.91.
Rasio Produksi Sayuran dan Buah-Buahan Terhadap Konsumsi Sayuran dan Buah-Buahan Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2013 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)

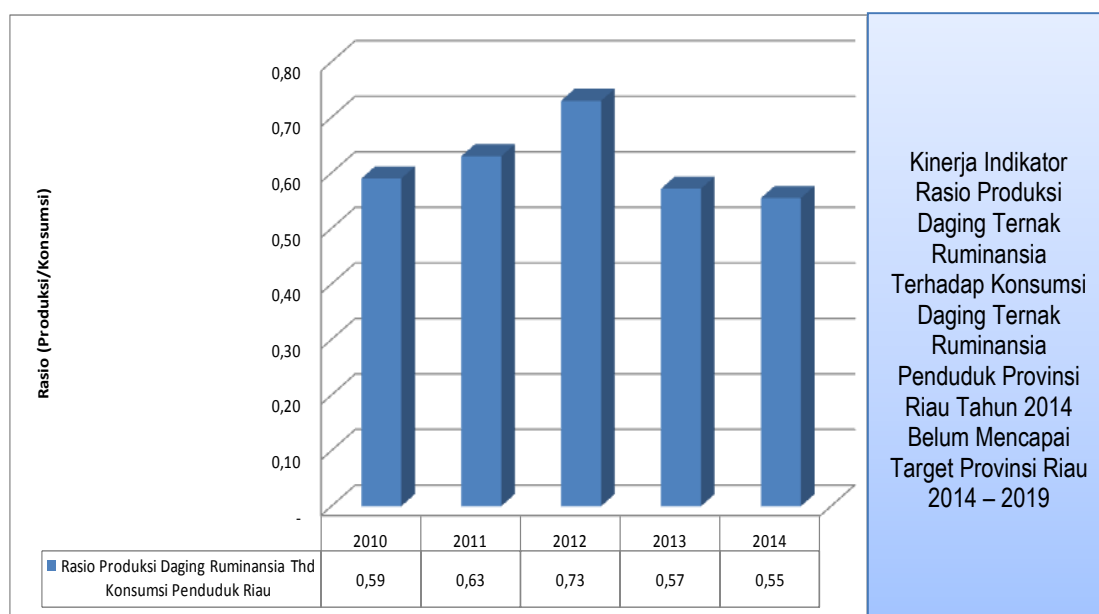
Rasio produksi sayuran terhadap konsumsi sayuran penduduk Kabupaten/kota se Provinsi Riau semuanya berada pada kategori defisit dengan rasio berkisar antara 0,03 – 0,73. Rasio produksi buah-buahan terhadap konsumsi buah-buahan menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau hanya Kota Dumai yang terkategori Surplus dengan rasio 3,15 sedangkan Kabupaten/kota lainnya memiliki kategori defisit dengan rasio berkisar antara 0,13 – 0,73

Selama periode 2010 – 2014, produksi daging ruminansia memiliki tren berfluktuasi meningkat. Pada tahun 2010, produksi daging yang bersumber dari ternak ruminansia sebesar 10.322 ton, meningkat 13.627 ton pada tahun 2012 dan menurun menjadi 10.992 ton pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata produksi daging ternak ruminansia sebesar 1,27% per tahun. Pada masa yang sama, konsumsi daging yang berasal dari ternak ruminansia memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, konsumsi daging ruminansia sebesar 17.385 ton, meningkat menjadi 18.612 ton pada tahun 2012 dan diprediksi meningkat menjadi 19.810 ton pada tahun 2014. Rata-rata pertumbuhan konsumsi selama periode ini sebesar 2,65% per tahun.

Tingkat konsumsi daging yang bersumber dari ternak ruminansia yang lebih tinggi dibanding produksi daging ternak ruminansia menjadikan rasionya kecil dari 1. Pada tahun 2010, rasio produksi daging ruminansia sebesar 0,59 dan terkategori defisit, yang artinya bahwa produksi daging ruminansia hanya mencukupi 59% dari konsumsi penduduk Provinsi Riau. Pada tahun 2014, diprediksi rasio produksi daging ruminansia terhadap konsumsi daging ruminansia sebesar 0,55 dan terkategori defisit.

Gambar 2.92.

Rasio Produksi Daging Ruminansia Terhadap Konsumsi Daging Ruminansia Penduduk Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau

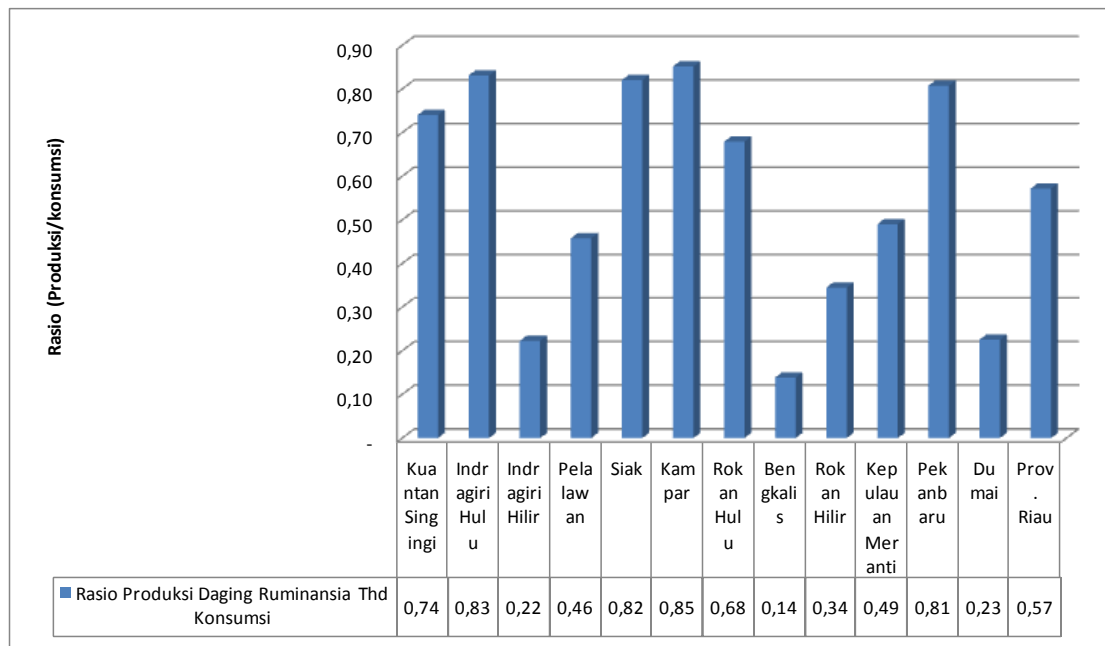


Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio produksi daging ruminansia terhadap konsumsi daging ruminansia penduduk tahun 2014 di Provinsi Riau ditargetkan meningkat 0,75. Pada tahun 2014, realisasi rasio produksi daging ruminansia terhadap konsumsi daging ruminansia di Provinsi Riau sebesar 0,55, sehingga realisasi kinerja rasio produksi daging ruminansia terhadap konsumsi daging ruminansia penduduk di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 73,98%.

Gambar 2.93.
Rasio Produksi Daging Ruminansia Terhadap Konsumsi Daging Ruminansia
Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2013 Provinsi Riau



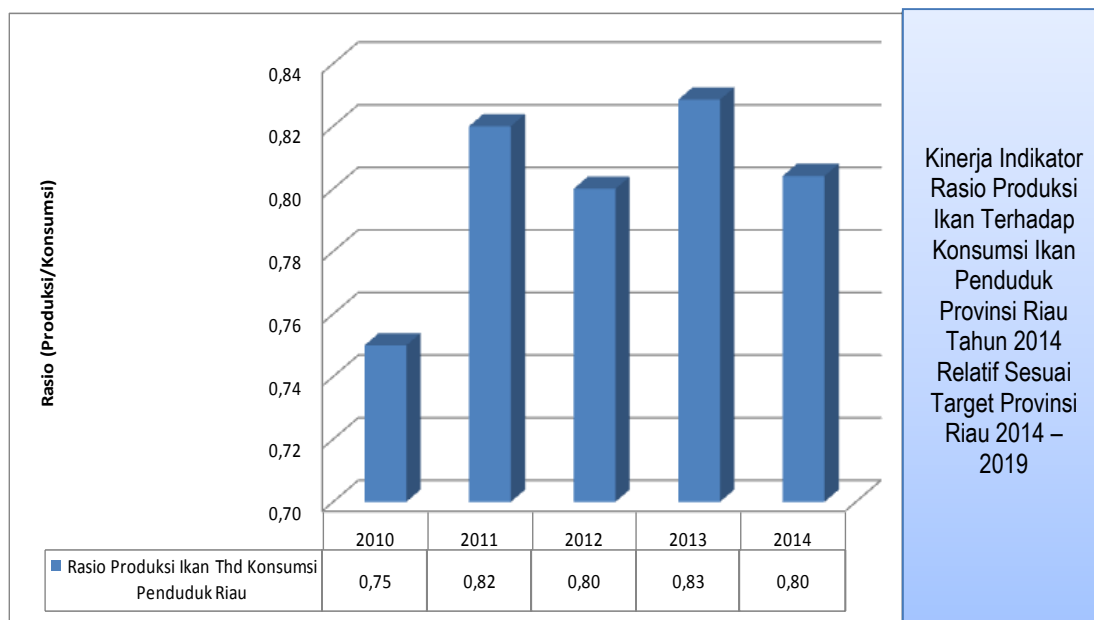
Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)

Rasio antara produksi terhadap konsumsi daging ruminansia menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa semuanya terkategori defisit dengan nilai rasio berkisar antara 0,14 – 0,85. Defisit akan daging ruminansia di Provinsi Riau sebagian disuplai dari Provinsi tetangga seperti Lampung, Jambi, Sumatera Utara dan sebagian di Impor dari negara lain.

Selama periode 2010 – 2014, produksi ikan di Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, produksi ikan di Provinsi Riau sebesar 133.002 ton, meningkat menjadi 150.788 ton pada tahun 2012 dan diprediksi meningkat menjadi 161.677 ton pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata produksi ikan meningkat sebesar 3,98%. Pada masa yang sama, konsumsi ikan memiliki tren yang sama meningkat. Pada tahun 2010, konsumsi ikan penduduk Provinsi Riau sebesar 176.477 ton, meningkat menjadi 188.930 ton pada tahun 2012 dan diprediksi meningkat menjadi 201.065 ton pada tahun 2014. Selama periode 2010 -2014, rata-rata konsumsi ikan meningkat sebesar 2,64% per tahun. Jumlah konsumsi yang lebih tinggi dibanding produksi menjadikan rasionya lebih kecil dari satu. Pada tahun 2010, rasio produksi ikan terhadap konsumsi ikan di Provinsi Riau sebesar 0,75 dan terkategori defisit yang

berarti produksi ikan Provinsi Riau hanya mampu mencukupi konsumsi sebesar 76%. Pada tahun 2014, rasio produksi ikan terhadap konsumsi ikan di Provinsi Riau sebesar 0,80 dan terkagori defisit.

Gambar 2.94.
Rasio Produksi Ikan Terhadap Konsumsi Ikan Penduduk
Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau

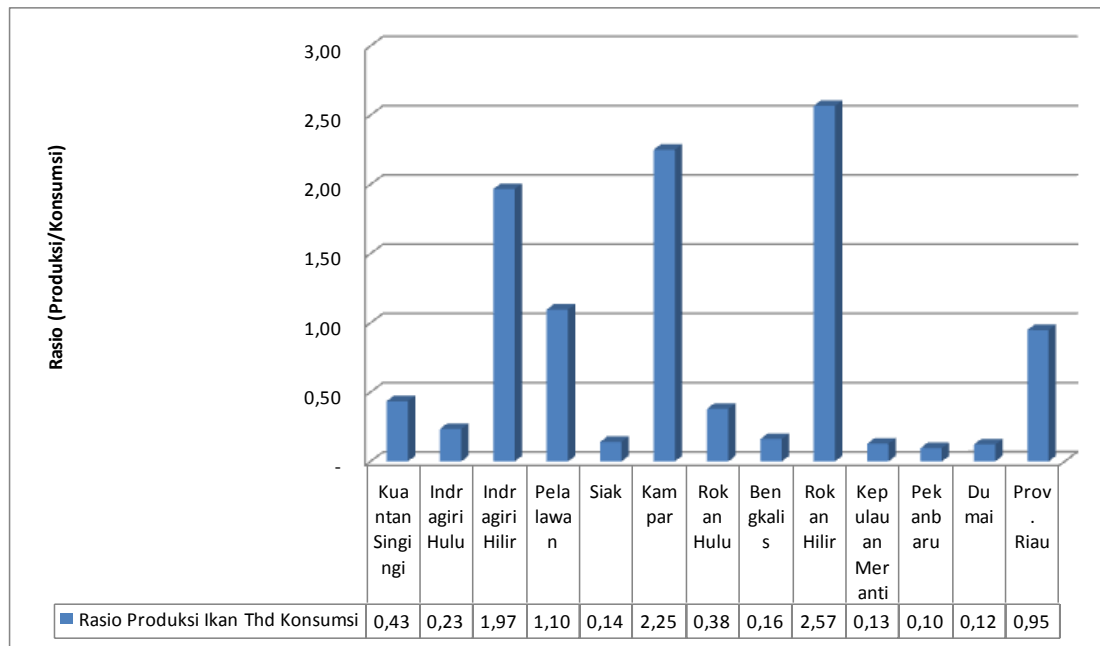


Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)
Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio produksi ikan terhadap konsumsi ikan penduduk di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat 0,81. Pada tahun 2014, realisasi rasio produksi ikan terhadap konsumsi ikan di Provinsi Riau sebesar 0,80, sehingga realisasi kinerja rasio produksi ikan terhadap konsumsi ikan penduduk di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,27%.

Rasio produksi ikan terhadap konsumsi ikan menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau menunjukkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir (2,57), Kampar (2,25), dan Indragiri Hilir (1,97) terkagori Suplus. Kabupaten Pelalawan dengan nilai rasio 1,10 terkategori hampir surplus. Nilai rasio Kabupaten/Kota lainnya berkisar antara 0,10 – 0,43 dengan kategori defisit.

Gambar 2.95.
Rasio Produksi Ikan Terhadap Konsumsi Ikan Penduduk Tahun 2013 Menurut
Kabupaten/kota Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)

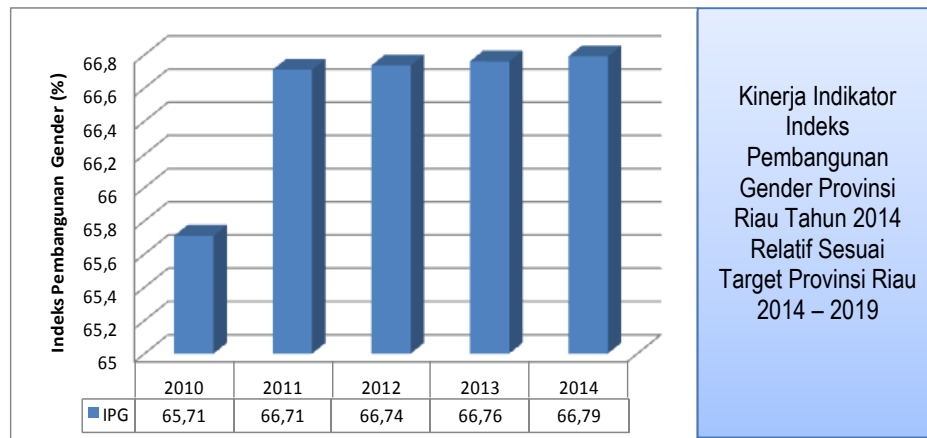
15) Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Upaya memenuhi kebutuhan terakhir maka diperlukan IPG yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar yang sama seperti IPM, yakni harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Apabila nilai IPG sama dengan IPM, maka dapat dikatakan tidak terjadi kesenjangan gender, tetapi sebaliknya IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi kesenjangan gender.

Selama periode 2010 – 2014, indeks pembangunan gender (IPG) Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, nilai IPG Provinsi Riau sebesar 65,71,

meningkat menjadi 66,74 pada tahun 2012 dan menjadi 66,79 pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan IPG Provinsi Riau meningkat sebesar 0,33% per tahun. Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Riau (2010 sebesar 76,07, 2013 sebesar 76,91 dan 2014 sebesar 77,55) maka nilai IPG Provinsi Riau lebih rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan gender di Provinsi Riau.

Gambar 2.96.
Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Dokumen Data dan Informasi Tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, nilai IPG di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi 66,80. Pada tahun 2014, realisasi nilai IPG di Provinsi Riau sebesar 66,79, sehingga realisasi kinerja IPG di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 99,99%.

Tabel 2.27.
Kesetaraan Gender di Setiap Jenjang Pendidikan
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

No	Indikator	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD/MI	100,01	100,8	101,9	98,25	101,03
2	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP/MTs	105,20	96,70	114,4	110,6	113,80
3	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMA/SMK/MA	107,05	110,7	111,1	107,6	107,50
4	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di Perguruan Tinggi	112,09	114,34	85,77	85,77	101,01

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau (2013)

Bila kesetaraan gender di Provinsi Riau selama 2009 – 2013, dianalisis dari kesetaraan dibidang pendidikan menunjukkan sebaliknya, dimana kesetaraan perempuan jauh lebih tinggi. Hal ini terlihat dari rasio APM perempuan terhadap laki-laki mulai dari SD/MI – di Perguruan Tinggi yang lebih besar dari 100.

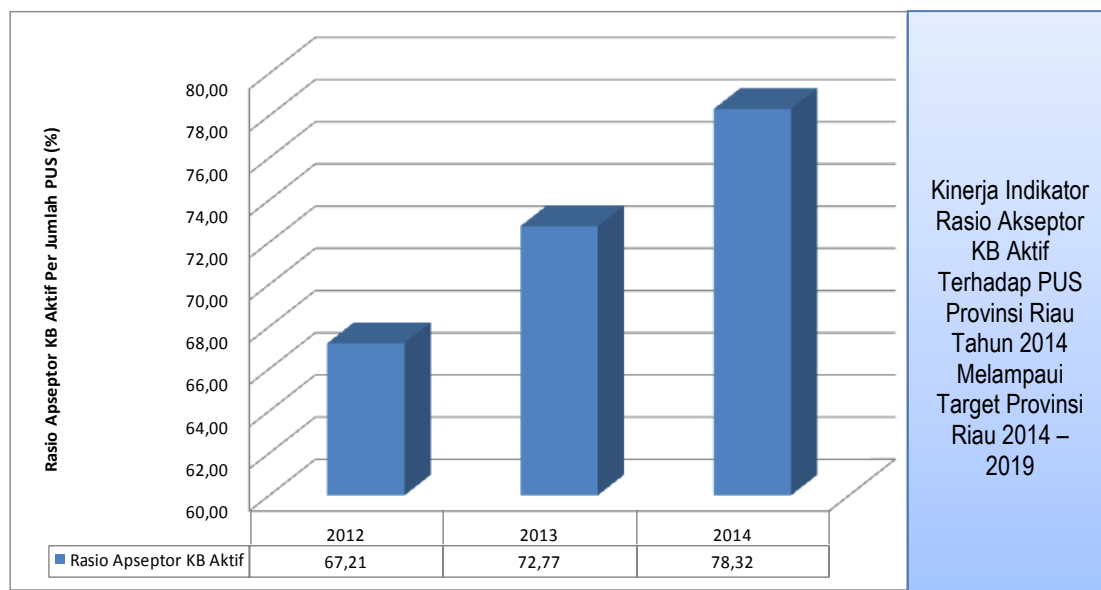
16) Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk.

Selama periode periode 2012 – 2014, jumlah pasangan usia subur terus meningkat sebagai dampak ‘bonus demografi’ yang sedang/akan dihadapi. Pada tahun 2012, jumlah 849.958 pasangan usia subur (PUS), meningkat menjadi 856.198 pasangan usia subur. Pada masa yang sama, jumlah akseptor KB juga meningkat dari 571.275 PUS pada tahun 2012 menjadi 670.574 PUS tahun 2014. Selama periode 2012 – 2014 ini, rasio akseptor KB aktif terhadap jumlah PUS meningkat dari 67,21% pada tahun 2012 menjadi 78,32% pada tahun 2014.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rasio akseptor KB aktif terhadap jumlah PUS di Provinsi Riau tahun 2014 ditargetkan meningkat menjadi 56%. Pada tahun 2014, realisasi rasio akseptor KB aktif terhadap jumlah PUS di Provinsi Riau sebesar 78,32%, sehingga realisasi kinerja IPG di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 139,86%.

Gambar 2.97.
Rasio Akseptor KB Aktif Terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur
Tahun 2012 – 2014 Provinsi Riau



Sumber : BKKBN Provinsi Riau, 2014

Jumlah PUS di Provinsi Riau tahun 2012 mencapai 849.958 pasangan, dimana jumlah PUS yang paling banyak adalah di Kota Pekanbaru yaitu 159.691 PUS dan paling sedikit di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 27.118 PUS. Jumlah akseptor KB aktif terbanyak dan yang paling kecil sama dengan jumlah PUS yaitu Kota Pekanbaru yang terbanyak dan yang paling sedikit ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Rasio akseptor KB aktif terhadap jumlah PUS tertinggi terdapat di Kabupaten Siak (75,75%) diikuti Indragiri Hilir (71,92) dan Kampar (71,32%). Rasio akseptor KB aktif terhadap jumlah PUS terendah adalah Kabupaten Pelalawan (53,77) diikuti Kota Dumai (54,35%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (55,77%).

Tabel 2.28.
Jumlah Penduduk Peserta KB Tahun 2012 Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Peserta KB		
		PUS	Peserta KB	Tidak KB
1	Kuantan Sengingi	56.319	38.999	17.320
2	Indragiri Hulu	65.258	45.587	19.671
3	Indragiri Hilir	77.379	55.649	21.730
4	Pelalawan	59.584	32.037	27.547
5	Siak	34.865	26.410	8.455
6	Kampar	95.050	67.785	27.265
7	Rohul	78.239	53.849	24.390
8	Bengkalis	58.882	36.662	22.220
9	Rohil	91.530	64.817	26.713
10	Kepulauan Meranti	27.118	15.124	11.994
11	Pekanbaru	159.691	109.333	50.358
12	Dumai	46.043	25.023	21.020
	Provinsi Riau	849.958	571.275	278.683

Sumber : BKKBN Provinsi Riau, 2013

17). Bidang Urusan Perhubungan

Di Provinsi Riau terdapat 6 pelabuhan udara, dimana lima pelabuhan udara dimiliki oleh Pemerintah dan satu pelabuhan udara ‘Sultan Syarif Harun Setia Negara’ di Pelalawan dimiliki oleh swasta. Dari kelima pelabuhan udara, pelabuhan udara ‘Sultan Syarif Kasim II’ di Pekanbaru merupakan pelabuhan udara utama dengan kualifikasi pelabuhan udara internasional. Pelabuhan udara ‘Pinang Kampai’ di Dumai merupakan pelabuhan udara yang relatif beroperasi. Sedangkan pelabuhan udara ‘Japura’ di Rengat relatif kurang beroperasi. Sementara, pelabuhan udara ‘Tempuling’ di Tembilahan dan ‘Pasir Pengaraian’ juga relatif kurang beroperasi karena kondisi pelabuhan udara yang belum standar dengan dukungan peralatan yang masih minim.

Keberadaan pelabuhan laut sangat besar perannya karena sebagian daerahnya merupakan kepulauan/perairan. Pelabuhan laut sesuai PP nomor 61 Tahun 2009 menyebutkan tentang pelabuhan dimana TUKS merupakan terminal untuk kepentingan sendiri. Tersus merupakan terminal khusus atau pelabuhan khusus. Pelabuhan pengumpan merupakan pelabuhan regional dan/atau pelabuhan lokal. Pelabuhan pengumpul merupakan pelabuhan nasional. Pelabuhan utama merupakan pelabuhan internasional.

Tabel 2.29.
Jumlah Keberangkatan Pesawat, Penumpang Tahun 2012
Menurut Pelabuhan Udara Provinsi Riau

Bandara	Pesawat		Penumpang		
	Datang	Beran gkat	Datang	Berangkat	Transit
Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru	10.212	10.240	1.170.847	1.297.867	118.595
Pinang Kampai Dumai	534	534	22.313	22.941	8.465
Japura Rengat	75	75	349	52	4
Sultan Syarif Harun Setia Negara Pelalawan	404	404	105.799	103.492	-
Tempuling Tembilahan	22	22	556	1.284	-
Pasir Pengaraian	41	41	207	167	-

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2013)

Di Provinsi Riau, jumlah pelabuhan umum sebanyak 33 buah, terbanyak ada di kabupaten Indragiri Hilir. Pelabuhan Tersus sebanyak 11 buah, terbanyak ada di Kabupaten Bengkalis. Pelabuhan TUKS berjumlah 95 buah, terbanyak ada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelabuhan Utama sebanyak satu buah yaitu di Kotra Dumai. Pelabuhan pengumpul sebanyak 13 buah, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Pelabuhan pengumpan sebanyak 19 buah, terbanyak 2 unit terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Pelabuhan yang diusahakan sebanyak 9, terbanyak di Kabupaten Indragiri Hilir dan Bengkalis. Terdapat 24 buah pelabuhan yang tidak diusahakan, terbanyak ada di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.30
Jumlah Pelabuhan Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/kota	Jenis Pelabuhan (Unit)							
		Umum	Tersus	TUK S	Utama	Pengumpul	Pengumpan	Diusahakan	Tidak diusahakan
1	Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Indragiri Hulu	1	-	4	-	1	-	1	-
3	Indragiri Hilir	12	3	15	-	4	8	2	10
4	Pelalawan	1	-	-	-	1	-	-	1
5	Siak	5	-	-	-	2	3	-	5
6	Kampar	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Rokan Hilir	3	-	2	-	1	2	1	2
9	Bengkalis	6	7	7	-	2	4	2	4
10	Kep. Meranti	3	-	30	-	1	2	1	2
11	Pekanbaru	1	-	8	-	1	-	1	-
12	Dumai	1	1	14	1	-	-	1	-
	Provinsi Riau	33	11	95	1	13	19	9	24

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2013)

Pembangunan pelabuhan laut harus terus dilakukan baik kuantitas maupun kualitasnya, karena pelabuhan laut merupakan pintu masuk dan keluar utama barang dari/ke Provinsi Riau sekaligus membuka keterisoliran wilayah kepulauan. Upaya Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Dumai untuk mendorong Pelindo meningkatkan fasilitas pelabuhan Dumai dan membangun pelabuhan peti kemas akan sangat mempercepat arus masuk/keluar barang. Hal yang sama untuk meneruskan pembangunan pelabuhan Samudra Kuala Enok juga akan mempercepat bongkar/muat barang untuk Riau bagian selatan.

18). Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Kepemilikan dan penguasaan peralatan komunikasi dan informatika merupakan salah satu indikator kemajuan masyarakat suatu daerah. Pada tahun 2012, persentase rumah tangga yang memiliki telepon sebesar 3,72% dan HP sebesar 93,03% sehingga total rumah tangga yang memiliki sarana telekomunikasi sebesar 96,75%. Rumah tangga yang memiliki desktop sebesar 4,84% dan Laptop sebesar 14,84%. Persentase rumah tangga yang memiliki telepon, HP, desktop dan Laptop menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.31

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon, Telepon Seluler (HP), Komputer Desktop, Komputer Laptop Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Memiliki			
		Telepon	HP	Desktop	Laptop
1	Kuantan Singingi	2,96	91,01	2,69	14,48
2	Indragiri Hulu	2,68	91,18	2,61	6,26
3	Indragiri Hilir	3,70	87,16	1,87	3,71
4	Pelalawan	1,52	94,48	2,20	12,97
5	Siak	3,87	97,88	4,01	12,09
6	Kampar	2,03	94,69	5,08	10,95
7	Rokan Hulu	1,61	88,28	1,51	11,42
8	Rokan Hilir	0,34	86,96	1,63	7,39
9	Bengkalis	4,62	96,37	7,98	14,24
10	Kep. Meranti	1,81	90,99	2,36	8,16
11	Pekanbaru	8,87	98,68	10,42	36,55
12	Dumai	4,84	97,05	10,56	20,36
	Provinsi Riau	3,72	93,09	4,84	14,84

Sumber: Susenas (2012).

Penguasaan penduduk terhadap teknologi informasi khususnya internet di Provinsi Riau relatif masih rendah. Pada tahun 2012, penduduk Provinsi Riau yang pernah mengakses internet masih sebesar 14,50%. Sisanya sebesar 85,50% belum pernah mengakses internet. Penduduk yang pernah mengakses internet umumnya berada didaerah perkotaan, yang dapat dilihat tingginya persentase penduduk yang pernah mengakses internet di Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Oleh karena itu, upaya mendorong masyarakat pedesaan untuk dapat akses internet perlu menjadi perhatian dalam pembangunan periode 2014 – 2019.

Tabel 2.32.

Persentase Penduduk Usia 5 tahun Ke atas yang Pernah Mengakses Internet Tahun 2012 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk 5 Tahun Ke atas	
		Pernah Mengakses Internet	Tidak Pernah Mengakses Internet
1	Kuantan Singingi	11,22	88,78
2	Indragiri Hulu	7,97	92,03
3	Indragiri Hilir	7,60	92,40
4	Pelalawan	16,66	83,34
5	Siak	12,82	87,18
6	Kampar	12,56	87,44
7	Rokan Hulu	7,31	92,69
8	Rokan Hilir	7,59	92,41
9	Bengkalis	13,28	86,72
10	Kep. Meranti	10,35	89,65
11	Pekanbaru	32,60	67,40
12	Dumai	20,77	79,23
	Provinsi Riau	14,50	85,50

Sumber: Susenas (2012)

19). Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Selama periode 2009 – 2013, jumlah Ormas yang terdaftar di Badan Kesbang dan Politik Provinsi Riau cenderung berfluktuatif menurun yaitu dari 68 Ormas pada tahun 2009 menjadi 4 Ormas pada tahun 2013. Kondisi yang relatif sama pada jumlah LSM dan LNL. Kondisi ini berbeda dengan kondisi lapangan dimana jumlah Ormas, LSM dan LNL terus meningkat. Oleh karena itu pembinaan Ormas, LSM dan LNL perlu terus ditingkatkan.

Tabel 2.33.
Jumlah LSM/Orkemas, Yayasan Yang Terdaftar
Pada Badan Kesbang dan Politik Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Tahun	Ormas	LSM	LNL	Jumlah
2009	68	32	-	100
2010	98	59	3	160
2011	105	26	7	138
2012	78	110	2	190
2013	4	2	-	6

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (2014)

Secara umum, kejadian-kejadian unjuk rasa di Provinsi Riau relatif sangat rendah. Kejadian unjuk rasa yang paling menonjol adalah masalah tenaga kerja, masalah lahan dan masalah politik dan hukum.

Tabel 2.34.
Jumlah Kejadian Unjuk Rasa Tahun 2013 di Provinsi Riau

No	Materi Unjuk Rasa	Jumlah
1	Terkait dengan politik dan hukum	23
2	Pemerintah Pusat dan Daerah	21
3	Masalah lahan	34
4	Masalah tenaga kerja	53
5	Masalah pendidikan	2
6	Masalah lainnya	29

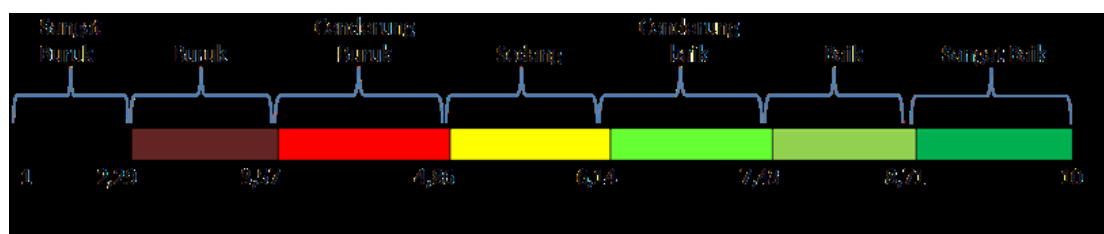
Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau (2014)

20) Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Kinerja pemerintah daerah salah satunya dapat diukur dari keberhasilannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang antara lain diukur dari indeks efektivitas pemerintahan, nilai keterbukaan informasi, indeks integritas daerah. Pada penilaian kinerja administrasi keuangan daerah dinilai dari Opini BPK dan nilai akuntabilitas.

a. Indeks Efektifitas Pemerintahan

Indonesia Governance Index (IGI) merupakan pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan Provinsi di Indonesia. Pengukuran dilakukan terhadap empat sektor pemerintahan (*governance*), yaitu: pemerintah (*government*), birokrasi (*bureaucracy*), masyarakat sipil (*civil society*) dan masyarakat ekonomi (*economic society*). Keempat sektor tersebut diukur menggunakan enam parameter *good governance*, yaitu: partisipasi (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), efisiensi (*efficiency*) dan efektifitas (*effectiveness*). Metode statistik digunakan untuk penilaian terhadap sektor-sektor governance di atas, dituangkan dalam suatu indeks. Analisa angka-angka indeks didasarkan pada *range* nilai berikut:



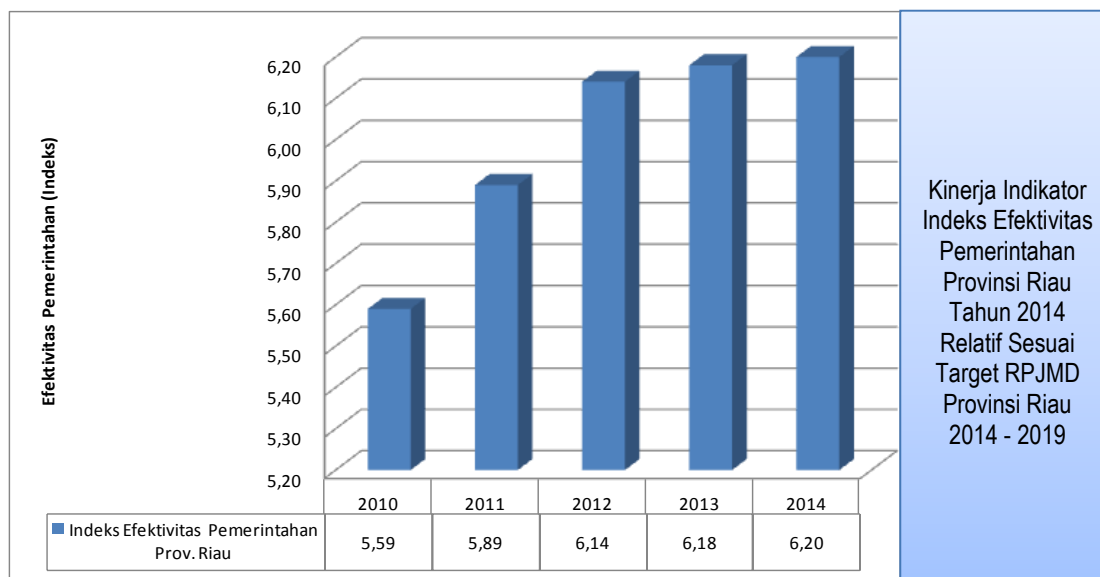
Selama periode 2010 – 2014, indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, indeks efektivitas pemerintahan atau kinerja tata kelola Pemerintahan Provinsi Riau sebesar 5,59 yang berada pada kategori sedang. Pada tahun 2012, indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau meningkat menjadi 6,14 sehingga mulai memasuki kategori cenderung baik dan semakin mantap pada tahun 2013 dengan indeks 6,18 pada kategori cenderung baik. Indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau yang cenderung baik (6.18) tersebut disumbang oleh indeks birokrasi yang cenderung baik (7.24) dan indeks masyarakat sipil yang juga cenderung baik (6.40). Selain itu juga diperkuat oleh angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 13.98% per tahun dengan PDRB/Kapita mencapai Rp 44.154.993,13 yang merupakan angka tertinggi secara nasional. Pada tahun 2014, indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau diprediksi sebesar 6,20 dengan kategori cenderung baik. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau meningkat sebesar 2,03% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 6,38. Pada tahun

2014, indeks efektivitas pemerintahan Provinsi Riau diperkirakan sebesar 6,20 sehingga realisasi kinerja indikator indeks efektivitas pemerintahan relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,79%.

Gambar 2.98.

Indeks Efektivitas Pemerintahan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

b. Indeks Integritas Daerah

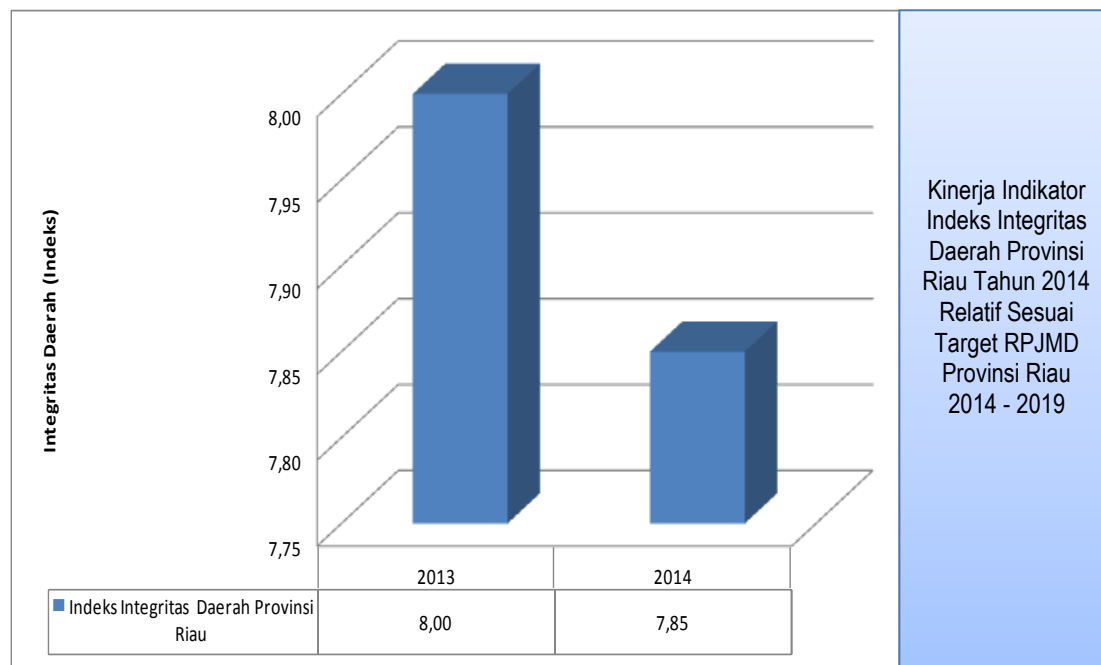
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan survey integritas sektor publik untuk mengukur persepsi tentang pelayanan publik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Responden dalam survey ini adalah para pengguna layanan langsung dari layanan yang disediakan. Survey KPK tersebut terbagi kedalam 6 indikator yaitu pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, siste administrasi, perilaku individu dan pencegahan korupsi. Hasil pengolahan data disajikan dalam skala nilai 0–10, menunjukkan bahwa semakin mendekati nilai 10 maka indeks integritas semakin baik yang menggambarkan baiknya pelayanan sektor publik terhadap masyarakat saat pengurusan layanan.

Pada tahun 2013, indeks integritas pemerintahan Provinsi Riau sebesar 8,00, sudah di atas standar minimal yang ditetapkan KPK (6,0) yang menggambarkan pelayanan sektor publik terhadap masyarakat saat pengurusan layanan yang di Provinsi Riau

cenderung baik. Pada tahun 2014, diprediksi indeks integritas Daerah Provinsi Riau menurun menjadi 7,85 dan masih di atas standar minimal yang ditetapkan KPK.

Gambar 2.99.

Indeks Integritas Daerah Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2014)

Keterangan: Tahun 2014 adalah angka prediksi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, indeks integritas daerah Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 8,20. Pada tahun 2014, indeks integritas daerah Provinsi Riau diperkirakan sebesar 7,85 sehingga realisasi kinerja indikator indeks integritas daerah relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,73%.

c. Nilai Keterbukaan Informasi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (UU KIP) intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu. Undang-undang ini bertujuan untuk (i) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan publik. (ii) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. (iii) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan

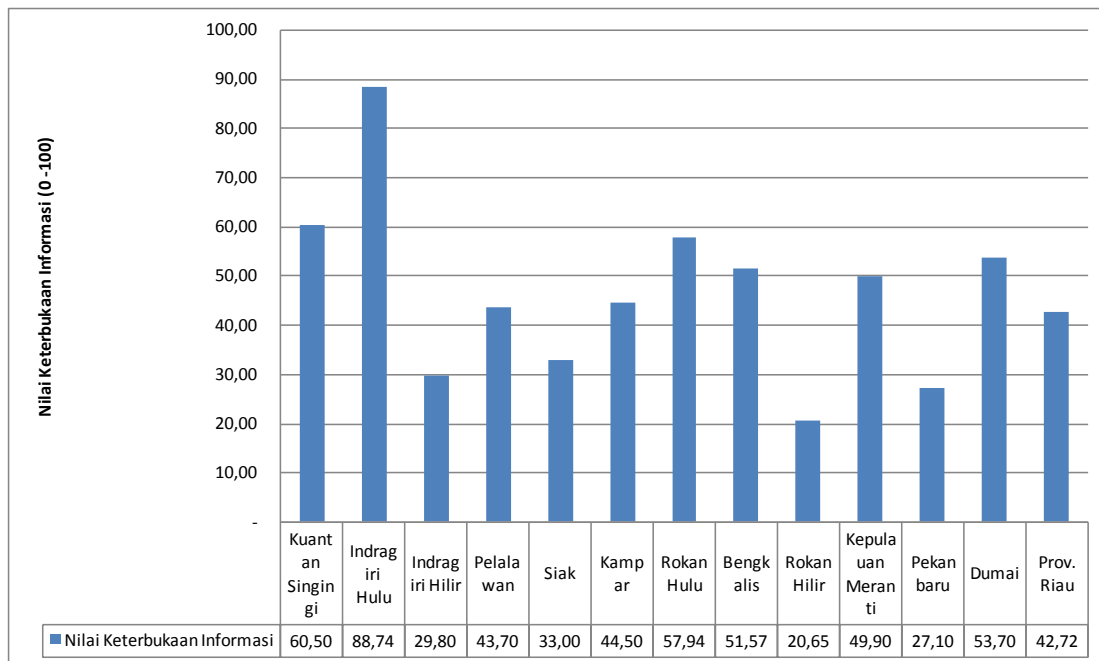
kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. (iv) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. (v) Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak. (vi) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan/atau (vii) meningkatkan pengelolaan informasi dilingkungan badan publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Metode pengukuran keterbukaan informasi ini adalah metode self assessment dilakukan untuk menilai kemajuan dan kinerja dari suatu unit kerja. Komisi Informasi mengirim kuesioner ke badan publik yang terdiri dari 27 pertanyaan yang bersifat penilaian mandiri dengan klaster bobot penilaian: informasi dasar dengan bobot 10%, kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi dengan bobot penilaian 20%, kewajiban badan publik untuk mengumumkan informasi dengan bobot penilaian 30% dan pelayanan informasi dengan bobot penilaian 40%.

Pada tahun 2013, nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau sebesar 32,27% berada di peringkat 10 dari Provinsi yang ada di Indonesia. Nilai keterbukaan Provinsi Riau ini di bawah Provinsi Jawa Barat (33,52), Kepulauan Riau (37,22), Kalimantan Tengah (47,77), NTB (48,38), Banten (51,79), Yogyakarta (51,93), Aceh (52,00), Jawa Timur (52,44) dan Kalimantan Timur (56,83). Pada tahun 2014, nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau meningkat menjadi 42,72 dengan nilai keterbukaan informasi untuk kategori SKPD Provinsi Riau yang nilainya di atas 20 adalah Dinas Pendapatan Daerah (60), Biro Keuangan Setdaprov (59), Bappeda (45), BLH (44), Dinas Sosial (26), RSUD Arifin Ahmad (25), Dishub, Dishut, Disperindag, Disbudpar, Disbun dan Disnak (24) dan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (20).

Nilai keterbukaan informasi menurut Kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu adalah yang teratas dengan nilai 88,74 diikuti Kuantan Singingi (60,50), Rokan Hulu (57,94). Kabupaten/Kota dengan nilai keterbukaan informasi terendah adalah Kabupaten rokan Hilir (20,65), Kota Pekanbaru (27,10) dan Indragiri Hilir (29,80).

Gambar 2.100
 Nilai Keterbukaan Informasi Tahun 2014
 Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau tahun 2014 ditarget meningkat menjadi 35,82. Pada tahun 2014, nilai keterbukaan informasi Provinsi Riau sebesar 42,72 sehingga realisasi kinerja nilai keterbukaan informasi melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 119,26%.

d. Opini BPK

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan, (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), (ii) opini wajar dengan pengecualian (WDP), (iii) opini tidak wajar dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dimana auditor memiliki reservasi tentang laporaan keuangan pemerintah. Keempat kriteria di atas dipenuhi. Ini juga

dikenal sebagai pendapat bersih berarti bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar (*fair*). Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana masih ada penggunaan keuangan negara yang bersifat material yang menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Opini Tidak Wajar adalah jenis opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, dan perubahan posisi keuangan, sesuai dengan prinsip berlaku umum. Disclaimer menyatakan banyak rekening/perkiraan/pos mata anggaran yang tidak didukung dengan buku, catatan dan bukti transaksi atau sekalipun buku, catatan dan bukti transaksi ada, pihak pemeriksa mengalami kesulitan untuk menyelusuri alur dokumen dan banyak hal-hal yang menyimpang dari peraturan dan peundangan yang ada.

Selama periode 2010 – 2013, opini BPK terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau mendapat opini WTP pada tahun 2010, menurun menjadi WDP pada tahun 2011 dan kembali WTP pada tahun 2012 - 2013. Pada tahun 2014 ini diprediksi opini BPK terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau adalah WTP.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, opini BPK terhadap terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2014 ditarget WTP. Pada tahun 2014, opini BPK terhadap terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi diprediksi WTP sehingga realisasi kinerja opini BPK relatif sesuai target yang ditetapkan.

Tabel 2.35.
Penilaian Kinerja Administrasi Keuangan Daerah
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Deskripsi	Tahun					Kinerja Opini BPK dan Nilai Akuntabilitas Relatif Sesuai Target RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019
	2010	2011	2012	2013	2014	
Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	
Nilai Akuntabilitas	51,40 (CC)	57,29 (CC)	59,97 (CC)	61,91 (CC)	63,85 (CC)	

e. Nilai Akuntabilitas

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Jika akuntabilitas keuangan hasilnya berupa laporan keuangan, sedangkan produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20. Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya. Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Selama periode 2014, nilai akuntabilitas Pemerintahan Provinsi Riau terus meningkat. Pada tahun 2010 bernilai CC dengan skor 51,45 yang berarti cukup baik. Pada tahun 2012, nilai akuntabilitas tetap CC (cukup baik) dengan skor meningkat menjadi 59,97. Pada tahun 2013, nilai akuntabilitas juga tetap CC (cukup baik) dengan skor meningkat menjadi 61,91. Pada tahun 2014 nilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi Riau diprediksi tetap CC dengan skor sebesar 63,85.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, nilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi Riau tahun 2014 ditarget CC. Pada tahun 2014, nilai akuntabilitas Pemerintah Provinsi diprediksi CC (63,85) sehingga realisasi kinerja nilai akuntabilitas relatif sesuai target yang ditetapkan.

21) Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selama periode 2010 – 2014, jumlah desa/kelurahan di Provinsi Riau mengalami perkembangan. Pada tahun 2010, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan masing-masingnya sebanyak 151 kecamatan dan 1.643 desa/kelurahan. Pada tahun 2012, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan masing-masingnya meningkat menjadi 163 kecamatan dan 1.759 desa/kelurahan. Pada tahun 2014, jumlah kecamatan meningkat menjadi 164 dan jumlah desa/kelurahan meningkat menjadi 1.836.

Tabel 2.36.
Jumlah Desa dan Kelurahan Tahun 2009 – 2013
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa & Kelurahan				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Kuantan Singingi	209	209	229	229	229
2	Indragiri Hulu	194	194	194	194	194
3	Indragiri Hilir	192	236	236	236	236
4	Pelalawan	118	118	118	118	118
5	Siak	126	129	129	129	131
6	Kampar	245	245	245	245	245
7	Rokan Hulu	153	153	153	153	153
8	Rokan Hilir	140	161	161	161	183
9	Bengkalis	102	102	102	102	155
10	Kep. Meranti	73	101	101	101	101
11	Pekanbaru	58	58	58	58	58
12	Dumai	33	33	33	33	33
	Jumlah	1.643	1.739	1.759	1.759	1.836

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2014)

Dari jumlah desa/kelurahan yang ada di Provinsi Riau hingga tahun 2013, sebanyak 276 desa atau 15,76% merupakan desa eks. Transmigrasi. Berdasarkan tingkat perkembangan desa, sebanyak 1.213 desa atau 69,35% dari total desa tahun 2013 terkategori desa swadaya. Desa yang terkategori desa swakarya sebanyak 520 desa atau 29,73% dari total desa tahun 2013 dan desa yang terkategori desa swasembada sebanyak 16 desa atau 0,91% dari total desa tahun 2013.

Tabel 2.37.
Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

NO	KAB / KOTA	JUMLAH DESA EKS.TRANS	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA	JUMLAH
1	KAMPAR	68	142	108	0	250
2	INRDAGIRI HULU	39	138	55	1	194
3	BENGKALIS	0	118	35	2	155
4	INDRAGIRI HILIR	37	174	63	0	237
5	PELALAWAN	21	74	38	6	118
6	ROKAN HULU	55	74	76	0	150
7	ROKAN HILIR	28	130	53	1	184
8	SIAK	0	92	34	5	131
9	KUANTAN SINGINGI	28	186	43	0	229
10	KEPULAUAN MERANTI	0	85	15	1	101
11	PEKANBARU	0	0	0	0	0
12	DUMAI	0	0	0	0	0

Sumber: Bapemades Provinsi Riau (2013)

22). Bidang Urusan Sosial

Tingginya migrasi penduduk luar provinsi ke Provinsi Riau menjadikan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) cenderung meningkat. PMKS yang cenderung meningkat selama periode 2009 – 2013 adalah wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, penyandang cacat, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan, keluarga berumah tidak layak huni, korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran bermasalah sosial, orang dengan HIV/AIDS dan keluarga rentan. Oleh karena itu, permasalahan PMKS perlu mendapat perhatian dalam pembangunan ke depan.

Tabel 2.38
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

No	Jenis PMKS	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Anak Balita Terlantar	1.920,5	1.867	2.767	1.711	1.662
2	Anak Terlantar	32.820,2	31.315	34.246	27.013	25.715
3	Anak Nakal	1.313,0	1.309	1.181	1.297	1.293
4	Anak Jalanan	761,7	769	758	791	798
5	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	15.432,3	15.502	15.054	15.712	15.783
6	Lanjut Usia Terlantar	24.988,6	22.651	17.766	16.337	14.651
7	Korban Tindak Kekerasan	514,2	626	741	1.025	1.208
8	Penyandang Cacat	16.064,0	16.064	16.064	16.064	16.064
9	Tuna Susila	2.372,9	2.051	2.201	1.229	1.036
10	Pengemis	406,7	424	445	478	497
11	Gelandangan	187,7	186	185	181	179
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	496,2	719	857	1.616	2.117
13	Korban penyalahgunaan NAPZA	602,5	592	644	561	551
14	Keluarga Fakir Miskin	177.995,0	160.358	112.758	113.053	100.619
15	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	28.979,3	29.065	34.811	29.323	29.41
16	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	548,2	560	570	596	609
17	Komunitas Adat Terpencil	22.421,9	21.771	13.874	19.876	19.282
18	Korban Bencana Alam	48.511,3	58.867	43.464	95.72	112.559
19	Korban Bencana Sosial	10.894,3	11.553	264	13.644	14.422
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	583,3	811	1.11	1.704	2.182
21	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	89,2	186	601	654	994
22	Keluarga Rentan	3.856,4	4.781	4.073	8.126	9.698
	Jumlah	387.191,5	382.027	278.825	366.742	361.784

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau (2013)

Disisi lain, kuantitas dan kualitas panti sosial yang tersedia masih relatif kurang. Jumlah panti sosial anak telantar yang tersebar di Kabupaten/kota berjumlah 89 buah dan menampung sebanyak 3.975 orang anak. Disisi lain, jumlah anak telantar, anak balita telantar, anak nakal dan anak jalanan sekitar 30.000 orang. Oleh karena itu, sesuai amanat undang-undang, maka penanganan anak dan balita telantar, anak jalanan dan anak nakal perlu mendapat perhatian lebih baik lagi.

Tabel 2.39
Jumlah Panti Sosial Anak Terlantar Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Panti	Jumlah Klien/Anak
1	Kuantan Singingi	3	81
2	Indragiri Hulu	5	231
3	Indragiri Hilir	11	436
4	Pelalawan	5	230
5	Siak	2	50
6	Kampar	15	628
7	Rokan Hulu	3	115
8	Rokan Hilir	4	160
9	Bengkalis	8	408
10	Kep. Meranti	2	80
11	Pekanbaru	21	1.016
12	Dumai	10	540
	Jumlah	89	3.975

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau (2013)

24) Bidang Urusan Statistik

Bidang urusan statistik dilakukan dengan kerjasama antara Bappeda dengan BPS. Selama periode 2009 – 2013, publikasi buku Riau Dalam Angka, PDRB Provinsi Riau, Kabupaten/Kota Dalam Angka dan PDRB untuk masing-masingnya selalu disediakan atau 100% dilaksanakan. Kecuali pada tahun 2009, buku Kepulauan Meranti Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Meranti Tahun 2009 belum tersedia karena pada tahun 2009 Kabupaten Meranti baru dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis.

Tabel 2.40
Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten/Kota
Tahun 2009 – 2013 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	2009		2010		2011		2012		2013	
		Angka	PDRB	Angka	PDRB	Angka	PDRB	Angka	PDRB	Angka	PDRB
1	Kuantan Singingi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Indragiri Hulu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Indragiri Hilir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Pelalawan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Siak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Kampar	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
7	Rokan Hulu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8	Rokan Hilir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
9	Bengkalis	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Kep. Meranti	Na	Na	√	√	√	√	√	√	√	√
11	Pekanbaru	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
12	Dumai	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Provinsi Riau	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Bappeda Provinsi Riau (2014)

24). Bidang Urusan Perpustakaan

Perpustakaan daerah yang terdapat pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada tahun 2009 masing-masing satu perpustakaan kecuali Kabupaten Kuansing yang belum memiliki perpustakaan daerah dan tidak terjadi penambahan hingga pada tahun 2013. Jumlah pengunjung pada perpustakaan Soeman HS sebanyak 378.556 orang pada tahun 2009, dan mengalami peningkatan jumlah pengunjung pada tahun 2010, 2011 dan 2012 namun mengalami penurunan pada tahun 2013 sehingga perlu dibuat suatu terobosan untuk meningkatkan jumlah pengunjung di perpustakaan. Jumlah Koleksi buku perpustakaan di Provinsi Riau (per Judul) pada tahun 2009 sebanyak 71.750 judul dan mengalami peningkatan sebanyak 84.428 judul pada tahun 2013. Jumlah Koleksi buku perpustakaan di Provinsi Riau (Per Eks) pada Tahun 2009 sebanyak 192.685 eks mengalami peningkatan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 720.586 eks. Jumlah pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman H.S Tahun 2009-2013 Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41.
Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman H.S
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

No	Uraian	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Pengunjung di Perpustakaan Soeman HS (orang)	378.556	399.647	437.236	442.896	342.896
2	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Riau (Per Judul)	71.750	66.625	80.090	83.935	84.428
3	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Provinsi Riau (Per eks)	192.685 eks	167.085 eks	657.049 eks	720.156 eks	720.586 eks

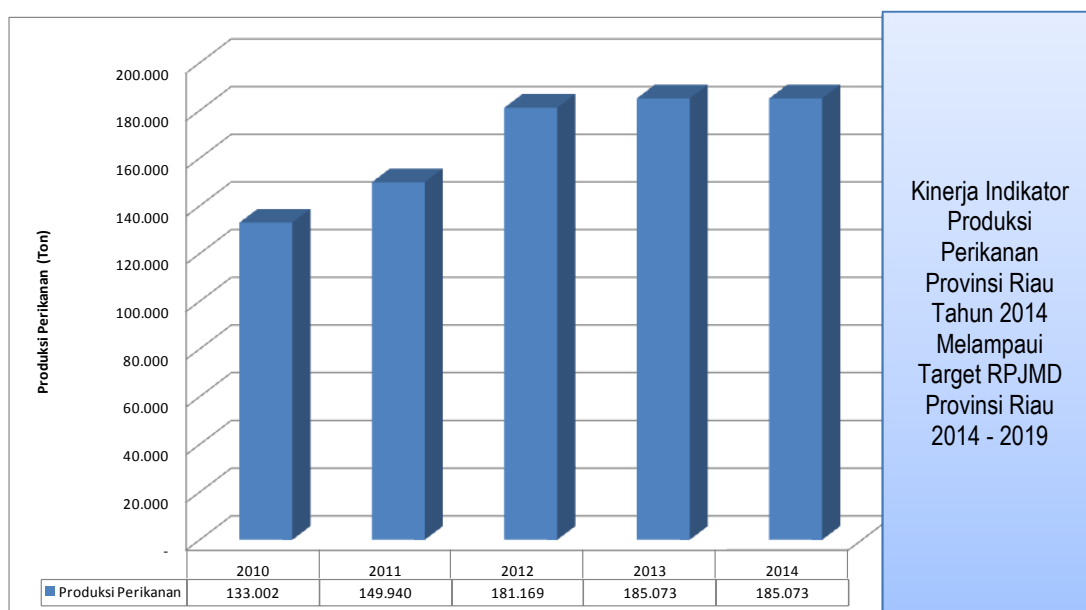
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah Provinsi Riau yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan industri.

1) Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Selama periode 2010 – 2014, produksi perikanan di Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, produksi perikanan di Provinsi Riau sebesar 133.002 ton, meningkat menjadi 181.169 ton pada tahun 2012 dan menjadi 185.073 ton pada tahun 2013. Produksi perikanan terbesar adalah perikanan laut yaitu sebesar 93.279 ton atau 50,40% dari produksi, diikuti dari kolam dan kerambah (27,34%) dan jaring apung (12,64%). Pada tahun 2014, produksi perikanan di Provinsi Riau relatif sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 185.073 ton. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan produksi perikanan di Provinsi Riau sebesar 6,83% per tahun.

Gambar 2.101
Produksi Perikanan Tahun 2010 – 2014 di Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, produksi perikanan Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 158.954,26 ton. Pada tahun 2014, realisasi produksi perikanan Provinsi Riau sebesar 185.073 to, sehingga realisasi produksi perikanan di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 113,64%.

Pada tahun 2013, produksi perikanan terbesar terdapat di Kabupaten Kampar diikuti dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten Kampar merupakan sentra perikan kolam dan kerambah serta jaring apung. Sedangkan Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir merupakan sentra perikanan laut.

Tabel 2.42.
Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2013 Menurut Kabupaten Provinsi Riau

No	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut	Perairan Umum	Tambak	Kolam & Kerambah	Kerambah	Sawah	Jaring Apung	Jumlah
1	Kuantan Singingi	-	227,00	-	4.162,13	-	-	-	4.389,13
2	Indragiri Hulu	-	2.339,30	-	656,04	-	-	-	2.995,34
3	Indragiri Hilir	37.781,70	5.511,20	318,60	83,03	-	-	28,30	43.722,83
4	Pelalawan	3.858,70	2.129,20	-	6.213,65	-	-	-	12.201,55
5	Siak	356,90	598,20	-	930,99	-	-	1,00	1.887,09
6	Kampar	-	2.862,60	-	29.026,59	-	-	23.051,60	54.940,79
7	Rokan Hulu	-	1.856,70	-	4.399,14	-	-	318,90	6.574,74
8	Bengkalis	2.123,60	-	-	665,21	-	-	-	2.788,81
9	Rokan Hilir	47.520,00	1.826,00	-	1.229,18	-	-	-	50.575,18
10	Kep. Meranti	716,80	-	3,10	23,32	-	-	1,20	744,42
11	Pekanbaru	-	105,70	-	2.955,49	-	-	-	3.061,19
12	Dumai	921,50	-	7,60	163,05	-	-	-	1.092,15
	Provinsi Riau	93.279,20	17.455,90	329,30	50.507,82	-	-	23.401,00	185.073,20

Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Dibanding jumlah konsumsi, jumlah produksi perikanan provinsi Riau relatif defisit. Selama ini, kekurangan suplai ikan di Provinsi Riau umumnya didatangkan dari Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Rendahnya produksi perikanan dibanding konsumsi yang selama ini dialami Provinsi Riau perlu menjadi perhatian serius dan menjadi isu strategis ke depan. Pada perikanan laut dan budidayanya, permasalahan terbatasnya kemampuan jelajah kapal penangkapan ikan nelayan dan *over fishing* disekitar pantai perlu diantisipasi melalui modernisasi kapal dan peralatan tangkap serta pengembangan budidaya perikanan laut. Pada perikanan perairan umum, upaya penegakan peraturan tentang pencemaran sungai perlu ditingkatkan di samping pengaturan penangkapan ikan dip perairan umum. Khusus perikanan kolam keramba yang saat ini menjadi andalan produksi perikanan Provinsi Riau perlu diikuti pengembangan industri pengolahan ikan oleh UKM atau perusahaan besar sehingga harga ikan (patin) dapat stabil.

2). Bidang Urusan Pertanian

a) Tanaman Pangan dan Hortikultura

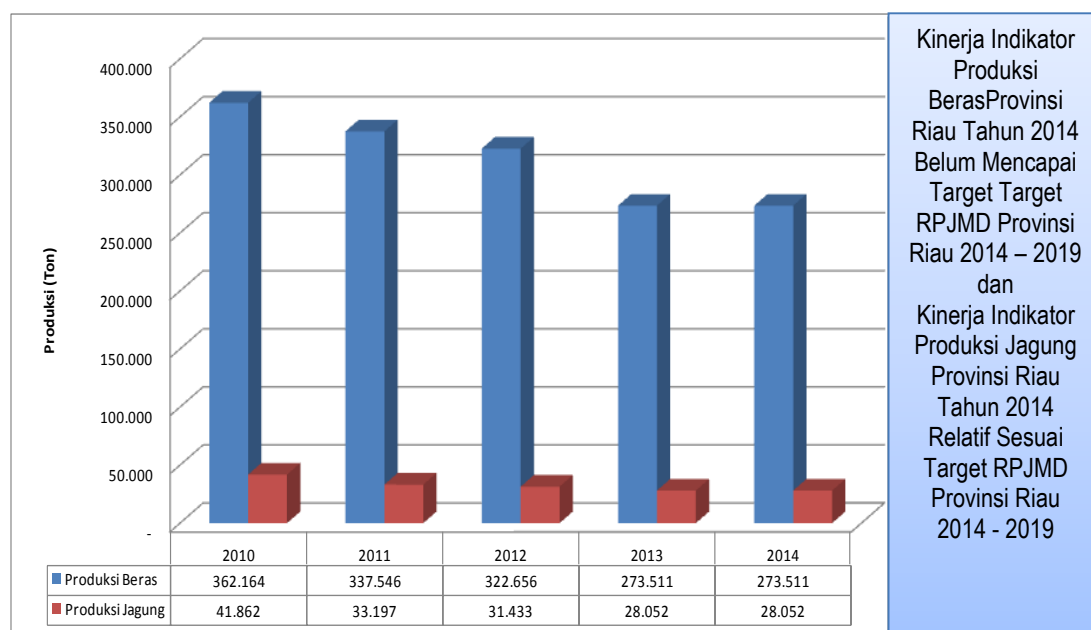
Pada tahun 2009, Provinsi Riau memulai Program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) dengan target peningkatan produksi padi sebesar 1 juta ton GKG (gabah kering giling) atau setara 630.000 ton beras. Target ini dicapai melalui peningkatan luas panen dari 147.746 hektar pada tahun 2008 menjadi 247.615 hektar tahun 2013 dan peningkatan produktivitas dari 3,34 ton pada tahun 2008 menjadi 4,04 ton pada tahun 2013. Target luas panen, produktivitas dan produksi (padi sawah dan padi ladang) tidak tercapai bahkan sebaliknya tren terus menurun kecuali produktivitas dan produksi padi sawah yang trennya sedikit meningkat.

Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan luas panen padi sawah dan padi ladang menurun yang masing-masingnya sebesar -5,72% per tahun dan -3,55%. Kondisi yang sama untuk pertumbuhan produksi (padi sawah dan ladang) dan produktivitas padi ladang yang masing-masingnya sebesar -5,23% per tahun, -7,26% per tahun dan -3,85% per tahun, sementara produktivitas padi sawah meningkat sebesar 0,52% per tahun. Menurunnya luas panen padi lebih disebabkan karena konversi lahan ke penggunaan lainnya oleh petani ke tanaman yang lebih bernilai ekonomis.

Pada tahun 2010, produksi beras di Provinsi Riau sebesar 362.164 ton, menurun menjadi 322.656 ton tahun 2012 dan kembali menurun menjadi 273.511 ton pada tahun 2013. Pada tahun 2014, diprediksi produksi beras di Provinsi Riau relatif sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 273.511 ton. Secara umum, rasio produksi beras Provinsi Riau terhadap konsumsinya terkategori defisit. Secara tradisional, defisit beras Provinsi Riau sebagian besar di suplai dari Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jambi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, produksi beras Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 328.228 ton. Pada tahun 2014, realisasi produksi beras Provinsi Riau sebesar 273.511 ton, sehingga realisasi kinerja produksi beras di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,33%.

Gambar 2.102
Perkembangan Produksi Beras dan Jagung Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

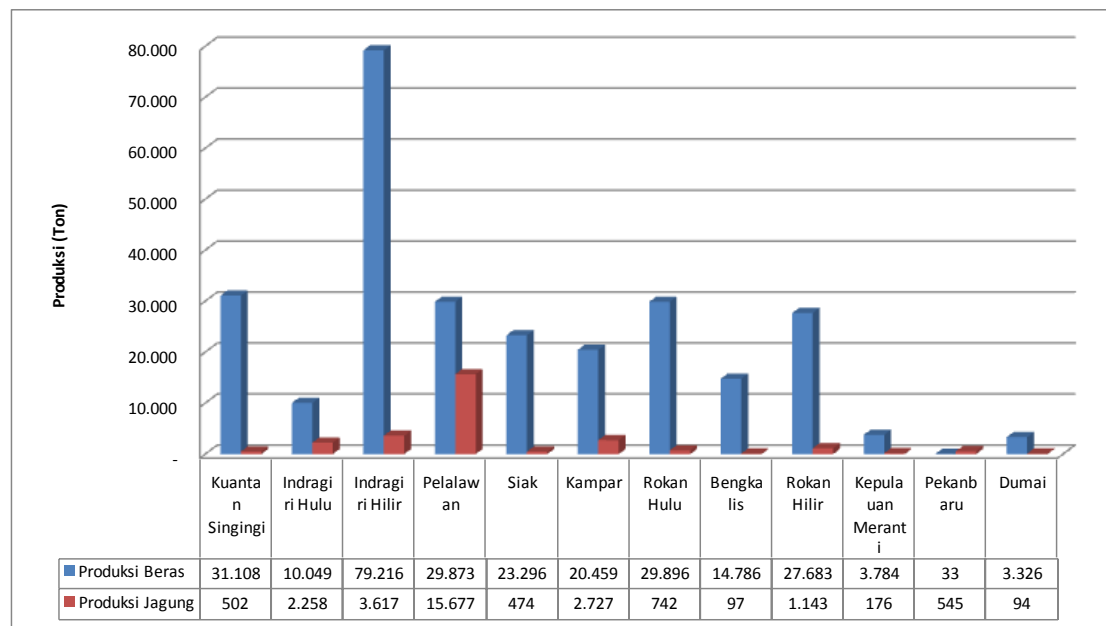
Keterangan: Produksi tahun 2014 adalah prediksi

Produksi beras menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 menunjukkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sentra produksi beras Provinsi Riau dengan total produksi (GKG) sebesar 79.216ton. Produksi padi terbesar kedua adalah Kabupaten Kuantan Singingi (31.108 ton) diikuti Kabupaten Rokan Hulu (29.896 ton). Kabupaten

Indragiri Hilir dan Kuantan singingi merupakan dua Kabupaten sentra beras ini memiliki rasio produksi terhadap konsumsi berasnya yang hampir mendekati surplus.

Selama periode 2010 – 2014, produksi jagung memiliki tren menurun. Pada tahun 2010, produksi jagung Provinsi Riau sebesar 41.862 ton, menurun menjadi 31.433 ton pada tahun 2012 dan menurun menjadi 28.052 ton tahun 2013. Pada tahun 2014, produksi jagung diprediksi sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 28.052 ton. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan produksi jagung Provinsi Riau menurun sebesar -7,69% per tahun. Secara umum, rasio antara produksi jagung dengan konsumsi jagung Provinsi Riau tahun 2014 terkategori defisit. Relatif sama dengan beras, kurang jagung Provinsi Riau disuplai dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Gambar 2.103.
Produksi Padi dan Jagung Tahun 2013
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau



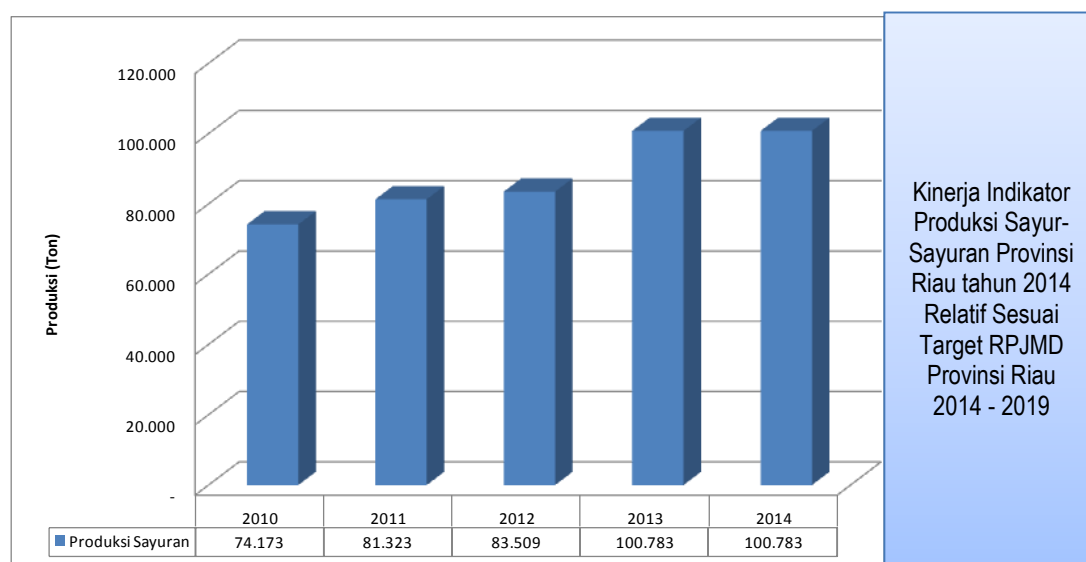
Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, produksi jagung Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 29.174,97 ton. Pada tahun 2014, realisasi produksi jagung Provinsi Riau sebesar 28.052 ton, sehingga realisasi kinerja produksi jagung di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,15%.

Produksi jagung provinsi riau menurut Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa sentra produksi jagung adalah Kabupaten Pelalawan dengan produksi sebesar 15.677 ton. Kabupaten/Kota sentra produksi jagung terbesar kedua adalah Indragiri Hilir (3.617 ton) diikuti Kampar (2.272 ton). Kabupaten Pelalawan dengan produksi 15.677 ton memiliki rasio produksi terhadap konsumsi yang terkategori surplus, sedangkan Kabupaten/kota lainnya terkategori defisit.

Provinsi Riau menghasilkan sayur-sayuran dataran rendah seperti cabe, ketimun, terong, kacang panjang, bayam, kangkung, petsau dan sawi. Sayuran ini diproduksi dan dikonsumsi secara lokal. Selama periode 2010 – 2014, produksi sayuran di Provinsi Riau memiliki tren meningkat. Pada tahun 2010, produksi sayuran berjumlah 74.173 ton, meningkat menjadi 83.509 ton dan diprediksi menjadi 100.783 ton pada tahun 2014. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan produksi sayuran di Provinsi Riau meningkat sebesar 6,32% per tahun. Secara umum, rasio antara produksi sayuran dengan konsumsi sayuran penduduk Provinsi Riau terkategori defisit dengan nilai rasio 0,24. Kekurangan sayuran di Provinsi Riau disuplai dari Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

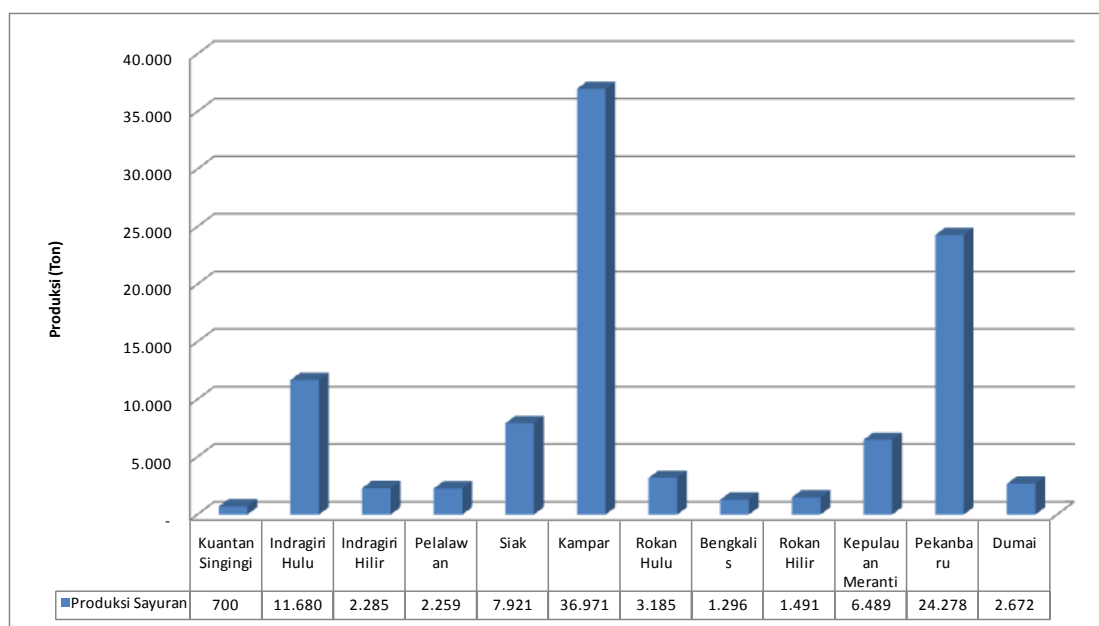
Gambar 2.104.
Perkembangan Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)
Keterangan: Produksi tahun 2014 adalah prediksi

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, produksi sayuran Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 96.754,14 ton. Pada tahun 2014, realisasi produksi sayuran Provinsi Riau sebesar 100.783 ton, sehingga realisasi kinerja produksi sayuran di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,16%.

Gambar 2.105.
Produksi Sayur-Sayuran Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota
Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

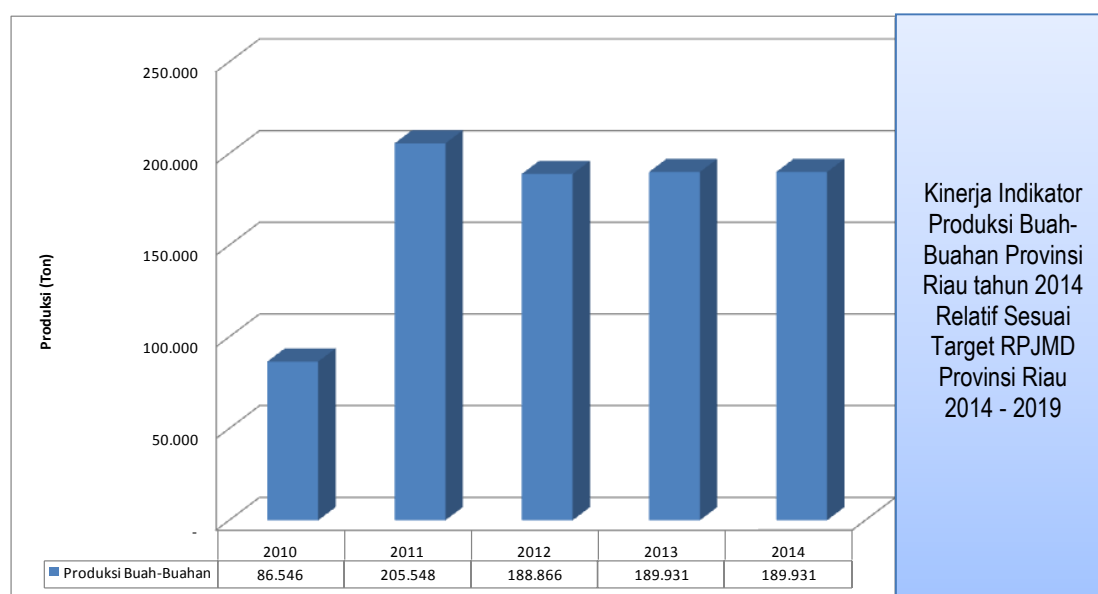
Produksi sayur-sayuran menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau menunjukkan bahwa sentra sayur-sayuran terdapat di Kabupaten Kampar dengan produksi sebesar 36.971 ton. Kota Pekanbaru dan Indragiri Hulu berada diposisi kedua dengan produksi masing-masingnya sebesar 24.278 ton dan 11.680 ton. Semua kabupaten/kota memiliki rasio produksi sayuran terhadap konsumsi yang terkategori defisit.

Provinsi menghasilkan buah-buahan tropis dataran rendah seperti pisang, durian, duku, mangga, rambutan, pepaya, nenas dan jambu. Selama periode 2010 – 2014, produksi buah-buahan di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, produksi buah-buahan sebesar 86.546 ton, meningkat menjadi 188.866 ton pada tahun 2012 dan pada tahun 2014 diprediksi produksi buah-buahan di Provinsi Riau relatif sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 189.931 ton. Selama periode ini, rata-rata produksi buah-buahan di Provinsi Riau meningkat sebesar 17,02% per tahun. Produksi

buah-buahan Provinsi Riau dibandingkan dengan konsumsi terkategori defisit. Kekurangan buah-buahan disuplai dari Provinsi tetangga seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan serta impor.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, produksi buah-buahan Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 195.873,34 ton. Pada tahun 2014, realisasi produksi buah-buahan Provinsi Riau sebesar 189.931 ton, sehingga realisasi kinerja produksi buah-buahan di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,97%.

Gambar 2.106.
Perkembangan Produksi Buah-Buahan Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau

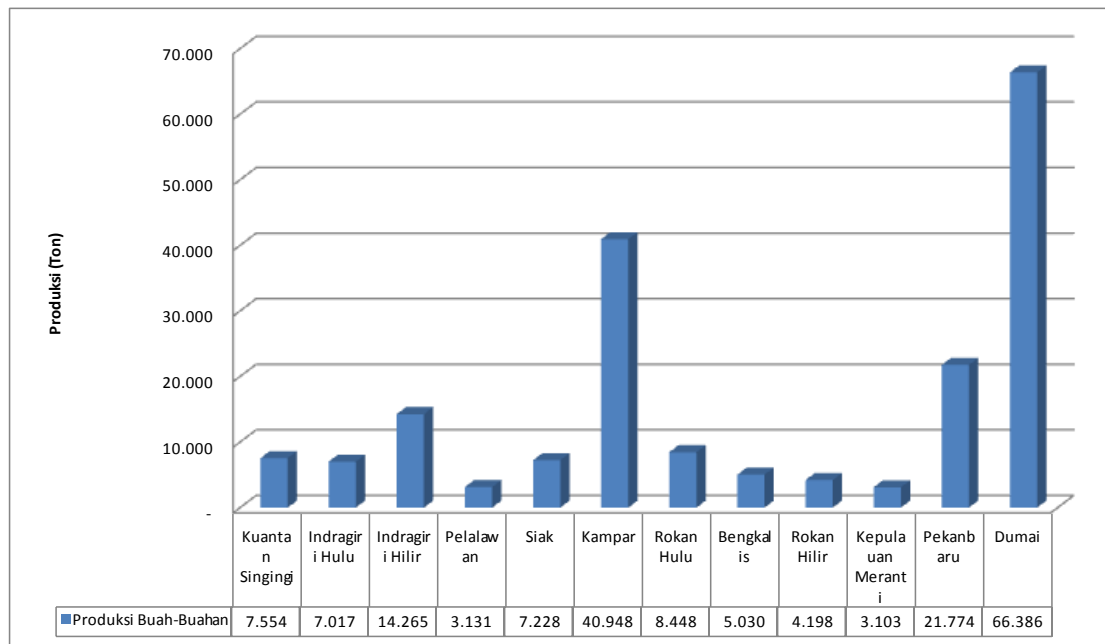


Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Keterangan: Produksi tahun 2014 adalah prediksi

Kabupaten/Kota produsen terbesar pertama buah-buahan di Provinsi Riau tahun 2013 adalah Kota Dumai dengan produksi sebesar 66.386 ton. Kota Dumai memproduksi buah nenas (63.079 ton), pepaya (1.240 ton), dan pisang (805 ton) serta buah-buahan lainnya. Produsen terbesar kedua adalah Kabupaten Kampar dengan produksi sebesar 40.948 ton diikuti Kota Pekanbaru yaitu sebesar 21.774 ton. Kecuali Dumai yang terkategori surplus buahan, Kabupaten/Kota lainnya terkategori defisit.

Gambar 2.107.
Produksi Buah-Buahan Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota
Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

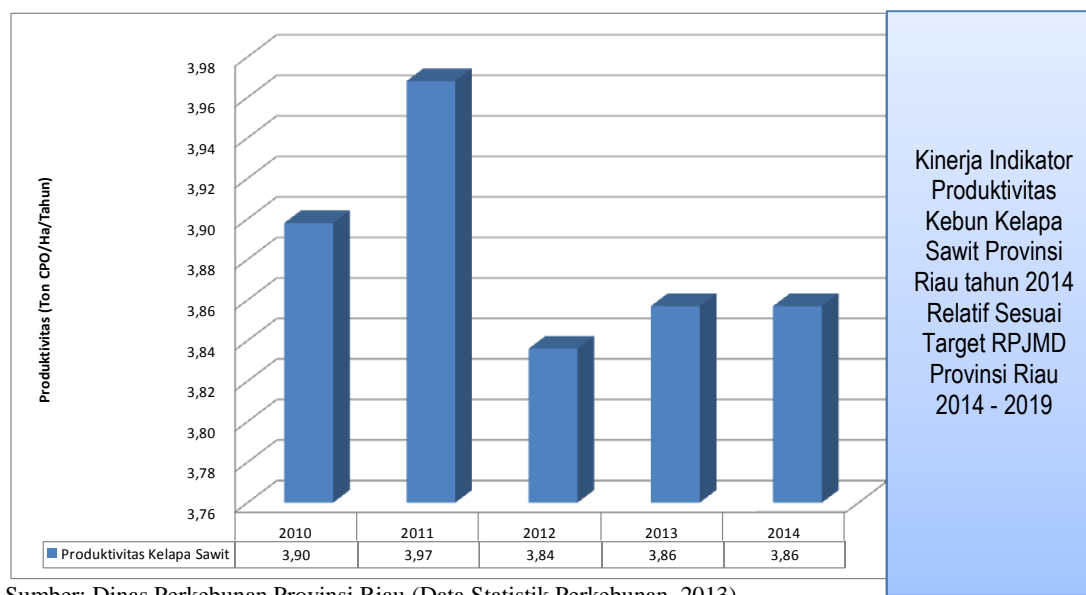
b). Perkebunan

Areal perkebunan kelapa sawit, kelapa dan karet adalah yang terluas di Provinsi Riau dan di Indonesia. Khusus untuk kelapa sawit dan kelapa, Provinsi Riau telah menjadi barometer di Indonesia. Pada tahun 2013, Statistik Indonesia menyatakan bahwa luas areal kelapa sawit Provinsi Riau seluas 2.226,6 ribu hektar merupakan yang terluas di Sumatera 6.625 ribu hektar (33,61%) dan Indonesia 10.586,5 ribu hektar (21,04%). Areal kelapa seluas 522,2 ribu hektar yang merupakan terluas di Sumatera 1.204,5 ribu hektar (43,35%) dan Indonesia 3.787,3 ribu hektar (13,79%). Areal karet seluas 405,1 ribu hektar terluas ke empat di Sumatera setelah Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Jambi.

Pada masa yang sama produksi CPO Provinsi Riau sebesar 6.499,8 ribu ton merupakan yang terbesar di Sumatera 18.443,8 ribu ton (35,24%) dan di Indonesia 26.895,5 ribu ton (24,17%). Produksi kelapa sebesar 479,0 ribu ton setara kopra, yang merupakan terbesar di Sumatera 1.040,6 ribu ton setara kopra (46,03%) dan Indonesia 3.228,1 ribu ton setara kopra (14,84%). Produksi karet sebesar 412,6 ribu ton KKK.

Selama periode 2010 – 2014, produktivitas kelapa sawit dalam menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) memiliki tren yang berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, produktivitas kelapa sawit dalam menghasilkan CPO per hektar per tahun sebesar 3,90 ton. Tahun 2012, produktivitas kebun kelapa sawit dalam menghasilkan CPO menurun menjadi 3,84 ton dan diprediksi meningkat sama dengan produktivitas tahun 2013 yaitu sebesar 3,86 ton CPO/hektar/tahun. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata pertumbuhan produktivitas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau menurun sebesar 0,21% per tahun. Pencapaian produktivitas kebun kelapa sawit Provinsi Riau selama periode 2010 – 2014 masih jauh di bawah potensi produksi kebun kelapa sawit yaitu sekitar 8 ton CPO/hektar/tahun. Penurunan produktivitas kelapa sawit di Provinsi Riau dimungkinkan karena penggunaan bibit yang tidak unggul dan pemeliharaan tanaman yang tidak standar serta tanaman yang sudah tua/rusak (PIR) penting di atasi secara cepat dan berkelanjutan.

Gambar 2.108.
Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2010 – 2014
Provinsi Riau

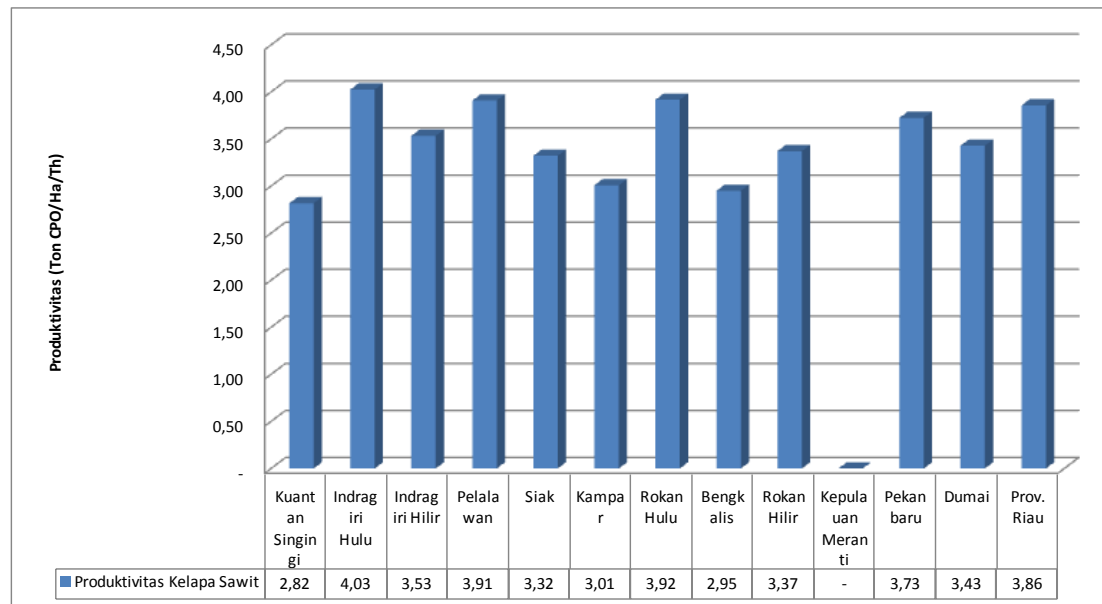


Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Data Statistik Perkebunan, 2013).

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, Produktivitas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 3,99 ton CPO/hektar/tahun. Pada tahun 2014, realisasi produktivitas kebun kelapa sawit Provinsi Riau diprediksi sebesar

3,86 ton CPO/hektar/tahun, sehingga realisasi kinerja produktivitas kebun kelapa sawit di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 96,67%.

Gambar 2.109.
Produktivitas Kelapa Sawit Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Data Statistik Perkebunan, 2013).

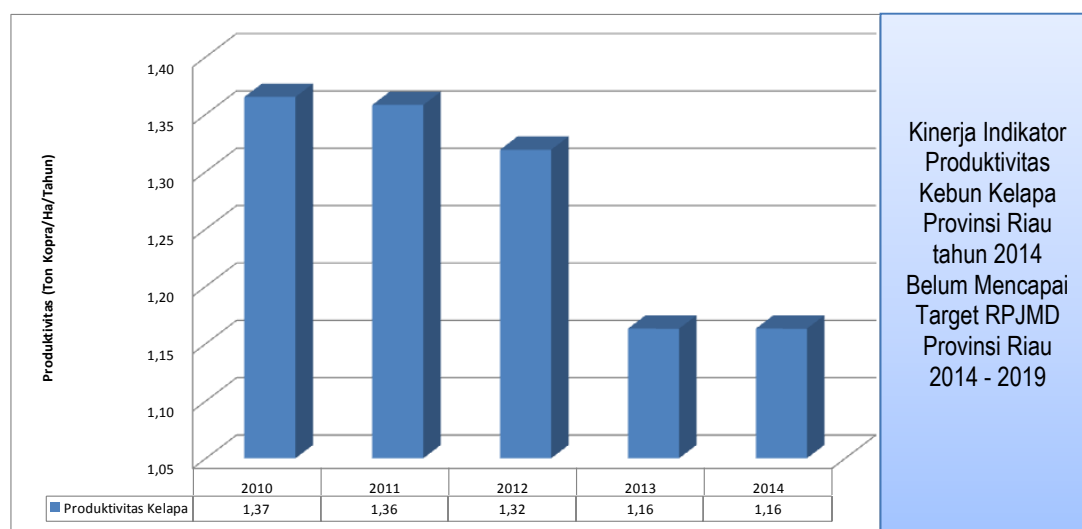
Produktivitas kebun kelapa sawit menurut Kabupaten/Kota se Provinsi Riau menunjukkan bahwa produktivitas kebun kelapa sawit di Indragiri Hulu adalah yang tertinggi yaitu sebesar 4,08 ton. Kabupaten Rokan Hlu dan Pelalawan ditempat kedua dan ketiga dimana produktivitas masing-masingnya sebesar 3,92 ton dan 3,91 ton. Produktivitas kebun kelapa sawit di Kabupaten/Kota lainnya berada di bawah produktivitas kebun kelapa sawit Provinsi Riau (3,86 ton CPO/Ha/Tahun).

Selama periode 2010 – 2014, produktivitas kelapa setara kopra menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2010, produktivitas kelapa sebesar 1,37 ton per hektar per tahun, menurun menjadi 1,32 ton pada tahun 2012. Pada tahun 2014, produktivitas kelapa diprediksi sama dengan produktivitas tahun 2013 yaitu sebesar 1,16 ton per hektar per tahun. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan produktivitas kelapa di provinsi Riau menurun sebesar -3,15% per tahun. Terus menurunnya produktivitas kelapa di Provinsi Riau, antara lain semakin luasnya tanaman kelapa tua/rusak dan

kerusakan kebun kelapa akibat instruksi air laut. Kondisi ini perlu segera di atasi di samping fasilitasi Pemerintah Daerah Riau dalam penetapan harga pembelian kelapa.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, Produktivitas kebun kelapa di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 1,288 ton setara kopra/hektar/tahun. Pada tahun 2014, realisasi produktivitas kebun kelapa Provinsi Riau diprediksi sebesar 1,16 ton setara kopra/hektar/tahun. Realisasi kinerja produktivitas kebun kelapa di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90,30%.

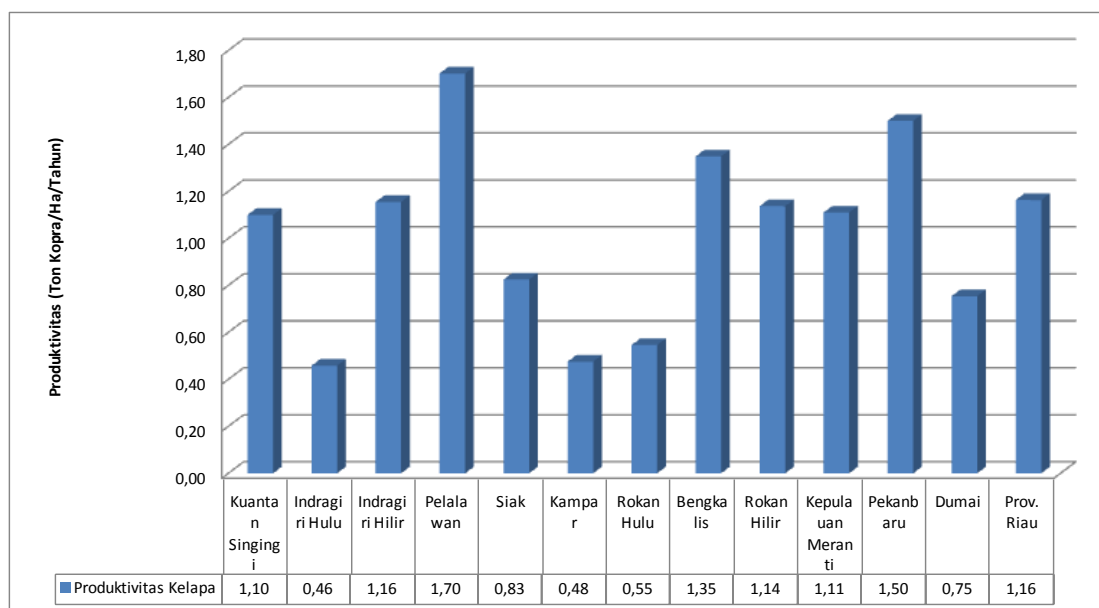
Gambar 2.110.
Produktivitas Kelapa Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Data Statistik Perkebunan, 2013).

Sentra kelapa (kelapa dalam) di Provinsi Riau hingga tahun 2013 adalah Indragiri Hilir dengan total produksi sebesar 299.634 ton setara CPO, diikuti Kepulauan Meranti (27.349 ton), Pelalawan (17.226 ton) dan Bengkalis (11.193 ton). Namun dari segi produktivitas tertinggi dicapai oleh Pelalawan (1,70 ton) diikuti Pekanbaru (1,5 ton) dan Bengkalis (1,35 ton). Produktivitas kebun kelapa Kabupaten/kota lainnya di bawah produktivitas kebun kelapa Provinsi Riau.

Gambar 2.111.
Produktivitas Kelapa Tahun 2013 Menurut Kabupaten/kota
Provinsi Riau

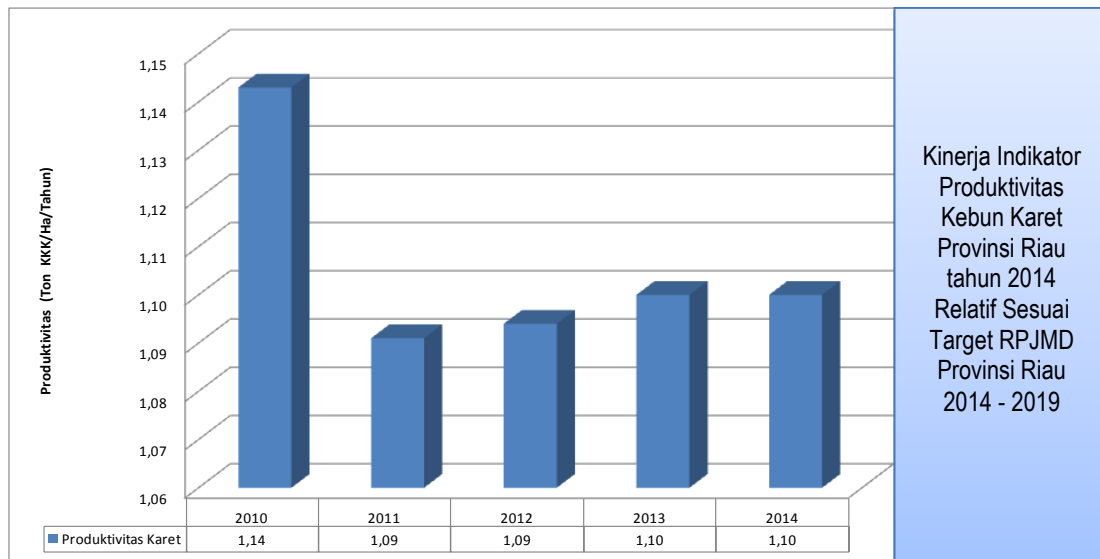


Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Data Statistik Perkebunan, 2013).

Selama periode 2010 – 2014, produktivitas karet setara Kadar Karet Kering (KKK) di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, produktivitas karet di Provinsi Riau sebesar 1,14 ton setara KKK per hektar per tahun, menurun menjadi 1,09 ton setara KKK per hektar per tahun. Pada tahun 2014, produktivitas kebun karet di Provinsi Riau diprediksi sama dengan produktivitas tahun 2013 yaitu sebesar 1,10 ton setara KKK per hektar per tahun. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan produktivitas karet di Provinsi Riau menurun sebesar -0,76% per tahun. Pencapaian produktivitas Provinsi Riau selama periode ini jauh di bawah produktivitas standar yaitu sekitar 1,5 ton KKK per hektar per tahun. Rendahnya produktivitas karet sebagai akibat semakin luasnya tanaman karet tua/rusak. Upaya replanting meniru pola SRDP (*smallholder Rubber Development Project*) perlu dilakukan.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, Produktivitas kebun karet di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 1,05 ton setara KKK/hektar/tahun. Pada tahun 2014, realisasi produktivitas kebun Karet Provinsi Riau diprediksi sebesar 1,10 ton setara KKK/hektar/tahun. Realisasi kinerja produktivitas kebun karet di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,76%.

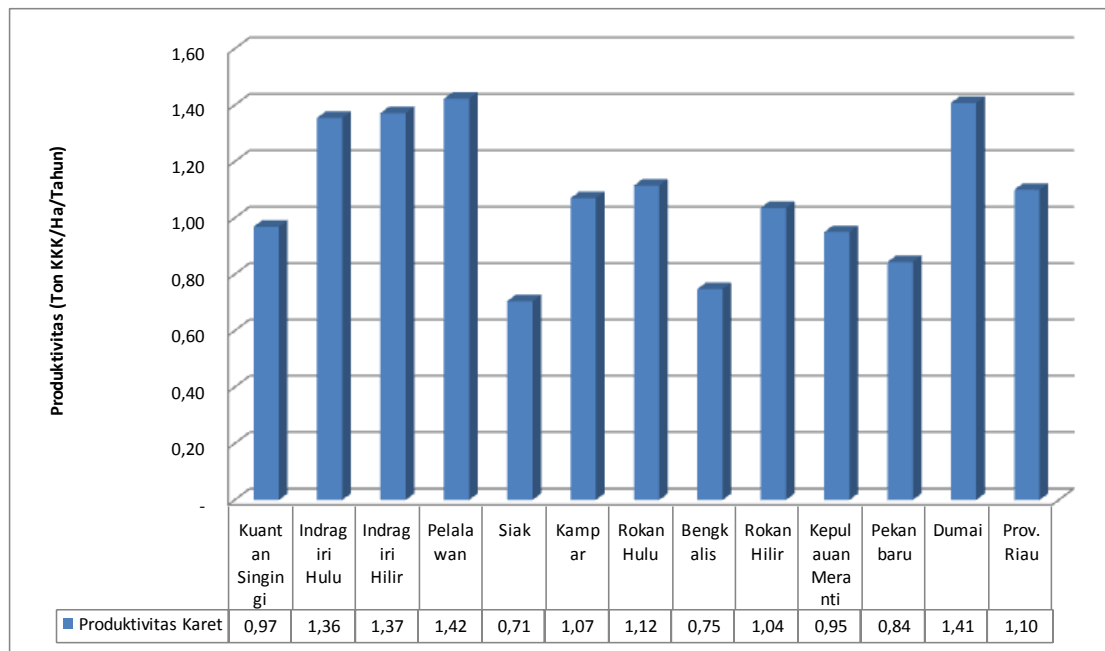
Gambar 2.112.
Produktivitas Karet Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Data Statistik Perkebunan, 2013).

Sentra tanaman karet di Provinsi Riau hingga tahun 2013 adalah Kabupaten Kuantan Singingi dengan luas 146.474 hektar dan produksi sebesar 71.149 ton setara KKK diikuti dengan Kampar dengan luas 92.537 hektar dan produksi sebesar 60.714 ton setara KKK dan Indragiri Hulu dengan luas 58.627 hektar dan produksi sebesar 40.468 ton setara KKK. Namun dari segi produktivitas ternyata yang tertinggi adalah Pelalawan (1,42 ton setara KKK) diikuti Dumai (1,41 ton setara KKK), Indragiri Hilir (1,37 ton setara KKK) dan Indragiri Hulu (1,36 ton setara KKK). Kabupaten lainnya dengan produktivitas di atas Provinsi Riau adalah Rokan Hulu (1,12 ton setara KKK) Kabupaten/Kota lainnya memiliki produktivitas di bawah Provinsi Riau.

Gambar 2.113.
Produktivitas Karet Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Riau (Data Statistik Perkebunan, 2013).

c). Peternakan

Selama periode 2010 – 2014, populasi ternak ruminansia besar (sapi dan kerbau) dan ruminansia kecil (kambing dan babi) memiliki tren menurun, kecuali domba dengan tren meningkat. Populasi ternak unggas (ayam kampung dan itik) memiliki tren meningkat dan populasi ternak unggas (ayam ras pedaging dan ayam kampung) memiliki tren meningkat, kecuali itik yang memiliki tren menurun. Disisi produksi daging, produksi daging ternak ruminansia besar, ruminansia kecil dan unggas memiliki tren meningkat kecuali produksi daging babi dan itik yang memiliki tren menurun.

Selama periode 2010 – 2014, populasi ternak sapi memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, populasi ternak sapi sebanyak 180.612 ekor, meningkat menjadi 189.060 ekor tahun 2012. Pada tahun 2014, diprediksi populasi ternak sapi relatif sama dengan jumlah ternak sapi yaitu sebanyak 175.431 ekor. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan populasi ternak sapi di provinsi Riau menurun sebesar 0,58% per tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwa laju kelahiran lebih rendah dibanding laju pemotongan ternak. Lebih tingginya laju pemotongan ternak dibanding kelahiran

terlihat dari produksi daging sapi yang memiliki tren berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, produksi daging sapi sebesar 7.478.418 kg, meningkat menjadi 10.730.828 kg pada tahun 2012 dan menurun menjadi 8.242.781 kg pada tahun 2010. Selama periode ini, rata-rata produksi daging sapi di Provinsi Riau meningkat sebesar 1,97% per tahun. Meski produksi daging sapi meningkat namun jumlah konsumsi lebih tinggi sehingga rasio produksi daging sapi terhadap konsumsi penduduk Provinsi Riau terkategori defisit. Kekurangan daging sapi di Provinsi Riau disuplai dari Provinsi tetangga dan impor.

Provinsi Riau yang defisit suplai daging ternak besar dan kecil ini sebagaimana halnya Indonesia, tidak perlu terjadi, bahkan Provinsi Riau dapat mensuplai untuk wilayah lain. Provinsi Riau mempunyai sumber daya yang memadai untuk pengembangan ternak khususnya ternak sapi, kerbau dan kambing. Areal kelapa sawit seluas 2,40 juta hektar menyediakan pakan hijauan yang besar. Diasumsikan per hektar lahan sawit dipelihara 1 ekor sapi atau kerbau atau kambing, perkebunan kelapa sawit setidaknya akan dicapai populasi sebesar 2,40 juta ekor.

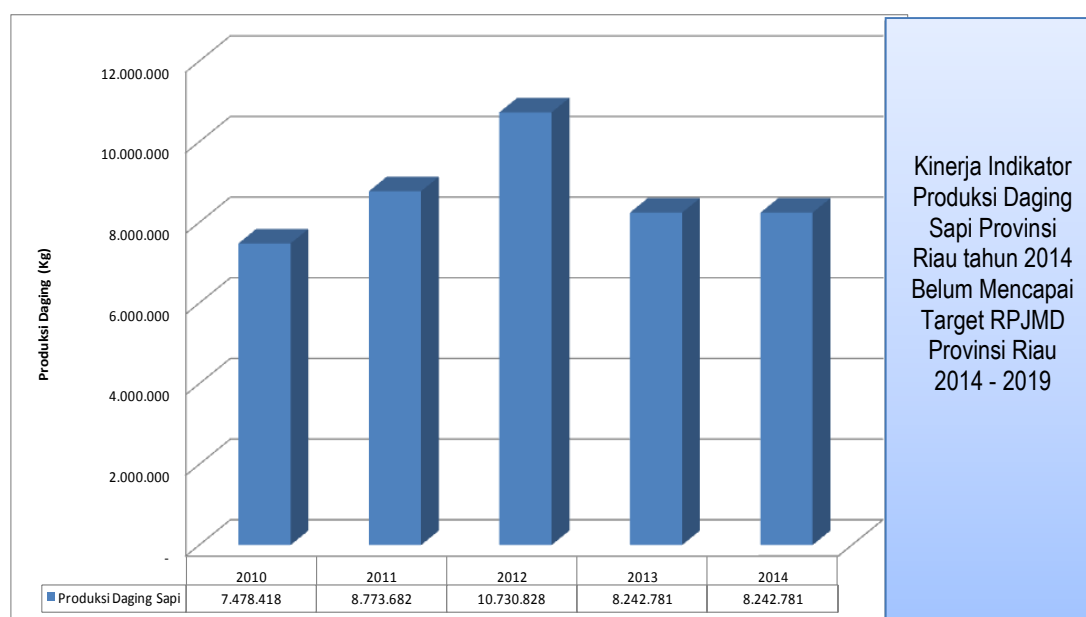
Tabel 2.43.
Populasi Ternak dan Produksi Daging
Tahun 2010 – 2014 Provinsi Riau

Deskripsi	Tahun					Pertumbuhan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
1. Populasi (Ekor)						
a. Sapi	180.612	164.707	189.060	175.431	175.431	(0,58)
b. Kerbau	52.700	38.300	41.229	32.237	32.237	(9,36)
c. Kambing	196.064	196.115	208.428	175.832	175.832	(2,15)
d. Domba	3.888	3.985	4.583	4.739	4.739	4,04
e. Babi	47.631	47.449	49.873	46.483	46.483	(0,49)
f. Ayam Broiler	35.141.255	38.043.692	38.165.987	36.930.599	36.930.599	1,00
g. Ayam Kampung	3.601.212	2.848.075	3.377.652	3.163.705	3.163.705	(2,56)
h. Itik	237.697	274.033	289.564	243.483	243.483	0,48
2. Produksi Daging (Kg)						
a. Sapi	7.478.418	8.773.682	10.730.828	8.242.781	8.242.781	1,97
b. Kerbau	1.359.282	1.021.749	1.607.797	1.367.215	1.367.215	0,12
c. Kambing	490.123	446.970	465.571	550.138	550.138	2,34
d. Domba	8.739	4.268	6.386	10.174	10.174	3,09
e. Babi	985.881	1.081.370	816.351	821.786	821.786	(3,58)
f. Ayam Broiler	25.209.624	25.618.229	37.024.456	26.609.747	26.609.747	1,09
g. Ayam Kampung	1.780.741	1.255.545	2.702.121	3.302.202	3.302.202	13,15
h. Itik	262.924	245.886	231.651	245.625	245.625	(1,35)

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka Tahun 2011 - 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, produksi daging sapi di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 12.283.428 kg. Pada tahun 2014, realisasi daging sapi di Provinsi Riau diprediksi sebesar 8.242.781 kg. Realisasi kinerja produksi daging sapi di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 67,10%.

Gambar 2.114.
Produksi Daging Sapi Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



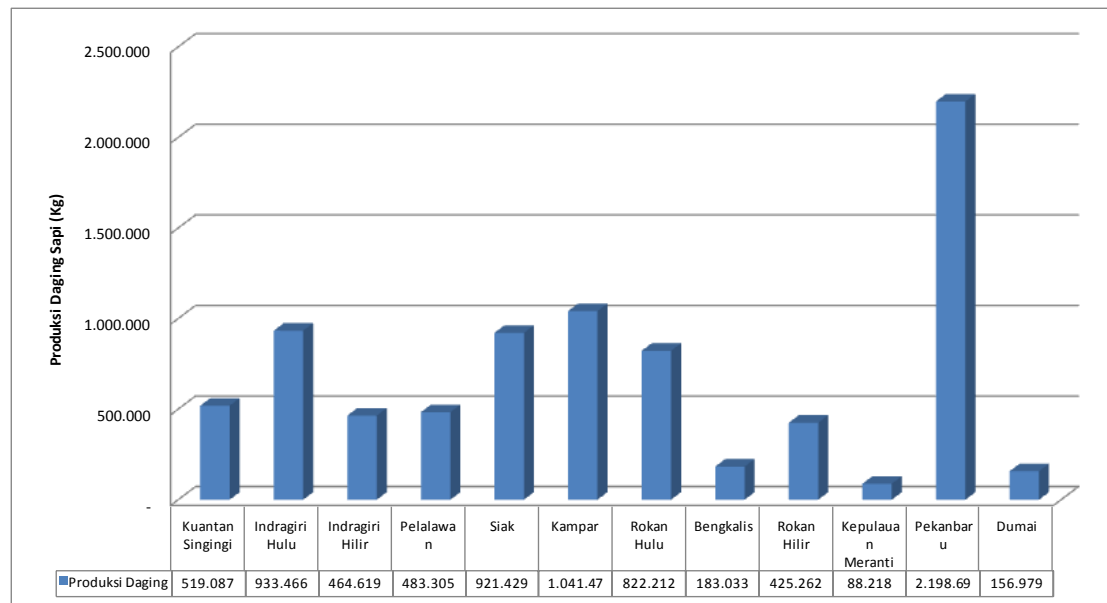
Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Provinsi Riau yang defisit suplai daging ternak besar dan kecil ini sebagaimana halnya Indonesia, tidak perlu terjadi, bahkan Provinsi Riau dapat mensuplai untuk wilayah lain. Provinsi Riau mempunyai sumber daya yang memadai untuk pengembangan ternak khususnya ternak sapi, kerbau dan kambing. Areal kelapa sawit seluas 2,73 juta hektar menyediakan pakan hijauan yang besar. Diasumsikan per hektar lahan sawit dipelihara 1 ekor sapi atau kerbau atau kambing, perkebunan kelapa sawit setidaknya akan dicapai populasi sebesar 2,37 juta ekor.

Oleh karena itu, upaya pengembangan ternak besar dan kecil (ruminansia) perlu menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau kedepan karena selain upaya pengembangan pertanian beroreansi *zero waste*, peningkatan sumber pendapatan alternatif petani kelapa sawit, karet dan kelapa juga mendukung program nasional untuk

pencapaian swasembada daging. Namun perlu diperhatikan bahwa dalam pengembangan populasi ternak besar dan kecil ini perlu dilakukan dengan daya dorong yang besar dan berkelanjutan sehingga laju pemotongan lebih kecil dari laju penambahan atau kelahiran ternak.

Gambar 2.115.
Produksi Daging Sapi Tahun 2013 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

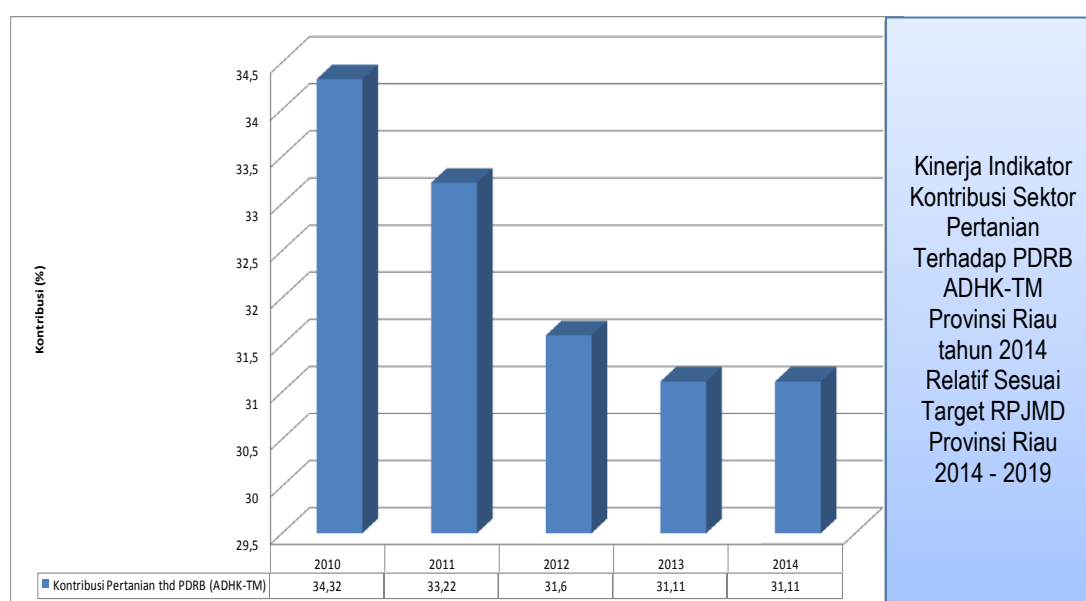
Sentra produksi daging sapi di Provinsi Riau terbesar di Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru dengan produksi pada tahun 2013 sebesar 2.198.699 kg. Diposisi kedua sebagai produksi daging sapi adalah Kabupaten Kampar yaitu sebesar 1.041.472 kg. Ditempat ketiga sebagai produsen daging sapi adalah Indragiri Hulu dengan produksi sebesar 933.466 kg. Produksi daging Kabupaten/Kota lain jauh di bawah produksi daging ketiga Kabupaten/Kota utama penghasil daging sapi Provinsi Riau. Namun perlu dicatat, meski Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu merupakan tiga Kabupaten/Kota produsen daging di Provinsi Riau namun rasio produksi daging terhadap konsumsi penduduknya masih terkategori defisit.

c). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Selama periode 2010 – 2014, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada harga konstan tanpa migas memiliki tren menurun. Pada tahun 2010, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Riau sebesar 34,32%, menurun menjadi 31,60 pada tahun 2012 dan kembali menurun pada tahun 2014 menjadi 31,11%. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan kontribusi pertanian terhadap PDRB (ADHK-TM) menurun sebesar -1,94% per tahun. Kondisi ini sesuai dengan teori dan pengalaman negara-negara maju yang bergerak dari negara agraris ke industri. Namun, rata-rata penurunan pertumbuhan kontribusi sektor pertanian ini belum diikuti dengan peningkatan kontribusi sektor industri pada PDRB, dimana pertumbuhan kontribusi sektor industri tanpa migas hanya meningkat 1,84% per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK-TM) di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget menurun menjadi 29,83%. Pada tahun 2014, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK-TM) di Provinsi Riau diprediksi sebesar 31,11%. Realisasi kinerja kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK-TM) di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 95,89%.

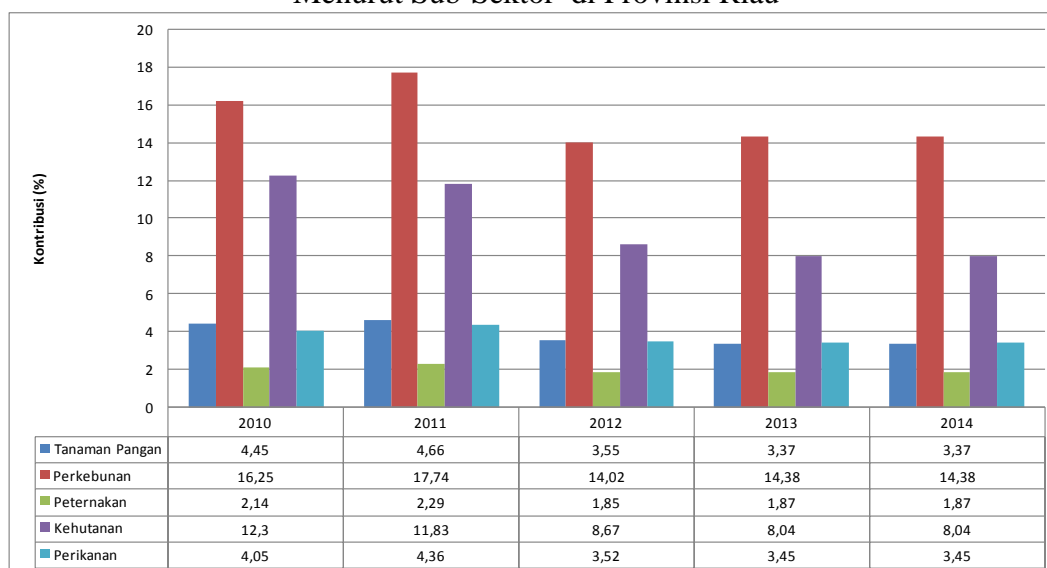
Gambar 2.116.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada
Harga Konstan Tanpa Migas (ADHK-TM) Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Bila kontribusi sektor pertanian dianalisis menurut subsektor pertanian pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kontribusi terbesar disektor pertanian adalah subsektor perkebunan dengan kontribusi menurun dari 16,25% pada tahun 2010 menjadi 14,38% tahun 2014. Sub-sektor kehutanan diposisi kedua dengan kontribusi menurun dari 12,30% tahun 2010 menjadi 8,04% tahun 2014. Sub-sektor tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar 4,45% tahun 2010 menurun menjadi 3,37% tahun 2014. Sub-sektor perikanan memberikan kontribusi sebesar 4,05% tahun 2010 menurun menjadi 3,45% tahun 2014. Ditempat terakhir adalah subsektor peternakan dengan kontribusi sebesar 2,14% tahun 2010 menurun menjadi 1,87% tahun 2014.

Gambar 2.117.
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB pada
Harga Konstan Tanpa Migas (ADHK-TM) Tahun 2013
Menurut Sub-Sektor di Provinsi Riau



Sumber: BPS Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Pengembangan industri pengolahan pertanian, khususnya industri kelapa sawit, kelapa dan karet penting menjadi perhatian dan menjadi isu strategis dalam pembangunan kedepan agar produk pertanian yang diproduksi dan diekspor bernilai lebih tinggi serta berdaya saing tinggi. *The Competitiveness Pyramid* telah menerangkan bahwa peningkatan PDRB khususnya PDRB per kapita suatu wilayah harus diawali dengan peningkatan investasi (teknologi, peralatan, infrastruktur dan sumber daya manusia). Investasi ini akan mendorong peningkatan produktivitas dan perdagangan serta daya saing wilayah tersebut.

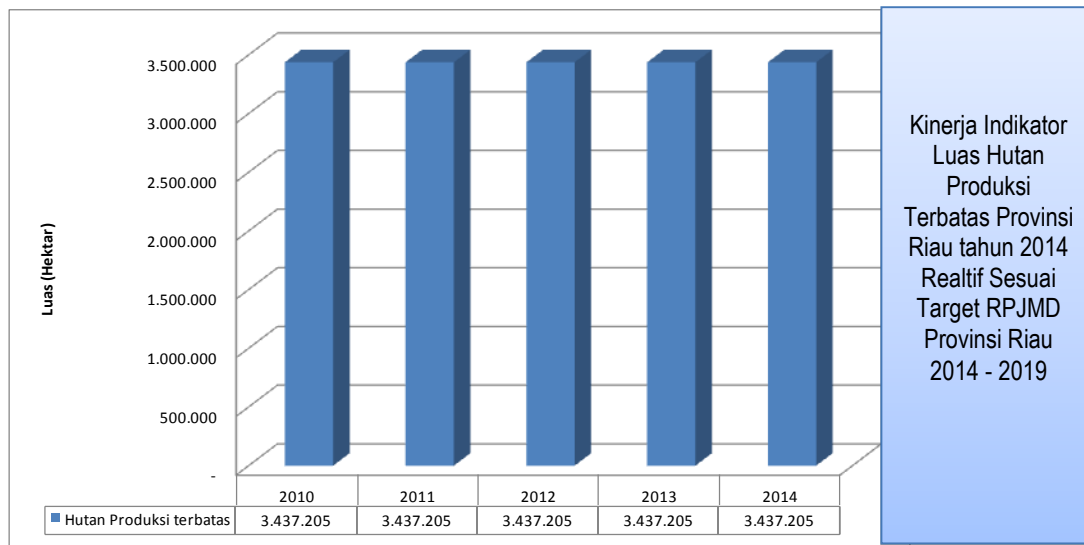
d) Bidang Urusan Kehutanan

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan menurut fungsi pokoknya dibagi menjadi hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak yang mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat, sehingga selain memanfaatkan harus diperhatikan pula kelestariannya.

Luas hutan berdasarkan Laporan Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2013 adalah 8.598.757 hektar. Bila dirinci menurut fungsinya sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) seluas 531.852,65 hektar (6,19%) adalah hutan suaka alam/taman wisata, seluas 228.793,82 hektar (2,66%) merupakan hutan lindung, kemudian 1.605.762,78 hektar (18,67%) adalah hutan produksi tetap, 1.815.949,74 hektar (21,12%) adalah hutan produksi terbatas seluas 2.364.828,39 hektar (27,50%) merupakan hutan produksi yang dapat dikonversi/APL, seluas 138.433,62 (1,16%) merupakan Hutan Mangrove/Bakau dan 1.913.136,00 hektar (22,25%) merupakan Areal Penggunaan Lain (APL)-Pelepasan. Hasil rekomendasi tim terpadu yang menjadi dasar pengusulan RTRW, luas hutan produksi terbatas meningkat menjadi 3.437.205 hektar.

Selama periode 2010 – 2014, luas hutan produksi terbatas yang telah ditetapkan relatif tetap yaitu sebesar 3.437.205 hektar. Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, luas hutan produksi terbatas di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget tetap seluas 3.437.205 hektar.. Pada tahun 2014, luas hutan produksi terbatas di Provinsi Riau seluas 3.437.205. Realisasi kinerja indikator luas hutan produksi terbatas di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Gambar 2.118.
Luas Hutan Produksi terbatas Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau

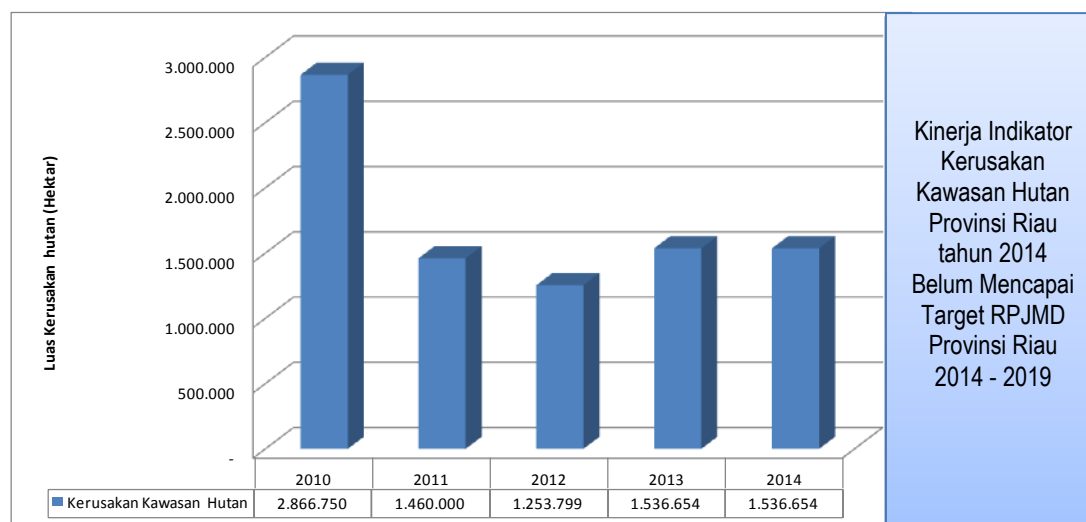


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014)

Kerusakan kawasan hutan di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuasi dan cenderung menurun. Pada tahun 2010, luas hutan yang terkagori rusak seluas 2,86 juta hektar menurun menjadi 1,25 juta hektar pada Tahun 2012 dan meningkat menjadi 1,54 juta hektar pada Tahun 2014. Peningkatan luas kerusakan hutan yang cenderung meningkat pada tahun 2013/2014 disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan yang melanda Provinsi Riau.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, luas kerusakan hutan di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget menurun menjadi 1.441.654 hektar. Pada tahun 2014, realisasi kerusakan hutan di Provinsi Riau diprediksi seluas 1.536.654 hektar. Realisasi kinerja indikator kerusakan hutan produksi terbatas di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan yaitu kinerjanya sebesar 93,82%.

Gambar 2.119.
Kerusakan Kawasan Hutan Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau

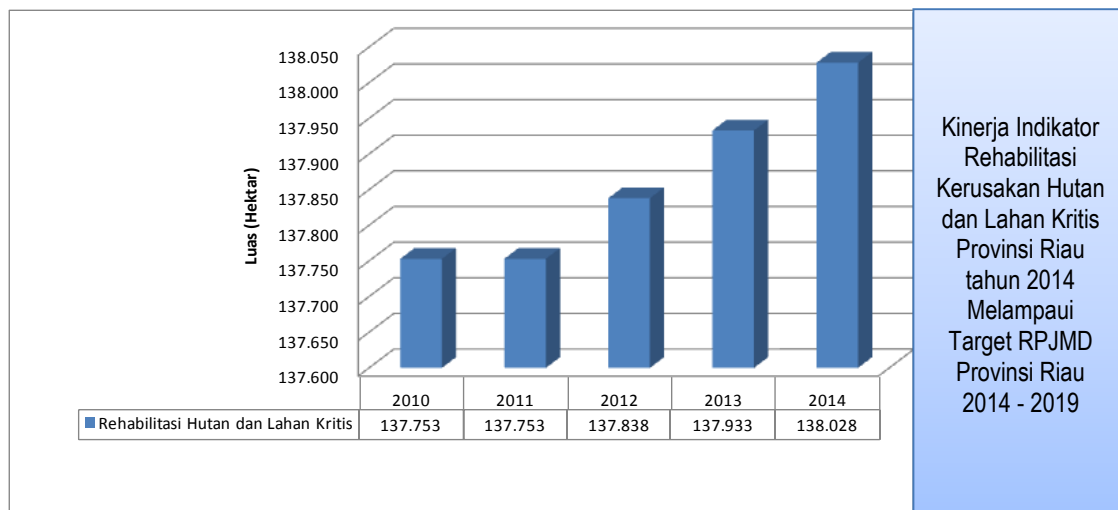


Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014)

Luas lahan kritis dalam kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Provinsi Riau pada tahun 2013 tercatat seluas 1.536.654 hektar dengan lokasi terluas ada di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu seluas 237.157 hektar atau 18,91% diikuti Kabupaten Kampar seluas 190.833 hektar atau 15,22% dan Kabupaten Bengkalis seluas 151.149 hektar atau 12,05%. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis merupakan upaya untuk menghidupkan kembali hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2010, luas hutan yang di rehabilitasi seluas 137.692 hektar. Pada tahun 2012, rehabilitasi hutan dan lahan kritis hanya seluas 137.838 hektar dan pada tahun 2014 diprediksi sama dengan tahun 2013 yaitu seluas 138.028 hektar.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget seluas 95.950 hektar atau meningkat sebesar 950 hektar dibanding tahun 2013. Pada tahun 2014, realisasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi Riau diprediksi seluas 1.38.028 hektar. Realisasi kinerja indikator kerusakan hutan produksi terbatas di Provinsi Riau melampaui target yang ditetapkan yaitu kinerjanya sebesar 143.85%. Namun perlu dicatat bahwa meski kinerja indikator ini telah melampaui target namun masih sangat luasnya hutan yang rusak yaitu seluas 1,54 juta hektar, maka upaya rehabilitasi hutan yang rusak perlu segera dilakukan agar masalah-masalah banjir dan lainnya dapat secara berangsur teratasi.

Gambar 2.120.
Perkembangan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau (2014)

Seiring dengan meningkatnya luas lahan kritis dan semakin tegasnya pemberantasan illegal logging maka produksi produk kayu olahan khususnya yang bersumber dari kayu alam cenderung semakin menurun sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.106 Produksi kayu gergajian, kayu lapis dan chip yang bersumber dari kayu alam sebagian besar dihasilkan di Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan. Sedangkan produksi pulp yang bersumber dari HTI cenderung berfluktuatif meningkat yang dihasilkan di Kabupaten Siak dan Pelalawan.

4). Bidang Urusan Energi dan Sumber daya mineral

Provinsi Riau memiliki potensi/cadangan bahan tambang sebagai sumber energi primer yang banyak terdapat di Provinsi Riau adalah minyak bumi, gas bumi, batubara, bitumin dan gambut. Cadangan minyak bumi di Provinsi Riau diperkirakan sebesar 4,27 MMSTB (*million metric stock tanks barrels*) yang terdapat Kabupaten Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, pelalawan dan Indragiri Hulu. Potensi/cadangan gas bumi sebesar 7,75 triliun *standart cubic feet* (TSCF) terdapat di kabupaten Pelalawan, Siak, Pekanbaru dan Bengkalis. Potensi/cadangan batubara sebesar 2,37 milyar ton berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hulu dan Kampar. Potensi/cadangan bitumin (*oil shale*) sebesar 52,8 juta ton berada di Kabupaten

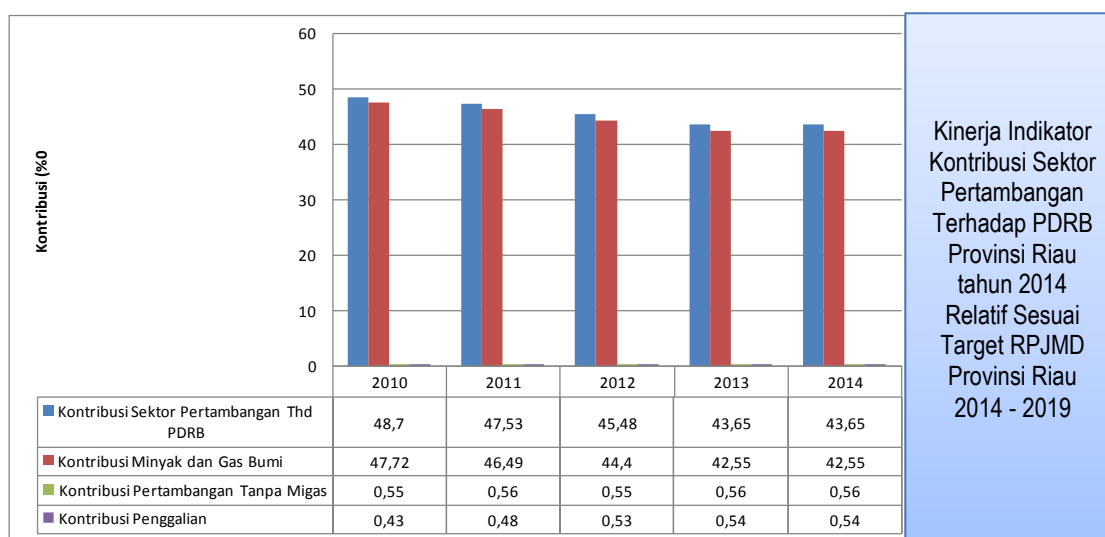
Kuantan Singingi. Potensi/cadangan gambut sebesar 12,88 milyar ton berada di Kabupaten Siak, Bengkalis dan Indragiri Hilir.

Produksi pertambangan Provinsi Riau yang terus diusahakan selama periode 2010 – 2014 meliputi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Selama periode ini, produksi minyak bumi Provinsi cenderung menurun dengan rata-rata penurunan pertumbuhan produksi sebesar -1,08% per tahun. Penurunan pertumbuhan produksi ini lebih dikarenakan jumlah sumur yang tua dan kurang produktif. Namun demikian, produksi minyak bumi dari bumi Provinsi Riau merupakan yang terbesar di Indonesia. Produksi gas bumi Provinsi Riau memiliki tren yang hampir sama dengan produksi minyak mentah bahkan tren penurunannya meningkat dengan rata-rata pertumbuhan produksi meningkat sebesar 28,92% per tahun. Produksi pertambangan batubara memiliki tren menurun dengan rata-rata pertumbuhan produksi menurun sebesar -5,58% per tahun.

Selama periode 2010 – 2014, sumber daya pertambangan telah memberikan kontribusi yang besar dalam APBD dan PDRB Provinsi Riau. Pada tahun 2010, kontribusi sektor pertambangan sebesar 48,7%, menurun menjadi 45,48% pada tahun 2012 dan menurun lagi menjadi 43,65% pada tahun 2014. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan kontribusi sektor pertambangan menurun sebesar -2,17% per tahun. Dianalisis menurut sub-sektornya memperlihatkan kontribusi terbesar diberikan oleh sub-sektor minyak dan gas bumi dengan kontribusi sebesar 47,72% tahun 2010 dan menurun menjadi 42,55% tahun 2014. Kontribusi pertambangan tanpa migas dan penggalan kontribusinya di bawah 1%.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 42,14%. Pada tahun 2014, realisasi kontribusi sektor pertambangan di Provinsi Riau tahun 2014 diprediksi sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 43,65%. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan yaitu kinerjanya sebesar 103,61%.

Gambar 2.121.
Perkembangan Kontribusi Sektor Pertambangan Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian disektor pertambangan dan penggalian ini adalah produksi minyak mentah Provinsi Riau besar ini hanya sebagian kecil saja yang diolah di Provinsi Riau. Sebagian besar diekspor dalam bentuk minyak mentah sehingga nilai tambah diperoleh negara pengimpor. Sebaliknya Provinsi Riau mengimpor hasil minyak sebesar 492.223 ton dari luar. Oleh karena itu, potensi produksi minyak mentah yang dimiliki Provinsi Riau seharusnya dapat dikembangkan dengan meningkatkan jumlah dan/atau kapasitas terpasang pabrik pengolahan minyak mentah yang ada di Provinsi Riau sehingga nilai produksi minyak akan semakin meningkatkan kontribusinya dalam PDRB Provinsi Riau.

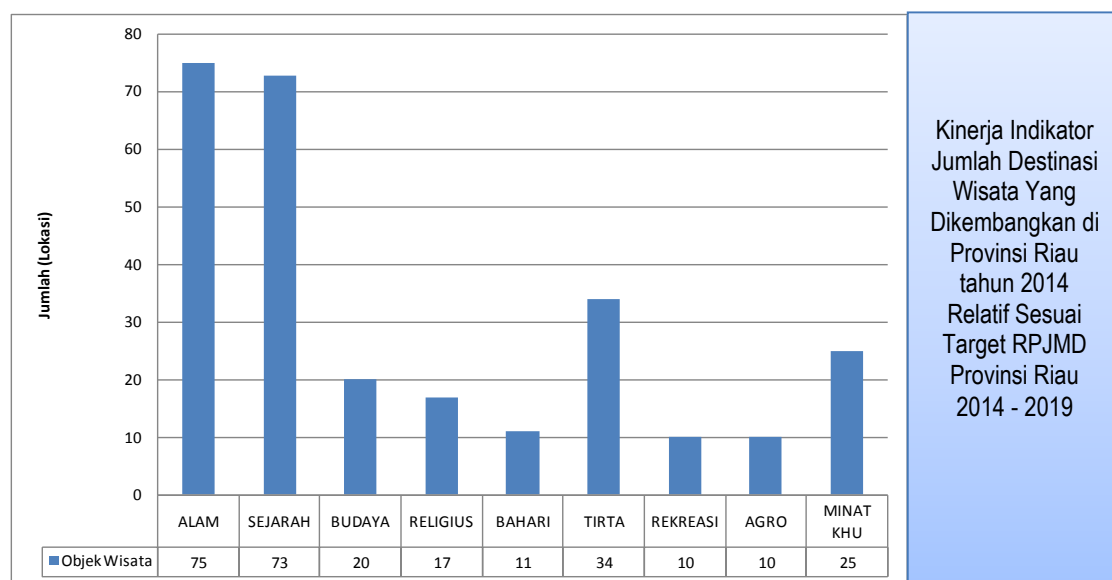
5). Bidang Urusan Pariwisata

Provinsi Riau memiliki potensi objek-objek pariwisata yang banyak. Dari potensi objek-objek wisata yang ada, hanya beberapa objek wisata yang mulai dikembangkan seperti (1) Wisata Fenomena Bono yang ada di Kabupaten Pelalawan, (2) Candi Muara Takus yang terletak d Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, (3) Benteng Tujuh Lapis dan sumber air panas di Kabupaten Rokan Hulu, (4) Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, (5) Festival Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, (6) Danau Buatan di Kota Pekanbaru dan (7) Istana Siak Sri Indrapura di

Kabupaten Siak. Sebagian besar objek wisata belum dikembangkan dan belum menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca negara. Kondisi ini menjadi pariwisata belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Provinsi Riau.

Gambar 2.122.

Jumlah Objek Wisata Tahun 2014 Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau



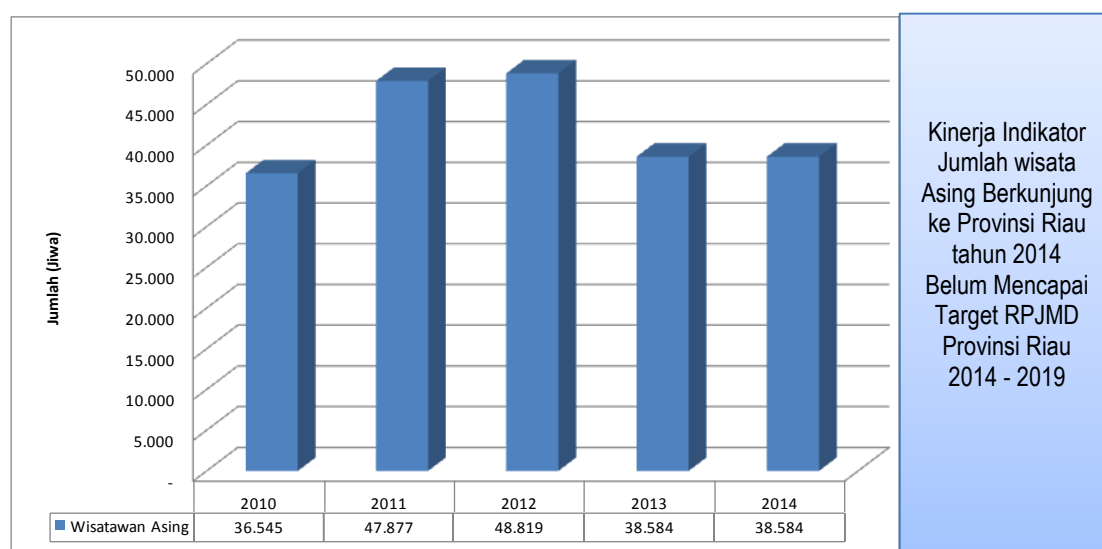
Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Riau (Data dan informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)

Pada tahun 2014, terdapat 2 destinasi wisata yang dikembangkan yaitu Istana Siak Sri Indrapura dan Bono. Namun pengembangan destinasi wisata ini tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, jumlah destinasi wisata yang dikembangkan di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebanyak 1 destinasi. Pada tahun 2014, realisasi jumlah destinasi wisata yang sedang dikembangkan di Provinsi Riau tahun 2014 sebanyak 2 destinasi. Realisasi kinerja indikator jumlah destinasi wisata yang dikembangkan di Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan.

Meski destinasi wisata di Provinsi Riau belum berkembang baik, namun jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif meningkat. Umumnya wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau untuk kegiatan bisnis. Pada tahun 2010, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau sebanyak 36.545 orang melalui tiga pintu masuk utama yaitu Pekanbaru (16.984 orang), Dumai (14.394 orang) dan Bengkalis (5.167 orang). Pada tahun 2012

meningkat menjadi 48.819 jiwa melalui empat pintu masuk (Pekanbaru, Dumai, Bengkalis dan Selat Panjang). Pada tahun 2014, jumlah wisatawan asing diprediksi sama dengan tahun 2013 yaitu sebanyak 38.584 orang melalui 4 pintu masuk. Selama periode ini, rata-rata pertumbuhan wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau meningkat sebesar 1,09% per tahun

Gambar 2.123.
Perkembangan Jumlah Wisatawan Asing Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Riau (Data dan informasi Pembangunan Provinsi Riau tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebanyak 56.709 orang. Pada tahun 2014, realisasi jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau diprediksi sebanyak 38.584 orang. Realisasi kinerja indikator jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 68,04%.

6) Bidang Urusan Industri

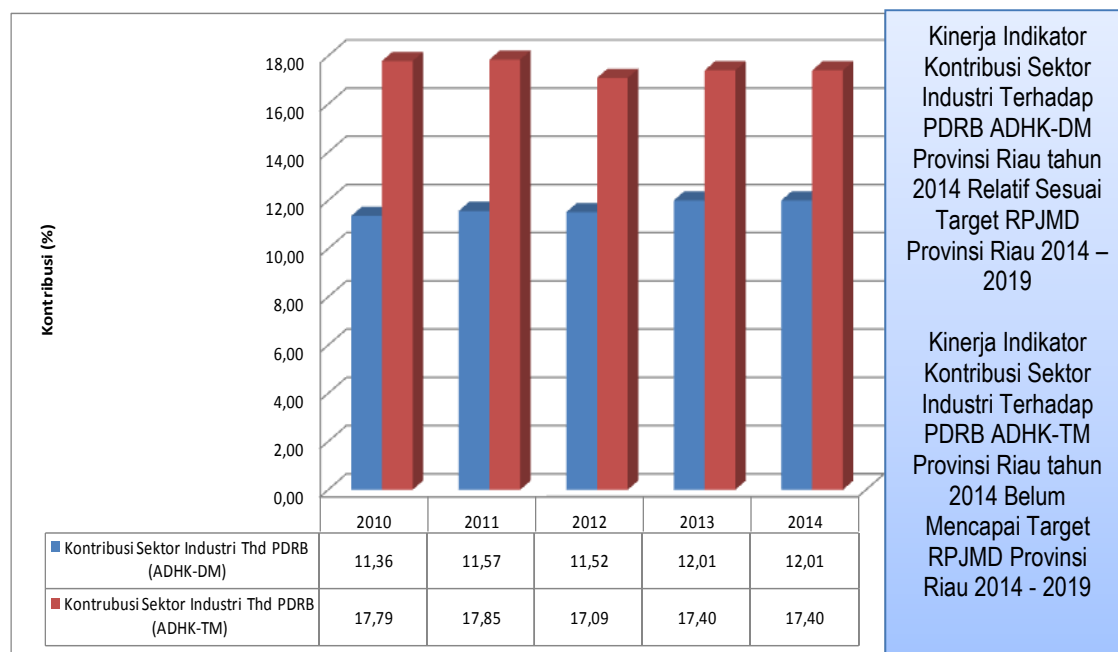
Pengembangan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah terhadap bahan baku yang tersedia secara lokal seperti minyak mentah, CPO, kelapa dan karet penting menjadi isu strategis dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019. Pengembangan industri pengolahan ini akan memberikan multiplier efek yang positif

terhadap sektor-sektor lainnya sehingga pertumbuhan PDRB dan penyerapan tenaga kerja akan meningkat signifikan dan berkelanjutan.

Pada tahun 2010 - 2014, jumlah perusahaan besar dan sedang yang bergerak dalam industri pengolahan meningkat secara berfluktuatif. Pada tahun 2010, jumlah perusahaan sebanyak 183 perusahaan dan meningkat menjadi 205 pada tahun 2011. Pada tahun 2011 ini, industri makanan merupakan yang terbanyak yaitu 152 perusahaan dengan serapan tenaga kerja sebanyak 49.665 orang diikuti industri karet, barang dari karet dan plastik (15 perusahaan). Pada tahun 2012, jumlah industri di Provinsi Riau menurun menjadi 202 perusahaan. Pada tahun 2014, diprediksi jumlah industri sama dengan tahun 2012 yaitu sebanyak 202 perusahaan.

Sejalan dengan perkembangan jumlah industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB atas dasar harga konstan (DM – TM) meningkat secara berfluktuatif. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-DM tahun 2010 sebesar 11,36%, meningkat menjadi 11,52% pada tahun 2012. Pada tahun 2013, kontribusi sektor industri meningkat menjadi 12,01% dan pada tahun 2014 diprediksi kontribusinya sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 12,01%.

Gambar 2.124.
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri (ADHK DM dan TM)
Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-DM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 12,39%. Pada tahun 2014, realisasi kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-DM Provinsi Riau sebesar 12,01%. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-DM Provinsi Riau relatif sesuai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 96,93%.

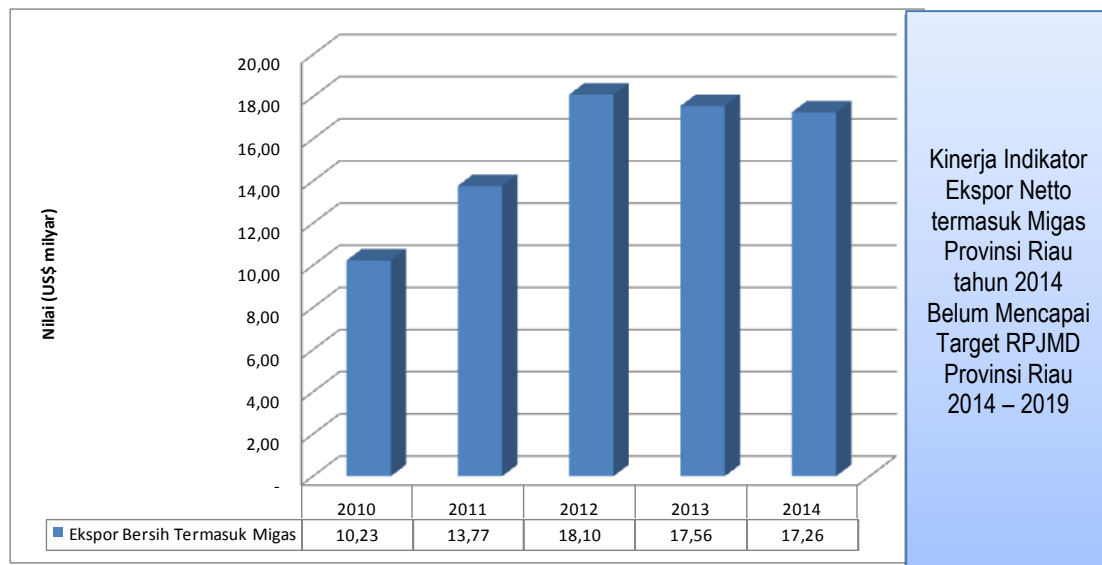
Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-TM Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 19,28%. Pada tahun 2014, realisasi kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-TM Provinsi Riau sebesar 17,40%. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB ADHK-DM Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 89,46%.

7) Bidang Urusan Perdagangan

Letak Provinsi Riau yang strategis dan didukung dengan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan menjadikan posisi ekspor netto berada dalam posisi surplus. Pada tahun 2010, jumlah ekspor senilai US\$ 14,89 milyar dengan nilai impor sebesar US\$ 1,12 milyar sehingga ekspor netto sebesar US\$ 13,77 milyar. Pada tahun 2012, ekspor netto meningkat menjadi US\$ 18,10 milyar yang terdiri dari ekspor migas yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak mentah dan non migas yang sebagian besar dari industri kelapa sawit, kelapa dan karet. Ekspor netto hasil pertanian dan hasil tambang relatif defisit. Pada tahun 2013, nilai ekspor netto sebesar US\$ 17,56 milyar dan pada tahun 2014 menurun menjadi US\$ 17,26 milyar.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, ekspor netto termasuk migas Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar US\$ 19,85 milyar. Pada tahun 2014, realisasi ekspor netto termasuk migas Provinsi Riau sebesar US\$ 17,26 milyar. Realisasi kinerja indikator ekspor netto termasuk migas Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 86,97%.

Gambar 2.125.
Perkembangan Ekspor Netto Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Seiring dengan peningkatan nilai ekspor dan ekspor netto, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki tren meningkat yaitu dari 8,91% pada tahun 2010 menjadi 10,48% pada tahun 2012. Pada tahun 2014, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB diprediksi sama dengan tahun 2013 yaitu sebesar 10,78%. Kontribusi sektor perdagangan dari komoditas migas dan non migas akan meningkat tajam apabila ekspor bukan merupakan produk mentah atau setengah jadi seperti minyak mentah, CPO, Kelapa bulat, CCO dan SIR. Bila produk ekspor yang selama ini berupa produk mentah atau setengah jadi terlebih dahulu diolah seperti minyak mentah menjadi bensin dan minyak tanah, CPO menjadi biodiesel, kelapa menjadi DC (*desicated coconut*), SIR menjadi ban. Agar kontribusi sektor perdagangan ini meningkat maka pengembangan industri pengolahan migas, industri hilir kelapa sawit, kelapa dan karet perlu menjadi isu strategis pembangunan kedepan.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 11,70%. Pada tahun 2014, realisasi kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau sebesar 10,78%. Realisasi kinerja indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 92,14%.

8) Bidang Urusan Ketransmigrasian

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi penerima transmigran terbesar di Indonesia. Namun mulai tahun 2000-an, jumlah penempatan transmigran di Provinsi Riau menurun drastis. Selama periode 2009 – 2013, antara target dan realisasi penempatan transmigran mencapai 100%.

Tabel 2.44.
Target dan Realisasi Penempatan Transmigran
Tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

Tahun	Target (KK)	Realisasi		% Target thd Realisasi
		Kepala keluarga	Jiwa	
2009	30	30	131	100
2010	18	18	73	100
2011	70	70	262	100
2012	16	16	69	100
2013	30	30	115	100

Sumber: BPS dan Bappeda Provinsi Riau (Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2014)

Daerah asal transmigran dari luar Provinsi Riau hanya dari Jawa Timur yaitu pada tahun 2009 dan 2011. Transmigrasi APPDT merupakan transmigran dominan selama periode 2009 – 2013.

Tabel 2.45.
Realisasi Penempatan Transmigran Menurut Daerah Asal
Tahun 2009 – 2013
Provinsi Riau

No	Daerah Asal	2009		2010		2011		2012		2013	
		KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
1	Jawa Timur	5	9			15	52				
2	Jawa Tengah										
3	Jawa Barat										
4	DI Yogyakarta										
5	DKI Jakarta										
6	Pengungsi Aceh										

7	APPDT	25	112	18	73	55	210	16	69	30	115
8	Banten										

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2013)

2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek kemampuan ekonomi daerah dianalisis menggunakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

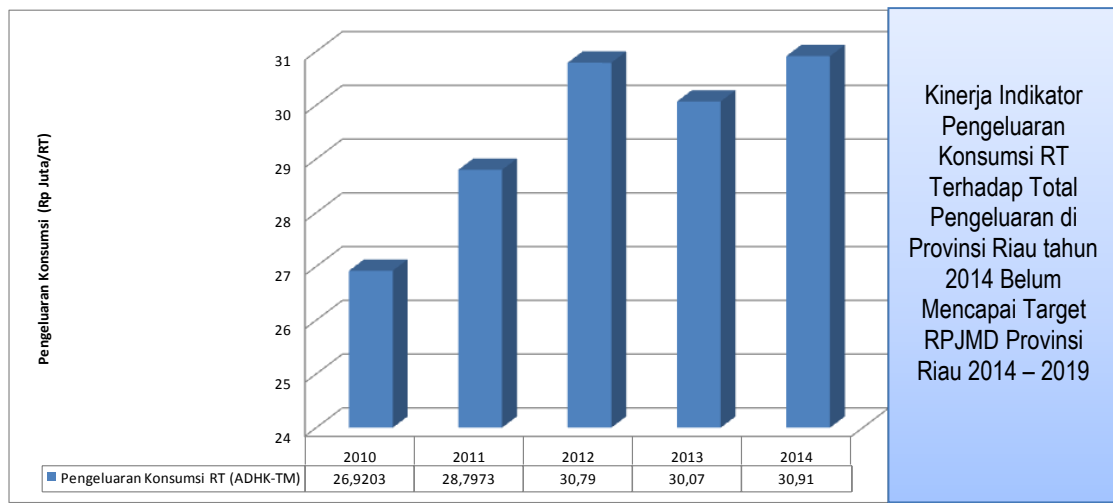
1) Pengeluaran Konsumsi Per Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Riau terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2010 hingga 2014, pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan tanpa migas (ADHK-TM) berfluktuatif meningkat. Pada tahun 2010, rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHK-TM sebesar Rp 26,92 juta/RT/tahun meningkat menjadi Rp 30,79 juta/RT/tahun pada tahun 2012. Pada tahun 2014 (kuartal III), rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga ADHK-TM sebesar Rp 30,91 juta/RT/tahun. Selama periode 2010 – 2014, rata-rata laju pertumbuhan pengeluaran RT sebesar 2,80 % per tahun.

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total pengeluaran per tahun ADHK-TM di Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar Rp 37.01 juta. Pada tahun 2014, realisasi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total pengeluaran per tahun Provinsi Riau sebesar Rp 30,91 juta. Realisasi kinerja pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total pengeluaran per tahun di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 83,52%.

Gambar 2.126.

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Total Pengeluaran Per tahun pada Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

2) Nilai Tukar Petani

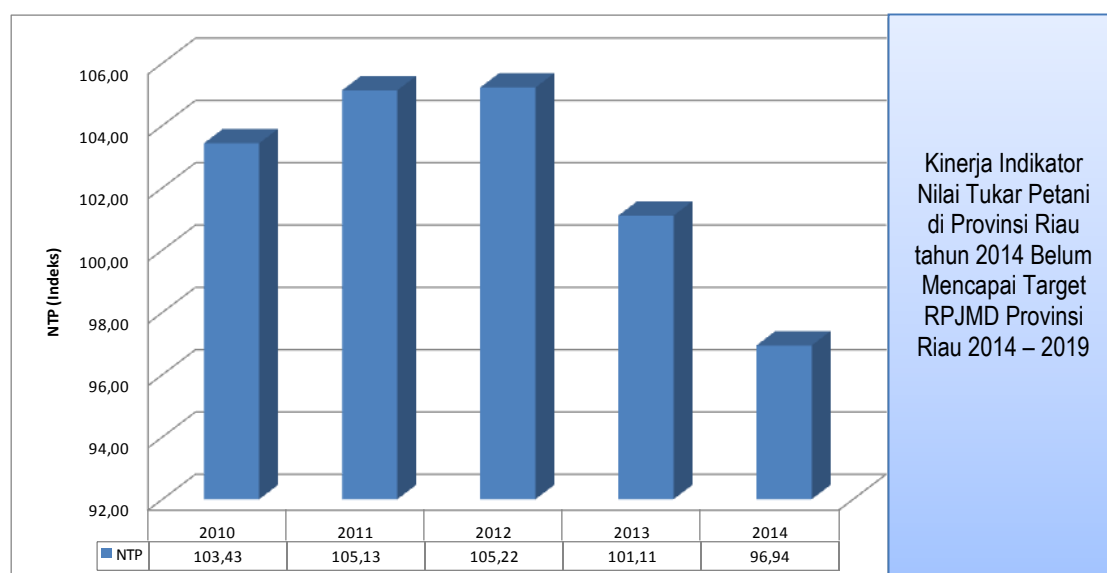
Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi, juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk, khususnya petani. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani dan keadaan perekonomian pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTP diperoleh dari persentase rasio indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). $NTP > 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar, yaitu tahun 1993. $NTP = 100$ berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun

dasar. Sedangkan $NTP < 100$ menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Selama periode 2010 – 2014, nilai tukar petani (NTP) di Provinsi Riau memiliki tren berfluktuatif menurun. Pada tahun 2010, NTP Provinsi Riau sebesar 103,43 yang menunjukkan bahwa kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibanding keadaan tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, NTP Provinsi Riau meningkat menjadi 115,13 yang menunjukkan bahwa kesejahteraan petani Provinsi Riau lebih baik dibanding tahun 2012. Pada tahun 2014, NTP Provinsi Riau menurun menjadi 96,94 yang berarti kesejahteraan petani Provinsi Riau menurun dibanding kesejahteraan tahun 2012.

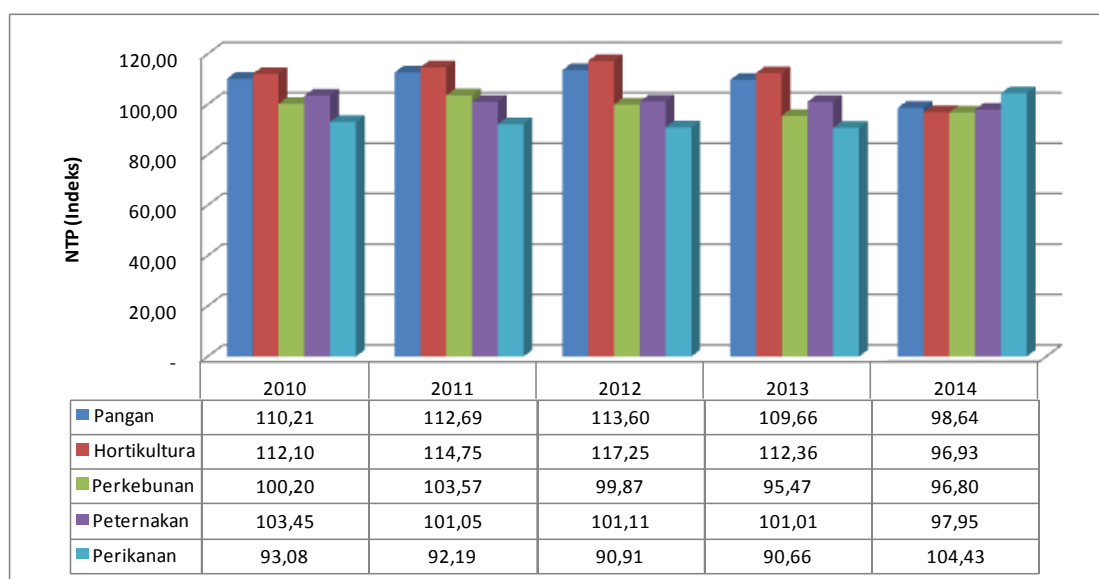
Gambar 2.127.
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2010 - 2014
Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

Dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019, NTP Provinsi Riau tahun 2014 ditarget sebesar 105,88. Pada tahun 2014, realisasi NTP Provinsi Riau sebesar 96,94. Realisasi kinerja NTP di Provinsi Riau belum mencapai target yang ditetapkan dengan kinerja sebesar 91,96%.

Gambar 2.128.
Perkembangan Nilai Tukar Petani Menurut Sub-Sektor
Tahun 2010 - 2014 Provinsi Riau



Sumber: Bappeda Provinsi Riau (Data Annual Provinsi Riau Tahun 2014)

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu sektor pembangunan yang paling dibutuhkan di Provinsi Riau karena ada banyak ketergantungan pengembangan ekonomi, sosial dan pendidikan dengan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Menurut studi yang dilakukan oleh Danareksa, setiap pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 100 kilometer akan memberikan tambahan 0,20% terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, dan menciptakan 69.000 lapangan kerja baru (Purbayu dan Edwin S, 2004 dalam Sudaryadi).

1) Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam struktur ruang wilayah diarahkan pengembangan sistem pusat-pusat permukiman perkotaan (*urban system*), fungsi utama pelayanan perkotaan, hubungan antar pusat permukiman perkotaan, orientasi pergerakan barang dan penumpang, serta kebijakan pokok pengembangan permukiman perkotaan di wilayah Riau sampai akhir kurun RTRWP tahun 2026.

Untuk mendukung aksesibilitas global wilayah Riau ke jaringan perkotaan poros perekonomian dunia dalam rangka menyongsong era pasar bebas, meningkatkan

pola kegiatan dan keterkaitan ekonomi wilayah provinsi serta mengoptimalkan fungsi-fungsi pelayanan internal dan eksternal/regional, diarahkan pengembangan 3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu : Pekanbaru, Dumai dan Kuala Enok serta 5 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu : Ujung Tanjung, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Bengkalis – Buruk Bakul dan Rengat – Pematang Reba. Setiap pusat permukiman perkotaan tersebut ditunjang dengan fasilitas pelabuhan laut dan/atau bandar udara sebagai simpul koleksi-distribusi sesuai jenjang fungsi yang direncanakan.

Pekanbaru dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (dalam RTRWN Pekanbaru ditetapkan sebagai PKW). Sebagai ibukota Provinsi dan Kota, Pekanbaru menunjukkan perkembangan yang pesat dan fisik perkotaannya telah melampaui batas-batas administratif Kota, terutama pada arah Barat dan Selatan. Untuk menunjang aksesibilitas global PKN Pekanbaru, dilakukan dengan mengembangkan pelabuhan Pekanbaru dan pelabuhan Tanjung Buton. Pelabuhan Pekanbaru yang kapasitasnya sudah terbatas dan dengan adanya permasalahan pada alur pelayaran Sungai Siak maka di masa depan kegiatan pelabuhan tersebut perlu dialihkan ke Tanjung Buton di pantai Timur Kabupaten Siak.

Sampai dengan akhir kurun RTRWP 2026, Pelabuhan Tanjung Buton direncanakan jenjang fungsinya sebagai Pelabuhan Nasional (PN), dan selanjutnya s/d 2020 ditingkatkan jenjang fungsinya menjadi Pelabuhan Internasional (PI). Sesuai jenjang fungsinya di masa depan sebagai PN maupun PI, Pelabuhan Tanjung Buton terbuka untuk pelayaran internasional, sedangkan Pelabuhan Pekanbaru nantinya hanya dioperasikan untuk pelayaran domestik bagi angkutan barang kebutuhan sehari-hari perkotaan Pekanbaru menggunakan kapal ukuran sedang/kecil yang masih memungkinkan melayari alur Sungai Siak. Dengan fungsinya yang berubah di masa depan maka Pelabuhan Pekanbaru nantinya akan memiliki jenjang fungsi sebagai Pelabuhan Regional (PR). Sebelum Pelabuhan Mengkapan Buton dapat dioperasikan, Pelabuhan Pekanbaru akan tetap berfungsi sebagai Pelabuhan Nasional (PN) dan terbuka untuk pelayaran internasional. Pelabuhan Sungai Duku tetap sebagai pelabuhan penumpang konvensional/penyeberangan dan ditingkatkan fungsinya sebagai pelabuhan penumpang konvensional /penyeberangan internasional.

Menyangkut transportasi udara, untuk menunjang Pekanbaru sebagai PKN diarahkan 1 bandara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II, yang terbuka untuk penerbangan internasional dan sekaligus berfungsi khusus sebagai Bandara Militer. Kedepan, sebagai langkahantisipasi lonjakan kegiatan penerbangan dari ataupun ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, perlu dilakukan studi kelayakan bandara reguler yang terpisah dengan kegiatan bandara militer, yang dewasa ini kedua fungsi tersebut masih diemban oleh Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Kota Dumai seperti Pekanbaru merupakan pusat kegiatan wilayah yang sudah berkembang dan memiliki potensi perkembangan yang pesat di masa depan. Dalam RTRWN, Dumai diarahkan jenjang fungsinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), namun mengingat perkembangan perkotaan Dumai, lokasi geografis dan perannya yang strategis dalam konteks hubungan eksternal terutama setelah lepasnya Batam yang memiliki fungsi sebagai PKN (menjadi bagian Provinsi Kepulauan Riau) maka jenjang fungsinya perlu ditingkatkan menjadi PKN. Untuk menunjang aksesibilitas global PKN Dumai, diarahkan 1 pelabuhan laut jenjang fungsi Pelabuhan Hub Internasional (PHI) yaitu Pelabuhan Dumai (Yos Sudarso) dan 1 bandara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Sekunder (PPS) yaitu: Bandara Pinang Kampai, yang masing-masing terbuka untuk pelayanan internasional. Untuk mengantisipasi keterbatasan pengembangan Pelabuhan Dumai di masa depan, diarahkan pengembangan pelabuhan ke Lubuk Gaung sejalan dengan rencana pengembangan kawasan agroindustri di lokasi tersebut. Untuk Bandara Pinang Kampai yang saat ini merupakan bandara khusus milik Pertamina, di masa depan juga diarahkan untuk melayani umum.

Dipromosikannya Kuala Enok sebagai PKN dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kuala Enok akan menjadi pusat pertumbuhan Riau Bagian Selatan. Keberadaan Kuala Enok sebagai PKN telah ditunjang dengan berbagai sarana penunjang yang memadai berupa pelabuhan internasional dan aksesibilitas berupa jalan yang mampu menghubungkan antara sentra-sentra produksi ke outlet di Kuala Enok. Di samping itu dengan dipromosikannya Kuala Enok sebagai PKN diharapkan mampu menyeimbangkan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Kedepan, pengembangan kota Dumai dan Pekanbaru diarahkan ke dalam satu koridor/poros perkembangan yang ditumpu oleh pengembangan jaringan jalan tol yang menghubungkan kedua kota tersebut.

PKN Kuala Enok merupakan Pusat Kegiatan Nasional yang relatif belum berkembang, untuk pengembangannya perlu didorong melalui pembangunan pelabuhan utama, kawasan agroindustri dan jalan akses dari Jalan Lintas Timur Sumatera ke pelabuhan. Dalam RTRWN, Kuala Enok diarahkan jenjang fungsinya sebagai PKL, namun mengingat pentingnya peran Kuala Enok sebagai simpul koleksi-distribusi internasional bagi wilayah Riau bagian Selatan di era global nanti maka jenjang fungsinya perlu ditingkatkan menjadi PKN.

Untuk menunjang aksesibilitas global PKN Kuala Enok diarahkan pengembangan 1 pelabuhan laut dengan jenjang fungsi Pelabuhan Nasional dan 1 bandara baru di Tempuling dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Tersier (PPT), yang masing-masing terbuka untuk pelayanan internasional. Untuk PKN Kuala Enok ini jenjang fungsi pelabuhan laut sebagai pelabuhan nasional dapat ditingkatkan menjadi pelabuhan internasional dengan mempertimbangkan kegiatan perekonomian di hinterland-nya dan aspek teknis lain seperti gelombang, kedalaman kolam pelabuhan, dan sebagainya. Demikian pula dengan bandaranya, setingkat lebih rendah karena diperlukan bandara baru yang pembangunan dan operasionalisasinya tergantung pada perkembangan perekonomian dan perkotaan Kuala Enok.

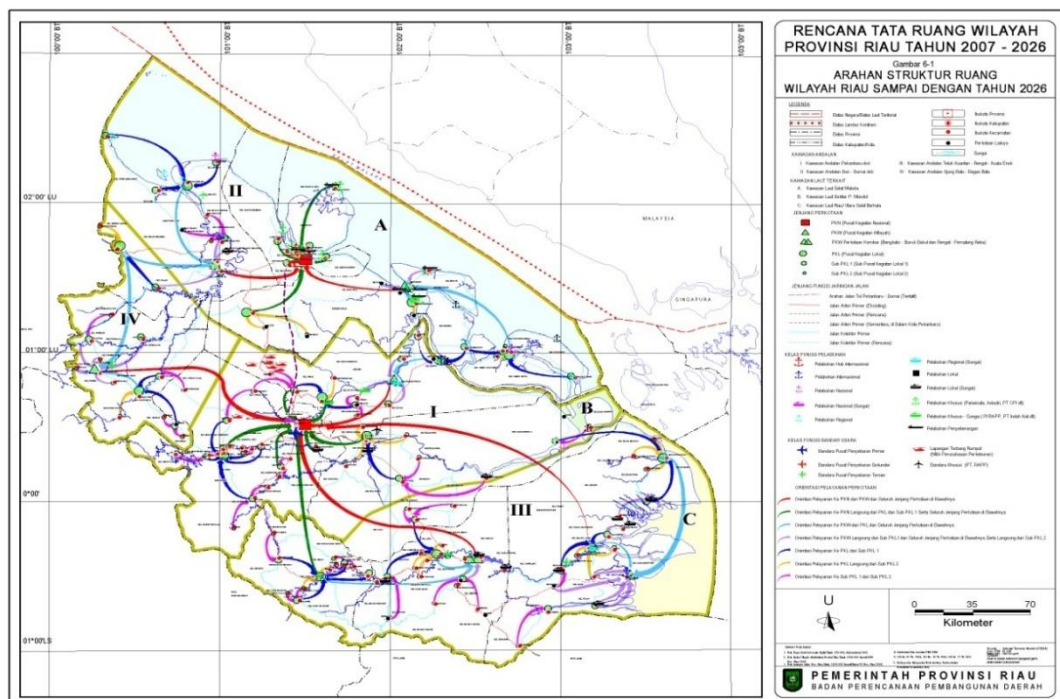
Sembilan perkotaan yaitu Perkotaan Bangkinang, Taluk Kuantan, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Bengkalis, Pangkalan Kerinci, Bagan Siapi – Api, Tembilahan, Rengat, dan Siak Sri Indrapura difungsikan pada jenjang PKW untuk mendukung PKN Pekanbaru dan Dumai dalam lingkup pelayanan wilayah.

Perkotaan dengan jenjang fungsi PKL (Pusat Kegiatan Lokal), s/d th. 2026 sebanyak 8 perkotaan yang diarahkan untuk jenjang fungsi sebagai PKL yaitu Duri, Sei Pakning, Bagan Batu, Perawang, Selat Panjang, Air Molek, Sungai Guntung dan Tanjung Buton. Perkotaan Bagansiapi-api dan Bagan Batu di Kabupaten Rokan Hilir, perkotaan Duri, Sei Pakning dan Selat Panjang yang terletak di Kabupaten Bengkalis, perkotaan Perawang di Kabupaten Siak Sri Indrapura, perkotaan Air Molek di Kabupaten Indragiri Hulu dan Perkotaan Sungai Guntung di Kabupaten Indragiri Hilir

telah menunjukkan perkembangan fisik dan sosial-ekonomi yang cukup pesat sehingga layak dijadikan sebagai pusat pelayanan bagi wilayah sekitarnya.

Adapun Tanjung Buton di Kabupaten Siak diarahkan sebagai PKL baru, karena adanya potensi yang besar sehubungan dengan diarahkannya pelabuhan Tanjung Buton sebagai Pelabuhan Nasional (PN) s/d tahun 2015 dan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Internasional (PI) pada tahun 2020 menggantikan Pelabuhan Pekanbaru. Tanjung Buton saat ini merupakan permukiman desa, arahan pengembangannya sebagai PKL baru merupakan tahapan untuk perencanaan jangka menengah dan panjang.

Gambar 2.129
Arahan Struktur Ruang Wilayah Riau 2007 - 2026



Untuk menunjang aksesibilitas regional maupun global PKL-PKL tersebut, secara umum bagi PKL-PKL yang memiliki pantai dan memungkinkan dikembangkan pelabuhan akan ditunjang oleh fasilitas pelabuhan laut pada jenjang fungsi Pelabuhan Nasional (PN). Pelabuhan laut ini selain untuk pelayanan domestik, juga terbuka bagi pelayanan internasional jarak dekat s/d menengah seperti ke Singapura, Malaysia dan negara-negara ASEAN yang lainnya, serta ke negara-negara Asia Timur dan Asia Selatan yang relatif masih dekat. Dari segi transportasi udara juga ditunjang oleh fasilitas bandar udara dengan jenjang fungsi Pusat Penyebaran Tersier (PPT), yang

terutama untuk pelayanan domestik. Namun, untuk beberapa bandara yang lokasinya dekat ke negara tetangga yang berbatasan (terutama Singapura dan Malaysia) maka juga dimungkinkan terbuka bagi penerbangan internasional yang bersifat lintas batas.

Dalam pengembangan wilayah, pusat-pusat permukiman perkotaan secara umum akan berfungsi sebagai simpul koleksi-distribusi dan sebagai pusat pelayanan berbagai fasilitas sosial-ekonomi bagi wilayah *hinterland*nya. Sebagai simpul koleksi-distribusi, pada satu sisi akan berperan sebagai lokasi/tempat pemasaran bagi berbagai produk perekonomian yang dihasilkan wilayah *hinterland* (fungsi koleksi), sedangkan pada sisi sebaliknya merupakan tempat masuk dan didistribusikannya

Tabel 2.46.

POLA PENGEMBANGAN KAWASAN ANDALAN MENURUT RTRW DI PROVINSI

No	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	PERKOTAAN DALAM KAWASAN ANDALAN (YANG DIARAHKAN DALAM RTRWN)	FUNGSI PERKOTAAN SECARA NASIONAL	DAS YANG MELAYANI	ARAHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR
1.	KAWASAN PEKANBARU DAN SEKITARNYA	<ul style="list-style-type: none"> TANAMAN PANGAN INDUSTRI PERTAMBANGAN PERKEBUNAN 	<ul style="list-style-type: none"> PEKANBARU BANGKINANG SIAK SRI INDRAPURA 	PKN PKW PKW	S. SIAK	<ul style="list-style-type: none"> AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK DAN INDUSTRI REKLAMASI RAWA UNTUK BUDIDAYA PERTANIAN TRANSPORTASI AIR
2.	KAWASAN DURI - DUMAI DAN SEKITARNYA	<ul style="list-style-type: none"> INDUSTRI PERIKANAN PERKEBUNAN 	<ul style="list-style-type: none"> DUMAI BAGAN SIAPI-API BENGKALIS 	PKN PKW PKW	S. ROKAN	<ul style="list-style-type: none"> AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK DAN INDUSTRI REKLAMASI RAWA UNTUK BUDIDAYA PERTANIAN TRANSPORTASI AIR
3.	KAWASAN RENGAT-KUALA ENOK – TALUK KUANTAN – PANGKALAN KERINCI DAN SEKITARNYA	<ul style="list-style-type: none"> PERKEBUNAN PERTANIAN INDUSTRI KEHUTANAN 	<ul style="list-style-type: none"> RENGAT TEMBILAHAN PANGKALAN KERINCI TALUK KUANTAN 	PKW PKW PKW PKW	S. INDRAGIRI	<ul style="list-style-type: none"> AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK DAN INDUSTRI REKLAMASI RAWA UNTUK BUDIDAYA PERTANIAN TRANSPORTASI AIR
4.	KAWASAN UJUNG BATU – BAGAN BATU DAN SEKITARNYA	<ul style="list-style-type: none"> INDUSTRI MIGAS PERKEBUNAN 	<ul style="list-style-type: none"> PASIR PANGARAYAN 	PKW	S. KAMPAR	<ul style="list-style-type: none"> AIR BERSIH UNTUK KEBUTUHAN DOMESTIK DAN INDUSTRI REKLAMASI RAWA UNTUK BUDIDAYA PERTANIAN TRANSPORTASI AIR
5.	KAWASAN ANDALAN LAUT SELAT MALAKA DAN SEKITARNYA	<ul style="list-style-type: none"> PERIKANAN PERTAMBANGAN 	<ul style="list-style-type: none"> DUMAI 	PKN	-	-

SUMBER : PP NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG RTRWN

KETERANGAN : PKN: PUSAT KEGIATAN NASIONAL DAN PKW : PUSAT KEGIATAN WILAYAH

berbagai produk kawasan perkotaan yang umumnya berupa produk industri ke wilayah *hinterland* (fungsi distribusi).

2) Sarana dan Prasarana Umum

Sistem sarana dan prasarana merupakan pendukung utama berfungsinya sistem sosial, ekonomi, dan penataan ruang. Sarana dan Prasarana wilayah utama yang mendukung pembangunan meliputi bidang Jalan, transportasi, kelistrikan dan energi, telekomunikasi dan air bersih.

a) Pembangunan Infrastruktur Jalan

Menurut Jalan UU RI No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dimana Jalan menurut status dan wewenang penyelenggaranya dibagi atas 5 (lima), yaitu:

Tabel 2.47.
Status dan Wewenang Penyelenggara Jalan

Status Jalan	Penyelenggara Jalan	Pelaksana Penyelenggaraan Jalan
Jalan Nasional	Pemerintah	Menteri Pekerjaan Umum
Jalan Provinsi	Pemerintah Provinsi	Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
Jalan Kabupaten	Pemerintah Kabupaten	Bupati atau pejabat yang ditunjuk
Jalan Kota	Pemerintah Kab./Kota	Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk
Jalan Desa	Pemerintah Kabupaten	Bupati atau pejabat yang ditunjuk

Sumber : UU RI No. 38 Tahun 2004.

Berdasarkan status jalan dan penyelenggara jalan Provinsi Riau secara garis besar dibiayai dari APBD Kota untuk jalan kota, APBD Provinsi untuk jalan Provinsi, dan APBN untuk jalan nasional. Pada Tabel 2.90 Terjadi kenaikan total panjang ruas jalan Provinsi dari 4.159 km menjadi 4.167 km (8 km) dalam periode 2007-2012. Kontribusi penambahan panjang jalan adalah berasal dari jalan Nasional.

Tabel 2.48.
Panjang Jalan menurut Tingkat Pemerintahan

Tahun	Jalan Negara (km)	Jalan Provinsi (km)	Total Panjang (km)
2007	1,126.12	3,033.32	4,159.44
2008	1,126.12	3,033.32	4,159.44
2009	1,133.11	3,033.18	4,166.29
2010	1,134.46	3,033.32	4,167.78
2011	1,134.46	3,033.32	4,167.78
2012	1,134.46	3,033.32	4,167.78

Sumber : BPS (Riau Dalam Angka, 2013)

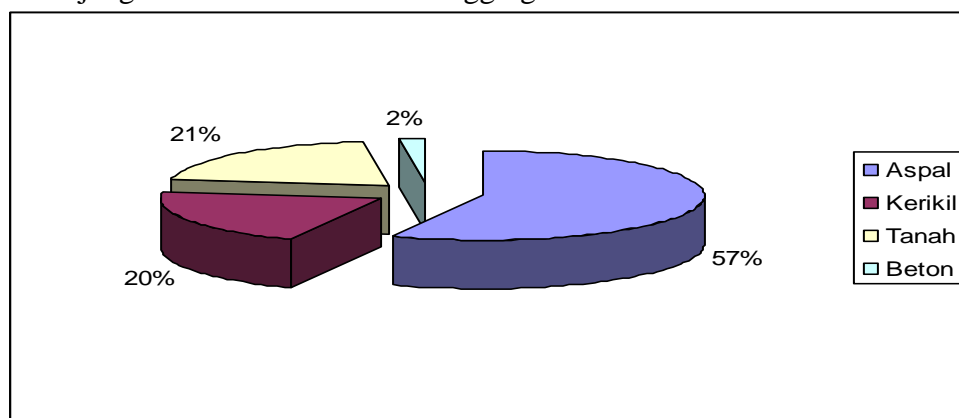
Dalam periode 2007-2012, peningkatan panjang ruas jalan Negara dan Provinsi di Provinsi Riau masih terbatas dan tidak lebih dari 0,2 persen. Peningkatan panjang ruas jalan nasional dan Provinsi dilakukan secara bertahap (2-4 tahun sekali). Hal ini menunjukkan investasi secara bertahap dalam meningkatkan aksibilitas jalan di Provinsi Riau telah dilakukan, namun perkembangannya masih relatif lambat.

Besarnya tingkat kerusakan infrastruktur jalan di Provinsi Riau bukan merupakan hal yang luar biasa mengingat tiga sektor pendukung perekonomian Riau adalah industri pengolahan seperti industri pengolahan, kayu, pertambangan dan pertanian yang didominasi perkebunan kelapa sawit dan karet. Ketiga sektor perekonomian ini memberikan beban yang sangat besar pada infrastruktur jalan di Provinsi Riau akibat mobilisasi kendaraan angkutan peralatan, bahan baku dan hasil olahan yang bertonase tinggi. Di samping itu, kerusakan infrastruktur jalan juga disebabkan sebagian besar kondisi tanah dasar (*subgrade*) di Provinsi Riau merupakan tanah lunak dan tanah gambut dengan daya dukung yang relatif rendah.

Keterbatasan anggaran biaya dan pemanfaatan teknologi stabilisasi/perkuatan tanah lunak pada pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Riau merupakan beberapa faktor yang menyebabkan daya dukung infrastruktur jalan yang dibangun tidak sesuai dengan beban tonase lalu lintas kendaraan yang ada. Menurut studi yang dilakukan Bappeda, 2011, diperkirakan diperlukan Rp. 6 triliun untuk pemeliharaan jalan Provinsi di Provinsi Riau. Sampai tahun 2013 ini alokasi anggaran untuk perbaikan dan pengembangan jalan di Provinsi Riau adalah kurang dari Rp. 1 triliun per tahunnya.

Gambar 2.130.

Panjang Jalan menurut Kondisi Aggregate Tahun 2012 di Provinsi Riau



Kerusakan infrastruktur jalan ini baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi daya saing perekonomian dan minat investasi di Provinsi Riau. Sedangkan panjang jalan menurut kondisi *Aggregate* dapat dilihat dalam Gambar 2.34. Kondisi jalan dengan aggregate beraspal adalah merupakan porsi terbesar dari total panjang jalan di Provinsi Riau (57%), jalan beton (*rigid*) adalah 2%, dan sisanya 41% berupa jalan tanah, jalan dengan pondasi aggregate kelas A dan B.

b) Pembangunan Infrastruktur Jembatan

Provinsi Riau yang terdiri dari banyak sungai dan anak sungai Pembangunan infrastruktur jembatan merupakan hal penting untuk memperlancar transportasi darat. Pada Tabel 2.91 menunjukkan panjang dan jenis konstruksi jembatan di Provinsi Riau mengalami peningkatan sebesar 5.069 meter dari tahun 2007 sebesar 21.423,40 meter menjadi 26.492,00 tahun 2011.

Perkembangan Proporsi Jembatan dengan jenis Kontruksi Komposit Provinsi Riau tahun 2007 – 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sepanjang 2.558,60 meter tahun 2007 menjadi 9.894,30 meter tahun 2011 atau sepanjang 7.335,7 meter. Jenis jembatan konstruksi kayu, beton mengalami perubahan penurunan yang relatif kecil. Melihat hal dari kondisi dan geografi daerah di Provinsi Riau perlu upaya terus untuk peningkatan konstruksi jembatan dari konstruksi kayu ke konstruksi komposit.

Tabel 2.49.
Panjang Jembatan, Jenis Kontruksi Jembatan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	Beton	Komposit <i>Composite</i>	Kayu	Rangka Baja	Jumlah
Kuantan Sengingi	232,60	766,00	302,80	1.020,00	2.321,40
Indragiri Hulu	173,30	1.197,00	531,50	1.010,00	2.911,80
Indragiri Hilir	493,50	3.245,30	-	2.972,00	6.710,80
Pelalawan	-	89,00	-	-	89,00
Siak	3.008,00	207,00	-	1.650,00	4.865,00
Kampar	529,50	1.132,70	-	2.681,10	4.343,30
Rokan Hulu	401,20	1.550,70	185,70	920,60	3.058,20
Bengkalis	-	233,20	-	-	233,20
Rokan Hilir	173,40	641,90	-	1.070,00	1.885,30
Meranti	-	-	-	-	-
Pekanbaru	6,00	350,00	-	770,00	1.126,00
Kota Dumai	116,50	481,50	-	-	598,00

Jumlah	2012	5,134.00	9,894.30	1,020.00	12,093.70	28,142.00
	2011	5,134.00	9,894.30	1,020.00	10,443.70	26,492.00
	2010	5,134.00	9,894.30	1,020.00	9,923.70	25,972.00
	2009	3,634.00	9,894.90	1,020.00	9,923.70	24,472.60
	2008	7,220.20	2,558.60	1,720.90	9,923.70	21,423.40
	2007	7,220.20	2,558.60	1,720.90	9,923.70	21,423.40

Sumber: Riau Dalam Angka 2013.

Pada Tabel 2.49 menunjukkan bahwa panjang jembatan menurut jenis konstruksi di Kabupaten/Kota nampak bahwa kabupaten Indragiri Hilir memiliki panjang jembatan terluas di provinsi Riau, hal ini disebabkan di Kabupaten Indragiri Hilir banyak terdapat sungai dan parit/kanal yang dikenal dengan daerah seribu parit, sedangkan panjang jembatan terkecil adalah Kabupaten Pelalawan. Data jembatan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum ada, karena merupakan daerah yang baru terbentuk/pemekaran dari kabupaten Bengkalis. Melihat dari perkembangan panjang dan jenis konstruksi jembatan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau ke depan perlu upaya peningkatan dan pemeliharaan jenis konstruksi jembatan yang ada serta pembukaan aksesibilitas ke daerah-daerah yang masih terisolir.

c) Bidang Transportasi

Sesuai dengan kondisi geografis dan letak strategis Provinsi Riau yang merupakan pintu gerbang pintu masuk dari Timur Sumatera, maka keterpaduan antar modal transportasi di Provinsi Riau merupakan syarat pembentukan struktur ruang dan pemerataan perkembangan wilayah. Posisi strategis tersebut memperkuat kepentingan integrasi modal transportasi yang melayani jarak jauh, kapasitas massal, angkutan berat, kecepatan tinggi, dan ongkos angkutan yang rendah. Keterpaduan antar moda transportasi membutuhkan dukungan sejumlah terminal.

Transportasi Darat

Permasalahan transportasi darat yang utama adalah kualitas jalan yang masih buruk, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sebagian jaringan jalan yang rusak adalah jalan Kabupaten/Kota, sehingga menjadi kendala bagi kegiatan koleksi-distribusi barang dan jasa serta pergerakan manusia antara pusat-pusat utama dengan pusat lokal, sentra produksi dan pusat pemasaran.

Permasalahan transportasi lainnya adalah terbatasnya jembatan yang melintasi beberapa sungai disebabkan oleh tingginya frekuensi pelayaran dan kondisi tanah gambut yang menyebabkan biaya konstruksi jembatan menjadi tinggi, di samping keberadaan jembatan yang telah melampaui umur teknis yang membutuhkan perbaikan. Dukungan sarana dan pelayanan terminal sebagai pemandu moda transportasi pada pusat-pusat kegiatan belum memadai, termasuk kebutuhan terminal untuk angkutan barang, khususnya untuk jarak jauh.

Sesungguhnya posisi geografis Riau merupakan jalur lintasan bagi pergerakan barang, jasa, dan orang. Arah Utara-Selatan antara Sumatera Utara dengan Sumatera bagian Selatan serta arah Timur-Barat antara Malaysia dan Singapura dengan Sumatera Barat. Dalam posisi tersebut, maka diperlukan perkuatan struktur jaringan jalan, keterpaduan moda transportasi, serta kualitas sarana dan pelayanannya yang memadai. Pada tingkat tertentu terdapat kebutuhan jalan *highway* sebagai arteri primer untuk memperkuat struktur jaringan jalan, pusat-pusat pemandu antar moda (*transshipment point*), peningkatan dan pemeliharaan jalan pada seluruh jaringan, dan pembangunan jalan baru yang berfungsi sebagai *feeder road*.

Kebijakan nasional pembangunan transportasi dan penataan ruang pada skala Pulau Sumatera mengindikasikan kebutuhan pembangunan jaringan kereta api Lintas Sumatera (*Trans Sumatera Railway*) untuk pergerakan jarak jauh, berat, dan massal. Dalam perspektif pembangunan Riau sebagai bagian dari pembangunan regional dan nasional, maka jaringan kereta api dikaitkan dengan angkutan produk pertanian, perkebunan dan SDA lainnya.

Transportasi Sungai dan Penyeberangan

Jika pada masa lalu peran sungai sangat menonjol bagi pergerakan barang dan orang, pada saat ini cenderung menurun dengan semakin luasnya sarana jalan dan adanya pendangkalan sungai yang menghambat alur pelayaran. Peran angkutan sungai pada dasarnya diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan DAS dan pedesaan yang belum terlayani jaringan jalan. Dalam rangka memantapkan sistem transportasi terpadu, maka dibutuhkan revitalisasi angkutan sungai melalui pengelolaan DAS untuk memulihkan kondisi alur pelayaran, pembangunan dermaga sungai, dan penyediaan prasarana kapal dan perahu.

Integrasi sistem transportasi juga perlu didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana penyeberangan antar provinsi dan antar negara, oleh karena Provinsi Riau memiliki sejumlah besar pulau-pulau kecil dan berbatasan dengan provinsi lain dan negara tetangga.

Transportasi Laut

Provinsi Riau memiliki 108 pelabuhan umum dan khusus, 11 pelabuhan diantaranya terbuka untuk perdagangan luar negeri, yakni Pelabuhan Dumai, Pekanbaru, Bagan Siapi-api, Rengat, Selat Panjang, Kuala Enok, Sungai Pakning, Tembilahan, Sungai Guntung, Siak Sri Indrapura, dan Buatan.

Sebagaimana kondisi transportasi laut secara umum di Indonesia, pelabuhan belum dapat berperan sepenuhnya sebagai pusat informasi pelayaran dan angkutan barang serta sebagai sarana pelayanan angkutan barang dan penumpang. Pelabuhan laut, sungai yang telah berfungsi untuk ditingkatkan fungsinya antara lain Pelabuhan Dumai dengan pelabuhan pengumpan Panipahan, Sinaboi, Tanjung Medang, Tanjung Lumba-Lumba, dan Bagan Siapi-api; Pelabuhan Kuala Enok dengan pelabuhan pengumpan Perigi Raja, Sungai Guntung, Kuala Gaung, Pulau Kijang, Kuala Mandah, Rengat, Sapat, Tembilahan, dan Pulau Palas; Pelabuhan Mengkapan Buton dengan pelabuhan pengumpan Bengkalis, Bandul, Tanjung Samak, Sei Pakning, Siak Kecil, Perawang, dan Tanjung Kedabu, serta Pelabuhan Pekanbaru (Sungai Duku dan Pelita Pantai).

Upaya pembangunan Pelabuhan Dumai, Kuala Enok, Mengkapan Buton, dan Pekanbaru sebagai pelabuhan internasional diupayakan melalui peningkatan kapasitas angkutan barang, keselamatan pelayaran dan kelengkapan fasilitas kepelabuhanan sesuai persyaratan internasional, dan fasilitas kepabeanan, imigrasi, dan karantina.

Transportasi Udara

Transportasi udara yaitu bandar udara yang terdapat Provinsi Riau ada sebanyak tujuh bandara udara yang sebagian belum beroperasi secara memadai, yaitu Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Japura di Rengat, Penipahan di Pasir Pangaraian, Pinang Kampai di Dumai, Bukit Batu di Sei Pakning, SSH Setia Negara di Pangkalan Kerinci, dan Tempuling di Indragiri Hilir. Bandara Sultan Syarif Kasim II melayani lebih dari 99 persen penerbangan domestik dan internasional. Pelayanan transportasi udara perlu diantisipasi melalui peningkatan kapasitas pelayanan bandar udara,

pembangunan bandar udara baru, peningkatan keselamatan penerbangan, dan integrasi dengan sistem moda transportasi darat, laut, sungai, dan penyeberangan. Untuk itu diperlukan pembangunan bandar udara baru pengganti Bandara Sultan Syarif Kasim II yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Primer; peningkatan fungsi Bandara Pinang Kampai-Dumai sebagai Pusat Penyebaran Tersier yang dapat ditingkatkan melayani penerbangan internasional untuk mendukung peran kota Dumai sebagai PKN; dan perlu dilakukan peningkatan pelayanan Bandara Japura, Penipahan di Pasir Pangaraian, Bukit Batu di Sei Pakning, SSH Setia Negara-Pelalawan, dan Tempuling.

Guna memberikan pelayanan yang semakin luas dalam bidang transportasi udara bagi masyarakat, terutama yang berada di daerah-daerah yang potensial tetapi belum dapat dilayani oleh transportasi udara, maka Pemerintah Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau serta Kabupaten/kota pada kedua provinsi tersebut telah mendirikan dan mengembangkan maskapai penerbangan *Riau Airlines* (RAL). Dengan penambahan Armada RAL beberapa tahun terakhir telah melayani penerbangan masyarakat bukan hanya dalam Provinsi Riau dan Kepulauan Riau saja, tetapi ke Melaka dan Jakarta juga.

d) Kelistrikan dan Energi

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Pada saat ini di Provinsi Riau energi listrik disediakan oleh Sistem Interkoneksi Sumatera Barat–Riau berasal dari PLTA Singkarak, PLTU Ombilin, dan PLTA Kota Panjang dan Sistem Terpisah menggunakan PLTD. Sistem interkoneksi dilengkapi jaringan transmisi 150 KV dari Payakumbuh ke Koto Panjang sepanjang 166 Km dan Gardu Induk di Bangkinang berkapasitas 1 x 10 MW dan Pekanbaru berkapasitas 2 x 50 MW. Sistem terpisah ditujukan untuk melayani kabupaten/kota, kecamatan dan desa-desa yang belum terlayani oleh sistem interkoneksi.

Penyediaan listrik dan sumber-sumber energi lainnya yang diperlukan oleh industri dan domestik perlu diupayakan dengan mempertimbangkan diversifikasi sumber listrik dan energi, skala pelayanan, dan efisiensi pembangkit dan transmisinya. Alternatif yang dapat dikembangkan selain PLTA adalah pembangunan PLTG dan PLTU dengan memanfaatkan aliran Sungai Indragiri, Kampar, Rokan Kiri, dan Rokan Kanan, sumber gas alam, dan batubara. Sedang sumber energi untuk bahan bakar dan

perkotaan selain BBM perlu mempertimbangkan pemanfaatan energi gas dan bahan nabati. Rencana pengembangan Dumai sebagai pusat agro industri dapat mendukung pemenuhan kebutuhan akan bahan bakar pada masa depan.

e) Bidang Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi di Provinsi Riau pada saat ini mengalami perkembangan yang relatif pesat sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh dan berkembangnya sejumlah perusahaan *provider* dibidang telekomunikasi yang mencakup sistem sambungan telepon rumah, sistem sambungan telepon mobil (CDMA) dan sistem seluler (GSM) yang telah dikembangkan kearah 3G, serta sistem telekomunikasi *internet/WAP*, kondisi tersebut menyebabkan terdapat ratusan menara BTS (*Base Transmission Station*) di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Tingkat sambungan telekomunikasi dengan berbagai modus sambungan diperkirakan telah mencapai sekitar sepertiga dari jumlah rumahtangga serta telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Provinsi Riau. PT. Telkom sebagai BUMN yang telah memotori berkembangnya usaha jasa dalam bidang telekomunikasi, didukung oleh *central gateway* di Pekanbaru, 24 STO di ibukota Kabupaten/Kota dan ibukota kecamatan, transmisi gelombang mikro dan UHF, serta *repeaters*. Untuk mendukung pelayanan telekomunikasi internasional, juga telah disediakan Sentral Gerbang Internasional (SGI) 3 di Pulau Batam dan transmisi gelombang mikro yang mampu mengantisipasi kebutuhan Provinsi Riau hingga dua dekade mendatang. Kapasitas terpasang dan tersambung pada pusat perkotaan yang berpenduduk padat mencatat *occupancy rate* hingga 60 persen, sedangkan SST pada pusat-pusat ibukota kabupaten baru relatif masih terbatas.

f) Air Bersih

Perkembangan dan peningkatankualitas kehidupan masyarakat Provinsi Riau menuntut adanya perbaikan dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih. Pelayanan air bersih merupakan salah satu sektor penting dalam mewujudkan Provinsi yang baik dan sehat.

Kecilnya kenaikan jumlah pelanggan dan juga cakupan jumlah air minum yang disalurkan disebabkan kualitas air tanah yang kurang bagus, keterbatasan terhadap

alokasi dana yang disalurkan untuk pemeliharaan jaringan dan instalasi air bersih. Kebiasaan masyarakat membeli air bersih dan air minum dari pengecer antara Rp 500 hingga Rp 1.000 per jerigen. Pada musim kemarau, harga air bersih untuk minum biasanya naik menjadi Rp 1.000 – Rp 2.000 per jerigen.

Kecilnya alokasi dana untuk pemeliharaan infrastruktur jaringan dan instalasi air bersih dan tidak tersedianya investasi yang signifikan untuk peningkatan kapasitas pelayanan mengakibatkan turunnya pelayanan air bersih di Provinsi Riau sehingga jauh tertinggal dari apa yang telah dicapai di skala Nasional. Selain itu masih lemahnya komitmen dan instrumen kebijakan serta strategi pembangunan air bersih baik di Provinsi Riau memperparah kondisi penyediaan air bersih di Provinsi ini. Selain itu menurunnya persentase cakupan pelayanan air bersih juga dipengaruhi oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi.

Disisi lain, jumlah populasi penduduk Provinsi Riau terus mengalami peningkatan sehingga kebutuhan air bersih menjadi hal yang sangat penting untuk diupayakan keberadaannya.

Demikian juga dengan penyediaan air bersih di pusat-pusat pedesaan dan sentra-sentra produksi. Sistem penyediaan air bersih pada skala kecil dengan memanfaatkan sungai, air tanah, dan air hujan sebagai sumber air baku dapat diupayakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Peran para pihak baik pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat dalam pengembangan sarana air bersih perlu diperkuat dan disinergikan.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1) Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas selalu diupayakan untuk disusutkan, walaupun tidak mungkin untuk mencapai angka nol. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.50.
Angka Kriminalitas Tahun 2008 – 2012 di Provinsi Riau

No	Jenis Kriminal	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah kasus narkoba	1195	1133	532	642	823
2	Jumlah kasus pembunuhan	154	82	36	29	33
3	Jumlah kejahatan seksual	252	489	214	111	128
4	Jumlah kasus penganiayaan	1316	1682	1238	1189	1045
5	Jumlah kasus pencurian	4620	3468	4064	3348	3626
6	Jumlah kasus penipuan	1087	1350	626	413	381
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	13	8	10	8	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	8637	8212	6720	5740	6036
9	Jumlah penduduk	5070952	5306533	5538367	5738543	5929173
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	0.00170323	0.00155	0.001213	0.001	0.001018

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka, 2013)

Salah satu indikator yang menggambarkan iklim berinvestasi yang baik pada suatu wilayah adalah rendahnya angka kriminalitas. Secara keseluruhan, angka kriminalitas di Provinsi Riau relatif kecil sehingga suasananya relatif aman dibandingkan wilayah sekitarnya. Meskipun rendah, ada kecenderungan angka kriminalitas semakin meningkat sejalan dengan semakin tingginya jumlah penduduk dan terbukanya wilayah Riau. Tindak kriminal yang paling banyak terjadi adalah pencurian dan penipuan. Sedangkan tindak kriminal lainnya terjadi dengan frekuensi yang relatif kecil. Perlu dicatat bahwa kasus-kasus kriminalitas ini umumnya dapat ditangani oleh pihak kepolisian.

Selama periode 2008 hingga 2012, pertumbuhan kriminalitas menurun sebesar 8,05 % per tahun. Pertumbuhan kriminalitas yang tinggi adalah kasus pembunuhan yaitu sebesar 15,71 % per tahun diikuti oleh kasus penipuan uang dan seksual masing-

masing sebesar 12,13% dan 9,84% per tahun. Meskipun kasus-kasus kriminal di Riau jumlahnya relatif kecil dan umumnya dapat ditangani, namun upaya pencegahan harus terus mendapat perhatian sehingga iklim investasi Provinsi Riau dapat terus meningkat.

2) Jumlah Demonstrasi

Demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi oleh kelompok masyarakat juga mulai menular ke Provinsi Riau meski dengan frekuensi yang relatif sedikit. Meski tidak diperoleh data yang pasti, jumlah demonstrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat rata-rata kurang dari 10 kali per tahun. Isu yang diangkat oleh kalangan demonstran yang paling banyak adalah isu lingkungan (Hutan dan Pemanfaat Lahan Gambut), sedangkan demonstrasi dengan isu-isu politik, ekonomi dan pemogokan kerja frekuensinya relatif sedikit dan terjadi tidak setiap tahun.

2.1.4.4. Fokus Sumber daya manusia

1) Kualitas Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor pendukung perekonomian suatu Negara. Untuk memajukan perekonomian suatu Negara diperlukan tenaga kerja yang berkualitas. Kualitas tenaga kerja selama periode 2008 hingga 2012, di Provinsi Riau yang ditunjukkan dari jumlah lulusan S1/S2/S3 semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.93. Pada tahun 2008, persentase rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 2,78% dari jumlah penduduk meningkat menjadi 4,25% pada tahun 2012.

Meski kualitas tenaga kerja di Provinsi Riau relatif meningkat, namun hal ini perlu dicermati secara mendalam. Karena peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja ini umumnya didorong oleh penduduk pendatang yang mempunyai daya saing merebut peluang kerja lebih baik dibandingkan tenaga kerja lokal. Keadaan ini perlu mendapat perhatian agar kesenjangan yang terjadi dan gap antara pendatang dengan penduduk tempatan tidak semakin melebar yang akan memberikan dampak sosial dikemudian harinya, perlu ketegasan Pemerintah Daerah Provinsi Riau untuk konsisten menegakkan peraturan daerah yang mengatur tentang prioritas penerimaan tenaga kerja lokal.

Tabel 2.51.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2008 – 2012 Provinsi Riau

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Lulusan S1/S2/S3	140.884	192096	164.489	211.752	251.990
2	Jumlah Penduduk	5.070.952	5.306.533	5.538.367	5.738.543	5.929.173
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3 (1/2) %	2,78	3,62	2,97	3,69	4,25

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka, 2013)

Jika dilihat dari rasio lulusan tabel 2.51 kualitas dan kuantitas lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Riau masih rendah (di bawah 5 %) per tahun, hal ini perlu mendapat perhatian oleh pemerintah dalam upaya untuk mencerdaskan kehidupan dan pendidikan masyarakat.

2) Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Angka ketergantungan atau tingkat ketergantungan adalah rasio antara jumlah penduduk usia tidak produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun) terhadap jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun), dimana rasio ini menggambarkan beban tanggungan setiap 100 orang penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif.

Tabel 2.52.
Rasio Ketergantungan Tahun 2008 - 2012 Provinsi Riau

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	1,639,718	1,677,910	1,835,758	1902108	1,965,299	3,97
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	127,400	131,801	579,234	145,757	150,620	3,65
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) & (2)	1,767,118	1,809,711	2,414,992	2,047,865	2,115,919	3,94
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	3,422,034	3,496,822	3,561,936	3690678	3,813,254	2,29
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	51,64	51,75	67,80	55,49	55,49	1,49

Sumber: BPS (Riau Dalam Angka, 2013)

Secara umum, rasio ketergantungan di Provinsi Riau berfluktuasi yaitu dari 100 penduduk produktif menanggung beban 51,64 jiwa tidak produktif pada tahun 2008 menjadi 55,49 jiwa pada tahun 2012 dengan laju kenaikan sebesar 1,49% per tahun.

Meski meningkat, namun tingkat ketergantungan yang ada di Provinsi Riau masih di bawah ideal, sehingga pendapatan keluarga masih tersedot untuk kebutuhan keluarga.

Hal lain yang perlu dicermati adalah penduduk usia produktif yang laju pertumbuhannya sebesar 2,29 % per tahun tersebut diduga merupakan penduduk pendatang yang bekerja di Riau dan umumnya tidak membawa keluarga. Dengan demikian, gambaran peningkatan tingkat ketergantungan sedikit bias berdasarkan fakta lapangan yang ada.

2.1.4.5. Resume Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja urusan pemerintahan Provinsi Riau disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.53.

Resume Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Riau

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar (Target RPJMD 2014)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1.1	Pertumbuhan Ekonomi ADHK-DM (%)	4,17	5,01	3,55	2,61	2,84	2,40	>
1.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi ADHK-TM (%)	7,16	7,63	7,82	6,13	6,80	6,31	>
1.1.3.	Laju Inflasi (%)	7,00	5,09	3,35	8,83	8,65	6,63	<
1.1.4.	Pendapatan Per Kapita ADHK-TM (Rp Juta)	8,46	9,15	9,62	9,94	10,41	10,11	>
1.1.5.	Gini Ratio (Ratio)	0,33	0,36	0,40	0,37	0,38	0,35	<
1.1.6.	Indeks Ketimpangan williamson ADHK-TM	0,2865	0,2877	0,2893	0,2910	0,2921	0,25	<
1.1.7.	ICOR ADHK-TM	3,67	3,61	3,65	4,84	4,68	3,68	<
1.1.8	Tingkat Kemiskinan (%)	8,65	8,17	8,05	8,42	7,99	7,90	<
1.1.9	Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)	1,38	1,21	1,17	1,18	1,00	1,09	>
1.1.10	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,37	0,29	0,28	0,24	0,29	0,22	<
1.2.	Kesejahteraan Sosial							
1.2.1.	IPM (Indeks)	76,07	76,53	76,91	77,25	77,55	77,96	=
1.2.2.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	71,40	71,55	71,70	71,73	71,81	72,16	=
1.2.3.	Angka melek Huruf (%)	98,35	98,42	98,45	98,48	98,51	98,71	=
1.2.4.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,58	8,63	8,64	8,78	8,83	8,69	>
1.2.5.	Pengeluaran Riil Per kapita (Rp ribu)	646,63	650,83	654,48	657,26	659,94	661,06	=
1.2.6.	APK SD/MI (%)	111,49	112,04	112,27	112,38	112,60	112,67	=
1.2.7.	APK SMP/MTs (%)	101,82	102,33	102,53	102,63	102,83	102,80	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar (Target RPJMD 2014)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
1.2.8.	APK SMA/SMK/MA (%)	77,77	78,55	78,71	78,78	79,03	79,14	=
1.2.9	AMP SD/MI (%)	96,04	96,52	96,81	97,14	97,42	97,46	=
1.2.10	APM SMP/MTs (%)	94,17	94,64	94,92	95,25	95,52	95,56	=
1.2.11	APM SMA/SMK/MA (%)	67,80	68,48	68,69	69,27	69,64	69,71	=
1.2.12	Gizi Buruk (%)	2,10	0,74	-	1,57	1,45	1,60	>
1.2.13	AKB (Per 1000 Kelahiran Hidup)	7,90	11,4	9,4	11,33	11,26	8,99	<
1.2.14	AKABA (Per 1000 anak)	5,6	8,4	9,7	11,77	11,43	9,13	<
1.2.15	AKI (Per 100.000 Kelahiran)	109,9	122,1	112,7	118	106,68	118	<
1.2.16	Angka Kesakitan DBD (Per 1000 penduduk)	18,3	51,5	18,8	23,45	22,29	18,50	<
1.2.17	Angka kesakitan Malaria (Per 1000 penduduk)	0,8	0,38	3,4	0,04	0,03	0,25	>
2	PELAYANAN UMUM							
2.1.	Pelayanan Urusan Wajib							
2.1.1.	Pendidikan							
a.	APS 7 – 12 tahun (%)	98,50	98,60	98,70	98,80	98,88	99,04	=
b.	APS 13 – 15 tahun (%)	91,70	91,80	91,90	92,00	92,08	93,30	=
c.	APS 16 -18 Tahun (%0	63,50	64,00	64,50	65	65,38	66,01	=
d.	Rasio Ketersediaan Sekolah/ penduduk sekolah 7 – 12 tahun	272	215	239	226	226	211,58	<
e.	Rasio Ketersediaan Sekolah/ penduduk sekolah 13 - 15 tahun	272	215	239	200	200	239,40	<
f.	Rasio Murid Thd Guru Tingkat SD/MI (Murid/Guru)	14,58	16,58	18,83	15,14	15,15	20,79	<
g.	Rasio Murid Thd Guru Tingkat MP/MTs (Murid/Guru)	11,73	13,49	13,60	9,96	10,00	15,82	<
h.	Rasio Murid Thd Guru Tingkat SMA/ SMK/ MA (Murid/Guru)	11,67	10,23	12,17	13,84	14,00	15,22	<
i.	Rasio Murid Terhadap Kelas SD/MI (Jumlah Murid/Kelas)	39,43	32,95	34,44	25,64	26,00	32,90	>
j.	Rasio Murid Terhadap Kelas SMP/MTs (Jumlah Murid/Kelas)	31,16	26,41	23,72	31,81	32,00	22,29	>
k.	Rasio Murid Terhadap Kelas SMA/ SMK/MA (Jumlah Murid/Kelas)	34,07	32,06	36,24	37,72	38,00	35,87	<
l.	Rasio Guru Terhadap Kelas SD/MI (jumlah Guru/Kelas)	2,70	1,99	1,83	1,65	1,60	1,62	<
m.	Rasio Guru Terhadap Kelas SMP/MTs (jumlah Guru/Kelas)	2,65	1,96	1,74	2,28	2,28	1,25	<
n.	Rasio Guru Terhadap Kelas SMA/ SMK/ MA (jumlah Guru/Kelas)	2,83	1,14	2,29	2,41	2,41	2,25	>
2.1.2.	Kesehatan							
a.	Rasio Puskesmas (Per 100.000 Penduduk)	3,61	3,50	3,49	3,41	3,41	3,52	=
b.	Rasio Pustu (Per 100.00 Penduduk)	14,73	14,57	14,77	14,19	14,04	14,16	=
c.	Rasio Puskesmas Keliling (Per 100.000 Penduduk)	3,20	3,61	3,34	3,13	3,10	3,44	<
d.	Rasio total Puskesmas/Pustu/Pusling (Per 100.000 Penduduk)	21,54	21,68	21,61	20,73	20,55	17,60	>
e.	Cakupan Puskesmas (Per kecamatan)	1,32	1,29	1,31	1,32	1,29	1,30	=
f.	Cakupan Pustu+Pusling (Per Desa/ Kelurahan)	0,60	0,63	0,62	0,61	0,58	0,60	=
g.	Rasio Rmah sakit Per satuan Penduduk	0,90	0,94	0,93	1,04	1,03	1,02	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar (Target RPJMD 2014)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
h.	Rasio Dokter Spesialis (Per 100.000 Penduduk)	10,60	9,88	9,36	11,41	12,46	9,40	>
i.	Rasio Dokter Umum (Per 100.000 Penduduk)	16,95	16,24	17,74	17,83	18,29	17,70	=
j.	Rasio Dokter Gigi (Per 100.000 Penduduk)	5,90	8,77	5,72	5,21	5,15	5,72	<
k.	Rasio Tenaga Perawat (Per 100.000 Penduduk)	96,20	76,13	109,32	99,88	98,86	109,30	<
l.	Rasio Tenaga Bidan (Per 100.000 Penduduk)	62,91	59,23	76,03	74,49	73,73	76,00	<
2.1.3	Lingkungan Hidup							
a.	Indeks Lingkungan Hidup	54,86	56,23	53,79	50,69	47,92	59,32	<
2.1.4.	Pekerjaan Umum							
a.	Panjang Jalan Provinsi (KM)	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033	=
b.	Kondisi Jalan Provinsi Berkondisi Baik (KM)	483,8	503,8	503,8	931,1	931,1	1.031	<
c.	Panjang irigasi /Rawa (KM)	na	na	na	229	229	350,6	<
d.	Banjir (Frekuensi)	27	12	27	29	29	20	<
2.1.5..	Penanaman Modal							
a.	PMDN (Rp Milyar)	1.037	7.462	5.450	4.874	7.700	5.699	>
b.	PMA (US\$ Juta)	86,63	212,34	1.152	1.304	1.369	1.178	>
2.1.6.	Koperasi dan UKM							
a.	Jumlah Koperasi Aktif (unit)	4.609	4.865	5.013	5.125	5.144	5.329	=
b.	Jumlah Anggota Koperasi (ribu Jiwa)	604,31	609,88	608,47	629,57	619,32	639,27	=
2.1.7.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
a.	Pertumbuhan Penduduk (%)	4,37	3,61	3,32	3,31	3,03	3,20	>
2.1.8	Ketenagakerjaan							
a.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,66	66,38	62,90	63,44	63,31	64,25	=
b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,72	5,32	4,30	5,50	6,56	5,11	<
2.1.9.	Ketahanan pangan							
a.	Rasio Produksi Beras Terhadap Konsumsi penduduk Riau	0,63	0,57	0,52	0,43	0,42	0,54	<
b.	Rasio Produksi Jagung Terhadap Konsumsi penduduk Riau	0,89	0,63	0,54	0,45	0,45	0,25	>
c.	Rasio Produksi Sayuran Terhadap Konsumsi Penduduk Riau	0,20	0,22	0,21	0,25	0,24	0,24	=
d.	Rasio Produksi Buah-Buahan terhadap Konsumsi penduduk Riau	0,21	0,49	0,44	0,42	0,41	0,45	<
e.	Rasio Produksi daging Ruminasia terhadap Konsumsi Penduduk Riau	0,59	0,63	0,73	0,57	0,55	0,75	<
f.	Rasio Produksi Ikan terhadap Konsumsi Penduduk Riau	0,75	0,82	0,80	0,83	0,80	0,81	=
2.1.10	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
a.	Indeks Pembangunan Gender (Indeks)	65,71	66,71	66,74	66,76	66,79	66,80	=
2.1.11	Keluarga berencana dan keluarga Sejahtera							
a.	Rasio akseptor KB aktif per jumlah PUS (%)	na	na	67,21	72,77	78,32	56,00	>
2.1.12	Pemerintahan Umum							
a.	Indeks Efektivitas Pemerintahan	5,59	5,89	6,14	6,18	6,20	6,38	=
b.	Indeks Integritas Daerah	na	na	na	8,00	7,85	8,20	=

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian kinerja					Standar (Target RPJMD 2014)	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2010	2011	2012	2013	2014		
c.	Nilai Keterbukaan Informasi (%)				32,27	42,72	35,82	>
2.1.13	Administrasi Keuangan Daerah							
a.	Opini BPK	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
b.	Nilai Akuntabilitas	51,40 CC	57,29 CC	59,97 CC	61,91 CC	63,85 CC	CC	=
2.2.	Pelayanan Urusan Pilihan							
2.2.1	Pertanian							
a.	Produksi Ikan (ribu Ton)	133,00	149,94	181,17	185,07	185,07	158,95	>
b.	Produksi Beras (Ribu Ton)	362,16	337,55	322,66	273,51	273,51	328,23	<
c.	Produksi Jagung (Ribu Ton)	41,86	33,20	31,43	28,05	28,05	29,17	=
d.	Produksi Sayuran (Ribu Ton)	74,17	81,32	83,51	100,78	100,78	96,75	=
e.	Produksi Buah-Buahan (Ribu Ton)	86,55	205,55	188,87	189,93	189,93	195,87	=
f.	Produktivitas kelapa Sawit (Ton CPO/Ha/Tahun)	3,90	3,97	3,84	3,86	3,86	3,99	=
g.	Produktivitas Kelapa (Ton kopras/Ha/Tahun)	1,37	1,36	1,32	1,16	1,16	1,29	<
h.	Produktivitas Karet (Ton KKK/Ha/Tahun)	1,14	1,09	1,09	1,10	1,10	1,05	=
i.	Produksi Daging Sapi (Ribu Ton)	7,48	8,77	10,73	8,24	8,24	12,28	<
j.	Kontribusi Sektor Pertanian Thd PDRB ADHK-TM (%)	34,32	33,22	31,60	31,11	31,11	29,83	=
k.	Luas Hutan Produksi (Juta Hektar)	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	3,44	=
l.	Kerusakan Kawasan Hutan (Juta Hektar)	2,87	1,46	1,25	1,54	1,54	1,44	<
m.	Rehabilitasi Hutan dan Lahan kritis (Ribu Hektar)	137,75	137,75	137,84	137,93	138,03	95,95	>
n.	Kebakaran Hutan dan Lahan (Titik Api)	1.527	3.567	4.675	2.447	4.321	7.500	<
2.2.2.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
a.	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Dari Migas (%)	47,72	46,49	44,40	42,55	42,55	42,13	=
2.2.3.	Pariwisata							
a.	Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan (Destinasi)	na	na	na	na	2	1	=
b.	Kunjungan Wisata Asing (Ribu Jiwa)	36,55	47,88	48,81	38,58	38,58	56,71	<
2.2.4	Perdagangan							
a.	Ekspor Bersih ADHK-TM (US\$ Juta)	10,23	13,77	18,10	17,56	17,26	19,85	<
b.	Kontribusi Sektor Perdagangan ADHK-TM (%)	8,91	9,34	10,48	10,78	10,78	11,70	<
2.2.5.	Industri							
a.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK-DM (%)	11,36	11,57	11,52	12,01	12,01	12,39	=
b.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK-TM (%)	17,79	17,85	17,09	17,40	18,00	19,45	=
3.	Daya Saing Daerah							
3.1.	Fokus kemampuan Ekonomi							
a.	NTP	103,43	105,13	105,22	101,11	96,11	105,88	<
b.	NTP Pangan	110,21	112,69	113,60	109,66	98,64	118,04	<
c.	NTP Hortikultura	112,10	114,75	117,25	112,36	96,93	124,09	<
d.	Perkebunan	100,20	103,57	99,87	95,47	96,80	101,88	<
e.	Peternakan	103,45	101,05	101,11	101,01	97,95	103,14	<
f.	Perikanan	93,08	92,19	90,91	90,66	104,43	92,74	>

2.1.4.6. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pencapaian target indikator kinerja terhadap 9 (sembilan) standar pelayanan minimal (SPM) tahun 2009 – 2013 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.54
Realisasi pencapaian target indikator kinerja
Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2009 – 2013 Provinsi Riau

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi pencapaian Target 2013				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	SOSIAL								
	<i>Pelaksanaan program/Kegiatan bidang sosial</i>								
	pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial skala provinsi	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80%	2008-2015	1%	2%	3%	2%	2%
	penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sosial skala provinsi	Persentase (%) Panti Sosial skala provinsi yang melaksanakan standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial	60%	2008-2015	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Penyediaan sarana dan prasarana sosial</i>								
	penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Provinsi	Persentase (%) panti sosial skala provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	80%	2008-2015	100%	100%	100%	100%	100%
	penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala provinsi	Persentase (%) Organisasi Sosial/Yayasan/ LSM yang Menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	60%	2008-2015	8%	6%	27%	10%	6%
	<i>Penanggulangan korban bencana</i>								
	bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang mengalami bencana Memberikan bantuan sosial bagi korban bencana skala provinsi	80%	2008-2015	100%	100%	100%	100%	100%
	evakuasi korban bencana skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap untuk evakuasi korban bencana skala provinsi	80%	2008-2015	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi pencapaian Target 2013				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<i>Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial</i>								
	penyelenggaraan jaminan sosial skala provinsi	Persentase (%) kabupaten/kota yang menyelenggarakan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial	80%	2008-2015	92%	92%	92%	92%	92%
II	LINGKUNGAN HIDUP (PERMEN LH NOMOR 19 TAHUN 2008)								
	Pelayanan informasi status mutu air	Persentase jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu airnya dan diinformasikan status mutu airnya	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%
	Pelayanan informasi status mutu udara ambient	Persentase Kabupaten/Kota yang dipantau kualitas udara ambientnya dan diinformasikan mutu udara ambientnya	100%	2013	30%	30%	60%	100%	83%
	Pelayanan tindak lanjut laporan masyarakat atas kasus dugaan pencemaran	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	100%	2013	100%	100%	100%	100%	100%
III	KETAHANAN PANGAN								
	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	60	2015		0%	0%	0%	
	Distribusi dan Akses Pangan	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah	100	2015		100%	100%	100%	
	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	80	2015		79.59%	84.44 %	88.89 %	
	Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	2015		9.09%	36.36 %	25.00 %	
IV	PENANAMAN MODAL								
	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	2014		sektor	sektor	sektor	
	Promosi Penanaman modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 (satu) kali/tahun	2014		9 kali	11 kali	11 kali	

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi pencapaian Target 2013				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal	100%	2014		0%	0%	0%	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014		1 kali	1 kali	1 kali	
	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	2014		0%	0%	0%	
	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014		1 kali	1 kali	1 kali	
V	PERHUBUNGAN								
	<i>Angkutan jalan :</i>								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Provinsi	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	Jaringan Prasarana Angkutan jalan	Tersedianya Terminal Angkutan penumpang type A pada setiap Provinsi untuk melayani angkutan umum dalam trayek	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya Fasilitas perlengkapan ajalan (Rambu, Marka, dan Guardrail) dan penerangan jalan umum pada jalan Provinsi	60 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam Provinsi (AKDP)	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelainan kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal dan pengelola perlengkapan jalan	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Angkutan Sungai dan Danau :</i>								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya angkutan sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	75 %	2014	75%	75%	75%	75%	75%

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi pencapaian Target 2013				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau	Tersedianya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada jaringan trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi pada wilayah yang tersedia alur pelayaran sungai dan danau yang dapat dilayari	60%	2014	50%	50%	50%	50%	60%
	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	100%	2014	90%	90%	90%	90%	100%
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau	100%	2014	5%	5%	5%	5%	20%
	Angkutan Penyeberangan:								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi yang menghubungkan jalan Provinsi yang terputus oleh perairan	75 %	2014	75%	75%	75%	75%	75%
	Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan	Tersedianya pelabuhan pada setiap ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/ Kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi dan tidak ada alternatif jalan	75 %	2014	60%	60%	60%	60%	75%
	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT	100 %	2014	5%	5%	5%	5%	5%
	Angkutan Laut :								
	Jaringan Pelayanan Angkutan Laut	Tersedianya kapal laut yang beroperasi pada lintas antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif jalan	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi pencapaian Target 2013				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Jaringan Prasarana Angkutan Laut	Tersedianya dermaga pada setiap ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/ Kota untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada lintas trayek antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan	100 %	2014	70%	75%	80%	85%	90%
	Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal yang beroperasi antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	100 %	2014	100%	100%	100%	100%	100%
	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai awak kapal untuk angkutan laut dengan ukuran di bawah 7 GT	100 %	2014	5%	5%	5%	5%	5%
VI	PERUMAHAN RAKYAT (PERMENPERA NO 22 TAHUN 2008)								
	Rumah layak huni dan terjangkau	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	100 %	2009 - 2025	11,66 %	13,66 %	13,84 %	14,88 %	16,48 %
		Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	70 %	2009 - 2025	10%	15%	20%	25%	30%
	Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	100 %	2009 - 2025	20%	25%	30%	35%	40%
VII	KESENIAN								
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	Cakupan Kajian Seni	50%	2014		0%	13%	53%	27%
		Cakupan Fasilitas Seni	30%	2014		0%	48%	48%	95%
		Cakupan Gelar Seni	75%	2014		100%	100%	133%	133%
		Misi Kesenian	100%	2014		100%	100%	100%	100%
	Sarana dan Prasarana	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	25%	2014		100%	100%	150%	0%
		Cakupan Tempat	100%	2014		100%	100%	100%	100%
		Cakupan Organisasi	34%	2014		196,07 %	196,07 %	196,07 %	98,04 %
VIII	KETENAGA KERJAAN								
	Pelayanan Pelatihan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	2016		70.70%	72.96 %	81.69 %	62,76 %
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	2016		66.66%	82.90 %	87.11 %	59,97 %
		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	2016		82.64%	93.02 %	93.19 %	66,66 %
	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	2016		19.51%	2.79%	5.01%	
	Pelayanan Penyelesaian Hubungan Industrial	Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	2016				34,37 %	48,00 %
	Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	2016				69,81 %	47,72 %

No.	Bidang/ Jenis Layanan	Indikator Kinerja	Target Rencana Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian	Realisasi pencapaian Target 2013				
					2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	2016				25,02 %	1,18%
		Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	2016					
IX	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
	Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu penanganan	100%	2014	0%	0%	10%	14%	7%
	Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di RS	100%	2014	0%	0%	12%	16%	9%
	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	0%	0%	0%	0%	3%
		Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	75%	2014	0%	0%	3%	14%	14%
	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	80%	2014	0%	0%	3%	14%	14%
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	50%	2014	0%	0%	0%	0%	0%
		ABH			0%	0%	5%	14%	8%
		KDRT			0%	0%	44%	32%	37%
		Kejahatan Seksual			0%	0%	13%	18%	14%
		Penganiayaan			0%	0%	2%	8%	12%
	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	50%	2014	0%	0%	22%	8%	5%
		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	2014	0%	0%	5%	4%	2%

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai tahun 2014 dan Realisasi RPJMD

Semua program dan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 - 2014 mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Riau Tahun 2008-2013, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2009 tentang RPJM Provinsi Riau Tahun 2008-201. Khusus program dan kegiatan 2014 juga mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2014 tentang RPJM Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

2.2.1. Urusan Wajib

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan 337 program dan 1.854 kegiatan urusan wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan untuk urusan wajib sebesar Rp 2.753.098.591.248,70 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.411.330.904.214,72. Persentase realisasi anggaran sebesar 87,59% dan realisasi fisik sebesar 91,14%. Realisasi fisik lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan sehingga maka penyelenggaraan urusan wajib tahun 2011 terkategori efisien.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 339 Program dan 2.547 kegiatan urusan wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan untuk urusan wajib sebesar Rp 4.009.554.019.103,50 dengan realisasi sebesar Rp 3.218.071.560.753,75. Persentase realisasi anggaran sebesar 80,26% dan realisasi fisik sebesar 87,16%. Realisasi fisik lebih tinggi dibanding realisasi keuangan sehingga penyelenggaraan urusan wajib tahun 2012 terkategori efisien.

Pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 365 program dan 2.890 kegiatan urusan wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan untuk urusan wajib sebesar Rp 4.492.080.566.392,22 dengan realisasi sebesar Rp 3.873.640.103.427,08 atau sebesar 86,23%. Realisasi fisik sebesar 85,53%. Realisasi fisik yang sedikit lebih rendah dibanding realisasi keuangan sehingga penyelenggaraan urusan wajib tahun 2013 sedikit di bawah efisien atau relatif kurang efisien.

Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 401 program dan 3.307 kegiatan urusan wajib. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan untuk urusan wajib sebesar Rp 4.185.048.511.074,00 dengan realisasi sebesar Rp

1.975.773.189.280,06 atau 47,21%. Realisasi fisik sebesar 49,41%. Pencapaian realisasi urusan wajib tahun 2014 ini sangat rendah dan merupakan pertama sekali terjadi dalam 10 tahun terakhir sebagai akibat beberapa hal, antara lain (i) Relatif lambatnya masa pelantikan Gubernur terpilih, (ii) Polemik SOTK dimana APBD tahun 2014 masih menggunakan SOTK lama, sementara SOTK baru telah disahkan sehingga menimbulkan polemik dalam pelaksanaan, dan (iii) banyaknya peristiwa-peristiwa politik dan lainnya yang menghambat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Riau. Secara umum, realisasi fisik yang lebih tinggi dibanding realisasi keuangan maka penyelenggaraan urusan wajib tahun 2014 terkategori efisien.

2.2.2. Urusan Pilihan

Pada tahun 2011 telah dilaksanakan sebanyak 79 Program dan 373 kegiatan urusan pilihan. Jumlah anggaran biaya langsung (BL) yang dialokasikan untuk urusan pilihan sebesar Rp 168.242.724.085 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 126.856.828.358. Persentase realisasi keuangan sebesar 75,40% dan realisasi fisik sebesar 84,78%. Realisasi fisik yang lebih tinggi dibanding realisasi keuangan menjadikan penyelenggaraan urusan pilihan tahun 2011 terkategori efisien.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan sebanyak 83 program dan 573 kegiatan urusan pilihan. Jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 293.317.704.763 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 209.013.252.316. Persentase realisasi keuangan sebesar 75,40% dan realisasi fisik sebesar 84,78%. Realisasi fisik yang lebih tinggi dibanding realisasi fisik menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pilihan terkategori efisien.

Pada tahun 2013 dilaksanakan sebanyak 86 program dan 654 kegiatan untuk urusan pilihan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan pilihan sebesar Rp 419.620.723.159, dengan realisasi keuangan sebesar Rp 365.359.740.808,00. Persentase realisasi keuangan sebesar 82,75% dan realisasi fisik sebesar 95,06%. Realisasi fisik yang lebih tinggi dibandingkan realisasi keuangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pilihan terkategori efisien.

Pada tahun 2014 dilaksanakan sebanyak 95 program dan 798 kegiatan urusan pilihan. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk urusan pilihan sebesar Rp 529.793.839.026,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 195.709.403.438,00.

Persentase realisasi keuangan sebesar 36,94% dan realisasi fisik sebesar 60,18%. Rendahnya tingkat pelaksanaan atau realisasi keuangan maupun fisik disebabkan oleh permasalahan yang sama dengan pelaksanaan urusan wajib tahun 2014. Secara umum, lebih tingginya realisasi fisik dibanding realisasi keuangan tahun 2014 ini dapat dikategorikan efisien.

Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 – 2014 dan perkiraan realisasi capaian tahun 2015 menurut urusan dan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.55.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2013 – 2014 dan Perkiraan Realisasi Capaian Tahun 2015 Provinsi Riau

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5		6	7	8=(7/6)	9		10=(5+7+9)*	11*	12
1				URUSAN WAJIB													
1	01			PENDIDIKAN													
1	01	15		Program Pendidikan Anak Usia dini	APK PAUD APS PAUD (0 - 6 tahun) Rasio Ketersediaan Lembaga PAUD/Penduduk Usia 0 - 6 Tahun Rasio Murid terhadap guru Rasio Guru terhadap kelas	72		53.76		53.76	48.384	90.00	58		50.80	71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	01	Pembangunan PAUD holistik Integratif	Jumlah PAUD Holistik Integratif						0		1 Lembaga				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	02	Mendirikan 1 Desa 1 Lembaga PAUD	Jumlah Lembaga PAUD						100		178 Lembaga				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	03	MONEV PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal)	Jumlah monitoring dan evaluasi yang dilakukan di Kabupaten/Kota						0		1440 Orang/Tahun				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	04	Beasiswa S1 PAUD	Jumlah PTK PAUD yang mendapatkan beasiswa S1 PAUD						100		100 Orang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	05	Kompetensi PTK PAUD	Jumlah PTK PAUD Non Formal yang lulus kompetensi						0		100 Orang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	06	Pelatihan Berjenjang Dasar, Lanjutan dan Mahir Bagi PTK PAUD	Jumlah PTK PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang						0		200 Orang				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	15	07	Alat Permainan Edukasi Indoor/Dalam	Jumlah Lembaga yang menerima bantuan Alat Permainan Edukasi Indoor					0		100 Lembaga			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	08	Pengadaan Meubiler	Jumlah Meubiler					0		200 Lembaga			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	09	Gebyar PAUD	Juara Nasional					0		10 Medali			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	10	Pembangunan Pagar dan Semenisasi TK Negeri Kabupaten Meranti	Tersedianya pagar dan semenisasi TK Negeri Kab. Meranti					0		1 Kab			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	11	Pembangunan RKB MDA Masjid Shirathal Mustaqim Jl. Garuda Ujung Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan RKB MDA Masjid Shirathal Mustaqim Jl. Garuda Ujung Tangkerang Tengah Kota Pekanbaru					0		1 MDA			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	12	Pembangunan Gedung Paud Raudhatul Jannah Kel. Sidomulyo Barat Tampan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Paud Raudhatul Jannah Kel. Sidomulyo Barat Tampan					0		1 paud			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	13	Renovasi Gedung TK Ar- Ridho Pekanbaru	Terlaksananya Renovasi gedung TK Ar- Ridho Pekanbaru					0		1 TK			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	14	Rehab Bangunan Taman Kanak Kanak Aisyah Pangkalan Kerinci Pelalawan	Terlaksananya Rehab Bangunan Taman Kanak Kanak Aisyah Pangkalan Kerinci Pelalawan					0		1 TK			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	15	15	Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Alhikmah Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu (3 Ruang)	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru TK Alhikmah Pasir Putih Desa Baru Kec. Siak Hulu (3 Ruang)					0		3 ruang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24			Program Pendidikan Dasar											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SD/MI/SDLB/Paket A	112.79		112.5	112.56	90.11	80.06	112.61	112.61	99.84		
					APM SD/MI/SDLB/Paket A	98.69		97.1	97.42	86.20	88.49	97.73	97.73	99.03		
					APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	105.36		102.75	103.27	82.68	80.06	103.79	103.79	98.51		
					APM SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	96.82		95.2	95.52	84.52	88.49	95.84	95.84	98.99		
					APS SD (7-12 Tahun)	79.81		70.54	72.3	65.69	90.86	74.11	74.11	92.86		
					APS SMP (13-15 Tahun)	67.45		56.79	58.78	53.41	90.86	60.83	60.83	90.19		
					Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (7-12 tahun)	221		244	239	236.61	99.00	234	234	94.44		
					Rasio Ketersediaan sekolah per penduduk usia (13-15 tahun)	193		213	209	204.82	98.00	205	205	94.15		
					Rasio murid terhadap guru SD/MI	31.15		19.34	21.27	20.065	94.34	23.4	23.4	75.12		
					Rasio murid terhadap guru SMP/MTs	28.92		14.38	16.54	14.919	90.20	19.02	19.02	65.77		
					Rasio murid terhadap kelas SD/MI	32.57		33.23	33.1	32.769	99.00	32.96	32.96	98.82		
					Rasio murid terhadap kelas SMP/MTs	34.97		21.23	23.46	22.03	93.89	25.92	25.92	74.12		
					Rasio guru terhadap kelas SD/MI	1.16		1.72	1.59	1.56	98.00	1.47	1.47	78.91		
					Rasio guru terhadap kelas SMP/MTs	1		1.48	1.37	1.33	97.00	1.27	1.27	78.74		
1	01	24	01		Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SD bekerja sama dengan perguruan tinggi	terpenuhinya Tenaga Labor Bahasa SD bekerja sama dengan perguruan tinggi					0	120 Orang		0.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaiain Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capai an Realis asi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	02	Peningkatan Kesejahteraan Tutor Paket A	terlaksananya Bantuan Honorarium Tutor Paket A (Tutor Rp. 400.000/Orang setia bulan)			0	36 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	03	Peningkatan Kesejahteraan Penyelenggaraan Paket A	terlaksananya Bantuan Honorarium Penyelenggaraan Paket A(Honor Penyelenggaraan Rp. 400.000,-/lembagasetiap bulan)			0	6 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	04	DED Prototype Pembangunan Labor IPA SD	terpenuhinya DED Prototype Pembangunan Labor IPA SD			0	2 Dokumen		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	05	DED Prototype Pustaka SD	terpenuhinya DED Prototype Pustaka SD			0	2 Dokumen		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	06	Pengadaan Alat dan Meubeler Laboratorium IPA SD	Terlaksananya Pengadaan Alat dan Meubeler Laboratorium IPA SD			0	15 Unit		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	07	Pendamping Kurikulum SD	Terlaksananya Pendamping Kurikulum SD			0	240 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	08	Lomba Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi SD	Terlaksananya Lomba Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi SD			0	2 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	09	Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SD	Terlaksananya Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SD			0	2 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	10	Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SD	Terlaksananya Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SD			0	2 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	11	Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SD	Terlaksananya Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SD			0	2 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	12	Lomba Budaya Mutu SD	Terlaksananya Lomba Budaya Mutu SD			0	7 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	13	Akreditasi Sekolah Dasar	Terlaksananya Akreditasi Sekolah Dasar						0	50 Sekolah		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	14	Cerdas Cermat SD	Terlaksananya Cerdas Cermat SD						0			0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	15	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SD						0	7 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	16	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD						0	2 Emas		0.43	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	17	Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SD	Terlaksananya Liga Pendidikan Indonesia (LPI) SD						0	1 Emas		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	18	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD						0	7 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	19	Lomba Cipta Pelajar SD	Terlaksananya Lomba Cipta Pelajar SD						0	3 Emas		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	20	Ki Hajar Award Tingkat Provinsi SD/MI	Terlaksananya KI Hajar Award Tingkat Provinsi SD/MI						90	1 Piala		0.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	21	Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD	Terlaksananya Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SD						86	5 Medali		0.88	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	22	Pelaksanaan Ujian Sekolah SD/MI	Terlaksananya Ujian Sekolah SD/MI						0	122.000 Set		0.08	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	23	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sekolah Berbasis Standar Nasional (SBSN) se Provinsi Riau	Terpenuhihnya Monitoring dan Evaluasi SBSN						0	12 Kab/Kota		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	24	Dukungan Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) SMP	Terpenuhihnya Pelaksanaan hasil Ujian Nasional (UN) SMP						0	95.000 Siswa		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	25	Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS DIKDAS Se-Provinsi Riau	Terpenuhinya Rakor BOS, Pendataan, Monitoring, evaluasi dan Assistensi BOS						0	4 Kegiatan		0.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	26	Bantuan Honorarium Tutor Paket B	Terpenuhinya Tutor Paket B yang menerima Honor						0	234 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	27	Bantuan Honorarium Penyelenggara Paket B	Terpenuhinya Penyelenggaraan Paket B yang menerima Honor						0	54Lembaga		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	28	Pendampingan Kurikulum SMP	Terpenuhinya Pendampingan Kurikulum SMP						0	193 Cluster		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	29	Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SMP	Meningkatnya Prestasi Guru						0	2 medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	30	Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SMP	Meningkatnya Prestasi Kepala sekolah						0	2 medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	31	Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMP	Meningkatnya Prestasi Pengawas daerah terpencil						0	2 medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	32	Penilaian Sekolah Potensial Menuju SBSN	Jumlah Sekolah SBSN						0	12 Kab/Kota		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	33	Lomba unit kesehatan sekolah (UKS) SMP	Terlaksananya Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) SMP						0	5 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	34	Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Dikdas	Terpenuhinya Pegembangan Kurikulum Dikdas						0	250 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	35	Lomba Tata Kelola Manajemen Pelaporan BOS Dikdas	Meningkatnya Perolehan Medali						0	2 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	36	Cerdas Cermat SMP	Meningkatnya Kompetensi Siswa SMP						0	20 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	37	Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Remaja Bagi Siswa SMP	Meningkatnya kualitas penulisan karya ilmiah siswa SMP						0	120 pelatihan		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	38	Pelatihan Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK) SMP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi	Meningkatnya Kompetensi Guru Bimbingan dan Konseling (BK)						0	120 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	39	Lomba Cerdas Terampil (LCT) Paket B	Meningkatnya kompetisi siswa paket B						0	20 Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	40	Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Meningkatnya Perolehan Medali						100	7 medali		1.10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	41	Lomba Karya Kreativitas dan Inovasi (LK2I) Paket B	Meningkatnya Perolehan Medali						0	Medali		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	42	Pelatihan Tenaga Labor Bahasa SMP bekerja sama dengan perguruan tinggi	Meningkatkan Kompetensi Tenaga LaborBahasa SMP						0	150 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	43	Pelatihan Kompetensi Tutor mata pelajaran Paket B	Terpenuhinya kompetensi Tutor Paket B						0	234 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	44	Pelatihan Tenaga Pustakawan SMP bekerja sama dengan perguruan tinggi	Terpenuhinya Pengelola Pustakawan SMP						0	48 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	45	Pengembangan ASESOR Program Induksi Guru Pomula Dikdas	Meningkatnya mutu guru pomula						0	109 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	46	Pelatihan Kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP bekerja sama dengan Perguruan Tinggi	Terpenuhinya kompetensi Guru Mata Pelajaran UN SMP						0	120 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	47	Beasiswa S1 untuk PTK SMP	Jumlah Guru SMP yang menerima Beasiswa						0	120 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	48	Penambahan Ruang Kelas Baru SDN 01 Bonai, Kab. Rokan Hulu	Tersedianya ruang kelas baru						0	3 RKB		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	49	RKB 2 Lantai SD Muhammadiyah 07 Tangkerang Timur Pekanbaru	RKB 2 Lantai SD Muhammadiyah 07 Tangkerang Timur Pekanbaru						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	50	Pembangunan RKB Laboratorium SMP	Tersedianya RKB Laboratorium SMP 1 Atap 017 Desa Rantau						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					Panjang Kecamatan Enok , Kab. Indragiri Hilir										
1	01	24	51	Rehab SD	Terlaksananya Rehab SD 015 Desa Sei. Pasir Putih Kec. Kelayang Kab. Inhu						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	52	Rehab Ruang kelas SMP	Terlaksananya Rehab Ruang kelas SMP 2 Pranap Kec. Pranap Kab. Inhu						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	53	Pembangunan Aula SD	Terlaksananya Pembangunan Aula SD 013 Pintu Gobang Desa Pintu Gobang Kari Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuansing						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	54	Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN	Tersedianya Ruang Kelas Baru SDN 042 Sei. Agung Kec. Tapung Kab. Kampar						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	55	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP						0	637 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	56	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP						0	452 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	57	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP						0	222 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	58	Cipta Pelajar SMP	Terlaksananya Cipta Pelajar SMP						0	104 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	59	Lomba Motifasi Belajar Mandiri SMP Terbuka	Terlaksananya Lomba Motifasi Belajar Mandiri SMP Terbuka						0	60 orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	01	24	60	Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) SMP	Terlaksananya Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR)				0	240 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	61	Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP	Terlaksananya Lomba Karya Jurnalistik Siswa SMP (LKJS) SMP				0	240 Orang		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	62	Rehab SMPN 13 Pekanbaru	Terlaksananya Rehabilitasi SMPN 13 Pekanbaru				0	1 sekolah		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	63	Penambahan Ruang Kelas MDA Al Makruf	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas MDA Al Makruf				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	64	Renovasi DTA Annajah Jl. Srikandi Perum Widya Graha 3 RW 9 Kel. Delima	Terlaksananya Renovasi DTA Annajah Jl. Srikandi Perum Widya Graha 3 RW 9 Kel. Delima				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	65	Peningkatan Pembangunan TPA Nurul Hidayah Jl. Pertanian RT 4 Rw 12	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan TPA Nurul Hidayah Jl. Pertanian RT 4 Rw 12				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	66	Penambahan Ruang Kelas SDIT Nurusalam Jl. Selamat Gg. Mesjid Nurusalam	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas SDIT Nurusalam Jl. Selamat Gg Mesjid Nurusalam				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	67	Penambahan Ruang Kelas MDA Amal Jariah Jl. Diponegoro III	Terlaksananya Penambahan Ruang Kelas MDA Amal Jariah Jl. Diponegoro III				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	68	Penambahan kelas MDA Al Hidayah Jl. Gelora Panam	Terlaksananya Penambahan kelas MDA Al Hidayah Jl. Gelora Panam				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	69	Pembelian Alat Marching Band Lengkap Untuk Madrasah Al Huda Dumai, Jl. Hayam Wuruk No. 3 Kel. Buluh Kasap Kec Dumai Timur Kota Dumai	Terlaksananya Pembelian Alat Marching Band Lengkap Untuk Madrasah Al Huda Dumai, Jl Hayam Wuruk No. 3 Kel. Buluh Kasap Kec Dumai Timur Kota Dumai				0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	70	Pembangunan 1 Lokal, 1 Kantor + Alat Permainan Raudhatul Athfal, (RA) Az-Zahra Marwa Jl. Lintas Timur Km. 18 Kel. Kulim Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan 1 Lokal, 1 Kantor + Alat Permainan Raudhatul Athfal, (RA) Az-Zahra Marwa Jl. Lintas Timur Km. 18 Kel. Kulim Kec Tenayan Raya Kota Pekanbaru			0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	71	Pembangunan Ruang Kantor MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab Kuansing	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kantor MTS Muhammadiyah Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab Kuansing			0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	72	Tpa Al-Muttaqin Jl Purwo Salim RT17 Tanjung Penyebal Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	Terlaksananya Pembangunan Tpa Al-Muttaqin Jl Purwo Salim RT17 Tanjung Penyebal Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai			0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	73	Pembangunan Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) Darul Amal Jl Baung Rw. 08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Madrasah Diniyah Awaliah (MDA) Darul Amal Jl Baung Rw. 08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru			0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	74	PDTA Masjid Aljihad RT. 02 RW. 09 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan PDTA Masjid Aljihad RT. 02 RW. 09 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru			0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	75	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PDTA Al- Mukhlisin Jl. SSQ Desa Sei. Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PDTA Al- Mukhlisin Jl. SSQ Desa Sei. Selari Kec. Bukit Batu Kab. Bengkalis			0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	76	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MDA Al- Furqon Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap, Kab. Inderagiri Hulu	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MDA Al- Furqon Desa Batu Rijal Barat Kec. Peranap, Kab. Inderagiri Hulu							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	77	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MDA Nurul Huda Jl. Ronggo Warsito No. 73 Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MDA Nurul Huda Jl. Ronggo Warsito No. 73 Kota Pekanbaru							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	78	Bantuan Pengadaan Komputer Sekolah 15 Unit Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas, Dumai	Terlaksananya Bantuan Pengadaan Komputer Sekolah 15 Unit Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas, Dumai							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	79	Pembangunan Ruang Belajar 2 Lantai 8 RKB dan 2 Ruang Tempat Mandi Santri Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas	Terlaksananya Pembangunan Ruang Belajar 2 Lantai 8 RKB dan 2 Ruang Tempat Mandi Santri Pondok Pesantren Nurussalam Dumai (Yayasan Haji Abdul Hamid Riau) Jl. Panglima Jambul Kel. Tanjung Palas							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	80	Pembangunan RKB MTs Madrasah Manabiul Ulum Simpang Gaung Kec. Gaung Kab. Inhil	Terlaksananya Pembangunan RKB MTs Madrasah Manabiul Ulum Simpang Gaung Kec. Gaung Kab. Inhil							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	81	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	82	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil.	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) MTs Hidayatul Islamiyah Kab. Inhil							0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	83	Pembangunan MDA Ibtidaiyah, desa Muara Jalai, Kampar Utara, Kampar	Terlaksananya Pembangunan MDA Ibtidaiyah, desa Muara Jalai, Kampar Utara, Kampar						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	84	Pembangunan Lokal SMP Al Hidayah Yayasan Pembina Taman Hidayah Kandis Kab. Siak	Terlaksananya Pembangunan Lokal SMP Al Hidayah Yayasan Pembina Taman Hidayah Kandis Kab. Siak						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	85	Pembangunan Lokal Raudhatul Athfal (RA) Sirojul Ulum, Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar	Terlaksananya Pembangunan Lokal Raudhatul Athfal (RA) Sirojul Ulum, Desa Hangtuah Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	86	Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Raudhatul Althfal dan Madrasah Diniyah Aliah (MDA) Yayasan Al Jamiatul Husna	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru untuk Raudhatul Althfal dan Madrasah Diniyah Aliah (MDA) Yayasan Al Jamiatul Husna						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	87	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Babussalam Pekanbaru Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP Babussalam Pekanbaru Yayasan Syekh Abdul Wahab Rokan Pekanbaru						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	88	Pembangunan Gedung MTS YAPI Kel. Mekar Sari Dumai	Terlaksananya Pembangunan Gedung MTS YAPI Kel. Mekar Sari Dumai						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	89	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Telekomunikasi Jl. Esemka Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) SMP Telekomunikasi Jl. Esemka Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	90	Penyediaan Peralatan Laboratorium IPA/Biologi SMP/MTS	Penyediaan Peralatan Laboratorium IPA/Biologi SMP/MTS						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	24	91	Penyediaan Buku Sejarah Pahlawan Nasional Indonesia Untuk SD/MI	Penyediaan Buku Sejarah Pahlawan Nasional Indonesia Untuk SD/MI						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	24	92	Pengadaan Buku Panduan Sholat Untuk Siswa SD	Tersedianya Buku Panduan Sholat Untuk Siswa SD						0	100%		0.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17		Program Pendidikan Menengah											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	81.33		78.87	79.36	77.58	97.76	79.84	79.84	98.17	
					APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	74.34		70.9	71.57	60.03	83.88	72.26	72.26	97.20	
					APS SMA/MA/SMK/SMALB (16-18 Tahun)	55.18		44.28	46.27	45.94	99.29	48.35	48.35	87.62	
					Rasio murid terhadap guru SMA/MA/SMK/SMALB	27.84		13.84	15.92	14.36	90.19	18.3	18.3	65.73	
					Rasio murid terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	36.06		35.88	35.92	35.56	99.00	35.95	35.95	99.69	
					Rasio Guru terhadap kelas SMA/MA/SMK/SMALB	1.53		2.59	2.33	2.26	97.00	2.1	2.1	72.86	
1	1	17	01	Dukungan Bantuan Siswa Miskin (BSM) SMA/SMK	Jumlah siswa SMA/SMK yang mendapat BSM							612 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa SMA	Jumlah sarana dan prasarana labor bahasa SMA							1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Multimedia dan Perpustakaan SMA	Jumlah sarana dan prasarana labor multimedia dan perpustakaan SMA							1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Sosial SMA	Jumlah sarana dan prasarana labor sosial SMA							1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	17	05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa	Jumlah sarana dan prasarana Labor Bahasa								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	06	Pengadaan Media Pembelajaran SMA	Jumlah Media Pembelajaran SMA								6 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	07	Pengadaan Media Pembelajaran SMK	Jumlah Media Pembelajaran SMK								6 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	08	Pengadaan e-Book untuk tingkat SMA	Jumlah paket e-book SMA								3 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	09	Pengadaan e-Book untuk tingkat SMK	Jumlah paket e-book SMK								3 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	10	Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Provinsi Riau Jenjang SMA/SMK	Jumlah guru yang diberikan pembinaan kurikulum 2013 jenjang SMA/SMK								1200 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	11	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Negeri Plus Provinsi Riau	Jumlah Peserta Didik di SMAN Plus Provinsi Riau								400 orang		2.16%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	12	Penyelenggaraan Pendidikan SMA Olahraga Provinsi Riau	Jumlah Peserta Didik di SMA Olahraga								385 orang		5.50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	13	Pembangunan USB Sekolah Terpadu	Jumlah USB Sekolah Terpadu								1 Unit		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	14	Pembangunan USB SMA Plus Provinsi Riau	Jumlah USB SMA Plus								1 USB		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan Menengah	Jumlah Kab/ Kota Yang mendapatkan Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan								4 Sekolah		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	16	Cerdas Cermat	Jumlah siswa yang mengikuti cerdas cermat								252 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	17	Pelatihan Kompetensi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pembelajaran	Jumlah Guru SMA/SMK yang mengikuti pelatihan								120 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	1	17	18	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMA	Jumlah Laboran yang mengikuti pelatihan								60 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	19	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustakawan SMA	Jumlah Pustakawan yang mengikuti pelatihan								60 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	20	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMA	Jumlah Tenaga Pengawas yang mengikuti pelatihan								60 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	21	Dukungan Pelaksanaan UN/UASBN SMA/MA/SMK	Terlaksananya Pelaksanaan UN/UASBN SMA/MA/SMK Se Provinsi Riau								12 Kab/Kota		23.92 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	22	Pembangunan Hotel Training	Jumlah Hotel Training SMK								1 unit		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	23	Pembangunan Ruang Kelas Baru Untuk SMK 4 Tahun	Jumlah RKB								4 RKB		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Multimedia dan Akuntansi	Jumlah Sarana dan Prasarana Labor Multimedia dan Akuntansi								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Pengawasan Mutu	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Labor Pengawasan Mutu								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	26	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Labor Hama dan Penyakit Tanaman								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Labor Perikanan								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Fisika	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Labor Kultur Fisika								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	29	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Kimia	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Labor Kultur Kimia								1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	1	17	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Labor Biologi	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Labor Kultur Biologi				1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	31	Lomba Guru, Pengawas Berdedikasi dan Berprestasi, Kepala Sekolah Berprestasi serta Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMA/SMK	Jumlah Perolehan Penghargaan				4 medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	32	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Laboran SMK	Jumlah Laboran yang mengikuti pelatihan				40 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	33	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pustaka SMK	Jumlah Pustakawan yang mengikuti pelatihan				40 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	34	Pelatihan Tata Kelola Tenaga Pengawas SMK	Jumlah Tenaga Pengawas yang mengikuti pelatihan				40 orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	35	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Biologi SMA Berbasis IT	Jumlah sarana dan prasarana labor biologi SMA				1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Perhotelan	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Praktek Perhotelan				1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	37	Pengadaan Sarana dan Prasarana Ruang Praktek Tatabusana	Jumlah sarana dan prasarana Ruang Praktek Tatabusana				1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	38	Pengadaan Sarana dan Prasarana SMK di Kab. Rokan Hulu	Tersedianya Sarana dan Prasarana SMK di Kab. Rokan Hulu				3 Sekolah		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	39	Pengadaan Alat Pemberdayaan Virtual 4 Dimensi SMA IPA	Tersedianya Alat Pemberdayaan Virtual 4 Dimensi SMA IPA di Provinsi Riau				100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	40	Pengadaan Ensiklopedia Pendidikan 18 karakter bangsa	Tersedianya Ensiklopedia Pendidikan 18 karakter bangsa untuk SMA di Kampar				100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	1	17	41		Pembangunan Kantor SMK	Terlaksananya Pembangunan Kantor SMK Sampena Jln, Jendral Sudirman Desa Rantau Panjang Kiri, Kec Kubu Labuh Salam, Kab Rokan Hilir					100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	42		Pengadaan peralatan bidang agrobisnis dan agroteknologi SMKN	Tersedianya Pengadaan peralatan bidang agrobisnis dan agroteknologi SMKN 2 Ramba Jl. Diponegoro KM.6 Pasir Pengaraian					100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	43		Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Bahasa.	Jumlah sarana dan prasarana labor bahasa					1 paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	44		Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA					288 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	45		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA					304 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	46		Debat Bahasa Indonesia SMA	Terlaksananya Debat Bahasa Indonesia SMA					64 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	47		Debat bahasa Inggris SMA	Terlaksananya Debat bahasa Inggris SMA					64 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	48		Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA	Terlaksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA					417 Orang		7.70%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	49		Lomba Kreatifitas Siswa SMK (LKS)	Terlaksananya Lomba Kreatifitas Siswa SMK (LKS)					300 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	50		Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK	Terlaksananya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK					504 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	1	17	51	Debat Bahasa Tingkat SMK	Terlaksananya Debat Bahasa Tingkat SMK				164 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	52	Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)	Terlaksananya Olimpiade Sains Terapan Nasional (OSTN)				120 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	53	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK	Terlaksananya Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK				348 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	54	Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	Terselenggaranya Penyediaan biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK				12 kab/kota		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	55	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Terselenggaranya Biaya Operasional SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau				1000 Siswa		4.85%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	56	Penyelenggaraan Pendidikan SMK Perikanan Provinsi Riau	Terselenggaranya Biaya Operasional SMK Perikanan Provinsi Riau				1 Sekolah		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	57	Penyelenggaraan Pendidikan SMK 4 Tahun	Terselenggaranya Biaya Operasional SMK 4 Tahun				9 Sekolah		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	58	RKB SMAN 1 Pekanbaru	Terbangunnya RKB SMAN 1 Pekanbaru				1 sekolah		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	59	Mobiler SMA Yayasan Nurul Falah, Lokasi Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Mobiler SMA Yayasan Nurul Falah, Lokasi Pekanbaru				100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	60	Pengadaan Peralatan Pembelajaran Aplikasi Fisika SMA/SMK di 10 Sekolah, Lokasi Pekabaru	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Pembelajaran Aplikasi Fisika SMA/SMK di 10 Sekolah, Lokasi Pekabaru				100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	1	17	61	Pengadaan Labor Bahasa Arab dan 6 Bahasa lainnya Lokasi Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Labor Bahasa Arab dan 6 Bahasa lainnya Lokasi Pekanbaru							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	62	Pembangunan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Fahrul Islam Jl. Subrantas Sungai Injab Kel. Terkul Kec. Rupert Kab. Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Fahrul Islam Jl Subrantas Sungai Injab Kel. Terkul Kec. Rupert Kab. Bengkalis							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	63	Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) SMK Kesehatan Duri Yayasan Mozera Insan Cendekia, Jl. Siak No.9, Balai Makam, Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) SMK Kesehatan Duri Yayasan Mozera Insan Cendekia, Jl. Siak No.9, Balai Makam, Duri Kec. Mandau Kab Bengkalis							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	64	Pembangunan RKB Lengkap SMA Islam Tibyan Al Ihsan	Terlaksananya Pembangunan RKB Lengkap SMA Islam Tibyan Al Ihsan							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	65	Penyelesaian SMK Teknologi Yayasan Al Hamidiah Aziziah kec. Tambang Kab. Kampar	Terlaksananya Penyelesaian SMK Teknologi Yayasan Al Hamidiah Aziziah kec. Tambang Kab. Kampar							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	66	Pembangunan Kantor dan Meubeler SMK Bina Insan Siak Hulu, Jl. Rezeki Desa Baru Siak Hulu	Terlaksananya Pembangunan Kantor dan Meubeler SMK Bina Insan Siak Hulu, Jl. Rezeki Desa Baru Siak Hulu							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	17	67	Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMA	Terlaksananya pelatihan pelaksanaan Kurikulum 2013 untuk guru mata pelajaran SMA di Provinsi Riau							100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	1	17	68		Pelatihan Pelaksanaan Kurikulum 2013 SMK								100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16			Program wajib belajar pendidikan sembilan tahun		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	01		Penelusuran Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SMP Se- Provinsi Riau		12 kab/kota			12 kab/kota	12 kab/kota	66.67				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	02		Implementasi dan Koordinasi Pelaksanaan serta Pelaporan BOS SD, SMP Se- Provinsi Riau		480 orang			480 orang		50.11				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	03		Pembinaan OSN SMP Se- Provinsi Riau		12 kab/kota			12 kab/kota		74.64				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	04		Peningkatan Sarana dan Prasarana PK dan PLK Provinsi Riau		1 sekolah			1 sekolah		14.59				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	05		Pendidikan Anak Marginal SD dan SMP di Provinsi Riau		216 Guru, 104 Pengelola, 1500 siswa			216 Guru, 104 Pengelola, 1500 siswa		71.12				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	06		Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat Sekolah Dasar		8 keg & 284 orang			8 keg & 284 orang		51.08				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	07		Fasilitasi Peningkatan gedung pusat layanan autis Provinsi Riau		1 sekolah			1 sekolah		16.01				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	08		Pengadaan Meubeler untuk SMP/MTs Se- Provinsi Riau		2 sekolah			2 sekolah		0.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	16	09	Pembangunan Ruang Kelas Baru 3 Lokal Tingkat SD IT Az Ziziyah Yayasan Zakariah	Jumlah Pembangunan RKB SD IT	1 Sekolah			1 Sekolah	1 Sekolah	4.88				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	10	Pengadaan Meubeler untuk SD/MI Se-Provinsi Riau	Jumlah sekolah yang menerima bantuan meubeler	3 sekolah			3 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	11	Pembangunan RKB untuk SD/MI	Jumlah Sekolah yang mendapatkan RKB	4 sekolah			4 sekolah	4 sekolah	6.07				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	12	Pembangunan RKB untuk SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang mendapatkan RKB	4 sekolah			4 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	13	Pengadaan Komputer untuk SD/MI	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan komputer	6 sekolah			6 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	14	Pengadaan Komputer untuk SMP/MTs	Jumlah Sekolah yang mendapatkan bantuan komputer	7 sekolah			7 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	15	Pengadaan Infokus dan Laptop untuk SMP/MTs	Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantuan infokus dan laptop	2 kab			2 kab		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	16	Pembangunan Laboratorium SMP Muhammadiyah 02	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan laboratorium	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	17	Pembangunan Ruang Perpustakaan MTs Al - Hidayah Desa Teluk Tuasan	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan perpustakaan	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	18	Pembangunan Kantor SMP Riau Al - Munawwarah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan ruang kantor	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	19	Pembangunan Lapangan MTs YPI Kuala Enok	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan lapangan	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	16	20	Pembangunan Mushalla Riau Al - Munawwarah	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan pembangunan mushalla	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	21	Pengadaan Buku Kamus Melayu dan Selayang Pandang Pantun dan Bidan Melayu untuk SMP se- Provinsi Riau	Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantuan buku Buku Kamus Melayu dan Selayang Pandang Pantun dan Bidan Melayu	12 kab/kota			12 kab/kota		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	22	Pembangunan RKB Nurul Jadid Pekanbaru	Jumlah Sekolah yang mendapatkan RKB	1 sekolah			1 sekolah	1 sekolah	6				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	23	Pembangunan SD di Desa Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Jumlah Pembangunan SD	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	24	Pengawasan Pembangunan SD Desa Rumbai Pesisir Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan	1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	25	Pembangunan SD di Desa Nelayan Pulau Pendamaran Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Jumlah Pembangunan SD	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	26	Pengawasan Pembangunan SD Desa Nelayan Pulau Pendamaran Kec. Bangko Kab. Rokan Hilir	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan	1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	27	Pengadaan Alat Micro Teaching Sekolah Dasar (SD)	Jumlah paket micro teaching	12 paket			12 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	28	DED Prototype Revitalisasi Sekolah Dasar	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Revitalisasi Sekolah Dasar	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	29	DED Prototype Unit Sekolah Baru SD	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Unit Sekolah Baru SD	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	16	30	DED Prototype Rumah Dinas Guru Marginal Type 45	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Rumah Dinas Guru Marginal Type 45	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	31	DED Prototype Asrama SLB Type 70	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Asrama SLB Type 70	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	32	Pembangunan SMP Islam Terpadu Al-Hafit Yayasan Taman Pendidikan Al Manar Hafit Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan SMP Islam Terpadu Al-Hafit Yayasan Taman Pendidikan Al Manar Hafit Pekanbaru	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	33	Pengawasan SMP Terpadu Al Hafit	Terlaksananya Pengawasan Pembangunan	1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	34	Pengadaan Alat Micro Teaching SMP	Jumlah paket micro teaching	12 paket			12 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	35	DED Prototype Revitalisasi SMP	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Revitalisasi SMP	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	36	DED Prototype Unit Sekolah Baru SMP	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Unit Sekolah Baru SMP	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	37	DED Prototype Asrama SMP	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Asrama SMP	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	38	Pemasangan Water Proofing Gedung Autis Provinsi Riau	Terlaksananya Pemasangan Water Proofing Gedung Autis Provinsi Riau	1 keg			1 keg		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	39	Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum SD	Jumlah peserta Fasilitasi TIM Pengembangan Kurikulum SD	132 orang			132 orang	132 orang	96.25				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	40	Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum SMP	Jumlah peserta Fasilitasi TIM Pengembangan Kurikulum SMP	132 orang			132 orang	132 orang	17.99				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	16	41	Cerdas Cermat SMP	Jumlah peserta Cerdas Cermat SMP						0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	42	Pengadaan Buku Panduan Baca Tulis Al Qur'an Kelas 1 s.d 6	Jumlah Buku Panduan Baca Tulis Al Qur'an Kelas 1 s.d 6	43200 buku			43200 buku		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	43	Pengadaan Buku Panduan Baca Tulis Al Qur'an Kelas 7 s.d 9	Jumlah Buku Panduan Baca Tulis Al Qur'an Kelas 7 s.d 9	21600 buku			21600 buku		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	44	DED Ruang Kelas Baru SMP	Terlaksananya pembuatan DED Ruang Kelas Baru SMP	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	45	DED Labor IPA SMP	Jumlah DED Labor IPA SMP	17 sekolah			17 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	46	DED Labor bahasa SMP	Jumlah DED Labor Bahasa SMP	17 sekolah			17 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	47	DED Labor Komputer	Jumlah DED Labor Komputer	17 sekolah			17 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	48	DED Pustaka SMP	Jumlah DED Pustaka SMP	14 sekolah			14 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	49	Pengembangan Asesor Program Induksi Guru Pemula SMP	Jumlah guru yang mengikuti	250 orang			250 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	50	Pengembangan Karakter Bangsa SMP	Jumlah guru yang mengikuti	250 orang			250 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	51	Pembangunan 8 Lokal SMP Al Manar di Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru 2 Lantai	Jumlah RKB yang dibangun di SMP Al Manar	8 RKB			8 RKB		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	52	Pengadaan Sepeda Untuk Siswa Miskin Tingkat SD di Kota Pekanbaru	Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan sepeda	1500 orang			1500 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	53	Pengadaan Sepeda Untuk Siswa Miskin Tingkat SMP di Kota Pekanbaru	Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan sepeda	1500 orang			1500 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	16	54	Revitalisasi Sekolah Dasar	Jumlah SD yang direvitalisasi							3 sekolah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	55	Revitalisasi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang direvitalisasi							3 sekolah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	56	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SD							1 sekolah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	57	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP	Jumlah Unit Sekolah Baru (USB) SMP							1 sekolah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	58	Pengadaan Sarana dan prasarana Labor IPA SD	Jumlah Sapras Labor IPA SD							3 paket			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	59	Pengadaan Sarana dan prasarana Labor IPA SMP	Jumlah Sapras Labor IPA SMP							3 paket			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	60	Pengadaan Sarana dan prasarana Micro Teaching Dikdas SD	Jumlah Sapras Labor Micro Teaching SD							3 paket			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	61	Pengadaan Sarana dan prasarana Micro Teaching Dikdas SMP	Jumlah Sapras Labor Micro Teaching SMP							3 unit			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	62	Pengadaan Media Pembelajaran SD	Jumlah SD yang Memperoleh Media Pembelajaran							6 paket			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	63	Pengadaan Media Pembelajaran SMP	Jumlah SMP yang Memperoleh Media Pembelajaran							6 paket			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	64	Pengadaan buku Elektronik (e-book) untuk SMP	Jumlah Sekolah yang Memperoleh e-book							3 paket			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	65	Pembinaan minat bakat SD	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional							10 medali			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	66	Pembinaan minat bakat SMP	Jumlah Perolehan Medali Tingkat Nasional							12 medali			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	67	Diklat Tenaga kependidikan SD	Jumlah tenaga laboran yang Mengikuti Diklat perjenjang							36 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
						jumlah pustakawan/i yang mengikuti diklat berjenjang							36 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						jumlah pengawas yang mengikuti diklat berjenjang							60 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	68		Diklat Tenaga kependidikan SMP	Jumlah tenga laboran yang Mengikuti Diklat perjenjang							30 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						jumlah pustakawan/i yang mengikuti diklat berjenjang							40 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						jumlah pengawas yang mengikuti diklat berjenjang							136 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	69		Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SD	Jumlah Guru yang diberikan pembinaan kurikulum jenjang SD							1.200 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	16	70		Pembinaan Pelaksanaan Kurikulum 2013 Jenjang SMP	Jumlah Guru yang diberikan pembinaan kurikulum jenjang SMP							1.200 orang			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05			Program pendidikan menengah / pemerataan akses rintisan wajib belajar 12 tahun	APM SMA/MA, SMA/SMLB dan Paket C	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	02		Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran SMA Olahraga Provinsi Riau	Jumlah Peserta Didik di SMA Olahraga Provinsi Riau	250 orang			250 orang	250 orang	55.73				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	03		Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran SMA Plus Provinsi Riau	Jumlah Peserta Didik di SMA Plus Provinsi Riau	300 orang			300 orang	300 orang	43.05				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	04		Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran Operasional SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Jumlah Peserta Didik di SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	478 orang			478 orang	478 orang	57.83				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	05		Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Ujian Kompetensi SMK	Jumlah kabupaten penyelenggara ujian kompetensi SMK	12 kab/kota			12 kab/kota	12 kab/kota	75.99				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	05	09	Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan dan Olimpiade Sains Teknologi (OSTN) Jenjang SMA Se-Provinsi Riau	Terselenggaranya seleksi OSTN tingkat provinsi dan nasional	12 kab/kota			12 kab/kota		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	10	Pembangunan Sarana dan Prasarana SMA Olahraga dan SMA Plus Provinsi Riau	Terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana	2 sekolah			2 sekolah	2 sekolah	100				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	14	Pengadaan Alat Praktek Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Olimpiade Sains Teknologi Nasional (OSTN)	Tersedianya alat praktek lomba dan olimpiade	1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	15	Pembuatan Pagar Sekolah SMK Pertanian Provinsi Riau	Panjang pagar yang dibangun	2250 m			2250 m		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	16	Rehabilitasi Prasarana SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau	jumlah prasarana SMK Pertanian Terpadu yang direhabilitasi	6 prasarana			6 prasarana		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	22	Pengadaan Digital Library	Jumlah paket digital library	1 paket			1 paket		100.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	25	Pengadaan Alat Praktek olimpiade Sains SMA	Tersedianya alat praktek olimpiade	1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	27	Pelaksanaan Lomba Kreatifitas Siswa SMK Tingkat Provinsi dan Dukungan Pelaksanaan Tingkat Nasional	Terselenggaranya lomba kreatifitas siswa SMK tingkat provinsi dan dukungan pelaksanaan tingkat nasional	12 kab/kota			12 kab/kota		63.89				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	28	Fasilitasi Pembinaan Kesiswaan dan OSTN Jenjang SMK Se Provinsi	Terselenggaranya pembinaan kesiswaan dan OSTN jenjang SMK	12 kab/kota			12 kab/kota		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	30	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Yayasan Masmur Pekanbaru	Terselenggaranya pembangunan RKB Yayasan Masmur	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	31	Pengadaan Peralatan Multimedia SMKN Terpadu Provinsi Riau	Tersedianya peralatan multimedia SMKN Terpadu Provinsi Riau	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	05	32	Pengadaan Alat Laboratorium Biologi SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Tersedianya Alat Laboratorium Biologi SMKN Terpadu Provinsi Riau	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	33	Pengadaan Peralatan THP SMKN Pertanian Terpadu Provinsi Riau	Tersedianya peralatan THP SMKN Terpadu Provinsi Riau	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	34	Pengadaan Alat Musik Tradisional dan Modern SMAN Plus Provinsi Riau	Tersedianya Alat Musik Tradisional dan Modern SMAN Plus Provinsi Riau	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	35	Pembangunan Labor IPA MA Muhammadiyah Pekanbaru	Terselenggaranya pembangunan Labor IPA MA Muhammadiyah Pekanbaru	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	38	Pengadaan Buku Penunjang pendidikan Berkarakter Imtaq dan Iptek untuk Pustaka SMA/MA Se Provinsi Riau	Tersedianya Buku Penunjang pendidikan Berkarakter Imtaq dan Iptek untuk Pustaka SMA/MA Se Provinsi Riau	1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	39	Pengadaan Peralatan IPA Berbasis WIFI Sensorik untuk SMU Kab. Bengkalis	Tersedianya Peralatan IPA Berbasis WIFI Sensorik untuk SMU Kab. Bengkalis	1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	40	Pembangunan Laboratorium MA Hasanah	Terselenggaranya pembangunan Laboratorium MA Hasanah	1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	45	Integration Central System SMA/SMK dan SMP/MTs	Tersedianya Integration Central System SMA/SMK dan SMP/MTs	2 sekolah			2 sekolah	2 sekolah	66.41%				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	46	Pengadaan Laboratorium Bahasa Multi Study berbasis SMS Center untuk SMA/SMK (Bengkalis, Meranti & Dumai)	Jumlah kabupaten penerima bantuan laboratorium bahasa multi study	3 kab/kota			3 kab/kota		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	47	Pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Bertingkat 2 SMA Babussalam Yayasan Svekh Abdul Wahab Rokan -Pekanbaru	Terselenggaranya pembangunan Gedung Ruang Kelas Baru Bertinokat 2 SMA Babussalam	1 sekolah			1 sekolah	1 sekolah	3.34				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	05	48	Pembangunan RKB dan WC MA Yayasan Islam Ar- Raudhah Indragiri	Terselenggaranya pembangunan RKB dan WC MA Yayasan Islam Ar- Raudhah Indragiri		1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	49	Pengadaan Peralatan Praktek untuk SMK Bina Profesi Pekanbaru	Tersedianya Peralatan Praktek untuk SMK Bina Profesi Pekanbaru		1 sekolah			1 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	51	Pengadaan Peralatan Pratikum SMK Otomotif - Autotronics	Jumlah sekolah penerima peralatan pratikum SMK Otomotif		3 sekolah			3 sekolah		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	54	Tersedianya Alat Micro Teaching untuk SMA	Jumlah Paket Alat Micro Teaching untuk SMA		12 paket			12 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	55	DED Prototype Boarding School	Jumlah DED Prototype Boarding School		1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	56	Pengadaan Meubiler SMA Plus Provinsi Riau	Tersedianya Meubiler SMA Plus Provinsi Riau		1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	57	Pengadaan Meubiler Pesantren Teknologi Provinsi Riau	Tersedianya Meubiler Pesantren Teknologi Provinsi Riau		1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	58	Ruang Kelas Baru SMK Teknologi Provinsi Riau	Jumlah RKB yang dibangun di SMK Teknologi		6 RKB			6 RKB		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	59	DED Prototype Hotel Training SMK 2 Taluk Kuantan	Jumlah DED Prototype Hotel Training SMK 2 Taluk Kuantan		1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	60	DED Prototype Unit Sekolah Baru SMK	Jumlah DED Prototype Unit Sekolah Baru SMK		1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	61	DED Prototype Unit Sekolah Baru SMA	Jumlah DED Prototype Unit Sekolah Baru SMA		1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	62	DED Prototype Sekolah Terpadu	Jumlah DED Prototype Sekolah Terpadu		1 lap			1 lap		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	63	Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Otomotif	Jumlah Sarana dan Prasarana Workshop Otomotif		1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	01	05	64	Pengadaan Sarana dan Prasarana Workshop Listrik	Jumlah Sarana dan Prasarana Workshop Listrik	2 paket		2 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	65	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kimia Industri	Jumlah Sarana dan Prasarana Kimia Industri	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	66	Pengadaan Sarana dan Prasarana Metatronika	Jumlah Sarana dan Prasarana Kimia Industri	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	67	Pengadaan Sarana dan Prasarana Multimedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Multimedia	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	68	Pengadaan Sarana dan Prasarana Labor Jasa Pariwisata (Traveling)	Jumlah Sarana dan Prasarana Labor Jasa Pariwisata (Traveling)	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	69	Pengadaan Sarana dan Prasarana Marketing	Jumlah Sarana dan Prasarana Marketing	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	70	Pengadaan Sarana dan Prasarana Seni rupa	Jumlah Sarana dan Prasarana Seni rupa	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	71	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerajinan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kerajinan	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	72	Perencanaan Revitalisasi SMAN 2 Pekanbaru (Prototype)	Jumlah Dokumen Perencanaan Revitalisasi SMAN 2 Pekanbaru (Prototype)	1 dok		1 dok		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	73	Perencanaan Revitalisasi SMKN 2 Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Revitalisasi SMKN 2 Pekanbaru	1 dok		1 dok		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	74	Perencanaan Revitalisasi SMKN 3 Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Revitalisasi SMKN 3 Pekanbaru	1 dok		1 dok		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	75	Perencanaan Revitalisasi SMKN 4 Pekanbaru	Jumlah Dokumen Perencanaan Revitalisasi SMKN 4 Pekanbaru	1 dok		1 dok		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	76	Pengadaan Peralatan Laboratorium IPA	Jumlah Peralatan Lab IPA	1 paket		1 paket		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	05	77	Pengadaan Peralatan Laboratorium Kimia	Jumlah Peralatan Lab Kimia		1 paket			1 paket		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	78	Pembangunan 1 Unit Gedung SMA Negeri 8 Lokal, 2 Lantai di Okura,Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru	Jumlah gedung, RKB, yang dibangun di SMP N 8 Pekanbaru		1 gedung, 8 RKB, 2 lantai			1 gedung, 8 RKB, 2 lantai		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	79	Pelaksanaan Pengembangan Kurikulum SMA dan SMK	Jumlah peserta Fasilitasi TIM Pengembangan Kurikulum SMA		150 orang			150 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	80	Cerdas Cermat SMA dan SMK	Jumlah Kabupaten Peserta		12 kab/kota			12 kab/kota		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	81	Pengadaan Sepeda Untuk Siswa Miskin Tingkat SMA di Kota Pekanbaru	Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan sepeda		1000 orang			1000 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	05	82	Pengadaan Sepeda Untuk Siswa Miskin Tingkat SMK di Kota Pekanbaru	Jumlah siswa miskin yang mendapat bantuan sepeda		1000 orang			1000 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06		Program : peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	01	Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Sekretariat Tim Penetapan Angka Kredit (PAK) Guru Tingkat Provinsi		12	kab/ko ta	0.00	12	12	41.92	7	19	158.33333	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	02	Diklat Uji Kompetensi Guru PAUD Formal Dan Non Formal Se Provinsi Riau	Terlaksananya Diklat Uji Kompetensi Guru PAUD Formal dan Non Formal se Provinsi Riau		12	kab/ko ta	0.00	12	0	0	6.96	6.96	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	03	Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD	Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Pendidik PAUD		12	kab/ko ta	0.00	12	0	0	6.96	6.96	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	04	Beasiswa Pendidikan S1 Bagi Guru PAUD Se Provinsi Riau (Lanjutan)	Jumlah guru PAUD penerima beasiswa S1		480	orang	0.00	480	471	98.12	9	480.00	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	06	05	Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		80	orang	0.00	80 orang	0	0.00	46.4	46.4	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	06	Diklat Tingkat Dasar Tenaga Pendidik PAUD	Jumlah guru yang mengikuti pendidikan lanjutan		199	orang	0.00	199 orang	89	44.77	110	199	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	07	Pendidikan Lanjutan Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi Tenaga Pendidikan Dan Kependidikan	Jumlah guru yang mengikuti Diklat Tingkat Dasar		80	orang	0.00	80	0	0.00	46.4	46.4	58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	06	08	Pemberian Apresiasi Bagi PTK-PAUDNI Berprestasi Tingkat Provinsi Riau	jumlah peserta dan lomba		204 , 15	orang, lomba	0.00	204 , 15	150, 11	73.53	54, 4	204 , 15	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	07		Program : peningkatan mutu kurikulum	Penguatan kurikulum pada mata pelajaran tertentu di 12 Kab/Kota		N/A		12 Kab/Kota	12 Kab / Kota	12 Kab/Kota	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	07	01	Review Kurikulum Muatan Lokal	Terselenggaranya Review Kurikulum Muatan Lokal		12 kab/kota		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100	N/A	N/A	N/A	
1	01	08		Program : pemerataan dan perluasan akses, mutu, relevansi dan daya saing di semua jenjang pendidikan	Penguatan dan daya saing di semua jenjang pendidikan di 12 Kab/Kota		N/A		12 Kab/Kota	12 Kab / Kota	12 Kab/Kota	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	01	Pengadaan Kalender Pendidikan Provinsi Riau	Jumlah Kalender Pendidikan		12500 buah				12500 buah	75.76				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	02	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Terbitnya Jurnal Pendidikan							0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	03	Dukungan pelaksanaan UN/UASBN SLB, SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	Terlaksananya pelaksanaan UN		12 kab/kota					98.05				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	04	Pemberian Penghargaan kepada siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi se-Provinsi Riau	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada siswa, tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi		12 kab/kota				12 kab/kota	6.99				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)				Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018			Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
													Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12								
1	01	08	05	Pengembangan dan Pengelolaan Database Pendidikan	Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	12 kab/kota								12 kab/kota	7.67				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	06	Liga Pendidikan Indonesia	Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia	12 kab/kota								12 kab/kota	39.79				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	07	Pemeliharaan Pengelolaan Alat Studio dan Laboratorium Komputer pada UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan	Terlaksananya Pemeliharaan alat studio dan laboratorium komputer	1 UPT								1 UPT	49.75				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	08	Penyediaan Jarkit Riau dan Alat TIK bagi UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan se Provinsi Riau	Terkoneksinya UPT Teknologi dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau	1 kegiatan								1 kegiatan	33.87				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	09	Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Partisipasi terhadap Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah	Terselenggaranya partisipasi terhadap hari besar nasional dan daerah	12 kab/kota								12 kab/kota	26.02				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	10	Penyediaan Biaya Pelaksanaan OSN Guru Se-Provinsi Riau	Terselenggaranya OSN Guru se Provinsi Riau	12 kab / kota								12 kab/kota	23.42				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	11	Pengembangan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa SD/MI	Terselenggaranya 6 perlombaan agenda tahunan Kemendikbud	12 kab / kota								12 kab/kota	51.17				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	12	Pembinaan Minat dan Bakat Murid PK dan PLK	Jumlah murid yang mengikuti	542 orang								542 orang	41.97				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	13	Pembinaan Minat dan Bakat Guru dan Murid TK	Jumlah guru dan murid yang mengikuti	396 orang								396 orang	42.07				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	14	Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMA dan MA	Jumlah kegiatan yang terlaksana	5 kegiatan								5 kegiatan	48.06				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	15	Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa SMK	Jumlah siswa SMK yang mengikuti	900 org								900 org	100.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	16	KI Hajar AWARD Tingkat Provinsi	Terselenggaranya even KI Hajar Award Tingkat Provinsi	12 kab / kota								12 kab/kota	3.66				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	08	17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/Kegiatan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Program/Kegiatan	12 kab/kota				12 kab/kota	18.10				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	18	Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya perencanaan dan penyusunan program/kegiatan	12 kab/kota					7.00				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	19	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Profesionalisme dan Tenaga Kependidikan Guna Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang mengikuti	300 org				300 org	55.76				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	20	In House Training Peningkatan Kualitas Guru dan Pemanfaatan SMA Plus dan SMA Olahraga Provinsi	Jumlah sekolah yang mengikuti inhouse training	2 sekolah					0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	08	21	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Terlaksananya publikasi informasi pendidikan	12 kab/kota					0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09		Program : pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi	Dukungan sarana dan prasarana PTN dan PTS serta fasilitasi akses PT terkemuka	N/A		10 PTN/PTS	10 PTN/PTS	10 PTN/PTS	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	01	Penyediaan Biaya Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka Nasional	Jumlah mahasiswa yang mengikuti	324	orang		324	324	100.00		324	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	02	Penyediaan Biaya Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Fakultas Kedokteran Universitas Riau	Jumlah mahasiswa yang mengikuti	36	orang		36	36	100.00		36	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	03	Penyediaan Biaya Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi pada Perguruan Tinggi Terkemuka di Malaysia	Jumlah mahasiswa yang mengikuti	100	orang		100	100	100.00		100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	04	Penyediaan Biaya Fasilitasi Masuk Tamatan SLTA Berprestasi dan Lanjutan Program S1 pada FKIP UNRI, FTK UIN, FKIP UIR dan FKIP Unilak	Jumlah mahasiswa yang mengikuti	1000	orang		1000	1000	100.00		1000	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	09	05	Penyediaan Biaya Pendidikan Program S1 Muatan Lokal Budaya Melayu pada UNILAK	Jumlah mahasiswa yang mengikuti						0.00		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	06	Dukungan Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat dukungan sarana dan prasarana	23	PT				0.00	23	23	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	09	Dukungan Fasilitas Masuk Bagi Tamatan SLTA Berprestasi Program S1 pada Akademi Kesenian Melayu Riau	Jumlah mahasiswa yang mengikuti						0.00		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	24	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Strata-2 dan Strata-3 Dalam dan Luar Negeri	Jumlah mahasiswa yang mengikuti	100	orang				0.00	100	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	25	Pembangunan Lanjutan Gedung III Fakultas Hukum Unilak	Terlaksananya pembangunan lanjutan	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	26	Renovasi Atap Parkir Fakultas Hukum Unilak	Terlaksananya renovasi atap parkir	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	27	Pembangunan Lanjutan Fakultas Ilmu Komputer Unilak	Terlaksananya pembangunan lanjutan	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	28	Pembangunan Turab Fakultas Ilmu Administrasi Unilak	Terlaksananya pembangunan turab	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	29	Renovasi Paving Blok Fak Ilmu Adm Unilak	Terlaksananya renovasi paving blok	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	30	Pembangunan Lanjutan Ruang Belajar Fakultas Ilmu Adm Unilak	Terlaksananya pembangunan lanjutan	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	31	DED Prototype Asrama Mahasiswa PCR	Terlaksananya pembuatan DED Prototype Asrama Mahasiswa	1	fakultas				0.00	1	1	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	09	32	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah mahasiswa yang mengikuti						0		0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	10		Program : pengembangan pendidikan karakter dan budaya	Diklat dan Workshop semua jenjang pendidikan di 12 Kab/Kota	N/A		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	10 PTN/PTS	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	10	01	Kegiatan Parade Cinta Tanah Air (PCTA)	Jumlah kegiatan parade	1 keg			1 keg	0	0	N/A	N/A	N/A	
1	01	25		Program Pembangunan Sekolah Terpadu		N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SD/MI/SDLB/Paket A	118.51		0	115.206	0.00	0.00	116.06	116.06	97.94	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMP/MTs/SMPLB/ Paket B	108.36		0	106.18	0.00	0.00	106.72	106.72	98.49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	74.34		0	70.28	0.00	0.00	71.29	71.29	95.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	25	01	Pembangunan Sekolah Terpadu Kab. Rohil	Pembangunan Sekolah Baru di daerah terpencil							1 Unit			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26		Program Pendidikan Khusus Layanan Khusus											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SD/MI/SDLB/Paket A	118.51		0	115.206	0.00	0.00	118.51	118.51	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APM SD/MI/SDLB/Paket A	99.85		0	97.71	0.00	0.00	99.85	99.85	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	108.36		0	106.18	0.00	0.00	108.36	108.36	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B	98.5		0	95.9	0.00	0.00	98.5	98.50	100.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	91.92		0	89	0.00	0.00	89.73	89.73	97.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	74.34		0	70.28	0.00	0.00	71.29	71.29	95.90	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	01	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SLB	Tersedianya RKB di Sekolah SLB							9 Ruang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	02	Recruitment Pendidik PK-LK	Tersedianya tenaga pendidik di bidang PKLK							10 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	03	Recruitment Tenaga Pustakawan PKLK	Tersedianya tenaga pustakawan di bidang PKLK							6 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	04	Recruitment Tenaga Teknis berkebutuhan khusus	Tersedianya tenaga Teknis berkebutuhan khusus di bidang PKLK							6 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	05	Beasiswa S1 untuk tenaga pendidik PK-LK	Bantuan beasiswa bai tenaga pendidik/guru PKLK							20 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	06	Pengadaan Sarana Prasarana Labor Komputer SLB	Tersedianya peralatan lengkap di Labor Komputer SLB							3 Set		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	07	Pengadaan Sarana Prasarana Alat Bantu Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) SLB	Tersedianya Peralatan untuk Alat Bantu Berkebutuhan Khusus SLB							3 Set		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga SLB	Tersedianya Peralatan Olahraga di SLB							3 Set		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan SLB	Tersedianya Sarana dan prasarana perpustakaan di SLB							3 Set		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Media Pembelajaran SLB	Tersedianya Media Pembelajaran SLB							3 Set		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Seni SLB	Tersedianya Peralatan Seni di SLB							3 Set		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	12	Pelatihan Tenaga Kependidikan SLB	Guru Sekolah Luar Biasa							64 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	13	Pelatihan Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan	Guru PKLK							30 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	26	14	Honor Guru SD Marginal	Guru SD Marginal di 10 Kabupaten/kota se Provinsi Riau				208 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	15	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi guru marginal	Tersedianya Rumah Layak Huni bagi Guru Marginal di 10 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau				27 Unit		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	16	Pengadaan Solar Cell untuk rumah layak huni	Tersedianya Solar Cell bagi rumah layak huni di daerah terpencil				27 Unit		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	17	Penyelenggaraan Pelatihan Pusat Layanan Autis provinsi Riau	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Pusat Layanan Autis provinsi Riau				12 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	18	Sosialisasi Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Sekolah PKLK				60 Kali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Meningkatnya Sarana dan Prasaran di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau				1 Paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	20	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Meningkatnya SDM di Pusata Layana Autis Provinsi Riau				25 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	21	Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Autis	Meningkatnya Pusat Layanan Autis				1 Kali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	22	Pendampingan Kurikulum 2013 PKLK	Sekolah PKLK se Provinsi Riau				60 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	23	Lomba Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi SDLB	Pengawas SDLB yang Berprestasi dan Berdedikasi				3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	24	Lomba Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi SMPLB	Pengawas SMPLB yang Berprestasi dan Berdedikasi				3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	25	Lomba Pengawas Berprestasi dan Berdedikasi SMALB	Pengawas SMALB yang Berprestasi dan Berdedikasi				3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	26	Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SDLB	Guru SDLB yang Berprestasi dan Berdedikasi				3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)				Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018			Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
													Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	01	26	27	Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SMPLB	Guru SMPLB yang Berprestasi dan Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	28	Lomba Guru Berprestasi dan Berdedikasi SMALB	Guru SMALB yang Berprestasi dan Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	29	Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SDLB	Kepala Sekolah SDLB yang Berprestasi dan Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	30	Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SMPLB	Kepala Sekolah SMPLB yang Berprestasi dan Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	31	Lomba Kepala Sekolah Berprestasi SMALB	Kepala Sekolah SMALB yang Berprestasi dan Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	32	Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SDLB	Pengawas Daerah Terpencil SDLB yang Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	33	Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMPLB	Pengawas Daerah Terpencil SMPLB yang Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	34	Lomba Pengawas Berdedikasi Daerah Terpencil SMALB	Pengawas Daerah Terpencil SMALB yang Berdedikasi											3 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	35	Peningkatan Tata Kelola Pengawas PKLK	Pengawas PKLK											12 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	36	Tata Kelola Kepala Sekolah PKLK	Kepala Sekolah SLB Se Provinsi Riau											35 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	37	Diklat PTK Marginal	Guru Huni dan Pengelola Marginal di 12 Kabupaten/Kota											208 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	38	Monitoring dan Evaluasi Tata Kelola Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Sekolah SLB Se Provinsi Riau											12 kab/kota		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	39	Pengadaan Alat Tulis untuk Kelompok Belajar Marginal	Pokjar Marginal di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau											77 Pokja		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab		
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)			
1				2		3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	26	40	Pengadaan Kelengkapan Sekolah Siswa SD Marginal	Kelengkapan Sekolah Siswa SD Marginal									1750 Paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	41	Pengadaan pakaian Dinas Guru Huni SD Marginal	Pakaian Bagi Guru Huni SD Marginal									208 Paket		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	42	Jambore Anak Berkebutuhan Khusus	Siswa Pramuka Sekolah Luar Biasa									8 stel		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	43	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) PKLK	Siswa PKLK									5 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	44	Olimpiade Sains Nasional (OSN) PKLK	Siswa PKLK									5 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	45	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) PKLK	Siswa PKLK									5 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	46	Lomba CIBI Pelajar PKLK	Siswa PKLK									5 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	47	Lomba Gebyar PKLK	Siswa dan Guru PKLK									1 Medali		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	48	Lomba Unit Kesehatan Sekolah (UKS) PKLK	Sekolah PKLK se Provinsi Riau									6 Sekolah		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	49	Pengadaan Kendaraan Operasional Pusat Layanan Autis Provinsi Riau	Tersedianya Kendaraan Operasional di Pusat Layanan Autis Provinsi Riau									2 Unit		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	26	50	Pelaksanaan Ujian Sekolah SDLB, Ujian Nasional SMPLB dan SMALB	Peningkatan Mutu Siswa SDLB, SMPLB dan SMALB									250 Ijazah		11.64 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23		Program Pendidikan Tinggi													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					APK Pendidikan Tinggi (PT)	28.73		0	26.33	0	0.00	26.93	26.93	93.73			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	01	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Dalam Provinsi Riau	Jumlah Tamatan SLTA yang mendapat beasiswa						12.00	3195 Orang		28.76 %			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 01 23 02	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Nasional	Jumlah Tamatan SLTA yang mendapat beasiswa						91.12	394 Orang		42.09 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 03	Beasiswa Tamatan SLTA Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri	Jumlah Tamatan SLTA yang mendapat beasiswa						0.00	68 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 04	Beasiswa pelatihan profesi bagi tamatan SLTA	Jumlah tamatan SLTA yang mendapat beasiswa pelatihan profesi.						0.00	2 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 05	Beasiswa bidik misi S1 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Jumlah Mahasiswa S1 yang mendapat beasiswa bidik misi.						0.00	200 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 06	Beasiswa bidik misi S2 untuk Ekonomi Kurang Mampu	Jumlah Mahasiswa S2 yang mendapat beasiswa bidik misi.						0.00	200 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 07	Kualifikasi S1 Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang meningkat Kualifikasinya						0.00	460 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 08	Kualifikasi S2 Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang meningkat Kualifikasinya						0.00	426 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 09	Kualifikasi S3 Bagi Tenaga Pendidik	Jumlah Tenaga Pendidik yang meningkat Kualifikasinya						0.00	60 Orang		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 10	Dukungan sarana dan Prasarana Alat Kesehatan Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi Yang mendapat Dukungan Sarana dan Prasarana Kesehatan						0.00	3 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 11	Penyediaan sarana dan Prasarana Workshop Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi Yang mendapat Dukungan Sarana dan Prasarana Workshop						0.00	2 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 01 23 12	Dukungan sarana dan Prasarana Komputer Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi Yang mendapat Dukungan Sarana dan Prasarana Komputer						0.00	5 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	23	13	Penyediaan sarana dan Prasarana Peralatan Olahraga Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi Yang mendapat Dukungan Sarana dan Prasarana Peralatan Olahraga						0.00	1 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	14	Dukungan sarana dan Prasarana Peralatan Kesenian Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi Yang mendapat Dukungan Sarana dan Prasarana Peralatan Kesenian						0.00	1 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	15	Dukungan sarana dan Prasarana Peralatan Elektronik Perguruan Tinggi di Provinsi Riau	Jumlah Perguruan Tinggi Yang mendapat Dukungan Sarana dan Prasarana Elektronik						0.00	5 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	16	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah Akademi yang terselenggara						0.00	1 PT		4.04%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	17	Pengadaan Alat Praktek fakultas Kedokteran Universitas Riau	Tersedianya Alat Praktek Fakultas Kedokteran Universitas Riau						0.00	1 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	18	Pengadaan Buku Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Riau	Tersedianya Buku Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Riau						0.00	1 PT		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	23	19	Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Bertingkat (2 Lantai) Sekolah Tinggi Sains Qur'an (STSQ) Riau Al Munawarah Jl. Riau Al Munawarah No. 9 Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Bertingkat (2 Lantai) Sekolah Tinggi Sains Qur'an (STSQ) Riau Al Munawarah Jl. Riau Al Munawarah No. 9 Kel. Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru						0.00	100%		0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27		Program Pendidikan Non formal dan Informal											Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Angka Melek Huruf			97.79							
					Persentase lembaga kursus yang terakreditasi			50							

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	27	01	Pembinaan Pramuka Pendidikan Nonformal dan Informal se Provinsi Riau	Jumlah Peserta Pembinaan Pramuka	300 orang				300 orang	0	0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	02	Bimbingan Teknis Organisasi Mitra PAUD	Peningkatan Kinerja organisasi Mitra PAUD	12 kab/kota				12 kab/kota	12 kab/kota	75.97				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	03	Pembelajaran Keaksaraan Fungsional	Jumlah Peserta Pembelajaran Keaksaraan Fungsional	840 orang				840 orang	840 orang	70.27				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	04	Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C	Jumlah Siswa Paket A, B, C	2500 orang				2500 orang	2500 orang	48.66				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	05	Diklat Pengembangan Model	Jumlah Pamong Belajar yang mengikuti Diklat	40 orang				40 orang	40 orang	62.29				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	06	Sosialisasi pembentukan PAUD	Terlaksananya Sosialisasi Pembentukan PAUD	12 kab/kota				12 kab/kota	12 kab/kota	71.99				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	07	Diklat Penilik PAUD	Jumlah Penilik PAUD	40 orang				40 orang	40 orang	55.77				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	08	Training of Trainers Diklat Tingkat Dasar	Terlaksananya Training of Trainers Diklat Tingkat Dasar	12 kab/kota				12 kab/kota	12 kab/kota	71.65				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	09	Workshop Parenting Pendidikan Anak Usia Dini	Terlaksananya Workshop Parenting Pendidikan Anak Usia Dini	12 kab/kota				12 kab/kota		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	10	Peningkatan mutu pendidikan PKBM di Provinsi Riau	Jumlah Peserta	240 orang				240 orang	240 orang	77.34				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	11	Pengembangan Kelembagaan PAUD se Provinsi Riau	Jumlah PAUD yang mendapat dukungan	200 PAUD				200 PAUD	200 PAUD	6.647				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	12	Peningkatan Mutu Lembaga Kursus dan pelatihan (LKP) se Provinsi Riau	Jumlah Peserta	240 orang				240 orang		0				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	13	Sosialisasi pembelajaran PAUD berbasis Melayu	Terlaksananya Sosialisasi Pembelajaran PAUD Berbasis Melayu	12 kab/kota				12 kab/kota	12 kab/kota	39.09				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	14	Sosialisasi POS Paud di Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi POS Paud	12 kab/kota				12 kab/kota	12 kab/kota	91.18				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	01	27	15	Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain "PAUD HARAPAN" UPT. P3NFI Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Jumlah Pamong PAUD HARAPAN	70 orang		70 orang	70 orang	26.06			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	16	Diklat Komputer	Jumlah Peserta Diklat	60 orang		60 orang		0.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	17	Pengembangan Satu Desa Satu PAUD Se-Provinsi Riau	Terwujudnya Kader PAUDNI di Provinsi Riau	12 kab/kota		12 kab/kota	12 kab/kota	19.72			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	18	Pengadaan Komputer, Infocus dan Printer untuk Riau Education Centre Pekanbaru	Terlaksananya Pengadaan Komputer, Infocus, Printer	1 paket		1 paket	1 paket	2.23			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	19	Pengadaan Alat SLB Pembina Pekanbaru	Jumlah SLB yang mendapat bantuan	1 SLB		1 SLB		0.00			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	20	Pembangunan gedung Bimbel ALMA	Jumlah rkb	1 rkb		1 rkb	1 rkb	9.10			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	21	Pembangunan RKB untuk PAUD Bunayya kel. Simpang Tiga kec. Bukit raya Pekanbaru	Jumlah RKB	8 rkb		8 rkb	8 rkb	2.17			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	22	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD Bunga Anggrek Kuala Lahang Kec. Gaung	Tersedianya Sarana dan Prasarana PAUD Bunga Anggrek	1 paket		1 paket		21.6			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	23	Bantuan APE PAUD Seroja Desa Harapan Tani	Tersedianya bantuan APE PAUD Seroja Desa Harapan Tani	1 paket		1 paket		84.2			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	24	Bantuan APE PAUD Lapanza Teluk Pinang Kec. GAS	Tersedianya bantuan APE PAUD Lapanza Teluk Pinang Kec. GAS	1 paket		1 paket		36.545			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	25	Pembangunan 2 unit RKB dan Meubeleur PDTA Miftahul Jannah	Jumlah RKB	2 rkb		2 rkb		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	26	Pengadaan RKB 2 Lokal Desa Sungai Raya Kec. Batang Tuaka	Jumlah RKB	2 rkb		2 rkb		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	27	Pembangunan Turap PDTA Nurul Hidayah	Terlaksananya pembangunan turap	1 sekolah		1 sekolah		0			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	27	28	DED Prototype PAUD Holistik	Jumlah DED Prototype PAUD Holistik	1 lap			1 lap		12.09				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	29	PUG Gender Bidang Pendidikan	Jumlah PUG Gender	1 lap			1 lap		73.97				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	30	Pengadaan APE PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat APE	170 lembaga			170 lembaga		12.58				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	31	Pengadaan Buku Ensiklopedia Pramuka	Jumlah Buku Ensiklopedia	780 buku			780 buku	780 buku	1.97				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	32	Pengadaan alat-alat Praktek kursus dan pelatihan	Terlaksananya Pengadaan Alat - Alat Praktek Kursus dan Pelatihan di 24 Lembaga							24 Lembaga	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	33	Apresiasi PTK-PAUDNI	Terlaksananya Apresiasi PTK - PAUDNI sebanyak 17 Lomba untuk 204 Orang							204 Orang	75	11.64 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	34	Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus	Peningkatan Kompetensi Instruktur Kursus untuk 24 Orang di 12 Kab/Kota							24 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	35	Sertifikasi kursus komputer	Terlaksananya Program Kursus dan Pelatihan yang disertifikasi dibidang komputer untuk 12 Orang di SKB							1 Kab/Kota	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	36	Sertifikasi kursus menjahit	Terlaksananya Program Kursus dan Pelatihan yang disertifikasi dibidang komputer untuk 12 Orang di SKB							1 Kab/Kota	15	0.17%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	37	Sertifikasi kursus TRP dan salon	Terlaksananya Program Kursus dan Pelatihan yang disertifikasi dibidang komputer untuk 12 Orang di SKB							1 Kab/Kota	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	27	38	Apresiasi peserta warga belajar PNFI	Terlaksananya Apresiasi peserta warga belajar PNFI sebanyak 4 Lomba untuk 48 Orang				48 Orang	15	4.47%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	39	Pengadaan alat -alat pembelajaran	Terlaksananya Pengadaan Alat - Alat Pembelajaran di 2 SKB				2 SKB	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	40	Pembangunan TBM Percontohan di daerah 3T	Terbangunnya TBM Percontohan di daerah 3T di 3 Kab/Kota				3 Kab/ Kota	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	41	Pengadaan mobiler	Terlaksananya Pengadaan Meubilier di 2 SKB				2 SKB	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	42	Bantuan honor tutor Keaksaraan	Terbantunya Honor Tutor Keaksaraan sebanyak 1000 Orang pada 12 Kab/Kota				1,000 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	43	Pengarustamaan Gender bidang pendidikan	Tersebaranya Informasi tentang Pengarustamaan Gender bidang Pendidikan sebanyak 40 Orang				40 Orang	0	84.58 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	44	Pengadaan komputer untuk PKBM	Terlaksananya Pengadaan Komputer untuk PKBM di 80 Lembaga				80 Lembaga	15	4.94%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	45	Pengadaan Fasilitas Kantor untuk 4 SKB	Tersedianya Fasilitas Kantor untuk 4 SKB				4 SKB	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	46	Fasilitasi Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C	Terlaksananya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, B dan C				12 Kab/ Kota	65	15.85 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	47	Peningkatan kualifikasi PTK pendidkan masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualifikasi PTK Pendidikan Masyarakat untuk S2 sebanyak 40 Orang				40 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	48	Kompetensi tutor keaksaraan fungsional	Terlaksananya Kompetensi Tutor Keaksaraan Fungsional sebanyak 100 Orang				100 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	27	49	Pengadaan buku TBM	Terlaksananya Pengadaan Buku TBM di 90 TBM pada 12 Kab/Kota							90 TBM	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	50	Pengadaan alat-alat praktek kepramukaan	Terlaksananya Pengadaan Alat - Alat Praktek Kepramukaan di 3 Kab/Kota							3 Kab/Kota	15	0.12%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	51	Pembinaan kepramukaan berjenjang	Terlaksananya Pembinaan Kepramukaan Berjenjang sebanyak 180 Orang							180 Orang	0	90.02 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	52	Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal dan Informal	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendidikan Non Formal dan Informal							12 Kab/Kota	15	1.29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	53	Penyebaran Informasi PNFI	Tersebarannya Penyebaran Informasi PNFI melalui Media Cetak, Media Elektronik, Leaflet dan Booklet pada 12 Kab/Kota							12 Kab/Kota	15	1.58%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	54	Pembangunan Sekretariat Forum PKBM	Tersedianya Sekretariat Forum PKBM							1 Unit	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	55	Pembangunan Sekretariat Forum PAUD	Tersedianya Sekretariat Forum PAUDI							1 Unit	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	56	Pembangunan Sekretariat Forum HIPKI	Tersedianya Sekretariat Forum HIPKI							1 Unit	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	57	Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum PKBM	Tersedianya Sarana dan Prasarana ForumPKBM							1 Unit	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	58	Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum HIPKI	Tersedianya Sarana dan Prasarana ForumHIPKI							1 Unit	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	59	Pengadaan Sarana dan Prasarana Forum PAUD	Tersedianya Sarana dan Prasarana Forum PAUDI							1 Unit	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	27	60	Kompetensi penilik dan pamong belajar PNFI	Terlaksananya Kompetensi Penilik dan Pamong Belajar PNFI sebanyak 60 Orang							60 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1012761	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Organisasi Mitra	Terlatihnya Pengurus atau Pengelola Organisasi Mitra Pendidikan Non Formal dan							168 Orang	15	1.29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012762	Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekretariat Forum Autis	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Forum Autis							1 Kab/Kota	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012763	Peningkatan Kompetensi Therapis Autis	Meningkatnya Kompetensi Therapis Autis untuk 250 Orang pada 12 Kab/Kota							250 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012764	Diklat Parenting Autis	Terlaksananya Diklat Parenting Autis untuk 500 Orang pada 12 Kab/Kota							500 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012765	Bimbingan Teknis Pembetukan Mitra Autis	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pembentukan Mitra Autis untuk 50 Orang pada 12 Kab/Kota							50 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012766	Gebyar Autis	Terlaksananya Gebyar Autis untuk Peringatan Hari Autis dan Pengukuhan Ketua Forum Autis Provinsi Riau sebanyak 2000 Orang							2000 Orang	60	24.00 %	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012767	Pengembangan Kemampuan Diri Anak Autis	Meningkatnya Kemanpuan Diri Anak Autis sebanyak 100 Orang							100 Orang	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012768	Pengadaan Buku Ensiklopedia Pramuka	Tersedianya Buku Ensiklopedia Pramuka							12 Kab/Kota	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1012769	Pembangunan Gedung Sanggara Seni Salsabila Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Gedung Sanggara Seni Salsabila Pekanbaru							100%	15	1.72%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	01	27	70	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Paud (Yayasan Darul Amal) desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar	Terbangunnya Ruang Kelas Baru (RKB) Paud (Yayasan Darul Amal) desa Pulau Jambu Kec. Kuok Kab. Kampar							100%	0	0.00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Yang melaksanakan program MBS dengan baik	2		2	2	2	100	2	2	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					SD/MI										
					SMP/MTs										
					SMA/MA/SMK										
					Persentase Sekolah yang Terakreditasi										
					TK/RA										
					SD/MI										
					SMP/MTs										
					SMA/MA/SMK										
1	01	22	01	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program/ Kegiatan monitoring Dinas Pendidikan Provinsi Riau							12 Kab/Kota		31%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	02	Pengadaan Kelender Pendidikan	Tersedianya Kalender Pendidikan Provinsi Riau							2500 Buah		100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	03	Pemberian Penghargaan Kepada Siswa, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Berprestasi seProvinsi Riau	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Siswa se Provisni Riau							50 Siswa		68%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	04	Review Kurikulum Muatan Lokal	Peningkatan kurikulum muatan lokal budaya Melayu							12 Kab/Kota		0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	01	22	05	Penerbitan Jurnal Pendidikan	Terbitnya Jurnal Pendidikan								2 Jurnal		3%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	06	Pengelolaan Data Pendidikan	Tersedianya data pendidikan di semua jenjang pendidikan se Provinsi Riau								12 Kab/Kota		22%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	07	Penyusunan Program/Kegiatan Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya Perencanaan Pendidikan dan Terselenggaranya sinkronisasi Program Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota								12 Kab/Kota		65%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	08	Dukungan Operasional Internet Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Terpenuhinya Akses Internet di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Riau								12 Bulan		0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	09	Monitoring Guru bantu	Terdapatnya jumlah guru bantu yang valid								12 Kab/Kota		0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	10	Pengadaan Majalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya majalah untuk lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Riau								10 Kali		0%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	22	11	Publikasi Informasi Pendidikan Provinsi Riau	Tersedianya publikasi informasi pendidikan melalui media cetak dan elektronik								12 Kab/Kota		38%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	02			KESEHATAN												
1	02	15		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	75%		56%		60%	58%	96.83	65%	65%	100	Dinas Kesehatan
1	02	15	01	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Bufer Stok Propinsi	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan buffer stock provinsi	10	Paket	2		2 Paket	1	66	2	5	53.2	Dinas Kesehatan
1	02	15	02	Pengadaan Obat Program (TB, HIV/AIDS, VAR dan Vit A)	tersedianya buffer stok obat program	25	Paket	5		5 paket	2	47	5	12.35	49.4	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	15	03	Evaluasi Program Obat, Kosmetik, Alkes, Makanan dan Minuman, Obat Tradisional TK Propinsi Riau 2014	Jumlah Kab/Kota yg dievaluasi Program Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, serta Obat Tradisional		12	Bulan	12	12 Bulan	0	0	12	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan
1	02	15	04	Pertemuan Penyusunan Rencana kebutuhan Obat Pelayanan kesehatan dasar(Bufer stok) dan Penyusunan Obat Program TK Propinsi Riau 2015	tersusunnya perencanaan kebutuhan obat pelayanan kesehatan dasar		5	Dok	1	1 dokumen	0	0	1	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	15	05	Monitoring /Survey Penggunaan Obat dan Penyalahgunaan Obat NAPZA	Jumlah Rumah Sakit yang di survei melakukan pemantauan Penyalahgunaan Obat dan NAPZA		32	RS	32	32 Rumah Sakit	28	87	32	32 Rumah Sakit	32 Rumah Sakit	Dinas Kesehatan
1	02	15	06	Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi Propinsi Dinas Kesehatan Propinsi Riau	Jumlah Instalasi Farmasi Provinsidan Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar		13	IFK	0	13 IFK	7.8	60	13	13 IFK	13 IFK	Dinas Kesehatan
1	02	15	07	Pengawasan Sarana Distribusi Obat, Alkes, Kosmetik, Makanan dan Minuman dan Obat Tradisional	Jumlah Sarana Distribusi Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, serta Obat Tradisional Yang di monitor		12	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	90	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	15	08	Harmonisasi dan Integrasi Pengelolaan Obat Dinas Kesehatan Propinsi Riau dan Dinas Kesehatan Kab/Kota Se-Propinsi Riau	Jumlah pemegang program yang melakukan koordinasi lintas program dan Sektor di tingkat provinsi dan kab/kota		12	0	0	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	15	09	Peningkatan Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan pembekalan tentang Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Rasional		450	Orang	0	90 Orang	90	74	90	180	40	Dinas Kesehatan
1	02	15	10	Koordinasi Program Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, serta Obat Tradisional di kabupaten/kota se-Propinsi Riau Th. 2015	Jumlah kab/Kota yang terkoordinir Program Obat, Kosmetik, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman, serta Obat Tradisional		12	0	12	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	15	11	Implementasi Sistem Pengelolaan Instalasi Farmasi kab/kota Se- Prov Riau	jumlah kab/koya Berjalannya sistem pengelolaan instalasi farmasi	12	0	12	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	15	12	Peningkatan Pelayanan Instalasi farmasi Propinsi Riau	jumlah kab/kota yang meningkatnya pelayanan instalasi farmasi	12	0	12	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	15	13	Implementasi Sistem Pengelolaan Logistik Dinas kesehatan Kab/Kota tahun 2015	jumlah kab/kota yang meimplementasikan sisitem pengelolaan logistik	12	0	12	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pelayanan puskesmas dan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta	90%		60%	65%	0.6225	95.77	0.7	0.7	100		Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, dan RSUD Petalabumi
1	02	16	01	Pertemuan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan	Jumlah Peserta Pertemuan Kebutuhan SDM Kab/Kota	120	Orang	24	24 Orang	24	100	24	72	60		Dinas Kesehatan
1	02	16	02	Sinkronisasi Perundang-undangan Tenaga Kesehatan di Propinsi Riau	Jumlah Peserta yang memilikipemahaman tentang Perundangan-undangan Tenaga Kesehatan	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	48	40		Dinas Kesehatan
1	02	16	03	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Uji Kompetensi	Jumlah Peserta yang memiliki pemahaman tentang Perundangan-undangan Tenaga Kesehatan	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	48	40		Dinas Kesehatan
1	02	16	04	Rekrutmen Calon PPDS/PPDGS tahun 2014	Ratio Dokter Spesialis	9,4/100.000 Penduduk		100	9,4/100.000 Penduduk	9,4/100.000 Penduduk	100	9,4/100.000 Penduduk	9,4/100.000 Penduduk	9,4/100.000 Penduduk		Dinas Kesehatan
1	02	16	05	Peningkatan Pendidikan Berjenjang dan berkelanjutan (Program Tugas Belajar)	Peserta Tugas Belajar	500	Orang	100	100 orang	0	0	100	200	40		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 16 06	Penguatan Sistem Manajemen Keperawatan di Rumah Sakit	Jumlah RSUD yang melaksanakan manajemen keperawatan sesuai dengan Peraturan Kemenkes RI	20	RS	20	20 RS	3	15	20	20 RS	20 RS	Dinas Kesehatan
1 02 16 07	Pengadaan Peralatan yang mendukung sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	Jumlah peralatan komunikasi yang mendukung pelaksanaan SPGDT di Rumah Sakit	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 16 08	Pengadaan Peralatan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan	Jumlah peralatan komunikasi SPGDT	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 16 09	Pengadaan Logistik alat dan bahan program P2B2	jumlah paket pengadaan Logistik alat dan bahan P2B2	12	Bulan	12	12 Bulan	1.8	15	12	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan
1 02 16 10	Pengadaan Logistik alat dan bahan program P2ML	jumlah paket pengadaan Logistik alat dan bahan P2ML	12	Bulan	12	12 Bulan	1.8	15	12	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan
1 02 16 11	Dukungan Biaya Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Labkesling	jumlah pemeriksaan yang dilayani oleh UPT labkesling	141,185	Orang	28237	28237	22871.97	81	28237	79345.97	56.2	Dinas Kesehatan
1 02 16 12	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Labkesling	jumlah petugas yang menerima jasa pelayanan di UPT Labkesling	215	Orang	43	43 Orang	43	100	43	129	60	Dinas Kesehatan
1 02 16 13	Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling	tersedianya kebutuhan bahan laboratorium klinis dan lingkungan setiap tahunnya	40	Orang	8	8 orang	0	0	8	16	40	Dinas Kesehatan
1 02 16 14	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bagi UPT Labkesling	tersedianya peralatan laboratorium klinis dan lingkungan	30	Unit	6	6 Unit	1.74	29	6	13.74	45.8	Dinas Kesehatan
1 02 16 15	Dukungan Biaya Jamkesda untuk Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesda Provinsi Riau Tahun 2014	Terlaksananya Penyediaan Biaya Jamkesda Provinsi Riau Selama 12 bln	12	Bulan	12	12 Bulan	6	50	12	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan
1 02 16 16	Penyediaan Biaya JAMKESDA di Provinsi Riau	Terlaksananya Manajemen Pelaksanaan Jameksda Selama 12 bln	12	Bulan	12	12 Bulan	4.92	41	12	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	16	17	Pertemuan koordinasi LP dan LS Program Dokter keluarga	Jumlah Dokter yang mendapatkan informasi dan Kebijakan terkini tentang dokter keluarga	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	18	Pelatihan manajemen dokter keluarga di puskesmas	Jumlah dokter yang mendapatkan informasi dan kebijakan terkini tentang Dokter keluarga	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	19	Penguatan Kemampuan petugas laboratorium di tingkat puskesmas	Meningkatnya fungsi laboratorium sebagai penunjang untuk penegakkan diagnosa	120	Orang	24	24 Orang	24	99	24	24	72	60	Dinas Kesehatan
1	02	16	20	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas	Meningkatnya kualitas kemampuan petugas dalam pelayanan kesehatan jiwa di puskesmas	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	21	Revitalisasi manajemen puskesmas	Jumlah Kapus dan KTU di Puskesmas dengan Revitalisasi manajemen Puskesmas sehingga tercapainya sistem manajemen puskesmas yang baik dan terarah di puskesmas	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	22	Pertemuan koordinasi dan evaluasi upaya kesehatan masyarakat	Terlaksananya program kesehatan masyarakat di 12 Kab/kota	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	12	96	12	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	16	23	Pelatihan pelayanan usila di Puskesmas	Jumlah Peserta Pelatihan pelayanan Usila di Puskemas	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	24	Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Masyarakat Usia Lanjut Dalam Program Upaya kesehatan	jumlah petugas yang meningkat kemampuan program Usila	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	25	Pertemuan koordinasi program kesehatan tradisional	Meningkatnya kualitas SDM petugas kesehatan tradisional di puskesmas se provinsi riau	120	Orang	24	24 orang	0	0	24	24	48	40	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	16	26	Sinkronisasi dan konsultasi pelayanan kesehatan dasar	Informasi dan kebijakan terbaru pelayanan kesehatan dasar serta konsultasi permasalahan kesehatan	12	Kab/Kota	8	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12	Dinas Kesehatan
1	02	16	27	Operasional sentra pengembangan dan penerapan pengobatan tradisional (SP3T)	persentase puskesmas dengan program pengembangan (SP3T)	20	Pusk	20	20 Puskesmas	20	99	20	20 Pusk	20 Pusk	20	Dinas Kesehatan
1	02	16	28	Pertemuan koordinasi program gigi dan mulut	Meningkatnya jumlah petugas puskesmas yang tersosialisasi program gigi dan mulut sehingga meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut di puskesmas	120	Orang	24	24 Orang	0	0	24	48	40		Dinas Kesehatan
1	02	16	29	Dukungan biaya pelayanan dan Pemeliharaan UPT AKKES	jumlah Bulan pelayanan UPT AKKES	12 Bulan	Bulan	86.15	12 Bulan	12	99	12	12 Bulan	12 Bulan		Dinas Kesehatan
1	02	16	30	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dalam Desa Siaga di Propinsi Riau	Jumlah Masyarakat yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Puskesmas	5	Paket	1	1 Paket	1	100	1	3	60		Dinas Kesehatan
1	02	16	31	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Puskesmas	Jumlah Aparatur Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Puskesmas	5	Paket	1	1 Paket	1	100	1	3	60		Dinas Kesehatan
1	02	16	32	Pelatihan Manajemen Diklat bagi Dinkes Kab/ Kota	Jumlah Aparatur Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Manajemen Diklat Bagi Dinkes Kab/Kota	5	Paket	1	1 Paket	1	100	1	3	60		Dinas Kesehatan
1	02	16	33	Pelatihan Fasilitator Puskesmas dalam Desa Siaga	Jumlah Aparatur Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Fasilitator Puskesmas dalam Desa Siaga	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	40		Dinas Kesehatan
1	02	16	34	Pelatihan Pencegahan Infeksi di Propinsi Riau	Jumlah Aparatur Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Pencegahan Infeksi di Propinsi Riau	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	40		Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	16	35	Pelatihan Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Puskesmas di Propinsi Riau	Jumlah Aparatur Kesehatan yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas di Propinsi Riau	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	10=(5+7+9)*	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	36	Sosialisasi Penelitian Kesehatan di Propinsi Riau	jumlah penelitian yang disosialisasikan	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	37	Penelitian Kediklatan : Pengkajian Kebutuhan Pelatihan Petugas Puskesmas se Propinsi Riau	Terdatanya jenis pelatihan yang dibutuhkan petugas puskesmas	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	38	Penelitian Diklat : Evaluasi Pasca Pelatihan Fasilitator Desa Siaga	Terevaluasinya Kinerja Fasilitator desa Siaga	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	39	Penelitian Kediklatan : Evaluasi Pasca pelatihan dan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Propinsi Riau	Terevaluasinya Kinerja Manajemen Puskesmas	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	40	Pembinaan Laboratorium lapangan bagi UPT Pelatihan dan Penelitian Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan Laboratorium lapangan di UPT. PELLITKES	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	41	Penelitian Kepuasan Pasien pada RS Petala Bumi Dan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se Propinsi	Terevaluasinya Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan RS. Petala Bumi	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	42	Penelitian Kediklatan : Efektivitas pelayanan Rekam Medis rumah Sakit di Propinsi Riau	Terevaluasinya Efektivitas Pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit	5	Paket	1	1 Paket	0	0	1	2	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	16	43	Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan UPT. PELLITKES	Persentase kelancaran dalam melaksanakan pelayanan dan Pemeliharaan di UPT. PELLITKES	5	Paket	1	1 Paket	1	80	1	3	3	60	Dinas Kesehatan
1	02	16	44	Monev dan bimtek kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan pengembangannya	Terlaksananya Monev dan Bimtek kegiatan Pelayanan kesehatan Dasar dan pengembangan	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 16 45	Peningkatan Kinerja petugas puskesmas melalui penilaian tenaga kesehatan teladan dan puskesmas yang berprestasi	Terlaksananya penilaian petugas kesehatan teladan dan Puskesmas ber prestasi	12	Kab/Kota	100	12 Kab/Kota	9.96	83	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 16 46	Penyediaan Biaya Penunjang Pelayanan RS Petala Bumi	Jumlah Bulan biaya penunjang pelayanan RS Petala Bumi	12	Bulan	12	12 Bulan	9.84	82	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 16 47	Penyediaan Jasa Pelayanan Kesehatan RS Petala Bumi	Jumlah Bulan tersedia jasa pelayanan RS Petala Bumi	12	Bulan	12	12 Bulan	9	75	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 16 48	Pengadaan Honorarium Tenaga Kontrak dan THL RS Petala Bumi	Jumlah Tenaga THL RS Petala Bumi	300	Orang	0	300 orang	252	84	0	252	84	Dinas Kesehatan
1 02 16 49	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Manajemen dan Kesehatan RS Petala Bumi	Jumlah pelatihan manajemen dan teknis yang di ikuti oleh RS Petala Bumi	125	Paket	25	25 Paket	17	67	25	67	53.6	Dinas Kesehatan
1 02 16 50	Penyelesaian Pembayaran Pembangunan Instalasi Limbah Cair	Jumlah pembayaran limbah cair yang terlaksana	5	Paket	1	1 paket	0	0	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 16 51	Penguatan program rujukan dalam rangka JKN	Jumlah RSUD Kab/Kota yang melaksanakan program rujukan dalam Rangka JKN	15	0	15	0	0	0	0	15	100	Dinas Kesehatan
1 02 16 52	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kab/Kota di Prov. Riau	100	%	100	0	0	0	0	100	100	Dinas Kesehatan
1 02 16 53	Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penguatan pelayanan kesehatan dasar	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12	100	Dinas Kesehatan
1 02 16 54	Peningkatan SP3T Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peningkatan SP3T	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12	100	Dinas Kesehatan
1 02 16 55	Pengawasan pengobatan tradisional di 12 kab/Kota	Jumlah kab/kota yang mendapatkan pengawasan pengobatan tradisional	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	16	56		Peningkatan Program Penyakit Tidak Menular	jumlah kab/kota yang meingkat program penyakit tidak menular	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12	100	Dinas Kesehatan
1	02	19			Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang menerapkan pola hidup bersih dan sehat	70%		14.10%	14.10%	13.8%	98	30%	30%	100	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan
1	02	19	01		Penyebarluasan Informasi Kesehatan	jumlah kab/kota yang tersebar informasi kesehatan	12	Paket	12	12 Kab/kota	12	80	12	12 Kab/kota	12 Kab/kota	Dinas Kesehatan
1	02	19	02		Peningkatan Kinerja Promkes dalam Penggerakkan dan Pemberdayaan masyarakat	Jumlah kab/kota yang termonitor sistem pengelolaan program kesehatan kerja	12	Paket	12	12 Kab/kota	12	86.04	12	12 Kab/kota	12 Kab/kota	Dinas Kesehatan
1	02	19	03		Pemantauan Jajanan Anak Sekolah	Jumlah Sekolah yang tepantau jajannya	5	Sekolah	5	5 sekolah	5	100	5	5 sekolah	5 sekolah	Dinas Kesehatan
1	02	19	04		Evaluasi Program Promosi Kesehatan	jumlah kab/kota yang terevaluasi program promosi kesehatan	12	Paket	12	12 Kab/kota	0	0	12	12 Kab/kota	12 Kab/kota	Dinas Kesehatan
1	02	19	05		Upaya Pengelolaan Promkes di RS /PKRS dan Poskestren	jumlah kab/kota yang terkelola promkes Rs/PKRS dan Poskestren	12	Paket	0	12 Kab/kota	12	100	12	12 Kab/kota	12 Kab/kota	Dinas Kesehatan
1	02	19	06		Penyuluhan Kesehatan Di daerah KLB	jumlah informasi kesehatan yang diperoleh masyarakat di daerah rawan KLB melalui penyuluhan	25	Tema	0	5 tema	5	100	5	10	40	Dinas Kesehatan
1	02	19	07		Penilaian Kinerja Posyandu	Jumlah Kab/Kota yang dinilai Kinerja Posyandunya	12	Paket	12	12 Kab/kota	12	100	12	12 Kab/kota	12 Kab/kota	Dinas Kesehatan
1	02	19	08		Publikasi Melalui Media Cetak tentang Kesehatan untuk Masyarakat Provinsi Riau	jumlah Publikasi melalui media cetak tersedia	5	Paket	0	1 paket	1	100	1	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	19	09		Pengadaan peralatan penunjang kegiatan promosi kesehatan dan peran serta masyarakat	Jumlah alat penunjang program promkes dim percepat tercapainya program	1	Paket				0	0	0	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1021910	Dukungan peningkatan kinerja petugas kesehatan dalam pengembangan desa/kelurahan siaga aktif	Jumlah kab/kota yang dapat mengembangkan desa/kelurahan siaga aktif	12	Paket				0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1021911	Penguatan peran UKS di Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang melakukan program UKS secara nyata	12	Paket				0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1021912	Peningkatan kinerja pengelola program kesehatan kerja dalam memberdayakan masyarakat pekerja	Jumlah kab/kota yang termonitor sistem pengelolaan program kesehatan kerja	12	Paket				0	0	0	0	Dinas Kesehatan
10220	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk balita	1.20%		1.60%	1.60%	1.7%	1.64%	1.50%	1.50%	100	Dinas Kesehatan
1022001	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Jumlah kecamatan melaksanakan pemantauan status gizi	151	Kec	151	151 Kec	151	99.4	151	151 Kec	151 Kec	Dinas Kesehatan
1022002	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya	jumlah kab / Kota yang tertanggulangi masalah gizi buruk	12	Tema	12	12 kab/Kota	12	32.2	12	12 kab/Kota	12 kab/Kota	Dinas Kesehatan
1022003	Peningkatan Kinerja Program Gizi	Meningkatkan kinerja petugas dalam pelaksanaan program gizi	12	Tema	12	12 Kab/Kota	12	84.73	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1022004	Revitalisasi Posyandu	Diaktifkan kembali Posyandu	12	Tema	12	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1022005	Pengadaan Buffer Stok MP ASI	Balita bermasalah kesehatan mendapat MP.ASI	3500	Balita	0	3500 Balita	0	0	3500	3500	100	Dinas Kesehatan
1022006	Penanggulangan masalah gizi	Jumlah gizi buruk yang tertanggulangi	18	Balita	0	18 Balita	0	0	18	18	100	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	20	07	Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil KEK	Jumlah Ibu hamil Kek yang diberi makanan tambahan	2500	Ibu Hamil	0	2500 Ibu Hamil	0	0	2500	2500	100	Dinas Kesehatan
1	02	21		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memanfaatkan air minum berkualitas	80.00%		52.75%	60.00%	55%	91.21	0.65	0.65	100	Dinas Kesehatan
1	02	21	01	Peningkatan akses air minum berkualitas bagi masyakat	jumlah kab/Kota tenaga yang terampil dan kompeten dalam menentukan opsi sarana air minum di masyarakat serta mampu melaksanakan survailans kualitas air	12	Kab/Kota	0	12 Kab/Kota	12	87	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	21	02	Inspeksi Sanitasi TTU/TPM	Terpantaunya kondisi sanitasi TTU/TPM di Kab/Kota	9826	Fasilitas	0	9826 Fasilitas	0	0	9826	9826 Fasilitas	9826 Fasilitas	Dinas Kesehatan
1	02	21	03	Evaluasi dan Sinkronisasi Kegiatan STBM	Kabupaten/Kota yang melaksanakan STBM	12	Kab/Kota	100	12 Kab/Kota		100	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	21	04	Peningkatan kinerja pengelola program penyehatan lingkungan	Terpantaunya hasil pelaksanaan pengelolaan program penyehatan lingkungan di kab/kota	12	Kab/Kota	0	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	21	05	Pertemuan Revitalisasi Klinik Sanitasi	Terpaparnya petugas pengelola klinik sanitasi di Kab/Kota	12	Kab/Kota	0	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	21	06	Pelatihan AMDAL bagi petugas kesling dinkes kab/kota dan Puskesmas sentinel	Jumlah petugas Kesling Kab/Kota dan Puskesmas Sentinel yang telah terlatih AMDAL	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	21	07	Assesment daerah yang terkena dampak perubahan iklim	jumlah kab/kota Terlaksananya assesment daerah yang terkena dampak perubahan iklim	12	Kab/Kota	0	12 Kab/Kota	12	100	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	21	08	Verifikasi penyelenggaraan kab/ kota atau kawasan sehat dan kunjungan kerja dalam rangka pengembangan kab/ kota sehat	Kab/Kota yang menyelenggarakan program Kab/Kota Sehat	0	Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	21	09	Pengembangan Opsi sarana Sanitasi dasar (Jamban Keluarga) di Masyarakat	Petugas yang terampil dalam mengorganisir program sanitasi dasar untuk pemilihan opsi sarana jamban	30	Orang	0	6 Orang	6	15	6	6	12	40	Dinas Kesehatan
1	02	21	10	Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas	jumlah kab/kota yang tenaga yang terampil dan kompeten dalam menentukan opsi sarana air minum di masyarakat serta mampu melaksanakan survailans kualitas air	12	Kab/Kota	0	12 kab/kota	0	0	12	12	12 kab/kota	12 kab/kota	Dinas Kesehatan
1	02	21	11	Surveilans kualitas air minum Sarana Pamsimas Tahapan 1	Desa Pamsimas Tahapan I yang memanfaatkan air minum yang berkualitas	94	Desa	0	94 Desa	0	0	94	94	94 Desa	94 Desa	Dinas Kesehatan
1	02	21	12	Peningkatan dan pengembangan wilayah STBM	Desa yang penduduknya telah mengembangkan program sanitasi berbasis masyarakat	446	Desa	0	446 Desa	0	0	466	466	446	446	Dinas Kesehatan
1	02	21	13	Pengendalian bahaya pada Tempat-tempat Umum (TTU)	Sarana Tempat-tempat Umum yang telah melakukan pengendalian faktor resiko hygiene sanitasi	4472	Fasilitas	0	4472 Fasilitas	0	0	4472	4472	4472	100	Dinas Kesehatan
1	02	21	14	Peningkatan dan pengembangan wilayah pemukiman sehat	Kabupaten / Kota yang telah melaksanakan program peningkatan pemukiman sehat	0	Kab/Kota	0	0 Kab/Kota	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	21	15	Pengendalian limbah medis Fasilitas Yankes	Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan pengendalian limbah medis	38	Fasilitas	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan penyakit menular, diantaranya DBD, malaria, dan HIV / AIDS pada kelompok resiko tinggi										Dinas Kesehatan
					DBD: 52/100.000 Penduduk	< 35		52	< 39	< 38	97.44	< 37	< 37	100	
					Malaria: 0,3/1000 Penduduk	0.1		0.3	0.25	0.2475	99.00	0.2	0.2	100	
					HIV/AIDS : 2,9 Dari penduduk beresiko tinggi	0.5		2.9	2	2.1	95.24	1.5	1.5	100	
1	02	22	01	Survey Kusta Frambusia	Terlaksananya Survey Kusta Frambusia di 4 Kabupaten	12	kab /kota			0	0	4	1	8.33	Dinas Kesehatan
1	02	22	02	Intensifikasi penemuan kasus HIV dan IMS	Jumlah orang yang mendapat layanan di klinik IMS	23610	orang			7870	33.33	7870	792	3.35	Dinas Kesehatan
1	02	22	03	Survey Darah Jari	Terlaksana Survey darah jari di 2 Kab	2	kab /kota			0	0.00	2	1	50.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	04	Peningkatan Cakupan Tatalaksana & Kualitas Program pengendalian Malaria	Terlaksananya peningkatan cakupan tatalaksana & kualitas program pengendalian malaria di 10 kab	35	lokasi /desa			1	2.86	7	3	8.57	Dinas Kesehatan
1	02	22	05	Pemantapan Pengetahuan dan Pelaporan Data DBD bagi petugas kab/kota	terlaksananya pemantapan pengetahuan dan pelaporan data DBD di 12 kab/kota	12	kab /kota			12	100	12	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	06	Monitor dan Supervisi Program P2B2	Terlaksananya Monitor dan Supervisi Program P2B2 di 12 Kab/kota	12	kab /kota			12	100	12	2	16.67	Dinas Kesehatan
1	02	22	07	Monitor dan Supervisi Program P2ML	Terlaksananya Monitor dan Supervisi Program P2ML di 12 Kab/Kta	12	kab /kota			12	100	12	2	16.67	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	22	08	Peningkatan kapasitas peny Kusta bagi Dokter di PRK Kusta Kab/Kota	Terlaksananya Pelatihan Kusta bagi Dokter PRK Kusta di 12 Kab/kota		12	kab /kota			0	0	12	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	09	Peningkatan Manajemen Program ISPA dan Diare se Provinsi riau	Terlaksananya peningkatan manajemen Program ISPA dan Diare di 12 Kab/Kota		12	kab /kota			0	0	12	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	10	Peningkatan Kapasitas dan Cakupan dalam Pengendalian TB	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan cakupan dan pengendalian TB di 12 Kab/kota		12	kab /kota			12	100	12	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	11	Peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan Penyakit Menular Lainnya	Terlaksananya peningkatan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang dan penyakit menular lainnya di 12 Kab/kota		12	kab /kota			0	0	12	2	16.67	Dinas Kesehatan
1	02	22	12	Pengadaan Logistik Program P2B2	Terlaksananya pengadaan logistik Program P2B2 buffer stok 1 paket		4	paket			0	0	1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	13	Pengadaan Logistik Alat dan Bahan Program P2ML	Terlaksananya pengadaan logistik Program P2ML buffer stok 1 paket		4	paket			0	0	1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	14	Peningkatan Penemuan kasus AFP	Terlaksananya Peningkatan Penemuan kasus AFP di 12 Kab/kota		12	kab /kota			0	0	12	1	8.33	Dinas Kesehatan
1	02	22	15	Evaluasi Program AFP	Terlaksananya pertemuan evaluasi Program AFP di 12 kab/Kota		12	kab /kota			0	0	12	1	8.33	Dinas Kesehatan
1	02	22	16	Evaluasi Program Penyelenggaraan Kesehatan haji	Terlaksananya Evaluasi Program Penyelenggaraan Kesehatan Haji di 12 Kab/kota		12	kab /kota			0	0	12	1	8.33	Dinas Kesehatan
1	02	22	17	Peningkatan Program Kesehatan Haji	Jumlah calon jamaah haji yang diperiksa		18000	orang			0	0	4500	775	4.31	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	22	18	Magang petugas kesehatan dalam rangka persiapan Embarkasi /Debakasi Riau tahun 2015	Terlaksananya Magang petugas kesehatan dlm rangka persiapan embarkasi/Debakasi Riau Tahun 2015 sebanyak 15 org	60	orang				0	0	15	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	19	Pengadaan cold chain dan peralatan imunisasi	Terlaksananya pengadaan Cold chain dan peralatan imunisasi sebanyak 2 paket	8	paket				0	0	2	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	20	Pengadaan ADS (auto disposable stringe)	Terlaksananya pengadaan ADS sebanyak 1 paket	4	paket					0	1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	21	Peningkatan Kapasitas bidan desa (vaksinator) dan cold chain	Jumlah Bidan Desa Yang dilatih	480	orang				0	0	120	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	22	Peningkatan Imunisasi dalam rangka akselerasi GAIN UCI	Terlaksananya peningkatan imunisasi dalam dalam rangka akselerasi GAIN UCI di 12 kab/Kota	3255	desa				651	20	1738	224	6.88	Dinas Kesehatan
1	02	22	23	Pengadaan peralatan pendukung kegiatan imunisasi	Terlaksananya Pengadaan peralatan pendukung kegiatan imunisasi sebanyak 1 paket	1	paket				0	0	1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	24	Pengendalian KLB kesehatan termasuk Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian dan KLB Kesehatan termasuk Krisis kesehatan	170	kejadian				34	20	34	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	22	25	Peningkatan kemampuan pengelola program imunisasi	Jumlah Pengelola program imunisasi yang dilatih	96	orang				0	0	24	24	25.00	Dinas Kesehatan
1	02	023		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase sarana kesehatan terhadap tenaga medis/paramedis yang teregistrasi dan terakreditasi	80.0%		60.0%		60.0%	58%	97	65%	65%	100	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, RSUD Petalabumi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	23	01	Sinkronisasi perizinan dan pengembangan sarana kesehatan pemerintah dan Swasta	jumlah paket perijinan dan Pengembangan sarana kesehatan pemerintah dan swasta	4	paket			0		1	1	25.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	02	Pembinaan Akreditasi dan Pengawasan perizinan sarana kesehatan pemerintah/swasta Se-Propinsi Riau	Jumlah sarana Kesehatan yang terbina	800	unit			0		200	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	03	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Prov. Riau	Jumlah Peserta rapat kerja Kesehatan daerah Prov Riau	1800	orang			0		450	450	25.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	04	Penyusunan perencanaan bersumber APBN	Jumlah dokumen Perencanaan Bersumber APBN yang terusun	4	dok			0		1	0.04	1.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	05	Penyusunan Perencanaan APBD Provinsi Riau	Jumlah dokumen Perencanaan Bersumber APBD yang terusun	4	dok			0		1	0.02	0.50	Dinas Kesehatan
1	02	23	06	Pengembangan Data cepat puskesmas 24 jam Provinsi Riau	Jumlah Paket data cepat puskesmas yang tersedia	4	paket			0		1	0.01	0.25	Dinas Kesehatan
1	02	23	07	Pengadaan sarana Data cepat puskesmas 24 jam di Provinsi Riau	jumlah pengadaan sarana data cepat yang tersedia	4	paket			0		1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	08	Evaluasi anggaran bersumber APBN/APBD provinsi Riau	jumlah kab/kota yang tervaluasi beradaskan sumber dana APBD/APBN	12	kab /kota			0		12	12	100.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	09	Koordinasi Evaluasi Program Kesehatan	jumlah kab/Kota yang terkoordinir pelaksanaan evaluasi programnya	12	kab /kota			0		12	12	100.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	10	Pengembangan Bank Data Kes.Prop.Riau	Tersedianya data Kesehatan terintegrasi	5	keg			1		1	1	20.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	11	Koordinasi dan Pengelolaan data dan informasi Kesehatan Provinsi Riau	Jumlah kab/kota yang telaksana koordinasi dan pengelolaan data dan infotmasi	12	kab /kota			0		12	1	8.33	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	02	23	12	Biaya Pelayanan dan Pemeliharaan UPT Labkesling	jumlah bulan pelayanan dan pemeliharaan UPT Labkesling	12	bln			0		12	3	25.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	13	Penyediaan Jasa Pelayanan UPT Labkesling	jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan UPT Labkesling	12	bln			0		12	3	25.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	14	Pengadaan Bahan Laboratorium (Reagensia) UPT Labkesling	Jumlah Paket pengadaan regensia UPT Labkesling	1	paket			0		1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	15	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Bagi UPT Labkesling	Jumlah Paket pengadaan alat-alat laboratorium UPT Labkesling	1	paket			0		1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	16	Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang meningkat pelayanan laboatorium	12	kab /kota			0		12	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	17	Tindak Lanjut Akreditasi Labkesling Sesuai Dengan ISO/IEC 17025 ; 2008	Tindak lanjut akreditasi labkesling	2	paket			1		1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	18	Peningkatan Kinerja Program Pengembangan Sarana Kesehatan	Jumlah kab/kota yang meningkat kinerja program pengembangan sarana kesehatan	12	kab /kota			0		12	1	8.33	Dinas Kesehatan
1	02	23	19	Pemantapan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Riau 2014-2015	Jumlah dokumen renstra yang dilaksanakan	1	dok			0		1	0	0.00	Dinas Kesehatan
1	02	23	20	Pelaksanaan percepatan SPM Kesehatan	jumlah Kab/Kota yang melaksanakan percepatan SPM	12	kab /kota			0		12	12	100.00	Dinas Kesehatan
1	02	25		Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dengan kelengkapan alat kesehatan yang memadai dengan jumlah penduduk(per 100.000 penduduk	90.0%		50.0%	60.0%	0.51875	86.46	0.65	0.65	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	25	01	Pengembangan SIKDA Generik se-Provinsi Riau	jumlah sistem informasi kesehatan yang dilaksnakan di provinsi Riau	5	Sistem	0				0	1	1	20	Dinas Kesehatan
1	02	25	02	Peningkatan Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	jumlah kab/kota yang meningkat kinerja pengembvangan SDM kesehatnya	12	Kab/Kota	0			12	83.3	12	12	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	03	Survey lokasi, Pembebasan Lahan, pengurusan izin Insenerator lombah B3 dan bahan berbahaya lainnya di prov. Riau	Jumlah Paket kegiatan	5	Paket	1			0	0	1	2	40	Dinas Kesehatan
1	02	25	04	Monitoring dan Pengendalian Tekhnis Bantuan Keuangan Propinsi Riau di Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota yang mendapat bantuan Keuangan dari Propinsi Riau	0		0			0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	25	05	Penyelesaian pembangunan Puskesmas Kandis Kab. Siak	Jumlah Puskesmas yang diselesaikan	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	06	Penyelesaian pembangunan Puskesmas Sabak Auh Kab. Siak	Jumlah Puskesmas yang diselesaikan	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	07	Penyelesaian pembangunan Puskesmas Bukit Kapur Kota Dumai	Jumlah Puskesmas yang diselesaikan	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	08	Penyelesaian pembangunan Puskesmas Peranap Kab. Inhu	Jumlah Puskesmas yang diselesaikan	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	09	Penyelesaian pembangunan Puskesmas Lubuk dalam Kab. Siak	Jumlah Puskesmas yang diselesaikan	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	10	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Bandul Kab. Meranti	jumlah sarana dan prasarana Puskesmas bandul yang tersedia	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	11	Pembangunan Puskesmas Plus di Kota Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Plus di Kota Pekanbaru	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	25	12	Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Kuansing	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Kuansing	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	13	Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Indragiri Hulu	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Indragiri Hulu	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	14	Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Indragiri Hilir	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Indragiri Hilir	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	15	Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Kampar	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Kampar	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	16	Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Rokan Hilir	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas Plus di Kab. Rokan Hilir	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas di Kab. Siak	Terlaksananya Pengadaan Prasarana Poliklinik Umum (5 set), Gawat Darurat (2 set) dan PONE (2 set) Kab. Siak	9	Set	9				0	0	9	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	18	Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung	Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung Kab. Meranti	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	19	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	20	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Poskesdes	Terlaksananya Pengadaan alat Kesehatan untuk Poskesdes di Kab. Meranti	9	Unit	9				0	0	9	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	21	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Tanah Sari Kab. Kampar	Tersedianya Puskesmas Pembantu Desa Tanah Sari Kab. Kampar	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	25	22	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Se Provinsi Riau	Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Se Provinsi Riau	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	23	Rehab Berat Puskesmas Koto Baru	Terlaksananya Rehab Puskesmas Koto Baru Kab. Kuansing	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	24	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Cahaya Baru Kec. Mandah	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Cahaya Baru Kec. Mandah	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	25	Peningkatan Pembangunan Puskesmas Bangun Pura menjadi Puskesmas Perawatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	26	Peningkatan Puskesmas Tandun menjadi Puskesmas Perawatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	27	Peningkatan Puskesmas Rambah Hilir menjadi Puskesmas Perawatan	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	28	Pembangunan Ruang rawat inap Puskesmas Sungai Sembilan	Jumlah ruang rawat inap Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	29	Pembangunan Puskesmas Rimba Semina Kecamatan Rakit Kulim	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	30	Pembangunan Puskesmas Koto Baru Kecamatan Kritang	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	31	Pembangunan Puskesmas Pangkalan Kerinci II	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	32	Pembangunan Puskesmas Kampar Timur	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	33	Pembangunan Puskesmas Rawat Jalan Puskesmas Alah Air Kec. Tebing Tinggi kab. Meranti	Jumlah Puskesmas rawat inap yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	34	Pembangunan Puskesmas Koto Gasib Kabupaten Siak (bertingkat)	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 25 35	Pembangunan UGD Puskesmas Kari	Jumlah UGD Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 36	Rehab Berat Puskesmas Koto Baru	Jumlah Bangunan Puskesmas yang Direhab	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 37	Pembangunan Puskesmas Rawat inap desa simp gaung kec gaung Kab Inhil	Jumlah Ruang Rawat Inap	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 38	Pembangunan puskesmas pembantu desa sungai agung kec tapung Kab. Kampar	jumlah Pustu yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 39	Pembangunan puskesmas pembantu desa tebing lestari Kec Tapung hilir Kab. Kampar	jumlah Pustu yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 40	Pembangunan puskesmas pembantu desa tanah sari Kab. Kampar	jumlah Pustu yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 41	Perencanaan Pembangunan Gudang Perlengkapan Propinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Gudang Perlengkapan Prop Riau	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 42	Perencanaan rehab Gedung kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 43	Perencanaan Rehab Rumah Dinas Kesehatan Propinsi riau	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 44	Perencanaan Rehab Gedung Kantor Bapelitkes Propinsi Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 45	Perencanaan Pembangunan Gedung kantor UPT Penanggulangan Krisis dan batra	Jumlah Dokumen Perencanaan	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 46	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Kampar	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 47	Pengadaan /peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Siak	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	25	48	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Kab. Inhil	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	49	Peningkatan Kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	jumlah petugas dengan kinerja yang meningkat		100	Orang	20			0	0	20	20	Dinas Kesehatan
1	02	25	50	Penyelesaian Aset-aset Propinsi Riau Bidang Kesehatan di Kab/Kota Se-Propinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang diselesaikan hibah Asetnya		12	Kab/Kota	12			0	0	12	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	51	Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskemas Koto baru Kab. Kuansing	Jumlah Gedung Rawat Inap		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	52	Pembangunan Turap Gudang farmasi Kab. Kuansing	Jumlah Paket Pembangunan Turap		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	53	Pembangunan Poskesdes 9 unit di Kab. Meranti	Jumlah Poskesdes yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	54	Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis di Kab. Meranti	Jumlah Rumah Dinas Dokter dan paramedis		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	55	Perencanaan Pembangunan Insenerator lomba B3 dan bahan berbahaya lainnya di prov. Riau	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan		1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	56	Rehab Gedung kantor Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung kantor Dinas Kesehatan		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	57	Rehab Rumah Dinas Kesehatan Propinsi Riau	Jumlah Paket rehab Rumah Dinas		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	58	Rehab Gedung Kantor Bapelitkes Propinsi Riau	Jumlah paket rehab gedung kantor bapelitkes		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	59	Pembangunan Puskemas Jaya Mukti Kota Dumai	Jumlah puskesmas yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	60	Pembangunan Puskesmas Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan	Jumlah Puskesmas yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	61	Relokasi Puskesmas kampar kiri tengah	Jumlah Puskesmas yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	25	62	Relokasi Puskesmas Bagan siapi-api Rokan Hilir	Jumlah Puskesmas yang di bangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	63	Revitalisasi Puskesmas Kuala Lahang Kec Gaung Kab Inhil	Jumlah Puskesmas yang di bangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	64	Revitalisasi Puskesmas Kuala Lahang Kec Gaung Kab Inhil	jumlah Puskesmas Yang terbangun'		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	65	Pembangunan Puskesmas Air Molek Kec Pasir Penyau Kab Inhu	Jumlah puskesmas yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	66	Pembangunan Puskemas Kulim jaya Kec. Lubuk batu jaya Kab Inhu	Jumlah puskesmas yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	67	Pembangunan Puskesmas Perawatan Enok Kab Inhil	Jumlah puskesmas perawatan yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	68	Pembangunan Puskesmas Perawatan Teluk Pinang Kab Inhil	Jumlah puskesmas perawatan yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	69	Pembangunan Puskesmas Sungai Tohor Kec. Tebing tinggi Kab.Kep. Meranti	Jumlah Puskesmas yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	70	Pengadaan Mobil operasional farmasi Dinkes Bengkalis	Jumlah Pengadaan Mobil Operasional farmasi		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	71	Pembangunan Rumah Dinas Dokter dan Paramedis Puskesmas Kab Bengkalis	Jumlah Rumah paramedis		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	72	Pengadaan Ambulance Emergency untuk 9 Kab/kota	Jumlah pengadaan Ambulance puskesmas		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	73	Pengadaan ambulance untuk puskesmas di Kota Dumai	Jumlah penngadaan Ambulance puskesmas		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	74	Pengadaan Mebeluler Puskesmas Jaya Mukti Kota Dumai	Jumlah Paket Meubelair puskesmas		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	75	Pengadaan alat kesehatan Puskesmas Jaya Mukti Kota Dumai	Jumlah Paket Alat kesehatan		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	76	Pembangunan posyandu terpadu Di Kota Dumai (3 Unit)	Jumlah Posyandu yang dibangun		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	25	77	Pengadaan meubeler dan peralatan kesehatan untuk Posyandu Di Kota Dumai	Jumlah paket pengadaan meubelair dan alkes posyandu	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	78	Relokasi Puskesmas Rejosari Kota Pekanbaru	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	79	Pembangunan Rumah Paramedis/ Mess Pkm Langgam langgam Kab Pelalawan	Jumlah Rumah paramedis	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	80	Pembangunan Poskesdes di Kab Pelalawan	Jumlah poskesdes yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	81	Pembangunan Puskesmas Kampar (Perawatan)	Jumlah puskesmas perawatan yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	82	Pengadaan Sarana Alat Kesehatan Puskemas Kulim jaya Kec. Lubuk batu jaya	Jumlah Paket Pengadaan Alkes	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	83	Pembangunan Insenerator limbah B3 dan bahan berbahaya lainnya di prov. Riau	Jumlah Incenerator yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	84	Pembangunan Puskesmas teluk Meranti kab. Pelalawan	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	85	Perencanaan Pembangunan IPAL dan incenerator Puskemas di Kab. Rohul	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dok	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	86	Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Rohul	Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	87	Perencanaan Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Kep Meranti	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dok	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	88	Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Kep Meranti	Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	89	Perencanaan Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Rohil	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dok	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	90	Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Rohil	Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPd Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	25	91	Perencanaan Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Inhu	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	92	Pembangunan IPAL dan Incenerator Puskemas di Kab. Inhu	Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	93	Perencanaan Pembangunan IPAL dan Incenarator Puskemas di Kab. Kuansing	Jumlah dokumen perencanaan	1	Dok	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	94	Pembangunan IPAL Puskemas di Kab. Kuansing	Jumlah Ipal dan Incenerator yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	95	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas kab. Pelalawan	Jumlah Paket Alkes	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	96	Pembangunan Puskesmas Perawatan Kuala Lahang dan Concong Luar	Jumlah Puskesmas Perawatan yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	97	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab. Meranti	Jumlah paket Alkes	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	98	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab. Rohil	Jumlah paket Alkes	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	99	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab Bengkalis	Jumlah paket alkes	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	100	Pembangunan Puskesmas Tambang II	Jumlah puskesmas yang dibangun	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	101	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab Dumai	Jumlah paket alkes	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	102	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab Siak	jumlah paket alkes	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	103	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab Inhil	jumlah paket alkes	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	104	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Inhu	jumlah paket alkes	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	105	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab Kuansing	jumlah paket alkes	1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 25 106	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas di Kab Rohul	jumlah paket alkes	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 107	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Pustu di Kab Kampar	jumlah paket alkes	1 Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 108	Pembangunan Puskesmas Pasar Mambo Kota Pekanbaru	Jumlah puskesmas yang dibangun	1 Unit	0			0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1 02 25 109	Pengadaan Alat Puskesmas Pasar Mambo Kota Pekanbaru	Jumlah paket pengadaan alkes	1 Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 110	Pembangunan Puskesmas Bongkol Malang Kec. Kelayang Kab. Inhu	Jumlah puskesmas yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 111	Pembangunan Puskesmas Banjar Balam Kec. Lirik Kab. Inhu	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 112	Pembangunan Puskesmas Batu Papan Kec. Batang cenaku kab Inhu	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 113	Pembangunan Puskesmas Tapung I	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 114	Pembangunan Puskesmas XIII Koto Kampar I	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 115	Pembangunan Puskesmas kampung Pulo Kec. Rengat kab Inhu	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 116	Pembangunan Sarana dan Prasarana pendukung Puskesmas Pematang Jaya Kec. Rengat barat kab Inhu	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 117	pembangunan Posyandu terpadu 5 unit di Kab. Inhu	Jumlah posyandu yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 118	Pembangunan Puskesmas bantan Kec. Teluk pambang Kab. Bengkalis'	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 25 119	Pengadaan Alat kesehatan Puskesmas bantan Kec. Teluk pambang Kab. Bengkalis'	Jumlah paket pengadaan alkes	1 Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	25	120	Pembangunan Puskesmas Perawatan Teluk Belengkong dan Mandah	Jumlah Puskesmas perawatan yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	121	Pembangunan Puskesmas Perawatan Sapat dan Pulau Kijang	Jumlah Puskesmas perawatan yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	122	Pembangunan Puskesmas Perawatan Pelangiran dan Batang Tumu	Jumlah Puskesmas perawatan yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	123	Pembangunan UPT Puskesmas Rawat Inap Kedabu rapat Kec. Rangsang Pesisir Kep Meranti	Jumlah Puskesmas rawat Inap yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	124	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Rawat Inap Kedabu Rapat Kec rangsang Kep Meranti	Jumlah paket pengadaan alkes	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	125	Pembangunan Pustu 4 Unit di Kab Inhu	Jumlah pustu yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	126	Pembangunan Poskesdes 9 Unit di Kep Meranti	Jumlah Poskesdes yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	127	Pembangunan Poskesdes 5 unit di Kep Meranti	Jumlah poskesdes yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	128	Rehab Pustu dan Polindes di Kep Meranti (8 unit)	Jumlah poskesdes yang dibangun	1	Unit	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	129	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Rohil	Jumlah Paket Pengadaan sarana dan prasarana	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	130	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Rohul	Jumlah Paket Pengadaan sarana dan prasarana	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	131	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Bengkalis	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana	1	Paket	1				0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	25	132	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Inhu	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	133	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kota Pekanbaru	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	134	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kota Dumai	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	135	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Kep meranti	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana		1	Paket	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	136	pembangunan Puskesmas Plus di Prov Riau (8 unit)	jumlah puskesmas plus yang di bangun'		25	Unit	25			0	0	25	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	137	Pengadaan Peralatan Puskesmas di Riau	Jumpah paket Peralatan Puskemas yang tersedia		25	Paket	25			0	0	25	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	138	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas di Kab. Siak	Terlaksananya Pengadaan Prasarana Poliklinik Umum (5 set), Gawat Darurat (2 set) dan PONED (2 set) Kab. Siak		9	Set	9			0	0	9	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	139	Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung	Pembangunan Rumah Dinas di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung Kab. Meranti		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	140	Pembangunan Rumah Dinas Paramedis di Puskesmas Perawatan Teluk Belitung	Pembangunan Rumah Dinas Paradis Puskesmas Perawatan Teluk Belitung		1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	141	Pengadaan Alat Kesehatan untuk Poskesdes	Terlaksananya Pengadaan alat Kesehatan untuk Poskesdes di Kab. Meranti		9	Unit	9			0	0	9	100	Dinas Kesehatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	25	142	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Tanah Sari Kab. Kampar	Tersedianya Puskesmas Pembantu Desa Tanah Sari Kab. Kampar	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	143	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas Se Provinsi Riau	Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas Se Provinsi Riau	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	144	Rehab Berat Puskesmas Koto Baru	Terlaksananya Rehab Puskesmas Koto Baru Kab. Kuansing	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	145	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Cahaya Baru Kec. Mandah	Pembangunan Puskesmas Pembantu Desa Cahaya Baru Kec. Mandah	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	25	146	Pengadaan/peningkatan/perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas Kab. Kuansing	jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana	1	Unit	1			0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26		Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Persentase ketersediaan Jenis Pelayanan	80.0%		60.0%	65.0%	0.6225	95.77	0.7	0.7	100	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad,RSUD Petalabumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan
1	02	26	01	Rehab Gedung Kantor (Ruang Aula, Ruang Makan, Rumah Dinas dan Gudang UPT Bapelitkes Pekanbaru	jumlah Rehab gedung kantor yang representative	5	Paket	1	1 paket	1	15.00	1	3	60	Dinas Kesehatan
1	02	26	02	Pengadaan Alat-Alat Keperawatan RS Petala Bumi	jumlah paket alat-alat perawatan yang tersedia	5	Paket	1	1 paket	1	92.00	1	3	60	Dinas Kesehatan
1	02	26	03	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Habis Pakai RS Petala Bumi	jumlah bahan habis pakai yang tersedia	5	Paket	1	1 paket	1	86.00	1	3	60	Dinas Kesehatan
1	02	26	04	Pengadaan Obat-Obat Standar RS Petala Bumi	jumlah oabt stnadar RS yang tersedia	5	Paket	1	1 paket	1	82.00	1	3	60	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 26 05	Pengadaan Obat Generik RS Petala Bumi	jumlah Obat generik yang tersedia	5	Paket	1	1 paket	1	40.00	1	3	60	Dinas Kesehatan
1 02 26 06	Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat RS Petala Bumi	Jumlah perعتakan adm RS dan surat menyurat yang tersedia	5	Paket	0	1 paket	1	92.00	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 26 07	Pengadaan Peralatan Pelayanan Binatu (Laundry) di RS Petala Bumi	Jumlah oengadaan peralatan Pelayanan binatu yang di adakan	5	Paket	1	1 paket	1	80.73	1	3	60	Dinas Kesehatan
1 02 26 08	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga RS Petala Bumi	jumlah peralatan rumah tangga yang di adakan	5	Paket	0	1 paket	1	98	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 26 09	Renovasi Bangunan	jumlah bangunan yang di renovasi	5	Paket	1	1 paket	1	79.00	1	3	60	Dinas Kesehatan
1 02 26 10	Penyediaan Finalisasi Master Plan RS Petala Bumi	jumlah master Plan RS yang di susun	5	Dok	1	1 dok	0	0.00	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 26 11	Pengadaan IPAL RS Petala Bumi	jumlah IPAL RS yang di bangun	5	Paket	0	1 paket	1	60.00	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 26 12	Pengadaan Makan Minum Pasien RS Petala Bumi	jumlah bulan yang tersedia makan dan minum	12	Bulan	12	12 bulan	12	79.00	12	12 bulan	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 13	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RS Petala Bumi	jumlah alat kesehatan RS yang di adakan	5	Paket	1	1 paket	1	70.00	1	3	60	Dinas Kesehatan
1 02 26 14	Pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Riau di Pekanbaru	jumlah bangunan RS yang di bangun	5	Paket	0	1 paket	0	0.00	1	1	20	Dinas Kesehatan
1 02 26 15	Pengadaan Obat-obatan Non Generik RS Petalabumi	Jumlah Obat-obat Non generik Rs yang di adakan	5	Paket	0	1 paket	1	40.00	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 26 16	Pembangunan Rumah Sakit Trauma Center PMI	Jumlah bangunan RS yang di bangun	5	Paket	0	1 paket	0	0.00	1	1	20	Dinas Kesehatan
1 02 26 17	Penyediaan Jasa Pengecatan Gedung RS Petala Bumi	jumlah bangunan RS yang di cat	5	Paket	0	1 paket	1	80.00	1	2	40	Dinas Kesehatan
1 02 26 18	Penyusunan Inventarisasi Sarana dan Prasarana RSUD, Puskesmas, Pustu dan Puskesmas Se-Propinsi Riau puskesmas. Pustu dan puskesl se prov Riau	Jumlah Dokumen Inventarisasi sarana dan prasarana	0		Dok/12 kab kota		0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	26	19	Pembangunan Bank RSUD RSUD Selasih	jumlah bang darah RS yang di bangun'	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	20	Peralatan RS dr. Pratomo Rokan Hilir	Jumlah paket pengadaan alkes RS Pratomo	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	21	Lanjutan pembangunan RS Pulau Kijang Inhil	Jumlah Rs yang dibangun	1	Unit	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	22	Pembangunan Ruang Haemodialisa RS Siak	Jumlah ruang Hemodialisa RS Siak	1	Unit	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	23	Pembangunan ruang rawat inap kelas III RS Puri husada kab. Indragiri Hilir	Jumlah Ruang perawatan RS yang dibangun	1	Unit	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	24	Pembangunan IPAL RSUD Rokan Hulu	Jumlah Ipal RS yang dibangun	1	Unit	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	25	Pengadaan Alat Kesehatan ICU RSUD Kab. Siak	Jumlah paket Pengadaan Alkes ICU RS	1	Paket	1 paket	0		0	0	0	0		Dinas Kesehatan
1	02	26	26	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS Bagan Sinembah Kab. Rohil	Jumlah sarana dan prasarana RS yang dibangun	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	27	Pengadaan Alat Kesehatan RS Bagan Sinembah Kab. Rohil	Jumlah Paket pengadaan Alkes Rs	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	28	Pembangunan sarana dan Prasarana RS Pulau Kijang Kab Inhil	Jumlah Sarana dan prasarana RS	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	29	Pengadaan Alat Kesehatan RS Pulau Kijang Kab. Inhil	Jumlah paket pengadaan alkes	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	30	Pembangunan Sarana dan Prasarana RS Rokan Hulu	Jumlah sarana dan prasarana RS yang dibangun	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	31	Pembangunan Ruang VIP RSUD Dumai	jumlah Ruangan VIP RSUD yang dibangun	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	32	Pengadaan peralatan RS dr. Pratomo Bagan Kab. Rohil Rokan Hilir	Jumlah paket pengadaan peralatan RS	1	Paket	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	26	33	Pembangunan Rumah Dinas dokter Spesialis RSUD Rokan Hulu	Jumlah Rumah Dinas dokter RS	1	Unit	1	0		0	0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 26 34	Pengadaan Alkes Ruang Operasi RSUD Rokan hulu	Jumlah paket Pengadaan Alkes Ruang Operasi RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 35	Pengadaan Kulkas Jenazah RSUD Rokan Hulu	Jumlah Paket pengadaan Kulkas Jenazah RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 36	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan RSUD Puri Husada tembilahan kab. Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Instalasi rawat jalan RS	0		0		0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1 02 26 37	Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Inap RSUD Puri husada tembilahan kab. Indragiri Hilir	Jumlah Gedung Instalasi rawat inap RS	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 38	Pembangunan Gedung Radiologi dan CT scan RSUD Puri Husada tembilahan kab. Indragiri Hilir	Jumlah gedung radiologi dan CT Scan RS	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 39	Pembangunan IPAL RSUD Puri Husada Tembilahan kab. Indragiri Hilir	Jumlah IPAL RSUD	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 40	Pengadaan Endoscopy Gastrointestinal RSUD Puri Husada Inhil	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 41	Pengadaan operating Lamp RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 42	Pengadaan Ventilator RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 43	Pengadaan Monitor pasien RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 44	Pembangunan Instalasi Gas Medis RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana RS	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 45	Revitalisasi UGD PONEK RSUD Indrasari Rengat kab. Inhu	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana RS	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 46	Revitalisasi Bangunan Rawat Inap Kelas III RSUD Indrasari Rengat Kab. Inhu	Jumlah Bangunan Rawat Inap di RS	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 02 26 47	Pembangunan sarana dan prasarana Rumah sakit di Prov Riau	jumlah saran dan prasarana RS yang dibangun'	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 48	Pengadaan Peralatan Rumah sakit di Riau	jumlah saran dan prasarana RS yang diadakan"	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 49	Pengadaan Instalasi gas Medis RSUD Indrasari Rengat kab Indragiri Hulu	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 50	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Pekanbaru	Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 51	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung RSUD Pekanbaru	Jumlah sarana dan prasarana pendukung	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 52	pengadaan Sarana IPAL dan Insenerator RSUD Pekanbaru	Jumlah Sarana Ipal dan Incenerator	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 53	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kab. Kep Meranti	Jumlah Pengadaan Alat kesehatan RS	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 54	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung RSUD Kab Kep Meranti	Jumlah pengdaan sarana dan prasarana pendukung	1	Paket	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 02 26 55	Pembangunan gedung Rawat Inap RSUD Taluk Kuantan Kab. Kuantan Sengingi	Jumlah Pengadaan Ruang Rawat Inap RS	1	Unit	1	0		0	0	1	100	Dinas Kesehatan
1 0 27 10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan masyarakat rujukan yang dipelihara	95.0%		50.0%	50.0%	0.51875	103.75	0.65	0.65	100	Dinas Kesehatan, RSUD Arifin Achmad, RSUD Petalabumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampar
1 02 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka kematian ibu melahirkan, bayi dan anak (per 100,000)										Dinas Kesehatan
		Ibu: 118/100.000 Kelahiran Hidup	104		118	116	115	99.13793 103	113	113	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					bayi: 24/1.000 Kelahiran hidup		21		24	24	24	100	24	24	100	
					Anak: 28/1.000 Kelahiran hidup		26		28	28	28	100	28	28	100	
1	02	32	01		Peningkatan Kinerja Pengelola Program Kesehatan Anak	Meningkatkan kinerja petugas dalam pelaksanaan program anak	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	12	15	12	12 Kab/Kota	100	Dinas Kesehatan
1	02	32	02		Perawatan Neonatus Esensial	Terlaksananya Tata laksana Kohort Bayi dan Balita	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24	0	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	100	Dinas Kesehatan
1	02	32	03		Akselerasi Penurunan Kematian Perinatal Tk. Provinsi Riau	Perawatan Neonatus Esensial Audit Maternal Perinatal terkini	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	12	100	12	12 Kab/Kota	100	Dinas Kesehatan
1	02	32	04		Evaluasi Bringing Rate dan Filling Rate Serta Logistik Buku KIA	Tersedianya Logistik Buku KIA dan terinventarisnya Bringing Rate dan Filling Rate Buku KIA	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	0	0	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24 Kab/ Kota & Puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	32	05		Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Terkoordinasinya Kegiatan Kualitas Hidup Anak (UKS, Remaja dan Anak dengan keb. Khusus	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	12	45	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	32	06		Penguatan Kohort Bayi dan Balita	Terlaksananya Penguatan Kohort Bayi dan Balita	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24	46	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24 Kab/ Kota & Puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	32	07		Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang Bayi dan Balita	Terlaksananya Penguatan SDIDTK dalam yankes balita	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	32	08		Peningkatan Cakupan K4 melalui Penguatan P4K dan ANC Terpadu	Terlaksananya Peningkatan Cakupan K4 melalui penguatan p4k dan ANC Terpadu di 12 Kab/Kota	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	0	0	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24 Kab/ Kota & Puskesmas	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	02	32	09	Peningkatan SDM (Bidan Desa) di Kab/Kota dengan Jumlah Kasus Kematian Ibu tertinggi kematian tertinggi	terlaksananya peningkatan SDM (bidan desa) di 6 Kab/kota dengan kasus kematian tertinggi	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	0	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	32	10	Pelacakan kasus kematian Ibu (Audit Kematian Ibu)	Terlaksananya pelacakan kematian ibu (Audit Kematian Ibu) di 12 kab/kota	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24	34.1	24	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24 Kab/ Kota & Puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	32	11	Peningkatan Kapasitas pengelola Program Kesehatan Ibu	Terlaksananya peningktan kapasitas pengelolaan prorgam kesehatan ibu di 12 Kab/Kota	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	0	0	0	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	32	12	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan KB berkualitas	Terlaksananya fasilitasi peningkatan pelayanan KB berkualitas di 12 Kab/kota	12	Kab/Kota	12	12 Kab/Kota	12	20	12	12	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	32	13	Pengadaan Paket Kelas Ibu Hamil	Terlaksananya pengadaan paket kelas ibu bagi 12 kab/kota	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	0	0	0	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24 Kab/ Kota & Puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	32	14	Pengadaan Paket Pemeriksaan Ibu Hamil	Terlaksananya pengadaan paket pemeriksaan ibu hamil di 12 kab/kota	24	Kab/Kota & Pusk	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	0	0	0	24	24 Kab/ Kota & Puskesmas	24 Kab/ Kota & Puskesmas	Dinas Kesehatan
1	02	12		Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan logistik kesehatan	98%		87%	90%	90%	100	0.92	0.92	100		Dinas Kesehatan
1	02	12	01	Implementasi Sistem Pengelolaan Instalasi Farmasi kab/kota Se- Prov Riau	Jumlah Kab/Kota yang dapat menerapkan sistem pengelolaan Instalasi Farmasi yang baik dan benar	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota		0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015		Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12						
1	02	12	02	Peningkatan Pelayanan Instalasi farmasi Propinsi Riau	Jumlah Kab/Kota yang dapat pengetahuan tentang Peningkatan Pelayanan Instalasi Farmasi	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota			0	0		14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	12	03	Implementasi Sistem Pengelolaan Logistik Dinas kesehatan Kab/Kota tahun 2015	Jumlah Kab/Kota yang dapat menerapkan sistem pengelolaan logistik yang baik dan benar	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota			0	0		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	12	04	Peningkatan Pelayanan Logistik Dinas kesehatan Propinsi Riau	Jumlah kab/Kota dengan Tenaga Pengelola Instalasi Farmasi yang dapat pengetahuan tentang Peningkatan Pelayanan Logistik	12	Kab/Kota	12	Kab/Kota			0	0		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	12	05	Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Jumlah Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	1	Paket	1	Paket			0	0		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	02		Program Pengendalian Penyakit tidak Menular	Persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular	90%		30%	40%	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	01	Pengembangan Posbindu	Jumlah kab/kota dengan posbindu aktif yang tersedia (10% per jumlah desa)	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	02	02	Peningkatan Program Penyakit Tidak Menular	Jumlah kab/kota dengan peralatan PTM yang tersedia	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	02	03	Survei Deteksi Dini Faktor resiko Penyakit Tidak Menular (PTM)	Jumlah kab/kota dengan Masyarakat yang diperiksa PTM	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	02	04	Pengawasan dan pengendalian penyakit Tidak Menular di Kabupaten / Kota	Jumlah Kab/Kota yang di Monev	12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	02	05	Survei Pelaksanaan Kegiatan Program PPTM di Posbindu	Jumlah kab/kota dengan Posbindu		12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	02	06	Peningkatan kapasitas Teknis dan Manajemen Faktor Resiko Penyakit PTM penyakit tidak menular	jumlah kab/kota dengan Peningkatan SDM		12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1	02	02	07	Monitoring dan Evaluasi pengendalian PTM	Jumlah Kab/kota yang di evaluasi program surveilans		12	Kab/Kota	12	0	0	0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan
	02															
1	02	02		Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per 100.000 penduduk		12%		9.4	9.4	9.7525	103.75	0.1	0.1	100	Dinas Kesehatan
1	02	02		Program Manajemen dan Informasi Kesehatan	Persentase perencanaan kesehatan dengan sistem informasi kesehatan		76%		60%	63%	62.25%	98.81	0.65	0.65	100	Dinas Kesehatan
1	02	16		Program Diklat dan Penelitian Kesehatan	Persentase Pelatihan yang dikerjakan (%)		100%		25%	75%	77.81%	103.75	1	1	100	Dinas Kesehatan
1	02	16	01	peningkatan Sumber daya Manusia Bidang Kesehatan di UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan Kesehatan olahraga masyarakat	Jumlah Masyarakat dan Aparatur Kesehatan yang mengikuti kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan di UPT. Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pengembangan SDM dan KOM		100 masyarakat/ aparat		100 masyarakat/ aparat			0	0	100 masyarakat/ aparat	100 masyarakat/ aparat	Dinas Kesehatan
1	02	16		Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	Persentase Prosentase Krisis kesehatan termasuk KLB yang ditangani < 24 Jam (%)		100%		95%	100%	0.985625	98.5625	1	1	100	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1				2		3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	16		Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan Lingkungan	Persentase pemeriksaan laboratorium Klinis dan lingkungan yang dilayani telah terakreditasi (ISO)												Dinas Kesehatan
					Lab. Klinis : 24.29%	50%		24.4%	24.3%	25.26%	104.01	0.35	0.35	100	Dinas Kesehatan		
					Lab. Lingkungan : 44,90%	100%		44.9%	44.9%	46.58%	103.75	60	60	100	Dinas Kesehatan,		
1	02	02		Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang sakit mendapat pelayanan kesehatan	100%		100%	100%	1	100	1	1	100	Dinas Kesehatan,		
1	02	02	01	Penyediaan Biaya Jamkesda/PBI Daerah di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyediaan Biaya Jamkesda Provinsi Riau Selama 12 bln	12	Bulan	12			0	0	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan		
1	02	02	02	Manajemen Pelaksanaan Jamkesda	Terlaksananya Manajemen Pelaksanaan Jameksda Selama 12 bln	12	Bulan	12			0	0	12 Bulan	12 Bulan	Dinas Kesehatan		
1	02	02	03	Pelatihan PHA/DHA Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelatihan PHA/DHA dengan peserta dari provinsi dan 12 kab/kota	12	Kab/Kota	12			0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan		
1	02	02	04	Koordinasi Pelaksanaan JKN	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan JKN dengan 12 Kab/Kota	12	Kab/Kota	12			0	0	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	Dinas Kesehatan		
1	02	24		Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100%		100%	100%	100%	100	1	1	100	RS Jiwa Tampan dan RSUD Petala Bumi		
1	02	33		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan padal BLUD RS sesuai standar Pelayanan Minimal	100%		50%	60%	62%	103.75	0.7	0.7	100	RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi dan Rumah Sskit Jiwa Tampan		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	02	28		Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pemberi pelayanan kegawat darurat yang bersertifikat	100%		70%	70%	73%	103.75	0.8	0.8	100	Rumah Sakit Jiwa Tampan, RSUD Arifin Achmad
1	08			LINGKUNGAN HIDUP											
1	08	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Jumlah kabupaten/Kota yang meraih penghargaan tentang kebersihan tingkat nasional			2.0%	0	0	0	0	0	100	Badan Lingkunga Hidup, Cipta Karya
1	08	16		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72.00%		2.00%	2.00%	2.00%	100	55%	59%	81.94	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, PU dan CK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	08	16	01	Penilaian dan Pembinaan Kota Bersih dan Teduh / Adipura	Jumlah Ibukota Kab/Kota yang Meningkatkan Kebersihan dan Keteduhannya	12	kota					12 kota	12 kota	100	Badan Lingkunga Hidup,
1	08	16	02	Penanganan Kasus/Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus/Sengketa Lingkungan yang di Selesaikan	15	lk					8 lk	8 lk	100	Badan Lingkunga Hidup,
1	08	16	03	Kampanye Lingkungan Hidup	Frekuensi Pelaksanaan Kampanye							3 paket	3 paket	100	Badan Lingkunga Hidup,
1	08	16	04	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah Sungai Besar yang di Pantau di Tetapkan dan di Informasikan Status Mutu Airnya	2						2	2	100.0	Badan Lingkunga Hidup,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1081605	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah usaha/keg. Yg diawasi pengelolaan B3 dan LB3 nya	30						25	25	83.3	Badan Lingkunga Hidup,
1081606	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)	Jumlah Perusahaan Peserta PROPER yang dinilai	30						28	28	93.3	Badan Lingkunga Hidup,
1081607	Koodinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih	Jumlah Perusahaan Peserta Prokasih yang dipantau	40						38	38	95	Badan Lingkunga Hidup,
1081608	Pemantauan Kualitas Udara Ambient	Jumlah Kota yang dipantau, ditetapkan dan diinformasikan Status Mutu Udaranya	10 kab						10 kab	10 kab	100	Badan Lingkunga Hidup,
1081609	Verifikasi dan Sosialisasi Beban Pencemaran Air dan Udara	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Verifikasi dan Sosialsasi Beban Pencemaran Air dan Udara							8 lokasi pelatihan persampahan, 1 lokasi demplot pengukuran emisi non kawasan, 1 event	8 lokasi pelatihan persampahan , 1 lokasi demplot pengukuran emisi non kawasan, 1 event	100	Badan Lingkunga Hidup,
1081610	Peningkatan Upaya Pengendalian Perubahan Iklim	Jumlah Orang yang mengikuti Upaya Pengendalian Perubahan Iklim	8 lokasi pelatihan persampahan, 1 lokasi demplot pengukur an emisi non kawasan, 1 event						5 lokasi, 3 reaktor, 1 biourin	5 lokasi, 3 reaktor, 1 biourin	100	Badan Lingkunga Hidup,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	08	16	11		Pengembangan Program Kampung Iklim dan Biogas		Jumlah Lokasi Proklamasi dan Biogas	10 lokasi, 3 reaktor, 1 biourin, komposter 30 unit, PAH 10, bopori 50 unit								Badan Lingkungan Hidup,
1	08	16	12		Pengembangan Dewan Daerah Perubahan Iklim		Jumlah Rakor DDPI yang dilaksanakan	2 kali rakor, 1 kelembagaan kab/kota								Badan Lingkungan Hidup,
																Badan Lingkungan Hidup,
1	08	17			Program Perlindungan dan Konservasi SDA		Jumlah Desa dan kelurahan yang mendapat pembinaan di bidang lingkungan hidup	80		46	29	63.04	50	79	98.75	Badan Lingkungan Hidup,
1	08	17	01		Pembinaan Konservasi Keanekaragaman Hayati		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Konservasi Keanekaragaman Hayati	500 orang					350	350 orang	70	Badan Lingkungan Hidup,
1	08	17	02		Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Riau		Jumlah Dokumen Profil Keanekaragaman Hayati Riau yang disusun	0					0	0	0	Badan Lingkungan Hidup,
1	08	17	03		Pembinaan Calon Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup		Jumlah Individu/Kelompok Masyarakat Penerima Calon Penerima Penghargaan yang dibina						0	0	0	Badan Lingkungan Hidup,
1	08	17	04		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Pesisir dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Kawasan Pesisir dan Laut		Persentase Peningkatan Tutupan Mangrove	0				90.32	7000 bibit	7000 bibit		Badan Lingkungan Hidup,
																Badan Lingkungan Hidup,

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RPKD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RPKD Tahun 2014	Realisasi RPKD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	08	19				100	100	100	100	100	100	Badan Lingkungana Hidup,
1	08	19	01			Jumlah Sekolah dan Berbudaya Lingkungan	100 sekolah		0.8	0.8	0.2	Badan Lingkungana Hidup,
1	08	19	02			Jumlah buku SLHD dan Statistik Lingkungan yang dihasilkan	150 buku		60 sekolah	60 sekolah	60	Badan Lingkungana Hidup,
1	08	19	03			Jumlah Peserta dari Prov dan Kabupaten/Kota yang Mengikuti Rakor	50 orang		150 buku	150 buku	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
1	08	19	04			Jumlah Masyarakat yang diberikan Sosilalisasi Program 3R			50 orang	50 orang	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
1	08	22				Persentase Penurunan Luas Areal yang Terbakar	100%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
1	08	05				Persentase penurunan luas areal yang terbakar	penurunan 100%	15.269 ha	penurunan 0%	penurunan 0%	100	Badan Lingkungan Hidup, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
																Pembangunan Desa, Badan Koordinasi Penyuluhan
1	08	05	01	Sosialisasi Kebijakan Pencegahan Kebakaran Hutan	Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan pencegahan Karhutla		385 orang						385 orang	385 orang	100	
1	08	05	02	Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)	Jumlah Anggota MPA yang dibina		385 orang						385 oran	385 oran	100	
1	08	05	03	Pengendalian Karhutla Berbasis Masyarakat	Jumlah Kanal yang disekat Berbasis Masyarakat		30 lokasi						6 lokasi	6 lokasi	20	
1	08	06		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam rangka peningkatan pengelolaan ruang terbuka hijau		12		0	0	0	0	4	4	33.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, Cipta Karya tata ruang dan sumberdaya air
1	03			PEKERJAAN UMUM												
1	03	15		Program Pembangunan jalan dan Jembatan	panjang jalan provinsi dalam kondisi baik (km)		990.8			9311	198.16	2.13	129	327.16	33.02	Dinas Bina Marga
	03				panjang Jembatan provinsi Dalam Kondisi baik (meter)		8803			8852	6196	70.00	1065	7261.4	82.49	
	03				Jumlah desa yang rendah aksesibilitas		71	Desa		0	0	0	22	22	30.99	
1	03	15	1	Peningkatan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti			35	Km					8	8	22.86	Dinas Bina Marga
1	03	15	2	Peningkatan Jalan Cerenti - Sp. Kelayang			38.5	Km					9	9	23.38	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	3	Peningkatan Jalan Lubuk Jambi - Sp. Ibul - Sp. Ila		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	4	Peningkatan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling		7.5	Km					1.5	1.5	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	5	Peningkatan Jalan Tempuling - Tembilahan		10	Km					2	2	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	6	Peningkatan Jalan Air Hitam Raya		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	7	Peningkatan Jalan SM. Amin		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	8	Peningkatan Jalan Pasir Putih		8.7	Km					2	2	22.99	Dinas Bina Marga
1	03	15	9	Peningkatan Jalan Kandis - Tapung		8.8	Km					2	2	22.73	Dinas Bina Marga
1	03	15	10	Peningkatan Jalan Tapung - Tandun		20.8	Km					5	5	24.04	Dinas Bina Marga
1	03	15	11	Peningkatan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning		9.4	Km					1.88	1.88	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	12	Peningkatan Jalan Bagan Siapi-api - Sinaboi		7	Km					1.5	1.5	21.43	Dinas Bina Marga
1	03	15	13	Peningkatan Jalan Simpang Lago - Simpang Buatan		4.6	Km					1	1	21.74	Dinas Bina Marga
1	03	15	14	Peningkatan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan/Buton		16.6	Km					4	4	24.10	Dinas Bina Marga
1	03	15	15	Peningkatan Jalan Lipat Kain - Lubuk Agung		4	Km					1	1	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	16	Peningkatan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah		6.6	Km					1.5	1.5	22.73	Dinas Bina Marga
1	03	15	17	Peningkatan Jalan Kota Tengah - Sei Rangau		6	Km					1.5	1.5	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	18	Peningkatan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin		2.6	Km					0.5	0.5	19.23	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 15 19	Peningkatan Jalan Pantai Cermin - Petapahan		2.6 Km					0.5	0.5	19.23	Dinas Bina Marga
1 03 15 20	Peningkatan Jalan Lingkar Kota Bangkinang		12 Km					3	3	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 21	Peningkatan Jalan Sp. Minas - Perawang - Meredan-Sp. Buatan		4.8 Km					1	1	20.83	Dinas Bina Marga
1 03 15 22	Peningkatan Jalan Sp. Beringin - Meredan		26 Km					6	6	23.08	Dinas Bina Marga
1 03 15 23	Peningkatan Jalan Tembilahan - Enok (Sharing Kab/Kota)		20 Km					4	4	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 24	Peningkatan Jalan Enok - Benteng - Pulau Kijang (Sharing Kab/Kota)		20 Km					4	4	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 25	Peningkatan Jalan Dalu dalu - Rantau Kasai (Sharing DAK dan APBD) DAK : Rp. 33.338.640.000,00 APBD : Rp. 3.500.000.000,00		24.6 Km					5	5	20.33	Dinas Bina Marga
1 03 15 26	Peningkatan Jalan Rantau Kasai - Mahato		5 Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 27	Peningkatan Jalan Mahato - Pujud		9 Km					2	2	22.22	Dinas Bina Marga
1 03 15 28	Peningkatan Jalan Pujud - Sp. Manggala		9.6 Km					2	2	20.83	Dinas Bina Marga
1 03 15 29	Peningkatan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya		6.25 Km					2	2	32.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 30	Pembangunan Box Culvert Jalan Km 8 - Kota Baru		0.4 Km					0	0	0.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 31	Peningkatan Jalan Lubuk Kandis - Sp. Ifa		16 Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 32	Peningkatan Jalan Rokan - Banjar Datar		8 Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 33	Pembangunan Jalan Banjar Datar - Batas Sumbar		8 Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 34	Peningkatan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas		8 Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	35	Peningkatan Jalan Teluk Meranti - Guntung		5.88	Km					1	1	17.01	Dinas Bina Marga
1	03	15	36	Peningkatan Jalan Kubang Raya		2.4	Km					0.5	0.5	20.83	Dinas Bina Marga
1	03	15	37	Peningkatan Jalan Pedamaran - Teluk Piyai (Kubu)		22	Km					4	4	18.18	Dinas Bina Marga
1	03	15	38	Peningkatan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Sei. Daun		20	Km					4	4	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	39	Peningkatan Jalan Sei. Daun - Panipahan		10	Km					2	2	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	40	Peningkatan Jalan Pedamaran I - Pedamaran II (sharing kab/kota)		1.5	Km					0	0	0.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	41	Peningkatan Jalan Pekan Heran - Teluk Kiambang - Mumpa (Sharing Kab/Kota)		4.6	Km					1	1	21.74	Dinas Bina Marga
1	03	15	42	Peningkatan Jalan Batu Besurat - Tanjung - Dusun Batas		9.2	Km					2	2	21.74	Dinas Bina Marga
1	03	15	43	Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang (A)		10.5	Km					2	2	19.05	Dinas Bina Marga
1	03	15	44	Peningkatan Jalan Pekanbaru - Bangkinang (B)		10.5	Km					2	2	19.05	Dinas Bina Marga
1	03	15	45	Peningkatan Jalan Dalam Kota Pekanbaru		1	Km					1	1	100.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	46	Peningkatan Jalan Batu Gajah - Sei. Karas		0	Km					0			Dinas Bina Marga
1	03	15	47	Peningkatan Jalan Desa Peranap-Desa Kampung Balak Kec. Tebing Tinggi Barat (Sharing Kab/Kota)		22	Km					4	4	18.18	Dinas Bina Marga
1	03	15	48	Peningkatan Jalan Desa Alai Selatan-Desa Batang Malas Kec. Tebing Tinggi Barat (Sharing Kab/Kota)		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	49	Pembangunan Jalan Sp. Panam - Bts. Kampar (Garuda Sakti)		2.6	Km					0.5	0.5	19.23	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	50	Pembebasan Lahan dan Utilitas Kota Pekanbaru			7.2	Km					1	1	13.89	Dinas Bina Marga
1	03	15	51	Pembangunan Jembatan Inuman			880	M					220	220	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	52	Pembangunan Jembatan Sumpur			359.6	M					89.9	89.9	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	53	Pembangunan Jembatan Pangean			880	M					220	220	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	54	Peningkatan Jembatan Rantau Berangin - Tandun			1000	M					200	200	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	55	Peningkatan Jembatan Tandun - Ujung Batu			500	M					100	100	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	56	Pembangunan Jembatan Kota Lama (Rohul)			490	M					90	90	18.37	Dinas Bina Marga
1	03	15	57	Pembangunan Jembatan Gantung Sei Rokan (Kec. Tangun)			516	M					104	104	20.16	Dinas Bina Marga
1	03	15	58	Pembangunan Jembatan Sungai Belading			324	M					81	81	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	59	Pembangunan Jembatan Ruas Jalan Lipat Kain - Lb. Agung			480	M					120	120	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	60	Pembangunan Jembatan Pulau Birandang - Pasar Kampar Kec. Kampar Timur (Lanjutan 3) (Sharing Kab/Kota)			640	M					140	140	21.88	Dinas Bina Marga
1	03	15	61	Pengawasan Peningkatan Jalan			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	62	Pengawasan Peningkatan Jalan (A)			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	63	Pengawasan Peningkatan Jalan (B)			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	64	Pengawasan Peningkatan Jalan (C)			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	65	Pengawasan Peningkatan Jalan (D)			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	66	Pengawasan Pembangunan Jalan			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	67	Pengawasan Pembangunan Jembatan			5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	68	Pengawasan Peningkatan dan Penggantian Jembatan		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	69	Perencanaan Teknik Jembatan		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	70	Perencanaan Teknik Jalan		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	71	Peningkatan Jalan Batu Tujuh menuju Spg. Jembatan Pedamaran I Kec. Bangko		400	M					80	80	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	72	Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kampar Timur Lanjutan (3)		350	M					70	70	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	73	Pengendalian,Pemeliharaan,Peningkatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Konsultansi Ke Luar Daerah		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	74	Pembangunan Jalan Riau Ujung		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	75	Pembangunan Jembatan Sungai Air Hitam		175	M					35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	76	Pembangunan Jembatan Sungai Sibam		175	M					35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	77	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan Jalan Bagan Jaya Enok - Kuala Enok)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	78	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan Jalan Sei. Pakning - Tik. Mesjid - Sp. Pusako)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	79	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan Jalan Pelintung - Sepahat - Sei. Pakning)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	80	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan Jembatan Teluk Mesjid)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	81	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan Jembatan Perawang)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPd Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPd Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	82	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan jalan Dalu - Mahato - Sp.Manggala		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	83	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan jalan sp. Kumu - Sontang - Duri)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	84	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan jalan Sei Akar - Bagan Jaya)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	85	Pembayaran Eskalasi (Paket Pembangunan jalan Sorek - Tlk. Meranti - Guntung)		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	86	Pembangunan Jembatan Pada Ruas Jalan Mandah - Bente		175	M					35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	87	Peningkatan Jalan Kota Tembilahan		15	Km					3	3	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	88	Pembangunan Jalan Tembilahan - Mandah		10	Km					2	2	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	89	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Sipungguk		175	M					35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	90	Pembangunan jembatan gantung Desa Pangkalan Baru - Buluh Nipis kab. Kampar		350	M					70	70	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	91	Pembangunan jembatan gantung Desa Kuapan - Koto Perambahan kab. Kampar		350	M					70	70	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	92	Peningkatan Jalan Sp. Air Hitam - Sp.Jalan Riau		3	Km					0.6	0.6	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	93	Pembangunan Jerambah Beton Desa Belaras Kec. Mandah Kab. Inhil		100	M					20	20	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	94	Pembebasan lahan jembatan lubuk jambi		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	95	Pembayaran Audit Jembatan Siak IV		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	96	Peningkatan jl. Imam Bonjol, jl. Teratai, Jl. Kamboja,Jl.Tenaga Kec. Dumai Kota Dumai		3	Km				0.6	0.6	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	97	Peningkatan jalan Muhajirin dan Jalan Durian Desa Kualu Nenas Kec. Tambang		3	Km				0.6	0.6	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	98	Peningkatan Jalan Objek Wisata Danau Bokuok Kec. Tambang Kab. Kampar		2	Km				0.4	0.4	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	99	Peningkatan Jl. Nibul desa Batu Ampar Kec. Kemuning kab. Rohil		21	Km				5	5	23.81	Dinas Bina Marga
1	03	15	100	Peningkatan jalan Masa Karya II tarai bangun kab. Kampar		0.5	Km				0.1	0.1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	101	Peningkatan Jalan haji Usman I Kubang Jaya Siak Hulu Kab. Kampar		0.6	Km				0.12	0.12	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	102	Peningkatan jalan lubuk Meriam kuala Gasib Kab. Siak		0.5	Km				0.1	0.1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	103	Pembuatan Box Culvert jalan H. Usman I Kubang Jaya Kab. Kampar										Dinas Bina Marga
1	03	15	104	Peningkatan jalan jalan Suka Makmur Desa Sumber makmur Kec.Tapung kab. Kampar		0.5	Km				0.1	0.1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	105	Peningkatan jalan Perum Mitra Persada Graha RT. 05/RW VII Desa tanah merah kec. Siak hulu kab. Kampar		1	Km				0.2	0.2	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	106	Peningkatan jalan Perum Karya Dwi Tunggal desa tanah Merah Kec.Siak hulu Kab. Kampar		200	M				40	40	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	107	Peningkatan jalan Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampar Timur Kab. Kampar		0.5	Km				0.1	0.1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	108	Peningkatan jalan kota pangkalan Kerinci (K- 250)		3	Km				0.6	0.6	20.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 15 109	Pembangunan jembatan kanalisasi Desa Nusantara jaya Kec. Keritang kab.Inhil		175	M				35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 110	Pembangunan Jembatan Sei. Simbar		175	M				35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 111	Peningkatan jalan Rawa Sempadan Parit Indah Pekanbaru		0.7	Km				0.14	0.14	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 112	Pembangunan jalan Guntung- pulau burung		1	Km				0.2	0.2	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 113	Peningkatan jalan Desa Kuapan- Sei Pinang Kab. Kampar		8	Km				1.6	1.6	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 114	Peningkatan Jalan Kayu Jati Tembilahan Hulu		2.5	Km				0.5	0.5	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 115	Peningkatan jalan Pekanbaru Bangkinang		8	Km				1.6	1.6	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 116	Peningkatan Jalan Hasanah Menuju Pulau Bungin 1,300M		6.5	Km				1.3	1.3	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 117	Peningkatan Jalan Kisaran Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar		1.5	Km				0.3	0.3	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 118	Pembangunan Jembatan Kisaran Desa karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar		175	M				35	35	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 119	Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu sasak - Bts Sumbar		5	Km				1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 120	Perencanaan Peningkatan Jalan Okura - Geringging		100	M				20	20	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 121	Peningkatan Jalan Okura - Geringging		20	Km				4	4	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 122	Peningkatan Jalan Duyung Pekanbaru		7.7	Km				1.54	1.54	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 123	Peningkatan Jalan Komplek AURI Pekanbaru		1.6	Km				0.32	0.32	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 124	Peningkatan Jalan Arwana Pekanbaru		3	Km				0.6	0.6	20.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 15 125	Peningkatan Jalan Wisata Tepian Sei. Siak		3.9	Km					0.78	0.78	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 126	Pembangunan Bundaran Jalan Siak IV Menuju Jalan Sembilang		5	Unit					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 127	Pembangunan Jalan Cardhrop Gedung LAMR		0.25	Km					0.05	0.05	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 128	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Siak IV ke Jalan Sembilang		9.5	Km					1.9	1.9	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 129	Perencanaan Pelebaran Jalan Rumbai Pesisir 2 Jalur Kec. Rumbai Pesisir		100	M					20	20	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 130	Perencanaan Pembangunan Bundaran Simpang Jalan Siak IV Dengan Jalan Sembilang Kec. Rumbai Pesisir		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 131	Peningkatan Jalan Laksamana Kota Dumai		7.25	Km					1.45	1.45	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 132	Pengawasan Peningkatan Jalan (E)		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 133	Perencanaan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Panipahan		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 134	Perencanaan Jalan Sorek - Teluk Meranti		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 135	Perencanaan Jalan Teluk Meranti - Guntung		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 136	Perencanaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 137	Perencanaan Jalan Alai - Mengkikip Kabupaten Kepulauan Meranti		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 138	Perencanaan Jalan Pedamaran - Teluk Piyai (Kubu)		5	Lap					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1 03 15 139	Studi Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan (High Grade Highway/HGH) dari ibu Kota Provinsi		5	Keg					1	1	20.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					Keseluruhan Kab/Kota Dalam Meningkatkan Konektivitas dan Mobilitas Antar Wilayah di Provinsi Riau									
1	03	15	140		Kajian Identifikasi Penataan Pengembangan Jaringan Jalan Strategi Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Investasi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Produktifitas dan Percepatan Pembangunan Wilayah di Provinsi Riau	500	M				100	100	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	141		Peningkatan Jalan Dari Jembatan Kubu Menuju Sei. Besar	42	Km				8.4	8.4	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	142		Perencanaan Jalan Dari Jembatan Kubu Menuju Sei. Besar	5	Lap				1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	143		Peningkatan Jalan dari Sungai Tekuana ke arah simpang bingung Palas - Kec. Rumbai Pekanbaru	7.6	Km				1.52	1.52	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	144		Peningkatan Jalan dari Sungai Tekuana ke Simpang Jalan Pesantren Nahdatul Ulama - Kec. Rumbai Pekanbaru.	6.7	Km				1.34	1.34	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	145		Pembangunan Jembatan Beton Sungai Tekuana Palas - Kec. Rumbai Pekanbaru	200	M				40	40	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	146		Pembangunan Jembatan Beton Anak Sungai Tekuana	200	M				40	40	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	147		Peningkatan Jalan Pesantren Nahdatul Ulama Palas - Rumbai Pekanbaru	5.4	Km				1.08	1.08	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	148		Pembangunan Bundaran Simpang RT Kota Batak Kab. Kampar	0.6	Km				0.12	0.12	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	149		Pembangunan Bundaran Persimpangan Kantor Camat Rumbai Kota Pekanbaru	5	Unit				1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	150		Pembangunan Jalan Pinggir Sungai Siak dari Jembatan Siak IV ke arah hulu	1.1	Km				0.22	0.22	20.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	151	Pembangunan Jalan ke arah Sungai Tekuana Pekanbaru		0.2	Km					0.04	0.04	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	152	Pembangunan Jalan dari Sungai Tekuana ke Pesantren Nahdatul Ulama		0.2	Km					0.04	0.04	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	153	Pembangunan Jalan Pesantren Nahdatul Palas		0.1	Km					0.02	0.02	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	154	Pembangunan Jalan H. Badar - Palas		0.2	Km					0.04	0.04	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	155	Penimbunan Jalan Parit Indah I		1000	M					200	200	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	156	Pembangunan Badan Jalan Parit Indah - Labersa		1000	M					200	200	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	157	Peningkatan Jalan SP. 7 - Sontang Kab. Rohul		25	Km					5	5	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	158	Peningkatan Jalan Km. 6 Bukit Suligi - Bts. Sumbang		15	Km					3	3	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	159	Peningkatan Jalan Tandun - Ujung Batu - Psr Pangaraian		12	Km					3	3	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	160	Peningkatan Jalan Pasir Pangaraian - Dalu-dalu - Bts Sumut		12	Km					3	3	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	161	Peningkatan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah - Sei Guntung		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	162	Peningkatan Jalan Yos Sudarso		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	163	Peningkatan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Siapi api		42	Km					8	8	19.05	Dinas Bina Marga
1	03	15	164	Peningkatan Jalan Duri - Sei Rangau		20	Km					5	5	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	165	Peningkatan Jalan Lubuk Agung - Batu Sasak - Bts. Sumbang		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	166	Peningkatan Jalan Selensen - Kota Baru		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	15	167	Peningkatan Jalan Sp. Langgam - Langgam - Sp. Koran		20	Km					5	5	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	168	Peningkatan Jalan Kota Dumai - Lubuk Gaung		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	169	Peningkatan Jalan Bangkinang - Lipat Kain		12	Km					3	3	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	170	Peningkatan Jalan Sp. Minas - Perawang		40	Km					10	10	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	171	Peningkatan Jalan Dalu dalu - Mahato		8	Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	172	Peningkatan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya		10	Km					5	5	50.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	173	Peningkatan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis		12	Km					3	3	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	174	Peningkatan Jalan Muara Lembu - Pangkalan Indarung (Sharing Kab/Kota)		8	Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	175	Pembangunan Jalan Kubu - Teluk Piyai (Kubu) (Sharing Kab)		12	Km					3	3	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	176	Pembangunan Jalan Teluk Piyai (Kubu) - Sei. Daun (Sharing Kab)		8	Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	177	Pembangunan Jalan Sei. Daun - Panipahan (Sharing Kab)		8	Km					2	2	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	178	Peningkatan Jalan Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang - Mumpa (Sharing Kab/Kota)		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	179	Pembangunan Jalan Sp. Panam - Bts. Kab Kampar (Garuda Sakti)		2.4	Km					0.8	0.8	33.33	Dinas Bina Marga
1	03	15	180	Pembangunan Jembatan Gantung Pulau Rambai Kec. Kab Kampar Timur Lanjutan (4)		280	M					70	70	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	15	181	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Salo Kec Salo Kabupaten Kab Kampar Lanjutan 2		280	M					70	70	25.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	03	15	182	Pembangunan Jembatan Pulau Birandang - Pasar Kab Kampar Kec. Kab Kampar Timur (Lanjutan 4) (Sharing Kab/Kota)								Dinas Bina Marga			
1	03	15	183	Pembangunan Jembatan Padat Karya (Umban Sari menuju Kab Siak II) lanjutan 2	88	M			22	22	25.00	Dinas Bina Marga			
1	03	15	184	Peningkatan Jalan dari Panipahan - Sumut	12	Km			3	3	25.00	Dinas Bina Marga			
1	03	15	185	Pembangunan Jembatan Sei Mentawai pada ruas jalan Banjar datar - Rokan	120	M			30	30	25.00	Dinas Bina Marga			
1	03	15	186	Pengawasan Pembangunan dan Penggantian Jembatan	4	Keg			1	1	25.00	Dinas Bina Marga			
	03														
1	03	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Provinsi yang di Pelihara (km)	3033.32	Km	0	292.032	40.88448	14	284.5	325.38448	10.73	Dinas Bina Marga
	03				Panjang Jembatan Provinsi yang dipelihara (meter)	2649.2	M	0	0	0	0	2649.2	2649.2	100.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	1	Pemeliharaan Jalan Rantau Berangin - Tandun		234.8	Km					46.96	46.96	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	2	Pemeliharaan Jalan Tandun- Ujung Batu		207.98	Km					36.59	36.59	17.59	Dinas Bina Marga
1	03	18	3	Pemeliharaan Jalan Ujung Batu- Pasir Pangaraian		161.59	Km					25	25	15.47	Dinas Bina Marga
1	03	18	4	Pemeliharaan Jalan Taluk Kuantan - Cerenti (Swakelola)		61.16	Km					-	-		
1	03	18	5	Pemeliharaan Jalan Cerenti - Sp. Kelayang		51	Km					-	-		
1	03	18	6	Pemeliharaan Jalan Sp. Kelayang - Simpang Japura		20.5	Km					-	-		
1	03	18	7	Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling		11.6	Km					-	-		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPDP Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab		
									Target RKPDP Tahun 2014	Realisasi RKPDP Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)			
1				2		3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	18	8	Pemeliharaan JalanTempuling - Tembilahan		21.94	Km					-	-				
1	03	18	9	Pemeliharaan Jalan Kota Garo- Kandis (swakelola)		122.8	Km					24.56	24.56	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	10	Pemeliharaan Jalan Tapung - Kota Garo		144.05	Km					24.56	24.56	17.05		Dinas Bina Marga	
1	03	18	11	Pemeliharaan Jalan Tapung - Tandun		229.05	Km					45.81	45.81	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	12	Pemeliharaan Jalan Pelintung- Sei. Pakning		292	Km					71	71	24.32		Dinas Bina Marga	
1	03	18	13	Pemeliharaan Jalan Simpang Tanah Putih - Bagan Siapi-api (Swakelola)		360	Km					72	72	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	14	Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Sp. Siak Sri Indrapura		214.75	Km					42.95	42.95	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	15	Pemeliharaan Jalan Sp. Siak Sri Indrapura - Mengkapan		119.5	Km					23.9	23.9	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	16	Pemeliharaan Jalan Lipat Kain - Lb. Agung		135	Km					27	27	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	17	Pemeliharaan Jalan Simpang Kumu - Kota Tengah		172.5	Km					34.5	34.5	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	18	Pemeliharaan Jalan Kota Tengah - Sei. Rangau		185.5	Km					37.1	37.1	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	19	Pemeliharaan Jalan Kota Baru - Bagan Jaya		252.5	Km					50.5	50.5	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	20	Pemeliharaan jalan Lingkar Kota Dumai		23.2	Km					5.8	5.8	25.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	21	Pemeliharaan Jalan Bangkinag - Lipat Kain		204	Km					51	51	25.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	22	Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Sungai luar (Swakelola)		10	Km					2.5	2.5	25.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	23	Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Meredan - Sp. Buatan		167.5	Km					33.5	33.5	20.00		Dinas Bina Marga	
1	03	18	24	Pemeliharaan Jalan Pujud - Sp. Manggala		203.25	Km					30	30	14.76		Dinas Bina Marga	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	18	25	Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Patapahan		187.75	Km						37.55	37.55	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	26	Pemeliharaan Jalan Lubuk Kandis - Simpang. IFA		307.5	Km						61.5	61.5	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	27	Pemeliharaan Jalan Peranap - Simpang IFA - Bts Jambi		337.5	Km						67.5	67.5	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	28	Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan		397	Km						79.4	79.4	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	29	Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Dusun Batas		338.5	Km						67.7	67.7	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	30	Pemeliharaan Jalan Pasir Pangaraian - Tangun - Batas Sumut		105	Km						21	21	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	31	Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid		72	Km						3	3	4.17	Dinas Bina Marga
1	03	18	32	Pemeliharaan Jalan Terminal Kari (Sharing Kab/Kota)		16.5	Km						3	3	18.18	Dinas Bina Marga
1	03	18	33	Pemeliharaan Jalan Kota Pekanbaru		388.4	Km						96.1	96.1	24.74	Dinas Bina Marga
1	03	18	34	Pemeliharaan Jalan Merbau - Teluk Meranti		98.1	Km						5	5	5.10	Dinas Bina Marga
1	03	18	35	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohul - Ruas jalan Pasir Pangaraian - Batas Sumut - Ruas jl.Simpang Kumu - Kota tengah		12	Km									
1	03	18	36	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kuansing - Ruas Jl. Taluk Kuantan - Cerenti		12	Km									
1	03	18	37	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Inhil - Ruas Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan		20	Km								0.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	18	38	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kampar - Ruas jalan Rantau berangin - Tandun - Ruas jalan Bangkinang - Rantau berangin - Ruas jalan Bangkinang - Petapahan		10	Km					2	2	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	39	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Rohil - Ruas Jalan Sp. Tanah Putih - Bagan Siapi api		10	Km					2	2	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	40	Pengawasan Pemeliharaan Jalan (A)		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	41	Pengawasan Pemeliharaan Jalan (B)		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	42	Pengawasan Pemeliharaan Jalan (C)		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	43	Pengawasan Pemeliharaan Jalan (D)		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	44	Pengawasan Pemeliharaan Jembatan		5	Km					1	1	20.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	45	Pemeliharaan Jalan Bangkinang - Petapahan		40	Km					10	10	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	46	Penanggulangan Keadaan Darurat		16	Km					4	4	25.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	47	Pemeliharaan Jalan Simp. Lago - Simp. Buatan		40.4	Km					4	4	9.90	Dinas Bina Marga
1	03	18	48	Pemeliharaan Jalan Simp. Buatan - Siak Sri indrapura		50.95	Km					2	2	3.93	Dinas Bina Marga
1	03	18	49	Pemeliharaan Jalan Minas - Perawang - Maridan		41.5	Km					2	2	4.82	Dinas Bina Marga
1	03	18	50	Pemeliharaan Jalan Sepahat - Sei. Pakning		56	Km					2	2	3.57	Dinas Bina Marga
1	03	18	51	Pemeliharaan Fly Over Jalan Jendral Sudirman		1400	M					-	-		
1	03	18	52	Pemeliharaan Jalan Cerenti - Air Molek		204	Km					51	51	25.00	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 18 53	Pemeliharaan Jalan Air Molek - Simpang Japura		82 Km					20.5	20.5	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 18 54	Pemeliharaan Jalan Rumbai Jaya - Tempuling - Tembilahan		134.16 Km					33.54	33.54	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 18 55	Pemeliharaan Jembatan Kabupaten Kab Kuansing (Ruas Jl. Taluk Kuantan - Cerenti - Sp. Japura)										
1 03 18 56	Pemeliharaan Jembatan Kayu Desa Jawi-jawi Kec. Kampar Timur										
1 03 18 57	Pemeliharaan Jalan Benai - Pulau Lancang (9 KM) Kab. Kuansing		36 Km					9	9	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 18 58	Pemeliharaan Jalan dari Pujud ke Sp. Manggala Kab. Rohil		40 Km					10	10	25.00	Dinas Bina Marga
1 03 18 59	Pemeliharaan Jalan Tandun- Pasir Pangaraian		47 Km					46.59	46.59	99.13	Dinas Bina Marga
1 03 18 60	Pemeliharaan Jalan Tembilahan - Khairiah Mandah - Sei Guntung		77 Km					74.5	74.5	96.75	Dinas Bina Marga
1 03 18 61	Pemeliharaan Jalan kota Tembilahan										
1 03 18 62	Pemeliharaan Jalan Sungai Lempi (Tembilahan)										
1 03 18 63	Pemeliharaan Jalan Air Hitam Raya		7 Km					6.5	6.5	92.86	Dinas Bina Marga
1 03 18 64	Pemeliharaan Jalan Hangtuah (Pekanbaru)		7.2 Km					7.7	7.7	106.94	Dinas Bina Marga
1 03 18 65	Pemeliharaan Jalan Yos Sudarso (Pekanbaru)		7.3 Km					6	6	82.19	Dinas Bina Marga
1 03 18 66	Pemeliharaan Jalan SM. Amin (Pekanbaru)		5.5 Km					3	3	54.55	Dinas Bina Marga
1 03 18 67	Pemeliharaan Jalan Tuanku Tambusai (Pekanbaru)		6 Km					7	7	116.67	Dinas Bina Marga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	18	68	Pemeliharaan Jalan Ujung Batu - Rokan - Batas Sumbar		62	Km					59.4	59.4	95.81	Dinas Bina Marga
1	03	18	69	Pemeliharaan Jalan Telaga Biru (Tembilahan)		1.3	Km							0.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	70	Pemeliharaan Jalan Akses Siak IV (Pekanbaru)		5.3	Km							0.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	71	Pemeliharaan Jalan Riau Ujung - Pantai Cermin (Pekanbaru)		10	Km					9.8	9.8	98.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	72	Pemeliharaan Jalan Km. 18 Jalan Nasional - Sei. Sibam (Pekanbaru)		10	Km					12	12	120.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	73	Pemeliharaan Jalan Tembilahan -Enok		16	Km					15.76	15.76	98.50	Dinas Bina Marga
1	03	18	74	Pemeliharaan Jalan Terminal Taluk Kuantan - Kari (Taluk Kuantan)		4.5	Km					1	1	22.22	Dinas Bina Marga
1	03	18	75	Pemeliharaan Jalan Enok - Batas Jambi		37	Km					35.3	35.3	95.41	Dinas Bina Marga
1	03	18	76	Pemeliharaan Jalan Mahato - Simpang Manggala		63	Km					63.25	63.25	100.40	Dinas Bina Marga
1	03	18	77	Pemeliharaan Jalan Dalu dalu - Mahato		45	Km					43.33	43.33	96.29	Dinas Bina Marga
1	03	18	78	Pemeliharaan Jalan Pekanbaru - Tenayan - Perawang		34	Km					33	33	97.06	Dinas Bina Marga
1	03	18	79	Pemeliharaan Jalan Sungai Beringin (Tembilahan)		0.94	Km							0.00	Dinas Bina Marga
1	03	18	80	Pemeliharaan Jalan Langgam - Sorek		31	Km					28	28	90.32	Dinas Bina Marga
1	03	18	81	Pemeliharaan Jalan Arifin Ahmad (Pekanbaru)		4.5	Km					2	2	44.44	Dinas Bina Marga
1	03	18	82	Pemeliharaan Jalan Sorek - Teluk Meranti		61	Km					58.1	58.1	95.25	Dinas Bina Marga
1	03	18	83	Pemeliharaan Jalan Sontang - Kota Lama - Simpang Suram		61	Km					54.5	54.5	89.34	Dinas Bina Marga
1	03	18	84	Pemeliharaan Jalan Pasir Putih		17	Km					16.5	16.5	97.06	Dinas Bina Marga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 18 85	Pemeliharaan Jalan Pangkalan Indarung - Batas Sumbar					31	Km					30	30	96.77	Dinas Bina Marga
1 03 18 86	Pemeliharaan Jalan Sei. Pakning - Teluk Mesjid - Simpang Pusako					47	Km					45	45	95.74	Dinas Bina Marga
1 03 18 87	Pemeliharaan Jalan Teluk Piyai (kubu) - Panipahan					46	Km					45	45	97.83	Dinas Bina Marga
1 03 18 88	Pemeliharaan Jalan Muara Lembu - Pangkalan Indarung					22	Km					25	25	113.64	Dinas Bina Marga
1 03 18 89	Pemeliharaan Jalan Lingkar Kota Bangkinang					12	Km					11	11	91.67	Dinas Bina Marga
1 03 18 90	Pemeliharaan Jalan Dumai - Lubuk Gaung - Sinaboi					67.4	Km					67.4	67.4	100.00	Dinas Bina Marga
1 03 18 91	Pemeliharaan Jalan Duri - Simpang Jurong - Sei. Rangau (Sontang)					47	Km					47.34	47.34	100.72	Dinas Bina Marga
1 03 18 92	Pemeliharaan Jalan Bagan Siapi api - Sinaboi					27	Km					28	28	103.70	Dinas Bina Marga
1 03 18 93	Pemeliharaan Jalan Teluk Meranti - Guntung					112	Km					110.6	110.6	98.75	Dinas Bina Marga
1 03 18 94	Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalian - Muara Takus					52.7	Km					47.7	47.7	90.51	Dinas Bina Marga
1 03 18 95	Pemeliharaan Jalan Kubang - Simpang Panam					11	Km					10.5	10.5	95.45	Dinas Bina Marga
1 03 18 96	Pemeliharaan Jalan Bagan Siapi api - Teluk Piyai (kubu)					31	Km					30	30	96.77	Dinas Bina Marga
1 03 18 97	Pemeliharaan Jalan Simpang Buatan - Buatan					8	Km					8.41	8.41	105.13	Dinas Bina Marga
1 03 18 98	Pemeliharaan Jalan Lubuk Agung - Batu sasak - batas Sumbar					37.5	Km					37.5	37.5	100.00	Dinas Bina Marga
1 03 18 99	Pemeliharaan Jalan Kandis - Tapung					39	Km					37.12	37.12	95.18	Dinas Bina Marga

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab		
									Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPd Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)			
1				2		3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	18	100	Pemeliharaan Jalan Pekan Heran - Pelor - Teluk Kiambang - Mumpa			61	Km					58.9	58.9	96.56	Dinas Bina Marga	
1	03	18	101	Pemeliharaan Jalan Sei. Akar - Bagan Jaya			46	Km					41	41	89.13	Dinas Bina Marga	
1	03	18	102	Pemeliharaan Jalan Slensen- Kota Baru - Bagan Jaya			38.5	Km					38	38	98.70	Dinas Bina Marga	
1	03	18	103	Pemeliharaan Jalan Simpang Beringin - Meredan - Simpang Buatan			38.21	Km					36.21	36.21	94.77	Dinas Bina Marga	
1	03	18	104	Pemeliharaan Jalan Simpang Kulim - Simpang Batang			10	Km					11.3	11.3	113.00	Dinas Bina Marga	
1	03	18	105	Pemeliharaan Jalan Pangkalan Kasai - Lubuk Kandis			41.04	Km					43.04	43.04	104.87	Dinas Bina Marga	
1	03	18	106	Pemeliharaan Jalan Sp. Panam - Pantai Cermin - Petapahan			29.8	Km					30.3	30.3	101.68	Dinas Bina Marga	
1	03	18	107	Pemeliharaan Jalan Sp. Langgam - Langgam - Sp. Koran			69.5	Km					70	70	100.72	Dinas Bina Marga	
1	03	18	108	Pemeliharaan Jalan Dumai - Sepahat			40	Km					57.38	57.38	143.45	Dinas Bina Marga	
1	03	18	109	Pemeliharaan Jalan Lubuk Jambi - Simpang Ibul - Simpang Ila			62	Km					60	60	96.77	Dinas Bina Marga	
	03																
1	03	20	03	Program Inspeksi Jalan dan Jembatan		Jumlah Dokumen Administrasi Jalan dan Jembatan	20		0	6	6	100	6	12	60.00	Dinas Bina Marga	
1	03	20	1	Pemeriksa Jembatan (BMS)			5	Keg	1	1	1	100	1	3	60.00	Dinas Bina Marga	
1	03	20	2	Survey IRMS Jalan Provinsi di Prov. Riau			5	Keg	1	1	1	100	1	3	60.00	Dinas Bina Marga	
1	03	20	3	Survey Leger Jalan Provinsi di Prov. Riau			5	Keg	1	1	1	100	1	3	60.00	Dinas Bina Marga	
1	03	20	4	Survey Simplified Design Jalan (Swakelola)			5	Keg	1	1	1	100	1	3	60.00	Dinas Bina Marga	
	03																

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	30		Progran Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Kawasan yang terhubung dengan Jalan Poros	2 Kawasan		4 Kawasan	0	0	0	2 Kawasan	2 Kawasan	50	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03				Pembangunan Infrastruktur Permukiman Pedesaan	142 Desa		111 Desa	102 Desa	102 Desa	100	112 Desa	112 Desa	50	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03				Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Kumuh di Pedesaan	10 Kawasan		0	0	0	0	10 Kawasan	10 Kawasan	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	01	Infrastruktur Desa Pasar Kembang Kec Keritang Kec. Keritang	Terlaksananya Infrastruktur Desa Pasar Kembang Kec Keritang Kec. Keritang	100%					0	100%	2	1.9	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	02	Pembuatan Drainase Desa Pagaruyung Kec. Tapung Kab. Kampar	Terlaksananya Pembuatan Drainase Desa Pagaruyung Kec. Tapung Kab. Kampar	100%					0	100%	2	2.0	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	03	Pekerjaan Pembuatan Parit / Drainase Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu	Pekerjaan Pembuatan Parit / Drainase Panjang 200 Meter Desa Kota Baru Kec. Rakit Kulim Kab. Indragiri Hulu	Panjang 200 M					0	Panjang 200 M	1	0.8	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	04	Pembangunan Drainase dusun Sidomulyo Desa Munga Raya Kab. Siak	Terbanggunnya Drainase 300 Meter dusun Sidomulyo Desa Munga Raya Kab. Siak	300M					0	300M	0	0.2	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	05	Pembangunan Drainase Dusun II Desa Pulau Binjai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	Terlaksananya Pembangunan Drainase Dusun II Desa Pulau Binjai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	100%					0	100%	0	0.3	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	06	Pembangunan Jalan Kampung Paman Jaya Kel. Tanjung Palas Dumai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Kampung Paman Jaya Kel. Tanjung Palas Dumai	100%					0	100%	1	1.5	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	30	07	Pembangunan Semenisasi Desa Teluk Kab Desa Teluk	Terlaksananya Pembangunan Semenisasi Desa Teluk Kab Desa Teluk Kab. Pelalawan	100%				0	100%	0		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	08	Pembangunan Semenisasi Desa Serapung	Terlaksananya Pembangunan Semenisasi Desa Serapung Kab. Pelalawan	100%				0	100%	1	1.0	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	09	Semenisasi Jalan Poros Penghubung antar Desa Bekawan - Desa Bidari Tanjung Datuk Kec. Mandah	Terlaksananya Semenisasi Jalan Poros Penghubung antar Desa Bekawan - Desa Bidari Tanjung Datuk Kec. Mandah	100%				0	100%	2	2.0	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	10	Semenisasi Jalan Jl Harapan Ujung Sumber Sam RT 12 Kel. Bagan Keladi Kec Dumai Barat	Terlaksananya Semenisasi Jalan Jl Harapan Ujung Sumber Sam RT 12 Kel. Bagan Keladi Kec Dumai Barat	100%				90.58	100%	1	1.3	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	11	Semenisasi Jl. Lingkungan Desa Sialang Kubang Perhentian Raja Kampar	Terlaksananya Semenisasi Jl. Lingkungan Desa Sialang Kubang Perhentian Raja Kampar	100%				0	100%	0		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	12	Pembuatan Drainase Di Desa Hangtuah Perhentian Raja Kampar	Terlaksananya Pembuatan Drainase Di Desa Hangtuah Perhentian Raja Kampar	100%				3.82	100%	1	0.8	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	13	Semenisasi Jalan Lingkungan Jalan Pebaun Hilir Desa Pebaun Hilir Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	Terlaksananya Semenisasi Jalan Lingkungan Jalan Pebaun Hilir Desa Pebaun Hilir Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	1 Kegiatan				0	1 Kegiatan	0	0.0	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	30	14	Semenisasi Jalan Radio 5 dan Jalan Radio 4 RT.05 RW.08 Kel. Delima Tampan Pekanbaru	Terlaksananya Semenisasi Jalan Radio 5 dan Jalan Radio 4 RT.05 RW.08 Kel. Delima Tampan Pekanbaru	1 Kegiatan				-	1 Kegiatan	0		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03													

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	32		Program pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Pada Kawasan Permukiman Perkotaan	12 Kab/Kota	12 Kab	12 Kab	100	12 Kab	12 Kab	50	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03				Meningkatkan Kualitas Lingkungan Kumuh di Perkotaan	2 Kawasan	0	9	0	2 Kawasan	2 Kawasan	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	01	Pembangunan Parit Beton, jl. Kapau Sari III s.d Jl. Kapau Sari RT.02 /RW.19 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Tinggi 4 M, L : 1 M, PJ : 200 M	Parit Beton, jl. Kapau Sari III s.d Jl. Kapau Sari RT.02 /RW.19 Kel. Tangkerang Timur Kec. Tenayan Raya Tinggi 4 M, L : 1 M, PJ : 200 M	Tinggi 4 M, L : 1 M, PJ : 200 M				Tinggi 4 M, L : 1 M, PJ : 200 M			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	02	Pembuatan Parit Beton Jl. Muslimin IV RT/RW 003/008 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai (200 M kiri kanan)	Terlaksananya Pembuatan Parit Beton Jl. Muslimin IV RT/RW 003/008 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai (200 M kiri kanan), Kota Pekanbaru	200 M				200 M			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	03	Pembangunan Drainase Jl. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan	Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Purwodadi Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan, Kota Pekanbaru	100%				1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	04	Pembangunan Drainase Jl. Siak Kec. Tampan Kec Payung Sekaki	Terlaksananya Pembangunan Drainase Jl. Siak Kec. Tampan Kec Payung Sekaki	100%				1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	05	Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Sekuntum Kel. Delima Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Drainase Jl. Sekuntum Kel. Delima Pekanbaru, Kota Pekanbaru	100%				1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	06	Turap beton RT. 01/RW.01 Kel. Seberang Tembilahan, Kec. Tembilahan	Turap beton RT. 01/RW.01 Kel. Seberang Tembilahan, Kec. Tembilahan	100%				1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	32	07		Pekerjaan Pembuatan Parit / Drainase Panjang 102 Meter Lebar 4 Meter Jalan Warta Sari di Belakang Kantor DPRD Riau	Panjang 102 M, Lebar 4						Panjang 102 M, Lebar 4			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	08		Pekerjaan Pembuatan BOX CULVERT Gg. Mushalla Al-Hidayah Jln Datuk Laksamana RT04/RW03 Kel. Suka Maju, Kec Sail Pekanbaru	100%						1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	09		Pembangunan Drainase Jl. Inpres Gg. Masjid RT.03 RW.16 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	100%						1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	10		Pembangunan jaringan drainase Provinsi Riau DED Jaringan Drainase Kota Pekanbaru dan Kampar	100%						1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	11		Pengerjaan Box Cover (Gorong-Gorong) Jl. Sei. Kampar RT./RW. 004/001 Kel. Sekip Kec. Lima Puluh	100%						1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	12		Semenisasi Jalan Perumahan Citra Kencana Jl. Taman Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan, Pekanbaru	3,5 X 800 M.						3,5 X 800 M.			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	32	13		Semenisasi Jl. Muhajirin Gg. Kuantan RT. 01 RW 09 Kel. Sidomulyo Barat Pekanbaru	185 Meter						185 Meter			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	03	32	14	Semenisasi Kota Pangkalan Kerinci	Terlaksananya Semenisasi Kota Pangkalan Kerinci	100%				1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air		
1	03	32	15	Semenisasi Infrastruktur Perkotaan Lokasi Pekanbaru	Terlaksananya Semenisasi Infrastruktur Perkotaan Lokasi Pekanbaru	100%				1			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air		
	03														
1	03			Program Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	Terkelolanya Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	1 Unit		0	0	0	0	1 Unit	1 Unit	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03			Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Meningkatnya Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa	132.7 Km		0	109,3 KM	54 KM	49.41%	130 Km	130 Km	138.7	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03				Terkelolanya Kawasan Tangkapan Air dan Tertatanya sumber daya air	2 Kawasan		0	0	0	0	1 Kawasan	1 Kawasan	50	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		01	Pembangunan Bendung Suplesi dan Saluran Sei. Sialok ke Daerah Irigasi Sei. Perak	Terbangunnya Bendung Suplesi dan Saluran Sei. Sialok ke Daerah Irigasi Sei. Perak Kab. Inhil	769 M						769 M			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		02	Pembangunan dan Pengadaan Pompa Siak Kiri Paket B dan D Bunga Raya	Terbangunannya Pompa Siak Kiri Paket B dan D Bunga Raya	10 M						10 M			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		03	Pengendalian Kegiatan Bidang Irigasi Rawa	Terkendalinya Kegiatan Bidang Irigasi Rawa	1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03														
1	03	25		Program Penyediaan dan Pegelolaan Air Baku	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air baku bagi masyarakat	100/det		240/det	0	0	0	100/det	100/det	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
10328	Program Pengendalian Banjir	Terlindungnya wilayah sungai dan pantai dari abrasi dan erosi	281.6 Km		8 Km	7 Km	7 Km	100	12 Km	27 km	9.588	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032801	Pengawasan Teknis Kegiatan SUPADA	jumlah laporan	5 Laporan						1 Laporan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032802	Pengendalian Kegiatan Bidang Sungai, Pantai dan Danau	Terkendalnya Kegiatan Bidang Sungai, Pantai dan Danau	1 Laporan						1 Laporan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032803	Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Air Hitam Kota Pekanbaru	Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Air Hitam Kota Pekanbaru	120 M'						120 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032804	Pembuatan Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi (Lanjutan)	Terbangunnya Bangunan Pengendali Banjir di Kota Selat Panjang Kec. Tebing Tinggi (Lanjutan)	65 M'						65 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032805	Pembangunan Pengaman Pantai di Sepahat Kec. Bukit Batu	Terbangunnya Pengaman Pantai di Sepahat Kec. Bukit Batu kab. Bengkalis	80 M'						80 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032806	Pembangunan Pengaman Pantai di Pergam Kec. Rupert	Terbagnunnya Pengaman Pantai di Pergam Kec. Rupert Kab. Bengkalis	100 M'						100 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032807	Pembangunan Pengaman Tebing Sei. Rokan di Desa Sekela di Kec. Tanah Putih	Terbangunnya Pengaman Tebing Sei. Rokan di Desa Sekela di Kec. Tanah Putih	40 M'						40 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1032808	Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Tanjung Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi (Lanjutan)	Terbangunnya Turap Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Tanjung Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singinqi (Lanjutan)	50 M'						50 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	28	09	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kresek (Lanjutan)	terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Kresek (Lanjutan) Kab. Kuansing'	50 M'						50 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	10	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir (Lanjutan)	Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Kepala Pulau Kec. Kuantan Hilir (Lanjutan)	50 M'						50 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	11	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Seberang Pantai (Lanjutan)	Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Seberang Pantai Kec. Kuantan Hilir (Lanjutan)	50 M'						50 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	12	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Banjar Padang (Lanjutan)	terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Kuantan di Desa Banjar Padang (Lanjutan) Kab. Kuantan Singingi	50 M'						50 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	13	DD. Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kiri di Domo	Terbangunnya DD. Bangunan Pengaman Tebing Sei. Kampar Kiri di Domo	1 Laporan						1 Laporan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	14	DED Pengendali Banjir di Kec. Bangkinang Kab. Kampar	Terlaksannya DED Pengendali Banjir di Kec. Bangkinang Kab. Kampar	1 Laporan						1 Laporan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	15	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasir Kemilu (Lanjutan)	Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasir Kemilu (Lanjutan)	80 M'						80 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	16	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Danau Baru (lanjutan)	Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Danau Baru (lanjutan)	75 M'						75 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	17	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Gumanti Kec.Peranap (Lanjutan)	Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Gumanti Kec.Peranap (Lanjutan)	60 M'						60 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	28	18	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasar Peranap Kec.Peranap (Lanjutan)	Terbangunnya Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Pasar Peranap Kec.Peranap (Lanjutan)	60 M'						60 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	19	Pembangunan Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Batu Rijal Hilir Kec. Peranap (lanjutan)	TerbangunnyaPengaman Tebing Sungai Indragiri di Batu Rijal Hilir Kec. Peranap (lanjutan)	60 M'						60 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	20	Pembangunan Turap Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu (lanjutan)	Terbangunnya Turap Pengaman Tebing Sungai Indragiri di Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu (lanjutan)	90 M'						90 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	21	Pembangunan Turap Desa Bolak Raya Kec. Mandah (Lanjutan)	Terbangunnya Turap Desa Bolak Raya Kec. Mandah (Lanjutan)	90 M'						90 M'			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	22	Pemeliharaan Tanggul Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan	Terlaksananya Pemeliharaan Tanggul Sungai Solok Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan										Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	23	Pembangunan Turap Perum Cendana Kec Tenayan Raya	Terlaksananya Pembangunan Turap Perum Cendana Kec Tenayan Raya, Kota Pekanbaru	100%						100%			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	24	Normalisasi Kanal	Terlaksananya Normalisasi Kanal 1000Mx2M Dalam 2M BTN Bumi Dumai Baru Kel. Bukit Timah Kec Dumai Selatan Kota Dumai	1000Mx2M						1000Mx2M			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	25	Pembangunan Turap Beton Kelurahan Enok Kec. Tanah Merah	Terlaksananya Pembangunan Turap Beton Kelurahan Enok Kec. Tanah Merah	150 M						150 M			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	26	Pembangunan Turap Desa Makmur Kab Pelalawan	Terlaksananya Pembangunan Turap Desa Makmur Kab Pelalawan	1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	28	27	Pembangunan Parit Beton RW. 14 Kel. Sidomulyo Barat	Terlaksananya Pembangunan Parit Beton RW. 14 Kel. Sidomulyo Barat	1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	28	Pembagunan Turap Penahan Tebing Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar	Terbangunnya Pembagunan Turap Penahan Tebing Desa Sungai Tonang Kec. Kampar Utara Kab. Kampar	1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	29	Pembangunan Turap di Desa Lubuk Bendahara Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu	Terbangunnya Pembangunan Turap di Desa Lubuk Bendahara Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu	1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	28	30	Pembuatan Tanggul Mekanik Desa Kuala Selat	Terlaksananya Pembuatan Tanggul Mekanik Desa Kuala Selat kab. Inhil	1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03														
1	03			Program Penyediaan Prasaran Air Minum Pedesaan	Jumlah desa yang terlayani air minum	100 Desa		100 Desa	82 Desa	82 Desa	100	100 Desa	100 Desa	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya akses air minum yang aman dan layak skala regional di provinsi Riau	269/det		40/det	0	0	0	40/det	40/det	29.74	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	01	Perencanaan Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Tersedianya Perencanaan Program Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	1 Dokumen						1 Dokumen	1 Dokumen		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	02	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm Kabupaten Rokan Hilir	Tersedianya Pemasangan Pipa Transmisi PE 100 DN 500 mm Kabupaten Rokan Hilir	6000 M						6000 M	6000 M		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	03	Penyusunan AMDAL SPAM Regional II Provinsi Riau	Tersusunnya AMDAL SPAM Regional II Provinsi Riau	1 Laporan						1 Laporan	1 Laporan		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	03	27	04	PAH 500 liter (200 buah) Desa Pengalihan Kec. Enok	PAH 500 liter (200 buah) Desa Pengalihan Kec. Enok, Kab. Inhil	500 Liter, 200 Buah				500 Liter, 200 Buah	500 Liter, 200 Buah		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	05	PAH 500 liter (300 buah) Pusaran 9 Kel. Pusaran Kec. Enok	PAH 500 liter (300 buah) Pusaran 9 Kel. Pusaran Kec. Enok, Kab. Inhil	500 Liter, 300 Buah				500 Liter, 300 Buah	500 Liter, 300 Buah		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	06	Pengadaan PA (500 liter) Desa Bagan Jaya Kec. Enok kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Bagan Jaya Kec. Enok kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	07	Pengadaan PA (500 liter) Desa Kulim Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Kulim Jaya Kec. Kempas Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	08	Pengadaan PA (500 liter) Desa Sungai Rabit Kec. Kempas Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Sungai Rabit Kec. Kempas Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	09	Pengadaan PA (500 liter) Desa Pengalihan Kec. Enok Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Pengalihan Kec. Enok Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	10	Pengadaan PA (500 liter) Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	11	Pengadaan PA (500 liter) Kel. Kempas Kec. Kempas Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Kel. Kempas Kec. Kempas Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	12	Pengadaan PA (500 liter) Kel. Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Kel. Kuala Enok Kec. Tanah Merah Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	13	Pengadaan PA (500 liter) Desa Jaya Bakti Kec. Enok Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Jaya Bakti Kec. Enok Kab. Inhil	500 Liter				500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	27	14	Pengadaan PA (500 liter) Desa Igal Kec. Mandah Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Desa Igal Kec. Mandah Kab. Inhil	500 Liter						500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	15	Pengadaan PA (500 liter) Dusun Pandan Arun Desa Danau Pulau, Kec. Kempas Kab. Inhil	Tersedianya Pengadaan PA (500 liter) Dusun Pandan Arun Desa Danau Pulau, Kec. Kempas Kab. Inhil	500 Liter						500 Liter	500 Liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	16	Tangki PAH Desa Concong dalam Kec. Concong Kab. Inhil	Tangki PAH Desa Concong dalam Kec. Concong Kab. Inhil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	17	Tangki PAH Desa Tasik Raya Kec. Batang Tuaka Kab. Inhil	Tangki PAH Desa Tasik Raya Kec. Batang Tuaka Kab. Inhil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	18	Bantuan Instalasi Pengolahan air gambut untuk sumber air bersih untuk desa tanjung layang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	Bantuan Instalasi Pengolahan air gambut untuk sumber air bersih untuk desa tanjung layang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	19	Bantuan Instalasi Pengolahan air gambut untuk sumber air bersih untuk di Kecamatan Kuala Kampar Kab. Pelalawan	Bantuan Instalasi Pengolahan air gambut untuk sumber air bersih untuk di Kecamatan Kuala Kampar Kab. Pelalawan	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	20	Pengadaan Penampung Air Hujan	Tersedianya Pengadaan Penampung Air Hujan Untuk Masyarakat Siak	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	21	Pengadaan Penampung Air Hujan	Tersedianya Pengadaan Penampung Air Hujan Untuk Masyarakat Pelalawan	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	22	Pengerjaan Prasarana Air Bersih untuk Kep Labuhan Tangga Besar Kab. Rokan Hilir	Terlaksananya Pengerjaan Prasarana Air Bersih untuk Kep	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					Labuhan Tangga Besar Kab. Rokan Hilir										
1	03	27	23		Pengadaan Penampungan Air Bersih (PAH) Piquin 1000 liter	1000 liter						1000 liter	1000 liter		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	24		Pengadaan Sumur Bor Warga, Jl. Tambusai RT. 17/RW. 05 Kepeng Lubuk Jawi Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	25		Pengadaan Sumur Bor Warga 3 (tiga) unit sumur bor dusun, Tanah Putih, Jl. H. Wan Muhammad Noor Desa Pasir Putih Utara Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	26		Pengadaan Sumur Bor Warga, Jl. Pramuka RT. 04/RW. 02 Kepeng Lubuk Jawi Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	27		Pengadaan Sumur Bor Warga, Jl. Gurame RT. 08/RW. 03 Kepeng Lubuk Jawi Bagan Sinembah Kab. Rohil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	28		Pengadaan Sumur Bor Warga, Jl. Mesjid RT. 08/RW. 03 Kepeng Lubuk Jawi Kec. Bagan Sinembah Kab. Rohil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	29		Bantuan Sumur Bor TK. Rahmat Bunda, Jl. Lintas Bagan Siapi-Api, Bantayan, Kec. Batu Hampar kab. Rohil	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	27	30	Pembangunan Sumur Bor Jl. Kayu Mas Kel. Tampan Payung Sekaki	Terlaksananya Pembangunan Sumur Bor Jl. Kayu Mas Kel. Tampan Payung Sekaki	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	31	Pembangunan Sumur Artesis untuk Masyarakat Desa Rantau Panjang Kec.Koto Gasib, Kab. Pelalawan Kab Siak	Terlaksananya Pembangunan Sumur Artesis untuk Masyarakat Desa Rantau Panjang Kec.Koto Gasib, Kab. Pelalawan Kab Siak	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	32	Pembuatan Sumur Bor	Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor warga di provinsi riau	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	33	Pembuatan Sumur Bor dan MCK Desa Muara lembu	Terlaksananya Pembuatan Sumur Bor dan MCK Desa Muara lembu Kec. Singingi Kab. Kuansing	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	34	Pembuat sumur bor dan MCK Dusun III Desa Pulau Binjai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	Terlaksananya Pembuatan sumur bor dan MCK Dusun III Desa Pulau Binjai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	35	Bantuan Pembuatan Sumur Bor dan Tangki air suku tempatan desa tasik serai Organisasi Masyaraka Setempat (OMS) Jl. Umum Sebang Km 33 Segeronggang Kec Pinggir Kab. Bengkalis	Bantuan Pembuatan Sumur Bor dan Tangki air suku tempatan desa tasik serai Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Jl. Umum Sebang Km 33 Segeronggang Kec Pinggir Kab. Bengkalis	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	36	Pembangunan Sumur Bor Artesis Di Jl. Ampera Rt 04 Rw 07 Kel. Limbungan Rumbai Pesisir	Terbangunnya Sumur Bor Artesis Di Jl. Ampera Rt 04 Rw 07 Kel. Limbungan Rumbai Pesisir	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	27	37	Pengadaan Air Bersih Kab Pelalawan	Tersedianya Air Bersih Kab Pelalawan	1 Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03			Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Panjang pipa air minum yang terbangun (meter)	20.000 m	15000 m	850 m	850 m	100	26600 m	28950 M	144.8	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03			Program Penataan Pembangunan dan Lingkungan	Jumlah kawasan yang tertata sesuai dengan kaidah penataan pembangunan dan lingkungan	5 Kawasan	-	0	0	0	5 Kawasan	5 Kawasan	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
	03				Jumlah bangunan dan lingkungan yang dibangun dan ditingkatkan	10 Unit	0	10 Unit	10 Unit	100	10 Unit	10 Unit	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		01	Revitalisasi Masjid Raya Kota Pekanbaru	Revitalisasi Masjid Raya Kota Pekanbaru	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		02	Manajemen Kontruksi Mesjid Raya Kota Pekanbaru	Manajemen Kontruksi Mesjid Raya Kota Pekanbaru	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		03	Manajemen Kontruksi Museum Perempuan Tahap III	Manajemen Kontruksi Museum Perempuan Tahap III	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		04	Manajemen Kontruksi Auditorium Mesjid Agung An-Nur	Manajemen Kontruksi Auditorium Mesjid Agung An-Nur	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		05	Pembangunan Rumah Garim Mesjid Agung An-Nur	terbangunnya Rumah Garim Mesjid Agung An-Nur	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		06	Pembangunan Gedung Akademi Kesenian Melayu Riau (Tahap III)	terbangunnya Gedung Akademi Kesenian Melayu Riau (Tahap III)	50%					50%	50%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		07	DED Pembangunan RSU POLRI Riau	Tersedinya DED Pembangunan RSU POLRI Riau	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	08	DED Water Front City Kota Pekanbaru	Tersedinya DED Water Front City Kota Pekanbaru	1 Laporan				1 Laporan	1 Laporan		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	09	Penataan Kawasan Objek Wisata Bono Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan	Penataan Kawasan Objek Wisata Bono Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan								Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	10	masjid terapung kelurahan teluk belitung kec. Merbau kab. Kep. Meranti	masjid terapung kelurahan teluk belitung kec. Merbau kab. Kep. Meranti	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	11	Pembangunan Polsek XIII Kota Kampar	Pembangunan Polsek XIII Kota Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	12	Pembangunan Koramil XIII Kota Kampar	Pembangunan Koramil XIII Kota Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	13	Pembangunan pagar kantor camat XIII Kota Kampar	Pembangunan pagar kantor camat XIII Kota Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	14	Pembangunan pagar kantor polsek XIII Kota Kampar	Pembangunan pagar kantor polsek XIII Kota Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	15	Pembangunan pagar kantor koramil XIII Kota Kampar	Pembangunan pagar kantor koramil XIII Kota Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	16	Pembangunan gedung tanah batak	Pembangunan gedung tanah batak	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	17	Pembangunan Gedung Rektorat Universitas Islam Riau	Terlaksananya Pembangunan gedung Rektorat Universitas Islam Riau	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
10318	Pembangunan Masjid Alfida Pekanbaru	Terbangunnya Masjid Alfida Pekanbaru	1 Unit						1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10319	Pembuatan Balai Pertemuan Desa Makmur Sejahtera, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar	Tersedianya Balai Pertemuan Desa Makmur Sejahtera, Kec. Gunung Sahilan, Kab. Kampar										Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10320	Rehab Balai Desa Pagaruyung Kec. Tapung Kab. Kampar	Tersedianya Balai Desa Pagaruyung Kec. Tapung Kab. Kampar	1 unit						1 unit	1 unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10321	Rehab Balai Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar	Tersedianya dana untuk Rehab Balai Desa Sungai Putih Kec. Tapung Kab. Kampar	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10322	Rehab balai Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar	Tersedianya dana untuk Rehab balai Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10323	Pembangunan Balai Adat Desa Muara Mahat Kec. Tapung, Kab. Kampar	Terbangunnya Balai Adat Desa Muara Mahat Kec. Tapung, Kab. Kampar	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10324	Pembangunan Balai Adat Desa Ranah Sungkai Kec. 13 Koto. Kab. Kampar	Terbangunnya Balai Adat Desa Ranah Sungkai Kec. 13 Koto. Kab. Kampar	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10325	Pembangunan Pendopo Serbaguna Jl.Kuriang II Block B 55 A/5 RT 03RW03 Dusun 2 Pandau Permai desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar	Terbangunnya Pendopo Serbaguna Jl.Kuriang II Block B 55 A/5 RT 03RW03 Dusun 2 Pandau Permai desa Pandau Jaya Kec Siak Hulu Kab Kampar	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
10326	Pembangunan Gedung Serbaguna di RW. 12 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis	Terbangunnya Gedung Serbaguna di RW. 12 Kel. Talang Mandi Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis	100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03		27	Pengadaan Gedung Serbaguna Kec Rupat Kab. Bengkalis(Murni)		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		28	Rumah Tunggu Pemakaman+Penimbunan Budi Kemulyaan Kec. Dumai Kota		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		29	Renovasi Rumah Adat Koto Sitingkai		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		30	Pembangunan gedung serbaguna desa Air Terbit Kec. Tapung		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		31	Pembangunan Gedung Serbaguna PKK Desa		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		32	Pembangunan rumah godang Kampung raja		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		33	Pembangunan Masjid Al hidayah Desa		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		34	Pembangunan masjid Raya Kopah		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		35	Masjid Darussalam Desa		100%						100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03		36	Perbaikan Bangun Bedung GKPI Resot Khusus Persiapan	Terlaksananya Perbaikan Bangun Bedung GKPI Resot Khusus Persiapan, Pasir Putih Desa Tanah Merah Siak Hulu Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		37	Pembangunan Los Pasar Senin Indrapura Desa Batang Batindih	Terlaksananya Pembangunan Los Pasar Senin Indrapura Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		38	Pembangunan Mesjid Almuksyarah	Terlaksananya Pembangunan Mesjid Almuksyarah Parit Joko Kel. Tanjung Kapal Kec Rupat Kab. Bengkalis	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		39	Pembangunan Gedung Terbuka serba guna sungai Tohor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Terbuka serba guna sungai Tohor Jl. Sentosa Desa Sungai Tohor Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep Meranti	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		40	Pembangunan Gedung Gaung Sepakat Dusun	Terlaksananya Pembangunan Gedung Gaung Sepakat Dusun Pasar Baru Desa Desa Simpang Gaung Kec. Gaung	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		41	Pembangunan Gedung Gaung Center	Terlaksananya Pembangunan Gedung Gaung Center Kelurahan Kuala Lahang Kec. Gaung	100%				100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		42	Pembangunan Rumah camat XIII Kota Kampar	Terlaksananya Pembangunan Rumah camat XIII Kota Kampar	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		43	Pembangunan Rumah kapolsek XIII Kota Kampar	Terlaksananya Pembangunan Rumah kapolsek XIII Kota Kampar	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 44	Pembangunan Rumah danramil XIII Kota Kampar			Terlaksananya Pembangunan Rumah danramil XIII Kota Kampar	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 45	Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Riau			Terlaksananya Pembangunan Gedung DPRD Provinsi Riau	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 46	Pembangunan gedung TK yayasan syekh abdul wahab rokan Pekanbaru, jl. HR subrantas no.62 pekanbaru (lanjutan)			Terlaksananya pembangunan gedung TK yayasan syekh abdul wahab rokan pekanbaru, Jl. HR subrantas no.62 pekanbaru	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 47	Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 90 Sukajadi Pekanbaru			Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru Smk Muhammadiyah 2 Pekanbaru Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 90 Sukajadi Pekanbaru	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 48	Rehabilitasi Atap Dan Plapon Aula Sekolah YKPP Dumai			Terlaksananya Rehabilitasi Atap Dan Plapon Aula Sekolah YKPP Dumai	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 49	Pengembangan Masjid Al Wahidin kota baru kec. Keritang - inhil			Terlaksananya Pengembangan masjid al wahidin kota baru kec. Keritang - inhil	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 50	Pembangunan Masjid Agung Al - Kausar Kel. Babus Salam Kec. Mandau Kab. Bengkalis			Terelaksananya Pembangunan Masjid Agung Al - Kausar Kel. Babus Salam Kec. Mandau Kab. Bengkalis	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 51	Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Sering Kab Pelalawan			Terlaksananya Pembangunan Masjid Nurul Iman Desa Sering Kab Pelalawan	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	52	Pembangunan Surau Al-Munawarah Jalan Batang Tuakal RT2/RW2 Keluaran Pekan Arba - Inhil	Terelaksananya Pembangunan Surau Al-Munawarah Jalan Batang Tuakal RT2/RW2 Keluaran Pekan Arba - Inhil	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	53	Pembangunan Lanjutan Masjid Tawakal jalan Puncak Sari kel. Sri meranti, Kec Rumbai, Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Lanjutan Masjid Tawakal jalan Puncak Sari kel. Sri meranti, Kec Rumbai, Pekanbaru	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	54	Rehab mesjid Almustaqim desa Alai Kec. Tebing Tinggi barat Kab. Kepulauan meranti	Terlaksananya Rehab mesjid Almustaqim desa Alai Kec. Tebing Tinggi barat Kab. Kepulauan meranti	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	55	Renovasi Mesjid Annajah Jl, Srikandi Perum Delima Kel. Delima Widia Graha 3 Rw 9	Terlaksananya Renovasi Mesjid Annajah Jl, Srikandi Perum Delima Kel. Delima Widia Graha 3 Rw 9	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	56	Renovasi Mushola Al-Falah, Desa Bantar Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti	Terlaksananya Renovasi Mushola Al-Falah, Desa Bantar Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	57	Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin RT 04 RW 07 Kel Maha Ratu Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	Terbangunnya Masjid Baitul Muttaqin RT 04 RW 07 Kel Maha Ratu Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	58	Pembangunan Masjid Nurfalah Huddin Jl Lintas Dumai Basilam Baru Simpang Pulai RT 17 Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan Dumai	Terbangunnya Masjid Nurfalah Huddin Jl Lintas Dumai Basilam Baru Simpang Pulai RT 17 Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan Dumai	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	59	Pembangunan Masjid Al Muamalah Jl Pematang Pudu RT 15 Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	Terlaksananya Pembangunan Masjid Al Muamalah Jl Pematang Pudu RT 15 Kel. Tanjung Penyebal Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 60	Pembuatan Pagar Mesjid Darul Amal Jl. Baung Rw 08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru			Terlaksananya Pembuatan Pagar Mesjid Darul Amal Jl. Baung Rw 08 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 61	Pembangunan Mushola SMKN 1 Pangkalan Kuras Kab Pelalawan			Terlaksananya Pembangunan Mushola SMKN 1 Pangkalan Kuras Kab Pelalawan	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 62	Penyelesaian gedung serbaguna Desa Kuapan Kec. Tambang			Terlaksananya Penyelesaian gedung serbaguna Desa Kuapan Kec. Tambang	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 63	Pembangunan Gedung Serbaguna Pemuda Jl. Karya indah Perum. Cipta Karya Indah			Terlaksannaya Pembangunan Gedung Serbaguna Pemuda Jl. Karya indah Perum. Cipta Karya Indah	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 64	Pembangunan Masjid Baiturrahim Desa Pebaun Hilir Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing (LANJUTAN)			Terlaksannaya Pembangunan Masjid Baiturrahim Desa Pebaun Hilir Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 65	Pembangunan Balai Adat suku Piliang Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing			Terlaksananya Pembangunan Balai Adat suku Piliang Desa Koto Lubuk Jambi Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuansing	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 66	Pembangunan Masjid Al Husna Dusun Empat Penatan Desa Kampar Kec. Kampar Timur Kam. Kampar			Terlaksananya Pembangunan Masjid Al Husna Dusun Empat Penatan Desa Kampar Kec. Kampar Timur Kam. Kampar	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 67	Rehab Masjid Al - Muttaqin Dusun Jawi-Jawi Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar			Terlaksananya Rehab Masjid Al - Muttaqin Dusun Jawi-Jawi Desa Koto Perambahan Kec. Kampar Timur Kab. Kampar	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03		68	Pembangunan Masjid Al-Firdaus Jl. Firdaus Kel. Simpang Baru Kec. Tampan kota Pekanbaru	Terlaksananya Pembangunan Masjid Al-Firdaus Jl. Firdaus Kel. Simpang Baru Kec. Tampan kota Pekanbaru	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		69	Rehab Masjid Al Ghufon Jl. Cipta Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru	Terlaksananya Rehab Masjid Al Ghufon Jl. Cipta Karya Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		70	Pembangunan Gedung Cahaya Bunda Dusun Mulya , Desa Keranji Guguh, Kec. Koto Gasib Kab. Siak	Terbangunnya Gedung Cahaya Bunda Dusun Mulya , Desa Keranji Guguh, Kec. Koto Gasib Kab. Siak	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		71	Pembangunan Mesjid Al - Hijrah Dusun 3 Petaling Jaya Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan	Terbangunnya Mesjid Al - Hijrah Dusun 3 Petaling Jaya Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Pelalawan	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		72	Pembangunan Mushalla Nurul Iman RT. 01 RW 02 Desa Kuala Gasib, siak	Terbangunnya Mushalla Nurul Iman RT. 01 RW 02 Desa Kuala Gasib, siak	1 Unit				-	-		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		73	Pembangunan Mushalla Al - Miftahuljannah, desa Bunga Raya, Kec. Bunga Raya, siak	Terbangunnya Mushalla Al - Miftahuljannah, desa Bunga Raya, Kec. Bunga Raya, siak	1 Unit				-	-		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		74	Pembangunan Sekretariat dan Gedung Serbaguna Yayasan Fortuna Sejati Kec. Tampan Pekanbaru	Terbangunnya Sekretariat dan Gedung Serbaguna Yayasan Fortuna Sejati Kec. Tampan Pekanbaru	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		75	Pembangunan Masjid Tawakal Jl. Puncak Sari KEL. Sri Meranti Kec. Rumbai, Pekanbaru (lanjutan)	Terbangunnya Masjid Tawakal Jl. Puncak Sari KEL. Sri Meranti Kec. Rumbai, Pekanbaru	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03		76	Rehab Masjid Al Mustaqim Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti	Terlaksananya Rehab Masjid Al Mustaqim Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti	1 Unit				1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 03 77	Pembangunan Balai Pertemuan Warga Desa Bukit Batu Laut Kab. Bengkalis			Terbangunnya Balai Pertemuan Warga Desa Bukit Batu Laut Kab. Bengkalis	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 78	Pembangunan Surau Suluk Ubudiyah, Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar			Terbangunnya Surau Suluk Ubudiyah, Desa Penghidupan Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kab. Kampar	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 79	Peningkatan Masjid Al Jamiah Desa Hangtuh Perhentian Raja, Kab. Kampar			Terbangunnya Masjid Al Jamiah Desa Hangtuh Perhentian Raja, Kab. Kampar	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 80	Pembangunan Balai Adat Desa Tabing, Kec. Koto Kampar Hulu			Terbangunnya Balai Adat Desa Tabing, Kec. Koto Kampar Hulu	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 81	Pembangunan Balai Adat Desa Pulau Gadang, Kec. Tiga Belas Koto Kampar			Terbangunnya Balai Adat Desa Pulau Gadang, Kec. Tiga Belas Koto Kampar	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 82	Pembangunan Balai Adat Desa Siberuang, Kec. Koto Kampar Hulu			Terbangunnya Balai Adat Desa Siberuang, Kec. Koto Kampar Hulu	1 Unit					1 Unit	1 Unit		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 83	Renovasi Masjid Al Rahman Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat, Akb. Kep. Meranti			Terlaksananya Renovasi Masjid Al Rahman Desa Alai Kec. Tebing Tinggi Barat, Akb. Kep. Meranti	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 84	Renovasi Masjid Al Mujahidin Desa Nipah Senanu Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti			Terlaksananya Renovasi Masjid Al Mujahidin Desa Nipah Senanu Kec. Tebing Tinggi Timur Kab. Kep. Meranti	100%					100%	100%		Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1 03 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya			Terbangunnya Turap di Danau Raja di Kabupaten Indragiri Hulu (lanjutan)	N/A	0	1	1	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	26	01	Pembinaan Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Riau	Terbinanya Kelembagaan dan Operasional Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Riau	5 Kegiatan			5 Kegiatan			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	26	02	Pembangunan Turap di Danau Raja (Lanjutan)	Terbangunnya Turap di Danau Raja (Lanjutan) Kab. Inhu	100 Meter			100 Meter			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	26	03	Pengeboran dan Pemanfaatan air di Tanah	Terlaksananya Pengeboran dan Pemanfaatan air di Tanah di Kabupaten Kuansing	100%			100%			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	26	04	Reklamasi Sungai Kampung Pinang	Terlaksananya Reklamasi Sungai Kampung Pinang Menuju Lubuk Sakat ± 14 Km Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar	100%			100%			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	34		Program pengembangan/peningkatan laboratorium pengujian	Tersedianya Peralatan Laboratorium Pengujian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum
	03	35		Program pengujian material/bahan konstruksi	Tersedianya sistem pengendalian mutu dan kualitas konstruksi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	31		Program peningkatan fasilitas pendukung fungsi ke- PU an	Tersedianya perangkat pendukung teknis kePU-an	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air
1	03	31	01	Pengelolaan UPT Air Minum Pekanbaru Selatan	Tersedianya Pengelola UPT Air Minum Pekanbaru Selatan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan		Dinas Pekerjaan Umum, Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air
1	03	31	02	Pengelolaan UPT Gedung PIP2B	Tersedianya Pengelola UPT Gedung PIP2B	1 Kegiatan			1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.00	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Dava Air

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	03	31	03	Pengelolaan Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau	Tersedianya Pengelola Sekretariat Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi Riau	1 Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	14.90	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air
1	03	31	04	Sinkronisasi Program Bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air	Terlaksananya Sinkronisasi Program Bidang Keciptakaryaan, Tata Ruang dan Sumber Daya Air	1 Kegiatan						1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.20	Dinas Pekerjaan Umum, Cipta karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air
1	03			Program Penyediaan dan pengelolaan air minum	Tersedianya prasarana air minum di 12 Kab/Kota	N/A		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum
1	03	22		Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Jumlah Sistim Informasi jalan dan jembatan yang dibuat	N/A		0	1	1	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Bina Marga
1	03	29		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya prasarana lingkungan di permukiman perkotaan yang berkualitas di 12 Kab/Kota	N/A		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	29	01	Pengelolaan Rusunawa Pekerja Provinsi Riau di Pekanbaru	Terpeliharanya Rusunawa Pekerja Provinsi Riau	100%						100%			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	03	29	02	Pembinaan Teknis dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Terbinanya Teknis dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	100%						100%			Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air
1	05			PENATAAN RUANG											
1	05	15		Program perencanaan tata ruang	Terlaksananya Fasilitas Perencanaan penataan ruang wilayah	4		0	0	0	0	4	4	100	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
																Sumber daya Air, Bappeda
1	05	16			Program Pemanfaatan ruang	Terbangunnya kawasan ruang terbuka hijau (RTH)	4		0	2 kawasan	2	100	1 Kawasan	1 Kawasan	75	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air, Bappeda
1	05	19			Program Penataan Ruang	Tersedianya dokumen/ Fisik RTH Provinsi Riau			4	4	0	0	0	0	0	Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber daya Air, Bappeda
1	06				PERENCANAAN PEMBANGUNAN											
1	06	20			Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Jumlah aparatur perencana 'yang mengikuti berbagai pendidikan	25 org, 20 org, 65 org, 65 org, 48 org		48 orang	20 org, 65 org, 48 org	20 org, 65 org, 48 org	100	25 org, 20 org, 65 org, 65 org, 48 org	25 org, 20 org, 65 org, 65 org, 48 org	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	01		Penerapan, Evaluasi Dan Audit ISO 9001: 2008 Bappeda Provinsi Riau	Terimplementasi Sistem Manajemen Mutu 9001:2008 Bappeda Provinsi Riau	5	dok	5					5	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	02		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Perencana Provinsi Riau Dan Kabupaten / Kota Se- Provinsi Riau.	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencana	90	org	90					90	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	03		Bimbingan Teknis Pengisian Lembar Anggaran Responsif Gender (ARG) Dan Gender Analysis Pathway (GAP) Bagi Focal Point Provinsi Riau	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencana	100%	kegiatan	100%					100%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	20	04	Workshop Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi Riau	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencanaan	100%	kegiatan			100%	100%			100%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	05	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Motivasi AparaturPerencanaan Bappeda Prov.Riau	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencanaan	100%	kegiatan			100%	100%			100%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	06	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencanaan Aparatur	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencanaan	100%	kegiatan			100%	100%			100%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	07	Bimbingan Kemampuan Tim Building Aparatur Perencanaan Provinsi Riau	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencanaan	100%	kegiatan			100%	100%			100%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	20	08	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Bagi Aparatur	Meningkatnya pengetahuan kapasitas pejabat fungsional perencanaan	100%	kegiatan			100%	100%			100%	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen	115	Dokumen	0		52	52	100	104	156	135.65	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	01	Penyusunan rancangan RKPD Provinsi Riau	tersusunnya RKPD Provinsi Riau	10	dokumen			2	2	100	2	4	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	02	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	terselenggaranya Musrenbang RKPD	5	dokumen			1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	03	Penyiapan Materi/Paparan/Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau	Tersusunnya Pidato, Pengarahan dan Presentasi Pimpinan Dibidang Perencanaan	240	materi			48	48	100	48	96	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	04	Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Provinsi Riau	Terevaluasinya capaian Kinerja pada Pemerintah Provinsi Riau	2	dokumen			1	1	100	1	2	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	05	Sosialisasi Sistem Perencanaan di Provinsi Riau	Tersosialisasi Sistem Perencanaan di Provinsi Riau	1	kegiatan			0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	06	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Riau	Tersusunnya data dan analisa tentang evaluasi kinerja pembangunan daerah	3	Doku men		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	07	Sinkronisasi RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten/Kota	Tersinkronnya RKPD dan KUA/PPAS Kab/Kota dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi	24	Doku men		12	12	100	12	24	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	08	Sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota	Tersinkronnya RKPD Kab/Kota dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi	36	Doku men		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	09	Sinkronisasi dan asistensi Penyusunan dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kab./kota	Terkendali dan terasistensinya penyusunan dokumen perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan kab./kota	4	kegiatan		0	0	0	42 SKPD / 12 Kab/Kota			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	10	Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja, Penetapan Kinerja (Penja, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Terkoordinasi dan tersusunnya LAKIP Bappeda Prov. Riau , Penja Prov. Riau dan RKT Bappeda	6	Doku men		3	3	100	3	6	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	11	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	1	Doku men		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	12	Sinkronisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Riau	Terlaksananya sinkronisasi pelayanan standar pelayanan minimal di Provinsi Riau	1	Doku men		0	0	0	SPM Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	13	Revisi Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2018	1	Doku men		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	14		Evaluasi Capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD Provinsi Riau Tahun 2014-2018	Tersusunnya dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau	4	dokumen		0	0	0	42 SKPD			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	15		Koordinasi dan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan	Terkoordinasi dan tersusunnya Perjanjian Kinerja Prov. Riau dan RKT Bappeda	6	Dokumen		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	16		Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Riau	Terkoordinasi dan tersusunnya LAKIP Bappeda Prov. Riau	3	Dokumen		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	17		Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur	Terintegrasinya perencanaan pembangunan bidang sumberdaya aparatur di Provinsi Riau	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	18		Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perencanaan Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	5	laporan		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	19		Sinkronisasi Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau	Terintegrasinya Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau	4	Dokumen		0	0	0	1	1	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	20		Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	tersusunnya KUA dan PPAS (murni dan perubahan)	20	dokumen		4	4	100	4	8	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	21		Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	tersusunnya usulan APBN, terdapatnya dokumen perencanaan Kab/Kota, koordinasi dengan Pemerintah Pusat	5	dokumen		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	22	Verifikasi, Analisis dan Penyelesaian Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten / Kota	Terkoordinasinya Verifikasi, Analisis dan Penyelesaian Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten/Kota	4	kali (RPJP 12 Kab/Kota RPJMD 12 Kab/Kota)		0	0	0	1	1	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	23	Penyusunan Prioritas dan Pagu Anggaran	tersusunnya Prioritas dan Pagu Anggaran SKPD Provinsi Riau	1	dokumen		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	24	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Penelitian	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Rencana Program dan Kegiatan Penelitian	4	Dokumen		0	0	0	1	1	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Provinsi Riau	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	26	Kajian Akademis RPJPD Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Akademis Perencanaan RPJPD Provinsi Riau	1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	27	KLHS Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005 - 2025	Tersusunnya KLHS Evaluasi RPJPD Provinsi Riau 2005 - 2025	1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	28	Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau	Terlaksananya Penyusunan Revisi RPJPD Provinsi Riau	1	Dokumen		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	29	Musrenbang RPJPD Provinsi Riau	Terlaksananya Musrenbang RPJPD Provinsi Riau	2	kegiatan		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	30	Penetapan Peraturan Daerah Revisi RPJPD Provinsi Riau	Tersedianya Perda RPJPD Provinsi Riau	1	Dokumen		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	31	Sosialisasi Peraturan Daerah RPJPD Provinsi Riau	Tersosialisasinya Perda RPJPD Provinsi Riau	1	kegiatan		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	32	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Provinsi Riau Sampai tiap tahun	Tersedianya dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau	2	Dokumen					0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	21	33	KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau	Tersedianya KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau	1	Dokumen		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	34	Review RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	Terlaksananya Review RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	35	revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019	Terlaksananya Revisi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	1	Dokumen		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	36	verifikasi dokumen perencanaan Kabupaten /Kota se Provinsi Riau	Terlaksananya Verifikasi Dokumen Perencanaan Kab/Kota Se Provinsi Riau	1	dokumen		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	37	Analisa Satuan Biaya	Tersusunnya Dokumen Analisa Satuan Biaya Provinsi Riau	3	dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	38	Penyusunan Standarisasi Tunjangan Kinerja Daerah Provinsi Riau	Tersusunnya Dokumen Standarisasi tunjangan kinerja daerah Provinsi Riau	3	3 dok						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	39	Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau	Tersusunnya Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	40	Musrenbang RPJMD Provinsi Riau	Terlaksananya Musrenbang RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	1	Dokumen		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	41	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau		1	Dokumen		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	42	Penetapan RPJMD Provinsi Riau	Tersedianya PERDA RPJMD Provinsi Riau 2014-2018		1	perda		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	43	Sosialisasi Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Riau	Tersosialisasi PERDA RPJMD Provinsi Riau 2014-2018		1	kegiatan		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	44	Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi	Terlaksananya Koordinasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi		6	dokumen		1	1	100	1	2	33.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	45	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau		6	dokumen		1	1	100	1	2	33.33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	46	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya buku hasil pengendalian dan pelaporan APBD, APBN dan data rumah layak huni se-Provinsi RiauData/Informasi Pelaksanaan APBD Tahun 2014		27	dokumen		4	4	100	4	8	29.63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	47	Pengendalian Pelaporan Inpres No. 3 Tahun 2010 di Provinsi Riau	Dokumen Pelaporan Inpres No. 3 Tahun 2010		2	dokumen		1	0	0	1	1	50.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	48	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Provinsi Riau Sampai tahun 2014	terevaluasinya dokumen RPJP Provinsi Riau setengah periode berjalan terhadap target capaian yang telah ditetapkan di RPJP Provinsi Riau		2	dokumen		0	0	0	1	1	50.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	49	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Riau	Tersedianya data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur Provinsi Riau		1	dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	50	Updating sistem aplikasi pelaporan APBD lingkup Bappeda Provinsi Riau	Terupdatenya sistem aplikasi pelaporan APBD Bappeda Provinsi Riau berbasis sistem Aplikasi	2	laporan						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	51	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Perhubungan dan Kebinamargaan	4	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	52	Pelaksanaan Pokja RAD-GRK	Terlaksananya pelaksanaan Pokja RAD-GRK	4	kegiatan		0	0	0	1	1	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	53	Pelaksanaan Pokja Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	Terlaksananya Pokja Cagar Biosfer Giam Siak Kecil bukit Batu	5	kegiatan		0	0	0	1	1	20.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	54	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Hutan Lindung Mahato	Terlaksananya Pneyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Hutan Lindung Mahato	1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	55	Pneyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang	Tersedianya Pneyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang	1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	56	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terluar	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Terluar	1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	57	Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau	4	Dokumen		0	0	0	1	1	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	58	Pelaksanaan Koordinasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau	5	Dokumen		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	59	Pelaksanaan Pokja AMPL Provinsi Riau	Terlaksananya Pokja AMPL Provinsi Riau	5	kegiatan		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	06	21	60	Operasional Pokja PPSP Provinsi Riau Bidang Perencanaan	Lancarnya Pelaksanaan Pokja PPSP Provinsi Riau	4	Dokumen		1	0	0	1	1	25.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	61	Penyusunan Masterplan Persampahan Provinsi Riau	Tersedianya Masterplan Pengembangan Kelistrikan dan Energi di 12 Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau	1	Dokumen		1	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	62	Penyusunan Masterplan Pengembangan Infrastruktur dan Potensi Wisata di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	Tersedianya Masterplan Pengembangan Infrastruktur dan Potensi Wisata di Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu	1	Dokumen		1	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	63	Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Ke Kab/Kota se- Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) se Provinsi Riau	1	kegiatan		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	64	Asistensi Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	Terkoordinasinya Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	1	Dokumen		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	65	Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Provinsi Riau	1	Dokumen		1	1	100	0	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	66	Studi Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan (High Grade Highway/HGH) dari Ibukota Provinsi ke Seluruh Kab/Kota Dalam Meningkatkan Konektivitas dan Mobilitas Antar Wilayah di Provinsi Riau	Terlaksananya Studi Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan (High Grade Highway/HGH) dari Ibukota Provinsi ke Seluruh Kab/Kota Dalam Meningkatkan Konektivitas dan Mobilitas Antar Wilayah di Provinsi Riau	11	Dokumen		1	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	67	Kajian Identifikasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Investasi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Produktifitas dan Percepatan Pembangunan Wilayah di Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Identifikasi Penataan dan Pengembangan Jaringan Jalan Strategis Berdasarkan Potensi dan Kebutuhan Investasi Daerah Dalam Upaya Peningkatan Produktifitas dan Percepatan Pembangunan Wilayah di Provinsi Riau		1	Dokumen		1	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	68	Pemetaan Sarana dan Prasarana Transportasi Menuju Daerah Terisolir di Provinsi riau	Tersedianya Dokument Pemetaan Sarana dan Prasarana Transportasi Menuju Daerah Terisolir di Provinsi riau		1	Dokumen		1	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	69	Penyusunan Manajemen Penanganan Jalan provinsi Riau	Tersedianya manajemen Penanganan jalan Provinsi Riau		1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	70	Penyusunan Road Map Sanitasi	tersedianya road map sanitasi provinsi riau		1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	71	Penyusunan Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersusunnya Kebijakan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		1	Dokumen		0	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	72	Penyusunan Data Base Sanitasi Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Data Base Sanitasi Provinsi Riau		1	Dokumen		1	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	73	Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Terlaksananya Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen RPJMD terhadap RKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau		3	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	21	74	Asistensi review penyusunan indikator pembangunan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau	Tersusunnya data dan informasi terhadap pembangunan daerah Kabupaten/Kota se-provinsi Riau		3	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	21	75	Pembakuan dan penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan Provinsi Riau	terlaksananya pembakuan dan penetapan indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan provinsi riau		2	pergub		0	0	0	0	0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Tersedianya dokumen 'koordinasi,'sinkronisasi dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi		5	Dokumen	3	6	6	100	8	17	340.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	01	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		5	laporan		1	1	100	1	1	20.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	02	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau	Terkoordinasinya Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Riau		5	laporan		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	Terlaksananya Upaya Pencapaian target RAD Pangan dan Gizi di Provinsi Riau		5	laporan		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau	Terkoordinasinya Perencanaan berupa Action Plan MP3EI di Provinsi Riau		5	laporan		1	1	100	1	2	40.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	05	Penyusunan Kajian Potensi dan Sinergi Mitra tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau	Tersusunnya Dokumen Potensi dan Sinergi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau		1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	06	Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Riau	Tersusunnya strategi pembangunan pertanian di Provinsi Riau		1	Dokumen		1	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	07	Penyusunan Kajian Potensi dan Sinergi Mitra tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau	Tersusunnya Dokumen Potensi dan Sinergi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau		1	Dokumen		1	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					Sosial Perusahaan (TJSP) di Provinsi Riau											
1	06	22	08		Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan di Provinsi Riau	Tersusunnya strategi pembangunan pertanian di Provinsi Riau	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	09		Strategi Pengembangan Peternakan di Provinsi Riau	Tersusunnya dokumen model pengembangan peternakan di Provinsi Riau	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	10		Strategi Pembangunan Perikanan Berbasis Industri di Provinsi Riau	Tersusunnya strategi pembangunan perikanan berbasis industri	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	11		Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Provinsi Riau	Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Industri UKM di Provinsi Riau	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	12		Penyusunan Strategi Program Peningkatan daya saing (Keunggulan Kompetitif) komunitas andalan utama sektor pertanian dalam menghadapi perdagangan global	Tersusunnya Strategi Program Peningkatan daya saing (Keunggulan Kompetitif) komunitas andalan utama sektor pertanian dalam menghadapi perdagangan global	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	13		Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai mitra pembangunan	3	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	14		Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)	Tersusunnya strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin	1	Dokumen						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	22	15	Strategi Penguatan Struktur Ekonomi Daerah yang berdaya saing	Tersedianya dokumen strategi penguatan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing		1	Doku men						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	16	Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD)	Tersusunnya strategi percepatan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat miskin		1	Doku men						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	17	Strategi Penguatan Struktur Ekonomi Daerah yang berdaya saing	Tersedianya dokumen strategi penguatan struktur ekonomi daerah yang berdaya saing		1	Doku men		1	0	0	1	1	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	18	Kajian Pengembangan Kemaritiman di Provinsi Riau	Tersedianya dokumen pengembangan kemaritiman di Provinsi Riau		1	Doku men						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	22	19	Model pengembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir melalui pendekatan ekonomi kelembagaan	terciptanya model pengembangan sosial ekonomi masyarakat wilayah pesisir melalui pendekatan ekonomi kelembagaan		1	Doku men						0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	24		Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	Tersedianya dokumen 'koordinasi, 'sinkronisasi dan evaluasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		5	Doku men	0	2	2	100	5	7	140.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	24	01	Valuasi ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau	Teridentifikasinya nilai ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau		1	Doku men	0			0		0	0.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	24	02	Penyusunan Neraca Sumber daya Alam Daerah	Tersusunnya Neraca Sumberdaya Alam Daerah		2	Doku men	0	1	0	0	1	1	50.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 06 24 03	03	Evaluasi kesesuaian lahan dan pengembangan tanaman perkebunan karet di Provinsi Riau	Teridentifikasinya kesesuaian lahan dan pengembangan tanaman perkebunan karet di Provinsi Riau	1	Doku men	0						0		0	0.00	BPPD RIAU
1 06 24 04	04	Masterplan energi terbarukan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah	terlaksananya energi terbarukan dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah	1	Doku men									0	0.00	BPPD RIAU
1 06 24 05	05	penyusunan potensi dan pemanfaatan hutan berbasis kemasyarakatan	tersusunnya dokumen potensi dan pemanfaatan hutan berbasis kemasyarakatan	1	Doku men									0	0.00	BPPD RIAU
1 06 24 06	06	Kajian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air pada empat aliran sungai di Provinsi Riau	Terlaksananya Kajian Potensi dan Pemanfaatan sumberdaya air pada empat aliran sungai di Provinsi Riau	1	Doku men					1	0	0	1	1	100.00	BPPD RIAU
1 06 24 07	07	Strategi pengembangan ekonomi petani perkebunan tradisional	Peningkatan kesejahteraan petani pekebun tradisional	1	Doku men										0.00	BPPD RIAU
1 06 24 08	08	Studi karakteristik dan pengelolaan air pada lahan gambut di Provinsi Riau dalam rangka pengelolaan gambut berkelanjutan	Terlaksananya studi karakteristik dan pengelolaan air pada lahan gambut di Provinsi Riau dalam rangka pengelolaan gambut berkelanjutan	1	Doku men											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 24 09	09	Pemanfaatan hasil limbah perkebunan di Provinsi Riau sebagai sumber energi alternatif	Termanfaatkannya limbah perkebunan sebagai sumber energi terbarukan	1	Doku men											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 24 10	10	Identifikasi dan pemetaan potensi energi baru dan terbarukan	teridentifikasinya potensi energi baru dan terbarukan	1	Doku men											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1 06 24 11	11	Penyusunan masterplan pengembangan komoditas unggulan perkebunan	tersusunnya masterplan sebagai acuan sistem pengembangan komoditas unggulan perkebunan di Provinsi Riau	1	Doku men											Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab									
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)										
1					2					3					4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	06	24	12		Penyusunan Master Plan Perkebunan Provinsi Riau	Terlaksananya penyusunan Master Plan Perkebunan Provinsi Riau	1	Doku men															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	24	13		Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi	Terlaksannya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi	4	Doku men															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	23			Program Perencanaan Sosial Budaya	Tersedianya dokumen 'koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan sosial budaya	6	Doku men																
1	06	23	01		Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	Terwujudnya Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	5	tahun (12 Kab/Kota)		1	1	100	1	2	40.00								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	23	02		Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	5	dokumen		12 kab/kota	12 kab/kota	100	12 kab/kota	12 kab/kota									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	23	03		Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	12 kab/kota selama 2 tahun			0	0	0	0	0	0.00								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	23	04		Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	Jumlah laporan hasil Evaluasi Pencapaian Tujuan dan Target MDG's Provinsi Riau	1	dokumen															Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	06	23	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pasca MDGs 2015	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Pasca MDG's 2015	3	tahun (12 Kab/Kota)		5	5	100	7	12	400.00								Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	06	23	06	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terkendalinya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Riau	12	Kab/Kota			0	0	0	12	12	100.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	07	Pengendalian Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Prov. Riau	Terkendalinya Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Prov. Riau	12	Kab/Kota			0	0	0	60	60	500.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	08	Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	Terlaksananya koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Dalam Rangka Pengendalian Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	240	Orang									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	09	Penyusunan Profil Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat Provinsi Riau	200	dokumen									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	10	Pemetaan Permasalahan Masyarakat Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Pemetaan Permasalahan Masyarakat Provinsi Riau	200	dokumen									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	23	11	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata di Provinsi Riau	3	dokumen									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	06	17		Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya perencanaan dan pembangunan di wilayah perbatasan	11	keg									BPPD RIAU
1	06	17	01	Survei identifikasi kebutuhan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di kawasan perbatasan Prov Riau.	Jumlah Pos Lintas Batas Negara yang minim sarana prasarana.	2 Keg							1 Keg	1 Keg	4.25	BPPD RIAU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	06	17	02	Survei identifikasi titik batas Negara (TR) di kawasan perbatasan Prov Riau.	Jumlah titik batas Negara (TR) yang teridentifikasi di Prov Riau.	2 Keg				1Keg	1Keg	1.65	BPPD RIAU		
1	06	17	03	Survei pengukuran dan pelacakan Batas daerah Kab/Kota dalam Provinsi Riau.	Jumlah segmen yang dapat diselesaikan penegasan batas	4 Keg				1 Keg	1 Keg	6.44	BPPD RIAU		
1	06	17	04	Perapatan pilar batas antar Provinsi	Jumlar Pilar batas yang dibangun.	3 Keg				1 Keg	1 Keg	5.03	BPPD RIAU		
1	04			PERUMAHAN											
1	04	15	01	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah rumah sederhana layak huni yang dibangun (unit)	2000 Unit		0	2157 Unit	2157 Unit	100	2000 Unit	2000 Unit	100	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
					Terbangunnya Restlement pemukiman masyarakat	2 Kawasan		0	-	0	0	2 Kawasan	2 Kawasan	100	
					Jumlah unit bangunan rumah	2 unit, 0 dokumen, 0 lantai, 60 orang		0 unit, 0 dokumen, 0 lantai, 0 orang	-	0	0	2 unit, 2 dokumen, 4 lantai, 73 orang	2 unit, 2 dokumen, 4 lantai, 73 orang	100	
1	04	15	01	Pemantauan dan Pengendalian Kegiatan Bidang Permukiman melalui sistem e-monitoring	Terpantaunya dan Terkendalnya Kegiatan Bidang Permukiman melalui sistem e-monitoring	40%					40%				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04	15	02	Survey dan Penyusunan Data Base	Tersusunya Data Base	1 Laporan						1 Laporan			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04	15	03	Penyusunan dan Perencanaan Teknis Kegiatan Bidang Permukiman	Tersusunya Teknis Kegiatan Bidang Permukiman	1 Laporan						1 Laporan			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Banodes

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	04	15	04	Dukungan Infrastruktur Dasar Rusunawa	Persentase Dukungan	100%							100%			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04	16		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terfasilitasinya sinkronisasi Program nasional dalam pengembangan Infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat di Provinsi Riau	1 Laporan		0	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
					Pembinaan teknis dan pengendalian untuk mendukung program - program nasional dalam pembangunan Infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat	100 Desa		0	0	0	0	100 Desa	100 Desa	100		
1	04			Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman	Jumlah Kawasan Pemukiman yang Memiliki Sanitasi yang Baik dan Berwawasan Lingkungan	5 Kawasan		0	0	0	0	5 Kawasan	5 Kawasan	100		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		01	Pembangunan Drainase Sekitar Kawasan Jembatan Siak IV Pekanbaru Paket A	terbangunnya Drainase Sekitar Kawasan Jembatan Siak IV Pekanbaru Paket A	1000 M						1000 M				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		02	Pembangunan Drainase Sekitar Kawasan Jembatan Siak IV Pekanbaru Paket B	terbangunnya Drainase Sekitar Kawasan Jembatan Siak IV Pekanbaru Paket B	1000 M						1000 M				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		03	Pembangunan Drainase Kabupaten Rokan Hilir	terbangunnya Drainase Kabupaten Rokan Hilir Sei Pabrik Bagan Punak	2000 M						2000 M				Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
																Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		04	Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau		1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		05	Perencanaan UKL dan UPL Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah Dokumen UKL dan UPL Program Penyehatan Lingkungan Permukiman		1 Kegiatan						1 Kegiatan			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		06	Pembangunan Landfill TPA Mekar Sari	Tersedianya Landfill TPA Mekar Sari		1 Kawasan						1 Kawasan			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04		07	Sinkronisasi Program Nasional dalam Pembangunan Infrastruktur berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau	Persentase Dukungan		100%						100%			Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04			Program Penyusunan dan Perencanaan Teknis kegiatan Bidang Permukiman	Tersusunnya dokumen perencanaan teknis kegiatan Bidang Permukiman		6 Laporan		0	0	0	0	6 Laporan	6 Laporan	100	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Sumber daya air BPM Bangdes
1	04			Program Pengembangan Perumahan Pedesaan	Jumlah rumah layak huni dan sanitasi lingkungan yang dibangun bagi rumah tangga miskin di pedesaan (unit)		5520		0	3638	2728.5	75	0	0	0	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	18			KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA											
1	18	15		Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda		100		0	100	100	100	100	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	16		Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan		217		80	80	80	100	205	205	94.47	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	17		Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda		90		65	75	75	100	75	75	83.33	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	18		Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba		80		70	80	80	100	80	80	100.00	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		85.00		70.00	121	121	100	80.00	80.00	94.12	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	21		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		24		38	20	20	100	122	122	19.67	Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18			Program Peningkatan Sarana Prasarana Aktifitas Kepemudaan		6		1.00	1	1	100	1	1	16.67	Dinas Pemuda dan Olahraga

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	16			PENANAMAN MODAL								76.47	78.26	
1	16	15		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp milyar) PMA (US\$juta)	4.809 655	1257.7 115.3	4.032 549	3628,8 109,8	2 90	4.233 577	4.233 577	88,02 101,65	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	15	01	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan Penanaman Modal Daerah	Terevaluasinya pelaksanaan program dan kinerja BPMPD	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100	1 laporan		0.369	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	15	02	Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Kegiatan Penanaman Modal	12 kab/kota		12 kab/kota	12 kab/kota	100	12 kab/kota		0.904	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	15	03	Promosi Luar Negeri	Tersebar luasnya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi luar negeri	6 event		-	-		3 event		0.194	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	15	04	Promosi Dalam Negeri	Tersebar nya informasi tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui promosi dalam negeri	7 event		5 event	5 event	100	2 event		1.004	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	16	15	05	Pelayanan Calon Investor dalam Pelaksanaan Investasi	Meningkatnya pelayanan kepada calon investor pada masa pra investasi	5 calon investor				5 calon	5 calon	100	5 calon investor		0.095	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	15	06	Riau Expo	Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap informasi potensi SDA, investasi, perdagangan dan sosial budaya	1 event				1 event	1 event	100	1 event		2.973	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	15	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang penanaman modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang penanaman modal	12 kab/kota				12 kab/kota	12 kab/kota		12 kab/kota		80.604	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	16		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim investasi PMDN (jumlah proyek) PMA (jumlah proyek)	51 93			13 14	35 65	35 65	100 100	39 72	39 72	76,47 78,26	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	16	01	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terselesaikannya permasalahan investasi yang dilaporkan oleh investor dan dunia usaha serta terjalinnya kemitraan usaha di Provinsi Riau	5 permasalahan							5 permasalahan			Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	16	16	02	Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terevaluasinya perencanaan dan pelaksanaann penanaman modal dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat	2 prog kerja						2 prog kerja			Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	16	03	Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN/PMA	Data investasi PMA/PMDN Provinsi Riau yang seragam dan muhtakhir	data invsetasi kab/kota per triwulan						12 kab/kota			Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17		Program Penyiapan Potensi Sumberdaya Sarana dan Prasarana Daerah	Tersedianya potensi/peluang investasi (Jumlah Peluang yang ditawarkan)	34		19	22	22	100	25	25	131.58	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17	01	Pelaksanaan Warta Promosi Daerah	Tersedianya data / informasi umum tentang daerah Riau dengan segala potensi sumber daya, peluang investasi, dan daya tarik wisata secara berkala melalui media cetak dam elektronik	12 edisi majalah				12 edisi	100	12 edisi majalah		0.63	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17	02	Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah	Tersedianya informasi perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN yang akurat sebagai acuan pengambilan keputusan	500 eksmpl				400 buku	80	400 buku		0.58	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Teroadu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
1	16	17	03	Pencetakan Bahan Publikasi dan promosi Daerah	tersedianya data/informasi umum tentang daerah Riau (SDA, Peluang Investasi dan Daya tarik wisata) Ter-Update nya website riainvestment.com	500 eksmpl		250 eksmpl	50	250 ekpl		0.39	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17	04	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Terwujudnya kesepakatan terhadap arah pemetaan dan pengembangan penanaman modal Provinsi Riau	1 pra fs				1 fs		0.56	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17	05	Koordinasi Pengembangan Gedung Pusat Promosi Sumatera (SPC) Batam	Terwujudnya pengembangan investasi di sumatera promotion centre (SPC) Batam	1 tahun		1 tahun	100	1 tahun		0.29	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17	06	Penyusunan database potensi dan peluang investasi kab/kota se Provinsi Riau	Tersedianya database potensi dan peluang investasi 12 Kab/Kota Riau	12 Kab/Kota				4 kab/kota		2.86	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah, Badan Penghubung,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16	17	07	Penyusunan FS Potensi Unggulan Investasi	Terlaksananya dokumen FS potensi unggulan investasi	3 fs				1 fs			

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	16			Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan	Meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan	N/A		48211	11	11	100	N/A	N/A	N/A	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16			Program Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya akuntabilitas perizinan dan non perizinan (Dokumen Berita Acara Survey)	N/A		350	70	66.255	94.65	N/A	N/A	N/A	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16			Program penerbitan, monitoring, Evaluasi dan penanganan Pengaduan perizinan dan non perizinan	Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan/keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan (IKM)	N/A		78	80	80	100	N/A	N/A	N/A	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16			Program penguatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pelayanan terpadu	tersediaanya instrumen/dokumen penguatan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelayanan terpadu (dokumen)	N/A		1	26	26	100	N/A	N/A	N/A	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
1	16			Program penajajakan calon investor ke Perwakilan Negara Sahabat	Terlaksananya advetorial promosi dalam bahasa inggris ke negara sahabat	N/A		0	6 kali	0	0	N/A	N/A	N/A	Badan Penghubung
1	16			Program peningkatan pelayanan hubungan Perwakilan Negara Sahabat dan Pemerintah Daerah	Tersedianya buku panduan beasiswa dari negara sahabat	N/A		0	225 buku	0	0	N/A	N/A	N/A	Badan Penghubung
1	15			KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH											
1	15			Program Peningkatan Daya saing UMKM	Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau (%)	2.0%		7.9%	8.9%	0.089	100	0.02	0.02	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab				
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	15				Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau (%)	12.9		7.9	0	0	0	17.8	17.8	137.98	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	15				Program Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi dan UMKM untuk Pendukung Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya koperasi aktif di Provinsi Riau (%)	N/A		0.7	0.8	0.72625	90.78	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	15	18			Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya koperasi aktif di Provinsi Riau (%)	12		0	0	0	0	0.9	0.9	7.5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	15				Program Penguatan Permodalan Koperasi dan UMKM	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan (%)			100	100	100	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	15	15			Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Meningkatnya koperasi dan UMKM yang mendapatkan fasilitas permodalan (%)	100		0	100	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	15	16			Program Penyelenggaraan Kewirausahaan, Keunggulan Kompetitif dan Pengembangan Sistem pendukung di UMKM	Meningkatnya pembinaan teknis produk dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (%)	0.02		100	100	100	100	0.02	0.02	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	15	17			Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya pembinaan teknis produk dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (%)	100		0	0	0	0	100	100	100	Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil dan Menengah
1	14				KETENAGAKERJAAN											
1	14				Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Tenaga Penataan Adm Kependudukan	100		100 Orang	100	98.93	98.93	100	100	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	14	01	Pelatihan Peningkatan Administrator Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	250		24	24		24	72	28.8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	02	Pelatihan Kearsipan dan Pencatatan Sipil	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	250		24	24	100	24	72	28.8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	03	Pelatihan Peningkatan Pengelola E-KTP	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	250		24	24	100	24	72	28.8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	04	Peningkatan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	250	2	5	5	100	5	17	6.8	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	05	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan E-KTP	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	250		2	1	50	1	4	1.6	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	06	Penyusunan Profil Kependudukan Berbasis Database SIAK	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	325	40	40	60	150	60	200	61.5	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	07	Pembinaan Informasi Pencatatan Sipil	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	200						0	0	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	08	Forum Komunikasi Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	250						0	0	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	09	Rapat Koordinasi Teknis Kebijakan Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	200						0	0	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	10	Penyusunan Proyeksi Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan							0		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	14	11	Pemeliharaan Perangkat Jaringan data SIAK	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	100					0	0	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	12	Pengembangan Database Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	48	Org	48	48	100	48	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	13	Pelatihan Dasar-dasar Administrasi Kependudukan	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	24	Org	24	24	100	24	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	14	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengelola Dokumen Adminduk	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	24	Org	24	24	100	24	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	15	Monitoring Pengembangan Database Kependudukan dan Penyiapan DP4 Pilgubri Tahun 2013	Terselenggara Penataan Administrasi Kependudukan	30	Buku	30	30	100	30	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14		Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/petugas sebagai administrator ADMINDUK	96		0	0	0	12	100	Biro Pemerintahan, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14		Program Peningkatan Kesempatan dan Perluasan Kerja	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja %	67		62,65	63,30	100	63,70	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	01	Koordinasi,Sinkronisasi/ Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja	770	Org	20	20	100	100	18.18	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	02	Pembentukan Kader Teknologi Padat Karya	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja	760	Org	20	40	150	63	18.82	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	14		03	Pembentukan Wirausaha Baru	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja	1610	Org	50	50	100	200	105	255	15.84	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14		04	Pelatihan/Pemberdayaan Tenaga Kerja Muda Terdidik	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja	605	Org	40	30	64	213.33	67.2	171.2	28.30	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14		05	Pameran Bursa Kerja (Job Fair)	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja	385	Perusahaan	50	50	50	100	52.5	152.5	39.61	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14		06	Penyusunan Data Profil Ketenagakerjaan	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perluasan Kerja	75	Buku	75	75	75	100	78.75	75	100	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14			Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan yang diawasi dan dilindungi	100 Perusahaan, 75 Kasus		75 perusahaan, 75 kasus	75 perusahaan, 75 kasus	75 perusahaan, 75 kasus	100	100 perusahaan, 75 kasus	100 perusahaan, 75 kasus	100	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14		01	Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	12		12	12	12	100	12	12	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14		02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	375		75	75	113	150.67	113	301	80.27	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14		03	Penetapan Upah Minimum dan Sosialisasi Upah Minimum Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	1		1	1	1	100	0	1	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan
1	14		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Upah minimum bagi Dewan Pengupahan Kab/Kota Se Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	15		40	50	15	30	48	15	100.00	Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	14	05	Penerapan Sistem Deteksi Dini untuk Pencegahan Kasus Hubungan Industrial	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	475	130	75	75	100	75	280	58.95	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	06	Koordinasi dan Sinkronisasi LKS Tri Partit se Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	250	3	3	3	100	3	9	3.60	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	07	Pelatihan Lembaga Kerja Sama Bipartit	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	240	40	40	46	115	46	132	55.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	08	Bimtek Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi Anggota P2K3 di Perusahaan se Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	150	30	30	60	200	60	150	100.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	09	Sosialisasi Kemenakertrans RI No.68 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Perusahaan se Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	150	30	30	30	100	30	90	60.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	10	Bimtek Bagi Petugas Pengelola Data dan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (UU No.7 Tahun 1981) se Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	150	30	30	30	100	30	90	60.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	11	Temu Konsultasi Organisasi Pengusaha dan Pekerja dengan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Rangka Penegakan Hukum Ketenagakerjaan	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	150	30	30	30	100	30	90	60.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	12	Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se Provinsi Riau	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	42	30	27	6	22.22	5	41	97.62	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
1	14	13	Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan se Indonesia	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	23	11	11	11	100	11	11	47.83	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab							
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)								
1				2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12		
1	14		14	Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan, K3 dan Penegakan Hukum	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	12		12	12	12	100	12	12	100.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14		15	Monitoring dan Evaluasi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di 12 Kab/Kota	Terlaksananya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (Perusahaan)	12		12	12	12	100	12	12	100.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga kerja yang berkualitas	2500		922	1126	956.575	84.95	2216	2216	88.64	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	01	Pelatihan Kewirausahaan, AMT dan Produktivitas	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			60	120	132	110	126	318	0.00	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	02	Penyuluhan dan Bimbingan Teknis Konsultasi Produktivitas	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)	1800		270	270	459	170	283.5	1012.5	56.25	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	03	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Pekanbaru (Pelatihan Institusional)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)	1060		144	176	232	131.82	184.8	560.8	52.91	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	04	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Pada UPT-LK Pekanbaru (Pelatihan Non Institusional)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			160	224	382	170.54	235.2	777.2		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	05	Renovasi Asrama Siswa dan Aula UPT -LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)				2	1	50	2.1	3.1		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	06	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Non Institusional)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			64	112	176	157.14	117.6	357.6		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						
1	14	15	07	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)				1	1	100	1.05	2.05		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan						

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	14	15	08	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Dumai (Pelatihan Institusional)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			96	72	75	100.8	172.8		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	09	Pengadaan Peralatan Perhotelan ,dan Aneka Kejuruan UPT-LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			1	0	0	1.05	1.05		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	10	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Dumai (Pelatihan Berbasis Masyarakat)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)		80	80	140	175	84	304		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	11	Revitalisasi Workshop Teknologi Mekanik	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			1	1	100	1.05	2.05		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	12	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja pada UPT LK Dumai (Pelatihan Teknisi Pabrik Kelapa Sawit)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)				0		0	0		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	13	Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja (Las dan Reklame)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			1	0	0	1.05	1.05		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	14	Pelatihan Kompetensi Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			1	0	0	1.05	1.05		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	15	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Berbasis Kompetensi)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)				0		0	0		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	16	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Dumai (Pelatihan Berbasis Kompetensi)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)		96	96	96	100	100.8	292.8		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	
1	14	15	17	Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)				0		0	0		Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab											
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)												
1					2					3					4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12		
1	14	15	18		Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bengkalis	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	19		Pelatihan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Meranti	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	20		Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	21		Pengadaan Jurusan Prosessing, Tata Boga, dan Aneka Kejuruan UPT LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	22		Rehabilitasi/Perbaikan Gedung Perhotelan, Tata Niaga dan Aneka KejuruanUPT LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	23		Pembuatan Pagar di UPT LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	24		Training Need Analysis (TNA) di UPT LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	25		Bimtek Penyuluhan Modul Berbasis Kompetensi di UPT LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	26		Penataan dan Servis Peralatan/Mesin-mesin di Workshop Teknologi Mekanik UPT-LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			
1	14	15	27		Pembuatan Rumah Dinas Type 70 dan 50 pada UPT-LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0				0	0			Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab									
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)										
1					2					3					4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	14	15	28	Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPT-LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan								
1	14	15	29	Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan di UPT-LK Pekanbaru	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan								
1	14	15	30	Pembangunan/Pembuatan Jalan di Lingkungan UPT-LK Rohul	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan								
1	14	15	31	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja pada UPT-LK Rohul (Pelatihan Institusional)	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)			48		48	48	100	50.4	146.4		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan								
1	14	15	32	Pelatihan Kompetensi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (org)					0			0	0		Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan								
1	21			KETAHANAN PANGAN																				
1	21			Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH	2.00%		2.00%		2.00%			0.02	0.02	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan								
1	21			Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	95		88.89		0	0	0	95	95	100	Badan Ketahanan Pangan								
1	21			Program Optimalisasi Kerjasama Pembangunan dibidang Perekonomian dengan mewujudkan Kerjasama yang baik, Antara Pemerintah Daerah,	Terlaksananya Pengendalian dan Kebijakan kepala Daerah tentang subsidi Gas, Minyak Solar	2.0%		0.0%		2.0%	0.02	100	0.02	0.02	100	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perlengkapan,								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab									
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)										
1					2					3					4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					Pemerintah Pusat, Swasta dan Masyarakat																			Biro Administrasi Kemasyarakatan
1		21			Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Pemantauan antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dalam Peningkatan Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah	2.0%		0.0%	2.0%	0.02	100	0.02	0.02	100									Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1		21			Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah	Terciptanya Koordinasi dan Pemantauan antara Pemerintah Provinsi, Kab/Kota dalam Peningkatan Pengelolaan BUMD/ Perusahaan Daerah (%)	20 %		0	0	0	0	20 %	20 %	100									Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,Biro Administrasi Pembangunan,Biro umum, Dispenda, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perlengkapan, Dinas Pemuda dan Olahraga
1		21			Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Terlaksananya Koordinasi dan rekomendasi Pemerintah dan swasta dalam pengembangan bidang perekonomian	20 %		20 %	20 %	0.2075	103.75	20 %	20 %	100									Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1		21			Program Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Perekonomian	Tersedianya Data sembilan sektor ekonomi			0	20 %	20 %	100		0	0									Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1		21			Program Optimalisasi Teknologi Informasi	Tersedianya Data sembilan sektor ekonomi	20 %		2.0%	2.0%	0.02	100	20 %	20 %	100									Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	11			PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
1	11	15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kebijakan Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	4 Kab/Kota & 150 Org	1 Perda Pemenuhan Hak Anak dan 120 Org	225 Org	225 Org	100	1 Perda & 4 Kab/Kota	1 Perda & 4 Kab/Kota	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan dan Anak yang terlindungi	134 Kasus & 290 Org	146 Kasus & 580 Org	0 org	0	0	100 Kasus & 175 Org	100 Kasus & 175 Org	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	17	01	Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	Terlayannya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan serta terlaksanannya Rakor P2TP2A	675	146	75	75	100	100	321	47.56	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	17	02	Advokasi PTPPO Kab/ Kota Se-Prov Riau	Jumlah Aparatur yang mendapat sosialisasi dalam pembentukan Gugus Tugas PTPPO	400	0	0	0	0	100	100	25	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	17	03	Monev PP & PLM Kab/Kota se-Prov Riau	Termonitor, evaluasi dan peaporan seluruh kegiatan	7	3	0	0	0	1	4	57.14	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah perempuan yang meningkatkan produktifitas ekonominya	155 Org & 120 Kelompok	720 Org & 1964 Kelompok	488 Org & 120 Kelompok	488 Org & 120 Kelompok	100	120 Org & 120 Kelompok	120 Org & 120 Kelompok	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
															dan Keluarga Berencana
1	11	18	01		Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan (Peningkatan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan bagi Organisasi Perempuan dan kemasyarakatan)	Jumlah keikutsertaan perempuan dalam PHI (lomba UP2K, P2WKSS, GSI)	6 Keg	1 Keg	1 Keg	1	100	1	3	50	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	18	02		Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera (Pelatihan keterampilan bagi perempuan Kepala Rumah Tangga/PEKA)	Jumlah Perempuan Kepala Rumah Tagga yang mendapatkan Pelatihan	315	80	40	40	100	60	180	57.14	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	18	03		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Pelatihan Model Desa Prima)	Jumlah Desa yang menjadi Model percontohan Perempuan Indonesia Maju Mandiri	490	295	48	48	100	20	363	74.08	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	18	04		Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha (Pelatihan Manajemen Usaha Kelompok UP2K se-Provinsi Riau)	Terlaksananya Pelatihan Manajemen Usaha Kelompok UP2K	540	68	80	80	100	0	148	27.41	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	18	05		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan (Monitoring Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga/UP2K)	Jumlah Kelompok UP2K yang Termonitoring dan Evaluasi	2584 Kelompok	1964 Kelompok	120 Kelompok	120 Kelompok	100	120	2204	85.29	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	19			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Tersedianya Kelembagaan PUG dan Anak se-Provinsi Riau	1860 Org	2 SKPD & 1490 Org	1794 Org	1794 Org	100	45 SKPD & 420 Org	45 SKPD & 420 Org	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab		
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12		
1	11	19	01	Monitoring,evaluasi dan Pelaporan (Monitoring dan Evaluasi P2TP2A)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi P2TP2A	12 Kab/Kota	0	12 Kab/Kota	12	100	12	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1	11	19	02	Pelatihan PPRG bagi SKPD Penggerak Se-Provinsi Riau	Jumlah SKPD penggerak yang menerapkan Anggaran yang Responsif Gender	130	0	0	0	45	45	34.62	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
1	11	19	03	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Pekanbaru Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) (Rapat Kerja Teknis Gugus Tugas PTPPO)	Terfasilitasinya pengembangan P2TP2A dan Terlaksananya Rakor PTPPO	30	0	30	30	100	0	30	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	19	04	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (Pertemuan Forum Anak Kab/Kota se-Provinsi Riau)	Terciptanya Wahana Aspirasi Anak untuk berkreasi dan berinovasi dalam pembangunan	100	0	100	100	100	0	100	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	19	05	Fasilitasi Pelaksanaan PUG (Fasilitasi Program dan Pelaksanaan PUG di Provinsi Riau)	Jumlah SKPD yang mendapatkan Fasilitasi PUG	720	0	360	360	100	0	360	50	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	19	06	Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender Bagi Focal Point SKPD	Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Anggaran Responsif Gender bagi focal point	50	0	50	50	100	0	50	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	19	07	Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak	Tersedianya Data Terpilah Gender dan Anak	2	0	0	0	0	1	1	50	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11	19	08	Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak	Jumlah Anak yang terekplorasi kratifitas dan kemampuannya	5030	1000	420	420	100	575	1995	39.66	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	11					2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A	N/A	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11					4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	11					1 dokumen	1 dokumen	100		0	0	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	12											
1	12	15										Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	12	15	01						2000	3500	28	BPPPAKB
1	12	15	02						1000	8700	74.36	BPPPAKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab				
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	12	15	03		Pelatihan PLKB / Capacity Building	Jumlah PLKB yang Mendapat Pelatihan	493		100	40	40	100	80	220	44.62	BPPPAKB
1	12	15	04		Sosialisasi Alat kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur	Jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapat Sosialisasi	1200		200	200	200	100	275	675	56.25	BPPPAKB
1	12	15	05		Pelatihan Komunikasi Inter Personal (KIP)/Konseling Dengan Menggunakan ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan) Bagi Bidan Klinik KB	Jumlah Bidan Klinik Desa Yang memiliki Sertifikasi dan Mendapatkan ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)	400		40	40	40	100	80	160	40	BPPPAKB
1	12	16			Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah Remaja yang mendapatkan advokasi dan TOT kebijakan Program PKBR										Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	12	16	01		Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi remaja (TOT Kebijakan Pogram PKBR dalam rangka mewujudkan Generasi Berencana (Gen Re)	Terlaksananya TOT kebijakan Program PKBR dalam rangka Mewujudkan Generasi Berencana (GenRe)	616		400	0	0	0	60	460	74.68	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	12	18			Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya Pelayanan Akseptor KB baru Khususnya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)										Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	12	18	01		Pelatihan komunikasi Interpersonal / Konseling dengan Menggunakan ABPK (Alat Bantu Pengambilan Keputusan)	Jumlah Bidan Desa yang mendapat Pelatihan dn mendapatkan ABPK (Alat Bantu Pengambil Keputusan)	80		40	40	40	100	0	80	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)				Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
												Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	12	18	02	Pelayanan KB Medis Operasi	Terlaksananya pelayanan KB medis	200		0	200	200	100	0	200	100	0	200	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
1	12	18	03	Orientasi Masyarakat Peduli KB	Jumlah Masyarakat Peduli KB yang difasilitasi	470		100	0	0	0	110	210	44.68	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1	12	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Tersedianya pusat pelayanan informasi dan konseling Remaja dan Mahasiswa (klpk) menjadi 411 PIK	40 Org & 36 PIK		400 Org & 40 PIK	0	0	0	40 Org & 36 PIK	40 Org & 36 PIK	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1	12	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya Ibu rumah tangga, Remaja dan Kelompok Khusus terhadap penanggulangan Narkoba	200 Org		0	620 Org	620 Org	100	100 Org	100 Org	100	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1	12	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS (Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS bagi Kelompok Khusus)	Jumlah Kelompok Khusus yang mendapatkan Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	820		120	220	220	100	132	472	57.56	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana			
1	07			PERHUBUNGAN														
1	07	15		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkoordinasi baik	100%		30%	30%	30%	100	40%	40%	100	Dinas Perhubungan			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1 07 15 01	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana jembatan timbang	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas jembatan timbang agar berfungsi optimal	100	0	0%	0	0	40%	40%	40%	Dinas Perhubungan
1 07 15 02	Pemeliharaan/Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan	Terpeliharanya prasarana dan fasilitas pelabuhan penyeberangan agar berfungsi optimal	100	0	0%	0	0	80%	80%	80%	Dinas Perhubungan
1 07 15 03	Lanjutan Pemeliharaan dan Rekonstruksi Shoulder Bandara Tempuling	Terpenuhinya kondisi fasilitas sisi udara yang memenuhi standar keselamatan	100	0	0%	0	0	66%	66%	66%	Dinas Perhubungan
1 07 15 04	Pemeliharaan fasilitas LLAJ se-Provinsi Riau	Terpenuhinya kondisi perlengkapan jalan sesuai standar sehingga berfungsi optimal	100	0	0%	0	0	20%	20%	20%	Dinas Perhubungan
1 07 15 05	Pengadaan peralatan pendukung operasional jembatan timbang	Terpenuhinya fasilitas penunjang operasional jembatan timbang sehingga dapat berfungsi secara optimal	100	0	0%	0	0	75%	75%	75%	Dinas Perhubungan
1 07 15 06	Pemeliharaan fasilitas sisi udara Bandara Tempuling	Terpeliharanya kondisi fasilitas sisi udara agar berfungsi optimal	100	0	0%	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1 07 15 07	Pemeliharaan fasilitas pelabuhan laut Tanjung Buton	Terpeliharanya kondisi fasilitas laut agar berfungsi optimal	100	0	0%	0	0	50%	50%	50%	Dinas Perhubungan
1 07 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya pelayanan angkutan umum (lintas penyebrangan)	5	3	3	3.1125	103.75	3	3	100	Dinas Perhubungan
1 07 17 01	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan umum teladan	Terpilihnya awak kendaraan angkutan umum teladan dan meningkatnya ketertiban lalaj	100	0	0%	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1 07 17 02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan angkutan lebaran, natal dan Tahun Baru	Terkoordinirnya pelayanan angkutan lebaran, natal dan tahun baru dengan baik	100	0	0%	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	07	18		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan (simpul)	23 Simpul dan 66 Penunjang		11 Simpul dan 66 Penunjang	11 Simpul dan 66 Penunjang	11 Simpul dan 66 Penunjang	100	14 Simpul dan 66 Penunjang	14 Simpul dan 66 Penunjang	100	Dinas Perhubungan
1	07	18	01	Pembangunan Halte Trans Metro	Tersedianya fasilitas penunjang pengguna jasa TransMetro	100		0	0%	0	0	30.00%	30.00%	30.00%	Dinas Perhubungan
1	07	18	02	Pengadaan dan Pemasangan NDB termasuk Flight Commissioning di Bandara Tempuling	Terpenuhinya fasilitas keselamatan penerbangan sesuai ketentuan	100		0	0%	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Terlaksananya Pengendalian keamanan lalu lintas (unit)	7.700 rambu jalan 500 rambu sungai 200.000 m marka jalan 2900 m guadrail, 40 warning light 200 LPJU		1 307 rambu jalan 152 rambu sungai	1700 rambu jalan 500 delineator 12000m marka jalan	1700 rambu jalan 500 delineator 12000m marka jalan	100	2500 rambu jalan 500 rambu sungai 24000 m marka jalan 500 m guadrail, 10 warning light 50 LPJU	2500 rambu jalan 500 rambu sungai 24000 m marka jalan 500 m guadrail, 10 warning light 50 LPJU	100	Dinas Perhubungan
1	07		01	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Terjaminnya keselamatan pengguna jalan	100		0	0%	0	0	12%	12%	12%	Dishub
1	07		02	Pembuatan Marka Jalan Provinsi Riau	Terjaminnya keselamatan pengguna jalan	100		0	0%	0	0	24%	24%	24%	Dishub
1	07		03	Pengadaan Delieator Jalan	Terjaminnya keselamatan pengguna jalan	100		0	0%	0	0	20%	20%	20%	Dishub

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	07		04	Pengadaan LPJU Tenaga Surya	Terjaminnya keselamatan pengguna jalan	100	0	0%	0	0	33%	33%	Dishub
1	07		05	Pengadaan dan pemasangan RPPJ	Terpandunya arah perjalanan pengguna jalan	100	0	0%	0	0	14%	14%	Dishub
1	07	20		Program peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas (unit)	400	894	750	750	100	650	650	Dinas Perhubungan
1	07	20	01	Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor	100	0	0%	0	0	72%	72%	Dinas Perhubungan
1	07	21		Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Terpenuhnya jumlah simpul pelayanan perhubungan yang di fasilitasi dan di bina (simpul)	34	33	33	34.2375	103.75	33	33	Dinas Perhubungan
1	07	21	01	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Bandara Khusus Helipad dan KKOP	Terpenuhnya standar keselamatan penerbangan di Bandara Khusus dan KKOP	100	0	0	0	0	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	02	Pembinaan dan pengawasan fasilitas pelabuhan laut	Termonitornya kondisi fasilitas pelabuhan laut di Provinsi Riau	100	0	0	0	0	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	03	Pembinaan dan pengawasan operasional jembatan timbang	Terlaksananya pengawasan melekat kegiatan ops. di jembatan timbang	100	0	0	0	0	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	04	Dukungan kegiatan pameran	Terpublikasinya informasi Dinas Perhubungan melalui kegiatan Expo	100	0	0	0	0	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	05	Dukungan kegiatan pelayanan forum LLAJ	Terkordinasinya stakeholder di Bidang LLAJ di Provinsi Riau	100	0	0	0	0	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	06	Dukungan kegiatan kehumasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau	Terpublikasinya kinerja sektor perhubungan kepada masyarakat luas	100	0	0	0	0	100%	100%	Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	07	21	07	Pembinaan dan pengawasan perusahaan penunjang angkutan laut	Terbinanya kinerja jasa usaha pelayaran dengan baik	100		0	0	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	08	Penyusunan DED Pembangunan Pelabuhan Pekanbaru	Tersusunnya dokumen studi Relokasi Pelabuhan Laut Pekanbaru Terminal Tenayan	100		0	0	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	21	09	Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Pelayaran	Terawasinya keselamatan pelayaran di wilayah Provinsi Riau	100		0	0	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	15		Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya dokumen pengendalian prasarana dan fasilitas fisik perhubungan	N/A		0	2 dokumen 1 lokasi	2 dokumen 1 lokasi	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Perhubungan
1	07	15	01	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan (Rakornis)	Tersusunnya program pembangunan secara terpadu di Provinsi Riau	100		0	0%	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	15	02	Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan	Terjaminnya efektifitas pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai kontrak pekerjaan	100		0	0%	0	0	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
1	07	19		Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Tersedianya rambu-rambu dan marka jalan	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perhubungan
1	25			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA											
1	25	19		Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Jumlah desa / SKPD Pemerintah Provinsi Riau yang terkoneksi Jaringan Komunikasi dan informatika	38 desa/ 54 SKPD		1.014 desa/ 38 SKPD	0	0	0	38 desa/ 52 SKPD	38 desa/ 52 SKPD	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab				
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	25	15			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase layanan pengembangan komunikasi dan informasi	50		32.27	35.82	33.480125	93.47	39.36	39.36	100	Dinas Komunikasi dan Informatika,Badan Penelitian dan Pengembangan,Biro Hubungan Masyarakat,Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah,badan penghubung
1	25	20			Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/ jumlah aplikasi yang terintegrasi	10 aplikasi		3 aplikasi	2 aplikasi	2 aplikasi	100.00	2 aplikasi/ 5 aplikasi	2 aplikasi/ 5 aplikasi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	25				Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah ketersediaan layanan informasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	56		41	44	42.5375	96.68	47	47	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	25	18			Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Jumlah kerjasama dengan media massa			0	0	0	0		0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat KORPRI
1	25	23			Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Prosentase jasa titipan dan provider yang mematuhi peraturan	100 %		0.1	0	0	0	20 %	20 %	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
1	25				Program Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informatika	3523 orang		415600 orang	1191 orang	1191 orang	100	2566 orang	2566 orang	100	Dinas Komunikasi dan Informatika,Biro Hubungan Masyarakat,Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	19			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI										
1	19	25	01	Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah generasi muda, masyarakat dan forum yang memperoleh fasilitasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan	550 org, 2 Forum	500 Generasi Muda/ Masyarakat 1 Forum	300 org, 2 Forum	300 org, 2 Forum	100	400 org, 2 Forum	400 org, 2 Forum	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan, Biro Administrasi kemasyarakatan
1	19	26	02	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Berkurangnya Potensi konflik dan aksi unjuk rasa dikalangan masyarakat	590 org, 130 Potensi konflik , 170 aksi	150 Potensi konflik , 190 aksi	N/A	N/A	N/A	450 org, 145 Potensi konflik, 185 aksi	450 org, 145 Potensi konflik, 185 aksi	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	19	27	03	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota.	75% Pilgub & Pilkada Kab/Kota 1200 org	Pemilihan Legislatif 2009 68,17 % Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 65,67 % Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Walikota/ wakil walikota 60,20% 1200 org	75% Pilpres & pileg 385 org	75% Pilpres & pileg 385 org	100	75% pilkada Kab/Kota 400 org	75% pilkada Kab/Kota 400 org	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	19	28		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi	Jumlah Fasilitas Forum Ketahanan Ekonomi dalam cakupan pemantauan ketersediaan kebutuhan sembako di daerah	2 Forum 12 Kab/Kota			2 Forum 12 Kab/Kota	2 Forum 12 Kab/Kota	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	19	29		Program Fasilitas Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	Jumlah Ormas,LSM dan LNL yang terdaftar dan memiliki SKT serta Fasilitas Forum Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	15 ormas 7 LSM 1 Forum		353 ormas 229 LSM dan 12 LNL 1 Forum	10 ormas 5 LSM 1 Forum	10 ormas 5 LSM 1 Forum	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	19	17		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat/ Generasi Muda yang memahami tentang nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan			230 org	N/A	N/A	N/A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	19	18		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat/ Generasi Muda yang memahami tentang nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan			230 org	N/A	N/A	N/A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	19	21		Program pendidikan politik masyarakat	Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu , Pilkada Provinsi dan Kabupaten/Kota.			1200 org	N/A	N/A	N/A	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN											
1	20	37		Program Penataan Kelembagaan	Prosentase SKPD yang sesuai dengan visi dan misi, kebutuhan, potensi dan kemampuan daerah	90%		20%	40%	0.4	100	0.6	0.6	0.67	Biro Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	20	39		2	3	4		5		6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20	39		Program Reformasi Birokrasi	Prosentase SKPD yang melaksanakan area perubahan Reformasi Birokrasi	90%		20%		40%	0.4	100	0.6	0.6	0.67	Biro Organisasi
1	20	38		Program Penataan Tatalaksana	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP)	90%		8%		15%	0.15	100	0.3	0.3	0.33	Biro Organisasi
1	20			Program Pelayanan Publik	Prosentase Standar Pelayanan Publik (SPP)	90%		40%		50%	0.5	100	0.6	0.6	0.67	Biro Organisasi
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah SKPD yang melaksanakan pembinaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	43	SKPD	43		43 SKPD	43 SKPD	100	43 SKPD	43	1	Biro Organisasi
1	20				Persentase peningkatan sistem pengawasan internal secara berkala (reguler) yang dilaksanakan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	100.0%		20.0%		20.0%	19%	95	40%	40%	40%	Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Biro Perlengkapan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20	27		Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	2.0%		70.0%		76.0%	0.73	95.56	82%	82%	100%	Inspektorat
1	20	02		Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	2%		N/A		100%	1	100	100%	100%	100%	Biro Administrasi Pembangunan
1	20			Program Pelayanan Umum	Persentase terselenggaranya pelayanan Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	100%		N/A		100%	1	100	100%	100%	100%	Biro Umum

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Peraturan Perundang - undangan yang ditata	40%		0%	0%	0	0	15.0%	15.0%	37.50	Biro Umum
1	20	34		Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase penguatan kerjasama antara Pemerintah	40%		0%	10%	0.1	100	15.0%	15.0%	37.50	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Biro Hukum, Sekretariat KORPRI
1	20				Terlaksananya Pengendalian dan Kebijakan kepala Daerah tentang subsidi Gas, Minyak Solar	20%		0%	0%	0	0	20.0%	20.0%	100%	Biro Hukum,Badan Penghubung
1	20	24		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian masalah Hukum yang dihadapi Masyarakat	40%		0%	10%	0.1	100	15.0%	15.0%	37.5	Biro Organisasi dan tata laksana, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1	20	40		Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	12 Kab/Kota		12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100	Biro Hukum
1	20			Program Pengadaan Tanah Pemerintah Provinsi Riau	Tersedianya lokasi kawasan (bisnis, hijau dan lainnya)	N/A		0	3 kawasan	3 kawasan	100	N/A	N/A	N/A	Biro Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1	20			Program Pengelolaan Pemerintahan yang Baik	Tersedianya dokumen kapasitas pemerintahan Daerah	N/A		0	2 dokumen	2 dokumen	100	N/A	N/A	N/A	Biro Tata Pemerintahan
1	20			Program Percepatan Implementasi Otonomi Daerah	Tersedianya dokumen implementasi otonomi daerah	N/A		0	3 dokumen	3 dokumen	100	N/A	N/A	N/A	Biro Pemerintahan Tata
1	20	16		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Rapat / pertemuan yang di fasilitasi oleh Badan Penghubung	12 kali, 0 orang, 200 buku		0 kali, 0 orang, 0 buku	11 kali, 150 orang, 0 buku	11 kali, 150 orang, 0 buku	100	12 kali, 0 orang, 200 buku	12 kali, 0 orang, 200 buku	100	Biro Pemerintahan Tata

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1				2		3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20			Program pembinaan mental dan akhlak remaja masyarakat Riau di JABODETABEK	Terlaksananya kegiatan sosial	N/A		0	1 kali	1 kali	100	N/A	N/A	N/A			Biro Umum, Badan Penghubung, Biro Tata Pemerintahan
1	20	17		Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya fasilitasi masyarakat dan PEMDA di JAKARTA	N/A		0	7 Kegiatan	7 Kegiatan	100	N/A	N/A	N/A			Badan Penghubung
1	20	44		Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pejabat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase terfasilitasinya pelayanan kedinasan KDH dan WKDH dan Legislatif	100%		100%	100%	100%	100	100%	100%	100			Badan Penghubung
1	20				Persentase rapat dan pertemuan yang dihadiri oleh KDH dan WKDH	100%		N/A	100%	100%	100	100%	100%	100			Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1	20	35		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	100%		N/A	0.76	0.76	100	0.82	0.82	100			Biro Umum
1	20	42		Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi	Persentase terfasilitasinya aspek pertanahan dan wilayah administrasi	100%		N/A	0.6	0.6	100	70%	70%	100			Biro Pemerintahan, Biro Administrasi Pemerintahan Umum
1	20	43		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan serta Toponimi	Tersusunnya grand design penataan pemekaran, pembakuan nama rupa bumi dan pelayanan umum Pemerintahan	grand design kec. 4 kab/kota, rupa bumi 4 kab/kota, pelayanan umum Pemerintahan 12 Kab/Kota		N/A	rupa bumi 4 kab/kota	rupa bumi 4 kab/kota	100	grand design kec. 4 kab/kota, grand design kab.12 kab/kota, rupa bumi 4 kab/kota, pelayanan umum Pemerintahan 12 Kab/Kota	grand design kec. 4 kab/kota, grand design kab.12 kab/kota, rupa bumi 4 kab/kota, pelayanan umum Pemerintahan 12 Kab/Kota	100			Biro Administrasi Pemerintahan Umum

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
12033	Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil Penelitian dan Pengembangan	24 kali monitoring dan 2 laporan		N/A	24 kl monitoring & 2 laporan	24 kl monitoring & 2 laporan	100	24 kl monitoring & 2 laporan	24 kl monitoring & 2 laporan	100	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
12049	Program Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah	Terbentuknya sistem informasi dan pengembangan hasil kelitbangan dan potensi keunggulan daerah	5 rekomendasi		N/A	0	0	0	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
120	Program Peningkatan Sumber daya Pengelolaan Bank Data	Tersedia dan meningkatnya sumber daya pengelolaan bank data	10 orang		N/A	0	0	0	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
12031	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah rekomendasi yang dapat disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau	19 rekomendasi		75 rekomendasi	0	0	0	9 rekomendasi	9 rekomendasi	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
12032	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSIDa)	Jumlah peningkatan kerjasama dibanding angka sebelumnya	3 rekomendasi		2 rekomendasi	0	0	0	5 rekomendasi	5 rekomendasi	100	Badan Penelitian dan Pengembangan
120	Program pemetaan penelitian dan pengembangan	Jumlah rekomendasi yang dapat disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau	0		69 dokumen	29 dokumen	29 dokumen	100	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
120	Program peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan	0		38 dokumen	39 dokumen	39 dokumen	100	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
120	Program koordinasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Terlaksananya koordinasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	0		7 Rekomendasi	11 rekomendasi	11 rekomendasi	100	0	0	0	Badan Penelitian dan Pengembangan
12016	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya dokumen koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi perencanaan kerjasama pembangunan	19 dokumen		-	8 dokumen	8 dokumen	100	13 dokumen	13 dokumen	100	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPd Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20			Identifikasi Data Perencanaan Kerjasama Kawasan Perbatasan	Data dan Informasi Perencanaan Kerjasama Kawasan	1 Keg						1 Keg		19.44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1	20			Kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dalam rangka pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan	Jumlah MOU yang dihasilkan	2 Keg						1 Keg		0.21	Badan Perencanaan Daerah,Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1	20			kerjasama dengan pers dan media dalam pembentukan garda perbatasan	Jumlah MOU yang dihasilkan	2 Keg						1 Keg		0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1	20	15		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Jumlah Penyelesaian Produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah	27 Perda		13 Perda	23 Perda	23 Perda	100	24 Perda	24 Perda	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Badan Pengelola Perbatasan Daerah
1	20			Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang dilaksanakan	100%		60%	68%	0.68	100	0.76	0.76	100	Sekretariat DPRD
1	20			Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan yang dibuat	4 SOP		1 SOP	2 SOP	2 SOP	100	2 SOP	2 SOP	100	Inspektorat
1	20	23		Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Persentase Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1		0.7	0.76	0.76	100	0.82	0.82	100	Inspektorat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab				
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	20	46			Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Peningkatan IPK	6		N/A	4	4	100	4.5	4.5	100	Inspektorat
1	20	18			Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota (% jumlah kab/kota yang memperoleh opini WTP)	100		90	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20				Program Peningkatan Sistem, Akuntansi dan Pertanggungjawaban	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kab/Kota yang akuntabel	100		100	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	20				Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina	12		0	12	12	100	12	12	100	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	21			Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Persentase peningkatan kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana	12		0	6	6	100	5	5	100	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	47			Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan	Meningkatnya Pendidikan dan Keagamaan di Lingkungan Masyarakat Provinsi Riau	2 Kegiatan , 3150 orang, 12 kali, 2 kegiatan		0	2957 orang, 5 kali, 3 Kegiatan	2957 orang, 5 kali, 3 Kegiatan	100	2 Kebijakan, 3000 orang, 11 kali, 2 kegiatan	2 Kebijakan, 3000 orang, 11 kali, 2 kegiatan	100	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20	48			Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama	Jumlah penerima manfaat dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama (orang)	1425		0	1497	1497	100	1425	1425	100	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20				Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Agama	Jumlah penerima manfaat peningkatan kualitas pendidikan dan agama (orang dan instansi)	3100 orang 12 Instansi		0	3000 orang 12 Instansi	3000 orang 12 Instansi	100	3000 orang 12 Instansi	3000 orang 12 Instansi	100	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
1	20				Program Bantuan Pembinaan dan Peningkatan SDM	Jumlah penerima manfaat pembinaan dan peningkatan SDM	4 Paket		0	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	4 Paket	100	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakvat

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20			Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase sosialisasi dan penegakan peraturan daerah (6 Perda dan 24 kali/tahun)	100%		100%	100%	1	100	1	1	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100%		100%	100%	1	100	1	1	100	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan bangsa dan Politik, dan Pemberdayaan Masyarakat
1	20	16		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (jumlah patroli wilayah terhadap rawan gangguan sebanyak 48 kali dan Jumlah gangguan trantibum yang ditanggapi oleh tim reaksi cepat satpol pp sebanyak 24 kali dalam 1 tahun)	100%		100%	100%	1	100	1	1	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penegak Hukum (Perda)	Persentase aset yang diawasi dan tertibkan sebanyak 20% dalam 1 tahun	100%		NA	100%	1	100	1	1	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	23		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum	100%		100%	100%	1	100	1	1	100	Satuan Polisi Pamong Praja
1	20	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	meningkatkan jumlah pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di Provinsi Riau	10 kali		0	10 kali	10 kali	100	10 kali	10 kali	100	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab			
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)				
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12			
1	20	19		Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Meningkatnya peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	374		NA	NA	NA	424	424	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	20			Program Fasilitas Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung	Jumlah Masyarakat / mahasiswa Riau yang difasilitasi dalam satu tahun Anggaran	3283 orang, 27 kali		0 orang, 0 kali	5 orang, 22 kali	5 orang, 22 kali	100	1900 orang, 21 kali	1900 orang, 21 kali	100	Badan Penghubung
1	20			Program Peningkatan Pelayanan Dan Koordinasi Pemerintah Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kebudayaan di anjungan Riau yang dipelihara (Rumah)	4		NA	0	0	0	4	4	100	Badan Penghubung
1	20			Program Pengembangan Kerjasama Daerah	Terlaksananya kerjasama antar Daerah	N/A		0	1 Dokumen	1 Dokumen	100	N/A	N/A	N/A	Badan Penghubung
1	20			Program pengembangan Konservasi Budaya tidak benda Anjungan Riau TMII (UNESCO)	Terlaksananya pagelaran seni budaya di Jakarta	N/A		0	3 kegiatan	3 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Badan Penghubung
1	20	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengelolaan Fasilitas Budaya Anjungan Riau	7 area, 4 unit, 170 orang		0 area, 0 unit, 0 orang	0 area, 0 unit, 0 orang	0 area, 0 unit, 0 orang	0	8 area, 5 unit, 140 orang	8 area, 5 unit, 140 orang	100	Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif ,Badan Penghubung
1	20	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis budaya yang dipergelarkan	29 orang, 31 kali		0 orang, 0 kali	0 orang, 0 kali	0 orang, 0 kali	0	29 orang, 27 kali	29 orang, 27 kali	100	Dinas Pariwisata dan ekonomi Kreatif , Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penghubung
					Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 12 hari kerja setahun	901		300	633	633	100	844	844	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20			Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI	Terwujudnya Pembinaan Organisasi KORPRI diseluruh kab/kota se-Provinsi Riau	2000 PNS		NA	0	0	0	500 PNS	500 PNS	100	Sekretariat KORPRI

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	20			Program Pembinaan Jasmani dan Rohani Anggota KORPRI	Terwujudnya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani anggota KORPRI melalui lembaga dibawah KORPRI Prov. Riau	5 lembaga		NA	0	0	0	2 lembaga	2 lembaga	100	Sekretariat KORPRI
1	20			Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum	Meningkatnya Jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Advokat	2932 Orang		NA	0	0	0	733 orang	733 orang	100	Sekretariat KORPRI
1	20			Program Pengembangan Motivasi dan Informasi	Meningkatnya Jumlah anggota yang mengikuti sosialisasi dan asistensi	520 orang		NA	0	0	0	130 orang	130 orang	100	Sekretariat KORPRI
1	20			Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama	Meningkatnya jumlah usaha - usaha bisnis yang di kelola KORPRI atau lembaga lain dibawah KORPRI	4 usaha bisnis		1 usaha bisnis	1 usaha bisnis	1 usaha bisnis	100	1 usaha bisnis	1 usaha bisnis	100	Sekretariat KORPRI
1	20	30		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dan Masyarakat tentang Aturan Hukum	0.4		0	0.1	0.1	100	0.15	0.15	100	Biro Organisasi dan Tata Laksana, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretariat KORPRI, Biro Hukum dan Ham
1	20			Program fasilitasi pindah/ purna tugas PNS	Terlaksananya fasilitasi pindah/purna tugas PNS			0	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	28		Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan (orang)	441		105	240	240	100	391	391	100	Biro Administrasi Pembangunan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab				
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	20	52			Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Jumlah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar	0.95		0.75	0.75	0.75	100	0.8	0.8	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20	51			Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi	0.88		0.79	0.8	0.8	100	0.82	0.82	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
1	20				Program Peningkatan Ketatalaksanaan	Jumlah layanan kinerja yang dapat disosialisasikan	12 kab/kota		12 kab/kota	12 kab/kota	12 kab/kota	100	12 kab/kota	12 kab/kota	100	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	20				Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang tersedia	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	20				Program Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama yang dapat dikembangkan stakeholders terkait	0.75		0	0.25	0.25	100	0.5	0.5	100	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	20				Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok masyarakat dan lembaga penyiaran yang terlibat	12 kab/kota		12 kab/kota	12 kab/kota	12 kab/kota	100	12 kab/kota	12 kab/kota	100	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
1	22				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
1	22	18			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Tingkat kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Pemerintah Desa yg Akuntabel (%))	3		5	3	3	100	3	3	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	22	15			Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Tingkat kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat desa (%)	3		5	3	3	100	3	3	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab				
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)					
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12				
1	22	17			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Rasio tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan (%)	3		5	3	3	100	3	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	
1	22	16			Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan lembaga ekonomi desa	3		5	3	3	100	3	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa	
1	22	21	05		Program pengembangan komunitas perumahan pedesaan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pengembangan resetlemen di kabupaten/kota	6%		0	2%	0.02	100	0.02	0.02	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	22				Program pembangunan Infrastruktur jalan perdesaan	Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan pembangunan dan pengembangan jalan lingkungan desa di kabupaten/kota	1.033		0	2%	0.02	100	0.02	0.02	100	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa
1	22	17			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Terlaksananya resetlemen pemukiman	N/A		0	3 kegiatan	3 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	13			SOSIAL											
1	13	15		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya kualitas hidup Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil PMKS lainnya (KK) Pembinaan Pendamping, Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (orang) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (unit)	649/2628/4		391/1750/1	0/2097/1	0/2097/1	100	649/2458/1	649/2458/1	100	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	15	01	Kesetiakawanan Sosial Nasional EXPO Dan HKSNI Provinsi	Terlaksananya kegiatan ksn expo dan hksn provinsi(orang)	5,907				1025		1180	2205	37.33	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	15	02	Pelayanan Dan Penyantunan Bagi Perintis Dan Janda Perintis Kemerdekaan	Tercapainya penyantunan janda perintis kemerdekaan dan veteran (orang)	1,692				4		422	426	25.18	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	15	03	Pemugaran Dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Tercapainya pemeliharaan makam TMP Dan Taman makam bahagia (Kegiatan)	5				1		1	2	40.00	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	15	04	Seminar Kepahlawanan Provinsi Riau	Tercapainya Peserta seminar Kepahlawanan	620				0		190	190	30.65	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	15	05	Pembinaan Dan Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan	Tercapainya AKRS, ramah tamah, dan HAWAN, serta Sarasehan (orang)	5,351				918		1043	1961	36.65	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan
1	13	15	06	Peningkatan Sarana Pemukiman / Rumah Layak Huni Warga KAT di Perbatasan	Terlaksananya pembangunan 36 unit rumah warga KAT	36				0		36	36	100.00	Dinas Sosial, Biro Administrasi Kemasyarakatan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang)	2662		432	1163	448.2	38.53826311	1526	1526	100	Dinas Sosial
1	13	16	01	Pemberdayaan Para Penyandang Cacat Dan Eks Trauma	Tercapainya pemberdayaan orang dengan kecacatan (ODK) (orang)	159				23		25	48	30.19	Dinas Sosial
1	13	16	02	Pengiriman Penyandang Cacat Ke Balai Pelatihan Keterampilan Dan Pembuatan Protehse Dan Orthese	Tercapainya bantuan bagi ODK ke balai Pelatihan (orang)	126				16		20	36	28.57	Dinas Sosial
1	13	16	03	Peningkatan Pelayanan Sosial Anak	Tercapainya pelayanan anak dalam lembaga kesejahteraan sosial (anak)	1,250				150		200	350	28.00	Dinas Sosial
1	13	16	04	Pemantapan Pendamping Program Kesejahteraan Sosial anak dan Lanjut Usia	Meningkatnya kemampuan pendamping dalam bantuan lanjut usia (orang)	260				30		53	83	31.92	Dinas Sosial
1	13	16	05	Bantuan Kelangsungan Hidup ODK Berat	Tercapainya bantuan ODK berat (orang)	820				50		100	150	18.29	Dinas Sosial
1	13	16	06	Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti	Tercapainya pelaksanaan pelayanan lanjut usia luar panti (orang)	3,478				500		639	1139	32.75	Dinas Sosial
1	13	16	07	Pencegahan Penyebaran NAPZA Dan HIV/AIDS	Terlaksananya sosialisasi pencegahan Penyebaran HIV/AIDS (orang)	500				100		400	500	100.00	Dinas Sosial
1	13	16	08	Pelayanan sosial dan fasilitasi kelompok minoritas (waria)	Tersedianya bahan usaha ekonomi produktif bagi kelompok minoritas	80				0		20	20	25.00	Dinas Sosial
1	13	16	09	Pelayanan sosial Tuna Susila dan korban Trafficking	Terlaksananya pelayanan dan tersedianya bahan usaha ekonomi produktif bagi tunasusila dan korban trafficking	40				0		10	10	25.00	Dinas Sosial

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	13	16	10	Peningkatan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas	Meningkatnya taraf hidup penyandang diasabilitas (orang)	500				100		100	200	40.00	Dinas Sosial
1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas penyelenggara kelembagaan kesejahteraan sosial (orang)	1630		736	688	763.6	110.99	1380	1380	100	Dinas Sosial
1	13	21	01	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas TKSM/TKSK (orang)	1,011				211		213	424	41.94	Dinas Sosial
1	13	21	02	Peningkatan Kualitas Pengurus Karang Taruna	Meningkatnya kemampuan pengurus KT (orang)	300				60		84	144	48.00	Dinas Sosial
1	13	21	03	Pelatihan Dan Fasilitasi Tenaga Penyuluh Sosial Swadaya	Tercapainya penyuluhan sosial perbatasan, kampanye sosial, penyuluhan keliling ((orang)	516				96		120	216	41.86	Dinas Sosial
1	13	21	04	Pemberdayaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Tercapainya pemantapan pengurus sosialisasi, monitoring dan Evaluasi(orang)	530				50		170	220	41.51	Dinas Sosial
1	13	21	05	Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	Tercapainya peningkatan kemampuan pengurus WKSBM (orang)	360				72		72	144	40.00	Dinas Sosial
1	13	21	06	Rapat Kerja dan Musyawarah Provinsi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	Terselenggaranya pembentukan IPSM Provinsi riau	120				0		60	60	50.00	Dinas Sosial
1	13	21	07	Pembinaan Untuk 40 Kelompok Usaha Bersama Karang Taruna Kab Pelalawan	Terbentuknya 40 Buah Kelompok Usaha Bersama Karang taruna di Kabu. Pelalawan	204				164		40	204	100.00	Dinas Sosial
1	13	22		Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Terselenggarakannya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial (orang)	2760		1790	3230	1857.125	57.50	2605	2605	100	Dinas Sosial
1	13	22	01	Pelayanan Psikososial Bagi Orang Terlantar Dan Pekerja Migran Yang Diterlantarkan	Tercapainya pelayanan orang terlantar dan pekerja migran yang diterlantarkan (orang)	5,000				1000		1000	2000	40.00	Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	13	22	02	Pemantapan Pelaksana dan Peserta Asuransi Kesejahteraan Sosial	Mantapnya konsolidasi pengurus lembaga dan yayasan dalam pelaksanaan asuransi kesejahteraan sosial (orang)	475				75		75	150	31.58	Dinas Sosial
1	13	22	03	Pelayanan Dan Perlindungan Sosial Bagi Korban Tindak Kekerasan	Tercapainya pelayanan KTK (orang)	420				20		100	120	28.57	Dinas Sosial
1	13	22	04	Pengumpulan Dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	Tercapainya pemantapan PPSDS (orang)	400				50		75	125	31.25	Dinas Sosial
1	13	22	05	Pelayanan Sosial Rumah Perlindungan Dan Trauma Center	Tercapainya pelayanan bagi korban tindak kekerasan (orang)	780				120		120	240	30.77	Dinas Sosial
1	13	23		Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Meningkatnya Pelayanan Sosial di Panti (orang)	230		190	235	197.125	83.88	220	220	100	Dinas Sosial
1	13	23	01	Pelayanan Sosial Bagi Anak Remaja Nakal Eks Korban NAPZA Di Panti	Terbinanya Anak / Remaja Nakal Eks Penyandang Napza melalui UPT. PSMP Tengku Yuk (orang)	290				50		60	110	37.93	Dinas Sosial
1	13	23	02	Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia Terlantar Melalui Panti	Tercapainya pelayanan lanjut usia melalui panti (orang)	420				80		80	160	38.10	Dinas Sosial
1	13	23	03	Pelayanan sosial pengasuhan anak terlantar melalui panti	Tersedianya alokasi kegiatan penyantunan terhadap anak terlantar pada UPT. Panti sosial pengasuhan anak	200				0		50	50	25.00	Dinas Sosial
1	13	24		Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial	Tersedianya Sumber Daya Manusia Kesejahteraan sosial terlatih (orang)	120		0	0	0	0	60	60	100	Dinas Sosial
1	13	24	01	Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial	Tenaga Kesejahteraan Sosial terlatih mengikuti Diklat manajemen pembangunan kesejahteraan sosial	420						60	60	100	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	13	25		Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya koordinasi penanggulangan daerah rawan bencana (%)	95		60	70	70	100	80	80	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	13	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terantisipasinya resiko korban akibat kejadian bencana (%)	80		40	50	50	100	55	55	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
1	13	28		Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	91.25		38.75	52.5	52.5	100	62.5	62.5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	13			Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana (%)	90		45	55	55	100	65	65	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	13	26		Program Peringatan Dini	Terantisipasinya resiko akibat kejadian bencana (%)	90		40	50	50	100	60	60	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	13			Program Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana (%)	75		45	50	50	100	60	60	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	13			Program Perencanaan Umum	Tersedianya dokumen penanggulangan bencana	N/A		0	2 Dokumen	2 Dokumen	100	N/A	N/A	N/A	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	17			KEBUDAYAAN											
1	17			Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	1		0.25	0	0	0	0.55	0.55	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	17	15		Program Pengembangan nilai budaya	Tersedianya informasi dan pelaksanaan workshop tentang kebudayaan melayu	N/A		0	4 kegiatan	4 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	17			Program Pagelaran Seni Budaya Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pagelaran seni budaya daerah	N/A		0	6 kegiatan	6 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	17	19		Program Pelestarian Budaya	Tersedianya informasi, sarana dan prasarana tentang seni budaya melayu Riau	N/A		0	32 kegiatan	32 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	23			STATISTIK											
1	23			Program Pengembangan Data dan Informasi	Jumlah Dokumen	51 Paket		51 Paket	51 Paket	51 Paket	100	51 Paket	51 Paket	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Cipta Karya tata ruang dan Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Sekretaris KORPRI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
															Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Penghubung, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bina Marga, Sekretariat KPID, Dinas Kehutan
1	24			KEARSIPAN											
1	24	15		Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatkan jumlah institusi (Pemerintah dan Swasta) dalam pelaksanaan administrasi kearsipan.	50 Berkas, 8 Spesifikasi, 4 Unit, 5 SKPD, 2 Kategori, 12 Kab/Kota		16.630 Berkas, 8 Spesifikasi, 0 Unit, 5 SKPD, 4 Kategori, 12 Kab/Kota	50 Berkas, 4 Spesifikasi, 2 Unit, 0 SKPD, 0 Kategori, 12 Kab/Kota	50 Berkas, 4 Spesifikasi, 2 Unit, 0 SKPD, 0 Kategori, 12 Kab/Kota	100	50 Berkas, 6 Spesifikasi, 3 Unit, 3 SKPD, 0 Kategori, 0 Kab/Kota	50 Berkas, 6 Spesifikasi, 3 Unit, 3 SKPD, 0 Kategori, 0 Kab/Kota	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
1	24	18		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan.	0 Gedung, 199 Org, 4x Keg, 4 Pedoman, 3		0 Gedung, 162 Org, 3x Keg, 1 Pedoman, 0	0 Gedung, 40 Org, 1x Keg, 0 Pedoman, 0	0 Gedung, 40 Org, 1x Keg, 0 Pedoman, 0 SKPD, 1 Set/unit	100	0 Gedung, 55 Org, 2x Keg, 3 Pedoman, 3 SKPD, 0 Set/unit	0 Gedung, 55 Org, 2x Keg, 3 Pedoman, 3	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab		
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)			
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12		
			SKPD, 3 Set/unit		SKPD, 5 Set/unit	SKPD, 1 Set/unit				SKPD, 0 Set/unit				
1	24	16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Meningkatkan jumlah koleksi arsip di lembaga kearsipan.	4 Sistem, 12 Kab/Kota, 5 Berkas, 0x Keg, 3 Tokoh, 5 SKPD, 3 Jenis	1 Sistem, 12 Kab/Kota, 6 Berkas, 0x Keg, 0 Tokoh, 0 SKPD, 0 Jenis	0 Sistem, 12 Kab/Kota, 0 Berkas, 0x Keg, 0 Tokoh, 2 SKPD, 0 Jenis	100	0 Sistem, 12 Kab/Kota, 0 Berkas, 2x Keg, 0 Tokoh, 3 SKPD, 1 Jenis	0 Sistem, 12 Kab/Kota, 0 Berkas, 2x Keg, 0 Tokoh, 3 SKPD, 1 Jenis	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	
1	24		Program Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kearsipan		Menigkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan.	4x Keg, 0 Jenis	3x Keg, 2 Jenis	1x Keg, 0 Jenis	1x Keg, 0 Jenis	100	1x Keg, 2 Jenis	1x Keg, 2 Jenis	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	24	19	Program Penyusunan dan Pembinaan Dokumentasi		Terwujudnya penyusunan dan pembinaan dokumentasi yang dikelola oleh tenaga profesional dengan dukungan pelayanan dokumentasi yang terstruktur dilingkungan pemerintah Provinsi Riau dengan perangkat yang memenuhi standar dan mengikuti kemajuan TIK;	602 Kali, 15 Org, 20 Instansi Kab/Kota, 12 Kab/Kota, 1000 Dok, 1 Keg, 10 Unit, 100 pcs.	0	300 Kali, 0 Org, 0 Instansi Kab/Kota, 12 Kab/Kota, 0 Dok, 0 Keg, 60 Unit, 100 pcs.	300 Kali, 0 Org, 0 Instansi Kab/Kota, 12 Kab/Kota, 0 Dok, 0 Keg, 60 Unit, 100 pcs.	100	0 Kali, 10 Org, 12 Instansi Kab/Kota, 12 Kab/Kota, 0 Dok, 0 Keg, 0 Unit, 100 pcs.	0 Kali, 10 Org, 12 Instansi Kab/Kota, 12 Kab/Kota, 0 Dok, 0 Keg, 0 Unit, 100 pcs.	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	26			2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	26			PERPUSTAKAAN											
1	26	21		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya budaya gemar membaca dengan dukungan bahan pustaka yang berkualitas dan TIK yang Mutakhir;	0		720000	28655 Eks, 60 Surat Kabar, 1 Laporan, 12 Edisi, 50 Org	28655 Eks, 60 Surat Kabar, 1 Laporan, 12 Edisi, 50 Org	100	0	0	0	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26			Program Penyediaan Infrastruktur TI dan SI Perpustakaan	Terwujudnya Perpustakaan yang modern sebagai pusat pengembangan budaya melayu dengan dukungan TIK dan SI	0		1 paket	1 paket 10 Provinsi'	1 paket 10 Provinsi'	100	0	0	0	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26			Program Pelestarian dan Penyelamatan Literatur Kebudayaan Riau	Terwujudnya Layanan Perpustakaan yang intensive dan sosialisasi perpustakaan dengan konsep promosi yang kreatif	0		12 bulan	12 bulan, 1 Keg	12 bulan, 1 Keg	100	0	0	0	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26			Program Pengembangan Pelayanan Perpustakaan	Terwujudnya pelayanan perpustakaan dalam bentuk bimbingan perpustakaan keliling, stock opname, dan koordinasi antar perpustakaan;	0		0	36 orang, 20 Pos, 83.000 Judul, 720.000 Eks, 3 Laporan	36 orang, 20 Pos, 83.000 Judul, 720.000 Eks, 3 Laporan	100	0	0	0	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
1	26	28		Program Pengembangan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan, Pelayanan, Pelestarian fisik dan Pemanfaatan TIK menuju Perpustakaan bernuansa Melayu	346.675 Pengunjung		234.439 Pengunjung	0	0	0	260.462 Pengunjung	260.462 Pengunjung	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
1	26	29		Program Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan perpustakaan dalam bentuk bimbingan pemakai, layanan perpustakaan keliling, koordinasi dan kerjasama antar perpustakaan, dan gerakan minat baca masyarakat dengan target peningkatan perpustakaan yang terakreditasi dan standar operasional prosedur serta kerjasama dengan lembaga pengembangan perpustakaan;	116 Org, 20 Pos, 4 Keg, 4 Status Organisasi, 3 GPMB, 2 Penelitian, 7 Perpustakaan, 1 SOP, 3 Laporan,		3 keg Monitoring, Inventarisasi Perpus, Nomor Pokok Perpus Kab/Kota	0	0	0	0 Org, 20 Pos, 0 Keg, 0 Status Organisasi, 0 GPMB, 0 Penelitian, 0 Perpustakaan, 0 SOP.	0 Org, 20 Pos, 0 Keg, 0 Status Organisasi, 0 GPMB, 0 Penelitian, 0 Perpustakaan, 0 SOP.	100	Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2												
2	05											
2	05	20										
2	05	20	01									
2	05	20	02									
2	05	20	03									
2	05	20	04									
2	05	20	05									
2	05	20	06									
2	05	20	07									
2	05	20	08									
2	05	20	09									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 05 20 10	Pengembangan bibit ikan unggul				Tercukupinya Induk ikan unggul		1500000	ekor		30	30	100	765000	765030	51.0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 11	Pengadaan sarana dan fasilitas pada stasiun pembinaaan dan pengembangan BBAT di sentra produksi Koto Panjang				Tersedianya Stasiun dan Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar		1	Unit		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 12	Workshop teknis pembenihan ikan air tawar				Terselenggaranya workshop teknis pembenihan ikan air tawar		12	Kab/Kota		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 13	Dukungan peningkatan operasional UPT Pembenihan				Beroperasinya Kegiatan di BBIS Sei Tibun, Dempond Kampar dan BBIP Pulau Rupat		12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 14	Pengadaan benih ikan				Terpenuhi benih ikan yang berkualitas untuk masyarakat		10,000,000	ekor		12000	12000	100	5,100,000	5112000	51.12	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 15	Pengadaan bibit dan Pakan Ikan untuk Masyarakat				Terpenuhi nya Bibit Ikan dan Pakan untuk Masyarakat		100,000	ekor		100,000	173000	173	0	100,000	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 16	Pengadaan ekskavator untuk perikanan budidaya				Tersedianya Ekskavator dan Mobil Operasional		3	unit		3	0	0	3	3	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 17	Pembinaan dan bimbingan teknis pembenihan ikan				Pelaksanaan Workshop Pembenihan Ikan Air Tawar		12	Kab/Kota		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 18	Pembangunan Mess pelatihan pembenihan				Adanya asrama untuk penginapan bagi peserta pelatihan dan magang		1	unit		2	0	0	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 19	Pembangunan Kolam Rakyat				Terlaksananya Pembangunan Kolam Rakyat		12	Kab/Kota		5	5	100	5.25	10.25	85.42	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 20	Pembangunan jalan/jembatan di sentra produksi perikanan				Tersedianya jalan lingkungan di BBIS Sei Tibun		1	unit		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 21	Pengadaan peralatan pembibitan ikan air tawar				Adanya sarana untuk pembibitan ikan bagi kelompok UPR/KPR		15	Klpg		2	2	100	2.1	4.1	27.33	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 05 20 22	Pengadaan Induk Ikan Langka	Tersedianya ikan ekonomis penting	7	jenis		7	0	0	7	7	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 23	Peningkatan Sarana dan Prasarana UPT Pembenihan Ikan	Adanya sarana dan prasarana untuk pembibitan ikan UPT Pembenihan Perikanan	16	unit/ keg		4	4	100	4.2	8.2	51.25	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 24	Pembangunan kolam rakyat untuk mendukung rumah layak huni	Terwujudnya pembangunan kolam di rumah layak huni	1650	kolam		1650	0	0	1650	1650	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 25	Pembangunan Kolam terpal	Terlaksananya pembangunan kolam terpal bagi kelompok	25	Unit		25	0	0	26.25	26.25	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 26	Peningkatan Operasional Excavator dalam mendukung Perikanan Budidaya	Terlaksananya operasional eskavator	12	bulan		12	12	100	12	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 20 27	Pembuatan Perencanaan DED Bangunan di BBIS Sei Tibun	Adanya DED Bangunan di BBIS Sei Tibun	1	dokumen		1	0	0	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
												Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil tangkapan perairan laut (ton)	141900		127415	130312	132193.06	101.44	133209	133209	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 01	Pengelolaan perizinan perikanan di Provinsi Riau	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Perizinan Perikanan Tangkap Kewenangan Provinsi di Kab/Kota	7	Kab/kota		7	7	100	7	7	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 02	Pertemuan FKPPS regional dan pertemuan koordinasi loog book	Kesepakatan Pengelolaan SDI dalam FKPPS dan Log Book	2	Kegiatan		2	2	100	2	2	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 03	Bimbingan teknis manajemen usaha perikanan tangkap	Terwujudnya keterampilan teknis Tenaga pendamping dan Nelayan	20	orang		20	20	100	20	20	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 04	Apresiasi kelembagaan usaha perikanan tangkap	Berkembangnya kemitraan usaha nelayan	12	Kab/kota		12	12	100	12	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPd Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 05 21 05	Peningkatan kapasitas dan operasional pelabuhan perikanan tanjung samak	Terlaksananya kegiatan operasional pelabuhan tanjuingsamak	1	Kegiatan		1	1	100	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 06	Pendaftaran dan penandaan kapal ikan di provinsi Riau	Tersosialisasi Peraturan Gubernur Riau tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan di Kab/Kota, keikutsertaan dalam kegiatan promosi bidang perikanan tangkap baik provinsi dan nasional	12	Kab/kota		12	12	100	12	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 07	Sertifikasi Ankapin III/Atkapin III bagi nelayan penerima Inkamini di Propinsi Riau	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan ANKAPIN III/ATKAPIN III Untuk Nelayan di BP3 Belawan Sumatera Utara	10	orang		10	10	100	10	10	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 08	Pembinaan dan operasional Forum KUB perikanan tangkap	Terwujudnya Forum KUB yang mandiri dan berkualitas secara teknis	10	KUB		10	10	100	10	10	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 09	Sosialisasi dan penyusunan WKOPP Tanjung samak	Dokumen Penyusunan WKOPP Pelabuhan Perikanan Tanjung Samak	1	Dok		1	1	100	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 10	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan (Pengembangan dermaga jati di PPI penagkalan sesai)	Terbangunya fasilitas penunjang dan operasional pelabuhan jati di kota dumai	1	Kegiatan		1	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 11	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Tersedianya sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi kelompok nelayan	5	Paket		5	5	100	5	5	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 12	Pengadaan Mesin Tarik untuk Kelompok Nelayan	Adanya mesin penarik jaring untuk kelompok nelayan	1	Unit		1	1	100	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05 21 13	Pembangunan Kapal Ikan > 30 GT dan alat Penangkap Ikan (DAK)	Terbangunya kapal penangkap ikan dan pengadaan Jaring Gill Net	6	Unit		6	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program /Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 05				Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran hasil Produksi Perikanan		44		39	40	40.4625	101.16	41	41	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	01			Peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur Pemasaran hasil perikanan		7	Unit	1	7	7	100.00	0	7	100.00	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	02			Pengembangan menu ikan, kampanye makan ikan dan aktifitas makan ikan serta sosialisasi sentra pengolahan ikan		1200	orang	400	12	12	100	412	824	68.667	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	03			Pemberdayaan UMKM melalui pengembangan KKMB		392	orang	40	12	12	100	52	104	26.531	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	04			Pengembangan dan pemantapan kemitraan dalam Minapolitan Industri hasil perikanan		1	Kegiatan		1	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	05			Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Kelompok Tani nelayan, KUB, Koperasi, lembaga perekonomian pengolahan hasil perikanan		12	Kab/Kota		12	0	0	12	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	06			Pameran/Bazar tingkat Provinsi dan Nasional, gemar ikan serta etalase pemasaran produk perikanan di Pekanbaru		6	Kali	4	3	1	33.33	1	6	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	07			Revitalisasi pengolahan hasil perikanan (Pasca panen) se Riau		30	orang		30	30	100	0	30	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	08			Pembinaan dan Lomba UMKM pengolahan Hasil Perikanan		24	UMKM	3	12	12	100	8	23	95.83	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	09			Pembangunan sarana pendukung sentra pengolahan		10	Unit	4	2	2	100	4	10	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2 05	10			Pengembangan industrialisasi Ikan Patin di prop Riau		420	orang	24	30	30	100	54	108	25.71	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	05		11	Fasilitasi Pengembangan Nilai Produk Perikanan	Data Ragam Unggulan dan Nilai Tambah Produk Perikanan	420	Paket	24	1	1	100	25	50	11.90	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		12	Pengembangan dan pembinaan unit pengolahan	Terbinanya Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Peningkatan Daya Jual Produk Perikanan yang Aman dan Berkualitas	5	Paket		5	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		13	Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau	lancarnya Operasional LPPMHP	12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		14	Peningakatan sarana dan prasarana pasar ikan hygienis	Tersedianya Bangunan Pasar Hygenis	1	Paket	0	2	1	50	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		15	Bimbingan Teknis bagi petugas LPPMHP	Peningkatan Mutu analis	40	orang		40	40	100	0	40	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		16	Pengadaan sarana dan prasarana Laboratorium	LPPMHP beroperasi dengan baik	1	Paket		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		17	Bimbingan dan akreditasi LPPMHP	Akreditasi Lab	1	dokumen		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		18	Pembuatan dan Penayangan Audio Visual Iklan Masyarakat (Tingkatkan Konsumsi Ikan Keluarga) pada Media TV ONLINE	Tersosialisasinya kegiatan Media TV Online	100	%		8	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05			Program Pegembangan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Ha)	0		10	18	10.375	57.64	0	0	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		01	Penyusunan Dokumen KKLD	Dokumen KKLD Provinsi Riau	1	dokumen		1	0		0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		02	Perlindungan dan pengkayaan sumberdaya ikan perairan umum	Pengkayaan Stock (Restocking) Sumberdaya ikan yang terancam punah di Perairan umum Daratan	7	Kab/kota		2	2	100	0	2	28.57	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	05		03	Identifikasi kawasan lubuk larangan/ikan larangan		7	Kab/kota		7	7	100	0	7	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		04	Rehabilitasi kawasan mangrove di kawasan pesisir		3	Kab/kota		3	3	100	0	3	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		05	Analisis Faktor Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Provinsi Riau		1	dokumen		1	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		06	Kajian Potensi Ikan Patin, Tapah dan Silais		1	dokumen		1	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		07	Kajian kebijakan Pengembangan Ekonomi Berbasis Usaha Perikanan Tangkap dan Strategi Pemberdayaan Nelayan dalam Konteks Sumber Daya Pesisir Secara Terpadu		1	dokumen		1	0	0	0	0	0	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		08	Sosialisasi Pergub 78 Tahun 2012 Tentang Penetapan Suaka Ikan Terubuk		1	Kegiatan		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
										1					
2	05	15		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		50		10	0	0	0	26	36	72	Dinas Perikanan dan Kelautan
			01	Identifikasi Potensi Pencadangan KKP (Kawasan Konservasi Perairan Daerah)		1	Kegiatan	0	0	0	0	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPd Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPd Tahun 2014	Realisasi RKPd Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2				3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	05	15	02	Rehabilitasi Kawasan Ekosistem Mangrove	Terciptanya Kawasan Ekosistem Mangrove Yang Baik		3	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	3	3	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05	15	03	Pelestarian dan Pemanfaatan Jenis Ikan Terancam Punah	Pelestarian dan Pemanfaatan Jenis Ikan Terancam Punah		1	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	1	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05	15	04	Analisa Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Pengelolaan Wilayah Pesisir			7	Kabupaten/Kota	0	0	0	0	7	7	100.00	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05			Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Kualitas SDM bidang perikanan dan kelautan (orang)		0		98	98	101.675	103.75	0	0	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		01	Dukungan penyelenggaraan Pendidikan SUPM internasional Provinsi Riau	Jumlah siswa sekolah yang dilayani dalam proses pendidikan di SUPM		12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		02	Praktek lapang siswa SUPM internasional Dumai	Tersedianya SDM perikanan dan kelautan yang tangguh dan handal		160	siswa		160	160	100	0	160	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		03	Makan dan minum harian siswa SUPM internasional Dumai	Terpenuhinya makan dan minum siswa SUPM		12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		04	Peningkatan sarana dan sarana SUPM Internasional Dumai	Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan SUPM yang memadai		12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		05	Peningkatan sarana dan prasarana UPT pelatihan perikanan	Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana di BAT Rumbai dan BAP Sei Sui Selat Panjang		2	lokasi		2	2	100	0	2	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	05		06	Dukungan pengembangan UPT Pelatihan perikanan	Terlaksananya Operasional di UPT Pelatihan Perikanan dan Kelautan		1	paket		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
20507	Pelatihan hama penyakit ikan air tawar	Terlaksananya Pelatihan Hama Penyakit Ikan Air Tawar	13	orang		13	13	100	0	13	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
20508	Dukungan pengembangan Instalasi pelatihan ikan air tawar	Terlaksananya Operasional di BAT Rumbai	1	paket		1	1	100	0	1	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
20509	Pelatihan budidaya air payau dan air tawar pada UPT Pelatihan	Meningkatkan Keterampilan Petani Budidaya Air Payau dan Air Tawar se Provinsi Riau	30	orang	0	40	30	75	0	30	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
20510	Pelatihan budidaya air payau untuk instruktur padaUPT Pelatihan	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Air Payau	60	orang	55	15	5	33.3333333	0	60	100.00	Dinas Perikanan dan Kelautan
20511	Pelatihan pengolahan hasil perikanan	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	120	orang	15	120	0	0	0	15	12.5	Dinas Perikanan dan Kelautan
20512	Pelatihan pembenihan dan budidaya ikan air tawar	Terlaksananya Pelatihan Pembenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	50	orang	25	15	15	100	0	40	80	Dinas Perikanan dan Kelautan
20513	Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT Riset dan penelitian perikanan dan kelautan	Buku laporan kegiatan UPT riset dan penelitian perikanan	12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
20514	Dukungan pelaksanaan teknis Riset perikanan dan Kelautan	Buku Laporan Hasil Kegiatan Riset dan Penelitian Perikanan dan kelautan	5	laporan		5	5	100	0	5	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
20516	Peningkatan Kapasitas dan Operasional Komisi Penyuluhan Perikanan dan Kelautan	Lancarnya kegiatan komisi penyuluhan perikanan dan kelautan	12	bulan		12	12	100	0	12	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
205	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Meningkatnya Kualitas SDM bidang perikanan dan kelautan (orang)	98		98	0	0	0	98	98	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
205	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Pesisir skala kecil	Tumbuh Kembangnya Koperasi Pesisir	7	kab/kota		7	7	100		7	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3		4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	05		02	Penyusunan Renstra Pesisir Provinsi Riau		1	dok		1	0	0		0	0	
2	05		03	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas		7	kab/ko ta		7	7	100		7	100	
2	05		04	Gelar operasi pengawasan terpadu dan penilaian serta lomba		12	kab/ko ta		7	7	100		7	58.33	
2	05		05	Pengadaan speedboat pengawasan		1	unit		1	1	100		1	100	
2	05		06	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan pengawas		1	paket		1	1	100		1	100	
2	05		07	Pengadaan kendaraan operasional BID Pengawas dan Kelautan		1	unit		1	1	100		1	100	
2	05		08	Pengadaan bahan harian kedai masyarakat pesisir		2	kab/ko ta		2	0	0		0	0	
2	05		09	Pengadaan Peralatan Penunjang Sistem Informasi Geografis Wilayah Pesisir		1	paket		1	1	100		1	100	
2	05			Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		0		10	12	10.375	86.46	0	0	100	Dinas Perikanan dan Kelautan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
								Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
2	05	17		Program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum (%)	20		10	0	0	0	14	14	100	Dinas Perikanan dan Kelautan
2	01			PERTANIAN											
2	01			Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (%) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani										Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan
					- Tanaman Pangan	116.96		115.8	116.03	116.03	100	116.26	116.26	100	
					- Tanaman Hortikultura - Komoditi dan Perkebunan	121.83		120.62	120.86	120.86	100	121.11	121.11	100	
2	01			Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan Ragam Pemasaran Produk Pertanian (komoditi) dan	15		10	11	11	100	12	12	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Peternakan
					Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan petani (unit)	20		20	20	20	100	20	20	100	Dinas Perkebunan
2	01			Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian (%)	70		60	62	62	100	64	64	100	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab	
						Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)		
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12	
												Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan	
		Terwujudnya pengembangan teknologi yang diterapkan dalam pengembangan sumberdaya pertanian, perikanan dan kehutanan serta sarana dan prasarana paket teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan (Teknologi)	7		0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh	
2	01	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produksi Pertanian (ton/ekor)	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura,Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan	
2	01	02	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan yang dikembangkan	208 Unit	123 Unit	62 Unit	62 Unit	100	200 Unit	200 Unit	100	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
2	01	21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunkan angka kematian ternak (%)	1	2.5	2.25	2.25	100	2	2	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan
2	01	22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase tingkat konsumsi produk asal ternak terutama daging	11,34 kg/perka pita pertahun	6,72 kg/perkapita pertahun	7,22 kg/perkapit a pertahun	7,22 kg/perkapita pertahun	100	8,42kg/perkapit a pertahun	8,42kg/perka pita pertahun	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,Dinas Pertanian dan Peternakan/ Perkebunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 01 23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan			Jumlah skim kredit yang disalurkan (Rp Miliar)	43	25	28	28	100	30	30	100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Peternakan/ Perkebunan
2 01	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan			Terwujudnya pengembangan kelembagaan penyuluh dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, SDM penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (orang)	1441	2130	0	0	0	1441	1441	100	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh
2 01	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan			Terlaksananya penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan	N/A	0	26 kegiatan	26 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh
2 01	Program Bantuan Pengembangan Pekarangan (untuk rumah layak huni)			Jumlah Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pemakai air oleh penyuluh pertanian serta asosiasi penyuluh	576 klp	690 kelompok	79 klp	79 klp	100	400 klp	400 klp	100	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh
2 02	KEHUTANAN												
2 02	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Masyarakat Sekitar Hutan			Meningkatnya kapasitas kelembagaan Usaha ekonomi masyarakat miskin (Kelompok)	3	11	5	5	100	6	6	100	Dinas Kehutanan
2 02	Program Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan			Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat desa sekitar hutan (desa)	3	9	5	5	100	6	6	100	Dinas Kehutanan
2 02 16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan, melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	300	759773	500	500	100	600	600	100	Dinas Kehutanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
					Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 02	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Tertanganinya tindak pidana perusakan kawasan hutan (kasus)	7	32	5	5	100	7	7	100	Dinas Kehutanan
2 02	Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi (unit)	2	66	1	1	100	2	2	100	Dinas Kehutanan
2 02 19	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (unit)	1	21	3	3	100	4	4	100	Dinas Kehutanan
2 02 22	Program perencanaan dan pengembangan Baton	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	1	4	1	1	100	1	1	100	Dinas Kehutanan
2 02 20	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	1	4	1	1	100	1	1	100	Dinas Kehutanan
2 02 21	Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri	Meningkatnya tanggung jawab sosial perusahaan pemegang izin	0	38	0	0	0	2	2	100	Dinas Kehutanan
2 02 22	Perencanaan dan Pengembangan Baton	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)		4 Dokumen	N/A	N/A	N/A		0	0	Dinas Kehutanan
2 02	Program Optimalisasi Peran Badan Usaha Bidang Kehutanan dalam Pembangunan	Meningkatnya peran badan usaha bidang kehutanan dalam pembangunan (unit)	1	58	1	0	0	2	2	100	Dinas Kehutanan
2 03	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2 03 15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Tersedianya laporan pengawasan dan pembinaan pertambangan mineral batubara (Dokumen)	91	222	222	222	100	225	225	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun Berjalan Tahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
							Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2 03 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan			Tersedianya unit pembangkit/genset dan jaringan (unit dan Kms)	10	10	10	10	100	10	10	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 03	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi			Tersedianya dokumen konservasi energi dan unit pembangkit listrik energi baru terbarukan (dokumen dan unit)	1583	0	N/A	N/A	N/A	1584	1584	100	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 03	Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas			Tersedianya sumur air dalam, evaluasi geologi wilayah dan evaluasi/monitoring migas (dokumen dan unit)	113	2	N/A	N/A	N/A	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 03	Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi			Tersedianya fasilitas data pendukung pembangunan ESDM dan Sertifikasi UPT Laboratorium dan Pengujian ESDM (dokumen)	36	3	3	3	100	0	0	0	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 03 16	Program pengawasan dan penertiban kegiatan Rakyat yang berpotensi merusak lingkungan			Terciptanya tertib administrasi perizinan ABT-AP serta terpenuhinya ketentuan teknis dan kaidah yang berlaku terhadap pemanfaatan ABT-AP	N/A	1	1	1	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2 04	PARIWISATA												
2 04 16	Program Pengembangan Destinasi			Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	16 Destinasi	3 Destinasi	N/A	N/A	N/A	13 Destinasi	13 Destinasi	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 04	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Jumlah tenaga SDM profesi pariwisata yang disertifikasi	400 Orang	26 Orang	N/A	N/A	N/A	200 Orang	200 Orang	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2 04	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata			Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif	32 Kelompok	8 Kelompok	N/A	N/A	N/A	20 Kelompok	20 Kelompok	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
					Jumlah desa wisata yang dikembangkan	62 desa		26 Desa	N/A	N/A	N/A	26 Desa	26 Desa	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	04	20		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, disain dan IPTEK	10 Paket		0 Paket	N/A	N/A	N/A	5 Paket	5 Paket	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	30 Paket		11 Paket	N/A	N/A	N/A	23 Paket	23 Paket	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	04	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,Jumlah Event Pariwisata dan Ekraf, dan Lama tinggal wisatawan mancanegara	60.824 Orang, 28 Event, 4.35 Hari		45.988 Orang, 2 Event, 3.68 Hari	48.633 Orang	48.633 Orang	100	51.430 Orang, 6 Event, 3.90 Hari	51.430 Orang, 6 Event, 3.90 Hari	100	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	04	18		Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi/ publikasi pengembangan pariwisata			0	3 kegiatan	3 kegiatan	100	N/A	N/A	N/A	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	07			INDUSTRI											
2	07	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan IKM, Produktifitas dan jumlah produk IKM yang mampu bersaing	400	IKM	0	400	200	50	100	300	75.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	18		Program Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri (kajian)	9		0	1	1	100	3	4	44.44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	15		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Meningkatnya kemampuan Teknologi Produksi Tepat guna/alsintan (PU)	315		0	236	35	100	270	305	96.83	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	07	17		Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru (Unit Usaha)	50		0	30	15	100	35	50	100.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
									Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1				2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	07			Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan berbasis Teknologi	Meningkatnya Industri Agro dan Industri Unggulan	1		0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06			PERDAGANGAN											
2	06	15		Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terciptanya Tertib Ukur di segala Bidang dan Perlindungan konsumen (Alat UTTP dan Jumlah Toko)	5400		5000	N/A	N/A	N/A	5100	5100	94.44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai dan Komoditas Ekspor (Juta US\$)	25.776		20.196	21.206	20.95335	98.81	22.266	22.266	86.38	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	18		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Stabilitas Harga Bahan Pokok (Laju Inflasi(%))	6.00		6.83	6.67	7.086125	106.24	6.51	6.51	108.50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	06	16		Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Terciptanya Kerjasama Perdagangan Internasional (MOU)	1		0	N/A	N/A	N/A		0	0.00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	08			TRANSMIGRASI											
2	08	15	01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang terbangun (Unit)	414	Unit	30	75	6	8	25	25	100	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
2	08			Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Ekonomi Kawasan Transmigrasi	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	414	Unit		116	78.45979617	67.64	116	194.4597962	46.97	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
2	08			Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi SDM	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	414	Unit		116	7.783506676	6.71	116	123.7835067	29.90	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
2	08			Penyediaan Lahan Dan Legalitas Tanah Transmigrasi	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	414	Unit		116	12.11935363	10.45	116	128.1193536	30.95	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2018		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2013	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program / Kegiatan RKPD Tahun BerjalanTahun 2015	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan		SKPD Penanggung Jawab
										Target RKPD Tahun 2014	Realisasi RKPD Tahun 2014	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2015 (%)	
1					2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11*	12
2	08	16			Program Transmigrasi Lokal	Jumlah kepala Keluarga yang diberdayakan dalam kelompok ekonomi Masyarakat (KK)	157200	KK	598	653	542	83.00	678	1818	1.16	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
2	08				Pembinaan Transmigrasi Lokal	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	157200	KK	598	653	542	83.00	678	1818	1.16	Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan
2	08				Pelatihan Transmigrasi Di UPT-Transmigrasi	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	157200	KK	598	653	542	83.00	678	1818	1.16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan Provinsi Riau yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

2.3.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Permasalahan utama adalah: (1) Kontribusi sektor migas (Pertambangan dan penggalian) di dalam PDRB Riau cenderung terus menurun dari 48,70% pada tahun 2010 menjadi 43,65% pada tahun 2013; (2) Rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian dan perkebunan; (3) Belum berkembangnya industri pengolahan yang terlihat dari kontribusi sektor industri pengolahan yang tidak begitu signifikan dari 11,36% pada tahun 2010 menjadi 12,01% pada tahun 2013; (4) Rendahnya serapan tenaga kerja dari pertumbuhan ekonomi *non-tradable* tergambar dari kontribusi sektor jasa di dalam PDRB Riau 2013 yang hanya sebesar 6,01%; (5) Belum optimalnya pengendalian inflasi yang tercermin dari fluktuatifnya nilai inflasi dari 7,00% tahun 2010 menjadi 3,35% tahun 2012 dan 8,65% pada tahun 2014; (6) Relatif tingginya ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota dimana penduduk miskin paling sedikit berada di Kota Pekanbaru dengan 3,27%, sedangkan penduduk miskin paling banyak berada di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 35,74%; (7) Belum meratanya penurunan angka kemiskinan; (8) Masih tingginya angka kedalaman dan keparahan kemiskinan terutama di desa dengan indeks kedalaman kemiskinan 1,50.

2.3.1.2. Kesejahteraan Sosial

Permasalahannya adalah: (1) Masih tingginya ketimpangan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) antar kabupaten dan kota dimana Pekanbaru dengan IPM tertinggi 80,43 dibandingkan dengan Kepulauan Meranti dengan IPM terendah 72,10; (2) Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja dengan pengangguran tertinggi sebesar 5,54% di Kabupaten Kepulauan Meranti dan diikuti oleh Dumai dengan 4,91%;

(3) Belum optimalnya perluasan jaringan dan perluasan lapangan kerja terdidik/terampil.

2.3.1.3. Seni Budaya dan Olahraga

Permasalahan: (1) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya Melayu belum optimal dimana hanya ada 158 jumlah grup seni budaya di seluruh Provinsi Riau; (3) Penerapan nilai-nilai Melayu yang islami belum melembaga; (4) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung dimana hanya tersedia 6 gedung kesenian di Riau serta tidak berkembangnya pegelaran seni dan budaya; (5) Tidak optimalnya penggunaan fasilitas gedung/venue eks PON XVIII sebagai sarana pembinaan olahraga dan kepemudaan.

2.3.2. Aspek Pelayanan Umum

2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Permasalahan utama adalah: (1) Aksesibilitas terhadap sekolah belum merata dimana terlihat dari APS SMP/MTs terendah 72,68% di Pelalawan dan tertinggi di Siak 96,86%; (2) Ruang penunjang untuk jenjang SMP dan SMA masih terbatas (laboratorium, perpustakaan dan pendukungnya) dimana rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah tingkat SD/MI terendah sebesar 162 ada di Indragiri Hilir dan tingkat SMP/MTs terendah sebesar 118 ada di Siak; (3) Belum meratanya penyebaran guru antara kota dan desa dimana Indragiri Hilir memiliki rasio jumlah guru dan murid tingkat SD/MI terbesar sebesar 36,50 dibandingkan dengan kawasan perkotaan Dumai sebesar 10,70; (4) Tingkat Kualitas dan tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan; (5) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan belum merata; (6) Terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan); dan (7) Belum optimalnya kesempatan sekolah dan pendataan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah.

B. Kesehatan

Permasalahan utamanya adalah: (1) Rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi kelompok penduduk miskin; (2) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang tercermin dari belum

meratanya sebaran dokter dimana Kabupaten Indragiri Hilir hanya memiliki 10 dokter untuk 100.000 penduduk yang jauh di bawah standar nasional yaitu 40 dokter per 100.000 penduduk;(3) Angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI dan AKB) masih relatif tinggi; (4) Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk di kabupaten/kota dimana rata-rata 1 puskesmas harus melayani 28.674 penduduk dan 1 rumah sakit melayani 100.495 penduduk; (5) Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif masih rendah; (6) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal.

C. Lingkungan Hidup

Permasalahan utama adalah: (1) Menurunnya kualitas sungai dan daerah aliran sungai (DAS); (2) Kerentanan resiko kebakaran lahan serta meningkatnya pencemaran udara dimana jumlah titik api di Provinsi Riau pada tahun 2014 meningkat menjadi 7.500 titik api yang meningkat hampir 4 kali jumlah titik api di tahun 2010 (1.525 titik api); (3) Masih tingginya pencemaran lingkungan; (4) Belum tercapainya fungsi kawasan lindung secara optimal; (5) Belum optimalnya pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK); dan (6) Terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pada media air sungai dan pesisir/laut.

D. Pekerjaan Umum

Permasalahan utama pada aspek kebinamargaan adalah: (1) Belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas jalan menuju sentra pertanian, wisata dan industri; (2) Belum terpenuhinya standar lebar jalan pada sebagian besar jalan provinsi; (3) Belum memadainya pertambahan panjang jalan Provinsi dan jalan Nasional dimana jalan provinsi dari 3.033 km pada tahun 2007 tetap panjangnya sampai tahun 2014; (4) Tingginya tingkat kerusakan jalan dimana jalan provinsi dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat masih tinggi (38,44%).

Permasalahan utama terkait aspek sumber daya air dan irigasi adalah: (1) Rendahnya penyediaan sumber air baku untuk air minum dan irigasi; (2) Tingginya kerusakan jaringan irigasi; (3) Menurunnya daya tampung sungai; (4) kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 1 sampai 2,5 m; (5) Belum optimalnya pengembangan pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim *sewerage*), (6) Sistem hidrologi lahan basah/gambut belum dioptimalkan;

E. Penataan Ruang

Permasalahan utama adalah: (1) Belum optimalnya rencana tata ruang wilayah sebagai acuan pembangunan di daerah; (2) Belum optimalnya perwujudan Nilai Standar Prosedur Kriteria (NSPK) Bidang Penataan Ruang; (3) Menurunnya ketersediaan ruang untuk ketahanan pangan dan ruang terbuka hijau (RTH) publik; dan (4) Belum optimalnya perwujudan ruang investasi di kawasan metropolitan dan pusat-pusat pertumbuhan di Riau.

F. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan utama adalah: (1) Posisi strategis Provinsi Riau belum memberi kontribusi terhadap kemajuan ekonomi, sosial, budaya, politik dan investasi; (2) Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal; (3) Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan masih rendah; (4) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi serta dokumen perencanaan; (5) Masih rendahnya kualitas pelaksanaan Musrenbang dan penerapan dokumen perencanaan; dan (6) Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.

G. Perumahan

Permasalahan utama pada aspek keciptakarya adalah: (1) Rendahnya penyediaan dan distribusi pelayanan air minum dimana sumber air minum yang berasal dari leding (pipa) dan air kemasan hanya mencapai 41,81%; (2) Rendahnya cakupan pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman (limbah, sampah, dan drainase); (3) Terbatasnya penyediaan infrastruktur sampah regional; (4) Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin.

H. Pemuda dan Olahraga

Permasalahan utama adalah: (1) Minimnya sarana dan kesempatan bagi pemuda untuk menampilkan hasil karya dan kreatifitasnya; (2) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri; dan (3) Rendahnya kualitas atlet.

I. Penanaman Modal

Permasalahan utama adalah: (1) Masih tingginya kesenjangan (*lag*) investasi antara izin prinsip dan realisasi investasi; (2) Kualitas infrastruktur pendukung investasi masih belum memadai; dan (3) Kurang kondusifnya iklim & minat investasi.

J. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi dimana hanya 77% persen yang aktif; (2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (3) Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

K. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi penduduk dimana pertumbuhan penduduk 3,96% per tahun; (2) Administrasi penduduk yang belum terdokumentasikan secara baik melalui e-KTP; dan (3) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal.

L. Ketenagakerjaan

Permasalahan utama adalah: (1) Meningkatnya angka pengangguran (4,30 persen) serta masalah ketenagakerjaan; (2) Kualitas tenaga kerja masih rendah; (3) Persebaran tenaga kerja yang tidak merata; dan (4) Tingginya tingkat pengangguran terbuka usia muda dengan pendidikan SMA ke bawah.

M. Ketahanan Pangan

Permasalahan utama adalah: (1) Pangan belum terdistribusikan dengan baik dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (2) Tingginya ketergantungan impor pangan strategis; (3) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; dan (4) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

N. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan utama adalah: (1) Rendahnya komitmen dan pemahaman dari masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang; (2) Masih rentan permasalahan *trafficking*; dan (3) Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan.

O. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Permasalahan utama adalah: (1) Kualitas pelayanan KB belum maksimal; (2) Belum optimalnya ketahanan keluarga; dan (3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat

untuk ber-KB terutama di Kabupaten Bengkalis dengan rasio akseptor KB hanya 19,72%.

P. Perhubungan

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah: (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan; (3) Masih tingginya *overloading* angkutan barang; dan (4) Belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau meskipun Riau memiliki 108 pelabuhan umum dan khusus.

Q. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan utama adalah: (1) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan belum optimal; dan (2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum optimal.

R. Kesaatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Permasalahan utama adalah: (1) Pendidikan politik masyarakat masih rendah; (2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

S. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Permasalahan utama adalah: (1) Penanganan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan stabilitas pertahanan serta keamanan masih belum optimal; (2) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; (3) Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); (4) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; (5) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; (6) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan; (7) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (8) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (9) Belum tuntasnya batas administrasi daerah; (10) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; (11) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman,

Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

T. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan utama adalah: (1) Minimnya sarana dan prasarana di pedesaan; (2) Belum optimalnya fungsi kelembagaan dan kualitas aparatur desa; dan (3) Rendahnya kemampuan masyarakat desa dalam mengakses kesempatan berusaha.

U. Sosial

Permasalahan utama adalah: (1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); (2) Belum terintegrasinya penanggulangan kemiskinan; (3) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; dan (4) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

V. Kebudayaan

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya apresiasi dan perlindungan terhadap budaya lokal; dan (2) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai budaya dalam penyelamatan aset budaya.

W. Statistik

Permasalahan utama adalah: (1) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap data statistik; dan (2) Referensi data pembangunan yang berbeda-beda.

X. Perpustakaan

Permasalahan utama adalah: (1) Keterbatasan sarana dan prasarana; dan (2) Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan.

2.3.2.2. Pelayanan Urusan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama adalah: (1) Keterbatasan bahan baku perikanan untuk mendukung industri pengolahan hasil perikanan; (2) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (3) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran; dan (4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana perikanan tangkap.

B. Pertanian

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya alih fungsi lahan terutama untuk perkebunan kelapa sawit seluas 2,73 juta hektar; (2) Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan; (3) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (4) Rusaknya infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi ke sentra produksi; (5) Tingginya konversi lahan pertanian; (6) Rendahnya perlindungan terhadap petani produsen; (7) Masih terjadi mutasi lahan ke non pertanian yang cukup tinggi; (8) Terbatasnya rumah potong hewan (RPH) modern yang berstandar SNI.

C. Kehutanan

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan dimana kerusakan kawasan hutan pada tahun 2013 adalah seluas 1,53 juta hektar; (2) Belum optimalnya pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan lindung; (3) Belum optimalnya konservasi hutan dan lahan dimana rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2013 yang mampu dilakukan seluas 95.000 hektar; dan (4) Rendahnya pendapatan masyarakat desa sekitar hutan.

D. Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan utama adalah: (1) Belum optimalnya cakupan pelayanan energi listrik dimana hanya 65,16% rumah tangga di Riau yang dilayani oleh PLN dan yang lebih parah adalah kawasan desa hanya dilayani sebanyak 46,08%; (2) Terbatasnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral; (3) Belum optimalnya pendayagunaan produksi energi sumber daya mineral;

E. Pariwisata

Permasalahan utama adalah: (1) Belum memiliki ikon wisata dan paket yang komprehensif dan berdaya saing; (2) Tata kelola destinasi pariwisata masih bersifat parsial; dan (3) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan.

F. Perindustrian

Permasalahan utama adalah: (1) Pemanfaatan bahan baku lokal rendah; (2) Inovasi produk masih rendah; (3) SDM masih rendah; (4) Penguasaan teknologi rendah; dan (5) Kurangnya produktivitas bahan baku substitusi impor.

G. Perdagangan

Permasalahan utama adalah: (1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) Kurangmemadainya jumlah maupun kualitas SDM; (4) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antara swasta dengan swasta (P to P), swasta dengan pemerintah (P to G) serta pemerintah dengan pemerintah (G to G); dan (5) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

H. Ketransmigrasi

Permasalahan utama adalah: (1) Ketersediaan tempat/lahan transmigran tidak dapat dipenuhi; dan (2) Kesiapan sumber daya manusia yang dikirim menjadi transmigran.

2.3.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.3.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Permasalahan utama adalah: (1) Tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan; (2) Tingginya ketimpangan kesejahteraan antara petani sawit dengan sektor pertanian lainnya; dan (3) Nilai Tukar Petani masih rendah.

2.3.3.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Permasalahan utama adalah: (1) Percepatan dan perluasan infrastruktur masih belum optimal; (2) Kualitas pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan yang masih rendah; (3) Pemenuhan energi listrik masih sangat rendah; dan (4) Aksesibilitas listrik dan air bersih yang belum memadai.

2.3.3.3. Iklim Investasi

Permasalahan utama adalah: (1) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan belum optimal, karena terbatasnya ketersediaan lahan; (2) Meningkatnya angka kriminalitas; dan (3) Belum optimalnya stabilitas keamanan sosial.

2.3.3.4. Sumberdaya Manusia

Permasalahan adalah: (1) Masih rendahnya kualitas tenaga kerja; (2) Masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap usia produktif.

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun 2013 - 2014 dan perkiraan tahun 2015 yang mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Provinsi Riau dalam pembangunan perekonomian yang meliputi pendapatan daerah dan kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendanai pembangunan tahun 2016 yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau mengacu kepada arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP dan kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Provinsi Riau. Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Provinsi Riau tahun 2014 – 2019 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2016.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2013 – 2014 dan Perkiraan Tahun 2015

Kondisi ekonomi ini menguraikan tentang kondisi dan analisis perekonomian Provinsi Riau yang antara lain mencakup: Produk Domestik regional Bruto (PDRB), tingkat inflasi, sumbangan sektoral, tingkat investasi, ekspor dan indikator pembangunan ekonomi lainnya yang secara ringkas ditunjukkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Riau

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
			Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015	Tahun 2016
1.	PDRB (Harga Berlaku)						
	a. Dengan Migas	Rp Milyar	522.241,43	569.243,16	47.001,73	626.167,48	689.482,04
	b. Tanpa Migas	Rp Milyar	340.631,03	381.507,75	40.876,72	431.103,76	482.793,10
2.	PDRB (Harga Konstan)						
	a. Dengan Migas	Rp Milyar	109.073,14	112.170,82	3.097,68	115.177,00	118.643,82
	b. Tanpa Migas	Rp Milyar	60.006,67	64.087,12	4.080,45	68.297,65	72.962,38
3.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Berlaku						
	a. Dengan Migas	%	11,33	9,00	(2,33)	10,00	9,17
	b. Tanpa Migas	%	14,90	12,00	(2,90)	13,00	11,99
4.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB Harga Konstan						
	c. Dengan Migas	%	2,61	2,84	0,23	2,68	3,01
	d. Tanpa Migas	%	6,13	6,80	0,67	6,57	6,83
5.	Tingkat Inflasi	%	8,83	8,65	(0,18)	6,46	6,30
6.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK-TM Pendekatan Pengeluaran (Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah, Investasi, dan Kegiatan Perdagangan Luar Negeri)						
	a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	%	7,67	7,23	(0,44)	7,46	7,65
	b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta Yg Tidak Mencari Keuntungan	%	7,16	15,53	8,37	15,34	10,50
	c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	%	2,48	(3,58)	(6,06)	1,50	2,00
	d. Pembentukan Modal tetap Bruto	%	5,32	1,62	(3,70)	1,50	3,50
	e. Ekspor	%	1,74	2,92	1,18	3,54	3,50
	f. Impor	%	4,10	(13,01)	(17,11)	5,76	4,00
7.	ICOR (Incremental Capital Output Ratio) ADHK-TM	Indeks	4,84	4,68	(0,16)	3,65	3,61
8.	Tingkat Kemiskinan	%	8,42	7,99	(0,43)	7,38	6,86
9.	Tingkat Pengangguran	%	5,50	6,56	1,06	4,81	4,50
10.	Disparitas Pendapatan Regional yang dilihat dari perbedaan:						

No	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Bertambah/ Berkurang	Proyeksi	
			Tahun 2013	Tahun 2014		Tahun 2015	Tahun 2016
	a. Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Dengan Migas	Rp Juta	79,13	86,52	7,39	93,91	101,30
	b. Pendapatan Perkapita Harga Berlaku Tanpa Migas	Rp Juta	51,61	57,33	5,72	63,05	68,77
	c. Pendapatan Perkapita Harga Konstan Dengan Migas	Rp Juta	16,53	16,64	0,11	16,75	16,86
	d. Pendapatan Perkapita Harga Konstan Tanpa Migas	Rp Juta	9,09	9,39	0,30	9,69	9,99
	e. Kemampuan Investasi PMDN	Rp Milyar	4.874,27	7.700,00	2.825,73	5.828,38	5.960,11
	f. Kemampuan Investasi PMA	US\$ Juta	1.304,90	1.369,60	64,66	1.232,79	1.260,65
	g. Indeks Gini (<i>Gini Ratio Index</i>)	Indeks	0,37	0,38	0,01	0,33	0,32
	h. IPM (Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,25	77,55	0,30	78,47	78,98
11	Berbagai macam besaran rasio dan perbandingan-perbandingan						
	a. Pajak Daerah terhadap PDRB (ADHB-DM)	%	0,40	0,44	0,04	0,47	0,50
	b. PAD terhadap PDRB (ADHB-DM)	%	0,48	0,54	0,06	0,58	0,59
	c. Dana Perimbangan terhadap PDRB (ADHB-DM)	%	0,68	0,67	(0,01)	0,66	0,63

3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi disuatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB dengan pendekatan produksi (lapangan usaha) dikelompokkan menjadi sembilan sektor ekonomi yaitu pertanian, pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa-jasa. Penghitungan PDRB dibedakan menjadi dengan migas dan tanpa migas. PDRB dan pendapatan per kapita secara tidak langsung dapat mencerminkan besaran kemakmuran per orang disuatu wilayah pada periode tertentu, yang besarnya adalah hasil bagi angka PDRB dan Pendapatan dibagi dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah tersebut pada satu tahun. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dalam selang waktu satu tahun menggunakan konsep harga konstan dengan tahun dasar (tahun 2000) untuk mengeliminasi faktor perubahan harga. Mulai akhir tahun 2014, BPS merubah tahun dasar menjadi tahun 2010.

Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian berbagai pihak khususnya pemerintah dalam pembangunan karena mengandung salah satu prinsip *triple track strategy* (*Pro Growth, Pro Poor dan Pro Job*). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau

tanpa migas (atas dasar harga konstan tanpa migas atau ADHK-TM) tahun 2013 sebesar 6,13%, merupakan pertumbuhan ekonomi paling rendah dalam 1 dekade terakhir. Pada tahun 2014 hingga triwulan III, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 6,80% . Apabila memasukan unsur minyak dan gas bumi (ADHK-DM) dalam perekonomian, maka ekonomi Provinsi Riau tahun 2013 sebesar 2,61%. Pada tahun 2014, hingga triwulan III sebesar 2,84% dan hingga akhir tahun 2014 (tahun dasar 2010) pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 2,62%.

Pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha tanpa migas tahun 2013 diatas 8% adalah sektor industri (8,08%) dan sektor keuangan sebesar 8,21%. Pada tahun 2013, pertumbuhan ekonomi (ADHK-TM) tertinggi adalah sektor keuangan walaupun mengalami perlambatan jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 (Triwulan III), pertumbuhan sektor keuangan menurun menjadi 4,95%. Pada tahun 2014 ini, pertumbuhan tertinggi diperoleh oleh sektor industri (9,15%) diikuti sektor perdagangan (9,03%). Pada tahun dasar tahun 2010, pertumbuhan terbesar adalah jasa perusahaan (12,8%), jasa lainnya (11,1%) dan konstruksi (8,5%).

Pertumbuhan menurut lapangan usaha dengan migas tahun 2013 adalah sektor keuangan yaitu sebesar 8,21%, diikuti jasa-jasa (7,16%) dan angkutan (7,84%). Sektor pertambangan mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -1,47%. Pada tahun 2014 (twiwulan III), sektor keuangan hanya tumbuh sebesar 4,95%, jasa-jasa (1,08%) dan angkutan (5,76%). Pada tahun 2014 ini, sektor yang pertumbuhannya tinggi adalah perdagangan (9,03%) dan industri (7,72%), Pertumbuhan sektor pertambangan masih tetap negatif yaitu sebesar -1,99%.

Distribusi PDRB (ADHK-TM) terbesar tahun 2013 adalah pertanian (30,11%), perdagangan (17,20%), listrik dan air (17,40%) dan jasa-jasa (10,92%). Sektor-sektor lainnya memberikan kontribusi 0,41% - 8,05%. Distribusi PDRB ADHK-DM tahun 2013 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi pada PDRB adalah sektor pertambangan (43,65%) diikuti pertanian (17,11%), pengolahan (12,01%) dan perdagangan (11,13%). Kontribusi sektor-sektor lainnya berkisar antara 0,23% - 6,21%.

Pada tahun 2015, nilai PDRB Provinsi Riau ADHK-TM diprediksi akan meningkat menjadi Rp 68.297,65 milyar dan pada tahun 2016 meningkat Rp 72.962,38 milyar. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi (ADHK-TM) diprediksi

sekitar 6,57% dan tahun 2016 diprediksi meningkat menjadi sekitar 6,83%. Pertumbuhan ekonomi ADHK-DM tahun 2015 diprediksi sekitar 2,68% dan pada tahun 2016 diprediksi akan tumbuh sekitar 3,01%.

Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas (ADHB-DM) tahun 2013 tertinggi disumbangkan oleh sektor pertambangan (33,59%) diikuti sektor industri (19,63), pertanian (18,41%) dan perdagangan (11,63%). Kontribusi sektor lainnya berkisar antara 0,17% - 7,33%. Pada tahun 2014 (Triwulan III) adalah sektor pertambangan (31,16%), industri (20,43%), pertanian (19,23%) dan perdagangan (12,36%). Kontribusi sektor lainnya berkisar antara 0,17 – 7,33%.

Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku tanpa migas (ADHB-TM) tahun 2013 tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian (28,23%) diikuti sektor industri (25,97%) perdagangan (17,83%) dan bangunan (11,24%). Kontribusi sektor lainnya berkisar antara 0,27 – 6,43%. Pada tahun 2014 (Triwulan III), kontribusi PDRB tertinggi disumbangkan oleh sektor pertanian (28,38%), diikuti sektor industri (26,28%), perdagangan (18,05%) dan bangunan (11,05%). Kontribusi sektor lainnya berkisar antara 0,25% - 6,01%.

Pertumbuhan ekonomi secara total adalah sama, baik melalui pendekatan lapangan usaha maupun pendekatan pengeluaran. Pada tahun 2013, hampir setiap komponen pengeluaran (konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintahan, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor dan impor) ADHK-TM mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga (7,67%), diikuti konsumsi lembaga swasta nirlaba (7,16%) dan PMTB (5,32%). Pada tahun 2014, pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh konsumsi lembaga swasta nirlaba (15,53%) dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (7,23%). Khusus impor dan pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan negatif yang masing-masingnya sebesar -13,01% dan -3,58%. Pada tahun 2015, pertumbuhan tinggi diprediksi pada pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba yaitu sebesar 15,34% dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (7,46%). Begitu juga pada tahun 2016, pertumbuhan tertinggi diprediksi pada konsumsi lembaga swasta nirlaba (10,50%) dan pengeluaran konsumsi rumah tangga (7,65%).

3.1.1.2. Pendapatan Perkapita

PDRM dan pendapatan perkapita secara tidak langsung dapat mencerminkan seberapa tinggi/rendah tingkat kemakmuran yang telah dicapai oleh penduduk suatu daerah pada waktu tertentu. Apabila data pendapatan per kapita disusun dalam beberapa tahun akan tampak adanya perubahan kemakmuran yang terjadi sehingga dapat diinterpretasikan apakah perubahannya menunjukkan kemakmuran yang semakin membaik atau sebaliknya. Pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB atau total pendapatan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besar atau kecilnya jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku dengan migas (ADHB-DM) tahun 2013 sebesar Rp 79,13 juta, meningkat menjadi Rp 86,52 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp 7,39 juta. Pada tahun 2015, diprediksi kenaikan angka PDRB per kapita Provinsi Riau relatif sama dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi Rp 93,91 juta dan tahun 2016 menjadi Rp 101,0 juta. Pendapatan per kapita (ADHB-TM) tahun 2013 sebesar Rp 51,61 juta atau 65,22% dari pendapatan per kapita tahun yang sama ADHB-DM. Hal ini mengindikasikan bahwa migas masih cukup besar pengaruhnya dalam PDRB Provinsi Riau. Pada tahun 2014, PDRB per kapita Provinsi Riau meningkat menjadi Rp 57,33 juta atau meningkat sebesar Rp 5,72 juta selama tahun 2014. Pada tahun 2015, diprediksi pendapatan per kapita ADHB-TM akan meningkat menjadi Rp 63,05 juta dan tahun 2016 meningkat menjadi Rp 68,77 juta. Secara keseluruhan, PDRB per kapita ADHB memperlihatkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Riau merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia dan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya.

PDRB per kapita ADHB-TM tahun 2013 sebesar Rp 9,09 juta dan meningkat menjadi Rp 9,39 juta pada tahun 2014 atau meningkat sebesar Rp 0,30 juta. Hal ini berarti bahwa daya beli riil penduduk Provinsi Riau meningkat meskipun sedikit. Komponen inilah yang mendorong IPM Provinsi Riau naik paling tinggi dibanding 3 komponen pembentuk IPM lainnya. Pada tahun 2015, PDRB per kapita Provinsi Riau diprediksi akan meningkat menjadi Rp 9,69 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 9,99 juta. Apabila PDRB atas dasar harga konstan ini memasukkan unsur migas tampak peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2013, PDRB per kapita

ADHK-DM sebesar Rp 16,53 juta atau lebih tinggi sebesar Rp 7,44 juta atau lebih tinggi sebesar 81,85% dibanding pendapatan per kapita ADHK-TM. Hal ini mencerminkan bahwa kontribusi migas terhadap PDRB dan pendapatan per kapita di Provinsi Riau sangat besar. Pada tahun 2014, pendapatan per kapita ADHK-DM meningkat menjadi Rp 16,64 juta atau meningkat Rp 0,11 juta. Pada tahun 2015, diprediksi pendapatan per kapita ADHK-DM akan meningkat menjadi Rp 16,75 juta dan pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp 16,86 juta. Pendapatan per kapita ADHK baik tanpa migas maupun dengan migas menunjukkan perubahan kesejahteraan penduduk Provinsi Riau terus semakin membaik.

3.1.1.3. Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Inflasi berkaitan dengan interaksi antara sisi permintaan dan sisi penawaran dari barang dan jasa. Namun pada kenyataan, inflasi tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya seperti sistem tata niaga, kelancaran distribusi barang dan jasa, peran kebijakan pemerintah dan lebih luas lagi berkaitan dengan perilaku sektor keuangan. Pada tahun 2013, tingkat inflasi di Provinsi Riau sebesar 8,83%, dimana kontribusi terbesar penyumbang inflasi dan diatas rata-rata inflasi adalah kelompok pengeluaran transpor/komunikasi dan jasa keuangan yaitu sebesar 13,46%. Penyumbang terbesar kedua adalah bahan makanan yaitu sebesar 12,36% dan pendidikan/rekreasi/ dan olahraga yaitu sebesar 9,26%. Khusus kelompok pengeluaran sandang mengalami deflasi sebesar -2,40%. Pada tahun 2014, kelompok penyumbangan inflasi terbesar masih sama yaitu transpor/komunikasi dan jasa keuangan yaitu sebesar 12,99% diikuti makanan jadi/minuman/rokok dan tembakau (10,41%) dan bahan makanan (10,15%).

Bila pemerintah terus melakukan kebijakan menaikkan harga BBM, tidak berupaya menurunkan nilai tukar dollar terhadap rupiah sekitar Rp 10.000 per dollar, dan pemerintah Provinsi Riau tidak berupaya meningkatkan ketahanan pangan di Prediksitingkat inflasi akan terus meningkat. Namun bila kedua kebijakan ini dilakukan sebaliknya maka pada tahun 2015, diperkirakan inflasi akan sedikit menurun menjadi 6,24% dan pada tahun 2016 diprediksi sebesar 6,30%. Perkiraan

inflasi tahun 2015 dan 2016 masih konsisten dengan perkiraan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019.

3.1.1.4. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR adalah suatu besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi baru) yang dibutuhkan untuk menaikkan/menambah satu unit output. Besaran ICOR diperoleh dengan membandingkan besarnya tambahan kapital dengan tambahan output. Karena unit kapital bentuknya berbeda-beda dan beraneka ragam, sementara unit output relatif tidak berbeda maka penghitungan keduanya dinilai dalam bentuk uang (nominal).

Formulasi penghitungan ICOR merupakan statistik yang menunjukkan kebutuhan perubahan stok kapital untuk menaikkan satu unit output (Perubahan Kapital/Perubahan Output). Dalam perkembangannya, data yang digunakan untuk menghitung ICOR bukan lagi hanya penambahan modal baru atau perubahan stock kapital melainkan Investasi (I) yang ditanamkan oleh swasta maupun pemerintah sehingga ICOR dimodifikasi menjadi rasio investasi terhadap perubahan output, dimana faktor-faktor selain investasi seperti pemakaian tenaga kerja, penerapan teknologi dan kemampuan kewiraswastaan diasumsikan konstan (*ceteris paribus*).

Nilai ICOR atas dasar harga kosntan tanpa migas (ADHK-TM) tahun 2013 sebesar 4,58 menurun menjadi 4,68 pada tahun 2014 sebagai konsekwensi lebih tinggi peningkatan (pertumbuhan) investasi dari Rp 17,2 triliyun pada tahun 2013 menjadi 22,38 triliyun pada tahun 2014. Pada tahun 2015, dengan akan disahkannya RTRW dan dimulainya kawasan industri maka nilai PMDN dan PMA senilai Rp 200 triliyun akan terealisasi sehingga nilai ICOR ikut menurun menjadi 3,65. Pada tahun 2016, diprediksi nilai ICOR akan menurun menjadi 3,61.

3.1.1.5. Tingkat Kemiskinan

Pencapaian penurunan kemiskinan di Provinsi Riau merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Pada tahun 2013, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 8,42 sudah diatas target MDG's. Pada tahun 2014, angka kemiskinan Provinsi Riau menurun menjadi 7,99%. Perlambatan penurunan angka kemiskinan Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir lebih disebabkan faktor eksternal terutama

kelembaban ekonomi dunia dan Indonesia serta migrasi penduduk miskin dari Provinsi tetangga.

Pada tahun 2015, angka kemiskinan di Provinsi Riau diprediksi akan menurun menjadi 7,38% dan tahun 2016 menurun menjadi 6,86%. Prediksi penurunan kemiskinan di Provinsi masih merujuk kepada target penurunan kemiskinan pada RPJMD Provinsi Riau tahun 2014 – 2019.

3.1.1.6. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran Provinsi Riau tahun 2013 sebesar 5,50% dan meningkat menjadi 6,56% pada tahun 2014 sesuai rumus perhitungannya adalah rasio antara jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja terhadap total angkatan kerja. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pekerja antara lain berhubungan dengan inflasi. A.W. Philip menjelaskan bahwa hubungan antara inflasi dengan pengangguran adalah negatif di Inggris. Hasil analisis terhadap data selama 20 tahun untuk Pekanbaru menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara inflasi dengan pengangguran. Semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin rendah pengangguran di Pekanbaru. Manfaat yang bisa dipetik adalah bahwa keterkaitan kebijakan sektor moneter dan sektor riil di Pekanbaru dan Riau pada umumnya bahwa inflasi pada titik-titik tertentu akan dapat mengurangi pengangguran. Oleh karena itu, sektor-sektor riil melalui produksi barang dan jasa, melalui tingkat harga tertentu, dapat menjadi pemicu dalam berproduksi karena adanya ekspektasi profit bagi produsen, yang pada gilirannya produsen akan membutuhkan tenaga kerja dalam memacu produksi.

Pada tahun 2015 dengan tingkat inflasi diprediksi sebesar 6,46%, diprediksi tingkat pengangguran di Provinsi Riau diprediksi akan menurun menjadi 4,81%. Pada tahun 2016, dengan tingkat inflasi diprediksi sebesar 6,30% maka di prediksi tingkat pengangguran akan menurun menjadi 4,50%.

3.1.1.7. Kemampuan Investasi

Nilai investasi di Provinsi Riau relatif terus meningkat. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) tahun 2013 sebesar Rp 4.874,27 milyar dan penanaman modal asing sebesar US\$ 1.304,90 juta atau keduanya setara dengan Rp 17,2 triliun. Pada

tahun 2014, PMDN meningkat menjadi Rp 7.700 milyar dan PMA meningkat menjadi US\$ 1.369,60 juta atau keduanya setara dengan Rp 22,38 triliun. Selama tahun 2014, nilai investasi di Provinsi Riau meningkat sebesar Rp 5,18 triliun atau meningkat sebesar 30,12%. Potensi investasi di Provinsi Riau, khususnya di Kota Dumai dan beberapa kawasan industri lainnya ada sekitar Rp 200 triliun yang terhambat utamanya karena belum disahkannya RTRW Provinsi Riau.

Apabila RTRW Provinsi Riau belum juga disahkan hingga 2015 maka diprediksi PMDN sebesar Rp 5.828,38 milyar dan PMA sebesar US\$ 1.232,79 juta. Pada tahun 2016, relatif akan sama yaitu sebesar Rp 5.960, 11 milyar dan PMA sebesar US\$ 1.260,65 juta. Apabila RTRW dapat disahkan pada tahun 2015 ini, diprediksi PMDN dan PMA akan meningkat lebih tinggi.

3.1.1.8. Indeks Gini

Indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Distribusi pendapatan sangat tidak merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi pendapatan dengan ketidak-merataan sedang jika angka indeks gini terletak antara 0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika angka indeks gini antara 0,2 sampai 0,35.

Pada tahun 2013, indeks gini Provinsi Riau sebesar 0,37 yang terkategori kepada distribusi pendapatan dengan ketidak merataan sedang. Pada tahun 2014, angka indeks gini Provinsi Riau meningkat menjadi 0,38 dengan kategori ketidak merataan sedang. Sesuai target RPJMD melalui program/kegiatan Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kabupaten serta Dunia Usaha, ditargetkan dan diprediksi angka indeks Provinsi Riau dapat turun menjadi 0,33 dan pada tahun 2016 menjadi 0,32 dimana kedua tahun ini kategorinya berubah lebih baik yaitu distribusi pendapatan relatif merata.

3.1.1.9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah proses agar mampu memiliki banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya.

Dalam konsep pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya semata. Pengukuran tingkat pencapaian pembangunan manusia, BPS menggunakan indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup tiga dimensi pokok dalam pemberdayaan penduduk yaitu peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Tingkatan status pembangunan manusia disuatu wilayah dibagi kedalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50 – kurang dari 80) dan tinggi (80 ke atas). Golongan menengah dipecah menjadi dua yaitu menengah bawah (antara 50 dan kurang dari 66) dan menengah atas (antara 66 dan kurang dari 80).

Pada tahun 2013, nilai IPM Provinsi Riau sebesar 77,25 dan tergolong kepada tingkatan status pembangunan manusia golongan menengah atas. Pada tahun 2014, nilai IPM Provinsi Riau meningkat menjadi 77,05 atau meningkat sebesar 0,30. Meski meningkat, tingkatan status pembangunan manusia di Provinsi Riau masih dalam golongan menengah atas. Pada tahun 2015, diprediksi nilai IPM Provinsi Riau sebesar 78,47 dan tahun 2016 meningkat menjadi 78,98. Apabila tidak ada perubahan kebijakan percepatan pembangunan manusia di Provinsi Riau, maka IPM Provinsi Riau dapat diatas 80 dan tergolong tinggi baru dapat dicapai pada tahun 2023. Mulai tahun 2016, Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan dalam pembangunan manusia. Kebijakan yang ditempuh antara lain dengan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp 415.900.000.000 kepada 12 kabupaten/kota. Bila bantuan keuangan ini terlaksana dan tepat sasaran maka diyakini untuk mencapai IPM Provinsi Riau sebesar 80,01 akan dapat terealisasi.

3.1.1.10. Rasio Pendapatan Terhadap PDRB

Bila PDRB Provinsi Riau merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di Provinsi Riau pada suatu waktu tertentu. Maka Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas (i) Pendapatan asli daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing dan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh negara. (ii) dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Hibah yang merupakan bagian dari lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Salah satu tolok ukur untuk penilaian keberhasilan desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah adalah tingkat pertumbuhan PDRB. Tingkat pertumbuhan PDRB Provinsi Riau termasuk yang terbaik di Indonesia dan selalu diatas pertumbuhan ekonomi Indonesia kecuali pada tahun 2013. Desentralisasi fiskal menjadi penting bagi pemerintah karena (i) semakin langkanya sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan pembangunan, (ii) mengurangi ketergantungan daerah pada Pemerintah Pusat dalam pembangunan dan (iii) banyak sumber pendapatan daerah yang besar dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Dalam desentralisasi fiskal yang dimulai pada 1 Januari 2001 disebutkan bahwa sistem pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pada tahun 2013, rasio antara pajak daerah terhadap PDRB (ADHB-DM) sebesar 0,40%. Meningkat menjadi 0,44 tahun 2014. Pada tahun 2015, rasio pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Riau diprediksi meningkat sebesar 0,47% dan 2016 meningkat menjadi 0,50%. Peningkatan ini menggambarkan bahwa laju pertumbuhan pajak daerah lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB.

Rasio antara PAD terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 0,48%, lebih tinggi dibanding rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,08%. Pada tahun 2014, rasio pajak daerah terhadap PDRB meningkat menjadi 0,54% atau meningkat sebesar 0,06% dibanding tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PAD lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan PDRB. Kedua rasio ini menggambarkan

bahwa tingkat ketergantungan Pemerintah Provinsi Riau cukup tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tingkat ketergantungan daerah rendah atau tinggi dapat diukur lebih baik dari rasio antara PAD terhadap total penerimaan daerah.

Rasio dana perimbangan terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 0,68%, lebih tinggi dibanding rasio sebelumnya yang menggambarkan besaran dana perimbangan lebih tinggi berbanding PAD. Pada tahun 2014, rasio dana perimbangan terhadap PDRB menurun menjadi 0,67 sejalan dengan menurunnya harga minyak bumi dari sekitar US\$ 100 per barel menjadi sekitar US\$ 50 per barel. Bila harga migas terus menurun maka diprediksi rasio dana perimbangan Provinsi Riau terhadap PDRB akan terus menurun yang masing-masingnya menjadi 0,66% dan 0,63%. Oleh karena itu, upaya untuk terus meningkatkan sumber pendapatan Pemerintahan Provinsi Riau dan tidak terlalu tergantung dari dana perimbangan khususnya DBH migas maka upaya terus menggali PAD perlu terus dilakukan.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2016 dan 2017

Bagian ini mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah, khususnya pada tahun 2016 - 2017. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memperkirakan proyeksi keuangan serta perkiraan kerangka pendanaan tahun mendatang.

Pada bulan Januari 2016, Provinsi Riau, Indonesia dan 9 negara ASEAN lainnya akan memasuki era baru “Masyarakat Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community. ASEAN akan menjadi pasar dan basis produksi tunggal, kawasan berdaya saing tinggi, kawasan pembangunan yang merata dan kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global. Konsekuensi MEA adalah pasar bebas permodalan (arus bebas modal dan arus bebas investasi), barang (aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, jasa (arus bebas jasa) dan tenaga kerja (arus bebas tenaga kerja trampil). Peluang bagi Indonesia, khususnya Provinsi Riau yang berada di garis depan dan berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia adalah produk-produk kita akan mendapat pasar di kawasan ASEAN dengan populasi lebih dari 600 juta jiwa dan pendapatan domestik bruto lebih dari US\$ 1,2 triliun. Tantangan adalah jika tidak siap maka justru produk dari negara ASEAN lainnya yang akan menyerbu Indonesia khususnya Provinsi Riau. Bagi Provinsi Riau, AEC merupakan tantangan sekaligus

prospek dalam pengembangan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Khusus pada tahun 2016 adalah masa yang mulai stabilnya Pemerintahan Provinsi Riau setelah didera berbagai masalah pada tahun 2014 dan masalah lainnya pada tahun 2015 yang ditutup Pilkada secara bersamaan di 9 Kabupaten/Kota. Walau secara langsung Pilkada tidak memberi dampak langsung terhadap pilkada namun mengganggu perekonomian Provinsi Riau. Pada tahun 2015, ini juga Provinsi Riau bersama Kabupaten/Kota penghasil migas juga didera dengan penurunan DBH migas sebagai konsekuensi penurunan harga minyak dunia. Kondisi ini menjadi sumber pendapatan daerah untuk pembangunan daerah menjadi berkurang. Pada tahun 2015, Provinsi Riau akan berkurang pendapatannya khususnya dari migas sebesar Rp 2 triliun. Apabila harga minyak bumi tidak meningkat dipasar dunia maka DBH migas Provinsi Riau akan menurun sejalan dengan penurunan harga dan produksi. Disisi lain, harga BBM, sesuai ketetapan pemerintah akan meningkat secara berfluktuatif yang berdampak kepada tingginya biaya produksi dan biaya hidup masyarakat. Dari sisi pengeluaran pada tahun 2014, pengeluaran transportasi dan pengeluaran konsumsi RT memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Riau dari sisi pengeluaran. Pada tahun 2016, diperkirakan perekonomian Provinsi Riau maupun Indonesia mulai pulih kembali dari shock sehingga prospek ekonomi Provinsi Riau 2016 dan 2017 diyakini lebih baik dari tahun 2014 dan 2015.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang menyangkut kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang terintegrasi dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dalam APBD merupakan kebijakan yang strategis untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah. Kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Mengacu kepada kondisi ekonomi daerah yang telah dibahas pada sub-bab 3.1.1. dan tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dibahas pada subbab 3.1.2, selanjutnya dilakukan analisis dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah yang ditunjukkan pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3.

Tabel 3.2.
Realiasi Pendapatan 2012-2014, Perkiraan Tahun Berjalan 2015 dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Provinsi Riau

No.	Uraian	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,588,688,445,077.20	2,725,623,913,109.06	3,049,490,022,808.24	3,656,360,898,235.16	9.02
1.1.	Pajak Daerah	2,058,595,750,963.00	2,110,997,529,618.00	2,496,771,206,539.30	2,924,923,046,636.62	9.18
1.2.	Retribusi Daerah	12,174,266,003.19	24,359,496,988.06	16,992,124,153.06	24,369,294,439.74	18.95
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139,601,792,176.90	146,463,619,420.44	154,214,508,022.56	208,544,824,163.60	10.55
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	378,316,635,934.11	443,803,267,082.56	381,512,184,093.32	498,523,732,995.20	7.14
2.	DANAPERIMBANGAN	3,618,842,730,571.00	3,610,182,229,607.00	4,231,808,633,743.00	4,196,336,984,783.74	3.77
2.1.	Dan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,067,171,446,571.00	2,844,812,993,607.00	3,367,086,539,743.00	3,462,914,734,783.00	3.08
2.2.	DanaAlokasiUmum	489,179,914,000.00	726,630,916,000.00	820,984,584,000.00	654,220,250,000.00	7.54
2.3.	DanaAlokasiKhusus	62,491,370,000.00	38,738,320,000.00	43,737,510,000.00	79,202,000,000.74	6.10
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	639,784,644,000.00	658,840,061,838.00	655,513,513,000.00	868,876,400,000.00	7.95
3.1.	Pendapatan Hibah	0	0	0.00	0.00	0.00
3.2.	DanaDarurat	0	0	0.00	0.00	0.00
3.3.	DanaBagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0	0	0.00	0.00	0.00
3.4.	DanaPenyesuaian dan Otonomi Khusus	639,784,644,000.00	636,219,961,838.00	655,513,513,000.00	868,876,400,000.00	7.95
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0.00	0.00	0.00
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	0	22,620,100,000.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	6,847,315,819,648.20	6,994,646,204,554.06	7,936,812,169,551.24	8,721,574,283,018.90	6.24

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah
Untuk data tahun 2015 bersumber dari Data APBD tahun 2015

Berdasarkan Tabel 3.2 dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah pada periode 2012-2015 sebesar 6.24% per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 9.02%, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang syah, masing-masing 3.77% dan 7.95%.

Walaupun dari sisi pertumbuhan, komponen PAD memperlihatkan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah daripada komponen Dana Perimbangan, namun dilihat dari proporsinya, Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Daerah. Dari Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa pada Tahun Anggaran 2012-2015, proporsi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan sebesar 48.11%, sedangkan yang bersumber dari PAD sebesar 41.92%. Kecenderungan kontribusi PAD yang semakin meningkat dan kontribusi dana perimbangan yang semakin menurun, menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Riau menuju kemandirian pengelolaan kekayaan daerah semakin membaik.

Tabel 3.3.
Proporsi Sumber Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2012– 2015

No.	Uraian	Realisasi 2012 (%)	Realisasi 2013 (%)	Realisasi 2014 (%)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (%)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	37.81	38.97	38.42	41.92
1.1.	Pajak Daerah	30.06	30.18	31.46	33.54
1.2.	Retribusi Daerah	0.18	0.35	0.21	0.28
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.04	2.09	1.94	2.39
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.53	6.34	4.81	5.72
2.	DANA PERIMBANGAN	52.85	51.61	53.32	48.11
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.79	40.67	42.42	39.71
2.2.	Dana Alokasi Umum	7.14	10.39	10.34	7.50
2.3.	Dana Alokasi Khusus	0.91	0.55	0.55	0.91
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.34	9.42	8.26	9.96
3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.34	9.10	8.26	9.96
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	0.00	0.32	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah
Untuk data tahun 2015 bersumber dari Data APBD tahun 2015

Selama periode 2012–2015, sumber-sumber Pendapatan Provinsi Riau terbesar masih dari Dana Perimbangan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2 dengan tren kontribusi menurun dengan besaran antara 48,115% -53,32% dari total pendapatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3. Kontribusi terbesar dari komponen dana perimbangan adalah dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dengan tren menurun dengan besaran kontribusi berkisar antara 39,71% - 44,79%. Diposisi kedua bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tren kontribusi berfluktuatif meningkat dengan besaran berkisar antara 37,81% - 41,92% dari total pendapatan. Kontribusi terbesar dari komponen PAD adalah Pajak Daerah dengan tren kontribusi meningkat dengan besaran kontribusi berkisar antara 30,06% - 33,54%. Diposisi ketiga adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan trend kontribusi meningkat dengan kisaran besaran kontribusi antara 8,26% - 9,96%.

Lebih lanjut, kinerja Pendapatan Daerah dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran yang ditetapkan dan realisasinya. Selaras dengan penerapan otonomi daerah, Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau terus mengalami peningkatan dari Rp 6,639,430,133,500.64 pada tahun 2012 menjadi Rp 7,400,619,878,055.10 pada tahun 2014. Lebih detail tentang perkembangan Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2012-2014 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	6,639,430,133,500.64	6,847,315,819,648.20	103.13	207,885,686,147.56	3.13
2013	6,937,720,762,637.46	6,999,609,547,133.44	100.89	61,888,784,495.98	0.89
2014	7,400,619,878,055.10	7,936,812,169,551.24	107.25	536,192,291,496.14	7.25
Jumlah	20,977,770,774,193.20	21,783,737,536,332.90	103.84	805,966,762,139.68	3.84

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa selama periode Tahun Anggaran 2012-2014, secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebesar Rp 20,977,770,774,193.20 dengan realisasi Rp 21,783,737,536,332.90, yang berarti realisasi telah melebihi Anggaran 103.84% atau bertambah 3.84%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pada tahun anggaran tersebut kemampuan Pemerintah Daerah Provinsi Riau menghimpun pendapatan daerah cukup baik.

Pendapatan Daerah Provinsi Riau bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dari Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa sumber Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Dana Perimbangan, sedangkan kontribusi dari PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah masih lebih kecil. Namun demikian, jika dicermati lebih lanjut dari proporsi realisasi komponen pendapatan, kontribusi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara persisten menunjukkan peningkatan. Semakin meningkatnya kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah menuju kemandirian pembiayaan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah semakin membaik.

Selama Tahun Anggaran 2012-2014, secara kumulatif realisasi PAD melebihi Anggaran, dengan realisasi mencapai 110.27% atau bertambah sebesar 10.27%. Tabel 3.5 menyajikan tentang perkembangan Anggaran dan realisasi PAD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014.

Tabel 3.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau Tahun
Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	2,181,221,661,379.00	2,588,688,445,077.20	118.68	407,466,783,698.20	18.68
2013	2,481,635,421,737.46	2,753,207,355,688.44	110.94	271,571,933,950.98	10.94
2014	2,946,911,680,239.00	3,049,490,022,808.24	103.48	102,578,342,569.24	3.48
Jumlah	7,609,768,763,355.46	8,391,385,823,573.88	110.27	781,617,060,218.42	10.27

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Komponen PAD terdiri dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dari empat komponen PAD tersebut Pajak Daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap total PAD diikuti oleh komponen Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Tabel 3.6 menyajikan tentang Anggaran dan realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014. Perlu diinformasikan bahwa Pajak Daerah terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan. Berdasarkan Tabel 3.6 dapat dinyatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2012-2014 realisasi Pajak Daerah melebihi Anggaran yang telah

ditetapkan. Secara kumulatif Anggaran Pajak Daerah sebesar Rp 6,311,648,189,906.46 dengan realisasi mencapai Rp 6,666,364,487,120.30. Dengan demikian realisasi mencapai 105.62%, atau bertambah Rp 354,716,297,213.84 (5.621%).

Tabel 3.6.

Target dan Realisasi Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	1,839,779,659,309.00	2,058,595,750,963.00	111.89	218,816,091,654.00	11.89
2013	2,025,217,116,337.46	2,110,997,529,618.00	104.24	85,780,413,280.54	4.24
2014	2,446,651,414,260.00	2,496,771,206,539.30	102.05	50,119,792,279.30	2.05
Jumlah	6,311,648,189,906.46	6,666,364,487,120.30	105.62	354,716,297,213.84	5.62

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Selanjutnya Tabel 3.7 menyajikan Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kepentingan orang pribadi atau badan, baik yang bersifat pelayanan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Tabel 3.7.

Target dan Realisasi Retribusi Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	10,651,305,400.00	12,174,266,003.19	114.30	1,522,960,603.19	14.30
2013	16,818,305,400.00	24,359,496,988.06	144.84	7,541,191,588.06	44.84
2014	18,750,000,000.00	16,992,124,153.06	90.62	-1,757,875,846.94	-9.38
Jumlah	46,219,610,800.00	53,525,887,144.31	115.81	7,306,276,344.31	15.81

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Dari Tabel 3.7 dapat dilihat bahwa realisasi Retribusi Daerah secara kumulatif dan per tahun rata-rata telah melebihi Anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Anggaran Retribusi Daerah secara kumulatif sebesar Rp. 46,219,610,800.00 dengan realisasi yang melebihi Anggarannya, yakni sebesar Rp. 53,525,887,144.31 atau 115.81%. Dengan kata lain realisasi Retribusi Daerah bertambah Rp. 7,306,276,344.31 (15.81%) dari Anggaran yang telah ditetapkan.

Komponen PAD berikutnya adalah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah. Dari Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2014, Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan secara kumulatif sebesar Rp. 445,647,545,831.00, sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp 440,279,919,619.90 (98.80%). Dengan kata lain realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih rendah Rp 5,367,626,211.10 (1.20%) dari Anggaran yang ditetapkan.

Tabel 3.8.
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	139,301,339,383.00	139,601,792,176.90	100.22	300,452,793.90	0.22
2013	139,600,000,000.00	146,463,619,420.44	104.92	6,863,619,420.44	4.92
2014	166,746,206,448.00	154,214,508,022.56	92.48	-12,531,698,425.44	-7.52
Jumlah	445,647,545,831.00	440,279,919,619.90	98.80	-5,367,626,211.10	-1.20

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Tabel 3.9 menyajikan Anggaran dan realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah bersumber dari: (a) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan; (b) Jasa Giro; (c) Pendapatan Bunga; (d) Tuntutan Ganti Rugi (TGR); (e) Komisi; (f) Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah; (g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; (h) Pendapatan Denda Pajak; (i) Pendapatan Denda Retribusi; (j) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; (k) Pendapatan dari Pengembalian; (l) Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum; (m) Pendapatan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan; (n) Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; dan (o) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Dari Tabel 3.9 dapat dinyatakan bahwa selama Tahun Anggaran 2012-2014, secara kumulatif Anggaran Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar Rp. 806,253,416,818.00, sedangkan realisasinya mencapai Rp. 1,231,215,529,689.37 (152.71%). Dengan demikian realisasi PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp 424,962,112,871.37 (52.71%).

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	191,489,357,287.00	378,316,635,934.11	197.57	186,827,278,647.11	97.57
2013	300,000,000,000.00	471,386,709,661.94	157.13	171,386,709,661.94	57.13
2014	314,764,059,531.00	381,512,184,093.32	121.21	66,748,124,562.32	21.21
Jumlah	806,253,416,818.00	1,231,215,529,689.37	152.71	424,962,112,871.37	52.71

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Sumber pendapatan daerah terbesar bagi penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Riau adalah dari Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara kumulatif, Anggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan selama Tahun Anggaran 2012-2014 sebesar Rp. 11,396,664,963,837.70. Sementara itu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang setiap tahun diterbitkan, akumulasi Dana Perimbangan yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 11,460,833,593,921.00. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Dana Perimbangan sebesar 100.56% dari Anggaran atau bertambah Rp 64,168,630,083.26 (0.56%) dari Anggaran. Secara detail Anggaran dan realisasi Dana Perimbangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014 disajikan pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	3,793,934,763,121.64	3,618,842,730,571.00	95.38	-175,092,032,550.64	-4.62
2013	3,797,458,032,900.00	3,610,182,229,607.00	95.07	-187,275,803,293.00	-4.93
2014	3,805,272,167,816.10	4,231,808,633,743.00	111.21	426,536,465,926.90	11.21
Jumlah	11,396,664,963,837.70	11,460,833,593,921.00	100.56	64,168,630,083.26	0.56

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Komponen Dana Perimbangan terdiri dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, (b) Dana Alokasi Umum dan (c) Dana Alokasi Khusus. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Dana Perimbangan, diikuti oleh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dari Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa secara kumulatif Anggaran penerimaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil

Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak selama Tahun Anggaran 2012-2014 adalah sebesar Rp. 9,214,902,349,837.74, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp. 9,279,070,979,921.00. Dengan demikian realisasinya sebesar 100.70% dari Anggaran yang telah ditetapkan atau bertambah 0.70%.

Tabel 3.11.

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	3,242,263,479,121.64	3,067,171,446,571.00	94.60	-175,092,032,550.64	-5.40
2013	3,032,088,796,900.00	2,844,812,993,607.00	93.82	-187,275,803,293.00	-6.18
2014	2,940,550,073,816.10	3,367,086,539,743.00	114.51	426,536,465,926.90	14.51
Jumlah	9,214,902,349,837.74	9,279,070,979,921.00	100.70	64,168,630,083.26	0.70

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Sementara itu anggaran dan realisasi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dimulaiselamaTahun Anggaran 2012-2014 adalah sama. Untuk Dana Alokasi Umum (Tabel 3.12), secara kumulatif selama Tahun Anggaran 2012-2014 Anggaran dan realisasinya sebesar Rp. 2,036,795,414,000.00. Sementara itu Anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus (Tabel 3.13) secara kumulatif sebesar Rp. 144,967,200,000.00.

Tabel 3.12.

Target dan Realisasi Dana Alokasi Umum Provinsi RiauTahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	489,179,914,000.00	489,179,914,000.00	100.00	0.00	0.00
2013	726,630,916,000.00	726,630,916,000.00	100.00	0.00	0.00
2014	820,984,584,000.00	820,984,584,000.00	100.00	0.00	0.00
Jumlah	2,036,795,414,000.00	2,036,795,414,000.00	100.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Tabel 3.13.

Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	62,491,370,000.00	62,491,370,000.00	100.00	0.00	0.00
2013	38,738,320,000.00	38,738,320,000.00	100.00	0.00	0.00
2014	43,737,510,000.00	43,737,510,000.00	100.00	0.00	0.00
Jumlah	144,967,200,000.00	144,967,200,000.00	100.00	0.00	0.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Selain PAD dan Dana Perimbangan, komponen Pendapatan Daerah juga bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Anggaran Lain-lain Pendapatan yang Sah secara kumulatif tidak dapat dipenuhi. Selama Tahun Anggaran 2012-2014, Lain-lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp. 1,971,337,047,000.00, namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1,931,518,118,838.00. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah hanya sebesar 97,98% atau berkurang 2.02%. Secara rinci Anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012-2014 disajikan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2012-2014

Tahun Anggaran	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi		Bertambah/Berkurang	
		Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
2012	664,273,709,000.00	639,784,644,000.00	96.31	-24,489,065,000.00	-3.69
2013	658,627,308,000.00	636,219,961,838.00	96.60	-22,407,346,162.00	-3.40
2014	648,436,030,000.00	655,513,513,000.00	101.09	7,077,483,000.00	1.09
Jumlah	1,971,337,047,000.00	1,931,518,118,838.00	97.98	-39,818,928,162.00	-2.02

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah

Berdasarkan realisasi pendapatan, pertumbuhan dan kinerja pendapatan tahun 2012–2014 dan perkiraan pendapatan tahun berjalan 2015 maka dilakukan proyeksi tahun 2016–2017 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15. Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2015 dan 2016 dilakukan tidak hanya mengacu kepada pada realisasi pertumbuhan dan kinerja pendapatan periode sebelumnya tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti potensi peningkatan pendapatan dimasa yang akan datang. Hal dilakukan mengingat peningkatan penerimaan yang cukup signifikan pada tahun sebelumnya berasal dari sumber baru yang dulunya belum optimal dikelola seperti pajak daerah khususnya pajak air permukaan atau belum optimal diterima seperti Dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Proyeksi pendapatan Provinsi Riau pada tahun 2016 akan meningkat menjadi Rp 8,802 triliun dan pada tahun 2017 menjadi Rp 11,79 triliun. Proyeksi pendapatan Provinsi dari PAD untuk tahun 2016 sebesar Rp 4,36 triliun yang bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp 3,44 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 42,09 milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 253,09 milyar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp 627,28 milyar.

Tabel 3.15.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Riau Tahun 2012 – 2017

No.	Uraian	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Proyeksi 2017 (Rp)
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,588,688,445,077.20	2,725,623,913,109.06	3,049,490,022,808.24	3,656,360,898,235.16	4,365,391,580,256.22	5,212,757,682,122.73
1.1.	Pajak Daerah	2,058,595,750,963.00	2,110,997,529,618.00	2,496,771,206,539.30	2,924,923,046,636.62	3,442,926,918,195.97	4,052,669,275,408.47
1.2.	Retribusi Daerah	12,174,266,003.19	24,359,496,988.06	16,992,124,153.06	24,369,294,439.74	42,093,210,795.37	50,511,852,954.44
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139,601,792,176.90	146,463,619,420.44	154,214,508,022.56	208,544,824,163.60	253,089,134,358.52	303,706,961,230.22
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	378,316,635,934.11	443,803,267,082.56	381,512,184,093.32	498,523,732,995.20	627,282,316,906.36	805,869,592,529.59
2.	DANA PERIMBANGAN	3,618,842,730,571.00	3,610,182,229,607.00	4,231,808,633,743.00	4,196,336,984,783.74	3,166,553,567,369.91	4,802,720,088,186.41
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,067,171,446,571.00	2,844,812,993,607.00	3,367,086,539,743.00	3,462,914,734,783.00	2,433,130,577,369.91	3,651,774,981,072.00
2.2.	Dana Alokasi Umum	489,179,914,000.00	726,630,916,000.00	820,984,584,000.00	654,220,250,000.00	654,220,250,000.00	1,092,730,481,304.00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	62,491,370,000.00	38,738,320,000.00	43,737,510,000.00	79,202,000,000.74	79,202,740,000.00	58,214,625,810.00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	639,784,644,000.00	658,840,061,838.00	655,513,513,000.00	868,876,400,000.00	1,270,367,198,800.00	1,778,514,078,320.00
3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	639,784,644,000.00	636,219,961,838.00	655,513,513,000.00	868,876,400,000.00	1,270,367,198,800.00	1,778,514,078,320.00
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	0.00	22,620,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	6,847,315,819,648.20	6,994,646,204,554.06	7,936,812,169,551.24	8,721,574,283,018.90	8,802,312,346,426.13	11,793,991,848,629.10

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah, dan hasil proyeksi

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah ini berisikan tentang kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Provinsi Riau berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Pembiayaan Daerah, dan Belanja Daerah.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dasar Hukum Pendapatan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah daerah diuntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

(1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2008 hingga tahun 2014, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Penyempurnaan sistem dan prosedur pungutan melalui peningkatan pelayanan masyarakat (*one day service*).
3. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur pengelola keuangan daerah.
4. Peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta sosialisasi terhadap wajib pajak.
5. Penyempurnaan tarif untuk perhitungan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dari 5% menjadi 10% yang diatur dengan Peraturan Gubernur Nomor 09 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan PBB-KB.
6. Merumuskan dan menyarankan perbaikan formula perhitungan, melalui Pembentukan Tim Verifikasi perhitungan PBB Migas dengan melibatkan instansi pusat seperti Dirjen Pajak, Dirjen Anggaran, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak, Kementerian ESDM, BP-Migas dan Kementerian Dalam Negeri.
7. Penambahan Kantor-kantor Pelayanan seperti di UP Kuantan Singingi Hilir, UP Kuantan Mudik, UP Kandis, UP Pangkalan Kuras, dan UP Ujung Batu dan Penyediaan Pelayanan Samsat Keliling.
8. Melakukan Kajian Potensi Daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
9. Verifikasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor bersama dengan BPKP.
10. Penegakkan Hukum terhadap kendaraan-kendaraan non BM, agar mendaftarkan pajaknya di Provinsi Riau.
11. Meningkatkan SDM aparatur melalui pelatihan-pelatihan, antara lain meningkatkan pengawasan penerimaan pendapatan bekerjasama dengan BPKP; Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Teknis Kesamsatan.
12. Pembentukan Tim Yustisi dalam rangka penagihan pajak daerah yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, Biro Hukum, Inspektorat, Satpol PP serta Dipenda.

(2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi Pendapatan Daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Pengkajian formula DAU yang lebih akomodatif terhadap kondisi dan kepentingan masyarakat Riau sebagai daerah penghasil SDA

2. Pengkajian dan Pengusulan perubahan tarif pajak, retribusi dan penerimaan lainnya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi.
3. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR RI (khususnya yang berasal dari Provinsi Riau) untuk meningkatkan penerimaan dari Dana Perimbangan.
4. Pembentukan Tim Kajian untuk menggali potensi pendapatan daerah dari sub sektor Perkebunan (CPO) bersama dengan Universitas Riau.

Dalam implementasinya, kebijakan Pendapatan Daerah memperlihatkan bahwa pada Tahun Anggaran 2012-2015 rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah sebesar 6.24% per tahun. Pertumbuhan tersebut paling besar didorong oleh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 9.02%, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang syah, masing-masing 3.77% dan 7.95% (lihat Tabel 3.2).

Selanjutnya dilihat dari proporsi realisasi Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Riau dapat dinyatakan bahwa realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2012, 2013 dan 2014 realisasinya lebih besar dari 100% (Tabel 3.4). Hal ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan pencapaian realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2012-2014 lebih besar dari anggaran yang ditetapkan.

Lebih lanjut dari Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa komponen Pendapatan Daerah yang konsisten memberikan proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap anggaran Pendapatan Daerah yang lebih besar dari 100% adalah komponen Pendapatan Asli Daerah. Sementara itu, proporsi realisasi Pendapatan Daerah terhadap anggaran Pendapatan Daerah dari komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang Sah berfluktuatif dan cenderung kurang dari 100%, terutama pada tahun 2012.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka upaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pencapaian realisasi PAD yang lebih besar daripada Dana Perimbangan perlu terus dilakukan. Penerapan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya perlu terus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar mewujudkan kemandirian Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka menyelenggarakan pembangunan daerahnya.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah

senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun 2015 dan 2016. Realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Riau selama periode 2012–2015 ditunjukkan pada Tabel 3.16.

Dari Tabel 3.18 dapat dilihat bahwa selama periode 2012–2015, rata-rata pertumbuhan belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Riau cenderung meningkat, yakni sebesar 7,92% per tahun. Dari komponen belanja tidak langsung, belanja hibah dan belanja bantuan social mengalami penurunan, masing-masing sebesar 7,45% per tahun dan 22.65% per tahun. Sementara itu, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan kabupaten/kota dan pemerintah desa mengalami peningkatan yang besar dengan rata-rata pertumbuhan meningkat sebesar 55.13% per tahun.

Lebih lanjut dapat dinyatakan bahwa pada masa yang akan datang pembangunan Provinsi Riau lebih diarahkan pada upaya meningkatkan pembangunan melalui peningkatan biaya langsung. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 16,37%.

Mengacu pada komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk terus meningkatkan proporsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung sebagai komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk mempercepat akselerasi pembangunan, maka belanja pada tahun 2016 tetap mengedepankan dan berpihak kepada masyarakat dengan memperbesar proporsi belanja langsung. Berdasarkan realisasi belanja tidak langsung dan belanja langsung 2012–2014 dan berbagai pertimbangan lainnya, maka diproyeksi belanja tidak langsung dan belanja langsung untuk periode 2016–2017 dengan memperhatikan dengan seksama proyeksi pendapatan untuk tahun berkenaan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Tabel 3.16.
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tahun 2012 - 2015

No.	Uraian	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,245,053,341,426.54	3,292,872,527,399.60	3,431,395,229,708.02	4,402,191,631,060.90	7.92
1.1.	Belanja Pegawai	790,433,933,049.38	877,503,080,598.60	937,182,709,704.00	1,122,745,692,797.10	9.17
1.2.	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Belanja Subsidi	0.00	4,999,254,000.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Belanja Hibah	1,459,570,748,269.00	1,251,675,819,700.00	751,853,824,924.00	1,070,651,842,000.00	-7.45
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	20,053,500,000.00	20,887,500,000.00	13,015,000,000.00	7,177,300,000.00	-22.65
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	796,726,771,530.66	874,713,339,476.00	1,614,630,538,837.02	1,159,145,278,913.80	9.83
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	178,268,388,577.50	263,093,533,625.00	114,713,156,243.00	1,032,471,517,350.00	55.13
1.8.	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	0.00
2	BELANJA LANGSUNG	3,425,711,795,518.10	4,232,409,978,640.70	2,171,482,592,718.06	6,281,782,651,958.00	16.37
	Jumlah Belanja	6,670,765,136,944.64	7,525,282,506,040.30	5,602,877,822,426.08	10,683,974,283,018.90	12.50

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2011, 2012, dan 2013, diolah
Untuk data tahun 2015 bersumber dari APBD 2015

Tabel 3.17.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Provinsi Riau Tahun 2012 – 2017

No.	Uraian	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Proyeksi 2017 (Rp)
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,245,053,341,426.54	3,292,872,527,399.60	3,431,395,229,708.02	4,402,191,631,060.90	4,247,663,394,294.90	3,899,219,103,329.48
1.1.	Belanja Pegawai	790,433,933,049.38	877,503,080,598.60	937,182,709,704.00	1,122,745,692,797.10	1,186,812,895,940.00	1,240,049,201,912.79
1.2.	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Belanja Subsidi	0.00	4,999,254,000.00	0.00	0.00	0.00	640,565,110,000.00
1.4.	Belanja Hibah	1,459,570,748,269.00	1,251,675,819,700.00	751,853,824,924.00	1,070,651,842,000.00	868,876,400,000.00	879,046,589,209.25
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	20,053,500,000.00	20,887,500,000.00	13,015,000,000.00	7,177,300,000.00	0.00	23,884,039,356.00
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	796,726,771,530.66	874,713,339,476.00	1,614,630,538,837.02	1,159,145,278,913.80	1,320,343,281,089.90	689,274,162,851.44
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	178,268,388,577.50	263,093,533,625.00	114,713,156,243.00	1,032,471,517,350.00	861,130,817,265.00	415,900,000,000.00
1.8.	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
2	BELANJA LANGSUNG	3,425,711,795,518.10	4,232,409,978,640.70	2,171,482,592,718.06	6,281,782,651,958.00	5,458,136,065,346.00	4,726,006,809,328.38
	Jumlah Belanja	6,670,765,136,944.64	7,525,282,506,040.30	5,602,877,822,426.08	10,683,974,283,018.90	9,705,799,459,640.90	8,625,225,912,657.86

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah, dan hasil proyeksi

Pada tahun 2016 dan 2017, belanja pemerintah Provinsi Riau di proyeksi masing-masing sebesar Rp 9,71 triliun dan Rp 8,63 triliun. Rasio belanja langsung untuk kedua tahun proyeksi ini lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Riau yang lebih pro pembangunan. Belanja langsung tahun 2016 merupakan hasil dari kesepakatan Musrenbang yang berasal dari usulan-usulan dari SKPD Pemerintah Provinsi Riau dan dari Kabupaten/Kota yang ada dalam Provinsi Riau. sehingga proyeksi belanja tahun sebelumnya merupakan sinergitas pembangunan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kabupaten/Kota.

Dapat dijelaskan bahwa Belanja Langsung pada Tahun 2017, merupakan prakiraan maju dari kegiatan-kegiatan yang ada pada Tahun 2016 sehingga proyeksi belanja lebih kecil dari tahun 2016. Sedangkan Proyeksi Belanja Langsung pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 adalah sebesar Rp. 8,1 Triliyun dengan total Belanja sebesar Rp. 12,2 Triliyun.

Belanja Pembangunan Daerah diarahkan untuk menjamin terlaksananya 6 (enam) prioritas pembangunan di Provinsi Riau Tahun 2016. Adapun tujuh prioritas yang dimaksud meliputi: (1) penguatan dan pembangunan jaringan infrastruktur, (2) pengembangan budaya, olahraga, seni dan kemasyarakatan, (3) peningkatan sarana prasarana, pemantapan aparatur, dan birokrasi pemerintahan, (4) peningkatan dan pemantapan pembangunan ekonomi berdaya saing, (5) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan (6) peningkatan kesejahteraan rakyat.

Belanja Pemerintah Provinsi memberikan prioritas alokasi kepada program yang secara nyata berkontribusi pada pencapaian 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2016. Keenam prioritas pembangunan untuk menyelesaikan isu strategis maka dianalisis program/kegiatan yang ada di masing-masing SKPD yang dijadikan prioritas dan ditingkatkan anggarannya. Peningkatan anggaran program prioritas yang diikuti dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang baik maka tingkat pencapaian indikator pembangunan pada tahun 2016 akan tercapai.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang

akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal. Realisasi dan proyeksi/target pembiayaan Pemerintah Provinsi Riau selama periode 2012 – 2017 ditunjukkan pada Tabel 3.18.

Dari Tabel 3.20 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2012 sebesar Rp 1,91 triliun yang bersumber dari Silpa dan pencairan dana cadangan. Hal ini tidak terlepas dari persiapan Pemerintah Provinsi Riau menjadi tuan rumah PON XVIII tahun 2012 untuk persiapan infrastruktur PON. Kondisi yang relatif sama terjadi pada penerimaan pembiayaan tahun 2013 yang mencapai Rp 1,98 triliun yang selanjutnya dipergunakan untuk menyelesaikan infrastruktur PON dan sekaligus persiapan menghadapi event ISG tahun 2013.

Pada tahun 2016 dan 2017, diproyeksi Silpa masing-masingnya sebesar Rp 803,65milyar dan Rp 450 milyar. Pada tahun 2016 dan 2017 direncanakan dilakukan berbagai aktivitas yang memerlukan pengeluaran pembiayaan daerah sehingga jumlah pembiayaan netto masing-masingnya sebesar Rp 803,65 milyar dan Rp 200 milyar. Jumlah pembiayaan netto ditambah perkiraan pendapatan tahun berjalan digunakan untuk belanja daerah.

3.2.3. Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Tabel 3.15, Tabel 3.17, dan Tabel 3.18, rekapitulasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Riau Periode 2012-2017 disajikan pada Tabel 3.19.

Tabel 3.18.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Provinsi Riau 2012 - 2017

No.	Uraian	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Proyeksi 2017 (Rp)
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,906,680,479,264.55	1,978,312,714,768.11	2,337,347,378,280.16	3,800,000,000,000.00	903,487,113,214.77	450,000,000,000.00
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,338,164,111,478.55	1,977,900,614,768.11	2,333,934,347,125.16	3,800,000,000,000.00	903,487,113,214.77	450,000,000,000.00
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	567,514,164,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	824,092,609.00	412,100,000.00	3,413,031,155.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.	Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran	178,110,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	105,429,892,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000,000.00
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000,000.00
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	105,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000,000.00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	429,892,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pembiayaan Netto	1,801,250,586,379.55	1,978,312,714,768.11	2,337,347,378,280.16	3,800,000,000,000.00	903,487,113,214.77	200,000,000,000.00

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau 2012, 2013, dan 2014, diolah, dan hasil proyeksi

Tabel 3.19.
Rekapitulasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Provinsi Riau Periode 2012-2017

No.	Uraian	Realisasi 2012 (Rp)	Realisasi 2013 (Rp)	Realisasi 2014 (Rp)	Perkiraan Tahun Berjalan 2015 (Rp)	Proyeksi 2016 (Rp)	Proyeksi 2017 (Rp)
A.	PENDAPATAN DAERAH	6,847,315,819,648.20	6,994,646,204,554.06	7,936,812,169,551.24	8,721,574,283,018.90	8,802,312,346,426.13	11,793,991,848,629.10
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2,588,688,445,077.20	2,725,623,913,109.06	3,049,490,022,808.24	3,656,360,898,235.16	4,365,391,580,256.22	5,212,757,682,122.73
1.1.	Pajak Daerah	2,058,595,750,963.00	2,110,997,529,618.00	2,496,771,206,539.30	2,924,923,046,636.62	3,442,926,918,195.97	4,052,669,275,408.47
1.2.	Retribusi Daerah	12,174,266,003.19	24,359,496,988.06	16,992,124,153.06	24,369,294,439.74	42,093,210,795.37	50,511,852,954.44
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	139,601,792,176.90	146,463,619,420.44	154,214,508,022.56	208,544,824,163.60	253,089,134,358.52	303,706,961,230.22
1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	378,316,635,934.11	443,803,267,082.56	381,512,184,093.32	498,523,732,995.20	627,282,316,906.36	805,869,592,529.59
2	DANA PERIMBANGAN	3,618,842,730,571.00	3,610,182,229,607.00	4,231,808,633,743.00	4,196,336,984,783.74	3,166,553,567,369.91	4,802,720,088,186.41
2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	3,067,171,446,571.00	2,844,812,993,607.00	3,367,086,539,743.00	3,462,914,734,783.00	2,433,130,577,369.91	3,651,774,981,072.41
2.2.	Dana Alokasi Umum	489,179,914,000.00	726,630,916,000.00	820,984,584,000.00	654,220,250,000.00	654,220,250,000.00	1,092,730,481,304.00
2.3.	Dana Alokasi Khusus	62,491,370,000.00	38,738,320,000.00	43,737,510,000.00	79,202,000,000.74	79,202,740,000.00	58,214,625,810.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	639,784,644,000.00	658,840,061,838.00	655,513,513,000.00	868,876,400,000.00	1,270,367,198,800.00	1,778,514,078,320.00
3.1.	Pendapatan Hibah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.	Dana Darurat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	639,784,644,000.00	636,219,961,838.00	655,513,513,000.00	868,876,400,000.00	1,270,367,198,800.00	1,778,514,078,320.00
3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah	0.00	22,620,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B.	BELANJA DAERAH	6,670,765,136,944.64	7,525,282,506,040.30	5,602,877,822,426.08	10,683,974,283,018.90	9,705,799,459,640.90	8,625,225,912,657.86
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,245,053,341,426.54	3,292,872,527,399.60	3,431,395,229,708.02	4,402,191,631,060.90	4,247,663,394,294.90	3,899,219,103,329.48
1.1.	Belanja Pegawai	790,433,933,049.38	877,503,080,598.60	937,182,709,704.00	1,122,745,692,797.10	1,186,812,895,940.00	1,240,049,201,912.79
1.2.	Belanja Bunga	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Belanja Subsidi	0.00	4,999,254,000.00	0.00	0.00	0.00	640,565,110,000.00
1.4.	Belanja Hibah	1,459,570,748,269.00	1,251,675,819,700.00	751,853,824,924.00	1,070,651,842,000.00	868,876,400,000.00	879,046,589,209.25
1.5.	Belanja Bantuan Sosial	20,053,500,000.00	20,887,500,000.00	13,015,000,000.00	7,177,300,000.00	0.00	23,884,039,356.00
No.	Uraian	Realisasi 2012	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Perkiraan Tahun Berjalan	Proyeksi 2016	Proyeksi 2017

		(Rp)	(Rp)	(Rp)	2015 (Rp)	(Rp)	(Rp)
1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	796,726,771,530.66	874,713,339,476.00	1,614,630,538,837.02	1,159,145,278,913.80	1,320,343,281,089.90	689,274,162,851.44
1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	178,268,388,577.50	263,093,533,625.00	114,713,156,243.00	1,032,471,517,350.00	861,130,817,265.00	415,900,000,000.00
1.8.	Belanja Tidak Terduga	0.00	0.00	0.00	10,000,000,000.00	10,500,000,000.00	10,500,000,000.00
2	BELANJA LANGSUNG	3,425,711,795,518.10	4,232,409,978,640.70	2,171,482,592,718.06	6,281,782,651,958.00	5,458,136,065,346.00	4,726,006,809,328.38
C.	PEMBIAYAAN DAERAH						
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	1,906,680,479,264.55	1,978,312,714,768.11	2,337,347,378,280.16	3,800,000,000,000.00	903,487,113,214.77	450,000,000,000.00
1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1,338,164,111,478.55	1,977,900,614,768.11	2,333,934,347,125.16	3,800,000,000,000.00	903,487,113,214.77	450,000,000,000.00
1.2.	Pencairan Dana Cadangan	567,514,164,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	824,092,609.00	412,100,000.00	3,413,031,155.00	0.00	0.00	0.00
1.6.	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.	Penerimaan Atas Kelebihan Pembayaran	178,110,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	105,429,892,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000,000,000.00
2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000,000.00
2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	105,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000,000.00
2.3.	Pembayaran Pokok Utang	429,892,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.	Pembayaran Kekurangan Belanja Bagi Hasil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.	Piutang Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.	Pembiayaan Netto	1,801,250,586,379.55	1,978,312,714,768.11	2,337,347,378,280.16	3,800,000,000,000.00	903,487,113,214.77	200,000,000,000.00

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Riau berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi Riau tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD 2014-2019, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain: (1) Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap MDGs, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja; (2) Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD; (3) Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan (4) Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

Arahan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan bahwa isu-isu strategis bidang pembangunan nasional yang harus diselaraskan dalam penyusunan RKPD 2016 adalah:

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, sehubungan dengan sistem jaminan sosial nasional, penurunan angka kematian ibu dan bayi, pengendalian jumlah penduduk, sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan, dan optimalisasi anggaran pendidikan.
- (2) Bidang Pembangunan Ekonomi, sehubungan dengan transformasi struktur industri dan peningkatan daya saing tenaga kerja.

- (3) Bidang Pembangunan Sarana Prasarana, sehubungan dengan penguatan konektivitas nasional melalui keseimbangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan transportasi massal perkotaan, ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar.
- (4) Bidang Pembangunan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup, sehubungan dengan perkuatan ketahanan pangan, peningkatan ketahanan energi, percepatan pembangunan kelautan, peningkatan keekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup.
- (5) Bidang Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehubungan dengan perkuatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Bidang Pembangunan Politik, sehubungan dengan konsolidasi demokrasi.
- (7) Bidang Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, sehubungan dengan percepatan pembangunan Minimum Essential Force (MEF) dengan pemberdayaan industri pertahanan dan peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri.
- (8) Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur, sehubungan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi
- (9) Bidang Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang, sehubungan dengan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan, pengelolaan risiko bencana, dan sinergi pembangunan perdesaan.

Mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014, arah kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut:

- (1) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- (2) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- (3) Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
- (4) Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik
- (5) Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- (6) Pembinaan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (7) Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah
- (8) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (9) Pengembangan Wilayah
- (10) Pengembangan Ekonomi Daerah

- (11) Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
- (12) Penataan Perkotaan
- (13) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- (14) Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
- (15) Pendidikan dan Pelatihan
- (16) Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- (17) Pelaksanaan Otonomi Khusus
- (18) Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- (19) Penanganan Bencana
- (20) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
- (21) Pengelolaan Perbatasan Antar Negara
- (22) Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
- (23) Pembangunan Gedung Negara

Prioritas SPM dalam RKPD Provinsi tahun 2016 pada 13 bidang sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan

- a) Pemetaan sekolah terkait lokasi, kondisi ruang kelas, persebaran penduduk;
- b) Pemetaan kondisi dan pemenuhn kebutuhan ruangan, laboratorium, alat peraga;
- c) Pemetaan jumlah dan kompetensi guru dan ka sekolah, pelatihan, sertifikasi;
- d) Pendataan dan penyediaan kebutuhan buku bagi peserta didik dan guru;
- e) Pemantapan kurikulum 2013 melalui kegiatan pelatihn, pembinaan, pendmpingn, monev;
- f) Penerapn prinsip Manajemen Berbasis sekolah (MBS).

(2) Bidang Kesehatan

- a) Meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak keluarga miskin usia 6-24 bulan;
- b) Peran posyandu dalam melakukan screening gizi keluarga miskin untuk meningkatkan cakupan perawatan atas balita gizi buruk;
- c) Kunjungan Puskesmas ke SD dan setingkat;
- d) Promosi keikutsertaan Keluarga Berencana (KB) mandiri;

- e) Penemuan kasus penyakit secara aktif pada masyarakat;
- f) Pelayanan kesehatan dasar;
- g) Pelayanan kesehatan rujukan;
- h) Peninjauan pada instalasi gawat darurat;
- i) Pembinaan terhadap puskesmas dalam penanganan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam akibat Kejadian Luar Biasa (KLB);
- j) Pembinaan desa siaga aktif.

(3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Bidang Sumber Daya Air diprioritaskan pada tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.
- b) Bidang Bina Marga diprioritaskan pada tersedianya jalan yang menjamin aksesibilitas, konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, dan keselamatan pengguna; Ketersediaan alat pengukur Naasra/Romdas/Roughometer beserta SDM yang dapat melakukan survei kondisi jalan; dan Pemeliharaan rutin dan berkala untuk mencapai dan mempertahankan kondisi jalan “baik” dan “sedang” berdasarkan nilai International Roughness Index (IRI).
- c) Bidang Badan Pembinaan Konstruksi diprioritaskan pada tersedianya data-data terkait 3 jenis layanan informasi jasa konstruksi dari instansi-instansi terkait; tersedianya SDM yang dapat menggunakan aplikasi SIPJAKI. Penataan Ruang yaitu ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) dan pelayanan izin pemanfaatan ruang serta pelayanan pengaduan pelanggaran tata ruang.

(4) Bidang Perumahan Rakyat

- a) Sosialisasi dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat melalui pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan untuk ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau;
- b) Pemutakhiran data secara berkala dari kabupaten/kota terkait bangunan rumah, harga rumah, penghasilan rumah tangga dan kondisi PSU lingkungan perumahan; dan
- c) Pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan bidang

perumahan rakyat kepada Menteri, untuk substansi ketersediaan rumah layak huni, potensi keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menghuni rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung PSU.

(5) Bidang Perhubungan

- a) Terpenuhi standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek AKDB (Antar Kota Dalam Provinsi).
- b) Terpenuhi standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- c) Terpenuhi standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 Gross Tonnage (GT) dan kapal yang beroperasi pada lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
- d) Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelalaian kendaraan pada perusahaan angkutan umum, pengelola terminal, dan pengelola perlengkapan jalan.

(6) Bidang Lingkungan Hidup

- a) Pelayanan informasi status mutu air;
- b) Pelayanan informasi status mutu udara ambien;
- c) Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- d) Tersedianya sarana pendukung (laboratorium dan pos pengaduan) di provinsi;
- e) Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup;
- f) Terlatihnya sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup;
- g) Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup; dan
- h) Terlaksananya kerjasama antar daerah dalam penerapan dan pencapaian SPM khususnya pembangunan dan/atau pemanfaatan laboratorium lingkungan.

(7) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Penyediaan cakupan bidang Layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mencapai target SPM 100%;
- b) Penyusunan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan provinsi yang terintegrasi dengan rencana penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan Kab/Kota;
- c) Penyediaan sarana pendukung (dari 5 layanan SPM) di Provinsi;
- d) Pembinaan penerapan dan pencapaian SPM bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan daerah kab/kota diwilayahnya.

(8) Bidang Keluarga Berencana

- a) Sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui perencanaan pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan, kependudukan dan analisa dampak kependudukan;
- b) Pengembangan peta Pasangan Usia Subur (PUS) dan pendataan keluarga di desa;
- c) Penyediaan dukungan operasional lini lapangan bagi Kelompok Kegiatan (POKTAN), Petugas Pembantu Lapangan Keluarga Berencana (PPLB)/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) minimal 12 kali dalam setahun;
- d) Rapat koordinasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ditingkat desa dan kecamatan; dan
- e) Penyediaan dukungan operasional dan sumber daya manusia untuk Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) ditingkat kecamatan.

(9) Bidang Sosial

- a) Pelayanan sosial dasar bagi PMKS melalui rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlindungan dan jaminan sosial;
- b) Peningkatan sarana dan prasarana panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat diklat, pusat kesos, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial;
- c) Kesejahteraan sosial bagi korban bencana melalui pelayanan sosial dasar yang meliputi pendidikan untuk masyarakat di drh bencana dengan taruna siaga bencana,

- d) penyiapan kampung siaga bencana,
- (10) Penanaman Modal
 - a) Sosialisasi Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM Bidang Penanaman Modal;
 - b) Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi SPM Bidang Penanaman Modal.
- (11) Pemerintahan Dalam Negeri
 - a) Kependudukan
 - (i) Sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - (ii) Sosialisasi dan bimbingan teknis oleh penyelenggaraan pelayanan penerbitan KTP Elektronik;
 - (iii) Menyebarkan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kelahiran; dan
 - (iv) Menyebarkan informasi publik tentang pentingnya kepemilikan akta kematian.
 - b) Ketertiban Umum, Ketertiban Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat
 - (i) Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial, maupun penindakan yustisial;
 - (ii) Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
 - (iii) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
 - (iv) Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, melalui
 - (v) Menyusun data profil kebakaran pada wilayah permukiman, gedung layanan publik, pabrik/industri, hutan, lahan dan bahan berbahaya dan beracun;
 - (vi) Menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Pembentukan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);

- (vii) Melakukan kerjasama antara kabupaten dan kota untuk pengurangan resiko kebakaran dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini BPBD Provinsi, serta nota kerjasama dengan pelaku usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta kesatuan masyarakat adat;
- (viii) Menyusun kriteria kondisi mendesak kejadian kebakaran pada Peraturan Daerah tentang APBD yang dapat memenuhi kriteria belanja tidak terduga dan penggunaan dana lain yang tersedia dalam APBD; dan
- (ix) Penataan kelembagaan dan fungsi pemadam kebakaran Peningkatan dan pengembangan kapasitas Institusi Pemadam Kebakaran untuk mendukung desentralisasi dan Otonomi Daerah.

(12) Bidang Komunikasi dan Informatika

- a) Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- b) Penyusunan Peraturan Gub/Bup mengenai SOP untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL);
- c) Perizinan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi; dan
- d) Peningkatan dan pengembangan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di kabupaten/kota.

(13) Bidang Ketahanan Pangan

- a) Menjamin Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan terkait dengan penyediaan lumbung pangan;
- b) Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; dan
- c) Menjaga stabilisasi harga, distribusi dan keamanan pangan

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012–2025. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 wajib dirumuskan kegiatan untuk: (1) pengawasan pelaksanaan perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); (2) pelaksanaan strategi komunikasi pendidikan dan budaya anti korupsi; dan (3) Pengawasan penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut.

Untuk penanganan gangguan keamanan dalam negeri mengacu pada INPRES Nomor 2 tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial di Masyarakat. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) penuntasan penanganan gangguan keamanan akibat konflik sosial dan terorisme yang terjadi di beberapa daerah; (2) perbaikan sistem penanganan gangguan keamanan agar lebih responsif dan dapat diandalkan; (3) pengidentifikasian potensi konflik dan menemukan solusi penyelesaian agar tidak berkembang menjadi gangguan keamanan; dan (4) peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam hal pembinaan kesatuan bangsa dan politik, dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Ormas sesuai dengan UU 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; (2) penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila secara rutin kepada Unsur Parpol, Ormas, lembaga nirlaba, dan lembaga pendidikan; dan (3) peningkatan dan Penguatan Kapasitas anggota dan kelembagaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menag dan Mendagri No 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mendukung pelaksanaan UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan kependudukan dan catatan sipil wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) sosialisasi kebijakan tentang perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan; (2) penyesuaian Perda terkait dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan; (3) pencetakan, penerbitan dan pendistribusian dokumen kependudukan; dan (4) penyusunan profil perkembangan kependudukan dengan memanfaatkan database kependudukan sesuai dengan UU 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pembinaan perencanaan pembangunan daerah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya; (2) *updating* data dan informasi yang akurat, yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional; (3) pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran; (4) pengendalian dan evaluasi perencanaan dan penganggaran perencanaan pembangunan kabupaten/kota (bagi provinsi); dan (5) evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 dan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (bagi provinsi); dan (6) penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD/Perubahan RKPD 2016) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD dan Renja/Perubahan Renja SKPD 2015) tepat waktu sesuai dengan ketentuan UU 32/2004, PP 8/2008, dan Permendagri 54/2010, dalam rangka: (a) monitoring penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah provinsi dan dokumen rencana SKPD provinsi serta dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota (bagi provinsi). Peraturan Menteri ini. Dilaporkan kepada Menteri paling lambat bulan Oktober 2015; dan (b) monitoring penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah kabupaten/kota dan dokumen rencana SKPD kabupaten/kota (bagi kabupaten/kota). Selanjutnya (7) peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan (8) menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengawasan perencanaan pembangunan daerah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil RKPD Tahun 2016 dan DPA-SKPD beserta perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; (2) Pengawasan perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi hasil RKPD dan Renja SKPD Tahun 2015 mencakup: (a) RKPD, Renja SKPD, dan DPA SKPD provinsi beserta perubahannya dan RKPD kabupaten/kota, dan (b) RKPD, Renja SKPD dan DPA SKPD kab/kota beserta perubahannya. Selanjutnya (3) penyusunan laporan hasil pengawasan.

Sehubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) peningkatan kemampuan aparat pemerintahan kabupaten/kota antisipasi UU tentang desa yang efektif paling lambat tahun 2016; (2) peningkatan kemampuan kelembagaan pemerintahan desa; (3) mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di perdesaan; (4) merumuskan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan; (5) dukungan dana urusan bersama untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP); (6) penyelesaian penyusunan profil desa dan kelurahan, serta penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan; (7) pengembangan adat istiadat dan budaya masyarakat desa; dan (8) pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengembangan wilayah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) pelaksanaan Permendagri 30/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya di Wilayah Laut; (2) kerjasama antardaerah/wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil khususnya pengelolaan Selat Karimata, Teluk Bone dan Teluk Tomini; (3) pelaksanaan Permendagri 29/2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Daerah; (4) pelaksanaan Permendagri 72/2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; (5) pengelolaan dan perlindungan wilayah konservasi di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil pada area segitiga terumbu karang dan (*Coral Triangle Initiative*) dan pembangunan kelautan dalam menghadapi dampak perubahan iklim; (6) pelaksanaan Permendagri 63/2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah; (7) pelaksanaan Instruksi Presiden 15/2011 tentang Perlindungan Nelayan, dan Tindak Lanjut Pengelolaan Penyu dan Habitatnya; dan (8) penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya di wilayah

laut yaitu Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengembangan ekonomi daerah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) penyusunan kebijakan pengelolaan pemberdayaan pasar tradisional sesuai Permendagri nomor 20 tahun 2012; (2) pengembangan potensi ekonomi daerah melalui produk unggulan daerah dan pemetaan potensi daerah; (3) promosi dan pemasaran produk khas daerah, unggulan daerah dan peluang jenis-jenis investasi daerah; (4) koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah untuk menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah; (5) peningkatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif di daerah melalui pemberian kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan pada lembaga PTSP di daerah; (6) pengembangan kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED); (7) insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal sesuai dengan Permendagri 64/2012; (8) peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sertifikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM), antara lain melalui Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD); dan (9) pengembangan kerjasama ekonomi daerah melalui pola kemitraan.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) pengelolaan lingkungan yang terstruktur dan komprehensif sesuai dengan UU 32/ 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup; (2) pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pencegahan pemberian ijin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan yang telah ditetapkan dalam RTRW; (3) pengembangan potensi ekowisata daerah dalam rangka peningkatan daya saing daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Permendagri 33/2009; (4) pelaksanaan KLHS berpedoman pada Permendagri 67/2012 tentang Pedoman KLHS; (5) pengembangan dan pelestarian flora dan fauna identitas daerah sesuai Kemendagri 522.53-958/2010 tentang Penetapan Flora dan Fauna Identitas Daerah Provinsi; (6) pengembangan dan perlindungan hutan mangrove sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional (SNPEM); (7) INPRES 10/2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru

dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; dan (8) peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan penataan perkotaan wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dengan berpedoman pada Perpres 125/2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Permendagri 41/2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; (2) pengelolaan sampah dengan berpedoman pada Permendagri 33/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; (3) penyediaan dan pengelolaan RTH secara optimal di kawasan perkotaan sesuai dengan SE Mendagri Nomor 650/4371/SJ tentang Cara Perhitungan Luasan RTH Kawasan Perkotaan; (4) pembangunan perkotaan dengan SPP sesuai dengan Permendagri 57/2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan; (5) pelaksanaan Permendagri 9/2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah; (6) percepatan pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan SE Mendagri 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah; (7) peningkatan pengawasan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan; dan (8) pelaksanaan Permendagri Nomor 69/2007 tentang Kerjasama Pembangunan Perkotaan dan mengakomodasi program/kegiatan kerjasama pembangunan perkotaan dalam dokumen perencanaan daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengelolaan keuangan daerah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sesuai PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; (2) peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dalam upaya memperoleh opini WTP; (3) penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual melalui penataan kelembagaan, serta penyesuaian dan penerbitan regulasi tentang kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah sesuai dengan Permendagri 64/2013 tentang Penerapan SAP; (4) upaya peningkatan PAD sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (5) pengelolaan barang

milik daerah ditekankan pada upaya-upaya terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah agar menjadi bagian dalam mewujudkan opini WTP dari BPK; dan (6) dukungan kegiatan-kegiatan kajian ilmiah terkait kebijakan investasi pemerintah daerah permanen dan non permanen sesuai dengan PP 1/2008 tentang Investasi Pemerintah dan Permendagri 52/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan mengacu pada Permendagri 20/2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda, dan Peraturan Bersama MenRistek dan Mendagri 03/2012 dan No 36/2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) melalui penyusunan *Road Map* SIDa dan panduan teknis operasional kegiatan penguatan SIDa; (2) peningkatan jumlah dan kompetensi peneliti pada Badan Litbang provinsi dan kabupaten/kota; dan (3) penelitian pengkajian terhadap implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah.

Dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara pemerintah daerah yang berbasis kompetensi secara terarah, berdasarkan UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Permendagri 2/2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Diklat Berbasis Kompetensi, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pendidikan dan pelatihan wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) penyelenggaraan diklat berbasis kompetensi; (2) pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi bagi aparatur Pemda; (3) pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah (LSP-Pemda) cabang Provinsi; dan (4) koordinasi dan integrasi seluruh kegiatan diklat di pusat dan daerah bagi kepala daerah, DPRD, dan PNS, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, politik dan penerapan SPM di daerah.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) evaluasi mandiri terhadap LPPD kabupaten/kota sebelum Tim Nasional melakukan validasi; (2) pembinaan kepada kabupaten/kota terkait dgn pelaporan (memerankan fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah); (3) pemeliharaan dokumen

pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD; (4) pemetaan kapasitas daerah dalam segi kebijakan, kelembagaan sumber daya manusia dan penyusunan rencana tindak hasil pemetaannya; (5) penyusunan rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dan rencana capaian SPM untuk 5 tahun mendatang; (6) Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan penerapan SPM terhadap PEMDA kabupaten/kota; (7) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi, dan menyusun serta menyampaikan laporan umum dan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Teknis terkait; (8) penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan PEMDA dan rencana pencapaian SPM diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; (9) Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah melakukan pembinaan terhadap PEMDA kabupaten/kota; dan (10) PEMDA dalam pelaksanaan urusan wajib dan pilihan berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan Menteri dan Pimpinan LPNK dan menjadikannya sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah.

Selanjutnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan peningkatan penyelenggaraan otonomi daerah wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) evaluasi mandiri terhadap LPPD Kabupaten/Kota; (2) Pembinaan kepada Kabupaten/Kota terkait dengan pelaporan; (3) pemeliharaan dokumen pendukung/dokumen capaian kinerja SKPD; (4) pemetaan kapasitas daerah dan penyusunan rencana tindak lanjut; (5) penyusunan rencana pencapaian SPM; (6) melakukan pembinaan penerapan SPM terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (oleh Gubernur); (7) monitoring, evaluasi, dan menyusun serta menyampaikan laporan umum dan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM; (8) penyusunan perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintah daerah dan rencana pencapaian SPM diintegrasikan perencanaan; dan (9) pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (oleh Gubernur).

Dalam hal pelaksanaan otonomi khusus, Otonomi Khusus Aceh diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan sebagaimana diamanatkan suai UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat diprioritaskan pada bidang program dan kegiatan sesuai dengan UU 35 Tahun 2008

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 . Dan Otonomi Khusus Daerah Istimewa Yogyakarta diprioritaskan pada optimalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogya.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) menciptakan payung kebijakan daerah dengan mengangkat identitas kelokalan dan perlindungan melalui system Hak Kekayaan Intektual (HKI); (2) penyusunan kebijakan penetapan identitas daerah dan perlindungan melalui sistem HKI; (3) penyediaan sarana dan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) bagi insan/pekerja/pelaku kreatif; dan (4) penyediaan fasilitas tempat/ruang/zona untuk promosi/pameran karya-karya kreatif.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan penanganan bencana wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) antisipasi prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, terdiri dari kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan resiko bencana, pencegahan bencana, pepaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis resiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; (2) penanggulangan bencana dalam tahapan saat tanggap darurat, mencakup kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan (3) penanggulangan pascabencana, mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan umum wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) pengembangan kerjasama antar daerah dan pengembangan kerjasama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan PP 50/2007 dan Permendagri 22/2009 dan Permendagri 23/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah; (2) penguatan penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah sesuai PP 19/2010 jo PP 23/2011; dan (3) penegakan Perda dalam menyelenggarakan Trantibum dan Tranmas sesuai PP 6/2010 tentang SatPol PP; (4) PATEN sesuai UU 32/2004, PP 38/2007, PP 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan; dan (5) pencegahan dan penanggulangan bencana

kebakaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 dan Permendagri 16/2009.

Dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pengelolaan perbatasan antar negara Pemerintah Daerah Provinsi wajib merumuskan kegiatan untuk: (1) dukungan pembangunan lokasi prioritas perbatasan; (2) Percepatan penyusunan rencana tata ruang kawasan perbatasan; (3) penyusunan kebijakan pemerintahan fokus pada pembangunan infrastruktur ekonomi; (4) koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan; dan (5) kerjasama pembangunan kawasan perbatasan.

Selanjutnya dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 sehubungan dengan pembangunan gedung negara wajib memperhatikan: (1) pembangunan bangunan gedung negara harus dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, hemat, tidak berlebihan, dan ramah lingkungan; dan (2) persyaratan administratif, persyaratan teknis, klasifikasi, standar luas, standar jumlah lantai, penyusunan rencana kebutuhan, rencana pendanaan supaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam penetapan arah pembangunan daerah hendaknya selaras dengan arah pembangunan nasional. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan nasional memiliki *link and match* dengan pembangunan daerah. Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2016 disamping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2014-2019, juga mengacu pada tema RKP Nasional 2016.

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Selanjutnya dengan memperhatikan kebutuhan akan perkuatan ekonomi dan penggenapan capaian sasaran pembangunan Nasional pada tahun 2016, maka ditetapkan tema RKP 2016, yakni: **“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas”**. Beberapa Pertimbangan Penetapan Tema dan Sasaran RKP Tahun 2016 : (1) melanjutkan reformasi pembangunan yang telah berjalan; (2) meningkatkan daya saing nasional, terutama menghadapi MEA, dan sebagainya; dan (3) memantapkan pembangunan secara menyeluruh, dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif, pembangunan berbasis SDA, SMD yang berkualitas, dan IPTEK

Dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2016, dan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, RKPD Provinsi Riau Tahun 2016 telah mengakomodir skala prioritas yaitu :

- a. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotism dan cinta tanah air serta semangat bela negara.
- b. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah bagi petani untuk hidup layak dan sejahtera.

- c. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antarwilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah.
- d. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik dibidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi.
- e. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Selain mengacu kepada kebijakan Nasional RKPD Tahun 2016 juga harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, dengan Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 adalah: **“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”**.

Visi RPJMD Provinsi Riau 2009-2013 adalah: **“Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang mapan dan Pengembangan Budaya Melayu secara Proporsional melalui Kesiapan Infrastruktur dan Peningkatan Pembangunan Pendidikan dalam Masyarakat yang Agamis”**. Sementara itu Visi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019 adalah: **“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur”**.

Mengacu pada Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi RPJMD Provinsi Riau 2014-2019, maka tema pembangunan Provinsi Riau 2014 adalah: **“Pemantapan Ekonomi dan Budaya melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Aparatur, serta Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan”**.

Visi ini memiliki misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 berikut ini :

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau:

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau 2014-2019:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur”

Tabel 4.1. Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur	1.	Membuka isolasi daerah terisolir	1.	Terbukanya aksesibilitas masyarakat di daerah terisolir
		2.	Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman perdesaan dan perkotaan	1.	Meningkatnya kualitas lingkungan pemukiman perdesaan dan perkotaan
		3.	Memperlancar arus barang dan jasa	1.	Lancarnya arus barang dan jasa
		4.	Meningkatkan infrastruktur sumber daya air	1.	Meningkatnya infrastruktur sumber daya air
2.	Meningkatkan Pelayanan Pendidikan	1.	Meningkatkan mutu dan akses pendidikan disemua jenjang	1.	Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah
				2.	Meningkatnya angka melek huruf
3.	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	1.	Mewujudkan keluarga sejahtera	1.	Terkendalnya angka kelahiran
		2.	Meningkatkan angka harapan hidup	2.	Meningkatnya angka harapan hidup
4.	Menurunkan Kemiskinan	1.	Menurunkan jumlah penduduk miskin	1.	Menurunnya jumlah penduduk miskin
		2.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin	1.	Menurunnya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan
				2.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

No	Visi/Misi		Tujuan		Sasaran
5.	Mewujudkan Pemerintahan Yang Terpercaya (Handal)	1.	Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah	1.	Membaiknya kinerja pengelolaan keuangan
				2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat
				3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
				4.	Terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan
				5.	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang hand
6.	Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa serta Pemantapan Stabilitas Politik	1.	Mewujudkan Masyarakat Yang Berbudaya, Beriman dan Bertaqwa	1.	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya
				2.	Terwujudnya kerukunan antar umat beragama
		2.	Mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban	1.	Menurunnya frekuensi konflik di masyarakat
7.	Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan	1.	Mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang	1.	Terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang
		2.	Meningkatkan nilai tambah produksi pertanian dan perkebunan	1.	Meningkatnya jumlah industri olahan produk pertanian dan Perkebunan
		3.	Meningkatkan kesejahteraan petani	1.	Meningkatnya Nilai tukar Petani
8.	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata	1.	Mewujudkan lingkungan hidup berkualitas	1.	Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas
		2.	Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan	2.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing
9.	Meningkatkan Penyediaan Listrik dan Air Bersih	1.	Meningkatkan aksesibilitas energi listrik bagi masyarakat	1.	Meningkatnya aksesibilitas energi listrik bagi rumah tangga
				2.	Meningkatnya produksi energi listrik lokal Provinsi Riau
10.	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan	1.	Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan	1.	Meningkatnya nilai investasi Swasta
				2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
				3.	Mengurangi tingkat pengangguran

4.2. Prioritas dan Pembangunan

Mengacu pada tema pembangunan Provinsi Riau 2016 sebagaimana telah diungkapkan di atas, maka dirumuskan tujuh prioritas pembangunan Provinsi Riau 2014. Adapun tujuh prioritas yang dimaksud meliputi: (1) Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur, (2) Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan, (3) Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan, (4) Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing, (5) Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia, dan (6) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Hubungan antara Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD) dan Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) disajikan pada Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
1.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
3.	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
4.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
5.	Program Pengendalian Banjir	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
6.	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
7.	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
8.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
9.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
10.	Program Reformasi Birokrasi	Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
11.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
12.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Kumkm	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
13.	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
14.	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
15.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan

No.	Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)	Prioritas Pembangunan daerah (RKPD)
		Ekonomi Berdaya Saing
16.	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
17.	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
18.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
19.	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
20.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
21.	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
22.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
23.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
24.	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
25.	Program Pembiayaan Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
26.	Program Pengembangan dan Pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
27.	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
28.	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
29.	Program Pembangunan Sekolah Terpadu	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
30.	Program Pendidikan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
31.	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
32.	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
33.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
34.	Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
35.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
36.	Program Pengembangan Perumahan Perdesaan	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
37.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Penjelasan tentang Program Pembangunan Daerah yang memuat tentang prioritas pembangunan, program pembangunan, kinerja dan SKPD pelaksana disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3. Penjelasan Program Pembangunan Daerah

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	URUSAN WAJIB				
	PENDIDIKAN				
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Sarana dan Prasarana aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standart kerja	20 persen	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	15 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat	7 persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	10 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	06	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan APK PAUD dan pemenuhan layanan PAUD bagi Anak Usia Dini serta peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik PAUD	62,88 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	07	Program Pendidikan Menengah	Peningkatan APK dan APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	APK = 91,35 Persen dan APM = 68,34 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	08	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase Sekolah Yang melaksanakan program MBS dengan baik SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK Persentase Sekolah yang Terakreditasi TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK	30 persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
			Terpenuhinya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi	104.31 persen	
	09	Program Pendidikan Tinggi	Peningkatan APK Pendidikan Tinggi (PT)	40 persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	10	Program Pendidikan Dasar	Terjaminnya Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan Dasar Bermutu dan Berkesetaraan	112,67 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	11	Program Pembangunan Sekolah Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Sekolah Terpadu	1 Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	12	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	APK SD/MI/SDLB/Paket A , APM SD/MI/SDLB/Paket A , APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B, APM SMP/MTs/SMPLB/PaketB, APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C, APM SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	116.86 % , 98.78 % , 107.25% , 97.2% , 90.46% , 72.3%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	13	Program Pendidikan Non Formal dan Informal	1. Angka melek huruf 2. Persentase Lembaga Kursus yang terakreditasi"	1. 98,45 persen 2. 41,17 persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		KESEHATAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi Baik	48 Persen	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Dan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai standar kerja	20 Persen	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/ sanksi	15 Persen	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber daya aparatur Yang meningkat	7 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem laporan capaian dan Keuangan yang Meningkat	10 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
	06	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase peningkatan program obat, kosmetik, alkes, makanan minuman, obat tradisional	70 Persen	Dinas Kesehatan
	07	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit Baik Pemerintah Maupun Swasta	75 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
	08	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Rumah Tangga dan Menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat	40 Persen	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan
	09	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk balita	1.40 Persen	Dinas Kesehatan
	10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase penduduk yang memanfaatkan air minum berkualitas	70 Persen	Dinas Kesehatan
	11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Angka kesakitan penyakit menular, diantaranya DBD, malaria dan HIV/AIDS pada kelompok resiko tinggi.	IR DBD : >37 per 100.000 penduduk. Malaria : 0.175 per 1000 penduduk. HIV dan AIDS : 1 dari penduduk beresiko tinggi	Dinas Kesehatan
	12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Sarana Kesehatan Terhadap Tenaga Medis/ para Medis yang terintegrasi dan terakreditasi	70 Persen	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi
	13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Pelayanan Terhadap Pasien Keluarga Miskin yang Datang Ke Rumah Sakit pada setiap Unit	100 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
			Pelayanan		
	14	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan dengan kelengkapan alat kesehatan yang memadai dengan jumlah penduduk(per 100.000 penduduk	75 Persen	Dinas Kesehatan
	15	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase ketersediaan Jenis Pelayanan	75 Persen	Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
	16	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat, Rujukan yang dipelihara	80 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan
	17	Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Memberikan Pelayanan Kegawat daruratan yang Bersertifikat	90 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan
	18	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Angka Kematian ibu Melahirkan (Per 100.000 KH), bayi dan anak (per 1000 KH)	AKI : 110 per 100.000 KH / AKB : 23 per 1000 KH / AKABA : 27 per 1000 KH	Dinas Kesehatan
	19	Program Pelayanan Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan logistik kesehatan	94 Persen	Dinas Kesehatan
	20	Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Persentase deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (PTM)	55 Persen	Dinas Kesehatan
	21	Program pengembangan dan pendayagunaan Sumberdaya Kesehatan	Rasio tenaga medis dan paramedis per 100.000 pddk	10.5/100.000 pddk	Dinas Kesehatan
	22	Program Manajemen Dan Informasi Kesehatan	Persentase perencanaan kesehatan dengan sistem informasi kesehatan	70 Persen	Dinas Kesehatan
	23	Program Diklat Dan Penelitian Kesehatan	Peningkatan motivasi kerja, pengetahuan, keterampilan serta pengembangan diri	90 persen	Dinas Kesehatan
	24	Program Penanggulangan Krisis Kesehatan	Perentase krisis kesehatan termasuk KLB	100 Persen	Dinas Kesehatan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
			yang di tangani < 24 Jam		
	25	Program Pelayanan Laboratorium Klinis dan lingkungan	Persentase pemeriksaan laboratorium klinis dan lingkungan yang dilayani telah terakreditasi (ISO)	Lab Klinis 40% lab lingkungan 60%	Dinas Kesehatan
	26	Program Pembiayaan Kesehatan	Persentase masyarakat miskin dan tidak mampu yang sakit mendapat pelayanan kesehatan.	65 Persen	Dinas Kesehatan
	27	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RS	Persentase Meningkatnya Pelayanan Kesehatan pada BLUD Rumah Sakit sesuai Standar Pelayanan Minimal	90 Persen	Rumah Sakit Jiwa Tampan, Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad
		PEKERJAAN UMUM			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan rutin kantor dinas Bina Marga Prov.Riau	1 Dinas	Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dinas	Dinas Bina Marga
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian PDH Bagi PNS Bina Marga	1 Dinas	Dinas Bina Marga
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Bina Marga	1 Dinas	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi yang Akuntabel	1 Laporan	Dinas Bina Marga
	06	Program Peningkatan Fasilitas Fungsi Ke-PU-AN	Meningkatnya akutabilitas Ke-PU-an	1 Dinas	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	07	Program Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan dan pedesaan	2 kegiatan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	08	Program Pengujian Material/Bahan Konstruksi	Peningkatan Pengendalian Kualitas Kontruksi dan Peningkatan Kemampuan Personel UPT pengujian	1 Laporan	Dinas Bina Marga
Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	09	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan sehingga fungsional melayani arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa	153,2420 Km	Dinas Bina Marga

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	10	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terwujudnya pemeliharaan jalan dan jembatan sehingga tetap fungsional melayani arus lalu lintas penumpang, barang dan jasa.	2,623.63 km	Dinas Bina Marga
	11	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Terbangunnya jaringan jalan dan jembatan menuju daerah terisolir dan kawasan strategis	1 Laporan	Dinas Bina Marga
			Mengoptimalkan fungsi perencanaan jalan dan jembatan	1 Laporan	
	12	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Terpeliharanya Jaringan irigasi dan meningkatnya Potensi Daerah Irigasi Sebagai Lahan Pertanian dan Perkebunan Dalam Rangka Menunjang Swasembada Pangan Melalui Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	30 – 60 persen	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	13	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Terwujudnya Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	30 persen	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	14	Program Pengendalian Banjir	Terwujudnya Optimalisasi Pengendalian dan Pembinaan Terhadap Kegiatan Sungai, Pantai dan Danau Sumber Daya Air	60 persen	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	15	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terwujudnya Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3 wilayah	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	16	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Jumlah Desa/Kel yang mendapatkan pembangunan jalan dalam desa	1637 desa/ kelurahan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	17	Program Penyediaan Air Minum Mendukung Penyehatan PDAM	Peningkatan ketersediaan air bersih	12 kab/kota	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	18	Program Pengembangan/Peningkatan Laboratorium Pengujian	Meningkatkan Kemampuan UPT Pengujian berupa kegiatan-kegiatan yang berorientasi penelitian teknis, advis teknis untuk menunjang pembangunan di daerah	1 UPT	
	19	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	Tersedianya dan terkelolaanya air minum di pedesaan dan perkotaan	12 kab/kota	
		PERUMAHAN			
Peningkatan		Program Lingkungan Sehat Perumahan	Terlaksananya Survey dan Perencanaan	12 kab/kota	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
Kesejahteraan Rakyat			Program Bidang Permukiman dan Perumahan Provinsi Riau		Daya Air, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Jumlah Desa/Kel yang mendapatkan pembangunan resetlemen desa	6 desa di 6 Kab/Kota	
			Jumlah masyarakat lokasi Resetlemen yang mendapatkan pelatihan	175 orang	
		Program Pengembangan Perumahan Perdesaan	Jumlah RSLH yang dibangun untuk masyarakat miskin	6.311 rumah	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
		Program Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembangunan drainase	12 kab/kota	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
		PENATAAN RUANG			
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	01	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Meningkatkan Penataan Bangunan dan Lingkungan	12 kab/kota	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
	02	Program Penataan Ruang	Meningkatnya sarana dan prasarana ruang terbuka hijau dan tersusunnya rencana RDTL	10 kawasan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Sumber Daya Air
		PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya kelancaran dalam proses administrasi perkantoran	12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai	12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kinerja pegawai Bappeda Prov. Riau	12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Pegawai	12 bulan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang Meningkat	10 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	06	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan Provinsi Riau.	1 Dokumen	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
	07	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan PNPM Provinsi Riau	1 Dokumen	

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	08	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	84 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	09	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan daerah	100 persen	Biro Administrasi Pembangunan
	10	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan ekonomi	100 persen	
	11	Program Perencanaan Sosial Budaya	Terselenggaranya kegiatan perencanaan sosial budaya	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	12	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Terselenggaranya kegiatan perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam	100 persen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	13	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	14	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen	2 dokumen	Badan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	15	Program Kerjasama Pembangunan	Tersedianya Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Provinsi Riau	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		PERHUBUNGAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	Dinas Perhubungan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	100 persen	Dinas Perhubungan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	100 persen	Dinas Perhubungan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat	100 persen	Dinas Perhubungan
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Presentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	100 persen	Dinas Perhubungan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Keuangan			
Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	06	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya dokumen pengendalian prasarana dan fasilitas fisik perhubungan	100 persen	Dinas Perhubungan
	07	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya prosentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang berkondisi baik	100 persen	Dinas Perhubungan
	08	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum	Meningkatnya pelayanan angkutan umum	100 persen	Dinas Perhubungan
	09	Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan (simpul)	100 persen	Dinas Perhubungan
	10	Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas	Tersedianya rambu dan marka jalan	100 persen	Dinas Perhubungan
	11	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas	100 persen	Dinas Perhubungan
	12	Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi	Terpenuhinya jumlah simpul pelayanan perhubungan yang difasilitasi dan dibina (simpul)	100 persen	Dinas Perhubungan
		LINGKUNGAN HIDUP			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Badan Lingkungan Hidup
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah paket pekerjaan perbaikan gedung kantor BLH	1 paket	Badan Lingkungan Hidup
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah pakaian dinas harian pegawai dalam menunjang pelaksanaan tugas	96 stel	Badan Lingkungan Hidup
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur di Bidang Lingkungan Hidup	18 org	Badan Lingkungan Hidup
			Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis Bidang Lingkungan Hidup	98 orang	
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Dokumen Renja SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Badan Lingkungan Hidup
Peningkatan dan Pemantapan	06	Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Ibukota Kab/Kota yang Meningkatkan Kebersihan dan Keteduhannya	12 kab/kota	Badan Lingkungan Hidup

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	07	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan tutupan mangrove	7 lokasi 7 kab/kota	Badan Lingkungan Hidup
			Jumlah individu/kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan kearifan lokal	3 individu/kelompok masyarakat dan 105 orang	
			Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan kehati yang disusun	1 Dokumen	
			Jumlah lokasi bekas tambang yang direklamasi	3 lokasi	
			Jumlah Kab/Kota yang ditingkatkan kinerja dan kersamanya dalam pengembangan pesisir dan laut	8 Kab/Kota	
	08	Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat yang diberikan sosialisasi Program 3R	8 kelompok 5 kab/kota	Badan Lingkungan Hidup
	09	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah anggota masyarakat yang ikut dalam gerakan Desa Bebas Asap	11 kab/kota	Badan Lingkungan Hidup
		KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Tenaga Penataan Administrasi Kependudukan	100 Orang	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	02	Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/Petugas sebagai administrator ADMINDUK	96 Orang	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	03	Peningkatan Pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelola/Petugas sebagai administrator ADMINDUK	96 Orang	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	48 Persen	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 Persen	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunya Persentase Aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapatkan teguran / sanksi	15 Persen	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Meningkat	7 Persen	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Laporan Capaian dan Keuangan Yang Meningkat	10 Persen	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan	06	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan	Jumlah Kebijakan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak	1 Pergub, 2 Kab/Kota & 100 Org	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	07	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak	Tersedianya Kelembagaan PUG dan Anak Se-Provinsi Riau	38 SKPD 775 Org	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	08	Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Jumlah Perempuan dan Anak yang terlindungi	100 Kasus & 275 Org	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	09	Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan yang meningkat Produktifitas Ekonominya	155 Org & 120 Klpk	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	10	Program Peningkatan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana	10 persen	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
		KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA			
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	01	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Partisipasi Program Keluarga Berencana, Rasio KB Aktif Per Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	3870 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	02	Program Pembinaan Peran Serta	Meningkatnya Pelayanan Akseptor KB baru	230 Orang	Badan Pemberdayaan Perempuan,

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri	Khususnya MKJP (Mteode Kontrasepsi Jangka Panjang)		Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
	03	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Tersedianya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa	40 Org & 23 PIK	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
		SOSIAL			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Ketersediaan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 Persen	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 Persen	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 Persen	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 Persen	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	06	Program Penelitian, Pendidikan dan Latihan	Persentase Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana	50 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	07	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya kualitas hidup Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil PMKS lainnya (KK) Pembinaan Pendamping, Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (orang) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (unit)	649/2628/2	Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	08	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial (orang)	1991 orang	Dinas Sosial
	09	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas kelembagaan kesejahteraan sosial (orang)	1.470 Orang	Dinas Sosial
	10	Program Bantuan dan Jaminan Sosial Serta Perlindungan Sosial	Terselenggarakannya bantuan dan jaminan sosial serta perlindungan sosial (orang)	2640 orang	Dinas Sosial
	11	Program Pelayanan Sosial Melalui Panti	Meningkatnya Pelayanan Sosial di Panti	225 Orang	Dinas Sosial
	12	Program Pendidikan dan Pelatihan Sosial	Tersedianya Sumber daya Manusia	120 Orang	Dinas Sosial

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
			Kesejahteraan Sosial terlatih (orang)		
	13	Program Rehab dan Rekonstruksi Dampak Bencana Alam	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	14	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Penanggulangan Bencana	100 persen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		KETENAGAKERJAAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	48 persen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan Sarana dan Prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya Persentase Aparatur dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan yang mendapat Teguran/Sanksi	15 persen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Meningkat	7 persen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang Meningkat	10 persen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	06	Program Pembinaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dibina	12 kab/kota	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	07	Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Berkualitas	2196 Orang	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	08	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,35 persen	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	09	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Lembaga Ketenagakerjaan yang diawasi dan dilindungi	100 Perusahaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	48 persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan Sarana dan Prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya Persentase Aparatur dalam Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan yang mendapat Teguran/Sanksi	15 persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang Meningkat	7 persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang Meningkat	10 persen	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	06	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM	208 orang	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	07	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan/pengembangan Jumlah KUKM/LKM yang	152 KUKM/LKM	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	08	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	12 kab/kota	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	09	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM	Masyarakat lokal mendapat pelatihan teknis dibidang dalam rangka pengembangan kewirausahaan	12 kab/kota	Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		PENANAMAN MODAL			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terciptanya layanan administrasi yang baik	12 bulan	Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Pelayanan Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah	12 bulan	Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Kedisiplinan Pegawai BP2T Provinsi Riau	12 bulan	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas dan terdidik sesuai dengan peraturan yang berlaku	12 bulan	Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya capaian kinerja SKPD melalui pelaporan yang baik	12 bulan	Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	06	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan Prinsip Pelayanan Prima	12 Kab/Kota	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	07	Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Tersedianya Data Laporan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan	12 Kab/Kota	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
	08	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Tersedianya Penyusunan Data base Potensi dan Peluang Investasi Kab/Kota se Provinsi Riau	1 paket	Badan Penanaman Modal Dan Promosi Daerah
KEBUDAYAAN					
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan	01	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah jenis budaya yang dipergelarkan	29 orang, 31 kali	Badan Penghubung, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	02	Program Pelestarian Budaya	Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal	70 persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang di dukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja	20 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya Persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	15 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat	7 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	10 Persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Keuangan			
	06	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase pemuda yang mengikuti sosialisasi menjadi kader penyuluh penyalahgunaan narkoba dan penularan HIV/AIDS	80 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan	07	Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Keserasian kebijakan kepemudaan tingkat provinsi dengan kabupaten dan kota	100 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	08	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang menjadi Pelopor dan penggerak pembangunan yang berkarakter mandiri dan berwawasan kebangsaan	210 orang	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	09	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Pemuda yang dibina berhasil menjadi wirausaha	75 Persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	10	Program Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga	Persentase atlit baik junior maupun senior dibina menjadi atlit berprestasi dan berperanserta dalam kegiatan olahraga	80 persen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	11	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang dikelola dan dipelihara	23 unit	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	12	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aktifitas Kepemudaan	Jumlah sarana prasarana kepemudaan yang dikelola dan dipelihara	2 unit	Dinas Pemuda Dan Olahraga
		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja	20 persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat Disiplin aparatur yang menggunakan pakain dinas	20 persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	persentase sumber daya aparatur yang meningkat	20 persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	10 persen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	06	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan pengamanan dan kenyamanan lingkungan	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	07	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (jumlah patroli wilayah terhadap rawan gangguan sebanyak 48 kali dan jumlah gangguan trantibum yang ditanggapi oleh tim reaksi cepat satpol pp sebanyak 24 kali dalam 1 tahun)	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	08	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat/generasi muda yang memahami tentang nilai-nilai ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	200 org	Sekretariat Korpri
	09	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah masyarakat / generasi muda yang memahami tentang nilai-nilai ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	N/A	Satuan Polisi Pamong Praja
	10	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan	Meningkatnya peran masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	374 orang	Satuan Polisi Pamong Praja
	11	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya jumlah pelaksanaan operasi pemberantasan penyakit masyarakat di provinsi riau	10 kali	Satuan Polisi Pamong Praja
	12	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penegak Hukum	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya penegak hukum	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	13	Program Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah generasi muda, masyarakat dan forum yang memperoleh fasiltasi bina ideologi dan wawasan kebangsaan	450 orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja
	14	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Berkurangnya potensi konflik dan aksi unjuk rasa dikalangan masyarakat	140 potensi konflik, 180 aksi	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	15	Program Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki hak pilih dalam memperoleh informasi penyelenggara pemilu dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilih, pilkada Provinsi dan kabupaten kota	75 % pilkada Kab/kota	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	16	Program Pembinaan dan Pengembangan	jumlah fasilitasi forum ketahanan ekonomi	2 forum 12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Ketahanan Ekonomi	dalam cakupan pemantaun ketersediaan kebutuhan sembako di daerah.	kab/kota	
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	17	Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terantisipasi Resiko Korban Akibat Kejadian Bencana (%)	60 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
		OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Biro Umum, Sekretariat Dprd, Inspektorat, Badan Penghubung, Sekretariat Korpri, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Dinas Pendapatan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Sekretariat Dprd, Badan Penghubung, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Pendapatan, Biro Umum, Inspektorat
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunya Persentase aparatur dalam proses penegakan Disiplin Aparatur dan yang mendapat teguran /sanksi	15 persen	Sekretariat Dprd, Badan Penghubung, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Dinas Pendapatan, Biro Umum, Inspektorat
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Meningkat	7 persen	Biro Umum, Sekretariat Dprd, Inspektorat, Badan Penghubung, Sekretariat Korpri, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Pendapatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang meningkat	10 Persen	Biro Umum, Sekretariat Dprd, Inspektorat, Badan Penghubung, Sekretariat Korpri, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Dinas Pendapatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	06	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah penyelesaian produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD bersama Pemerintah	25 Perda	Sekretariat Dprd, Biro Administrasi Pemerintahan Umum

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
			Daerah		
	07	Program Peningkatan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persentase rapat dan pertemuan yang dihadiri oleh KDH dan WKDH	100 persen	Biro Umum,Biro Administrasi Pemerintahan Umum, Badan Penghubung
	08	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas anggaran daerah	100 persen	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Dinas Pendapatan, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	09	Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kab/Kota (% jumlah kab/kota yang memperoleh opini WTP)	90 persen	
	10	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	20 persen	Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
	11	Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Persentase peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan aparaturnya pengawasan	20 persen	Inspektorat
	12	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Persentase ketersediaan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	20 persen	Inspektorat
	13	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase kesediaan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	20 persen	Inspektorat, Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
	14	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	100 persen	Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	15	Program Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Aparatur Sipil Negara yang mengikuti pendidikan kedinasan	401 Orang	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase Sumberdaya Aparatur yang meningkat	7 persen	Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,
	17	Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur Tentang Aturan Pemerintah	20 persen	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	18	Program Penelitian dan Pengembangan	Jumlah rekomendasi yang dapat disampaikan ke Pemerintah Provinsi Riau	18 Rekomendasi	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	19	Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (PSiDa)	Jumlah peningkatan kerjasama dibanding angka sebelumnya	4 rekomendasi	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	20	Program Pemantauan dan Evaluasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil penelitian dan pengembangan	12 bulan	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	21	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan kualitas kelembagaan	88 persen	Biro Administrasi Pembangunan
	22	Program Penataan Kelembagaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Anjab se Provinsi Riau	100 persen	Biro Organisasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	23	Program Penataan tatalaksana	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP)	60 Persen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Biro Organisasi
	24	Program Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pengembangan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan pemerintah provinsi	100 persen	Biro Organisasi
	25	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Otonomi Daerah	Jumlah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 Kab/Kota	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
	26	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Umum serta Toponimi	Tersusunnya Grand Design Penataan Pemekaran, Pembakuan Nama Rupa Bumi dan Pelayanan Umum Pemerintahan	Grand Design Kec. 4 Kab/Kota, Rupa Bumi 4 Kab/Kota, Pelayanan Umum Pemerintahan 12 Kab/Kota	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
	27	Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	20 persen	Inspektorat

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	28	Program Peningkatan Pendidikan dan Keagamaan	Meningkatnya Pendidikan dan Keagamaan di Lingkungan Masyarakat Provinsi Riau	2 Kebijakan, 3050 Orang, 12 kali, 2 Kegiatan	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	29	Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah	Terbentuknya sistem informasi dan pengembangan hasil Kelitbangan dan Potensi Keunggulan Daerah	6 rekomendasi	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	30	Program Pelayanan Administrasi Aparatur Sipil Negara	Terlaksananya Penyelesaian Pelayanan Administrasi	84 persen	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	31	Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur	Terciptanya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi kebutuhan dasar	85 persen	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
	32	Program Peningkatan Sumberdaya Pengelolaan Bank Data	Tersedia dan meningkatnya sumber daya pengelolaan bank data	7 orang	Badan Penelitian Dan Pengembangan
	33	Program Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah	Persentase Sosialisasi dan Penegakan Peraturan Daerah (6 perda dan 24 kali/tahun)	100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja
	34	Program Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) se Provinsi Riau	90 persen	Biro Organisasi
	35	Program Fasilitas Peningkatan Pelayanan Badan Penghubung	Jumlah Masyarakat/Mahasiswa Riau yang difasilitasi dalam satu tahun anggaran	2280 Orang, 23 Kali	Badan Penghubung
	36	Program Peningkatan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pemahaman Aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	88 persen	Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	37	Program Pengembangan Soliditas dan Solidaritas Anggota KORPRI	Terwujudnya Pembinaan Organisasi KORPRI diseluruh Kabupaten Kota Se-Provinsi Riau	12 kab/kota	Sekretariat Korpri
	38	Program Pengembangan Dunia Usaha dan Kerjasama KORPRI	Meningkatnya jumlah usaha-usaha bisnis yang dikelola KORPRI atau Lembaga lain dibawah KORPRI	225 orang	Sekretariat Korpri
	39	Program Pembinaan Jasmani dan Rohani anggota KORPRI	Terwujudnya peningkatan kesehatan jasmani dan rohani anggota KORPRI melalui lembaga di bawah KORPRI Provinsi Riau	60 orang dan 1 cabor	Sekretariat Korpri
	40	Program Penataan Sistem dan Pengembangan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum	Meningkatnya jumlah PNS yang mengikuti Pelatihan Advokat	700 orang	Sekretariat Korpri

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	41	Program Fasilitasi Administrasi Pertanahan dan Wilayah Administrasi	Persentase Terfasilitasinya Aspek Pertanahan Dan Wilayah Administrasi	80 persen	Biro Administrasi Pemerintahan Umum
Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan	42	Program Bantuan Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan Pembinaan Umat Beragama	Jumlah Penerima Manfaat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama (Orang)	1425 orang	Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	43	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Persentase Penguatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah	20 persen	Badan Penghubung, Biro Administrasi Perekonomian Dan Sumber Daya Alam, Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia
		KETAHANAN PANGAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentasi ketersediaan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen	Badan Ketahanan Pangan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100 persen	Badan Ketahanan Pangan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur Provinsi Riau	100 persen	Badan Ketahanan Pangan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100 persen	Badan Ketahanan Pangan
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Penyelesaian sistem pelaporan Kinerja keuangan	100 persen	Badan Ketahanan Pangan
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	06	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skor PPH	94,9	Badan Ketahanan Pangan
	07	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	95 persen	Badan Ketahanan Pangan
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana & Prasarana Aparatur (%)	12 Bulan	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	90 orang	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Sistem Pelaporan (%)	100 persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	06	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Hasil Program	100 persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	07	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Tingkat Kapasitas dan Peran Lembaga kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat.	3 persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	08	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Kemandirian Lembaga Ekonomi Desa	3 persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	09	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Rasio tingkat swadaya masyarakat dalam pembangunan Desa	3 persen	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dan Pembangunan Desa
	10	STATISTIK			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	11	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Jumlah dokumen	1 dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		KEARSIPAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatkan jumlah institusi (Pemerintah dan Swasta) dalam pelaksanaan administrasi kearsipan.	50 Berkas, 6 Spesifikasi, 3 unit, 3 SKPD, 0 Kategori, 0 Kab/Kota	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	02	Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Meningkatkan jumlah koleksi arsip di lembaga kearsipan.	0 Sistem, 12 Kab/Kota, 0 Berkas, 2x Kegiatan, 0 Tokoh, 3 SKPD, 2 Jenis	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
	03	Program Pemeliharaan Rutin Sarana Dan Prasarana Kearsipan	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan.	1x Kegiatan, 2 Jenis	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
	04	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan	0 Gedung , 90 Orang, 2x Kegiatan, 4 Pedoman, 3 SKPD, 0 Set/Unit	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yg didukung dg Sarana dan Prasarana Kerja yg sesuai dg Standar Kerja	100 Persen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya Persentase Aparatur dlm Proses Penegakan Disiplin Aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	100 Persen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat	7 persen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang Meningkat	100 Persen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika
	06	Program Pengembangan Komunikasi,	Persentase Layanan Pengembangan	100 Persen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Informasi Dan Media Massa	Komunikasi dan Informasi		Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika, Badan Penghubung
	07	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi	Jumlah masyarakat dan aparatur yang memahami komunikasi dan informasi	47566 orang	Dinas Komunikasi Dan Informatika, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, Dinas Komunikasi Dan Informatika
	08	Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa	Publikasi pembangunan daerah	100 persen	Biro Hubungan Masyarakat
	09	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	Jumlah aplikasi yang dikembangkan/ Jumlah aplikasi yang terintegrasi	30 aplikasi/ 20 aplikasi	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	10	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah ketersediaan layanan informasi dan komunikasi publik yang dapat diakses secara mudah dan cepat	50 layanan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	11	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Persentase jasa titipan dan provider yang mematuhi peraturan	50 persen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
	12	Program Peningkatan Ketatalaksanaan	Jumlah Layanan Kinerja yang dapat disosialisasikan	12 Kab/Kota	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	13	Program Peningkatan Sistem Monitoring dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi yang Tersedia	12 Dokumen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	14	Program Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Kerjasama yang dapat dikembangkan Stakeholder terkait	100 Persen	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
	15	Program Penataan Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	Jumlah Kelompok Masyarakat dan Lembaga Penyiaran yang terlibat	12 Kab./Kota	Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	16	Program Pengembangan Infrastruktur Komunikasi dan Informatika	Jumlah Desa/ SKPD Pemprov Riau yang terkoneksi jaringan komunikasi dan informatika	38 Desa / 54 SKPD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
		PERPUSTAKAAN			
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	01	Program Pengembangan Perpustakaan	Meningkatnya Pengembangan Pelayanan, Pelestarian Fisik dan Pemanfaatan TIK Menuju Perpustakaan Bernuansa Melayu	286.508 Pengunjung	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
	02	Program Pembinaan Perpustakaan	Terlaksananya pembinaan perpustakaan dalam bentuk bimbingan pemakai, layanan perpustakaan keliling, koordinasi dan kerjasama antar perpustakaan dan gerakan	0 Orang , 20 Pos,) Keg, 0 Status Organisasi,	Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
			minta baca masyarakat dengan target peningkatan perpustakaan yang terakreditasi dan standar operasional prosedur serta kerjasama dengan lembaga pengembangan perpustakaan	0 GPMB, 0 Penelitian, 0 Perpustakaan, 0 SOP	
		URUSAN PILIHAN			
		PERTANIAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunya Persentase aparatur dalam proses penegakan Disiplin Aparatur dan yang mendapat teguran /sanksi	15 persen	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Pertanian Dan Peternakan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur Yang Meningkat	7 persen	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Sistem Laporan Capaian dan Keuangan yang meningkat	10 Persen	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Dinas Perkebunan
	06	Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan Lapangan	Terwujudnya pemberian akses informasi dan inovasi penyuluh sehingga mampu beradaptasi dengan lingkungan wilayah kerjanya, komunikatif, mampu mengemban tugas secara seimbang, berorientasi global dalam mengelola sumberdaya lokal mengembangkan kompetensi pelaku usaha sesuai dengan perkembangan tuntutan lingkungan.	1452 orang	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	07	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani	117	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	08	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit usaha)	44 unit usaha	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
	09	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase penerapan teknologi pertanian	61,5 persen	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan
	10	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan utama	Karet 351.983 ton, Kelapa sawit 7.377.237 ton, kelapa 475.068 ton	Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian Dan Peternakan,
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	11	Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Penurunan Kasus Rabies (30% per tahun) (kasus)	0.89 persen	Dinas Pertanian Dan Peternakan
	12	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Daging	6.89 persen	Dinas Pertanian Dan Peternakan
	13	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap penyediaan PAH ASUH	9 persen	Dinas Pertanian Dan Peternakan
		KEHUTANAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Dinas Kehutanan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur Sipil Negara yang didukung dengan sarana prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Dinas Kehutanan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	15 persen	Dinas Kehutanan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang meningkat	15 persen	Dinas Kehutanan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase sistem capaian dan keuangan yang meningkat	10 persen	Dinas Kehutanan
Peningkatan dan Pemanapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	06	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan produksi (unit)	2 unit	Dinas Kehutanan
	07	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	Meningkatnya pemulihan kerusakan hutan dan lahan, melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (ha)	600 Ha	Dinas Kehutanan
	08	Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Tertanganinya tindak pidana perusakan kawasan hutan (kasus)	7 kasus	Dinas Kehutanan
	09	Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Meningkatnya pembinaan dan penertiban industri hasil hutan (unit)	4 unit	Dinas Kehutanan
	10	Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	1	Dinas Kehutanan
	11	Program Pemanfaatan Kawasan Baton Industri	Meningkatnya tanggungjawab sosial perusahaan pemegang izin (unit)	68 unit	Dinas Kehutanan
	12	Program Perencanaan dan Pengembangan Baton	Tersusunnya skenario pengelolaan kawasan hutan (judul)	1 judul	Dinas Kehutanan
		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemanapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlasananya administrasi Surat Menyurat	1 tahun anggaran	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Gedung Kantor ESDM	1 paket peralatan kantor ESDM	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah kegiatan yang mendukung terciptanya kedisiplinan aparatur	1 laporan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Meningkatnya Kompetensi Pegawai Dinas	7 orang	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Daya Aparatur	ESDM		
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Jumlah Dokumen yang digunakan dalam mendukung pembangunan sektor ESDM	3 dokumen	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha Tambang Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan di Provinsi Riau	9 kab/kota	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	07	Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terlaksananya pengawasan K2 pada Perusahaan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan	20 Perusahaan	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	08	Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Konservasi Energi	Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Penerapan Kebijakan Konservasi dan Audit Energi di 12 kab/kota se-Provinsi Riau	12 kab/kota	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	09	Program Pembinaan dan Pengawasan Geologi dan Migas	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Alokasi dan Distribusi LPG di Provinsi Riau	12 kab/kota	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	10	Program Pengelolaan dan Fasilitas Mineral, Batubara dan Energi	Terpeliharanya peralatan Eksplorasi Dinas ESDM	1 unit peralatan eksplorasi	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
		PARIWISATA			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	15 persen	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang meningkat	7 persen	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	10 persen	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	06	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara	54.388 Orang	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	07	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang dikembangkan	16 Destinasi	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	08	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	25 paket	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	09	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan IPTEK	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis media, disain dan IPTEK	10 Paket	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	10	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Pariwisata	Jumlah Desa Wisata yang dibina	32 Desa	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	11	Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah tenaga SDM profesi pariwisata yang disertifikasi	200 Orang	Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		KELAUTAN DAN PERIKANAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Administrasi Surat menyurat dan Dokumen Terlaksana Dengan Baik	12 bulan	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Rumah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	1 Unit Rumah Dinas	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Disiplin Pegawai	165 org	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang Terlatih	20 orang	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Laporan Realisasi Capaian Kinerja SKPD	6 Laporan	Dinas Perikanan Dan Kelautan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	06	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Meningkatnya Luas Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan	34 Hektar	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	07	Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Meningkatnya Kesadaran dan Penegakan Hukum	16 Persen	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	08	Program Pengembangan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	154.290,60	Dinas Perikanan Dan Kelautan

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
		Perikanan		Ton	
	09	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Hasil Tangkapan Perairan Laut	136.106 Ton	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	10	Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Meningkatnya Konsumsi Ikan	42 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	11	Peningkatan kapasitas dan operasional LPPMHP Prov Riau	Meningkatnya Konsumsi Ikan	42 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	12	Program Pengembangan Konservasi Sumberdaya Perikanan Kelautan	Meningkatnya Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola secara berkelanjutan	Bertambahnya luasan ekosistem pesisir yang dipulihkan	Dinas Perikanan Dan Kelautan
	13	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perikanan dan Kelautan	Meningkatnya Kualitas SDM bidang Perikanan dan Kelautan	Pembangunan Perikanan dan Kelautan	Dinas Perikanan Dan Kelautan
		PERDAGANGAN			
Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	48 persen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Aparatur sipil negara yang didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang sesuai dengan standar kerja (%)	20 persen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	menurunnya persentase aparatur dalam proses penegakan disiplin aparatur dan yang mendapat teguran/sanksi	15 persen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang Terlatih	7 persen	

Prioritas Pembangunan	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pembangunan		Kinerja		SKPD Penanggungjawab
			Indikator	Target	
	05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase sistem laporan capaian dan keuangan yang meningkat	10 persen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	06	Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Sinkronisasi program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen se Provinsi Riau	12 Kab/Kota	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	07	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Terciptanya Kerjasama Perdagangan Internasional (MOU)	1 MoU	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	08	Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya Nilai dan Komoditas Ekspor (Juta US\$)	23379 Juta US\$	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	09	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Stabilitas Harga bahan pokok (laju Inflasi %)	6.34 persen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		PERINDUSTRIAN			
Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	01	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	Meningkatnya kemampuan teknologi tepat guna/alsintan (PU)	290 Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	02	Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Meningkatnya Pertumbuhan IKM, Produktifitas dan Jumlah Produk IKM yang mampu bersaing	400 IKM	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	03	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatnya Jumlah Wirausaha Baru (Unit Usaha)	40 Unit Usaha	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	04	Program Pengembangan Agro dan Industri Unggulan Berbasis Teknologi	Meningkatnya Industri Agro dan Industri Unggulan	100 persen	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		TRANSMIGRASI			
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	01	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah Pemukiman Transmigrasi yang Terbangun	80 Unit	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan
	02	Program Transmigrasi Lokal	Jumlah Kepala Keluarga yang Berdayakan dalam Kelompok Ekonomi Masyarakat	758 KK	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan